Buku I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024
DI TAMBOLAKA

DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DI KUPANG

Nomor : 72.A/LHP/XIX.KUP/05/2025
Tanggal : 23 Mei 2025

Buku I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024
DI TAMBOLAKA

DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI

BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DI KUPANG

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

TAHUN 2024

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 terdiri dari dua laporan yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

   Laporan ini memuat:

   a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;

   b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan

   c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

   Laporan ini memuat:

   a. Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

   b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

   c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 3

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024 6

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 8

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 12

III. NERACA 13

IV. LAPORAN OPERASIONAL 16

V. LAPORAN ARUS KAS 20

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 23

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 24

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian

intern Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 72.B/LHP/XIX.KUP/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Kupang, 23 Mei 2025
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Triyantoro S.E., M.M., CSFA

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 yang didasarkan pada kriteria:

a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

b. Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP;

c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang memiliki 43 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang terdiri dari:

a. Neraca per 31 Desember 2024;

b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

c. Laporan Operasional (LO);

d. Laporan Arus Kas (LAK);

e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2024;

b. Kewajaran panyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;

c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;

d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;

e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;

f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan

g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern. Pemanfaatan hasil pemeriksaan sebelumnya baik interim, kinerja maupun dengan tujuan tertentu (DTT) digunakan untuk melihat dampak hasil pemeriksaan tersebut terhadap kewajaran laporan keuangan yang akan diperiksa dan kaitannya dengan penentuan kecukupan cakupan pemeriksaan LKPD.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak

yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 60 hari, terdiri dari pemeriksaan interim mulai tanggal 16 Februari s.d. 22 Maret 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 41/ST/XIX.KUP/02/2025 tanggal 12 Februari 2025 dan pemeriksaan terinci mulai tanggal 16 April s.d. 10 Mei 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 109/ST/XIX.KUP/04/2025 tanggal 11 April 2025.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024

BUPATI SUMBA BARAT DAYA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Tambolaka, 23 Mei 2025

Bupati Sumba Barat Daya

RATU NGADU BONU WULLA, ST

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(*AUDITED*)

(*Dalam Rupiah*)

NO	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**5.1.1**	**1.190.500.040.786,00**	**1.179.410.033.852,32**	**99,07**	**1.173.228.025.783,99**
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**5.1.1.1**	**41.865.479.936,00**	**43.651.261.637,32**	**104,27**	**35.304.169.687,99**
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	21.187.692.697,00	22.961.001.653,00	108,37	15.230.415.543,51
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	13.492.430.500,00	11.644.335.136,00	86,30	8.684.969.797,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	3.953.742.399,00	3.944.963.310,00	99,78	7.742.306.863,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	3.231.614.340,00	5.100.961.538,32	157,85	3.646.477.484,48
7	**JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH**		**41.865.479.936,00**	**43.651.261.637,32**	**104,27**	**35.304.169.687,99**
8						
9	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5.1.1.2**	**1.127.034.959.062,00**	**1.118.099.345.496,00**	**99,21**	**1.117.607.489.545,00**
10	Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	898.937.246.333,00	894.773.478.773,00	99,54	881.552.490.182,00
11	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1.1.a	4.206.996.200,00	4.671.526.524,00	111,04	6.046.427.914,00
12	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.1.b	575.826.082.000,00	574.445.179.602,00	99,76	502.959.267.143,00
13	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.1.1.c	164.943.436.000,00	160.421.804.814,00	97,26	200.621.098.674,00
14	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.1.1.d	153.960.732.133,00	155.234.967.833,00	100,83	171.925.696.451,00
15	**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN**		**898.937.246.333,00**	**894.773.478.773,00**	**99,54**	**881.552.490.182,00**
16						
17	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	19.751.646.000,00
18	Dana Desa	5.1.1.2.1.3	184.608.937.000,00	184.608.937.000,00	100,00	187.540.421.000,00
19	Insentif Fiskal	5.1.1.2.1.4	7.109.813.000,00	7.109.813.000,00	100,00	0,00

NO	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
20	**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**		**191.718.750.000,00**	**191.718.750.000,00**	**100,00**	**207.292.067.000,00**
21						
22	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.1.5	36.378.962.729,00	31.607.116.723,00	86,88	28.762.932.363,00
23	Pendapatan Bagi Hasil		36.378.962.729,00	31.607.116.723,00	86,88	28.762.932.363,00
24	**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH**		**36.378.962.729,00**	**31.607.116.723,00**	**86,88**	**28.762.932.363,00**
25						
26	**TOTAL PENDAPATAN TRANSFER**		**1.127.034.959.062,00**	**1.118.099.345.496,00**	**99,21**	**1.117.607.489.545,00**
27						
28	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.1.1.3**	**21.599.601.788,00**	**17.659.426.719,00**	**81,76**	**20.316.366.551,00**
29	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		21.599.601.788,00	17.659.426.719,00	81,76	20.316.366.551,00
30	**JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**		**21.599.601.788,00**	**17.659.426.719,00**	**81,76**	**20.316.366.551,00**
31						
32	**JUMLAH PENDAPATAN**		**1.190.500.040.786,00**	**1.179.410.033.852,32**	**99,07**	**1.173.228.025.783,99**
33						
34	**BELANJA DAN TRANSFER DAERAH**	**5.1.2**	**1.233.200.263.844,00**	**1.147.575.940.833,00**	**93,06**	**1.151.282.207.613,00**
35	**BELANJA OPERASI**	**5.1.2.1**	**819.248.566.989,00**	**741.753.087.764,00**	**90,54**	**672.673.943.713,00**
36	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	369.350.664.721,00	330.331.141.451,00	89,44	286.564.004.981,00
37	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	355.638.300.148,00	319.265.652.334,00	89,77	303.857.301.344,00
38	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	285.000.000,00	233.203.450,00	81,83	117.966.000,00
39	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	75.323.437.120,00	74.046.925.529,00	98,31	67.296.181.388,00
40	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	18.651.165.000,00	17.876.165.000,00	95,84	14.838.490.000,00
41	**JUMLAH BELANJA OPERASI**		**819.248.566.989,00**	**741.753.087.764,00**	**90,54**	**672.673.943.713,00**
42						
43	**BELANJA MODAL**	**5.1.2.2**	**165.144.905.371,00**	**160.632.937.633,00**	**97,27**	**227.471.238.492,00**
44	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	29.332.368.704,00	27.119.273.098,00	92,46	32.506.485.331,00
45	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	37.446.323.354,00	35.658.539.759,00	95,23	73.256.412.346,00
46	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	95.174.430.838,00	94.810.066.973,00	99,62	118.375.365.601,00

NO	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
47	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	3.191.782.475,00	3.045.057.803,00	95,40	3.252.975.214,00
48	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
49	**JUMLAH BELANJA MODAL**		**165.144.905.371,00**	**160.632.937.633,00**	**97,27**	**227.471.238.492,00**
50						
51	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.1.2.3**	**3.616.875.772,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	Belanja Tidak Terduga		3.616.875.772,00	0,00	0,00	0,00
53	**JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA**		**3.616.875.772,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54						
55	**BELANJA TRANSFER**	**5.1.2.4**	**245.189.915.712,00**	**245.189.915.436,00**	**100,00**	**251.137.025.408,00**
56	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4.1	1.781.587.522,00	1.781.587.389,00	100,00	1.626.899.958,00
57	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.1.2.4.2	985.219.190,00	985.219.084,00	100,00	0,00
58	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.3	242.423.109.000,00	242.423.108.963,00	100,00	249.510.125.450,00
59	**JUMLAH BELANJA TRANSFER**		**245.189.915.712,00**	**245.189.915.436,00**	**100,00**	**251.137.025.408,00**
60						
61	**JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER DAERAH**		**1.233.200.263.844,00**	**1.147.575.940.833,00**	**93,06**	**1.151.282.207.613,00**
62						
63	**SURPLUS/DEFISIT**	**5.1.3**	**(42.700.223.058,00)**	**31.834.093.019,32**	**(74,55)**	**21.945.818.170,99**
64						
65	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**5.1.4**	**42.700.223.058,00**	**42.842.835.929,10**	**100,33**	**32.754.404.887,93**
66	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**5.1.4.1**	**54.700.223.058,00**	**54.842.835.929,10**	**100,26**	**34.754.404.887,93**
67	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		54.700.223.058,00	54.842.835.929,10	100,26	34.754.404.887,93
68	**JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN**		**54.700.223.058,00**	**54.842.835.929,10**	**100,26**	**34.754.404.887,93**
69						
70	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.1.4.2**	**12.000.000.000,00**	**12.000.000.000,00**	**100,00**	**2.000.000.000,00**
71	Penyertaan Modal Daerah		12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
72	**JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN**		**12.000.000.000,00**	**12.000.000.000,00**	**100,00**	**2.000.000.000,00**

NO	URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
73						
74	**PEMBIAYAAN NETTO**		**42.700.223.058,00**	**42.842.835.929,10**	**100,33**	**32.754.404.887,93**
75						
76	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN**	**5.1.5**	**0,00**	**74.676.928.948,42**	**0,00**	**54.700.223.058,92**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bupati Sumba Barat Daya,

RATU NGADU BONU WULLA, ST

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(*AUDITED*)

(*Dalam Rupiah*)

NO	URAIAN	REFF CALK	2024	2023
1	**SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL**	**5.2.1**	**54.700.223.058,92**	**34.754.404.889,00**
2	PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	5.2.2	54.842.835.929,10	34.754.404.887,93
3	**SUBTOTAL (1-2)**		**(142.612.870,18)**	**1,07**
4	SALDO LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	74.676.928.948,42	54.700.223.058,92
5	**SUBTOTAL (3+4)**		**74.534.316.078,24**	**54.700.223.059,99**
6	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	5.2.4	142.612.870,18	(1.07)
7	LAIN-LAIN		0,00	0,00
8	**SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)**	**5.2.5**	**74.676.928.948,42**	**54.700.223.058,92**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bupati Sumba Barat Daya,

RATU NGADU BONI WULLA, ST

III. NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(*AUDITED*)

(*Dalam Rupiah*)

NO	URAIAN	REFF CALK	2024	2023
1	**ASET**	**5.3.1**	**2.102.553.302.491,61**	**2.010.334.497.965,09**
2	**ASET LANCAR**	**5.3.1.1**		
3	**Kas dan Setara Kas**		**74.748.429.108,47**	**54.909.233.838,10**
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	70.397.469.118,98	48.665.296.473,91
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	65.806.218,00	69.417.882,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	29.655.490,00	88.116.251,49
7	Kas Dana BOS	5.3.1.1.4	0,00	349.954.855,56
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.5	376.013.475,14	1.957.741.387,14
9	Kas Lainnya	5.3.1.1.6	39.329.266,05	3.778.706.988,00
10	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.7	785.956.588,30	0,00
11	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.8	3.054.198.952,00	0,00
12	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.9.1	16.926.553.540,00	14.891.647.516,00
13	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.9.2	1.118.406.002,00	499.161.100,00
14	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.9.3	618.730.208,09	0,00
15	Piutang Transfer	5.3.1.1.9.4	2.261.459.724,00	5.694.437.193,00
16	Piutang Lainnya	5.3.1.1.9.5	0,00	4.963.527.077,00
17	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.10	(10.935.992.257,19)	(14.417.067.902,98)
18	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.11	1.047.468.920,00	0,00
19	Persediaan	5.3.1.1.12	17.231.055.867,61	23.893.945.664,39
22	**JUMLAH ASET LANCAR**		**103.016.111.112,98**	**90.434.884.485,51**
23				
24	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**5.3.1.2**		
25	**Investasi Jangka Panjang Permanen**		**97.474.248.829,00**	**85.474.248.829,00**

NO	URAIAN	REFF CALK	2024	2023
26	Investasi Jangka Panjang Permanen		97.474.248.829,00	85.474.248.829,00
27	Penyertaan Modal		97.474.248.829,00	85.474.248.829,00
28	**JUMLAH INVESTASI PERMANEN**		**97.474.248.829,00**	**85.474.248.829,00**
29	**JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG**		**97.474.248.829,00**	**85.474.248.829,00**
30				
31	**ASET TETAP**	**5.3.1.3**		
32	Tanah	5.3.1.3.1	366.129.124.336,00	371.281.409.336,00
33	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	359.815.725.945,51	341.701.391.858,62
34	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	705.009.234.652,34	623.592.116.869,33
35	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	1.512.420.729.978,04	1.395.254.032.803,31
36	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	48.783.845.838,14	46.513.845.283,14
37	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	9.499.631.034,00	42.298.483.284,00
38	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.143.914.005.443,99)	(1.023.287.565.334,97)
39	**JUMLAH ASET TETAP**		**1.857.744.286.340,04**	**1.797.353.714.099,43**
40				
41	**ASET LAINNYA**	**5.3.1.4**		
42	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.4.1	1.565.986.950,09	1.717.322.480,35
43	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4.2	1.322.423.200,00	1.391.760.700,00
44	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.3	475.600.000,00	459.649.999,33
45	Aset Lain-lain	5.3.1.4.4	35.802.361.059,50	33.502.917.371,47
46	**JUMLAH ASET LAINNYA**		**39.166.371.209,59**	**37.071.650.551,15**
47				
48	**PROPERTI INVESTASI**	**5.3.1.5**	**5.152.285.000,00**	**0,00**
49	Properti Investasi Tanah		5.152.285.000,00	0,00
50	**JUMLAH PROPERTI INVESTASI**		**5.152.285.000,00**	**0,00**
51				
52	**JUMLAH ASET**		**2.102.553.302.491,61**	**2.010.334.497.965,09**
53				
54	**KEWAJIBAN**	**5.3.2**		
55	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**		**3.758.192.970,05**	**4.997.634.110,88**
56	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1	71.500.160,05	209.010.779,18
57	Utang Belanja	5.3.2.2	3.686.692.810,00	4.788.623.331,70
58	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.3	0,00	0,00

NO	URAIAN	REFF CALK	2024	2023
59	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**		**3.758.192.970,05**	**4.997.634.110,88**
60	**JUMLAH KEWAJIBAN**		**3.758.192.970,05**	**4.997.634.110,88**
61				
62	**EKUITAS**	**5.3.3**	**2.098.795.109.521,56**	**2.005.336.863.854,21**
63	EKUITAS		2.098.795.109.521,56	2.005.336.863.854,21
64	**JUMLAH EKUITAS**		**2.098.795.109.521,56**	**2.005.336.863.854,21**
65				
66	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS**		**2.102.553.302.491,61**	**2.010.334.497.965,09**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bupati Sumba Barat Daya,

RATU NGADU BONU WULLA, ST

IV. LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(*AUDITED*)

(*Dalam Rupiah*)

NO	URAIAN	REFF CALK	2024	2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1						
2	**PENDAPATAN**	**5.4.1**	**1.020.038.361.814,12**	**1.009.599.067.378,48**	**10.439.294.435,64**	**1,03**
3	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	**5.4.1.1**	**45.815.759.160,11**	**37.881.679.311,63**	**7.934.079.848,48**	**20,94**
4	Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	24.995.907.677,00	17.980.246.022,00	7.015.661.655,00	39,02
5	Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	12.263.594.538,00	8.995.990.897,00	3.267.603.641,00	36,32
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3	3.944.963.310,00	7.742.306.863,00	(3.797.343.553,00)	(49,05)
7	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4	4.611.293.635,11	3.163.135.529,63	1.448.158.105,48	45,78
8	**JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**		**45.815.759.160,11**	**37.881.679.311,63**	**7.934.079.848,48**	**20,94**
9						
10	**PENDAPATAN TRANSFER-LO**	**5.4.1.2**	**929.581.839.027,00**	**927.771.638.165,00**	**1.810.200.862,00**	**0,20**
11	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**					
12	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	5.4.1.2.1	901.407.699.773,00	900.663.366.268,00	744.333.505,00	0,08
13	Dana Perimbangan-LO	5.4.1.2.1.1	894.297.886.773,00	880.911.720.268,00	13.386.166.505,00	1,52
14	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO		4.195.934.524,00	5.405.658.000,00	(1.209.723.476,00)	(22,38)
15	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO		574.445.179.602,00	502.959.267.143,00	71.485.912.459,00	14,21

NO	URAIAN	REFF CALK	2024	2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
16	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO		160.421.804.814,00	200.621.098.674,00	(40.199.293.860,00)	(20,04)
17	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO		155.234.967.833,00	171.925.696.451,00	(16.690.728.618,00)	(9,71)
18	**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**		**894.297.886.773,00**	**880.911.720.268,00**	**13.386.166.505,00**	**1,52**
19						
20	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**					
21	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	5.4.1.2.1.2	0,00	19.751.646.000,00	(19.751.646.000,00)	(100,00)
22	Insentif Fiskal-LO	5.4.1.2.1.3	7.109.813.000,00	0,00	7.109.813.000,00	100,00
23	**JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**		**7.109.813.000,00**	**19.751.646.000,00**	**(12.641.833.000,00)**	**(64,00)**
24						
25	**Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO**	**5.4.1.2.2**	**28.174.139.254,00**	**27.108.271.897,00**	**1.065.867.357,00**	**3,93**
26	Pendapatan Bagi Hasil-LO		28.174.139.254,00	27.108.271.897,00	1.065.867.357,00	3,93
27	**JUMLAH Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO**		**28.174.139.254,00**	**27.108.271.897,00**	**1.065.867.357,00**	**3,93**
28	**TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO**		**929.581.839.027,00**	**927.771.638.165,00**	**1.810.200.862,00**	**0,20**
29						
30	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO**	**5.4.1.3**	**44.640.763.627,01**	**43.945.749.901,85**	**695.013.725,16**	**1,58**
31	Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.1	26.993.012.733,01	23.700.082.390,85	3.292.930.342,16	13,89
32	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3.2	17.647.750.894,00	20.245.667.511,00	(2.597.916.617,00)	(12,83)
33	**JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO**		**44.640.763.627,01**	**43.945.749.901,85**	**695.013.725,16**	**1,58**
34	**JUMLAH PENDAPATAN**		**1.020.038.361.814,12**	**1.009.599.067.378,48**	**10.439.294.435,64**	**1,03**
35						

NO	URAIAN	REFF CALK	2024	2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
36	**BEBAN**	**5.4.2**	**949.555.089.843,37**	**883.502.564.567,37**	**66.052.525.276,00**	**7,48**
37	**BEBAN OPERASI**	**5.4.2.1**	**764.388.903.794,64**	**711.241.255.569,81**	**53.147.648.224,83**	**7,47**
38	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	330.331.141.451,00	286.564.004.981,00	43.767.136.470,00	15,27
39	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	341.461.278.857,43	338.809.304.356,67	2.651.974.500,76	0,78
40	Beban Subsidi	5.4.2.1.3	233.203.450,00	117.966.000,00	115.237.450,00	97,69
41	Beban Hibah	5.4.2.1.4	73.004.663.605,00	69.938.681.550,00	3.065.982.055,00	4,38
42	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.5	17.876.165.000,00	14.838.490.000,00	3.037.675.000,00	20,47
43	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.6	1.482.451.431,21	972.808.682,14	509.642.749,07	52,39
44	**JUMLAH BEBAN OPERASI**		**764.388.903.794,64**	**711.241.255.569,81**	**53.147.648.224,83**	**7,47**
45						
46	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**	5.4.2.2	**124.585.207.612,73**	**108.664.704.589,56**	**15.920.503.023,17**	**14,65**
47	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		30.125.723.695,00	28.406.734.394,34	1.718.989.300,66	6,05
48	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		13.319.244.115,95	11.900.468.251,20	1.418.775.864,75	11,92
49	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		81.083.951.801,78	68.250.425.944,02	12.833.525.857,76	18,80
50	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud		56.288.000,00	107.076.000,00	(50.788.000,00)	(47,43)
51	**Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi**		**124.585.207.612,73**	**108.664.704.589,56**	**15.920.503.023,17**	**14,65**
52						
53	**BEBAN TRANSFER**	**5.4.2.3**	**60.580.978.436,00**	**63.596.604.408,00**	**(3.015.625.972,00)**	**(4,74)**
54	Beban Bagi Hasil		2.766.806.473,00	1.626.899.958,00	1.139.906.515,00	70,07
55	Beban Bantuan Keuangan		57.814.171.963,00	61.969.704.450,00	(4.155.532.487,00)	(6,71)
56	**JUMLAH BEBAN TRANSFER**		**60.580.978.436,00**	**63.596.604.408,00**	**(3.015.625.972,00)**	**(4,74)**
57	**JUMLAH BEBAN**		**949.555.089.843,37**	**883.502.564.567,37**	**66.052.525.276,00**	**7,48**
58	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI**	**5.4.3**	**70.483.271.970,75**	**126.096.502.811,11**	**(55.613.230.840,36)**	**(44,10)**
59						
60	**SURPLUS NON OPERASIONAL-LO**		**639.772.319,20**	**0,00**	**639.772.319,20**	**100,00**
61	**JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO**		**639.772.319,20**	**0,00**	**639.772.319,20**	**100,00**

NO	URAIAN	REFF CALK	2024	2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
62	**DEFISIT NON OPERASIONAL-LO**		**2.833.339.012,61**	**450.167.219,43**	**2.383.171.793,18**	**529,40**
63	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		2.833.339.012,61	450.167.219,43	2.383.171.793,18	529,40
64	**JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO**		**2.833.339.012,61**	**450.167.219,43**	**2.383.171.793,18**	**529,40**
65	**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**	**5.4.4**	**(2.193.566.693,41)**	**(450.167.219,43)**	**(1.743.399.473,98)**	**387,28**
66	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA**	**5.4.5**	**68.289.705.277,34**	**125.646.335.591,68**	**(57.356.630.314,34)**	**(45,65)**
67						
68	**BEBAN LUAR BIASA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	**JUMLAH BEBAN LUAR BIASA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	**5.4.6**	**68.289.705.277,34**	**125.646.335.591,68**	**(57.356.630.314,34)**	**(45,65)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bupati Sumba Barat Daya,

RATU NGADU BONU WULLA, ST

V. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(*AUDITED*)

(*Dalam Rupiah*)

NO	URAIAN	REFF CALK	2024	2023
1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**	**5.5.1**		
2	Penerimaan Pajak Daerah		22.961.001.653,00	15.230.415.543,51
3	Penerimaan Retribusi Daerah		11.644.335.136,00	8.684.969.797,00
4	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3.944.963.310,00	7.742.306.863,00
5	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah		4.664.967.938,32	3.373.161.313,48
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil		4.671.526.524,00	6.046.427.914,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum		574.445.179.602,00	502.959.267.143,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		160.421.804.814,00	200.621.098.674,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		155.234.967.833,00	171.925.696.451,00
10	Penerimaan Dana Insentif Daerah		0,00	19.751.646.000,00
11	Penerimaan Dana Desa		184.608.937.000,00	187.540.421.000,00
12	Penerimaan Insentif Fiskal		7.109.813.000,00	0,00
13	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		31.607.116.723,00	28.762.932.363,00
14	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		17.659.426.719,00	20.316.366.551,00
15				
16	**Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi**	**5.5.1.1**	**1.178.974.040.252,32**	**1.172.954.709.612,99**
17				
18	**ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS OPERASI**			
19	Pembayaran Pegawai		330.331.141.451,00	286.564.004.981,00
20	Pembayaran Barang dan Jasa		319.265.652.334,00	303.857.301.344,00
21	Pembayaran Subsidi		233.203.450,00	117.966.000,00
22	Pembayaran Belanja Hibah		74.046.925.529,00	67.296.181.388,00
23	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		17.876.165.000,00	14.838.490.000,00
24	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		2.766.806.473,00	1.626.899.958,00
25	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa		242.423.108.963,00	249.510.125.450,00

NO	URAIAN	REFF CALK	2024	2023
26				
27	**Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi**	**5.5.1.2**	**986.943.003.200,00**	**923.810.969.121,00**
28				
29	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi**		**192.031.037.052,32**	**249.143.740.491,99**
30				
31	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**	**5.5.2**		
32	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		435.993.600,00	273.316.171,00
33				
34	**Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi**	**5.5.2.1**	**435.993.600,00**	**273.316.171,00**
35				
36	**ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS INVESTASI**			
37	Perolehan Peralatan dan Mesin		27.119.273.098,00	32.506.485.331,00
38	Perolehan Gedung dan Bangunan		35.658.539.759,00	73.256.412.346,00
39	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		94.810.066.973,00	118.375.365.601,00
40	Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.045.057.803,00	3.252.975.214,00
41	Perolehan Aset Lainnya		0,00	80.000.000,00
42	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		12.000.000.000,00	2.000.000.000,00
43				
44	**Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi**	**5.5.2.2**	**172.632.937.633,00**	**229.471.238.492,00**
45				
46	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi**		**(172.196.944.033,00)**	**(229.197.922.321,00)**
47				
48	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**	**5.5.3**		
49	**Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Pendanaan**		**0,00**	**0,00**
50	**Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan**		**0,00**	**0,00**
51	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan**		**0,00**	**0,00**
52				
53	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**	**5.5.4**		
54	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		34.702.330.583,05	38.348.824.851,84
55				
56	**Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris**		**34.702.330.583,05**	**38.348.824.851,84**
57				
58	**ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS TRANSITORIS**			
59	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		34.839.841.202,18	38.425.865.167,35
60				
61	**Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris**		**34.839.841.202,18**	**38.425.865.167,35**
62				

NO	URAIAN	REFF CALK	2024	2023
63	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		(137.510.619,13)	(77.040.315,51)
64				
65	Kenaikan/Penurunan Kas		19.696.582.400,19	19.868.777.855,48
66	Saldo Awal Kas		54.909.233.838,10	35.040.455.983,69
67	Koreksi SiLPA		142.612.870,18	(1,07)
68	Saldo Awal Kas Setelah Koreksi		55.051.846.708,28	35.040.455.982,62
69	Saldo Akhir Kas	5.5.5	74.748.429.108,47	54.909.233.838,10

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bupati Sumba Barat Daya,

RATU NGADU BONU WULLA, ST

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(*AUDITED*)

(*Dalam Rupiah*)

NO	URAIAN	REFF CALK	2024	2023
1	**EKUITAS AWAL**	**5.6.1**	**2.005.336.863.854,21**	**1.879.783.177.163,23**
2	**SURPLUS / (DEFISIT) - LO**	**5.6.2**	**68.289.705.277,34**	**125.646.335.591,68**
3	**DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR**	**5.6.3**	**25.168.540.390,01**	**(92.648.900,70)**
4	Koreksi Ekuitas - Aset Lancar		(11.056.920,00)	(1,07)
5	Koreksi Ekuitas - Investasi		0,00	(1.323.927.074,00)
6	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap		24.960.519.493,71	2.760.714.830,37
7	Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya		65.408.026,12	0,00
8	Koreksi Ekuitas - Kewajiban		153.669.790,18	(1.529.436.656,00)
9	Koreksi Ekuitas - Lainnya		0,00	0,00
10	**EKUITAS AKHIR**	**5.6.4**	**2.098.795.109.521,56**	**2.005.336.863.854,21**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bupati Sumba Barat Daya,

RATU NGADU BONNU WULLA, ST

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang- undangan.

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Dana Perimbangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2024;

- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah NTT;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Sumba Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024;
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024;
- Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Amortisasi Aset tak Berwujud Berbasis Akrual Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 40 Tahun 2021 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024; dan
- Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

- Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

- Kebijakan Keuangan
- Indikator Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja APBD

- Iktisar Realisasi Pencapaian target kinerja keuangan
- Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian Tujuan

IV. Kebijakan Akuntansi

- Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasian ke Basis Akrual.

V. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - Pendapatan - LRA
  - Belanja
  - Pembiayaan
- Penjelasan Akun – Akun Neraca
  - Aset
  - Kewajiban
  - Ekuitas
- Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
  - Pendapatan - LO
  - Beban
  - Surplus / Defisit dari Kegiatan Operasional
  - Surplus / Defisit dari Pos Luar Biasa
- Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
  - Ekuitas Awal
  - Surplus / Defisit LO
  - Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
  - Ekuitas Akhir

VI. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

- Domisili
- Struktur Organisasi

VII. Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemerintah Daerah) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BPS Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan 7 indikator, yaitu:

a. Angkat Kemiskinan;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka;
c. Gini *Ratio*;
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
e. Laju Pertumbuhan Ekosnomi (LPE);
f. Tingkat Inflasi; dan
g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB).

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1. 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sumba Barat Daya

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023 %	Tahun 2024 %	Naik/(Turun) %
1	Kab.Sumba Barat Daya (%)	27,48	27,20	(0,28)
2	Kab.Sumba Barat Daya (Dalam Ribu Orang)	101,4	102,05	0,65
3	Provinsi NTT (%)	19,96	19,48	(0,48)
4	Nasional (%)	9,36	9,03	(0,33)

Sumber Dokumen: BPS Provinsi NTT dan Kab.Sumba Barat Daya

Secara Nasional, pada Tahun 2024, tingkat kemiskinan mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Penurunan jumlah penduduk miskin pada 2024 sejalan dengan perekonomian domestik yang membaik.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun 2021 sebanyak 100.420 orang dan pada Tahun 2022 menurun menjadi 98.500 orang atau 2,86% kemudian pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi 101.400 orang atau sebesar 27,48% dari total penduduk Kabupaten Sumba barat daya. Tren peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun 2022 sampai tahun 2024 semakin menurun dan diharapkan dengan adanya program-program pemerintah baik pusat maupun daerah yang bertujuan untuk mendorong peningkatan ekonomi asyarakat, maka jumlah penduduk miskin akan semakin menurun.

Tabel 2.1. 2 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sumba Barat Daya

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/(Turun)
1	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten	3,99	5,86	3,84	(2,02)
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi NTT (Gabungan Urban dan Rural)	3,74	3,33	3,57	0,24
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan Nasional (Gabungan Urban dan Rural)	1,56	1,53	1,36	(0,17)

Sumber Dokumen: BPS Provinsi NTT dan Kab.Sumba Barat Daya

Tabel 2.1. 3 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sumba Barat Daya

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/(Turun) (%)
1	Indeks Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,93	1,55	0,85	(0,70)
2	Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi (Gabungan Urban dan Rural)	0,93	0,80	0,96	0,16

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/(Turun) (%)
3	Indeks Keparahan Kemiskinan Nasional (Gabungan Urban dan Rural)	3,74	3,33	0,32	(3,01)

Sumber Dokumen: BPS Provinsi NTT dan Kab.Sumba Barat Daya

Tabel diatas menunjukkan adanya fluktuasi jumlah penduduk miskin periode Tahun 2022 s.d. 2024. Tingkat Kedalaman kemiskinan Kabupaten Sumba Barat Daya pada Tahun 2022 sebesar 3,99% mengalami peningkatan hingga menjadi 5,86% pada tahun 2023 kemudian menurun menjadi 3,84% pada Tahun 2024. Namun Tingkat Keparahan Kemiskinan pada Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 0,85% dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 1,55%, ini mengindikasikan adanya peningkatan daya beli masyarakat miskin meskipun tidak signifikan dan disparitas pengeluaran penduduk miskin secara rata-rata memiliki kecenderungan sama, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya terus berkomitmen untuk memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat agar dapat keluar dari garis kemiskinan melalui program dan kegiatan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah melakukan beberapa upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan alokasi anggaran senilai Rp193.621.223.859,00 dan telah direalisasikan senilai Rp175.231.448.120 atau 90,50%. Rincian program/kegiatan dalam rangka pengentasan kemiskinan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1. 4 Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2024

NO	UNIT KERJA	NAMA SUB KEGIATAN	STRATEGI	ANGGARAN	REALISASI	%
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Mengurangi Beban Pengeluaran	6.207.402.000,00	5.663.165.800,00	91,23
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Mengurangi Beban Pengeluaran	1.050.037.000,00	858.411.800,00	81,75
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	51.658.550.000,00	51.167.831.900,00	99,05
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Mengurangi Beban Pengeluaran	33.736.520.000,00	26.224.990.300,00	77,73
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	137.450.000,00	50.600.000,00	36,81
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Meningkatkan Pendapatan	525.569.750,00	517.693.750,00	98,5

NO	UNIT KERJA	NAMA SUB KEGIATAN	STRATEGI	ANGGARAN	REALISASI	%
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	9.824.226.250,00	9.721.877.950,00	98,96
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	479.581.050,00	477.878.350,00	99,64
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	12.354.057.050,00	12.275.157.300,00	99,36
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	580.195.000,00	566.559.000,00	97,65
11	DINAS KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	61.440.000,00	53.650.000,00	87,32
12	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	24.298.232.900,00	20.431.522.227,00	84,09
13	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Mengurangi Beban Pengeluaran	50.000.000,00	27.646.850,00	55,29
14	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	656.232.000,00	336.045.020,00	51,21
15	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	362.808.400,00	291.006.666,00	80,21
16	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	49.999.750,00	43.399.750,00	86,8
17	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Mengurangi Beban Pengeluaran	50.543.000,00	39.351.800,00	77,86
18	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	85.682.500,00	49.617.788,00	57,91
19	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Mengurangi Beban Pengeluaran	32.300.000,00	24.089.540,00	74,58
20	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	65.280.000,00	64.940.000,00	99,48
21	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Mengurangi Beban Pengeluaran	36.800.000,00	34.760.000,00	94,46
22	RSUD PRATAMA REDA BOLO	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	88.073.000,00	41.991.000,00	47,68

NO	UNIT KERJA	NAMA SUB KEGIATAN	STRATEGI	ANGGARAN	REALISASI	%
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	20.000.000,00	2.500.000,00	12,5
24	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	652.267.000,00	333.230.565,00	51,09
25	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Mengurangi Beban Pengeluaran	54.321.500,00	54.111.500,00	99,61
26	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Mengurangi Beban Pengeluaran	45.355.000,00	45.355.000,00	100
27	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Mengurangi Beban Pengeluaran	44.572.000,00	37.752.500,00	84,7
28	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	49.999.100,00	43.963.640,00	87,93
29	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Meningkatkan Pendapatan	2.558.147.854,00	2.533.800.077,00	99,05
30	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	951.520.000,00	950.867.196,00	99,93
31	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	4.130.592.000,00	4.089.045.298,00	98,99
32	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	194.100.000,00	191.714.000,00	98,77
33	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	1.132.731.000,00	1.092.266.000,00	96,43
34	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	104.088.750,00	103.008.750,00	98,96
35	DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	688.500.000,00	657.725.000,00	95,53

NO	UNIT KERJA	NAMA SUB KEGIATAN	STRATEGI	ANGGARAN	REALISASI	%
36	DINAS PERIKANAN	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Meningkatkan Pendapatan	14.400.000,00	14.400.000,00	100
37	DINAS PERIKANAN	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Meningkatkan Pendapatan	1.231.835.000,00	1.207.581.081,00	98,03
38	DINAS PERIKANAN	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Meningkatkan Pendapatan	10.433.000,00	10.433.000,00	100
39	DINAS PERIKANAN	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	93.553.000,00	93.176.500,00	99,6
40	DINAS PERIKANAN	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatkan Pendapatan	3.429.819.000,00	3.409.297.429,00	99,4
41	DINAS PERIKANAN	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	583.373.504,00	481.300.050,00	82,5
42	DINAS PERIKANAN	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	551.359.500,00	546.961.365,00	99,2
43	DINAS PERIKANAN	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	15.000.000,00	15.000.000,00	100
44	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	199.896.800,00	191.546.800,00	95,82
45	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatkan Pendapatan	5.072.538.000,00	1.801.367.980,00	35,51
46	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Meningkatkan Pendapatan	3.621.448.886,00	3.399.251.046,00	93,86
47	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	14.223.639.600,00	13.802.601.184,00	97,04

NO	UNIT KERJA	NAMA SUB KEGIATAN	STRATEGI	ANGGARAN	REALISASI	%
48	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	89.115.000,00	65.454.450,00	73,45
49	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	115.649.100,00	114.361.686,00	98,89
50	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	87.512.200,00	87.512.200,00	100
51	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	2.223.338.000,00	209199260	94,09
52	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	1.303.514.200,00	1.303.455.210,00	100
53	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Meningkatkan Pendapatan	117.102.750,00	111.710.750,00	95,4
54	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	5.221.253.000,00	5.022.031.015,00	96,18
55	DINAS SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	128.584.700,00	127.594.700,00	99,23
56	DINAS SOSIAL	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	495.483.800,00	495.231.700,00	99,95
57	DINAS SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	716.057.006	709.304.174,00	99,06
58	DINAS SOSIAL	Penyediaan Makanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	133.043.200,00	123.098.500,00	92,53
59	DINAS SOSIAL	Penyediaan Permakanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	135.999.800,00	135999800	100
60	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Mengurangi Beban Pengeluaran	20.998.000,00	20.948.000,00	99,76
61	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Meningkatkan Pendapatan	34.996.450,00	34.985.984,00	99,97

NO	UNIT KERJA	NAMA SUB KEGIATAN	STRATEGI	ANGGARAN	REALISASI	%
62	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatkan Pendapatan	143.370.875,00	139.566.369,00	97,35
63	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Meningkatkan Pendapatan	1.080.925.900,00	1.071.609.990,00	99,14
64	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Penyuluhan Transmigrasi	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	34.978.500,00	34.253.040,00	97,93
65	KECAMATAN LOURA	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	30.988.000,00	30.873.000,00	99,63
66	KECAMATAN KODI UTARA	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	23.448.000,00	2.878.000,00	12,27
67	KECAMATAN KODI	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	9.890.000,00	9.890.000,00	100
68	KECAMATAN KODI BANGEDO	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	38.231.000,00	35.081.000,00	91,76
69	KECAMATAN WEWEWA BARAT	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	12.287.990,00	12.287.990,00	100
70	KECAMATAN WEWEWA TIMUR	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	14.229.000,00	14.009.000,00	98,45
71	KECAMATAN WEWEWA UTARA	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	10.453.250,00	10.200.000,00	97,58
72	KECAMATAN WEWEWA SELATAN	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	8.726.000,00	1.826.000,00	20,93
73	KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	16.344.000,00	16.334.000,00	99,94

NO	UNIT KERJA	NAMA SUB KEGIATAN	STRATEGI	ANGGARAN	REALISASI	%
74	KECAMATAN KODI BALAGHAR	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	8.805.000,00	8.530.000,00	96,88
75	KECAMATAN WEWEWA TENGAH	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	17.486.000,00	17.486.000,00	100
76	DINAS PERIKANAN	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatkan Pendapatan	3.429.819.000,00	3.409.297.429,00	99,4
TOTAL				**193.621.223.859,00**	**175.231.448.920,00**	**90,5**

Program penanggulangan kemiskinan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah rumah tangga, keluarga, dan atau individu dengan kategori miskin berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Daerah berupa pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase sejumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 adalah sebesar 2,64 %, terjadi kecenderungan peningkatan jumlah tingkat pengangguran selama tiga tahun terakhir sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. 5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumba Barat Daya

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	1,97	2,08	2,64	0,56

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	3,54	3,14	3,02	(0,12)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,86	5,32	4,91	(0,41)

Sumber Dokumen: BPS Provinsi NTT dan Kab.Sumba Barat Daya

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,68% meningkat 0,56% dari Tahun 2023. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi pada Tahun 2024 sebesar 3,02 % dan TPT Nasional yang sebesar 4,91 %.

2.1.3. Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau *Gini Ratio* adalah alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva **Lorenz**, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama

b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi NTT, dan Tingkat nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. 6 Gini Ratio Nasional Kabupaten Sumba Barat Daya

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya	0,357	0,357	0,315	(0,04)
2	Tingkat Provinsi NTT	0,334	0,340	0,316	(0,02)
3	Tingkat Nasional (Gabungan Pedesaan dan Perkotaan)	0,381	0,388	0,379	(0,01)

Sumber Dokumen: BPS Provinsi NTT dan Kab.Sumba Barat Daya

Pada Tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya yang diukur oleh Gini Ratio adalah 0,315 hal ini mengindikasikan bahwa disparitas pendapatan di Kabupaten Sumba Barat Daya berada pada level sedang ini lebih rendah 0,001 poin dibandingkan Gini ratio Provinsi NTT Tahun 2024 sebesar 0,316 dan lebih rendah dibandingkan Gini Nasional Tahun 2024 sebesar 0,379. Hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pendapatan dalam masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya masih berada dibawah rata-rata ketimpangan pendapatan secara nasional.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living).

Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

a. Rendah (< 60)
b. Sedang (60≤IPM<70)
c. Tinggi (70 ≤IPM<80)
d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 adalah sebesar 64,27 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. 7 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumba Barat Daya

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun (%)
1	Kabupaten	63,15	63,74	64,27	0,53
2	Provinsi	65,90	66,68	69,14	2,46
3	Indonesia/Nasional	73,77	74,39	75,02	0,63

Sumber Dokumen: BPS Provinsi NTT dan Kab.Sumba Barat Daya

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 adalah sebesar 64,27 poin, mengalami peningkatan sebesar 0,53 poin jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu sebesar 63,74 poin dan menduduki peringkat ke 21 dari 22 Kabupaten di Provinsi NTT.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.1. 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumba Barat Daya

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
1	PDRB (harga konstan 2010) (Juta/Million Rp)	2 444.600,03	2.518.000,92	2.619,83	78.044,57	11.710.223,20
2	LajuPertumbuhan Ekonomi (%)	3,83	3,00	3,94	3,73	5,03
3	Peringkat Provinsi	11	11	12	-	-

Sumber Dokumen: BPS.go.id

Selama kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 perekonomian Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami fluktuasi, dimana pada Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat Daya berada pada level 3,84% kemudian pada Tahun 2023 menurun menjadi 3,06% dan pada tahun 2024 pertumbuhan perekonomian berada pada level 3,94%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sumba Barat Daya menempatiurutan 12 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan skala nasional laju pertumbuhan perekonomian kabupaten sumba barat daya menempatiuruan 441 dari laju pertumbuhan 514 kabupaten/kota di wilayah Indonesia.

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi

barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) Inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang **(***Galloping Inflation***)** Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat **(***High Inflation***)** kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan, dan (iv) Hiperinflasi *(Hyper Inflation)* Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia Tingkat Inflasi Kabupaten Sumba Barat Daya pada Desember Tahun 2024 adalah sebesar 1,66% dengan kategori ringan sebagaiman dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. 9 Tingkat Inflasi Kabupaten Sumba Barat Daya

No	Uraian	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	3,54	3,27	1,66	(1,61)
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	6,65	2,42	2,35	(0,07)
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	5,51	2,61	3,05	0,44

Sumber Dokumen: BPS Provinsi NTT dan Kab.Sumba Barat Daya

Pada bulanDesember 2024, di Kota Waingapu mengalami Inflasi MtM sebesar 0,16 persen sedangkan untuk Inflasi YoY Desember 2024, Kota Waingapu sebesar 1,66 persen. Inflasi di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2023 mengacu pada tingkat inflasi di Kota Waingapu sebesar 1,66 persen.

Data tersebut diatas menunjukkan tren kisaran laju inflasi di Kabupaten Sumba Barat Daya berfluktuasi selama kurun waktu tiga tahun terakhir, laju inflasi tertingi terjadi di tahun 2022 dimana tingkat inflasi saat itu sebesar 3,54% yang kemudian menurun menjadi 3,27% atau sebesar 0,27% pada Tahun 2023 selanjutnya menurun sesesar 1,61% pada tahun 2024, Tingkat inflasi ini berada pada kategori Inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah.

2.1.7. Struktur Perekonomian Kabupaten Sumba Barat Daya

Struktur perekonomian Kabupaten Sumba Barat Daya dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. 10 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumba Brat Daya Tahun 2021-2024

(dalam milyar rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	1.667.90	1.794,86	1.921,44
2	Pertambangan dan Penggalian	39.79	42,71	45,13
3	Industri Pengolahan	32.03	36,35	42,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.71	1,96	2,22
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0.26	0,27	0,30
6	Konstruksi	180.07	203,47	217,70
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	591.87	663,05	742,98
8	Transportasi dan Pergudangan	103.97	130,67	163,19
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.49	1,70	2,15
10	Informasi dan Komunikasi	372.85	390,48	416,88
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	94.41	97,54	103,19
12	*Real Estate*	62.51	69,19	78,24
13	Jasa Perusahaan	0.17	0,18	0,20
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.	588.00	614,03	702,89
15	Jasa Pendidikan	312.10	319,20	339,52
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	97.07	105,94	117,82
17	Jasa Lainnya	30.61	32,53	34,00
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	4.176,82	4.504,12	4.929,85

Sumber Dokumen: BPS Kab.Sumba Barat Daya

Adapun sektor usaha yang berkontribusi paling signifikan bagi perekonomian Kabupaten Sumba Barat Daya pada 2024 adalah Pertanian,

Kehutanan, dan Perikanan dengan jumlah kontribusi sebesar 38,99% terhadap total PDRB.

2.2. Kebijakan Keuangan

Terbentuknya Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pemekaran wilayah Kabupaten Sumba Barat membawa konsekuensi bahwa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai kewajiban menyelenggarakan segala kewenangannya yang diberikan untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan memberikan pelayanan yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan itu diperlukan kemampuan pendanaan dari pemerintah daerah yang berujung kepada upaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024 telah menyusun Peraturan Daerah Sumba Barat Daya Nomor 04 tanggal 29 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 serta Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Desember 2023 dan Peraturan Daerah Sumba Barat Daya Nomor 04 tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanggal 23 Agustus Tahun 2024 serta Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 tanggal 03 Oktober 2024. Perbedaan antara pendapatan dengan belanja menyebabkan timbulnya surplus atau defisit. Pendapatan Tahun Anggaran 2024 diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain – Lain Pendapatan Yang Sah.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mengarahkan pembangunan daerah dengan menitik beratkan pada arah kebijakan Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sektor pariwisata. Pada sektor-sektor kunci yang memiliki *multiplier effect* serta kaitan antar sektor baik arah hulu maupun hilir yang akan dilakukan secara bertahap, berkelanjutan dan terintegrasi antar sektor sebagai upaya untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan jangka panjang. Disamping itu memperhatikan skala prioritas, kebutuhan masyarakat/daerah, kemampuan fiskal dan aparatur pelaksana menjadi pertimbangan dalam menyusun program dan kegiatan.

Program pembangunan daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang dirancang memiliki kaitan baik secara langsung maupun melalui sektor-sektor pendukung dengan program nasional dan program propinsi NTT, sehingga hal ini menimbulkan sinkronisasi program/kegiatan antar jenjang Pemerintahan yang berbeda sebagai wujud dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Kebijakan Pendapatan Daerah berdasarkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan untuk memenuhi prioritas pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya sesuai target RPJMD yang telah ditetapkan dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah.

Mengingat keterbatasan-keterbatasan sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Daerah menempuh kebijakan anggaran untuk mengalokasikan dana pada program-program dan kegiatan prioritas dan mendesak serta memiliki dampak baik

secara langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, di samping itu Pemerintah akan terus berupaya untuk memperoleh bantuan program maupun dana baik melalui Pemerintah Pusat maupun menjalin kerjasama dengan lembaga donor/LSM yang tidak mengikat dan membebani APBD.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam pengukuran kinerja ini dilakukan dengan suatu metode atau proses yang meliputi yaitu:

a. Penetapan Indikator Kinerja

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi yaitu:

a) Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.

b) Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.

c) Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

b. Perjanjian Kinerja

Langkah selanjutnya setelah penetapan indikator kinerja adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) kinerja yang diinginkan, sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2024 atau melalui penyelarasan RKT dan PK Tahun Anggaran 2024 dengan Perubahan Anggaran Tahun 2024.

c. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasi kinerja kegiatan, program dan sasaran melalui media berupa Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dan Formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran).

Rumus perhitungan persentase pencapaian kinerja yaitu:

$$\textit{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Rencana/Target}} \times 100\ \%$$

Pencapaian IKK ini merupakan perolehan nilai SAKIP yang merupakan jumlah dari nilai hasil akhir penjumlahan komponen-komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja memberikan gambaran tingkat APIP dengan kategori predikat sebagai berikut.

Tabel 2.3. 1 Kategori predikat Tingkat APIP

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (Memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
> 0 –30	D	Sangat Kurang

d. Uraian Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya oleh Evaluator dari Kemenpan RB Republik Indonesia mendapatkan penilaian sebesar 50,05 dengan predikat “CC”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabiIitas kinerja “Cukup (Memadai)”, yaitu yaitu implementasi SAKIP sudah cukup baik namun masih perlu banyak perbaikan khususnya pada unit kerja.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA APBD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja

Realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2024 senilai Rp1.179.410.033.852,32 atau 99,07% dibandingkan dengan anggarannya senilai Rp1.190.500.040.786,00 dan meningkat sebesar 0,53% atau Rp6.182.008.068,33 dibandingkan tahun 2023.

Realisasi belanja secara keseluruhan pada tahun 2024 senilai Rp1.147.575.940.833,00 atau 93,06% dibandingkan dengan anggarannya senilai Rp1.233.200.263.844,00 dan mengalami penurunan sebesar 0,32% atau Rp3.706.266.780,00 dibandingkan tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut,

- Belanja Operasi dianggarkan senilai Rp819.248.566.989,00 terealisasi senilai Rp741.753.087.764,00 atau 90,54% dari anggaran;
- Belanja Modal dianggarkan senilai Rp165.144.905.371,00 terealisasi senilai Rp160.632.937.633,00 atau 97,27% dari anggaran;
- Belanja Tidak Terduga dianggarkan senilai Rp3.616.875.772,00 terealisasi senilai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran; dan
- Belanja Transfer dianggarkan senilai Rp245.189.915.712,00 terealisasi senilai Rp245.189.915.436,00 atau 100,00% dari Anggaran.

Realisasi pembiayaan pada tahun 2024 senilai Rp42.842.835.929,10 atau 100,33% dibandingkan dengan anggarannya senilai Rp42.700.223.058,00 dan mengalami kenaikan sebesar 30,80% atau Rp10.088.431.041,17 dibandingkan tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut.

- Penerimaan pembiayaan merupakan penerimaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2023 yang dianggarkan senilai Rp54.700.223.058,00 terealisasi senilai Rp54.842.835.929,10 atau 100,26% dari anggaran; dan
- Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2024 berupa penyertaan modal daerah kepada PT BPD NTT senilai Rp12.000.000.000,00 terealisasi senilai Rp12.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya masih dihadapkan dengan sejumlah hambatan dan kendala dalam pengelolaan dan pencapaian kinerja pengelolaan Tahun Anggaran 2024 antara lain adalah:

1. Masih kurangnya kualitas dan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan regulasi yang terus berkembang yang menuntut adanya penguasaan terhadap informasi teknologi;

2. Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pejabat Pengelolaan Keuangan di tingkat Perangkat Daerah belum optimal sehingga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
3. Kemampuan atau kapasitas kelembagaan dan aparat pemerintah dalam menjalankan berbagai tugas dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya masih belum optimal.

3.3 Mandatory spending dalam Postur APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4);
2. Alokasi anggaran fungsi kesehatan sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan
3. Alokasi anggaran fungsi infrastruktur sebesar 40% dari total Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Alokasi anggaran pengawasan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dengan klasifikasi yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah sebagai berikut.
   - Sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 paling sedikit sebesar 1,00% dari total belanja daerah;
   - Diatas Rp1.000.000.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 paling sedikit sebesar 0,75% dari total belanja daerah;
   - Diatas Rp2.000.000.000.000,00 paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah
5. Alokasi anggaran penanganan dampak inflasi dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, dapat dilakukan intervensi oleh pemerintah daerah dalam hal.
6. Alokasi anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) bagi pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Transfer Umum yang diterima oleh Pemerindah daerah.

3.3.1 *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyatakan bahwa salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah Daerah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024 senilai Rp366.534.203.762,00 dari atau 29,72%. Rincian alokasi anggaran fungsi pendidikan Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.3. 1 Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD INDUK Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)
1	a. Belanja pada Dinas Pendidikan	354.901.681.640,00	366.534.203.762,00
	1) Belanja Operasi	323.135.936.695,00	329.347.320.932,00
	a. Belanja Pegawai	171.062.382.638,00	178.521.412.760,00
	b. Belanja barang dan jasa	110.645.540.057,00	103.491.398.172,00
	c. Belanja hibah	41.428.014.000,00	47.334.510.000,00
	d. Belanja bantuan sosial	0,00	0,00
	2) Belanja Modal	31.765.744.945,00	37.186.882.830,00
	3) Belanja Transfer	0,00	0,00
	b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan antara lain:	0,00	0,00
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	354.901.681.640,00	366.534.203.762,00
3	Total Belanja Daerah	1.188.002.270.999,00	1.233.200.263.844,00
4	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	29,87%	29,72%

3.3.2 *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Besaran alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN. Tujuan dari mandatory spending fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya

Alokasi anggaran fungsi kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024 senilai Rp115.719.433.800,00 dari total anggaran diluar

belanja Gaji senilai Rp929.561.670.971,00 atau 12,45%. Rincian Alokasi anggaran fungsi kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3. 2 Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD INDUK (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)
1	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	158.518.508.150,00	115.719.433.800,00
	1) Belanja Operasi	139.752.698.476,00	100.721.605.321,00
	a. Belanja Pegawai	48.904.091.988,00	48.852.116.988,00
	b. Belanja barang dan jasa	90.848.606.488,00	51.869.488.333,00
	c. Belanja hibah	0,00	0,00
	d. Belanja bantuan sosial	0,00	0,00
	2) Belanja Modal	18.765.809.674,00	14.997.828.479,00
	b. Belanja di luar Dinas Kesehatan	0,00	0,00
2	Anggaran Kesehatan (a+b)	158.518.508.150,00	115.719.433.800,00
3	Total Belanja Daerah	1.188.002.270.999,00	1.233.200.263.844,00
4	Gaji ASN	297.739.650.392,00	303.638.592.873,00
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	890.262.620.607,00	929.561.670.971,00
6	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	17,81%	12,45%

3.3.3 *Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 147 ayat (1) menjelaskan belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang beriorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

Alokasi anggaran fungsi infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2023 senilai Rp324.193.032.614,00 dari total anggaran belanja dalam APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa senilai Rp988.010.348.198,00 atau 32,81%. Rincian Alokasi anggaran fungsi infrastruktur Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.3. 3 Alokasi Anggaran Fungsi Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD INDUK (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)
1	a. Belanja Modal	153.157.938.039,00	165.144.905.371,00

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD INDUK (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)
	1) Tanah	0,00	0,00
	2) Peralatan dan Mesin	29.718.130.614,00	29.332.368.704,00
	3) Bangunan dan Gedung	31.826.291.985,00	37.446.323.354,00
	4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	90.054.629.240,00	95.174.430.838,00
	5) Aset Tetap Lainnya	1.558.886.200,00	3.191.782.475,00
	6) Aset Lainnya	0,00	0,00
	b. Belanja Pemeliharaan	7.224.791.275,00	7.411.353.123,00
2	a. Belanja Hibah	64.481.726.392,00	75.171.437.120,00
	b. Belanja Bantuan Sosial	17.701.665.000,00	18.651.165.000,00
	c. Belanja Bantuan Keuangan	57.814.172.000,00	57.814.172.000,00
3	**Jumlah Infrastruktur Daerah (1+2)**	**300.380.292.706,00**	**324.193.032.614,00**
4	**Belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa**	**947.027.405.353,00**	**988.010.348.198,00**
5	**Persentase Belanja Infrastruktur**	**31,72%**	**32,81%**

3.3.4 *Mandatory Spending* Fungsi Pengawasan

Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan. Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah.

Alokasi anggaran fungsi pengawasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024 senilai Rp4.031.172.422,00 dari total anggaran belanja senilai Rp1.233.200.263.844,00 atau 0,33%. Rincian Alokasi anggaran pengawasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3. 4 Alokasi Anggaran Fungsi Pengawasan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD INDUK (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)
1	**a. Belanja pada Inspektorat**	**3.696.429.927,00**	**4.031.172.422,00**
	1) Belanja Operasi	3.684.988.927,00	3.974.331.422,00
	a. Belanja Pegawai	2.313.053.747,00	2.602.166.242
	b. Belanja barang dan jasa	1.371.935.180,00	1.372.165.180
	c. Belanja hibah	0,00	0,00

			d.	Belanja bantuan sosial	0,00	0,00
		2)		Belanja Modal	11.441.000,00	56.841.000
2	**Anggaran Pengawasan**				**3.696.429.927,00**	**4.031.172.422,00**
3	**Total Belanja Daerah**				**1.188.002.270.999,00**	**1.233.200.263.844,00**
4	**Rasio anggaran pengawasan (2:5) x 100%**				**0,31%**	**0,33%**

3.3.5 *Mandatory Spending* untuk Penanganan Dampak Inflasi

Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, dapat dilakukan intervensi oleh pemerintah daerah dalam hal:

- Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Alokasi anggaran penanganan dampak inflasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024 senilai Rp452.036.350,00 dari total anggaran belanja senilai Rp1.233.200.263.844,00 atau 0,037%. Rincian Alokasi anggaran pada tahun 2024 untuk mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah dan pengendalian barang dan jasa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3. 5 Alokasi Anggaran Penanganan Dampak Inflasi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA SUB KEGIATAN	APBD INDUK (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)
1	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	105.082.650,00	86.682.650,00
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	364.573.900,00	365.353.700,00
3	**Anggaran Penanganan Dampak inflasi**	**469.656.550,00**	**452.036.350,00**
4	**Total Belanja Daerah**	**1.188.002.270.999,00**	**1.233.200.263.844,00**
5	**Persentase Anggaran penanganan dampak inflasi (3:5) x 100%**	**0,040%**	**0,037%**

3.3.6 *Mandatory Spending* untuk Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) bagi pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2024 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan

Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi Dana Desa pada tahun Anggaran 2024 yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya senilai Rp57.814.172.000,00 untuk diberikan kepada 173 desa dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Kabupaten Sumba Barat Daya, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah basis akrual dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah:

- Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
- Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam penyusunan Neraca.

Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

a) Definisi

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

b) Pengakuan

- Pendapatan-LRA diakui pada saat:
  - Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
  - Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
  - Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
  - Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar Negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
  - Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

c) Pengukuran

- Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- Pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.
- Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan di konversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar menggunakan (kurs tengah Bank Sentral) pada saat terjadi Pendapatan-LRA.

d) Penyajian dan Pengungkapan

- Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
  - Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
  - Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
  - Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat rekening escrow;
  - Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan

daerah; dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

a) Definisi

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

b) Pengakuan

- Pendapatan-LO diakui pada saat:
  - Timbulnya hak atas pendapatan *(earned)* atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi *(realized)*.
  - Pengakuan pendapatan-LO pada Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas, Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
  - Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
  - Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assement dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan).
  - Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.
- Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
  - Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
  - Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan Keuangan
- Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Peraturan Presiden/Peraturan Menteri

Keuangan/Pereturan Gubernur) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

- Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
- Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu, Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

c) Pengakuan

- Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

d) Penyajian dan Pengungkapan

- Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
  - Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
  - Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
  - Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
  - Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Kebijakan Akuntansi Belanja

a) Definisi

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

- Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, serta Belanja Transfer.
  - Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah, dan Belanja bantuan sosial.
    - Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
    - Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
    - Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga *(interest)* yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang *(principal outstanding)* termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
    - Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
    - Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
    - Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
  - Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
  - Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang

sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

- Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

- Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
  - Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
  - Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.

b) Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan Uang Persesiaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat terbitnya SP2D GU/GU Nihil/TU Nihil.
- Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah dan kebijakan akuntansi badan layanan umum daerah.

c) Pengukuran

- Pengukuran belanja berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah atau pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah (SP2D) dan diukur berdasarkan asas bruto.

d) Penyajian dan Pengungkapan

- Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
  - Belanja Operasi;
  - Belanja Modal;
  - Belanja Tak Terduga; dan
  - Transfer

  dan dijelaskan dalam CaLK
- Jika terdapat realisasi anggaran belanja modal yang tidak memenuhi kriteria belanja modal, maka diungkapkan dalam CaLK dan diakui sebagai beban

operasional tahun berjalan.

- Jika terdapat realisasi anggaran belanja barang dan jasa yang asetnya memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap dicatat sebagai aset tetap, diungkapkan dalam CaLK dan tidak diakui sebagai beban operasional.
- Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

Kebijakan Akuntansi Beban

a) Definisi:

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Opeasional (LO).
- Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
  - Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
  - Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
  - Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
  - Beban Transfer dalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan Pemerintahan Daerah

kepada suatu entitas pelaporan lainnya (Misalnya Bantuan Keuangan ke Partai Politik) yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

- Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.
- Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
- Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

- Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang- ulang, dankejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

b) Pengakuan

- Beban diakui pada:
  - Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Saat terjadinya konsumsi aset;
  - Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

- Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

- Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
  - Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan, beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
  - Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
  - Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

- Pengakuan beban pada periode berjalan di dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

- Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
  - Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
  - Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
  - Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode

akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

- Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

c) Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

d) Penyajian Dan Pengungkapan

- Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Sesuai dengan klasifikasi ekonomi, Beban terdiri dari:
  - Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
  - Beban Transfer
  - Beban Non Operasional
  - Beban Luar Biasa
  - Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
- Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
  - Pengeluaran beban tahun berkenaan;
  - Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
  - Akun luar biasa disajikan terpisah dari akun-akun lainnya dalam Laporan

Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Nonoperasional.

- Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.
- Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Kebijakan Akuntansi Transfer

a) Definisi

- Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.
- Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
- Piutang Transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang Transfer dirinci menurut sumbernya.
- Uang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya.
- Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Transfer diklasifikasikan menurut suber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.
- Klasifikasi transfer menurut sumber dan entitas penerima dalam Bagan Akun Standar.

b) Pengakuan

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
  - Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
  - Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
- Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

- Untuk kepentingan penyajian transfer keuar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

c) Pengukuran

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

- Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

- Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

d) Penilaian

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang Pemerintah Daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak Pemerintah Daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.
- Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.
- Transfer Masuk dalam bentuk hibah mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- Transfer Keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan.

e) Pengungkapan

- Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer adalah sebagai berikut.
  - Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
  - Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
  - Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan Realisasi pendapatan transfer pada Laporan

Operasional.

- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

- Pengungkapkan atas transfer keluar dan beban transfer adalah sebagai berikut.
  - Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
  - Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
  - Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a) Definisi

- Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- Istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi pembiayaan dengan pengertian:
  - Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenalkan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
  - Basis Kas adalah basis yang mengakui pengaruh transaksi dan peritiwa lainnya pada saat kas ataau setara kas diterima atau dibayarkan.
  - Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
  - Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang
  - Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
  - Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

- Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:
  - Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara laain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
  - Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

b) Pengakuan

- Penerimaan pembiayaan diakui padaa saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.

c) Pengukuran

- Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkaan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
- Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembayaran

d) Akuntansi pembiayaan netto

- Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan netto.
- Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Sisa lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

e) Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

- Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
- Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada pengeluaran pembiayaan.
- Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada penerimaan pembiayaan.
- Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
- Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

f) Transaksi dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

g) Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenan;
- Penjelasan landasan hukum berkenan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- Informasi yang dianggap perlu.

Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

a) Definisi

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga

termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

b) Pengakuan

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
- Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah daerah.

c) Pengukuran

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

d) Penyajian dan Pengungkapan Pengungkapan

- Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
- Mutasi antar akun-akun kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transistoris pada Laporan Arus Kas.

Kebijakan Akuntansi Piutang

a) Definisi

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

b) Pengakuan

- Piutang diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
  - Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
  - Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi
- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
  - Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
  - Jumlah piutang dapat diukur;

c) Pengukuran

- Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut.
  - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
  - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
  - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut.

1. Pemberian pinjaman

   Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2. Penjualan

   Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3. Kemitraan

   Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4. Pemberian fasilitas/jasa

   Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

d) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
   a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
   b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
   c. Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan

setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d. Kualitas Macet sebesar 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

   a. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;

   b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

   c. Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

   d. Kualitas Macet sebesar 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

   a. 0,5% dari Piutang dengan kualitas lancar;

   b. 10% dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

   c. 50% dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

   d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

4. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.

5. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

6. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibatrestrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

e) Pemberhentian Pengakuan Piutang

- Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

- Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapusbukuan (*write-off*) dan penghapustagihan (*writedown*).
- Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang diperlakukan secara terpisah.
- Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapustagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan).

f) Pengungkapan

- Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
  1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
  2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
  3. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
  4. Jaminan atau sita jaminan jika ada.
  5. Informasi lainnya yang dianggap penting.

Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

a) Definisi

1. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
   - Investasi diklasifikasi menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancer.
   - Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagaai berikut.
   - Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
   - Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.

- Investasi jangka pendek biasanya beresiko rendah.
- Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek.

b) Pengakuan

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutaang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

- Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secaa memadai/andal (reliabel), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

c) Pengukuran Dan Penilaian

- Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasarnya dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut.
  - Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga trasaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
  - Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur berdasarkankan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
  - Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut.
  - Metode biaya, Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
  - Metode ekuitas, Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah

atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas invetasi yang tidak dapat diterima kembali.

- Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya *(aging schedule)*.
- Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut.

Tabel 4.3. 1 Persentase Penyisihan Investasi

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1.	Jatuh tempo pada periode 1-2 tahun	5 % - 10%
2.	Jatuh tempo pada periode 2-3 tahun	11% - 25%
3.	Jatuh tempo pada periode 3-4 tahun	26% - 60%
4.	Jatuh tempo pada periode diatas 4 tahun	61% -100%

- Khusus terhadap pengembalian dana bergulir kurang dari 4 tahun maka persentase penyisihannya setelah jatuh tempo tahun terakhir sebesar 100%.
- Penggunaan metode-metode tersebut diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.
  - Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
  - Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
  - Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
  - Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
  - Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
  - Kemampuan untuk menetapkan dan menggantikan dewan direksi

perusahaan investee;

- kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

a) Definisi

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

b) Pengakuan

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutaang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

- Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secaa memadai/andal *(reliabel*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

c) Pengukuran dan Penilaian

- Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenan.
- Investasi jangka panjang non permanen:
  - Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
  - Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
  - Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal

pada proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset Pemerintah Daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

- Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Kebijakan Akuntansi Persediaan

a) Definisi

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa:
  - Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
  - Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
  - Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
  - Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.
- Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
- Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

b) Pengakuan

- Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan saat telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya

berpindah.

- Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

c) Pengukuran

- Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
- Persediaan disajikan sebesar:
  - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
  - Harga pokok produk apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
  - Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/sitaan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
- Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar

d) Beban Persediaan

- Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (used of goods).
- Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

e) Persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.Pengungkapan

- Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
- Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
  - Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada

masyarakat; dan

- Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

a) Definisi

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- Masa manfaat adalah:
  - Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
  - Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
- Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/ efisiensi dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan Aset Tetap yang menambah kuantitas dan atau volume dari aset tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.
- Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- Reklasifikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
- Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
- Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

- Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
- Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
- Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
- Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
- Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
- Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
- Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :
    - Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
    - Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
    - Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
    - Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
    - Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
    - Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

b) Pengakuan Aset Tetap

- Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.
  - Berwujud;
  - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang disamakan.
- Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
- Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
- Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

c) Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

- Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
- Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
- Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin adalah nilai per unitnya senilai Rp500.000,00

d) Pengukuran Aset Tetap

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 36 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan
- Pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

e) Komponen Biaya

- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
  - Biaya perencanaan;

- Biaya lelang;
- Biaya persiapan tempat;
- Biaya pengiriman awal *(initial delivery)* dan biaya simpan dan bongkar muat *(handling cost);*
- Biaya pemasangan (*instalation cost*);
- Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- Biaya konstruksi.

- Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau Biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
- Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
- Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
- Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

f) Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

g) Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

h) Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

i) Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

j) Pertukaran Aset *(Exchange of Assets)*

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang.

Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

k) Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah, tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah, Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran, Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

l) Aset Tetap Lainnya

Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan atau non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan ikan dan tenaman. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh entitas.

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan atas Aset Tetap Lainnya diatur dalam kebijakan terkait penyusutan. Aset Tetap Lainnya berupa, hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, malainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

m) Pengeluaran Setelah Perolehan *(Subsequent Expenditures)*

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan, Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemerliharaan rutin/berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap. Nilai satuan

minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah seperti pada lampiran 1 pada Kebijakan Akuntansi Akun.

n) Pengukuran Berikutnya *(Subsequent Measurement)* Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

o) Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap yang dimaksud adalah seperti pada lampiran 2 pada Kebijakan Akuntansi Akun. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaituTanah, konstruksi dalam pengerjaan buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yangtelah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

p) Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

q) Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

r) Pengungkapan Aset Tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut.

- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - Penambahan;
  - Pelepasan;
  - Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
  - Mutasi aset tetap lainnya
- Informasi penyusutan, meliputi:
  - Nilai penyusutan;
  - Metode penyusutan yang digunakan;
  - Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
  - Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
  - Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
  - Tanggal efektif penilaian kembali;
  - Jika ada, nama penilai independen;
- Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- Nilai tercatat setiap jenis aset tetap. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

s) Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

- Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi

padaumumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

- Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

t) Kontrak Konstruksi

- Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
- Kontrak konstruksi dapat meliputi:
  - Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
  - Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
  - Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
  - Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
- Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi
- Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
- Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:
  - Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
  - Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
  - Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.
- Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
  - Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula;
  - Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

u) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
  - Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
  - Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
  - Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserah terimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

v) Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

- Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
  - Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
  - Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
  - Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
  - Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
  - Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
  - Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan
  - Biaya penyewaaan sarana dan prasarana
- Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
- Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
  - Asuransi;
  - Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

- Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
  - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  - Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
  - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanan kontrak konstruksi.
- Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.
- Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
- Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
- Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
- Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeur* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
- Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman.
- Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
- Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

w) Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
- Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- Uang muka kerja yang diberikan; dan

- Retensi.

Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

a) Definisi

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasfikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
4. Aset Tidak Berwujud; dan
5. Aset Lain-lain.

b) Klasifikasi Aset Lainnya

Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut.

Tabel 4.3. 2 Klasifikasi Aset Lainnya

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Pinjam Pakai
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	*Goodwill*
	Lisensi dan Franchise
	Hak Cipta
	Hak Paten
	Software
	Kajian
	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-lain

c) Pengakuan

- Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
  - Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
  - Diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
- Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan

dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Aset lainnya yang berkurang melalui penenerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d) Pengukuran

Atas sebagian aset tetap milik SKPD yang dikerjasamakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan perjanjian kerjasama dalam bentuk lainnya, tetap dicatat sebagai satu kesatuan aset tetap di SKPD, dan kerjasama aset tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Contoh, penggunaan sebagian bangunan untuk ATM, kantin, dan lain- lain.

e) Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- Besaran dan rincian aset lainnya;
- Kebijakan amortisasi ATB;
- Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT, dan BTO); dan
- Informasi lainnya yang penting.

Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

a) Definisi

- Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
  - digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau:
  - dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
- Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

b) Pengakuan

- Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
  - besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
  - biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
- Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
- Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
- Pemerintah daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.

c) Pengukuran

- Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
- Pengukuran properti investasi dapat dilakukan saat pengakuan awal dan setelah pengakuan awal.
- Properti investasi saat pengakuan awal;
  - Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
  - Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
  - Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
  - Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
  - Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara

langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.

- Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

- Properti investasi saat penilaian awal;
  - Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
  - Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.
  - Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
  - Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
  - Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
  - Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/penurunan dalam ekuitas.

d) Penyajian dan Pengungkapan

- Penyajian properti investasi:
  - Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah.
  - Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
- Pengungkapan properti investasi dalam catatan atas laporan keuangan meliputi:
  - Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
  - Metode penyusutan yang digunakan;
  - Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
  - Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.
  - Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil

revaluasi properti investasi;

- Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari properti investasi;
- Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari properti investasi.

Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a) Definisi

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur
- Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur
- Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.
- Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
- Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang

pemerintah

- Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.

b) Pengakuan

- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- Kewajiban diakui pada saat pinjaman diterima dan/ atau pada saat kewajiban timbul
- Kewajiban dapat timbul dari:
  - Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions)
  - Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
  - Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
  - Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbul balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.
- Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non-Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.
- Utang perhitungan fihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar

hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

- Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- Utang Beban, diakui pada saat:
  - Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
  - Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
  - Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
  - Barang yang dibeli sudah diterima, atau
  - Jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
  - Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
- Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

c) Pengukuran

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang

pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

- Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
- Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
- Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
- Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

d) Penyajian dan Pengungkapan

- Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang- kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut.
  - Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberipinjaman;
  - Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah dan jatuh temponya;
  - Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
  - Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
  - Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
  - Pengurangan pinjaman;
  - Modifikasi persyaratan utang;
  - Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
  - Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
  - Pengurangannilai jatuh tempo pinjaman; dan
  - Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
  - Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.

- Biaya pinjaman:
  - Perlakuan biaya pinjaman;
  - Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

Kebijakan Akuntansi Ekuitas

a) Definisi

Akun ini terdiri dari:

1. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Peristiwa Luar Biasa, Dan Peristiwa Setelah Periode Pelaporan (*Subsequent Event*)

- Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan- aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.
- Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

a) Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

- Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang

berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

- Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
  - Kesalahan tidak berulang; dan
  - Kesalahan berulang dan sistemik.
- Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
  - Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
  - Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
- Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
- Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun beban.
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- Contoh koreksi kesalahan belanja:
  - Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain-LRA.

- Yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Pendapatan lain-lain-LRA.
- Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas.
- Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas.

- Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:
  - Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
  - Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
- Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- Contoh koreksi kesalahan beban:
  - Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah Pendapatan lain-lain- LO.
  - Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Beban Lain-Lain-LO dan mengurangi saldo kas.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA:
  - Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan daerah

yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

- Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi Pemerintah Daerah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

- Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LO:
  - Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
  - Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan Dana Alokasi Umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi Pemerintah Daerah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:
  - Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
  - Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu Pemerintah Daerah mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemerintah Daerah Lain dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:
  - Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
  - Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi

kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

- Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:
  - Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
  - Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
- Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah.
- Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada poin 14, 15, 17 dan 21 tersebut diatas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
- Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada poin 14, 19, dan 23 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
- Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada pos-pos neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
- Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.
- Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada poin 11 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
- Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

b) Perubahan Kebijakan Akuntansi

- Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
- Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, metode dan estimasi, merupakan

contoh perubahan kebijakan akuntansi.

- Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
- Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi:
  - Pemerintah Daerah mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAP tersebut, jika ada; dan
  - Jika pemerintah daerah mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAP yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut, atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka pemerintah daerah menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif.
- Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut.
  - Adopsi suatu Kebijakan Akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
  - Adopsi suatu Kebijakan Akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
- Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka pemerintah daerah menyesuaikan saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal dan jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah- olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya.
- Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
- Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c) Peristiwa Luar Biasa

- Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
- Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau

tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

- Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
- Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
- Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
- Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut.
  - Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
  - Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
  - Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
  - Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
- Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d) Peristiwa Setelah Periode Pelaporan (*Subsequent Event*)

- Peristiwa setelah periode pelaporan (*subsequent event*) adalah peristiwa, baik yang menguntungkan (*favourable*) atau tidak menguntungkan (*unfavourable*), yang terjadi di antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Dua jenis peristiwa dapat diidentifikasikan:
  - Peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan (peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian); dan
  - Peristiwa yang mengidentifikasikan timbulnya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian).

- Pemerintah daerah melakukan penyesuaian jumlah pengakuan dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian.
- Berikut ini adalah contoh dari peristiwa setelah periode pelaporan yang mensyaratkan Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang sebelumnya tidak diakui:
  - Penyelesaian kasus pengadilan setelah periode pelaporan yang memutuskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban kini pada akhir periode pelaporan;
  - Penerimaan informasi setelah periode pelaporan mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada akhir periode pelaporan, atau perlunya penyesuaian atas jumlah yang sebelumnya telah diakui sebagai rugi penurunan nilai;
  - Penentuan setelah periode pelaporan atas kos pemerolehan aset yang dibeli, atau hasil penjualan aset yang dijual sebelum akhir periode pelaporan; dan
  - Penemuan kecurangan atau kesalahan yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak benar.
- Pemerintah daerah tidak menyesuaikan jumlah pengakuan dalam laporan keuangannya untuk mencerminkan peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian.
- Berikut ini adalah contoh dari peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian pemerintah daerah yaitu penurunan nilai pasar investasi di antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan terbit. Penurunan nilai pasar tersebut normalnya tidak terkait dengan kondisi investasi tersebut pada akhir periode pelaporan, namun mencerminkan keadaan yang timbul setelahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerahtidak menyesuaikan jumlah pengakuan investasi tersebut dalam laporan keuangannya.
- Jika peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian adalah material, maka tidak diungkapkannya hal tersebut akan mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengungkapkan informasi berikut untuk setiap kelompok peristiwa tersebut:
  - Sifat peristiwa; dan
  - Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.
- Berikut ini adalah contoh peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian yang umumnya dibuat pengungkapannya diantaranya:
  - Pembelian aset yang signifikan, aset tidak lancar yang dimilik untuk dijual dan pelepasan aset lain, atau pengambilalihan aset yang tidak signifikan oleh pihak di luar pemerintah daerah;

- Perubahan tarif pajak atau peraturan perpajakan yang diberlakukan atau diumumkan setelah periode pelaporan dan memiliki pengaruh signifikan pada aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan; dan
- Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang sernata-mata timbul karena peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan.

BAB V
PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas serta Laporan Perubahan Ekuitas. Penjelasan masing-masing laporan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Penjelasan masing-masing akun LRA sebagai berikut.

5.1.1 Pendapatan - LRA

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp1.190.500.040.786,00	**Rp1.179.410.033.852,32**	**Rp1.173.228.025.783,99**

Anggaran pendapatan Tahun 2024 senilai Rp1.190.500.040.786,00 tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024, yang terealisasi senilai Rp1.179.410.033.852,32 atau 99,07% dari target yang ditetapkan. Pendapatan LRA pada TA 2024 mengalami peningkatan senilai Rp6.182.008.068,33 atau 0,53% dari realisasi pendapatan TA 2023 senilai Rp1.173.228.025.783,99. Rincian realisasi pendapatan per jenis pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1. 1 Realisasi Pendapatan TA 2024 dan TA 2023

Jenis Pendapatan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LRA	41.865.479.936,00	43.651.261.637,32	104,27	35.304.169.687,99
Pendapatan Transfer – LRA	1.127.034.959.062,00	1.118.099.345.496,00	99,21	1.117.607.489.545,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LRA	21.599.601.788,00	17.659.426.719,00	81,76	20.316.366.551,00
JUMLAH	**1.190.500.040.786,00**	**1.179.410.033.852,32**	**99,07**	**1.173.228.025.783,99**

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah secara total pada Tahun 2024, target pendapatan dapat direalisasikan sebesar 99,07%. Realisasi PAD senilai Rp43.651.261.637,32 atau 104,27% dari anggaran, mengalami kenaikan senilai Rp8.347.091.949,33 atau 23,64%. Hal ini disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terealisasi senilai Rp1.118.099.345.496,00 atau 99,21% dari anggaran, dan mengalami kenaikan senilai Rp491.855.951,00 atau 0,04%. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan yang Sah terealisasi senilai Rp17.659.426.719,00 atau 81,76% dari anggaran, mengalami penurunan senilai Rp2.656.939.832,00 atau 13,08%.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LRA

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp41.865.479.936,00	Rp43.651.261.637,32	Rp35.304.169.687,99

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 senilai Rp43.651.261.637,32 mengalami kenaikan sebesar Rp8.347.091.949,33 atau 23,64% dibanding Tahun 2023 senilai Rp35.304.169.687,99. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan TA 2023 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1. 2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan TA 2023

URAIAN PENDAPATAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	21.187.692.697,00	22.961.001.653,00	108,37	15.230.415.543,51
Pendapatan Retribusi Daerah	13.492.430.500,00	11.644.335.136,00	86,30	8.684.969.797,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.953.742.399,00	3.944.963.310,00	99,78	7.742.306.863,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.231.614.340,00	5.100.961.538,32	157,85	3.646.477.484,48
JUMLAH	**41.865.479.936,00**	**43.651.261.637,32**	**104,27**	**35.304.169.687,99**

Berdasarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2024, target pendapatan dapat direalisasikan sebesar 104,27%. Namun, jika dirinci per jenis pendapatannya dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut.

1. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 senilai Rp22.961.001.653,00 atau sebesar 108,37% dari anggaran, mengalami kenaikan senilai Rp7.730.586.109,49 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp15.230.415.543,51;
2. Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi senilai Rp11.644.335.136,00 atau sebesar 86,30% dari anggaran, mengalami kenaikan senilai Rp2.959.365.339,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp8.684.969.797,00;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi senilai Rp3.944.963.310,00 atau 99,78% dari anggaran, mengalami penurunan senilai Rp3.797.343.553,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp7.742.306.863,00; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi senilai Rp5.100.961.538,32 atau 157,85% dari anggaran, nilai realisasi mengalami kenaikan senilai Rp1.454.484.053,84 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp3.646.477.484,48.

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp21.187.692.697,00	**Rp22.961.001.653,00**	**Rp15.230.415.543,51**

Pendapatan Pajak Daerah terealisasi senilai Rp22.961.001.653,00 dari target penerimaan Pajak Daerah TA 2024 senilai Rp21.187.692.697,00 atau 108,37% dan meningkat senilai Rp7.730.586.109,49 dari realisasi TA 2023 senilai Rp15.230.415.543,51. Pendapatan pajak dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah atas sepuluh objek pajak dengan nilai realisasi sebagai berikut.

Tabel 5.1. 3 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah TA 2024 dan TA 2023

URAIAN PENDAPATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pajak Hotel	4.521.885.693,00	6.438.451.018,00	142,38	1.155.326.039,00
Pajak Restoran	2.897.480.577,00	4.479.588.996,00	154,60	2.141.899.878,00
Pajak Hiburan	273.451.299,00	261.644.600,00	95,68	0,00
Pajak Reklame	200.000.000,00	245.541.716,00	122,77	265.642.618,00
Pajak Penerangan Jalan	3.093.088.807,00	4.251.187.966,00	137,44	3.359.407.387,00
Pajak Parkir	15.000.000,00	891.300,00	5,94	4.246.536,00
Pajak Air Tanah	30.000.000,00	24.568.217,00	81,89	32.870.185,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.300.000.000,00	3.092.118.419,00	93,70	3.381.545.371,51
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.056.786.321,00	2.196.132.821,00	43,43	3.259.337.695,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.800.000.000,00	1.970.876.600,00	109,49	1.630.139.834,00
JUMLAH	**21.187.692.697,00**	**22.961.001.653,00**	**108,37**	**15.230.415.543,51**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pajak Hotel terealisasi senilai Rp 6.438.451.018,00 atau 142,38% dari anggaran senilai Rp4.521.885.693,00, nilai realisasi mengalami kenaikan senilai Rp5.283.124.979,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp1.155.326.039,00 atau 457,28%. Kenaikan yang sangat signifikan disebabkan oleh pelunasan Pajak Hotel Tahun 2023 pada Tahun 2024;
2. Pajak Restoran terealisasi senilai Rp4.479.588.996,00 atau 154,60% dari anggaran senilai Rp2.897.480.577,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp2.141.899.878,00 realisasi mengalami kenaikan senilai Rp2.337.689.118,00 atau 109,14%. Kenaikan disebabkan peningkatan belanja makan minum kegiatan dan pelunasan piutang pajak restoran tahun 2023 pada tahun 2024;

3. Pajak Hiburan terealisasi senilai Rp261.644.600,00 atau 95,68% dari anggaran senilai Rp273.451.299,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp0,00 realisasi mengalami peningkatan senilai Rp261.644.600,00 atau 100%. Kenaikan ini disebabkan adanya bidang usaha baru yang menjadi objek Pajak Hiburan berupa usaha Spa pada Hotel Cap Karoso pada Tahun 2024;
4. Pajak Reklame terealisasi senilai Rp245.541.716,00 atau 122,77% dari anggaran senilai Rp200.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp265.642.618,00, realisasi mengalami penurunan senilai Rp20.100.902,00 atau 7,57%. Laju Pajak Reklame menurun pada Tahun Anggaran 2024 dibanding pada tahun sebelumnya disebabkan oleh variabel jumlah pengguna manfaat reklame yang kian menurun;
5. Pajak Penerangan Jalan terealisasi senilai Rp4.251.187.966,00 atau 137,44% dari anggaran senilai Rp3.093.088.807,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp3.359.407.387,00, realisasi mengalami kenaikan senilai Rp891.780.579,00 atau 26,55%;
6. Pajak Parkir terealisasi senilai Rp891.300,00 atau 5,94% dari anggaran senilai Rp15.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp4.246.536,00, realisasi mengalami penurunan senilai Rp3.355.236,00 atau 79,01%. Penurunan yang sangat signifikan disebabkan oleh penurunan tarif parkir yang sebelumnya 30% menjadi 10%, dan pemungutan parkir di tepi jalan belum dilakukan serta terminal di Pasar Radamata tidak dimanfaatkan lagi;
7. Pajak Air Tanah terealisasi senilai Rp24.568.217,00 atau 81,89% dari anggaran senilai Rp30.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp32.870.185,00, realisasi mengalami penurunan senilai Rp8.301.968,00 atau 25,26%;
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terealisasi senilai Rp3.092.118.419,00 atau 93,70% dari anggaran senilai Rp3.300.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp3.381.545.371,51, realisasi mengalami penurunan senilai Rp289.426.952,51 atau 8,56%;
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) terealisasi senilai Rp2.196.132.821,00 atau 43,43% dari anggaran senilai Rp5.056.786.321,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp3.259.337.695,00, realisasi mengalami penurunan senilai Rp1.063.204.874,00 atau 32,62%. Terkait penurunan realisasi PBBP2 ini disebabkan oleh keterlambatan penetapan PBBP2 Tahun 2024 sebagai akibat dari perubahan regulasi dimana Peaturan Bupati tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah baru ditetapkan pada bulan Agustus 2024, maka Jatuh tempo pembayaran PBBP2 Tahun 2024 dimundurkan menjadi tanggal 30 Desember 2024. Rentang waktu yang pendek ini membuat penagihan dan pembayaran PBBP2 menjadi tidak maksimal; dan
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terealisasi senilai Rp1.970.876.600,00 atau 109,49% dari anggaran senilai

Rp1.800.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp1.630.139.834,00, realisasi mengalami kenaikan senilai Rp340.736.766,00 atau 20.90%.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah - LRA

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp13.492.430.500,00	**Rp11.644.335.136,00**	**Rp8.684.969.797,00**

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 merupakan realisasi penerimaan Retribusi Daerah senilai Rp11.644.335.136,00 atau 86,30% dari target senilai Rp13.492.430.500,00. Realisasi Retribusi Daerah TA 2024 mengalami kenaikan senilai Rp2.959.365.339,00 atau 34,07% dari realisasi TA 2023 senilai Rp8.684.969.797,00. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah diketahui sebagai berikut.

Tabel 5.1. 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 dan TA 2023

URAIAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	11.205.335.000,00	10.054.250.646,00	89,73	6.809.441.192,00
Retribusi Pelayanan Pasar	500.000.000,00	261.824.000,00	52,36	409.924.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00
Retribusi Pengolahan Limbah Cair	60.000.000,00	113.092.700,00	188,49	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	896.199.000,00	753.313.000,00	84,06	762.796.950,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	71.120.000,00	22.897.300,00	32,20	34.348.200,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	50.480.000,00	32.788.000,00	64,95	31.811.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	12.500.000,00	12.585.000,00	100,68	8.525.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	108.424.000,00	104.600.000,00	96,47	98.960.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	138.372.500,00	45.300.000,00	32,74	94.520.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	420.843.455,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	450.000.000,00	243.684.490,00	54,15	0,00
Jumlah	**13.492.430.500,00**	**11.644.335.136,00**	**86,30**	**8.684.969.797,00**

Uraian Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat daya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan dikelola oleh Dinas Kesehatan terealisasi senilai Rp10.054.250.646,00 atau 89,73% dari anggaran senilai Rp11.205.335.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp6.809.441.192,00, realisasi mengalami

kenaikan senilai Rp3.244.809.454,00 atau 47,65%;

2. Retribusi Pelayanan Pasar dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah terealisasi senilai Rp261.824.000,00 atau 52,36% dari anggaran senilai Rp500.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp409.924.000,00, realisasi mengalami penurunan senilai Rp148.100.000,00 atau 36,13%;
3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dikelola oleh Dinas Perhubungan direalisasikan senilai Rp0,00 atau 0% dari target senilai Rp0,00 disebabkan oleh sesuai ketentuan peraturan terbaru, uji KIR kendaraan bermotor tidak boleh dipungut biaya. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp13.800.000,00, realisasi mengalami penurunan senilai Rp13.800.000,00 atau 100%;
4. Retribusi Pengolahan Limbah Cair terealisasi senilai Rp113.092.700,00 atau 188,49% dari anggaran senilai Rp60.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp0,00, realisasi mengalami kenaikan senilai Rp113.092.700,00 atau 100%.
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian serta UPTD SPAM Weemaringi terealisasi senilai Rp753.313.000,00 atau 84,06% dari anggaran senilai Rp896.199.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp762.796.950,00, realisasi mengalami penurunan senilai Rp9.483.950,00 atau 1,24%;
6. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dikelola oleh Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Pariwisata direalisasikan senilai Rp22.897.300,00 atau 32,20% dari target senilai Rp71.120.000,00 yang disebabkan karena ada beberapa kios yang tidak terisi. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp34.348.200,00, realisasi mengalami penurunan senilai Rp11.450.900,00 atau 33,34%;
7. Retribusi Tempat Khusus Parkir dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata terealisasi senilai Rp32.788.000,00 atau 64,95% dari anggaran senilai Rp50.480.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp31.811.000,00, realisasi mengalami kenaikan senilai Rp977.000,00 atau 3,07%;
8. Retribusi Rumah Potong Hewan dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terealisasi senilai Rp12.585.000,00 atau 100,68% dari anggaran senilai Rp12.500.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp8.525.000,00, realisasi mengalami kenaikan senilai Rp4.060.000,00 atau 47,62%;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dikelola oleh Dinas

Pariwisata terealisasi senilai Rp104.600.000,00 atau 96,47% dari anggaran senilai Rp108.424.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp98.960.000,00, realisasi mengalami kenaikan senilai Rp5.640.000,00 atau 5,70%;

10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dikelola oleh Dinas Perikanan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan direalisasikan senilai Rp45.300.000,00 atau 32,74% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp94.520.000,00, realisasi mengalami penurunan senilai Rp49.220.000,00 atau 52,07%. Penurunan ini disebabkan oleh bibit ternak yang kurang baik sehingga mempengaruhi jumlah produksi ternak yang akan dijual;
11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dikelola oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu terealisasi senilai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran senilai Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 senilai Rp420.843.455,00, realisasi mengalami penurunan senilai Rp420.843.455,00 atau 100%. Hal ini disebabkan terjadi pergantian nomenklatur pendapatan pada Tahun 2024 menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
12. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dikelola oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu terealisasi senilai Rp243.684.490,00 atau 54,15% dari anggaran senilai Rp450.000.000,00.

Objek Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dikelola oleh 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan anggaran dan penerimaan masing-masing SKPD. Rincian realisasi Retribusi Daerah pada 12 SKPD dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1. 5 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah per SKPD Tahun 2024 dan 2023

NO	SKPD	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	57.120.000,00	57.120.000,00	100
2	DINAS KESEHATAN	5.931.335.000,00	5.509.919.097,00	92,9
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	247.000.000,00	285.945.000,00	115,77
4	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	100.000.000,00	38.800.000,00	38,8
5	DINAS PERHUBUNGAN	128.000.000,00	76.956.000,00	60,12
6	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	450.000.000,00	243.684.490,00	54,15
7	DINAS PERIKANAN	41.072.500,00	25.000.000,00	60,87
8	DINAS PARIWISATA	160.024.000,00	135.022.000,00	84,38
9	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	432.500.000,00	266.985.000,00	61,73
10	BADAN PENDAPATAN DAERAH	558.504.000,00	277.156.300,00	49,62
11	RSUD PRATAMA REDA BOLO	5.326.875.000,00	4.614.654.549,00	86,63
12	UPTD SPAM WEEMARINGI	60.000.000,00	113.092.700,00	188,49
JUMLAH		**13.492.430.500,00**	**11.644.335.136,00**	**86,30**

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp3.953.742.399,00	**Rp3.944.963.310,00**	**Rp7.742.306.863,00**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 terealisasi senilai Rp3.944.963.310,00 atau 99,78% dari target senilai Rp3.953.742.399,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 mengalami penurunan senilai Rp3.797.343.553,00 atau 49,05% dari realisasi TA 2023 senilai Rp7.742.306.863,00.

Realisasi Hasil Pengelolan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 merupakan realisasi atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Bank NTT sampai dengan tahun 2023 senilai Rp84.781.758.084,00.

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp3.231.614.340,00	**Rp5.100.961.538,32**	**Rp3.646.477.484,48**

Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 terealisasi senilai Rp5.100.961.538,32 atau 157,85% dari target senilai Rp3.231.614.340,00, mengalami kenaikan senilai Rp1.454.484.053,84 atau 39,89% dari realisasi 2023 senilai Rp3.646.477.484,48. Rincian Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut.

Tabel 5.1. 6 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023

URAIAN PENDAPATAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	435.993.600,00	∞	273.316.171,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	82.500.000,00
Jasa Giro	1.000.000.000,00	1.359.677.497,33	135,97	1.082.716.103,91
Pendapatan Bunga	900.000.000,00	1.260.328.766,00	140,04	916.900.233,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	525.178.195,00	923.715.117,06	175,89	963.200.594,85
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00	140.118.423,00	280,24	70.837.131,72
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	188.775.032,00	∞	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	30.000.000,00	23.500.000,00	78,33	24.750.000,00
Pendapatan dari Pengembalian	726.436.145,00	768.853.102,93	105,84	232.257.250,00

URAIAN PENDAPATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
JUMLAH	3.231.614.340,00	5.100.961.538,32	157,85	3.646.477.484,48

Penjelasan atas realisasi Lain-Lain PAD yang Sah dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi senilai Rp435.993.600,00 dan tidak ada target yang ditetapkan pada Tahun 2024, mengalami kenaikan senilai Rp162.677.429,00 atau 59,52% dari realisasi Tahun 2023 senilai Rp273.316.171,00;
2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tidak dianggarkan dan tidak terealisasi pada Tahun 2024 serta mengalami penurunan senilai Rp82.500.000,00 atau 100% dari realisasi Tahun 2023;
3. Jasa Giro terealisasi senilai Rp1.359.677.497,33 atau 135,97% dari target senilai Rp1.000.000.000,00, mengalami kenaikan senilai Rp276.961.393,42 atau 25,58% dari realisasi Tahun 2023 senilai Rp1.082.716.103,91;
4. Pendapatan Bunga terealisasi senilai Rp1.260.328.766,00 atau 140,04% dari target senilai Rp900.000.000,00, mengalami kenaikan senilai Rp343.428.533,00 atau 37,46% dari realisasi Tahun 2023 senilai Rp916.900.233,00;
5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terealisasi senilai Rp923.715.117,06 atau 175,89% dari target senilai Rp525.178.195,00, mengalami penurunan senilai Rp39.485.477,79 atau 4,10% dari realisasi Tahun 2023 senilai Rp963.200.594,85;
6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi senilai Rp140.118.423,00 atau 280,24% dari target senilai Rp50.000.000,00, mengalami kenaikan senilai Rp69.281.291,28 atau 97,80% dari realisasi Tahun 2023 senilai Rp70.837.131,72;
7. Pendapatan Denda Pajak Daerah terealisasi senilai Rp188.775.032,00 dan tidak ada target yang ditetapkan pada Tahun 2024, mengalami kenaikan senilai Rp188.775.032,00 atau 100,00 % dari realisasi Tahun 2023 senilai Rp0,00;
8. Pendapatan Denda Retribusi Daerah terealisasi senilai Rp23.500.000,00 atau 78,33% dari target senilai Rp30.000.000,00, mengalami penurunan senilai Rp1.250.000,00 atau 5,05% dari realisasi Tahun 2023 senilai Rp24.750.000,00; dan
9. Pendapatan dari Pengembalian terealisasi senilai Rp768.853.102,93 atau 105,84% dari target senilai Rp726.436.145,00, mengalami kenaikan senilai Rp536.595.852,93 atau 231,04% dari realisasi Tahun 2023 senilai Rp232.257.250,00.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa kenaikan realisasi pada

kelompok Lain-lain PAD yang Sah jika dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi karena adanya penjualan peralatan dan mesin, peningkatan Jasa Giro pada Kas Daerah, Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah, dan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer - LRA

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp1.127.034.959.062,00	**Rp1.118.099.345.496,00**	**Rp1.117.607.489.545,00**

Realisasi Pendapatan Transfer selama Tahun 2024 adalah senilai Rp1.118.099.345.496,00 dari anggaran sebesar Rp1.127.034.959.062,00 atau 99,21%, dan mengalami kenaikan senilai Rp491.855.951,00 atau 0,04% dari realisasi TA 2023 senilai Rp1.117.607.489.545,00. Realisasi Pendapatan Transfer - LRA ialah sebagai berikut.

Tabel 5.1. 7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 dan TA 2023

URAIAN PENDAPATAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
Dana Perimbangan	898.937.246.333,00	894.773.478.773,00	99,54	881.552.490.182,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	191.718.750.000,00	191.718.750.000,00	100,00	207.292.067.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	36.378.962.729,00	31.607.116.723,00	86,88	28.762.932.363,00
JUMLAH	**1.127.034.959.062,00**	**1.118.099.345.496,00**	**99,21**	**1.117.607.489.545,00**

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp1.090.655.996.333,00	**Rp1.086.492.228.773**	**Rp1.088.844.557.182,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 merupakan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 senilai Rp1.086.492.228.773,00 atau 99,62% mengalami penurunan senilai Rp2.352.328.409,00 atau 0,22% dari realisasi Tahun 2023 senilai Rp1.088.844.557.182,00 dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.1. 8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 dan 2023

URAIAN PENDAPATAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
Dana Perimbangan	898.937.246.333,00	894.773.478.773,00	99,54	881.552.490.182,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	19.751.646.000,00
Dana Desa	184.608.937.000,00	184.608.937.000,00	100,00	187.540.421.000,00
Insentif Fiskal	7.109.813.000,00	7.109.813.000,00	100,00	0,00
JUMLAH	**1.090.655.996.333,00**	**1.086.492.228.773,00**	**99,62**	**1.088.844.557.182,00**

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp898.937.246.333,00	**Rp894.773.478.773,00**	**Rp881.552.490.182,00**

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Realisasi Dana Perimbangan TA 2024 senilai Rp894.773.478.773,00 atau sebesar 99,54% dari anggaran senilai Rp898.937.246.333,00 nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp13.220.988.591,00 atau 1,50% dari realisasi Tahun 2023 senilai Rp881.552.490.182,00. Rincian Dana Perimbangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. 9 Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2024 dan TA 2023

URAIAN PENDAPATAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	4.206.996.200,00	4.671.526.524,00	111,04	6.046.427.914,00
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	575.826.082.000,00	574.445.179.602,00	99,76	502.959.267.143,00
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	164.943.436.000,00	160.421.804.814,00	97,26	200.621.098.674,00
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	153.960.732.133,00	155.234.967.833,00	100,83	171.925.696.451,00
JUMLAH	**898.937.246.333,00**	**894.773.478.773,00**	**99,54**	**881.552.490.182,00**

Dari tabel diatas dapat diberikan penjelasan sebagai berikut.

(a) Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil – LRA

Pendapatan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil senilai Rp4.671.526.524,00 merupakan realisasi penerimaan Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil TA 2024 dari anggaran senilai Rp4.206.996.200,00 atau 111,04%, mengalami penurunan senilai Rp1.374.901.390,00 atau 22,74% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp6.046.427.914,00. Rincian realisasi Bagi Hasil Pajak dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1. 10 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dan 2023

URAIAN DANA TRANSFER UMUM DANA BAGI HASIL - LRA	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	644.035.000,00	644.035.000,00	100,00	742.849.000,00
DBH PPh Pasal 21	1.647.487.200,00	2.130.559.524,00	129,32	2.778.887.914,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	40.193.000,00	40.193.000,00	100,00	116.657.000,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	209.220.000,00	190.678.000,00	91,14	507.475.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	31.670.000,00	31.670.000,00	100,00	37.247.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Landrent	0,00	0,00	0,00	311.500,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	669.000,00	669.000,00	100,00	934.500,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.633.722.000,00	1.633.722.000,00	100,00	1.862.066.000,00
JUMLAH	**4.206.996.200,00**	**4.671.526.524,00**	**111,04**	**6.046.427.914,00**

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

1) DBH Pajak Bumi dan Bangunan TA 2024 terealisasi senilai Rp644.035.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp644.035.000,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp98.814.000,00 atau 13,30% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp742.849.000,00;
2) DBH PPh Pasal 21 TA 2024 terealisasi senilai Rp2.130.559.524,00 atau sebesar 129,32% dari anggaran senilai Rp1.647.487.200,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp648.328.390,00 atau 23,33% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp2.778.887.914,00;
3) DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN TA 2024 terealisasi senilai Rp40.193.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp40.193.000,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp 76.464.000,00 atau 65,55% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp116.657.000,00;
4) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) TA 2024 terealisasi senilai Rp190.678.000,00 atau sebesar 91,14% dari anggaran senilai Rp209.220.000,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp316.797.000,00 atau 62,43% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp507.475.000,00;
5) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi TA 2024 terealisasi senilai Rp31.670.000,00 atau

sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp31.670.000,00 nilai ini mengalami penurunan senilai Rp5.577.000,00 atau 14,97% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp37.247.000,00;

6) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-*Landrent* TA 2024 tidak dianggarkan dan tidak terealisasi. Sedangkan realisasi pada tahun 2023 senilai Rp311.500,00;

7) Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - *Royalty* TA 2024 terealisasi senilai Rp669.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp669.000,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp265.500,00 atau 28,41% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp934.500,00; dan

8) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan TA 2024 terealisasi senilai Rp1.633.722.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp1.633.722.000,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp228.344.000,00 atau 12,26% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp1.862.066.000,00.

(b) Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA

Pendapatan Dana Alokasi Umum senilai Rp574.445.179.602,00 merupakan realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat atau 99,76% dari target senilai Rp575.826.082.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp71.485.912.459,00 atau 14,21% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp502.959.267.143,00. Rincian dari Dana Alokasi Umum dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1. 11 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
DAU	426.287.651.000,00	426.287.651.000,00	100,00	484.864.853.143,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	23.659.272.000,00	22.278.369.602,00	94,16	17.694.414.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	79.859.797.000,00	79.859.797.000,00	100,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	26.387.889.000,00	26.387.889.000,00	100,00	0,00

DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	19.231.473.000,00	19.231.473.000,00	100,00	0,00
JUMLAH	**575.826.082.000,00**	**574.445.179.602,00**	**99,76**	**502.959.267.143,00**

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Dana Alokasi Umum TA 2024 terealisasi senilai Rp426.287.651.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp426.287.651.000,00 nilai ini mengalami penurunan senilai Rp58.577.202.143,00 atau 12,08% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp484.864.853.143,00;
2) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan TA 2024 terealisasi senilai Rp400.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp400.000.000,00 dan tidak ada kenaikan dan penurunan realisasi anggaran dibandingkan tahun 2023;
3) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja TA 2024 terealisasi senilai Rp22.278.369.602,00 atau sebesar 94,16% dari anggaran senilai Rp23.659.272.000,00 dan nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp4.583.955.602,00 atau 25,91% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp17.694.414.000,00;
4) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan TA 2024 terealisasi senilai Rp79.859.797.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp79.859.797.000,00 dan tidak ada realisasi anggaran pada tahun 2023;
5) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan TA 2024 terealisasi senilai Rp26.387.889.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp26.387.889.000,00 dan tidak ada realisasi anggaran pada tahun 2023; dan
6) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum TA 2024 terealisasi senilai Rp26.387.889.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp26.387.889.000,00 dan tidak ada realisasi anggaran pada tahun 2023.

(c) Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) – LRA

Jumlah senilai Rp160.421.804.814,00 merupakan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) - LRA Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2024 yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat atau 97,26% dari target

senilai Rp164.943.436.000,00 mengalami penurunan senilai Rp40.199.293.860,00 atau 20,04% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp200.621.098.674,00. Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) – LRA tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1. 12 Anggaran dan Realisasi Per Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - PAUD	332.381.000,00	329.734.000,00	99,20	1.065.280.000,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan – Reguler - SD	17.423.252.000,00	17.317.771.670,00	99,39	46.779.061.000,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan – Reguler - SMP	13.790.439.000,00	13.684.350.350,00	99,23	30.166.792.150,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB – Penugasan - Penurunan AKI dan AKB	189.930.000,00	189.900.000,00	99,98	10.688.539.189,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB – Reguler - KB	2.047.199.000,00	2.045.139.350,00	99,90	1.443.166.606,00
DAK Fisik - Bidang Pertanian – Penugasan - Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	22.182.257.000,00	18.595.111.015,00	83,83	2.404.752.931,00
DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Penugasan	4.500.960.000,00	4.465.630.216,00	99,22	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan – Reguler - Jalan	55.697.146.000,00	55.612.385.130,00	99,85	67.394.438.000,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum - Reguler	14.864.514.000,00	14.792.620.560,00	99,52	11.716.683.879,00
DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Reguler	9.142.574.000,00	9.142.574.000,00	100,00	10.952.206.000,00
DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan	3.030.366.000,00	3.001.075.000,00	99,03	2.063.653.000,00
DAK Fisik - Bidang Transportasi Perdesaan - Reguler	7.263.755.000,00	7.230.872.138,00	99,55	8.481.348.735,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB-Reguler - Penguatan Percepatan Penurunan *Stunting*	14.478.663.000,00	14.014.641.385,00	96,80	7.465.177.184,00
JUMLAH	**164.943.436.000,00**	**160.421.804.814,00**	**97,26**	**200.621.098.674,00**

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

1) DAK Fisik Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD TA 2024 terealisasi senilai Rp329.734.000,00 atau sebesar 99,20% dari anggaran senilai Rp332.381.000,00, nilai ini

mengalami penurunan senilai Rp735.546.000,00 atau 69,05% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp1.065.280.000,00;

2) DAK Fisik Bidang Pendidikan-Reguler-SD TA 2024 terealisasi senilai Rp17.317.771.670,00 atau sebesar 99,39% dari anggaran senilai Rp17.423.252.000,00 nilai ini mengalami penurunan senilai Rp29.461.289.330,00 atau 62,98% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp46.779.061.000,00;

3) DAK Fisik Bidang Pendidikan-Reguler-SMP TA 2024 terealisasi senilai Rp13.684.350.350,00 atau sebesar 99,23% dari anggaran senilai Rp13.790.439.000,00 nilai ini mengalami penurunan senilai Rp16.482.441.800,00 atau 54,64% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp30.166.792.150,00;

4) DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB TA 2024 terealisasi senilai Rp189.900.000,00 atau sebesar 99,98% dari anggaran senilai Rp189.930.000,00, nilai ini mengalami penurunanan senilai Rp10.498.639.189,00 atau 98,22% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp10.688.539.189,00;

5) DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB TA 2024 terealisasi senilai Rp2.045.139.350,00 atau sebesar 99,90% dari anggaran senilai Rp2.047.199.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp601.972.744,00 atau 41,71% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp1.443.166.606,00;

6) DAK Fisik Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian TA 2024 terealisasi senilai Rp18.595.111.015,00 atau sebesar 83,83% dari anggaran senilai Rp22.182.257.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp16.190.358.084,00 atau 673,26% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp2.404.752.931,00;

7) DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan TA 2024 terealisasi senilai Rp4.465.630.216,00 atau sebesar 99,22% dari anggaran senilai Rp4.500.960.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp4.465.630.216,00 atau 100% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp0,00;

8) DAK Fisik Bidang Jalan-Reguler-Jalan TA 2024 terealisasi senilai Rp55.612.385.130,00 atau sebesar 99,85% dari anggaran senilai Rp55.697.146.000,00 nilai ini mengalami penurunan senilai Rp11.782.052.870,00 atau 17,48% dari realisasi tahun 2023 senilai

Rp67.394.438.000,00;

9) DAK Fisik Bidang Air Minum-Reguler TA 2024 terealisasi senilai Rp14.792.620.560,00 atau sebesar 99,52% dari anggaran senilai Rp14.864.514.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp3.075.936.681,00 atau 26,25% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp11.716.683.879,00;

10) DAK Fisik Bidang Sanitasi-Reguler TA 2024 terealisasi senilai Rp9.142.574.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp9.142.574.000,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp1.809.632.000,00 atau 16,52% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp10.952.206.000,00;

11) DAK Fisik Bidang Irigasi-Penugasan TA 2024 terealisasi senilai Rp3.001.075.000,00 atau sebesar 99,03% dari anggaran senilai Rp3.030.366.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp937.422.000,00 atau 45,43% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp2.063.653.000,00;

12) DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler TA 2024 terealisasi senilai Rp7.230.872.138,00 atau sebesar 99,55% dari anggaran senilai Rp7.263.755.000,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp1.250.476.597,00 atau 14,74% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp8.481.348.735,00; dan

13) DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan *Stunting* TA 2024 terealisasi senilai Rp14.014.641.385,00 atau sebesar 96,80% dari anggaran senilai Rp14.478.663.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp6.549.464.201,00 atau 87,73% dari realisasi ditahun 2023 senilai Rp7.465.177.184,00.

(d) Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) – LRA

Pendapatan Alokasi Khusus Non Fisik senilai Rp155.234.967.833,00 merupakan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik-LRA) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat atau 100,83% dari target senilai Rp153.960.732.133,00 dan mengalami penurunan senilai Rp16.690.728.618,00 atau 9,71% dari realisasi Tahun 2023 senilai Rp171.925.696.451,00. Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) – LRA tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1. 13 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	87.838.888.577,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	1.410.000.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	32.111.331.000,00	31.183.492.000,00	97,11	28.532.934.340,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.277.134.000,00	2.544.000.000,00	199,20	2.127.500.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	11.325.504.000,00	14.103.114.000,00	124,53	10.843.686.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	5.900.501.700,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	1.352.815.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	26.367.669.939,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.957.105.350,00	5.957.105.350,00	100	6.606.010.300,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	330.070.000,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	627.123.044,00	627.123.044,00	100,00	615.620.595,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	84.067.070.000,00	82.878.350.100,00	98,59	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.328.000.000,00	1.325.000.000,00	99,77	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	6.104.960.000,00	5.595.489.800,00	91,65	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	874.650.000,00	733.268.800,00	83,84	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	581.390.644,00	959.221.644,00	164,99	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan	377.831.000,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
Obat dan Makanan				
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	9.208.633.095,00	9.208.803.095,00	100,00	0,00
JUMLAH	**153.960.732.133,00**	**155.234.967.833,00**	**100,83**	**171.925.696.451,00**

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

1) DAK Non Fisik-BOS Reguler TA 2024 tidak ada realisasi dan Anggaran, sedangkan pada tahun 2023 terealisasi senilai Rp87.838.888.577,00. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur pendapatan dana BOS Reguler pada tahun 2024 menjadi DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler.

2) DAK Non Fisik-BOS Kinerja TA 2024 tidak ada realisasi dan Anggaran, sedangkan pada tahun 2023 terealisasi senilai Rp1.410.000.000,00. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur pendapatan dana BOS Kinerja pada tahun 2024 menjadi DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja.

3) DAK Non Fisik-TPG PNSD TA 2024 terealisasi senilai Rp31.183.492.000,00 atau sebesar 97,11% dari anggaran senilai Rp32.111.331.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp2.650.557.660,00 atau 9,29% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp28.532.934.340,00.

4) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD TA 2024 terealisasi senilai Rp2.544.000.000,00 atau sebesar 199,20% dari anggaran senilai Rp1.277.134.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp416.500.000,00 atau 19,58% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp2.127.500.000,00.

5) DAK Non Fisik-TKG PNSD TA 2024 terealisasi senilai Rp14.103.114.000,00 atau sebesar 124,53% dari anggaran senilai Rp11.325.504.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp3.259.428.000,00 atau 30,06% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp10.843.686.000,00.

6) DAK Non Fisik-BOP PAUD TA 2024 tidak ada ketersediaan anggaran dan realisasi, sedangkan pada tahun 2023 terealisasi senilai Rp5.900.501.700,00. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur pendapatan dana BOP PAUD pada tahun 2024 menjadi DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler.

7) DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan TA 2024

tidak ada ketersediaan anggaran dan realisasi, sedangkan pada tahun 2023 terealisasi senilai Rp1.352.815.000,00. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur pendapatan dana BOP Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2024 menjadi DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler.

8) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK TA 2024 tidak ada ketersediaan anggaran dan realisasi, sedangkan pada tahun 2023 terealisasi senilai Rp26.367.669.939,00. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur pendapatan dana BOKKB-BOK pada tahun 2024.

9) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB TA 2024 terealisasi senilai Rp5.957.105.350,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp5.957.105.350,00 nilai ini mengalami penurunan senilai Rp648.904.950,00 atau 9,82% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp6.606.010.300,00.

10) DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal TA 2024 tidak ada ketersediaan anggaran dan realisasi, sedangkan pada tahun 2023 terealisasi senilai Rp330.070.000,00.

11) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian TA 2024 terealisasi senilai Rp627.123.044,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp627.123.044,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp11.502.449,00 atau 1,87% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp615.620.595,00.

12) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler TA 2024 terealisasi senilai Rp82.878.350.100,00 atau sebesar 98,59% dari anggaran senilai Rp84.067.070.000,00.

13) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja TA 2024 terealisasi senilai Rp1.325.000.000,00 atau sebesar 99,77% dari anggaran senilai Rp1.328.000.000,00.

14) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler TA 2024 terealisasi senilai Rp5.595.489.800,00 atau sebesar 91,65% dari anggaran senilai Rp6.104.960.000,00.

15) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja TA 2024 terealisasi senilai Rp30.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp30.000.000,00.

16) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler TA 2024 terealisasi senilai Rp733.268.800,00 atau sebesar 83,84% dari anggaran senilai Rp874.650.000,00.

17) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja TA 2024 terealisasi senilai Rp90.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp90.000.000,00.

18) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK

Kabupaten/Kota TA 2024 terealisasi senilai Rp959.221.644,00 atau sebesar 164,99% dari anggaran senilai Rp581.390.644,00.

19) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan TA 2024 terealisasi senilai Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari anggaran senilai Rp377.831.000,00.

20) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas TA 2024 terealisasi senilai Rp9.208.803.095,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp9.208.633.095,00.

5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp0,00	**Rp0,00**	**Rp19.751.646.000,00**

Dana Insentif Daerah TA 2024 tidak ada ketersediaan anggaran dan realisasi, tetapi ada realisasi dari tahun 2023 senilai Rp19.751.646.000,00.

5.1.1.2.1.3 Dana Desa

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp184.608.937.000,00	**Rp184.608.937.000,00**	**Rp187.540.421.000,00**

Dana Desa TA 2024 terealisasi senilai Rp184.608.937.000,00 atau 100% dari anggaran senilai Rp184.608.937.000,00 mengalami penurunan senilai Rp2.931.484.000,00 atau 1,56% dari tahun 2023 senilai Rp187.540.421.000,00 dikarenakan terjadinya penurunan alokasi dana desa yang merupakan salah satu pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Dana Desa diperuntukkan bagi 173 Desa pada 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Rincian Dana Desa per desa dapat dilihat pada **Lampiran 1.**

5.1.1.2.1.4 Insentif Fiskal

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp7.109.813.000,00	**Rp7.109.813.000,00**	**Rp0,00**

Insentif Fiskal TA 2024 terealisasi senilai Rp7.109.813.000,00 atau 100% dari anggaran senilai Rp7.109.813.000,00. Insentif Fiskal TA 2024 merupakan dana Insentif Fiskal daerah tahun 2024 yang digunakan untuk penanganan kemiskinan ekstrim dan pembangunan infrastruktur dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah.

5.1.1.2.1.5 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp36.378.962.729,00	**Rp31.607.116.723,00**	**Rp28.762.932.363,00**

Pendapatan Transfer Antar Daerah senilai Rp31.607.116.723,00 merupakan realisasi penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2024 atau 86,88% dari target senilai Rp36.378.962.729,00, mengalami kenaikan senilai Rp Rp2.844.184.360,00 atau 9,89% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp28.762.932.363,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1. 14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.980.907.865,00	4.380.273.027,00	73,24	2.512.427.501,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.025.930.569,00	2.395.480.434,00	79,17	2.450.376.665,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.959.782.930,00	8.242.139.349,00	82,75	8.216.565.897,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.889.105,00	2.424.558,00	83,92	3.045.177,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	17.409.452.260,00	16.586.799.355,00	95,27	15.580.517.123,00
JUMLAH	**36.378.962.729,00**	**31.607.116.723,00**	**86,88**	**28.762.932.363,00**

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak provinsi pada tahun 2024 bersumber dari realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi NTT tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 230/KEP/HK/2024 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 tanggal 19 Juni 2024 dan realisasi Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi NTT tahun 2023 sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/73/BKUD4/2024 tentang Hutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Kepada Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur.

Realisasi Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 yang disetorkan ke kas daerah pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. 15 Anggaran dan Realisasi Transfer Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi NTT Tahun 2023 di Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	TANGGAL TERIMA KAS
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.977.722.675,00	2.977.722.675,00	100,00	27/06/2024
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	970.923,00	970.923,00	100,00	20/09/2024
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.821.677.760,00	1.821.677.760,00	100,00	02/10/2024
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	894.065.835,00	894.065.835,00	100,00	20/09/2024
JUMLAH	**5.694.437.193,00**	**5.694.437.193,00**	**100,00**	

5.1.1.3 Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp21.599.601.788,00	**Rp17.659.426.719,00**	**Rp20.316.366.551,00**

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan TA 2024 realisasi senilai Rp17.659.426.719,00 atau 81,76% merupakan pendapatan dari anggaran senilai Rp21.599.601.788,00 yang bersumber dari pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat langsung ke Rekening 16 (enam belas) Puskesmas se-Kabupaten Sumba Barat Daya. Rincian Dana Kapitasi JKN pada FKTP tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. 16 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	21.599.601.788,00	17.659.426.719,00	81,76	20.316.366.551,00
JUMLAH	**21.599.601.788,00**	**17.659.426.719,00**	**81,76**	**20.316.366.551,00**

Rincian pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP untuk masing-masing puskesmas Se-Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. 17 Anggaran dan Realisasi Pendapatan JKN per Puskesmas Tahun 2024

NO	NAMA PUSKESMAS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PUSKESMAS BILLA CENGE	1.437.133.920,00	1.169.858.670,00	81,40
2	PUSKESMAS BONDO KODI	1.387.201.296,00	1.141.075.327,00	82,26
3	PUSKESMAS DELU DEPA	837.273.000,00	636.174.268,00	75,98
4	PUSKESMAS ELOPADA	1.445.834.508,00	1.392.335.260,00	96,30
5	PUSKESMAS KAWANGO HARI	865.735.728,00	684.561.173,00	79,07
6	PUSKESMAS KORI	1.757.331.152,00	1.715.428.220,00	97,62
7	PUSKESMAS PALLA	970.645.712,00	851.873.484,00	87,76
8	PUSKESMAS PANENGGO EDE	1.401.794.680,00	1.139.174.787,00	81,27
9	PUSKESMAS RADAMATA	1.792.726.876,00	1.050.052.912,00	58,57
10	PUSKESMAS TANGGABA	1.991.728.836,00	1.675.795.001,00	84,14
11	PUSKESMAS TENA TEKE	1.496.029.200,00	971.908.281,00	64,97
12	PUSKESMAS WAIMANGURA	1.695.192.360,00	1.499.024.524,00	88,43
13	PUSKESMAS WALLA NDIMU	869.555.360,00	724.964.185,00	83,37
14	PUSKESMAS WATUKAWULA	2.164.451.392,00	1.858.894.204,00	85,88
15	PUSKESMAS WEEKOMBAK	1.115.598.968,00	814.147.913,00	72,98
16	PUSKESMAS WERILOLO	371.368.800,00	334.158.510,00	89,98
	JUMLAH	**21.599.601.788,00**	**17.659.426.719,00**	**81,76**

5.1.2 Belanja dan Transfer Daerah

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp1.233.200.263.844,00	**Rp1.147.575.940.833,00**	**Rp1.151.282.207.613,00**

Pada Tahun 2024, realisasi Belanja dan Transfer Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat mencapai senilai Rp1.147.575.940.833,00 yang terdiri dari Belanja Operasi senilai Rp741.753.087.764,00 Belanja Modal senilai Rp160.632.937.633,00, Belanja Tak Terduga senilai Rp0,00 dan Belanja Transfer senilai Rp245.189.915.436,00. Adapun Rincian Belanja dan Transfer Daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi sebagai berikut.

Tabel 5.1. 18 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	819.248.566.989,00	741.753.087.764,00	90,54	672.673.943.713,00
2	Belanja Modal	165.144.905.371,00	160.632.937.633,00	97,27	227.471.238.492,00
3	Belanja Tidak Terduga	3.616.875.772,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Transfer	245.189.915.712,00	245.189.915.436,00	100	251.137.025.408,00
	Jumlah	**1.233.200.263.844,00**	**1.147.575.940.833,00**	**93,06**	**1.151.282.207.613,00**

Sedangkan realisasi belanja dan transfer daerah per SKPD tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. 19 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Per SKPD Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	47.850.587.363,00	41.694.279.359,00	87,13	10.941.226.995,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	26.077.251.518,00	25.509.143.613,00	97,82	18.953.174.788,00
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	264.803.526.600,00	260.232.196.996,00	98,27	260.246.802.625,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.298.944.688,00	2.740.299.153,00	83,07	2.943.761.784,00
BADAN PENDAPATAN DAERAH	6.460.205.280,00	5.645.142.782,00	87,38	5.345.042.727,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	8.387.860.224,00	7.211.052.686,00	85,97	6.115.497.741,00
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	3.961.949.124,00	3.255.066.801,00	82,16	3.291.872.424,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	4.853.084.976,00	4.156.956.735,00	85,66	2.874.385.734,00
DINAS KESEHATAN	160.307.181.214,00	139.521.441.701,00	87,03	139.363.551.663,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	3.645.363.875,00	3.318.595.327,00	91,04	3.018.164.072,00
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4.792.713.601,00	4.281.664.861,00	89,34	3.780.907.036,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.118.914.906,00	4.942.693.307,00	96,56	3.318.148.790,00
DINAS PARIWISATA	4.173.305.209,00	3.633.367.220,00	87,06	3.983.769.578,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	125.030.592.563,00	123.694.681.222,00	98,93	147.423.037.392,00
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	2.506.785.693,00	2.087.205.347,00	83,26	73.642.259,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.516.616.171,00	5.900.685.769,00	90,55	4.903.175.179,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.601.596.367,00	12.288.234.099,00	90,34	12.818.156.716,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.789.207.175,00	3.085.666.583,00	81,43	4.702.168.249,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	366.534.203.762,00	338.663.823.448,00	92,40	395.547.636.826,00
DINAS PERHUBUNGAN	3.669.036.382,00	3.499.780.300,00	95,39	2.569.932.588,00
DINAS PERIKANAN	8.861.248.135,00	8.438.428.629,00	95,23	3.963.043.199,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.037.605.792,00	2.458.185.473,00	80,93	159.228.301,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.080.889.032,00	1.885.703.848,00	90,62	1.895.182.155,00
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	37.584.307.675,00	32.597.182.734,00	86,73	19.239.940.537,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	6.167.781.829,00	5.702.862.665,00	92,46	5.217.468.998,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	14.145.590.718,00	13.532.043.883,00	95,66	9.759.243.149,00

Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
DINAS SOSIAL	4.792.827.753,00	4.705.971.655,00	98,19	3.664.176.662,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.250.327.126,00	2.729.596.155,00	83,98	118.291.680,00
INSPEKTORAT DAERAH	4.031.172.422,00	3.440.929.820,00	85,36	2.881.092.987,00
KECAMATAN KODI	1.696.957.714,00	1.521.595.023,00	89,67	1.418.648.208,00
KECAMATAN KODI BALAGHAR	1.328.007.145,00	1.072.893.787,00	80,79	1.065.894.793,00
KECAMATAN KODI BANGEDO	1.660.967.798,00	1.571.687.313,00	94,62	1.299.628.227,00
KECAMATAN KODI UTARA	1.699.027.689,00	1.465.259.790,00	86,24	1.349.179.361,00
KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA	4.454.239.853,00	4.243.553.574,00	95,27	4.280.871.793,00
KECAMATAN LOURA	1.742.192.134,00	1.569.953.662,00	90,11	1.184.481.120,00
KECAMATAN WEWEWA BARAT	1.915.433.865,00	1.840.969.362,00	96,11	1.680.159.124,00
KECAMATAN WEWEWA SELATAN	1.759.508.629,00	1.650.953.293,00	93,83	1.578.997.548,00
KECAMATAN WEWEWA TENGAH	2.233.706.223,00	2.040.813.655,00	91,36	1.899.616.709,00
KECAMATAN WEWEWA TIMUR	2.105.195.577,00	1.883.726.715,00	89,48	1.810.288.649,00
KECAMATAN WEWEWA UTARA	1.920.544.372,00	1.726.056.201,00	89,87	1.448.637.270,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.804.967.101,00	8.577.103.778,00	97,41	5.832.778.981,00
SEKRETARIAT DAERAH	23.325.589.361,00	19.783.683.158,00	84,82	20.980.405.095,00
SEKRETARIAT DPRD	29.223.249.210,00	27.774.809.351,00	95,04	26.340.897.901,00
TOTAL	**1.233.200.263.844,00**	**1.147.575.940.833,00**	**93,06**	**1.151.282.207.613,00**

5.1.2.1. Belanja Operasi

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp819.248.566.989,00	**Rp741.753.087.764,00**	**Rp672.673.943.713,00**

Belanja Operasi tahun 2024 terealisasi senilai Rp741.753.087.764,00 atau 90,54% dari anggaran senilai Rp819.248.566.989,00, mengalami kenaikan senilai Rp69.079.144.051,00 atau 10,27% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp672.673.943.713,00, terdiri dari:

Tabel 5.1. 20 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN 2024 (RP)	REALISASI 2024 (RP)	%	REALISASI 2023 (RP)
1	Belanja Pegawai	369.350.664.721,00	330.331.141.451,00	89,44	286.564.004.981,00
2	Belanja Barang dan Jasa	355.638.300.148,00	319.265.652.334,00	89,77	303.857.301.344,00
3	Belanja Subsidi	285.000.000,00	233.203.450,00	81,83	117.966.000,00
4	Belanja Hibah	75.323.437.120,00	74.046.925.529,00	98,31	67.296.181.388,00
5	Belanja Bantuan Sosial	18.651.165.000,00	17.876.165.000,00	95,84	14.838.490.000,00
	Jumlah	**819.248.566.989,00**	**741.753.087.764,00**	**90,54**	**672.673.943.713,00**

Uraian lebih lanjut dari masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp369.350.664.721,00	**Rp330.331.141.451,00**	**Rp286.564.004.981,00**

Jumlah senilai Rp330.331.141.451,00 merupakan realisasi Belanja Pegawai pada TA 2024 atau 89,44% dari rencana anggaran yang ditetapkan pada perubahan APBD senilai Rp369.350.664.721,00 dan mengalami kenaikan senilai Rp43.767.136.470,00 atau 15,27% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp286.564.004.981,00. Rincian belanja pegawai tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1. 21 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	303.638.592.873,00	270.499.233.983,00	89,09	229.786.105.388,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	50.711.208.172,00	45.761.022.107,00	90,24	42.646.151.327,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.331.534.888,00	13.584.881.138,00	94,79	13.553.550.630,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	279.328.788,00	119.364.223,00	42,73	167.317.636,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	390.000.000,00	366.640.000,00	94,01	410.880.000,00
JUMLAH	**369.350.664.721,00**	**330.331.141.451,00**	**89,44**	**286.564.004.981,00**

Dari tabel di atas dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut.

1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2024 terealisasi senilai Rp270.499.233.983,00 atau sebesar 89,09% dari anggaran senilai Rp303.638.592.873,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp40.713.128.595,00 atau 17,72% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp229.786.105.388,00.
2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2024 terealisasi senilai Rp45.761.022.107,00 atau sebesar 90,24% dari anggaran senilai Rp50.711.208.172,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp3.114.870.780,00 atau 7,30% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp42.646.151.327,00.
3) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2024 terealisasi senilai Rp13.584.881.138,00 atau sebesar 94,79% dari anggaran senilai Rp14.331.534.888,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp31.330.508,00 atau 0,23% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp13.553.550.630,00.
4) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2024 terealisasi senilai Rp119.364.223,00 atau sebesar 42,73% dari anggaran

senilai Rp279.328.788,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp47.953.413,00 atau 28,66% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp167.317.636,00.

5) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2024 terealisasi senilai Rp366.640.000,00 atau sebesar 94,01% dari anggaran senilai Rp390.000.000,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp44.240.000,00 atau 10,77% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp410.880.000,00.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp355.638.300.148,00	**Rp319.265.652.334,00**	**Rp303.857.301.344,00**

Jumlah senilai Rp319.265.652.334,00 merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 atau 89,77% dari rencana anggaran yang ditetapkan pada perubahan APBD senilai Rp355.638.300.148,00 dan mengalami kenaikan senilai Rp15.408.350.990,00 atau 5,07% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp303.857.301.344,00. Rincian Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1. 22 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
Belanja Barang Pakai Habis	124.894.371.496,00	112.832.515.330,00	90,34	102.740.230.092,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	15.450.625,00	15.245.625,00	98,67	28.834.375,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	341.914.792,00	302.014.792,00	88,33	0,00
Belanja Jasa Kantor	96.029.608.416,00	82.943.461.136,00	86,37	77.691.611.017,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	23.427.249.084,00	21.959.806.380,00	93,74	19.298.169.455,00
Belanja Sewa Tanah	120.000.000,00	40.000.000,00	33,33	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.224.310.500,00	996.416.500,00	81,39	1.071.087.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	923.750.000,00	729.300.000,00	78,95	406.150.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	12.000.000,00	3.000.000,00	25,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.167.850.057,00	2.879.271.045,00	90,89	4.580.448.585,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	765.000.000,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	382.500.000,00	382.500.000,00	100,00	434.500.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	632.045.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.558.763.137,00	2.098.547.266,00	82,01	2.651.243.292,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	842.251.031,00	782.783.449,00	92,94	249.505.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.010.338.955,00	3.965.690.200,00	98,89	1.464.468.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	55.864.424.980,00	48.618.683.295,00	87,03	42.257.169.635,00

URAIAN	ANGGARAN 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)	%	REALISASI 2023 (Rp)
Dalam Negeri				
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	308.250.000,00	306.250.000,00	99,35	297.925.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	781.898.000,00	515.666.000,00	65,95	3.417.995.787,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	40.656.162.075,00	39.820.325.626,00	97,94	45.870.919.106,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	50.207.000,00	47.175.690,00	93,96	0,00
JUMLAH	**355.638.300.148,00**	**319.265.652.334,00**	**89,77**	**303.857.301.344,00**

Dari tabel di atas dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut.

1) Belanja Barang Pakai Habis TA 2024 terealisasi senilai Rp112.832.515.330,00 atau sebesar 90,34 % dari anggaran senilai Rp124.894.371.496,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp10.092.285.238,00 atau 9,82% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp102.740.230.092,00.

2) Belanja Barang Tak Habis Pakai TA 2024 terealisasi senilai Rp15.245.625,00 atau sebesar 98,67% dari anggaran senilai Rp15.450.625,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp13.588.750,00 atau 47,13% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp28.834.375,00.

3) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi TA 2024 terealisasi senilai Rp302.014.792,00 atau sebesar 88,33% dari anggaran senilai Rp341.914.792,00. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi tidak dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023.

4) Belanja Jasa Kantor TA 2024 terealisasi senilai Rp82.943.461.136,00 atau sebesar 86,37% dari anggaran senilai Rp96.029.608.416,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp5.251.850.119,00 atau 6,76% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp77.691.611.017,00.

5) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2024 terealisasi senilai Rp21.959.806.380,00 atau sebesar 93,74% dari anggaran senilai Rp23.427.249.084,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp2.661.636.925,00 atau 13,79% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp19.298.169.455,00.

6) Belanja Sewa Tanah TA 2024 terealisasi senilai Rp40.000.000,00 atau sebesar 33,33% dari anggaran senilai Rp120.000.000,00. Belanja Sewa Tanah tidak dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023.

7) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2024 terealisasi senilai Rp996.416.500,00 atau sebesar 81,39% dari anggaran senilai Rp1.224.310.500,00, nilai ini mengalami penurunan senilai

Rp74.670.500,00 atau 6,97% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp1.071.087.000,00.

8) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2024 terealisasi senilai Rp729.300.000,00 atau sebesar 78,95% dari anggaran senilai Rp923.750.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp323.150.000,00 atau 79,56% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp406.150.000,00.

9) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2024 terealisasi senilai Rp3.000.000,00 atau sebesar 25,00% dari anggaran senilai Rp12.000.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp3.000.000,00 atau 100% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp0,00.

10) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2024 terealisasi senilai Rp2.879.271.045,00 atau sebesar 90,89% dari anggaran senilai Rp3.167.850.057,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp1.701.177.540,00 atau 37,14% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp4.580.448.585,00.

11) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2024 tidak dianggarkan, sedangkan pada tahun 2023 direalisasikan senilai Rp765.000.000,00.

12) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS TA 2024 terealisasi senilai Rp382.500.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp382.500.000,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp52.000.000,00 atau 11,97% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp434.500.000,00.

13) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2024 terealisasi senilai Rp27.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp27.000.000,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp605.045.000,00 atau 95,73% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp632.045.000,00.

14) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2024 terealisasi senilai Rp2.098.547.266,00 atau sebesar 82,01% dari anggaran senilai Rp2.558.763.137,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp552.696.026,00 atau 20,85% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp2.651.243.292,00.

15) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2024 terealisasi senilai Rp782.783.449,00 atau sebesar 92,94% dari anggaran senilai Rp842.251.031,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp533.278.449,00 atau 213,73% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp249.505.000,00.

16) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024 terealisasi senilai Rp3.965.690.200,00 atau sebesar 98,89% dari anggaran senilai Rp4.010.338.955,00, nilai ini mengalami

kenaikan senilai Rp2.501.222.200,00 atau 170,79% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp1.464.468.000,00.

17) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2023 terealisasi senilai Rp48.618.683.295,00 atau sebesar 87,03% dari anggaran senilai Rp55.864.424.980,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp6.361.513.660,00 atau 15,05% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp42.257.169.635,00.

18) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2024 terealisasi senilai Rp306.250.000,00 atau sebesar 99,35% dari anggaran senilai Rp308.250.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp8.325.000,00 atau 2,79% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp297.925.000,00.

19) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2024 terealisasi senilai Rp515.666.000,00 atau sebesar 65,95% dari anggaran senilai Rp781.898.000,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp2.902.329.787,00 atau 84,91% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp3.417.995.787,00.

20) Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2024 terealisasi senilai Rp39.820.325.626,00 atau sebesar 97,94% dari anggaran senilai Rp40.656.162.075,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp6.050.593.480,00 atau 13,19% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp45.870.919.106,00.

21) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas TA 2024 terealisasi senilai Rp 47.175.690,00 atau sebesar 93,96% dari anggaran senilai Rp50.207.000,00. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas tidak dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023

5.1.2.1.3. Belanja Subsidi

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp285.000.000,00	**Rp233.203.450,00**	**Rp117.966.000,00**

Jumlah senilai Rp233.203.450,00 merupakan realisasi belanja Subsidi atau 81,83% dari target yang dianggarkan senilai Rp285.000.000,00. Belanja subsidi merupakan subsidi bahan pokok melalui pengadaan pasar murah yang dilakukan oleh bagian ekonomi pada sekretariat daerah dalam rangka mengatasi kenaikan bahan pangan pokok masyarakat tahun 2024.

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp75.323.437.120,00	**Rp74.046.925.529,00**	**Rp67.296.181.388,00**

Jumlah senilai Rp74.046.925.529,00 merupakan realisasi Belanja Hibah atau 98,31% dari anggaran senilai Rp75.323.437.120,00, mengalami kenaikan senilai Rp6.750.744.141,00 atau 10,03% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp67.296.181.388,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1. 23 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	23.419.353.940,00	23.015.561.400,00	98,28	16.386.187.060,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.336.790.124,00	4.320.513.624,00	99,62	9.696.776.800,00
3	Belanja Hibah Uang Dana BOS	39.151.820.000,00	38.944.308.849,00	99,47	40.132.645.260,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.072.783.056,00	1.072.783.056,00	100,00	1.080.572.268,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP	7.342.690.000,00	6.693.758.600,00	91,16	0,00
	JUMLAH	**75.323.437.120,00**	**74.046.925.529,00**	**98,31**	**67.296.181.388,00**

Realisasi Belanja Hibah per 31 Desember 2024 terdiri Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat senilai Rp23.015.561.400,00 atau sebesar 98,28 % dari anggaran senilai Rp23.419.353.940,00, nilai tahun 2024 bertambah senilai Rp6.629.374.340,00 dari realisasi tahun 2023 senilai Rp16.386.187.060,00. Kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2024 ini disebabkan karena pada tahun 2024 terdapat penganggaran untuk pendanaan PILKADA tahun 2024 yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumba Barat Daya, POLRES Kabupaten Sumba Barat Daya, dan KODIM 1629 Kabupaten Sumba Barat Daya.

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia senilai Rp4.320.513.624,00 merupakan belanja hibah yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya belanja hibah kepada KONI dan hibah untuk perbaikan rumah adat pada kampung-kampung adat.

Realisasi belanja hibah Dana BOS senilai Rp38.944.308.849,00 diberikan kepada 187 sekolah yang terdiri dari 125 SD Swasta dan 62 SMP Swasta. Rincian atas hibah BOS kepada satuan Pendidikan dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

Jumlah senilai Rp1.072.783.056,00 atau 100% dari anggaran senilai Rp1.072.783.056,00 merupakan Belanja Hibah Bantuan Keuangan yaitu belanja bantuan kepada partai politik. Rincian Realisasi Hibah Bantuan Keuangan Lainnya kepada Partai Politik tahun Anggaran 2024

dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1. 24 Rincian Belanja Hibah Bantuan kepada Partai Politik Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	PARTAI AMANAT NASIONAL	111.328.435,00
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	67.386.099,00
3	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	49.062.104,00
4	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	73.444.110,00
5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	143.440.609,00
6	PARTAI DEMOKRAT	68.873.931,00
7	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	134.154.293,00
8	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	111.248.036,00
9	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	69.679.561,00
10	PARTAI GOLONGAN KARYA	103.986.145,00
11	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	107.358.160,00
12	PARTAI BERINGIN KARYA	32.821.573,00
JUMLAH		**1.072.783.056,00**

Jumlah senilai Rp6.693.758.600,00 atau 91,16% dari anggaran senilai Rp7.342.690.000,00 merupakan belanja hibah dana BOSP bagi unit pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD, dan Kesetaraan. Dana BOSP PAUD dan Kesetaraan yang diberikan kepada 276 sekolah yang terdiri dari 10 PAUD Negeri, 247 PAUD Swasta, 12 PAUD Kesetaraan, dan 7 SMP Swasta. Realisasi TA 2024 senilai Rp6.693.758.600,00 atau sebesar 91,16% dari anggaran senilai Rp7.342.690.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp6.693.758.600,00 atau 100% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp0,00. Rincian atas hibah BOSP kepada satuan Pendidikan dapat dilihat pada **Lampiran 2a**.

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp18.651.165.000,00	**Rp17.876.165.000,00**	**Rp14.838.490.000,00**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2024 senilai Rp17.876.165.000,00 atau 95,84% dari target yang dianggarkan senilai Rp18.651.165.000,00. Nilai realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan senilai Rp3.037.675.000,00 atau 20,47% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp14.838.490.000,00. Rincian Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut.

Tabel 5.1. 25 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.000.000.000,00	2.375.000.000,00	79,17	3.386.500.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.270.000.000,00	1.270.000.000,00	100,00	322.500.000,00

3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	14.381.165.000,00	14.231.165.000,00	98,96	11.129.490.000,00
JUMLAH		**18.651.165.000,00**	**17.876.165.000,00**	**95,84**	**14.838.490.000,00**

Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 terdiri atas:

1. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu pada tahun 2024 senilai Rp2.375.000.000,00 atau 79,17% dari anggaran senilai Rp3.000.000.000,00 mengalami penurunan senilai Rp1.011.500.000,00 atau 29,87% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp3.386.500.000,00;
2. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga tahun 2024 senilai Rp1.270.000.000,00 atau 100% dari anggaran senilai Rp1.270.000.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp947.500.000 atau 293,80% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp322.500.000,00; dan
3. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat pada tahun 2024 senilai Rp14.231.165.000,00 atau 98,96% dari anggaran senilai Rp14.381.165.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp3.101.675.000,00 atau 27,87% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp11.129.490.000,00.

5.1.2.2. Belanja Modal

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp165.144.905.371,00	**Rp160.632.937.633,00**	**Rp227.471.238.492,00**

Jumlah senilai Rp160.632.937.633,00 merupakan Realisasi Belanja Modal (Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Aset Lainnya) Tahun Anggaran 2024 atau 97,27% dari rencana anggaran senilai Rp165.144.905.371,00. Nilai realisasi tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp66.838.300.859,00 atau 29,38% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp227.471.238.492,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1. 26 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.332.368.704,00	27.119.273.098,00	92,46	32.506.485.331,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.446.323.354,00	35.658.539.759,00	95,23	73.256.412.346,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	95.174.430.838,00	94.810.066.973,00	99,62	118.375.365.601,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.191.782.475,00	3.045.057.803,00	95,40	3.252.975.214,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
JUMLAH	**165.144.905.371,00**	**160.632.937.633,00**	**97,27**	**227.471.238.492,00**

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat Belanja Modal tanah di tahun 2024 dan 2023.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp29.332.368.704,00	Rp27.119.273.098,00	Rp32.506.485.331,00

Jumlah senilai Rp27.119.273.098,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 atau 92,46% dari rencana anggaran senilai Rp29.332.368.704,00. Realisasi tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp5.387.212.233,00 atau 16,57% dibanding realisasi tahun 2023 senilai Rp32.506.485.331,00. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1. 27 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	495.430.000,00	486.480.000,00	98,19	265.800.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	8.259.189.234,00	8.156.783.000,00	98,76	1.163.000.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	47.850.000,00	47.850.000,00	100,00	55.825.000,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	455.046.750,00	154.818.495,00	34,02	408.785.633,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.330.101.450,00	7.072.476.034,00	96,49	8.157.256.086,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	476.607.502,00	454.600.132,00	95,38	137.020.000,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.347.528.848,00	3.818.242.317,00	87,83	12.859.954.208,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.099.371.702,00	1.054.159.040,00	95,89	1.725.540.000,00
9	Belanja Modal Komputer	2.596.639.268,00	2.010.840.430,00	77,44	4.813.501.994,00
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	640.148.500,00	425.048.500,00	66,40	684.107.560,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00	0,00
12	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	110.300.000,00
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	481.440.200,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.487.214.450,00	3.340.734.150,00	95,80	1.643.954.650,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	89.441.000,00	89.441.000,00	100,00	0,00
JUMLAH		**29.332.368.704,00**	**27.119.273.098,00**	**92,46**	**32.506.485.331,00**

Dari tabel di atas dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut.

1. Belanja Modal Alat Besar TA 2024 terealisasi senilai Rp486.480.000,00 atau sebesar 98,19% dari anggaran senilai Rp495.430.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp220.680.000,00 atau 83,02% dari realisasi tahun 2023 senilai

Rp265.800.000,00;

2. Belanja Modal Alat Angkutan TA 2024 terealisasi senilai Rp8.156.783.000,00 atau sebesar 98,76% dari anggaran senilai Rp8.259.189.234,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp6.993.783.000,00 atau 601,36% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp1.163.000.000,00;
3. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2024 terealisasi senilai Rp47.850.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp47.850.000,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp7.975.000,00 atau 14,29% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp55.825.000,00;
4. Belanja Modal Alat Pertanian TA 2024 terealisasi senilai Rp154.818.495,00 atau sebesar 34,02% dari anggaran senilai Rp455.046.750,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp253.967.138,00 atau 62,13% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp408.785.633,00;
5. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2024 terealisasi senilai Rp7.072.476.034,00 atau sebesar 96,49% dari anggaran senilai Rp7.330.101.450,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp1.084.780.052,00 atau 13,30% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp8.157.256.086,00;
6. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2024 terealisasi senilai Rp454.600.132,00 atau sebesar 95,38% dari anggaran senilai Rp476.607.502,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp317.580.132,00 atau 231,78% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp137.020.000,00;
7. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2024 terealisasi senilai Rp3.818.242.317,00 atau sebesar 87,83% dari anggaran senilai Rp4.347.528.848,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp9.041.711.891,00 atau 70,31% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp12.859.954.208,00;
8. Belanja Modal Alat Laboratorium TA 2024 terealisasi senilai Rp1.054.159.040,00 atau sebesar 95,89 % dari anggaran senilai Rp1.099.371.702,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp671.380.960,00 atau 38,91% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp1.725.540.000,00;
9. Belanja Modal Komputer TA 2024 terealisasi senilai Rp2.010.840.430,00 atau sebesar 77,44% dari anggaran senilai Rp2.596.639.268,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp2.802.661.564,00 atau 58,23% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp4.813.501.994,00;
10. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian TA 2024 terealisasi senilai Rp425.048.500,00 atau sebesar 66.40% dari anggaran senilai Rp640.148.500,00 dan mengalami

penurunan senilai Rp259.059.060,00 atau 37,87% dari realisasi di tahun 2023 senilai Rp684.107.560,00;

11. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja TA 2024 terealisasi Rp7.800.000,00 atau sebesar 100,00% dengan anggaran senilai Rp7.800.000,00, tetapi di tahun 2023 tidak ada realisasi;
12. Belanja Modal Rambu-Rambu TA 2024 tidak ada anggaran dan realisasi, tetapi terealisasi pada tahun 2023 senilai Rp110.300.000,00;
13. Belanja Modal Peralatan Olahraga TA 2024 tidak ada anggaran dan realisasi, tetapi terealisasi tahun 2023 senilai Rp481.440.200,00;
14. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS TA 2024 terealisasi senilai Rp3.340.734.150,00 atau sebesar 95,80% dari anggaran senilai Rp3.487.214.450,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp1.696.779.500,00 atau 103,21% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp1.643.954.650,00; dan
15. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP TA 2024 terealisasi senilai Rp89.441.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran senilai Rp89.441.000,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP merupakan rekening nomenklatur baru, sehingga tidak ada anggaran dan realisasi pada tahun 2023.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. 28 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023

Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	98.000.000,00	96.880.000,00	98,86	58.512.792,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	23.500.000,00	23.500.000,00	100,00	0,00
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	6.479.232.604,00	6.213.325.000,00	95,90	539.498.400,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	357.000.000,00	57.000.000,00	15,97	30.200.000,00
Badan Pendapatan Daerah	14.700.000,00	14.700.000,00	100,00	25.820.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	233.258.000,00	233.258.000,00	100,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	601.528.750,00	43.139.000,00	7,17	55.702.500,00
Dinas Kesehatan	8.442.983.445,00	7.513.881.909,00	89,00	17.049.976.028,00
Dinas Komunikasi dan Informatika,Statistik dan Persandian	34.467.880,00	34.467.880,00	100,00	3.500.000,00

Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	40.125.000,00	40.125.000,00	100,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	95.104.750,00	94.104.750,00	98,95	88.000.000,00
Dinas Pariwisata	23.648.500,00	23.648.500,00	100,00	3.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	71.388.500,00	64.382.000,00	90,19	846.752.560,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	117.239.605,00	117.239.000,00	100,00	8.000.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.137.785.800,00	1.136.535.700,00	99,89	1.084.963.260,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	177.715.000,00	177.668.000,00	99,97	1.500.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.882.399.320,00	9.734.357.364,00	98,50	11.469.675.058,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	122.050.000,00
Dinas Perikanan	152.200.000,00	151.971.745,00	99,85	47.100.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.330.000,00	13.330.000,00	100,00	49.873.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	61.273.000,00	61.273.000,00	100,00	23.290.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	295.201.663,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	23.500.000,00	23.500.000,00	100,00	0,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	28.900.000,00	28.900.000,00	100,00	280.979.570,00
Dinas Sosial	61.046.000,00	61.046.000,00	100,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14.523.000,00	13.523.000,00	93,11	0,00
Inspektorat Daerah	56.841.000,00	56.841.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Kodi	16.273.000,00	16.273.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Kodi Bangedo	24.668.750,00	24.668.750,00	100,00	75.115.250,00
Kecamatan Wewewa Barat	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Wewewa Tengah	28.700.000,00	28.700.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Wewewa Utara	16.700.000,00	16.700.000,00	100,00	13.200.000,00
Kecamatan Kota Tambolaka	54.985.500,00	54.985.500,00	100,00	145.100.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	50.230.000,00	50.230.000,00	100,00	40.261.250,00
Sekretariat Daerah	398.033.300,00	398.031.000,00	100,00	149.214.000,00

Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Sekretariat DPRD	399.438.000,00	399.438.000,00	100,00	0,00
TOTAL	**29.332.368.704,00**	**27.119.273.098,00**	**92,46**	**32.506.485.331,00**

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp37.446.323.354,00	**Rp35.658.539.759,00**	**Rp73.256.412.346,00**

Jumlah senilai Rp35.658.539.759,00 merupakan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 atau 95,23% dari anggaran senilai Rp37.446.323.354,00. Nilai realisasi belanja modal gedung dan bangunan mengalami penurunan senilai Rp37.597.872.587,00 atau 51,32% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp73.256.412.346,00.

Tabel 5.1. 29 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	37.327.523.354,00	35.628.550.049,00	95,45	73.138.912.346,00
2	Belanja Modal Monumen	30.000.000,00	29.989.710,00	99,97	0,00
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	88.800.000,00	0,00	0,00	117.500.000,00
	JUMLAH	**37.446.323.354,00**	**35.658.539.759,00**	**95,23**	**73.256.412.346,00**

Dari tabel di atas dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut.

1. Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2024 terealisasi senilai Rp35.628.550.049,00 atau sebesar 95,45% dari anggaran senilai Rp37.327.523.354,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp37.510.362.297,00 atau 51,29 % dari realisasi tahun 2023 senilai Rp73.138.912.346,00.
2. Belanja Modal Monumen TA 2024 terealisasi senilai Rp29.989.710,00 atau sebesar 99,97% dari anggaran senilai Rp30.000.000,00. Belanja Modal Monumen tidak dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2023.
3. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2024 tidak ada realisasi dari anggaran senilai Rp88.800.000,00, tetapi terealisasi pada tahun 2023 senilai Rp117.500.000,00.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. 30 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2024 dan 2023

Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
DINAS KESEHATAN	8.071.792.619,00	6.478.945.815,00	80,27	6.188.219.023,00
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	76.253.000,00	76.253.000,00	100,00	0,00
DINAS PARIWISATA	156.043.500,00	155.936.324,00	99,93	261.755.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.000.000.000,00	3.973.933.300,00	99,35	5.727.235.417,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	792.512.000,00	792.348.400,00	99,98	529.801.346,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	24.112.701.035,00	23.946.115.084,00	99,31	60.178.500.900,00
DINAS PERIKANAN	237.021.200,00	235.007.836,00	99,15	0,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0,00	0,00	0,00	297.900.660,00
KECAMATAN WEWEWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	73.000.000,00
TOTAL	**37.446.323.354,00**	**35.658.539.759,00**	**95,23**	**73.256.412.346,00**

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp95.174.430.838,00	**Rp94.810.066.973,00**	**Rp118.375.365.601,00**

Jumlah senilai Rp94.810.066.973,00 merupakan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) Tahun Anggaran 2024 atau 99,62% dari anggaran senilai Rp95.174.430.838,00. Nilai realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp23.565.298.628,00 atau 19,91% dibanding dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp118.375.365.601,00. Rincian Belanja Modal JIJ Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1. 31 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Jalan	71.157.551.000,00	70.976.373.615,00	99,75	99.102.688.866,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	4.115.340.000,00	4.065.228.000,00	98,78	2.148.959.000,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	1.264.846.000,00
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	2.115.000.000,00	2.057.000.000,00	97,26	0,00
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	325.000.000,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	602.000.000,00	602.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum	16.441.485.680,00	16.366.715.358,00	99,55	15.462.071.735,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	743.054.158,00	742.750.000,00	99,96	71.800.000,00
Jumlah	**95.174.430.838,00**	**94.810.066.973,00**	**99,62**	**118.375.365.601,00**

Dari tabel di atas dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut.

1. Belanja Modal Jalan TA 2024 terealisasi senilai Rp70.976.373.615,00 atau sebesar 99,75% dari anggaran senilai Rp71.157.551.000,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp28.126.315.251,00 atau 28,38% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp99.102.688.866,00.
2. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi TA 2024 terealisasi senilai Rp4.065.228.000,00 atau sebesar 98,78% dari anggaran senilai Rp4.115.340.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp1.916.269.000,00 atau 89,17% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp2.148.959.000,00.
3. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam TA 2024 tidak tersedia anggaran dan realisasi, tetapi terealisasi pada tahun 2023 senilai Rp1.264.846.000,00.
4. Belanja Modal Instalasi Air Kotor TA 2024 terealisasi senilai Rp2.057.000.000,00 atau sebesar 97,26% dari anggaran senilai Rp2.115.000.000,00. Belanja Modal Instalasi Air Kotor tidak dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023.
5. Belanja Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah TA 2024 tidak ada realisasi dan anggaran, tetapi terealisasi pada tahun 2023 senilai Rp325.000.000,00.
6. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik TA 2024 terealisasi senilai Rp602.000.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran senilai Rp602.000.000,00. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik tidak dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023.
7. Belanja Modal Jaringan Air Minum TA 2024 terealisasi senilai Rp16.366.715.358,00 atau sebesar 99,55% dari anggaran senilai Rp16.441.485.680,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp904.643.623,00 atau 5,85% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp15.462.071.735,00.
8. Belanja Modal Jaringan Listrik TA 2024 terealisasi senilai Rp742.750.000,00 atau 99,96% dari anggaran senilai Rp743.054.158,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp670.950.000,00 atau 934,47% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp71.800.000,00.

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. 32 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Per SKPD Tahun 2024 dan 2023

Nama SKPD	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
DINAS KESEHATAN	2.717.000.000,00	2.659.000.000,00	97,87	3.000.000,00
DINAS PARIWISATA	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	91.406.376.680,00	91.100.316.973,00	99,67	117.506.775.601,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	40.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	325.000.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	713.054.158,00	712.750.000,00	99,96	0,00
KECAMATAN TAMBOLAKA	308.000.000,00	308.000.000,00	100,00	471.790.000,00
TOTAL	**95.174.430.838,00**	**94.810.066.973,00**	**99,62**	**118.375.365.601,00**

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp3.191.782.475,00	**Rp3.045.057.803,00**	**Rp3.252.975.214,00**

Jumlah senilai Rp3.045.057.803,00 merupakan realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya TA 2024 dari anggaran senilai Rp3.191.782.475,00 atau 95,40%. Realisasi tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp207.917.411,00 atau 6,39% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp3.252.975.214,00. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 berada hanya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagai berikut.

Tabel 5.1. 33 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	792.750.000,00	789.123.628,00	99,54	1.270.575.720,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	633.600.000,00	622.221.600,00	98,20	306.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.689.886.875,00	1.558.166.975,00	92,21	1.676.399.494,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	75.545.600,00	75.545.600,00	100,00	0,00
Jumlah	**3.191.782.475,00**	**3.045.057.803,00**	**95,40**	**3.252.975.214,00**

Dari tabel di atas dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut.

1. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak TA 2024 terealisasi senilai Rp789.123.628,00 atau sebesar 99,54% dari anggaran senilai Rp792.750.000,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp481.452.092,00 atau 37,89% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp1.270.575.720,00.

2. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian TA 2024 terealisasi senilai Rp622.221.600,00 atau sebesar 98,20% dari anggaran senilai Rp633.600.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp316.221.600,00 atau 103,34% dari realisasi di tahun 2023 senilai Rp306.000.000,00.
3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS TA 2024 terealisasi senilai Rp1.558.166.975,00 atau sebesar 92,21% dari anggaran senilai Rp1.689.886.875,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp118.232.519,00 atau 7,05% dari realisasi di tahun 2023 senilai Rp1.676.399.494,00.
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS TA 2024 terealisasi senilai Rp75.545.600,00 atau sebesar 100% dari anggaran senilai Rp75.545.600,00. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS merupakan nomenklatur rekening baru pada TA 2024 yang digunakan untuk menganggarkan dan merealisasikan belanja yang berasal dari BOSP-BOS kinerja TA 2024.

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp0,00	**Rp0,00**	**Rp80.000.000,00**

Tidak ada realisasi dan anggaran di tahun 2024, tetapi terealisasi pada tahun 2023 senilai Rp80.000.000,00.

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp3.616.875.772,00	**Rp0,00**	**Rp0,00**

Realisasi belanja tidak terduga tahun 2024 senilai Rp0,00 dari anggaran senilai Rp3.616.875.772,00, sedangkan realisasi belanja tidak terduga pada tahun 2023 senilai Rp0,00.

5.1.2.4. Belanja Transfer

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp245.189.915.712,00	**Rp245.189.915.436,00**	**Rp251.137.025.408,00**

Jumlah senilai Rp245.189.915.436,00 merupakan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp245.189.915.712,00. Nilai realisasi Belanja Transfer tahun 2024

mengalami penurunan senilai Rp5.947.109.972,00 atau 2,37% dibanding dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp251.137.025.408,00. Rincian Belanja Transfer sebagai berikut.

Tabel 5.1. 34 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	2.766.806.712,00	2.766.806.473,00	100,00	1.626.899.958,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	242.423.109.000,00	242.423.108.963,00	100,00	249.510.125.450,00
	JUMLAH	**245.189.915.712,00**	**245.189.915.436,00**	**100,00**	**251.137.025.408,00**

5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil Pajak ke Desa

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp1.781.587.522,00	**Rp1.781.587.389,00**	**Rp1.626.899.958,00**

Jumlah senilai Rp1.781.587.389,00 merupakan realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp1.781.587.522,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.139.906.515,00 dari realisasi 2023 senilai Rp1.626.899.958,00.

Rincian realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1. 35 Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa per Kecamatan TA 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	LEBIH/(KURANG)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Kodi	195.665.767,00	195.665.667,00	100,00	100,00
Kodi Balaghar	82.385.544,00	82.385.544,00	0,00	100,00
Kodi Bangedo	216.262.053,00	216.262.053,00	0,00	100,00
Kodi Utara	216.262.053,00	216.262.053,00	0,00	100,00
Kota Tambolaka	82.385.544,00	82.385.544,00	0,00	100,00
Loura	113.280.123,00	113.280.123,00	0,00	100,00
Wewewa Barat	205.963.860,00	205.963.860,00	0,00	100,00
Wewewa Selatan	144.174.702,00	144.174.702,00	0,00	100,00
Wewewa Tengah	205.963.860,00	205.963.860,00	0,00	100,00
Wewewa Timur	195.665.667,00	195.665.667,00	0,00	100,00
Wewewa Utara	123.578.349,00	123.578.316,00	33,00	100,00
JUMLAH	**1.781.587.522,00**	**1.781.587.389,00**	**133,00**	**100,00**

5.1.2.4.2. Belanja Bagi Hasil Retribusi ke Desa

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp 985.219.190,00	**Rp 985.219.084,00**	**Rp0,00**

Jumlah senilai Rp985.219.084,00 merupakan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp985.219.190,00 mengalami kenaikan senilai Rp985.219.084,00 atau 100% dari realisasi 2023.

Rincian realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1. 36 Rincian Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kab/Kota Kepada Pemerintahan Desa per Kecamatan TA 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	LEBIH/(KURANG)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Kodi	108.203.325,00	108.203.252,00	73,00	100,00
Kodi Balaghar	45.559.264,00	45.559.264,00	0,00	100,00
Kodi Bangedo	119.593.068,00	119.593.068,00	0,00	100,00
Kodi Utara	119.593.068,00	119.593.068,00	0,00	100,00
Kota Tambolaka	45.559.264,00	45.559.264,00	0,00	100,00
Loura	62.643.988,00	62.643.988,00	0,00	100,00
Wewewa Barat	113.898.160,00	113.898.160,00	0,00	100,00
Wewewa Selatan	79.728.712,00	79.728.712,00	0,00	100,00
Wewewa Tengah	113.898.160,00	113.898.160,00	0,00	100,00
Wewewa Timur	108.203.252,00	108.203.252,00	0,00	100,00
Wewewa Utara	68.338.929,00	68.338.896,00	33,00	100,00
Jumlah	**985.219.190,00**	**985.219.084,00**	**106,00**	**100,00**

Rincian belanja transfer bagi hasil pajak dan belanja transfer bagi hasil retribusi daerah kepada setiap pemerintah desa dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5.1.2.4.3 Transfer Bantuan Keuangan

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp242.423.109.000,00	**Rp242.423.108.963,00**	**Rp249.510.125.450,00**

Jumlah senilai Rp242.423.108.963,00 merupakan realisasi belanja transfer bantuan keuangan Tahun Anggaran 2024 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp242.423.109.000,00 mengalami penurunan senilai Rp7.087.016.487,00 atau 2,84% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp249.510.125.450,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.1. 37 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	249.510.125.450,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	242.423.109.000,00	242.423.108.963,00	100,00	0,00
	JUMLAH	**242.423.109.000,00**	**242.423.108.963,00**	**100,00**	**249.510.125.450,00**

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa penurunan realisasi bantuan keuangan kepada desa terjadi karena adanya penurunan alokasi dana desa. Rincian realisasi Bantuan Keuangan kepada Desa dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1. 38 Rincian Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa TA 2024

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang)	%
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (DD – APBN) Kec. Kodi	20.038.121.000,00	20.038.121.000,00	0,00	100,00
2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (DD – APBN) Kec. Kodi Balagar	9.797.893.000,00	9.797.893.000,00	0,00	100,00
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (DD – APBN) Kec. Kodi Bangedo	22.720.149.000,00	22.720.149.000,00	0,00	100,00
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (DD – APBN) Kec. Kodi Utara	28.854.342.000,00	28.854.342.000,00	0,00	100,00
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (DD – APBN) Kec. Kota Tambolaka	8.742.753.000,00	8.742.753.000,00	0,00	100,00
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (DD – APBN) Kec. Loura	11.242.463.000,00	11.242.463.000,00	0,00	100,00
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (DD – APBN) Kec. Wewewa Barat	19.455.708.000,00	19.455.708.000,00	0,00	100,00
8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (DD – APBN) Kec. Wewewa Selatan	14.173.694.000,00	14.173.694.000,00	0,00	100,00
9	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (DD – APBN) Kec. Wewewa Tengah	19.616.054.000,00	19.616.054.000,00	0,00	100,00

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang)	%
10	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (DD – APBN) Kec. Wewewa Timur	17.394.913.000,00	17.394.913.000,00	0,00	100,00
11	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (DD – APBN) Kec. Wewewa Utara	12.572.847.000,00	12.572.847.000,00	0,00	100,00
12	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD – APBD) Kec. Kodi	6.380.400.389,00	6.380.400.389,00	0,00	100,00
13	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD – APBD) Kec. Kodi Balagar	2.662.273.848,00	2.662.273.848,00	0,00	100,00
14	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD – APBD) Kec. Kodi Bangedo	6.910.968.851,00	6.910.968.851,00	0,00	100,00
15	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD – APBD) Kec. Kodi Utara	7.150.968.851,00	7.150.968.851,00	0,00	100,00
16	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD – APBD) Kec. Kota Tambolaka	2.782.273.848,00	2.782.273.848,00	0,00	100,00
17	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD – APBD) Kec. Loura	3.658.126.541,00	3.658.126.541,00	0,00	100,00
18	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD – APBD) Kec. Wewewa Barat	6.705.684.620,00	6.705.684.620,00	0,00	100,00
19	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD – APBD) Kec. Wewewa Selatan	4.693.979.234,00	4.693.979.234,00	0,00	100,00
20	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD – APBD) Kec. Wewewa Tengah	6.665.684.620,00	6.665.684.620,00	0,00	100,00
21	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD – APBD) Kec. Wewewa Timur	6.260.400.389,00	6.260.400.389,00	0,00	100,00
22	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD – APBD) Kec. Wewewa Utara	3.943.410.809,00	3.943.410.772,00	37,00	100,00
Jumlah		**242.423.109.000,00**	**242.423.108.963,00**	**37,00**	**100,00**

Rincian transfer bantuan keuangan ke desa kepada setiap pemerintah desa dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

5.1.3 Surplus/ Defisit-LRA

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
(Rp 42.700.223.058,00)	Rp31.834.093.019,32	Rp21.945.818.170,99

Surplus Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024 senilai Rp31.834.093.019,32 mengalami peningkatan senilai Rp9.888.274.848,33 atau 45,06% dibanding realisasi tahun 2023 senilai Rp21.945.818.170,99.

5.1.4 Pembiayaan Daerah

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp42.700.223.058,00	Rp42.842.835.929,10	Rp32.754.404.887,93

Pembiayaan (*Financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran, yang terdiri dari:

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp54.700.223.058,00	Rp54.842.835.929,10	Rp34.754.404.887,93

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 senilai Rp54.842.835.929,10 yaitu 100,26% dari anggaran senilai Rp54.700.223.058,00. Penerimaan Pembiayaan Daerah diperoleh dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2023 senilai Rp54.842.835.929,10.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp12.000.000.000,00	Rp12.000.000.000,00	Rp2.000.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun 2024 senilai Rp12.000.000.000,00 yaitu 100% dari anggaran senilai Rp12.000.000.000,00 merupakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Bank NTT senilai Rp12.000.000.000,00.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp0,00	Rp74.676.928.948,42	Rp54.700.223.058,92

Jumlah senilai Rp74.676.928.948,42 merupakan SiLPA TA 2024 yang

bersumber dari Surplus Anggaran Pendapatan Daerah senilai Rp31.834.093.019,32 ditambah pembiayaan netto senilai Rp42.842.835.929,10. Nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp19.976.705.889,50 atau 36,52% dari SiLPA tahun anggaran 2023 senilai Rp54.700.223.058,92 Rincian SiLPA dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. 39 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024

Uraian	Nilai (Rp)
Surplus/(Defisit)	Rp31.834.093.019,32
Pembiayaan Netto	Rp42.842.835.929,10

5.2 Penjelasan Akun-akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.2. 1 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023
	(Rp)	(Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	54.700.223.058,92	34.754.404.889,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	54.842.835.929,10	34.754.404.887,93
Sub Total	(142.612.870,18)	1,07
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	74.676.928.948,42	54.700.223.058,92
Sub Total	74.534.316.078,24	54.700.223.059,99
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	142.612.870,18	(1.07)
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**74.676.928.948,42**	**54.700.223.058,92**

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp54.700.223.058,92	**Rp34.754.404.889,00**

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing disajikan senilai Rp54.700.223.058,92 dan Rp34.754.404.889,00. Saldo Anggaran lebih awal tahun 2024 mengalami kenaikan senilai Rp19.945.818.169,92 atau 57,39% dari realisasi tahun 2023.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp54.842.835.929,10	**Rp34.754.404.887,93**

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2023 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 senilai Rp54.842.835.929,10. Penggunaan Saldo Anggaran lebih tahun 2024 mengalami kenaikan senilai Rp20.088.431.041,17 atau 57,80% dari tahun 2023 senilai Rp34.754.404.887,93.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp74.676.928.948,42	**Rp54.700.223.058,92**

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran senilai Rp74.676.928.948,42 diperoleh dari Pembiayaan Netto senilai Rp42.842.835.929,10 ditambah dengan Surplus LRA senilai Rp31.834.093.019,32. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2024 mengalami peningkatan senilai Rp19.976.705.889,50 atau 36,52% dari realisasi tahun 2023 senilai Rp54.700.223.058,92.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp142.612.870,18	**Rp(1,07)**

Terdapat koreksi kurang pembukuan tahun sebelumnya senilai Rp142.612.870,18 terdiri dari koreksi kurang kas pada Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp10.886.920,00, Kas Dana BOK Puskesmas senilai Rp170.000,00. Koreksi tambah atas penghapusan Utang Iuran Jaminan Kesehatan senilai Rp15.224.718,00, dan Utang Iuran Wajib Pegawai Rp138.445.072,18.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Realisasi 2024	Realisasi 2023
Rp74.676.928.948,42	**Rp54.700.223.058,92**

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024 senilai Rp74.676.928.948,42 dibandingkan dengan TA 2023 senilai Rp54.700.223.058,92 mengalami kenaikan senilai Rp19.976.705.889,50 atau 36,52%.

5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca

Dalam penjelasan akun-akun Neraca diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut.

5.3.1 Aset

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp2.102.553.302.491,61	**Rp2.010.334.497.965,09**

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya per 31 Desember 2024 senilai Rp2.102.553.302.491,61 mengalami kenaikan senilai Rp92.218.804.526,52 atau 4,59% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp2.010.334.497.965,09 sebagaimana disajikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3. 1 Saldo Aset Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/(Penurunan)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Aset Lancar	103.016.111.112,98	90.434.884.485,51	12.581.226.627,47
Investasi Jangka Panjang	97.474.248.829,00	85.474.248.829,00	12.000.000.000,00
Aset Tetap	1.857.744.286.340,04	1.797.353.714.099,43	60.390.572.240,61
Aset Lainnya	39.166.371.209,59	37.071.650.551,15	2.094.720.658,44
Properti Investasi	5.152.285.000,00	0,00	5.152.285.000,00
Total	**2.102.553.302.491,61**	**2.010.334.497.965,09**	**92.218.804.526,52**

5.3.1.1. Aset Lancar

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp103.016.111.112,98	**Rp90.434.884.485,51**

Aset lancar terdiri atas Kas dan Setara Kas, serta aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp103.016.111.112,98 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.3. 2 Saldo Aset Lancar Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Kas di Kas Daerah	70.397.469.118,98	48.665.296.473,91	21.732.172.645,07	44,66
Kas di Bendahara Penerimaan	65.806.218,00	69.417.882,00	(3.611.664,00)	(5,20)
Kas di Bendahara Pengeluaran	29.655.490,00	88.116.251,49	(58.460.761,49)	(66,35)
Kas Dana BOS	0,00	349.954.855,56	(349.954.855,56)	(100,00)
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	376.013.475,14	1.957.741.387,14	(1.581.727.912,00)	(80,79)
Kas Lainnya	39.329.266,05	3.778.706.988,00	(3.739.377.721,95)	(98,96)
Kas Dana BOSP	785.956.588,30	0,00	785.956.588,30	100,00
Kas Dana BOK Puskesmas	3.054.198.952,00	0,00	3.054.198.952,00	100,00
Piutang Pajak Daerah	16.926.553.540,00	14.891.647.516,00	2.034.906.024,00	13,66
Piutang Retribusi Daerah	1.118.406.002,00	499.161.100,00	619.244.902,00	124,06
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	618.730.208,09	0,00	618.730.208,09	100,00
Piutang Transfer Antar Daerah	2.261.459.724,00	5.694.437.193,00	(3.432.977.469,00)	(60,29)
Piutang Lainnya	0,00	4.963.527.077,00	(4.963.527.077,00)	(100,00)
Penyisihan Piutang	(10.935.992.257,19)	(14.417.067.902,98)	3.481.075.645,79	(24,15)
Beban Dibayar Dimuka	1.047.468.920,00	0,00	1.047.468.920,00	100,00
Persediaan	17.231.055.867,61	23.893.945.664,39	(6.662.889.796,78)	(27,89)
JUMLAH ASET LANCAR	**103.016.111.112,98**	**90.434.884.485,51**	**12.581.226.627,47**	**13,91**

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp70.397.469.118,98	**Rp48.665.296.473,91**

Saldo Kas di Kas Daerah menurut Bank per 31 Desember 2024 senilai Rp70.435.529.673,03 dan menurut pembukuan senilai Rp70.397.469.118,98. Saldo kas di kas daerah pada tahun 2024 mengalami kenaikan senilai Rp21.732.172.645,07 atau 44,66% dari saldo tahun 2023 senilai Rp48.665.296.473,91. Terdapat selisih saldo menurut Bank dan Pembukuan sebesar Rp38.060.554,05 merupakan setoran jasa giro atas rekening sekolah swasta dan rekening dana desa yang keliru disetor ke Kas Daerah. Atas saldo tersebut dicatat dalam rekening Kas lainnya yang akan dikembalikan pada tahun 2025. Adapun rincian Kas Daerah menurut pembukuan dan Kas Daerah menurut Bank sebagai berikut.

Tabel 5.3. 3 Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2024

No	Nama bank	No. Rekening	Saldo Menurut Bank (Rp)	Saldo Menurut Pembukuan (Rp)
1	Kas Umum Daerah	027.01.04.000001-8	70.306.554.526,60	70.397.469.118,98
2	Jasa Giro Kas Daerah dan SKPD + Bunga Deposito	027.01.04.000002-1	128.975.146,43	0,00
3	PBB + BPHTB + Jagirnya di Bank NTT	027.01.05.000163-9	0,00	0,00
4	Pajak Penerangan Jalan Kab SBD di BRI	218601000723303	0,00	0,00
Jumlah			**70.435.529.673,03**	**70.397.469.118,98**

Penggunaan masing-masing rekening di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Rekening Giro Nomor 027.01.04.000001-8 digunakan sebagai rekening kas umum daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang menampung semua penerimaan yang ditransfer ke kas daerah. Saldo rekening kas umum daerah pada tahun 2024 senilai Rp70.306.554.526,00 mengalami peningkatan senilai Rp21.754.768.035,41 atau 44,81% dari saldo tahun 2023 senilai Rp48.551.786.491,19.
2. Rekening Giro Nomor 027.01.04.000002-1 digunakan sebagai penampung jasa giro rekening bendahara pengeluaran, rekening JKN Puskesmas dan rekening BOS sekolah. Saldo rekening jasa giro pada tahun 2024 senilai Rp128.975.146,43 mengalami peningkatan senilai Rp26.967.108,71 atau 26,44% dari saldo tahun 2023 senilai Rp102.008.037,72.
3. Rekening Giro Nomor 027.01.05.000163-9 digunakan sebagai penampung pendapatan PBB dan BPHTB. Saldo rekening pendapatan PBB dan BPHTB pada tahun 2024 senilai Rp0,00 mengalami penurunan senilai Rp11.501.945,00 atau 100% dari saldo tahun 2023 senilai Rp11.501.945,00.
4. Rekening Pajak Penerangan Jalan Kab SBD di BRI Nomor 218601000723303 digunakan sebagai penampung pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan. Saldo rekening pada tahun 2024 senilai Rp0,00.

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp65.806.218,00	**Rp69.417.882,00**

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung saldo kas di bendahara penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Per tanggal 31 Desember 2024, Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp65.806.218,00. Saldo kas di bendahara penerimaan pada tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp3.611.664,00 atau 5,20% dibandingkan tahun 2023 senilai Rp69.417.882,00.

Adapun Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2024 terdiri dari Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas yang baru disetorkan pada tahun 2025 senilai Rp14.937.118,00 dan Pendapatan Non Kapitasi bulan Desember 2024 yang baru disetorkan pada tahun 2025 senilai Rp18.992.100,00, Retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Reda Bolo dan Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor sebesar Rp17.013.000,00, dan Retribusi Rumah Tangga – Iuran Air Bersih pada UPTD SPAM senilai Rp14.864.000,00.

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp29.655.490,00	**Rp88.116.251,49**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung sisa kas atas belanja yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2024 senilai Rp29.655.490,00 atau mengalami penurunan senilai Rp58.460.761,49 atau 66,35% dibanding tahun 2023. Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2024 berada pada tiga SKPD dengan rincian berikut.

Tabel 5.3. 4 Rincian Saldo Kas di bendahara Pengeluaran Tahun 2024

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	440.000,00	Pengembalian belanja perjalanan dinas ke Jakartabidang Kelembagaan lewat tahun berkenaan
2	KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA	25.981.400,00	Sisa GU yang terlambat dibayarkan pada 31 Desember 2024
3	SEKRETARIAT DAERAH	3.234.090,00	Setoran sisa UP/GU yang masih ada di kas Bendahara Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah
JUMLAH		**29.655.490,00**	

Atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran di atas telah disetorkan dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3. 5 Penyetoran Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah

No	SKPD	Nilai (Rp)	Tanggal Penyetoran ke Kasda	Nomor Bukti Setoran
1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	440.000,00	15 Januari 2025	TT2505M7W72

No	SKPD	Nilai (Rp)	Tanggal Penyetoran ke Kasda	Nomor Bukti Setoran
2	KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA	25.981.400,00	23 Januari 2025	TT25023N5WBQ
3	SEKRETARIAT DAERAH	3.234.090,00	30 Januari 2025	TT25030RHX54
JUMLAH		**29.655.490,00**		

5.3.1.1.4. Kas di Bendahara BOS

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	**349.954.855,56**

Saldo kas dana BOS per 31 Desember 2024 pada 204 Satuan Pendidikan Dasar Negeri di Kabupaten Sumba Barat Daya senilai Rp0,00 mengalami penurunan senilai Rp349.954.855,56 atau 100,00% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur rekening Kas di bendahara BOS menjadi Kas di bendahara BOSP.

5.3.1.1.5. Kas Dana Kapitasi pada FKTP

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp376.013.475,14	**Rp1.957.741.387,14**

Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2024 senilai Rp376.013.475,14 mengalami penurunan senilai Rp1.581.727.912,00 atau 80,79% dibandingkan dengan saldo pada 31 Desember 2023 senilai Rp1.957.741.387,14. Kas di Bendahara JKN pada Tahun 2024 terdapat pada 16 Puskesmas dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3. 6 Saldo Kas di Bendahara JKN per 31 Desember 2024

No	Nama Sub Unit	Saldo Awal (Rp)	Mutasi 2024		Saldo Akhir (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Puskesmas Radamata	443.039.697,14	1.050.052.912,00	1.467.730.903,00	25.361.706,14
2	Puskesmas Waimangura	71.465.559,90	1.499.024.524,00	1.538.019.575,00	32.470.508,90
3	Puskesmas Tanggaba	231.220.470,00	1.675.795.001,00	1.785.296.472,00	121.718.999,00
4	Puskesmas Tena Teke	244.300.295,59	971.908.281,00	1.174.041.877,00	42.166.699,59
5	Puskesmas Palla	15.472.340,00	851.873.484,00	867.345.824,00	0,00
6	Puskesmas Kori	92.940.919,00	1.715.428.220,00	1.752.275.246,00	56.093.893,00
7	Puskesmas Bondo Kodi	53.148.340,00	1.141.075.327,00	1.194.051.620,00	172.047,00
8	Puskesmas Walla Ndimu	11.389.098,00	724.964.185,00	736.353.283,00	0,00
9	Puskesmas Watu Kawula	115.486.534,51	1.858.894.204,00	1.974.369.515,00	11.223,51
10	Puskesmas Panenggo Ede	157.613.135,00	1.139.174.787,00	1.296.575.285,00	212.637,00

No	Nama Sub Unit	Saldo Awal (Rp)	Mutasi 2024		Saldo Akhir (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
11	Puskesmas Billa Cenge	96.209.463,00	1.169.858.670,00	1.258.408.648,00	7.659.485,00
12	Puskesmas Elopada	9.813.239,00	1.392.335.260,00	1.382.766.058,00	19.382.441,00
13	Puskesmas Weekombak	226.520.614,00	814.147.913,00	1.024.168.367,00	16.500.160,00
14	Puskesmas Delu Depa	31.235.711,00	636.174.268,00	659.028.293,00	8.381.686,00
15	Puskesmas Kawango Hari	23.638.010,00	684.561.173,00	681.980.568,00	26.218.615,00
16	Puskesmas Weri Lolo	134.247.961,00	334.358.510,00	448.943.097,00	19.663.374,00
JUMLAH		**1.957.741.387,14**	**17.659.626.719,00**	**19.241.354.631,00**	**376.013.475,14**

5.3.1.1.6. Kas Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp39.329.266,05	**Rp3.778.706.988,00**

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp39.329.266,05, mengalami penurunan senilai Rp3.739.377.721,95 atau 98,96% dibanding dengan tahun 2023 yaitu senilai Rp3.778.706.988,00. Saldo kas lainnya merupakan pajak PPh 21 atas honorarium yang kurang dipotong oleh Bendahara Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah tahun 2024 Rp1.234.700,00, kelebihan pengembalian Belanja BOK pada Puskesmas Weri Lolo tahun 2024 sebesar Rp34.012,00 dan Jasa giro sekolah swasta dan dana desa yang salah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp38.060.554,05. Pajak atas honorarium sudah disetorkan pada tanggal 10 Maret 2025 dengan NTPN 0EF961PM35NTP3GB.

5.3.1.1.7. Kas Dana BOSP

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp785.956.588,30	**Rp 0,00**

Saldo kas dana BOSP per 31 Desember 2024 pada 204 Satuan Pendidikan Dasar Negeri di Kabupaten Sumba Barat Daya senilai Rp785.956.588,30 mengalami kenaikan senilai Rp785.956.588,30 atau 100,00% dibandingkan TA 2023.

Kas di Bendahara BOSP ini bersumber dari Silpa dana BOSP per 31 Desember 2023, pendapatan dana BOSP reguler dan dana BOSP Kinerja TA 2024.

Rincian Pendapatan, Belanja dan Saldo kas Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dapat dilihat pada **Lampiran 5**

5.3.1.1.8. Kas Dana BOK Puskesmas

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp 3.054.198.952,00	**Rp0,00**

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 pada 16 Puskesmas di Kabupaten Sumba Barat Daya senilai Rp3.054.198.952,00, mengalami kenaikan senilai Rp3.054.198.952 atau 100,00% dibandingkan TA 2023.

Kas Dana BOK Puskesmas ini bersumber dari Silpa Dana BOK per 31 Desember 2023 dan Pendapatan Transfer TA 2024. Kas Dana BOK Puskesmas pada Tahun 2024 terdapat pada 16 Puskesmas dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3. 7 Saldo Kas Dana BOK per 31 Desember 2024

No	Nama Sub Unit	Saldo Awal (Rp)	Mutasi 2024		Saldo Akhir (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	PUSKESMAS BILLA CENGE	147.380.370,00	657.938.630,00	466.983.406,00	338.335.594,00
2	PUSKESMAS BONDO KODI	697.193.180,00	9.905.707,00	454.734.332,00	252.364.555,00
3	PUSKESMAS DELU DEPA	291.509.670,00	445.124.330,00	395.069.000,00	341.565.000,00
4	PUSKESMAS ELOPADA	300.268.305,00	474.358.695,00	652.624.080,00	122.002.920,00
5	PUSKESMAS KAWANGO HARI	59.677.081,00	583.445.919,00	398.136.000,00	244.987.000,00
6	PUSKESMAS KORI	176.709.955,00	805.556.045,00	951.480.119,00	30.785.881,00
7	PUSKESMAS PALLA	20.838.854,00	841.703.146,00	831.955.000,00	30.587.000,00
8	PUSKESMAS PANENGGO EDE	296.202.379,00	503.606.621,00	587.090.303,00	212.718.697,00
9	PUSKESMAS RADAMATA	323.135.052,00	682.777.948,00	872.223.651,00	133.689.349,00
10	PUSKESMAS TANGGABA	277.282.130,00	548.160.759,00	692.576.063,00	132.866.826,00
11	PUSKESMAS TENA TEKE	48.914.420,00	820.455.580,00	576.570.835,00	292.799.165,00
12	PUSKESMAS WAIMANGURA	259.698.910,00	700.373.090,00	615.229.949,00	344.842.051,00
13	PUSKESMAS WALLA NDIMU	166.183.380,00	499.176.620,00	469.460.589,00	195.899.411,00
14	PUSKESMAS WATUKAWULA	187.826.551,00	572.642.449,00	746.996.613,00	13.472.387,00
15	PUSKESMAS WEEKOMBAK	438.492.640,00	305.413.360,00	602.679.255,00	141.226.745,00
16	PUSKESMAS WERILOLO	64.258.028,00	764.226.984,00	602.428.641,00	226.056.371,00
JUMLAH		**3.755.570.905,00**	**9.214.865.883,00**	**9.916.237.836,00**	**3.054.198.952,00**

5.3.1.1.9. Piutang Pendapatan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp20.925.149.474,09	**Rp 26.048.772.886,00**

Jumlah Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing- masing senilai Rp20.925.149.474,09 dan Rp26.048.772.886,00, mengalami penurunan senilai Rp5.123.623.411,91 atau 19,67% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023. Jumlah Piutang Pendapatan senilai Rp20.925.149.474,09 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan nilai piutang pendapatan sebelum penyisihan.

Tabel 5.3. 8 Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024

No	Jenis Piutang	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
1	Piutang Pajak Daerah	14.891.647.516,00	8.990.350.602,00	6.955.444.578,00	16.926.553.540,00
2	Piutang Retribusi Daerah	499.161.100,00	978.266.002,00	359.021.100,00	1.118.406.002,00
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	618.730.208,09	0,00	618.730.208,09
4	Piutang Transfer Antar Daerah	5.694.437.193,00	2.261.459.724,00	5.694.437.193,00	2.261.459.724,00
5	Piutang Lainnya	4.963.527.077,00	0,00	4.963.527.077,00	0,00
Jumlah		**26.048.772.886,00**	**12.848.806.536,09**	**17.972.429.948,00**	**20.925.149.474,09**

Uraian lebih lanjut atas masing-masing piutang adalah sebagai berikut.

5.3.1.1.9.1 Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp16.926.553.540,00	**Rp 14.891.647.516,00**

Saldo Piutang Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing disajikan senilai Rp16.926.553.540,00 dan Rp14.891.647.516,00, mengalami kenaikan senilai Rp2.034.906.024,00 atau sebesar 13,66%. Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.3. 9 Daftar Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024

No	Jenis Piutang	2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2024 (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	535.145.285,00	0,00	535.145.285,00	0,00
2	Piutang Pajak Restoran	314.307.849,00	0,00	313.857.849,00	450.000,00
3	Piutang Pajak Hiburan	0,00	54.823.500,00	0,00	54.823.500,00
4	Piutang Pajak Reklame	25.659.407,00	567.000,00	25.659.407,00	567.000,00

No	Jenis Piutang	2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2024 (Rp)
6	Piutang Pajak Penerangan Jalan	342.102.481,00	0,00	342.102.481,00	0,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	1.410.240,00	0,00	1.410.240,00	0,00
8	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	40.459.192,00	0,00	40.459.192,00	0,00
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	13.632.563.062,00	8.934.960.102,00	5.696.810.124,00	16.870.713.040,00
JUMLAH		**14.891.647.516,00**	**8.990.350.602,00**	**6.955.444.578,00**	**16.926.553.540,00**

Dari tabel di atas, Piutang Pajak Daerah dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut.

a) Saldo Piutang Pajak Hotel pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing disajikan senilai Rp0,00 dan Rp535.145.285,00, mengalami penurunan pada tahun 2024 senilai Rp535.145.285,00.

b) Saldo Piutang Pajak Restoran pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing disajikan senilai Rp450.000,00 dan Rp314.307.849,00, mengalami penurunan pada tahun 2024 senilai Rp313.857.849,00.

c) Saldo Piutang Pajak Hiburan pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing disajikan senilai Rp54.823.500,00 dan Rp0,00, mengalami kenaikan pada tahun 2024 senilai Rp54.823.500,00. Piutang Pajak Hiburan tahun 2024 berupa Piutang Pajak Usaha Spa.

d) Saldo Piutang Pajak Reklame pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing disajikan senilai Rp567.000,00 dan Rp25.659.407,00, mengalami penurunan pada tahun 2024 senilai Rp25.092.407,00.

e) Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing disajikan senilai Rp0,00 dan Rp342.102.481,00, mengalami penurunan pada tahun 2024 senilai Rp342.102.481,00.

f) Saldo Piutang Pajak Air Tanah pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing disajikan senilai Rp0,00 dan Rp1.410.240,00, mengalami penurunan pada tahun 2024 senilai Rp1.410.240,00.

g) Saldo Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing disajikan Rp0,00 dan Rp40.459.192,00, mengalami penurunan pada tahun 2024 senilai

Rp40.459.192,00.

h) Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing disajikan senilai Rp16.870.713.040,00 dan Rp13.632.563.062,00, mengalami kenaikan pada tahun 2024 senilai Rp3.238.149.978,00.

5.3.1.1.9.2 Piutang Retribusi Daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp1.118.406.002,00	**Rp499.161.100,00**

Saldo Piutang Retribusi pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing disajikan senilai Rp1.118.406.002,00 dan Rp499.161.100,00, mengalami kenaikan senilai Rp619.244.902,00 atau sebesar 124,06%. Rincian Piutang Retribusi daerah per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.3. 10 Daftar Piutang Retribusi Daerah

No	Jenis Piutang	2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2024 (Rp)
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	361.161.100,00	978.266.002,00	359.021.100,00	980.406.002,00
2	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	138.000.000,00	0,00	0,00	138.000.000,00
JUMLAH		**499.161.100,00**	**978.266.002,00**	**359.021.100,00**	**1.118.406.002,00**

Dari tabel di atas, Piutang Pajak Daerah dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut.

a) Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing disajikan senilai Rp980.406.002,00 dan Rp361.161.100,00 mengalami penurunan sebesar Rp619.244.902,00 atau 171,46%. Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan ini merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Reda Bolo. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada 16 Puskesmas belum dapat disajikan sebab masih terdapat perbedaan data klaim BPJS Kesehatan antara Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

b) Saldo Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing disajikan senilai Rp138.000.000,00 dan Rp138.000.000,00, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan di tahun 2024.

5.3.1.1.9.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp618.730.208,09	**Rp0,00**

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing disajikan senilai Rp618.730.208,09 dan Rp0,00. Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah antar daerah pada tahun 2024 mengalami kenaikan senilai Rp618.730.208,09 atau 100,00% dibandingkan dengan tahun 2023.

5.3.1.1.9.4 Piutang Transfer Antar Daerah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp2.261.459.724,00	**Rp5.694.437.193,00**

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2024 dan 2023 masing-masing disajikan senilai Rp2.261.459.724,00 dan Rp5.694.437.193,00. Saldo Piutang Transfer Antar Daerah pada tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp3.432.977.469,00 atau 60,29% dibandingkan dengan tahun 2023.

Tabel 5.3. 11 Daftar Piutang Transfer Antar Daerah

No	Jenis Piutang	Saldo Awal 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
1	PKB	1.821.677.760,00	0,00	1.821.677.760,00	0,00
2	BBNKB	894.065.835,00	218.509.034,00	894.065.835,00	218.509.034,00
3	PBB-KB	2.977.722.675,00	2.042.536.512,00	2.977.722.675,00	2.042.536.512,00
4	PAP	970.923,00	414.178,00	970.923,00	414.178,00
JUMLAH		**5.694.437.193,00**	**2.261.459.724,00**	**5.694.437.193,00**	**2.261.459.724,00**

5.3.1.1.9.5 Piutang Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp0,00	**Rp4.963.527.077,00**

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing- masing senilai Rp0,00 dan Rp4.963.527.077,00**.** Piutang ini merupakan piutang dana bergulir yang direklasifikasi ke rekening Dana Bergulir kepada Masyarakat pada pos Investasi Jangka Panjang – Investasi Non Permanen pada tahun 2024.

5.3.1.1.10. Penyisihan Piutang

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp10.935.992.257,19)	**(Rp14.417.067.902,98)**

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 senilai (Rp10.935.992.257,19), mengalami penurunan senilai Rp3.481.075.645,79 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai (Rp14.417.067.902,98). Saldo Penyisihan Piutang 2024 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.3. 12 Saldo Penyisihan Piutang Tahun 2024

No	Jenis Piutang	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
	Piutang Pendapatan Pajak Daerah	**(9.376.870.825,98)**			**(10.821.521.307,54)**
1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(2.675.726,43)	0,00	2.675.726,43	0,00
2	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(1.571.539,25)	(42.750,00)	1.569.289,25	(45.000,00)
3	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	0,00	(274.118,00)	0,00	(274.118,00)
4	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(128.297,04)	(2.835,00)	128.297,04	(2.835,00)
5	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(1.710.512,41)	0,00	1.710.512,41	0,00
6	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(7.051,20)	0,00	7.051,20	0,00
7	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(202.295,96)	0,00	202.295,96	0,00
8	Penyisihan Piutang PBB P2	(9.370.575.403,69)	(1.468.417.068,02)	17.793.117,17	(10.821.199.354,54)
	Piutang Retribusi Daerah	**(76.670.000,00)**			**(100.070.000,00)**
1	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	(1.070.000,00)	0,00	0,00	(1.070.000,00)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor	(75.600.000)	(23.400.000,00)	0,00	(99.000.000,00)
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	**0,00**			**(3.093.651,03)**
1	Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga-Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	(11,89)	0,00	(11,89)
2	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	(50.501,57)	0,00	(50.501,57)

No	Jenis Piutang	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
3	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	(140.246,78)	0,00	(140.246,78)
4	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	(839.594,93)	0,00	(839.594,93)
5	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	(2.063.295,86)	0,00	(2.063.295,86)
	Piutang Transfer Antar Daerah	**0,00**			**(11.307.298,62)**
1	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	(1.092.545,17)	0,00	(1.092.545,17)
2	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	(10.212.682,56)	0,00	(10.212.682,56)
3	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Air Permukaan	0,00	(2.070,89)	0,00	(2.070,89)
	Piutang Lainnya	**(4.963.527.077,00)**			**0,00**
1	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III	(4.963.527.077,00)	0,00	4.963.527.077,00	0,00
JUMLAH		**(14.417.067.902,98)**	**(1.506.537.720,67)**	**4.987.613.366,46**	**(10.935.992.257,19)**

Dari tabel di atas, penyisihan piutang dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut.

a) Saldo Penyisihan Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 dan mengalami penurunan di tahun 2024 senilai Rp2.675.726,43.

b) Saldo Penyisihan Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2024 senilai (Rp45.000,00) dan mengalami penurunan di tahun 2024 senilai Rp1.526.539,25.

c) Saldo Penyisihan Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2024 senilai (Rp274.118,00) dan mengalami kenaikan di tahun

2024 senilai Rp274.118,00.

d) Saldo Penyisihan Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024 senilai (Rp2.835,00) dan mengalami penurunan di tahun 2024 senilai Rp125.462,04.

e) Saldo Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 dan mengalami penurunan di tahun 2024 senilai Rp1.710.512,41.

f) Saldo Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 dan dan mengalami penurunan di tahun 2024 senilai Rp7.051,20.

g) Saldo Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 dan dan mengalami penurunan di tahun 2024 senilai Rp202.295,96.

h) Saldo Penyisihan Piutang PBB P2 per 31 Desember 2024 senilai (Rp10.821.199.354,54) dan mengalami kenaikan di tahun 2024 senilai Rp1.450.623.950,85.

i) Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas per 31 Desember 2024 senilai (Rp1.070.000,00) dan tidak ada kenaikan atau penurunan penyisihan pada tahun 2024.

j) Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah- Pemakaian Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2024 senilai (Rp99.000.000,00) dan mengalami kenaikan di tahun 2024 senilai Rp23.400.000,00.

k) Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga-Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 senilai (Rp11,89) dan mengalami kenaikan di tahun 2024 senilai Rp11,89.

l) Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor per 31 Desember 2024 senilai (Rp50.501,57) dan mengalami kenaikan di tahun 2024 senilai Rp50.501,57.

m) Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan per 31 Desember 2024 senilai (Rp140.246,78) dan mengalami kenaikan di tahun 2024 senilai Rp140.246,78.

n) Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan per 31 Desember 2024 senilai (Rp839.594,93) dan mengalami kenaikan di tahun 2024 senilai

Rp839.594,93.

o) Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten per 31 Desember 2024 senilai (Rp2.063.295,86) dan mengalami kenaikan di tahun 2024 senilai Rp2.063.295,86.

p) Saldo Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2024 senilai (Rp1.092.545,17) dan mengalami kenaikan di tahun 2024 senilai Rp1.092.545,17.

q) Saldo Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2024 senilai (Rp10.212.682,56) dan mengalami kenaikan di tahun 2024 senilai Rp10.212.682,56.

r) Saldo Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2024 senilai (Rp2.070,89) dan mengalami kenaikan di tahun 2024 senilai Rp2.070,89.

s) Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 dan mengalami penurunan di tahun 2024 senilai Rp4.963.527.077,00. Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III berisi penyisihan piutang dana bergulir. Adanya reklasifikasi piutang dana bergulir yang sebelumnya berada pada rekening Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain direklasifikasi ke rekening Dana Bergulir kepada Masyarakat pada pos Investasi Jangka Panjang – Investasi Non Permanen pada tahun 2024 menyebabkan reklasifikasi penyisihan atas piutang dana bergulir ke pos Investasi Jangka Panjang – Investasi Non Permanen.

5.3.1.1.11. Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2024	31 Desember 2024
Rp1.047.468.920,00	**Rp0,00**

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 senilai Rp1.047.468.920,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.047.468.920,00 atau 100,00% dibandingkan dengan saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00. Saldo Beban Dibayar Dimuka berupa sisa hibah PILKADA kepada KPU dan BAWASLU yang baru disetorkan ke Kas Daerah pada tahun 2025.

5.3.1.1.12. Persediaan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp17.231.055.867,61	**Rp23.893.945.664,39**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 senilai Rp17.231.055.867,61 mengalami penurunan senilai Rp6.662.889.796,78 atau 27,89% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2023 senilai Rp23.893.945.664,39. Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 berdasarkan hasil *stock opname* yang dilakukan pada akhir tahun, yang terdiri atas.

Tabel 5.3. 13 Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
I	**Persediaan Obat-Obatan dan Bahan Material**				
1	Dinas Kesehatan	14.497.928.017,45	18.352.288.021,87	22.943.870.252,90	9.906.345.786,42
2	Puskesmas Radamata	343.880.836,14	1.382.717.012,72	1.348.465.676,35	378.132.172,51
3	Puskesmas Waimangura	327.843.431,93	1.236.584.512,45	1.143.349.920,11	421.078.024,27
4	Puskesmas Tanggaba	114.913.625,46	1.413.391.198,52	1.358.184.008,12	170.120.815,86
5	Puskesmas Tena Teke	269.725.957,67	1.124.123.014,06	1.141.742.999,63	252.105.972,10
6	Puskesmas Palla	165.862.347,43	969.851.170,46	1.039.548.959,00	96.164.558,89
7	Puskesmas Kori	151.850.221,25	1.865.941.338,80	1.804.435.810,39	213.355.749,66
8	Puskesmas Bondo Kodi	122.094.004,82	1.810.259.886,23	1.846.005.711,44	86.348.179,61
9	Puskesmas Walla Ndimu	430.725.490,05	963.418.103,08	1.337.347.962,22	56.795.630,91
10	Puskesmas Watu Kawula	184.799.224,73	1.948.700.159,81	1.999.703.139,94	133.796.244,60
11	Puskesmas Panenggo Ede	333.660.525,86	1.404.665.015,57	1.466.172.449,29	272.153.092,14
12	Puskesmas Billa Cenge	231.431.621,99	1.294.354.056,33	1.385.914.591,15	139.871.087,17
13	Puskesmas Elopada	134.362.679,18	1.861.800.070,48	1.856.363.710,35	139.799.039,31
14	Puskesmas Weekombaka	113.880.938,02	1.015.211.475,05	996.078.921,27	133.013.491,80
15	Puskesmas Weri Lolo	124.868.163,13	597.525.121,12	630.446.795,50	91.946.488,75
16	Puskesmas Delu Depa	81.940.008,18	783.907.240,67	776.952.574,36	88.894.674,49
17	Puskesmas Kawango Hari	152.496.238,37	1.062.198.253,94	1.101.344.259,48	113.350.232,83
18	RSUD Reda Bolo	2.904.380.288,73	1.189.290.174,19	1.434.102.669,63	2.659.567.793,29
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana	576.123.960,00	3.147.513.695,00	3.354.831.528,00	368.806.127,00
20	Dinas Kependudukan dan Catatatan Sipil	288.420.000,00	1.856.161.959,00	1.389.131.901,00	755.450.058,00
21	Dinas Perhubungan	25.060.198,00	112.095.600,00	111.805.600,00	25.350.198,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	384.695.540,00	4.662.541.331,00	4.651.091.721,00	396.145.150,00
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD	3.900.000,00	1.775.844.700,00	1.779.744.700,00	0,00

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)
24	Badan Pendapatan Daerah	335.351.300,00	571.218.400,00	574.104.400,00	332.465.300,00
25	Kec. Wewewa barat	890.500,00	237.197.615,00	238.088.115,00	0,00
26	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.500,00	19.853.895.158,00	19.853.897.658,00	0,00
27	Sekretariat DPRD	13.875.046,00	4.170.286.260,00	4.184.161.306,00	0,00
II	**Persediaan yang akan diserahkan ke Masyarakat**				
1	Dinas Pertanian	126.000.000,00	0,00	126.000.000,00	0,00
2	Dinas PUPR	1.237.983.000,00	1.267.487.948,00	2.505.470.948,00	0,00
3	Kelurahan Langga Lero	215.000.000,00	146.956.250,00	361.956.250,00	0,00
Jumlah		**23.893.945.664,39**	**78.077.424.741,35**	**84.740.314.538,13**	**17.231.055.867,61**

Dari keseluruhan nilai persediaan tersebut terdapat persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat yang merupakan bantuan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang diberikan ke masyarakat dan belum diserahkan per 31 Desember 2024 berupa sambungan rumah dan sumur bor. Rincian persediaan per jenis barang dan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp97.474.248.829,00	**Rp 85.474.248.829,00**

Akun Investasi adalah akun untuk menampung seluruh investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Saldo Investasi jangka Panjang per 31 Desember 2024 senilai Rp97.474.248.829,00 mengalami kenaikan senilai Rp12.000.000.000,00 atau 14,04% dibandingkan dengan saldo Investasi jangka Panjang per 31 Desember 2023 senilai Rp85.474.248.829,00. Investasi Jangka Panjang berupa investasi non permanen terdiri dari Dana bergulir kepada Masyarakat dan investasi permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Investasi non permanen berupa dana bergulir kepada Masyarakat pada tahun 2024 senilai Rp4.963.527.077,00 dan tidak terdapat kenaikan maupun penurunan saldo dana bergulir dibandingkan dengan tahun 2023. Dana bergulir berada pada Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah. Tidak ada pelunasan dana bergulir pada tahun 2024. Penyisihan dana bergulir sebesar 100% karena dana bergulir macet. Rincian dana bergulir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3. 14 Saldo Investasi Non Permanen

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2024 (Rp)
1	Dinas Koperasi dan UKM	1.861.734.077,00	0,00	0,00	1.861.734.077,00
2	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	401.475.000,00	0,00	0,00	401.475.000,00
3	Dinas Perikanan	1.387.580.000,00	0,00	0,00	1.387.580.000,00
4	Dinas Pertambangan dan Energi (BKAD)	1.312.738.000,00	0,00	0,00	1.312.738.000,00
	JUMLAH	**4.963.527.077,00**	**0,00**	**0,00**	**4.963.527.077,00**

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) senilai Rp97.474.248.829,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp12.000.000.000,00 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp85.474.248.829,00. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilihat pada rincian berikut.

Tabel 5.3. 15 Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
1	BPD NTT	84.781.758.084,00	12.000.000.000,00	0,00	96.781.758.084,00
2	Perumda Lawadi	692.490.745,00	0,00	0,00	692.490.745,00
	JUMLAH	**85.474.248.829,00**	**12.000.000.000,00**	**0,00**	**97.474.248.829,00**

Investasi ke Bank NTT dicatat dengan metode biaya dengan persentase kepemilikan sebesar 4,55%. Pada tahun 2024 terdapat penambahan berupa penyertaan modal senilai Rp12.000.000.000,00 kepada Bank NTT, sehingga nilai penyertaan modal ke Bank NTT tahun 2024 seluruhnya senilai Rp96.781.758.084,00. Total saham Pemerintah Daerah sumba Barat Daya sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 9.678.175 atau senilai Rp96.781.750.000. Antara jumlah saham dan total Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terdapat selisih sebesar Rp8.084, hal ini disebabkan adanya pemotongan langsung Deviden tahun 2019 sebesar Rp2.239.258.084. Dari nilai ini terdapat sisa penyertaan Modal sebesar Rp8.084,00 yang tidak cukup untuk memperoleh 1 lembar saham karena harga per lembar saham ada Rp10.000,00. Sejak tahun 2019 Bank NTT tidak menyampaikan nomor seri saham kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Bank NTT, tetapi menyampaikan Surat Keterangan Saham Pengganti Surat Kolektif Saham nomor: 090/DK-PTBPDNTT/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 kepada Bupati Sumba Barat Daya selaku Pemegang Saham Seri A Bank NTT yang menjelaskan tentang jumlah dan nilai saham. Perkembangan nilai penyertaan modal ke Bank NTT per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.3. 16 Perkembangan Kepemilikan Saham Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya pada Bank NTT s.d 31 Desember 2024

No.	Tanggal Penyertaan	No. Seri Saham	Jumlah	Harga Satuan	Nilai (Rp)
			Saham (lembar)	Rp	
1	23/12/2008	24640875 s/d 24740874	100.000	10.000,00	1.000.000.000,00
2	17/06/2009	25822135 s/d 26022134	200.000	10.000,00	2.000.000.000,00
3	20/12/2010	34841573 s/d 35041572	200.000	10.000,00	2.000.000.000,00
4	28/10/2011	38881239 s/d 39081238	200.000	10.000,00	2.000.000.000,00
5	10/12/2012	47245339 s/d 47745338	500.000	10.000,00	5.000.000.000,00
6	12/12/2013	55395339 s/d 55895338	500.000	10.000,00	5.000.000.000,00
7	19/12/2014	68667127 s/d 69667126	1.000.000	10.000,00	10.000.000.000,00
8	30/11/2015	85742127 s/d 86342126	600.000	10.000,00	6.000.000.000,00
9	12/10/2019	128222477 s/d 129722476	1.500.000	10.000,00	15.000.000.000,00
10	2019	-	223.925	10.000,00	2.239.250.000,00
11	12/10/2020	-	1.000.000	10.000,00	10.000.000.000,00
12	30/12/2020	-	254.250	10.000,00	2.542.500.000,00
13	2021	-	1.000.000	10.000,00	10.000.000.000,00
14	2022	-	1.000.000	10.000,00	10.000.000.000,00
15	2023	-	200.000	10.000,00	2.000.000.000,00
16	2024	-	1.200.000	10.000,00	12.000.000.000,00
TOTAL			**9.678.175**		**96.781.750.000,00**

Investasi ke Perumda Lawadi dicatat dengan metode ekuitas dengan kepemilikan 100%. Nilai investasi pada Perumda Lawadi pada tahun 2024 dilakukan pencatatan berdasarkan hasil audit tahun 2024 atas laporan keuangan Perumda Lawadi tahun 2023. Sesuai surat pernyataan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya selaku Pembina BUMD nomor EK.500/40/53.18/V/2025, Perumda Lawadi tidak beroperasi pada tahun 2024 karena tersangkut masalah hukum dan sedang dalam proses pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Sumba Barat terkait dugaan korupsi. Hal ini menyebabkan Perumda Lawadi tidak menyusun Laporan Keuangan tahun 2024, sehingga pencatatan nilai investasi senilai Rp692.490.745,00 didasarkan pada hasil audit Perumda Lawadi tahun 2023.

Perkembangan nilai penyertaan modal ke Perumda Lawadi per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.3. 17 Perkembangan Kepemilikan Saham Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya pada Perumda Lawadi s.d. 31 Desember 2024

No.	Tanggal Penyertaan	No. Seri Saham	Jumlah Saham (lembar)	Nilai (Rp)
1	2020	-	-	5.150.000.000,00

5.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.857.744.286.340,04	**1.797.353.714.099,43**

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing- masing disajikan senilai Rp1.857.744.286.340,04 dan Rp1.797.353.714.099,43 yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.3. 18 Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024

No	Jenis Aset tetap	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Tanah	371.281.409.336,00	0,00	5.152.285.000,00	366.129.124.336,00
2	Peralatan dan Mesin	341.701.391.858,62	31.214.963.793,00	13.100.629.706,11	359.815.725.945,51
3	Gedung dan Bangunan	623.592.116.869,33	82.764.468.389,00	1.347.350.605,99	705.009.234.652,34
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.395.254.032.803,31	117.663.472.026,00	496.774.851,27	1.512.420.729.978,04
5	Aset Tetap Lainnya	46.513.845.283,14	3.167.855.203,00	897.854.648,00	48.783.845.838,14
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	42.298.483.284,00	0,00	32.798.852.250,00	9.499.631.034,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.023.287.565.334,97)	(127.263.326.890,44)	(6.636.886.781,42)	(1.143.914.005.443,99)
	JUMLAH	**1.797.353.714.099,43**	**107.547.432.520,56**	**47.156.860.279,95**	**1.857.744.286.340,04**

Pada tahun 2024 Aset Tetap Pemerintah kabupaten Sumba Barat Daya mengalami kenaikan senilai Rp60.390.572.240,61 atau 3,36% yang diperoleh baik dari Belanja Modal dan Hibah dari pihak Lainnya. Masing-masing Aset Tetap diuraikan sebagai berikut.

5.3.1.3.1. Tanah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp366.129.124.336,00	**Rp371.281.409.336,00**

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2024 senilai Rp366.129.124.336,00, bila dibandingkan dengan saldo aset tetap tanah 31

Desember 2023 senilai Rp371.281.409.336,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.152.285.000,00 atau 1,39% Rincian aset tetap tanah per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

Saldo Awal **Rp371.281.409.336,00**

Mutasi Penambahan

Tahun 2024 tidak ada mutasi tambah Tanah pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya baik yang diperoleh dari Pengadaan / Pembelian, Hibah atau dari Perolehan lainnya.

Mutasi Pengurangan

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2024 smengalami penurunan sebesar Rp5.152.285.000,00 pada Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan) disebabkan reklasifikasi aset tetap tanah yang tidak digunakan menjadi Properti Investasi tanah.

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

31 Desember 2024	31 Desember 2023
359.815.725.945,51	**341.701.391.858,62**

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2024 senilai Rp359.815.725.945,51. Bila dibandingkan dengan saldo aset tetap peralatan dan mesin tahun 2023 senilai Rp341.701.391.858,62, saldo di tahun 2024 mengalami kenaikan senilai Rp18.114.334.086,89 atau sebesar 5,30%. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3. 19 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Mutasi (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo 31 Desember 2023		**341.701.391.858,62**
Penambahan:		**31.214.963.793,00**
Belanja Modal	27.119.273.098,00	
Hibah	461.616.000,00	
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan jasa	222.332.708,00	
Pangakuan Aset dari utang	349.353.000,00	
Reklasifikasi antar Jenis aset	3.062.388.987,00	
Pengurangan:		**13.100.629.706,11**
Pembayaran Utang yang asetnya sudah diakui tahun sebelumnya	213.798.000,00	
Hibah	43.867.900,00	
Penghapusan	5.702.751.559,11	
Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	591.615.949,00	
Belanja modal diakui sebagai ekstrakomptabel	3.668.233.211,00	

Uraian	Mutasi (Rp)	Jumlah (Rp)
Reklasifikasi ke aset lainnya	1.186.832.387,00	
Reklasifikasi antar Jenis aset	1.693.530.700,00	
Saldo 31 Desember 2024		**359.815.725.945,51**

Saldo Awal **Rp341.701.391.858,62**

Mutasi Penambahan

Mutasi penambahan peralatan dan mesin senilai Rp31.214.963.793,00 terjadi karena adanya Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin di Tahun 2024 senilai Rp27.119.273.098,00, juga dipengaruhi oleh adanya:

- Hibah masuk aset peralatan dan mesin senilai Rp461.616.000,00 terdiri dari: Hibah untuk Puskesmas Kori berupa 1 (satu) unit Mesin TCM senilai Rp317.750.000,00, 1 (satu) unit Printer Ink Tank senilai Rp1.466.000,00 dan 1 (satu) unit UPS Earton senilai Rp12.900.000,00, Hibah 1 (satu) unit Sepeda Motor untuk Satuan Polisi Pamong Praja dari Bank NTT senilai Rp 24.500.000,00 dan Hibah Alat Pemadam Api dari BNPB untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan senilai Rp105.000.000,00 ;
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa dimana terdapat perolehan aset tetap peralatan mesin dari belanja barang dan jasa dengan nilai melebihi kapitalisasi aset tetap senilai Rp500.000,00, dengan nilai total Rp222.332.708,00;
- Penambahan peralatan dan mesin yang berasal dari pengakuan hutang senilai Rp349.353.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp322.953.000,00 dan Dinas Kesehatan Senilai Rp 26.400.000,00;
- Reklasifikasi antar jenis aset per 31 Desember 2024 senilai Rp3.062.388.987,00 terdiri dari: Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin senilai Rp 717.201.148,00 dan Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Peralatan dan Mesin senilai Rp2.345.187.839,0

Mutasi Pengurangan

Mutasi pengurangan nilai perolehan Aset Tetap Peralatan dan

Mesin senilai Rp13.100.629.706,11 merupakan pengurangan yang terjadi akibat dari beberapa hal yaitu berupa:

- Pembayaran utang tahun 2023 yang dianggarkan pada Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024, tetapi asetnya sudah diakui pada tahun buku 2023 pada SKPD Dinas Kesehatan senilai Rp213.798.000,00;
- Pemberian hibah Kepada SDM Wai Ha (Sekolah Swasta) yang dianggarkan pada Belanja Modal Tahun 2024 berupa Meubeleir senilai Rp43.867.900,00;
- Pengurangan senilai Rp5.702.751.559,11 merupakan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin yang dihapus terdiri dari : Penjualan Kendaraan Bupati dan Pimpinan DPRD senilai Rp2.677.451.000,00, Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Daerah (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan) senilai Rp133.550.700,00, Dinas P dan K senilai Rp2.598.163.359,11 dan Inspektorat Daerah Senilai Rp293.586.500,00.
- Belanja Modal yang tidak menjadi Aset Tetap diakui sebagai Barang Pakai Habis karena masa manfaatnya kurang dari 1 (satu) tahun senilai Rp591.615.949,00.
- Belanja Modal yang diakui sebagai Barang Habis Pakai senilai Rp3.668.233.211,00 karena adanya kebijakan akuntansi tentang batasan kapitalisasi (*capitalization thres hold*) terhadap perolehan awal suatu aset peralatan mesin yang dikelompokkan sebagai aset ekstra komptabel.
- Reklasifikasi aset Peralatan dan mesin ke akun aset lainnya senilai Rp1.186.832.387,00 terdiri dari : rusak berat senilai Rp1.170.432.387,00 pada 4 (empat) SKPD masing – masing Sekretariat Daerah (Bagian Kesra) senilai Rp 18.403.500,00, Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp27.815.750,00, Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp819.296.070,00, Kecamatan Loura senilai Rp304.917.067,00 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor yang hilang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp16.400.000,00.
- Reklasifikasi antar jenis aset tetap senilai Rp1.693.530.700,00 terdiri dari : Reklasifikasi Aset tetap Peralatan dan Mesin menjadi Aset Tetap Lainnya berupa Buku dan Alat Kesenian senilai Rp 101.350.000,00,

Reklasifikasi Aset tetap Peralatan dan Mesin menjadi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp900.785.000,00 dan Reklasifikasi Aset tetap Peralatan dan Mesin menjadi Aset Tetap Gedung dan bangunan Rp691.395.700,00.

Rincian aset tetap peralatan dan mesin per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp705.009.234.652,34	**Rp623.592.116.869,33**

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 senilai Rp705.009.234.652,34**,** bila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2023 senilai Rp623.592.116.869,33, saldo di tahun 2024 mengalami kenaikan senilai Rp 81.417.117.783,01 atau sebesar 13,06% dengan rincian sebagai berikut**.**

Tabel 5.3. 20 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Mutasi (Rp)	Jumlah(Rp)
Saldo 31 Desember 2023		**623.592.116.869,33**
Penambahan:		**82.764.468.389,00**
Belanja Modal	35.658.539.759,00	
Reklasifikasi antar Jenis Aset Tetap	26.483.367.861,00	
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan jasa	279.092.466,00	
Hibah	20.343.468.303,00	
Pengurangan:		**1.347.350.605,99**
Reklasisikasi ke barang dan jasa	76.253.000,00	
Reklasifikasi antar Jenis Aset Tetap	1.003.268.086,00	
Hibah	151.196.400,00	
Kekurangan Volume	116.633.119,99	
Saldo 31 Desember 2024		**705.009.234.652,34**

Saldo Awal **Rp623.592.116.869,33**

Mutasi Penambahan

Mutasi penambahan nilai perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp82.764.468.389,00. Penambahan dipengaruhi oleh:

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp35.658.539.759,00.
- Reklasifikasi antar jenis aset tetap senilai Rp26.483.367.861,00 terdiri dari : Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang direklasikasi menjadi Aset

Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp691.395.700,00, dari Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Gedung dan Bangunan senilai Rp25.722.634.661,00 dan Reklasifikasi dari Aset Lain - Lain (Kemitraan Pihak ketiga) senilai Rp 69.337.500,00;

- Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa senilai Rp 279.092.466,00 terdiri dari: Belanja Jasa Konsultansi pada Dinas Kesehatan yang diatribusikan menjadi nilai perolehan Aset tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp90.601.800,00, Kesalahan penganggaran pada Dinas P & K untuk Sekolah Negeri tapi dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa senilai Rp137.551.666,00 dan Pembangunan Garasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa senilai Rp 50.939.000,00;
- Penerimaan Hibah senilai Rp20.343.468.303,00 merupakan penambahan nilai aset tetap gedung dan bangunan dari hibah Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Sumba Barat Daya tahun 2023 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor 142.1 / BA / DC / 2023 dan BU.600 / 611.a / 53.18 / SBD / XII / 2023 berupa gedung Sekolah Dasar yang dibukukan pada tahun 2024.

Mutasi Pengurangan

Mutasi pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp1.347.350.605,99 dengan rincian sebagai berikut.

- Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap pada Dinas Koperasi yakni Ganti keramik pada Gedung PLUT, Belanja Pemeliharaan yang seharusnya dianggarakan pada Belanja Barang & Jasa senilai Rp76.253.000,00;
- Reklasifikasi antar jenis aset tetap dari Gedung dan bangunan menjadi aset tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp1.003.268.086,00;
- Hibah keluar sebesar Rp151.196.400,00 ke sekolah swasta yaitu SDN Watu Lambara sebesar Rp28.857.300,00 dan SDN Wallandimu sebesar Rp122.339.100,00;
- Reklasifikasi antar akun dari aset tetap dari Gedung dan bangunan menjadi aset Lancar Piutang Lain – lain PAD yang sah senilai

Rp116.633.119,99 untuk mencatat temuan Pengembalian Belanja Modal karena kekurangan Volume.

Rincian aset tetap gedung dan bangunan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.512.420.729.978,04	**1.395.254.032.803,31**

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 senilai Rp1.512.420.729.978,04, bila dibandingkan dengan saldo aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2023 senilai Rp1.395.254.032.803,31, saldo di tahun 2024 mengalami kenaikan senilai Rp117.166.697.174,73 atau sebesar 8,40% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3. 21 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Mutasi (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo 31 Desember 2023		**1.395.254.032.803,31**
Penambahan:		**117.663.472.026,00**
Belanja Modal	94.810.066.973,00	
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan jasa	212.610.000,00	
Reklasifikasi antar Jenis Aset Tetap	6.886.067.836,00	
Hibah dari Kementerian Tahun 2024	15.754.727.217,00	
Pengurangan:		**496.774.851,27**
Kekurangan Volume	496.774.851,27	
Saldo 31 Desember 2024		**1.512.420.729.978,04**

Saldo Awal **Rp1.395.254.032.803,31**

Mutasi Penambahan

Mutasi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp 117.663.472.026,00 dipengaruhi oleh:

- Belanja Modal senilai Rp94.810.066.973,00.
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa senilai Rp212.610.000,00 terdiri dari : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan IPAL pada Dinas Kesehatan Senilai Rp49.000.000,00, Pemasangan meteran Listrik pada Puskesmas Kawango Hari senilai Rp3.000.000,00, SDN Batu Karang senilai Rp3.200.000,00, SDN Noha

senilai Rp7.500.000,00 dan Pembangunan Toilet untuk masyarakat yang mengurus Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp149.910.000,00;

- Penambahan dari reklasifikasi jenis aset tetap senilai Rp5.876.067.836,00 terdiri dari : reklasifikasi dari Aset tetap Perlatan dan mesin ke Aset tetap JIJ senilai Rp900.785.000,00, reklasifikasi dari Aset tetap Gedung dan Bangunan ke Aset tetap JIJ Rp1.003.268.086,00 dan reklasifikasi dari Aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset tetap JIJ senilai Rp3.972.014.750,00;
- Penambahan dari aset tetap DI Dasa Gongu senilai Rp1.010.000.000,00 yang sudah diserahterimakan terdiri dari Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp759.015.000,00 dan penyelesaian sisa pekerjaan yang dilakukan pada tahun 2023 tetapi baru dilaporkan dan dicatat pada tahun 2024 senilai Rp250.985.000,00;
- Penerimaan Hibah senilai Rp15.754.727.217,00 merupakan penambahan nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dari hibah Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Pemerintah Sumba Barat Daya tahun 2023 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor 142.1 / BA / DC / 2023 dan BU.600 / 611.a / 53.18 / SBD / XII / 2023 yakni pembangunan sarana kebersihan (MCK) yang dibukukan pada tahun 2024 senilai Rp4.359.022.367,00 dan Optimalisasi SPAM IKK Kota Tambolaka sesuai Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) Nomor 309.12 / BA/DC/2024 dan BU.600/ 211/58.18/SB/IV/2024 tanggal 24 April 2024 senilai Rp11.395.704.850,00.

Mutasi Pengurangan

Mutasi pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp496.774.851,27, terdiri dari: kekurangan Volume Belanja Modal senilai Rp 412.659.171,27, kelebihan pembayaran jasa konsultan perencanaan dan Pengawasan untuk pekerjaan Jalan senilai Rp80.680.680,00 dan Jasa Konsultan perencanaan dan Pengawasan untuk pekerjaan Pembangunan Irigasi senilai Rp 3.435.000,00.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 10.**

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
48.783.845.838,14	**46.513.845.283,14**

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp48.783.845.838,14, bila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya tahun 2023 senilai Rp46.513.845.283,14, saldo di tahun 2024 mengalami kenaikan senilai Rp2.270.000.555,00 atau sebesar 4,88% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3. 22 Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Mutasi (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo 31 Desember 2023		**46.513.845.283,14**
Penambahan:		**3.167.855.203,00**
Belanja Modal	3.045.057.803,00	
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan jasa	21.447.400,00	
Reklasifikasi antar jenis aset	101.350.000,00	
Pengurangan:		**897.854.648,00**
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap	490.000,00	
Reklasifikasi antar jenis aset tetap	717.201.148,00	
Penghapusan aset tetap lainnya	180.163.500,00	
Saldo 31 Desember 2024		**48.783.845.838,14**

Saldo Awal **Rp46.513.845.283,14**

Mutasi Penambahan

Mutasi penambahan nilai perolehan Aset Tetap Lainnya senilai Rp3.167.855.203,00 di beberapa entitas akuntansi, juga dipengaruhi oleh:

- Terdapat Belanja Modal senilai Rp3.045.057.803,00.
- Penambahan karena Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa yakni pembelian buku pelajaran senilai Rp21.447.400,00;
- Penambahan dari reklasifikasi antar jenis aset tetap yaitu Peralatan dan mesin ke Aset tetap lainnya berupa Buku Pelajaran dan Alat Kesenian senilai Rp101.350.000,00.

Mutasi Pengurangan

Mutasi pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya senilai Rp897.854.648,00 merupakan pengurangan yang terdiri dari:

- Reklasifikasi antar jenis aset tetap senilai Rp717.201.148,00 yakni pembelian alat kantor dan rumah tangga yang dianggarkan pada belanja modal Aset tetap lainnya.
- Belanja perjalanan dinas dalam kota yang direalisasikan menjadi belanja modal pada SDN Pare Karabu akibat kelalaian Dinas P dan K pada saat melakukan verifikasi senilai Rp490.000,00.
- Penghapusan aset tetap lainnya sebesar Rp180.163.500,00 berubah ternak babi yang mati pada Dinas Peternakan sesuai SK Nomor: 632/KEP/HK/2024 tanggal 9 Desember 2024.

Rincian aset tetap lainnya per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 11.**

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp9.499.631.034,00	**Rp42.298.483.284,00**

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 senilai Rp9.499.631.034,00 bila dibandingkan dengan saldo aset tahun 2023 senilai Rp42.298.483.284,00, saldo di tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp32.798.852.250,00 atau 77,54 % dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3. 23 Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Mutasi (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo 31 Desember 2023		**42.298.483.284,00**
Penambahan :		**0,00**
Pengurangan :		**32.798.852.250,00**
Reklasifikasi antar Jenis Aset Tetap dari KDP menjadi Peralatan dan Mesin	2.345.187.839,00	
Reklasifikasi antar Jenis Aset Tetap dari KDP menjadi Gedung dan Bangunan	25.722.634.661,00	

Reklasifikasi antar Jenis Aset Tetap dari KDP menjadi Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.731.029.750,00	
Saldo 31 Desember 2024		**9.499.631.034,00**

Saldo Awal **Rp42.298.483.284,00**

Mutasi Penambahan

Tidak ada mutasi penambahan nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Mutasi Pengurangan

Sedangkan mutasi pengurangan nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp32.039.837.250,00 dipengaruhi oleh Reklasifikasi atas Pembangunan sekolah beserta isinya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah selesai dikerjakan pada tahun 2024 dan direklasifikasi ke jenis aset tetap yang lain terdiri dari Peralatan mesin senilai Rp2.345.187.839,00, Gedung bangunan senilai Rp25.722.634.661,00 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp3.972.014.750,00 dan Dinas PUPR yakni DI Dasa Gongu senilai Rp759.015.000,00 direklasfikasi ke Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(1.143.914.005.443,99)	**(1.023.287.565.334,97)**

Akumulasi penyusutan merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Lainnya yang di dalamnya terdapat jenis Aset Peralatan dan Mesin, Gedung Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan. Akumulasi Penyusutan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 disajikan sebesar Rp(1.143.914.005.443,99) mengalami kenaikan senilai Rp120.626.440.109,02 atau sebesar 11,79% dibanding akumulasi penyusutan tahun 2023 sebesar Rp(1.023.287.565.334,97) dengan rekapitulasi berikut.

Tabel 5.3. 24 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(260.710.401.417,80)	(30.131.184.445,00)	(3.976.566.680,00)	(286.865.019.182,80)
2	Akumulasi Penyusutan	(111.740.166.682,38)	(13.353.149.896,46)	0,00	(125.093.316.578,84)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember2024 (Rp)
	Gedung dan Bangunan				
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(650.836.997.234,79)	(81.118.672.447,56)	0,00	(731.955.669.682,35)
	JUMLAH	**(1.023.287.565.334,97)**	**(124.603.006.789,02)**	**(3.976.566.680,00)**	**(1.143.914.005.443,99)**

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebagai berikut.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp286.865.019.182,80 diperoleh dari mutasi tambah sebesar Rp30.131.184.445,00 terdiri dari beban penyusutan senilai Rp30.125.723.695,00 dan koreksi tambah atas hibah Peralatan dan Mesin yang diterima di tahun 2023 sebesar Rp5.460.750,00;dan

- Mutasi kurang Rp3.976.566.680,00 tediri dari Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Bagian Umum sebesar Rp1.007.238.093,00, Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Inspektorat Daerah sebesar Rp293.586.500,00 Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD sebesar Rp1.355.451.000,00, dan Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Bagian Organisasi sebesar Rp133.550.700,00; reklasifikasi aset tetap Prelatan dan mesin menjadi Aset lainnya terdiri dari Reklasifikasi aset tetap Peralatan dan mesin ke Aset Lainnya karena Rusak Berat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Setda) sebesar Rp18.403.500,00, Reklasifikasi aset tetap Peralatan dan mesin ke Aset Lainnya karena Rusak Berat padaDinas Lingkungan Hidup sebesar Rp819.296.070,00, Reklasifikasi aset tetap Peralatan dan mesin ke Aset Lainnya karena Rusak Berat pada BPBD sebesar Rp27.815.750,00, Reklasifikasi aset tetap Peralatan dan mesin ke Aset Lainnya karena Rusak Berat pada Kecamatan Loura sebesar Rp304.825.067,00 dan Reklasifikasi kendaraan roda 2 yang hilang dari AT Peralatan Mesin ke Aset Lainnya, telah didukung dengan surat dari kepolisian sebesar Rp16.400.000,00;

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar

Rp125.093.316.578,84 diperoleh dari mutasi tambah sebesar Rp13.353.149.896,46 terdiri dari beban penyusutan sebesar Rp13.319.244.115,95,dan koreksi ekuitas untuk pengakuan hibah gedung dan bangunan yang diterima tahun 2023 sebesar Rp33.905.780,51;

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp731.955.669.682,35 diperoleh dari mutasi tambah sebesar Rp81.118.672.447,56 terdiri dari beban penyusutan sebesar Rp81.083.951.801,78, koreksi ekuitas untuk KDP yang sudah diserahterimakan tahun sebelumnya dan baru dicatat tahun ini sebesar Rp16.833.333,33 dan koreksi ekuitas untuk pengakuan hibah yang diterima tahun 2023 sebesar Rp17.887.312,45.

Rincian akumulasi penyusutan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 12.**

5.3.1.4 Aset Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
39.166.371.209,59	**37.071.650.551,15**

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya pada tahun 2024 disajikan senilai Rp39.166.371.209,59 mengalami kenaikan senilai Rp2.094.720.658,44 atau 5,65% dari tahun 2023 senilai Rp37.071.650.551,15 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3. 25 Saldo Rincian Aset Lainnya

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	1.717.322.480,35	0,00	151.335.530,26	1.565.986.950,09
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.391.760.700,00	0,00	69.337.500,00	1.322.423.200,00
3	Aset Tidak Berwujud	459.649.999,33	72.238.000,67	56.288.000,00	475.600.000,00
4	Aset Lain-Lain	33.502.917.371,47	2.809.418.688,03	509.975.000,00	35.802.361.059,50
	JUMLAH	**37.071.650.551,15**	**2.881.656.688,70**	**786.936.030,26**	**39.166.371.209,59**

5.3.1.4.1. Tuntutan Ganti Rugi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.565.986.950,09	**1.717.322.480,35**

Tagihan Jangka Panjang/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) TA 2024 senilai Rp1.565.986.950,09 yang terdiri dari SK Pembebanan Sementara atas TP/TGR atas temuan Inspektorat Provinsi, BPK, BPKP, dan Inspektorat Kabupaten. Pada Tahun 2024 terdapat koreksi atas saldo awal TGR senilai Rp6.629.974,76 dan pengurangan tagihan atas pelunasan TGR senilai Rp65.552.506,00, dan reklasifikasi ke aset lain – lain untuk mencatat kekurangan volume belanja modal senilai Rp79.153.049,50 sehingga TGR mengalami penurunan sebesar Rp151.335.530,26 atau 8,81% dibanding tahun 2023 senilai Rp1.717.322.480,35. Rincian tagihan jangka Panjang per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 13.**

5.3.1.4.2. Kemitraan Pihak Ketiga

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp1.322.423.200,00	**Rp1.391.760.700,00**

Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, dan bangun serah guna, serta kerjasama pemanfaatan (KSP). Tahun 2024 saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga senilai Rp1.322.423.200,00 mengalami penurunan senilai Rp69.337.500,00 dibanding saldo tahun 2023 Rp1.391.760.700,00. Penurunan ini disebabkan terdapat dua Gedung Pemerintah Daerah yang selesai masa sewanya dan tidak diperpanjang lagi oleh PT bank NTT. Aset kemitraan dengan pihak ketiga dapat dilihat pada rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3. 26 Saldo Aset Lainnya Kemitraan Pihak ketiga

No	Uraian	Nilai (Rp)	SKPD	Keterangan
1	Pick Up	185.845.000,00	BKAD	Pinjam pakai
2	Sepeda Motor	24.937.000,00	BKAD	Pinjam pakai
3	Sepeda Motor	20.926.200,00	BKAD	Pinjam pakai
4	Pick Up	205.750.000,00	BKAD	Pinjam pakai
5	Station Wagon	304.965.000,00	BKAD	Pinjam pakai
6	Station Wagon	290.000.000,00	BKAD	Pinjam pakai
7	Station Wagon	290.000.000,00	BKAD	Pinjam pakai

No	Uraian	Nilai (Rp)	SKPD	Keterangan
	JUMLAH	**1.322.423.200,00**		

5.3.1.4.3. Aset Tak Berwujud

31 Desember 2024	31 Desember 2023
475.600.000,00	**459.649.999,33**

Nilai aset tidak berwujud senilai Rp475.600.000,00 merupakan aset pemerintah daerah dalam bentuk *software* yang digunakan oleh SKPD lingkup pemerintah daerah dalam mendukung operasional pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai kebutuhan masing-masing SKPD.

Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud senilai Rp2.285.189.000,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dari tahun tahun 2023 senilai Rp2.285.189.000,00. Nilai aset tidak berwujud 2024 disajikan netto dari penjumlahan atas nilai aset tidak berwujud senilai Rp2.285.189.000,00 dan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sampai dengan tahun 2024 sebesar (Rp1.809.589.000,00) sehingga jumlah Aset tidak berwujud tahun 2024 senilai Rp475.600.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp15.950.000,67 atau 3,47% jika dibanding saldo tahun 2023 Rp459.649.999,33. Hal ini disebabkan oleh lebih saji Amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp72.238.000,67.

Daftar aset tak berwujud pada masing-masing SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.3. 27 Saldo Aset tak Berwujud Pada OPD

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Komunikasi Dan Informatika	156.054.900,00	Lisensi Website
2	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	528.797.500,00	Aplikasi Penggajian dan SIMBADA
3	Badan Pendapatan Daerah	879.777.100,00	Sistem operasi dan perangkat lunak lain
4	Badan Kepegawaian Daerah	322.300.000,00	Aplikasi SIMPEG
5	Dinas Kependudukan Dan Capil	49.879.500,00	Sistem Operasi dan Aplikasi
6	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	268.380.000,00	Sistem Operasi dan Aplikasi
7	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	80.000.000,00	Software Aplikasi
	JUMLAH	**2.285.189.000,00**	

Sedangkan saldo akumulasi amortisasi ATB tahun 2024 senilai Rp(1.809.589.000,00) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp15.950.000,67. Rincian akumulasi amortisasi ATB secara lengkap per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

5.3.1.4.4. Aset Lain- Lain

31 Desember 2024	31 Desember 2023
35.802.361.059,50	**33.502.917.371,47**

Aset lain-lain senilai Rp35.802.361.059,50 mengalami kenaikan senilai Rp2.299.443.688,03 atau 6,86% dibanding tahun 2023 senilai Rp33.502.917.371,47. Nilai aset lain-lain 2024 disajikan netto dari penjumlahan atas nilai aset lain-lain senilai Rp56.663.686.347,53 ditambah Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) senilai Rp17.983.000,00 dan akumulasi penyusutan aset lain-lain sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp (20.879.308.288,03). Adapun uraian Aset Lain-lain ini adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3. 28 Saldo Aset Lain-Lain

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo 2024 (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Aset Rusak Berat	49.777.704.277,92	1.186.832.387,00	1.556.241.865,40	49.408.294.799,52
2	Ternak Bergulir	4.021.922.484,08	-	-	4.021.922.484,08
3	Temuan Kekurangan Volume Fisik	458.525.375,90	79.153.049,50	-	537.678.425,40
4	Kelebihan TPK dan Honor	-	201.454.541,67	-	201.454.541,67
5	Kelebihan Perjalanan Dinas	-	266.060.651,00	-	266.060.651,00
6	Kelebihan Pembayaran Jaspel Kapitasi Puskesmas	-	2.128.576.432,53	-	2.128.576.432,53
7	Temuan Jaskon	-	99.699.013,33	-	99.699.013,33
8	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	493.575.000,00	17.983.000,00	493.575.000,00	17.983.000,00
	JUMLAH	**54.751.727.137,90**	**3.979.759.075,03**	**2.049.816.865,40**	**56.681.669.347,53**

Penjelasan untuk masing-masing akun sebagai berikut.

a. Aset Rusak Berat

Saldo Aset Rusak Berat pada tahun 2024 senilai Rp49.408.294.799,52, mengalami penurunan senilai Rp369.409.478,40 atau 0,74% dibanding dengan saldo tahun 2023 senilai Rp49.777.704.277,92. Mutasi aset rusak berat dijelaskan sebagai berikut.

- Mutasi tambah senilai Rp1.170.432.387,00. Mutasi tambah berupa aset rusak berat pada Kecamatan Loura senilai Rp304.917.067,00, Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp27.815.750,00, Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp819.296.070,00, dan Bagian

Kesejahteraan Rakyat senilai Rp18.403.500,00;

- Mutasi tambah aset rusak berat senilai Rp16.400.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan kearsipan 1 (satu) unit sepeda motor tahun 2016 yang hilang;
- Mutasi kurang senilai Rp380.856.271,40. Mutasi kurang disebabkan oleh adanya penghapusan senilai Rp380.856.271,40 berupa penghapusan aset rusak berat Pos Jaga pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan SK Bupati Sumba Barat Daya Nomor: 633/KEP/HK/2024 tanggal 9 Desember 2024 dan .Dinas P dan K senilai Rp1.175.385.594,00 sesuai SK Bupati Sumba Barat Daya Nomor: 325/KEP/HK/2024.

b. Ternak Bergulir

Tidak ada mutasi penambahan / penurunan pada tahun 2024. Saldo ternak bergulir yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehtan Hewan pada tahun 2024 senilai Rp4.021.922.484,08.

c. Temuan kekurangan Volume Fisik

Saldo temuan kekurangan Volume fisik pada tahun 2024 senilai Rp537.678.425,40, mengalami kenaikan senilai Rp79.153.049,50 atau 17,26% dibanding dengan saldo tahun 2023 senilai Rp458.525.375,90. Mutasi temuan kekurangan volume fisik dijelaskan sebagai berikut.

- Mutasi tambah senilai Rp79.153.049,50. Mutasi tambah disebabkan reklasifikasi dari Tuntutan Ganti Rugi atas temuan kekurangan volume pekerjaan tahun 2022 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp 24.724.760,03 dan Dinas P dan K senilai Rp 54.428.289,47.

d. Kelebihan Pembayaran Honor Tim Pelaksanan Kegiatan

Saldo temuan Kelebihan Pembayaran Honor Tim Pelaksanan Kegiatan pada tahun 2024 senilai Rp201.454.541,67, mengalami kenaikan sebesar 100%. Hal ini disebabkan penyajian temuan dicatat dalam aset lain - lain

e. Kelebihan Pembayaran Pembayaran Perjalanan Dinas

Saldo temuan Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas pada tahun 2024 senilai Rp266.060.651,00, mengalami kenaikan sebesar 100%. Hal ini disebabkan penyajian temuan dicatat dalam aset lain - lain

f. Kelebihan Pembayaran Jaspel Kapitasi Puskesmas

Saldo Kelebihan Pembayaran Jaspel Kapitasi Puskesmas pada tahun 2024 senilai Rp2.128.576.432,53, mengalami kenaikan sebesar 100%. Hal ini disebabkan penyajian temuan dicatat dalam aset lain - lain

g. Kelebihan Pembayaran Jasa Konsutansi Perencanaan dan Pengawasan

Saldo Kelebihan Pembayaran Jasa Konsutansi Perencanaan dan Pengawasan pada tahun 2024 senilai Rp99.699.013,33, mengalami kenaikan sebesar 100%. Hal ini disebabkan penyajian temuan dicatat dalam aset lain - lain

h. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) tahun 2024 senilai Rp17.983.000,00 mengalami penurunan senilai Rp475.592.000,00 atau 96,36% dibandingkan dengan tahun 2023 senilai Rp493.575.000,00. Penurunan disebabkan karena sudah dilakukan realisasi ke Kas Daerah Tahun Anggaran 2024. Rincian Dana TDF dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3. 29 Saldo Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)

No.	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Mutasi		Saldo 2024 (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)	493.575.000,00	17.983.000,00	493.575.000,00	17.983.000,00
	JUMLAH	**493.575.000,00**	**17.983.000,00**	**493.575.000,00**	**17.983.000,00**

Rincian Aset Lain - Lain secara lengkap per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya tahun 2024 sebesar Rp20.879.308.288,03 mengalami penurunan senilai Rp369.501.478,40 atau 1,74% dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp21.248.809.766,43. Penurunan disebabkan oleh adanya penghapusan aset rusak berat sesuai SK Nomor 633/KEP/HK/2024 tanggal 09 Desember 2024.

5.3.1.5 Properti Investasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp5.152.285.000,00	**Rp0,00**

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 senilai Rp5.152.285.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp5.152.285.000,00 atau

100,00% dibandingkan dengan saldo Properti Investasi per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00. Properti Investasi berupa tanah untuk gedung dan bangunan.

5.3.2 Kewajiban

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp3.758.192.970,05	**Rp4.997.634.110,88**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Saldo Kewajiban tahun 2024 senilai Rp3.758.192.970,05 mengalami penurunan senilai Rp1.239.441.140,83 atau 24,80% dibanding tahun 2023 senilai Rp4.997.634.110,88. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3. 30 Saldo Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	209.010.779,18	39.387.863,42	176.898.482,55	71.500.160,05
2	Utang Belanja	4.788.623.331,70	3.564.232.441,00	4.666.162.962,70	3.686.692.810,00
	JUMLAH	**4.997.634.110,88**	**3.603.620.304,42**	**4.843.061.445,25**	**3.758.192.970,05**

5.3.2.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp71.500.160,05	**Rp209.010.779,18**

Saldo utang perhitungan pihak ketiga di tahun 2024 senilai Rp71.500.160,05 mengalami penurunan senilai Rp137.510.619,13 dibandingkan dengan tahun 2023. Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3. 31 Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga

No	Nama OPD	SaldoAwal (Rp)	Mutasi (Rp)		SaldoAkhir (Rp)
			Penerimaan	Pengeluaran	
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	185.874.696,18	38.060.554,05	153.669.790,18	70.265.460,05
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.637.500,00	0,00	22.637.500,00	0,00
4	Sekretariat Daerah	37.800,00	1.234.700,00	37.800,00	1.234.700,00
5	Sekretariat DPRD	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
6	Badan Pendapatan Daerah	380.783,00	0,00	380.783,00	0,00
Jumlah		**209.010.779,18**	**39.295.254,05**	**176.805.873,18**	**71.500.160,05**

Berdasarkan jenis akun Utang Perhitungan Fihak Ketiga, rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3. 32 Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

No	Utang (PFK)	SaldoAwal (Rp)	Mutasi		SaldoAkhir (Rp)
			Penerimaan	Pengeluaran	
1	Taperum	23.599.000,00	0,00	0,00	23.599.000,00
2	PPh 21	31.243.405,00	1.234.700,00	22.637.500,00	9.840.605,00
3	PPh 22	45.457,00	0,00	45.456,00	1,00
4	PPh 23	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00
5	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	415.327,00	0,00	415.327,00	0,00
6	Iuran Jaminan Kesehatan	15.224.718,00	0,00	15.224.718,00	0,00
7	IWP	138.445.072,18	0,00	138.445.072,18	0,00
8	Utang Jasa Giro bukan hak Pemda	0,00	38.060.554,05	0,00	38.060.554,05
Jumlah		**209.010.779,18**	**39.295.254,05**	**176.805.873,18**	**71.500.160,05**

Utang jasa giro bukan hak Pemerintah Daaerah Kabupaten Sumba Baarat Daya senilai Rp38.060.554,05 merupakan setoran jasa giro atas rekening Sekolah Swasta dan rekening Desa yang keliru disetor ke Kas Daerah.

Sampai dengan bulan Maret 2025, atas saldo utang PFK di atas telah disetorkan ke kas negara senilai Rp1.234.700,00 pada bulan Maret tahun 2025 dan masih terdapat sisa saldo utang PFK senilai Rp70.265.460,05 tabel berikut.

Tabel 5.3. 33 Rincian Penyetoran Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2024

No	Utang (PFK)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Penyetoran Tahun 2025 (Rp)	Sisa Yang Belum Disetorkan	Keterangan
1	SEKRETARIAT DAERAH	1.234.700,00	1.234.700,00	0,00	Disetorkan tanggal 10/03/2025
2	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	70.265.460,05	0,00	70.265.460,05	Belum disetorkan
Jumlah		**71.500.160,05**	**1.234.700,00**	**70.265.460,05**	

5.3.2.2. Utang Belanja

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp3.686.692.810,00	**Rp4.788.623.331,70**

Saldo utang belanja di tahun 2024 senilai Rp3.686.692.810,00 mengalami penurunan senilai Rp1.101.930.521,70 atau 23,01% dibandingkan dengan tahun 2023. Adapun rincian utang belanja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3. 34 Saldo Utang Belanja

No	Uraian Belanja	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
1	Dinas PUPR	537.711.564,70	250.985.000,00	463.528.472,70	325.168.092,00
2	Dinas Kesehatan	3.245.662.906,00	2.436.503.220,00	3.237.226.106,00	2.444.940.020,00
3	Dinas Peternakan	283.437.384,00	0,00	283.437.384,00	0,00
4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	322.953.000,00	0,00	322.953.000,00
5	UPTD SPAM Weemaringi	681.971.000,00	0,00	681.971.000,00	0,00
6	RSUD Reda Bolo	39.840.477,00	548.584.225,00	0,00	588.424.702,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	5.206.996,00	0,00	5.206.996,00
	JUMLAH	**4.788.623.331,70**	**3.564.232.441,00**	**4.666.162.962,70**	**3.686.692.810,00**

Penjelasan terkait utang belanja adalah sebagai berikut.

a. Utang belanja pada Dinas PUPR senilai Rp325.168.092,00 merupakan sisa Utang Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya atas tagihan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 kepada pihak ketiga atas pekerjaan konstruksi yang belum dibayarkan sampai 31 Desember 2024 dan Penambahan nilai utang tahun 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2025 terhadap pekerjaan konstruksi D.I Dasa Gongu yang telah diselesaikan pada tahun 2023 sebesar Rp250.985.000,00.

b. Utang belanja pada Dinas Kesehatan senilai Rp2.444.940.020,00 terdiri dari:

- Sisa utang pada Puskesmas atas jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan di Puskesmas yang berasal dari dana Non kapitasi JKN tahun 2022 yang belum terbayarkan sampai 31 Desember 2024 senilai Rp2.704.000,00.

- Utang senilai Rp89.947.700,00 tahun 2023 sesuai LHR Inspektorat yang dibayarkan tahun 2024 sebesar Rp81.510.800,00 sehingga terdapat sisa yang belum dibayarkan senilai Rp8.436.800,00. Hal ini disebabkan pada saat akan dilakukan pengajuan pembayaran oleh PPK jumlah tagihan yang diajukan oleh pihak ketiga dan jumlah barang ketika dilakukan pengecekan kembali di gudang jumlah dan

nilai hanya sebesar Rp81.510.900,00. Sehingga pembayarannya hanya sebesar Rp81.510.900,00. Pada tahun buku 2024 belum dihapus karena belum diajukan reviu kepada Inspektorat.

- Utang belanja tahun 2024 berdasarkan laporan hasil reviu utang oleh Inspektorat nomor IK.05702/LHR/SBD/PKPT/2025 yang belum terbayarkan sampai 31 Desember 2024 senilai Rp2.377.199.220,00.
- Utang belanja BMHP P2P berupa Logistik Malaria tahun 2024 yang belum terbayarkan sampai 31 Desember 2024 senilai Rp56.600.000,00.

c. Utang belanja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp322.953.000,00 berupa belanja modal berdasarkan hasil reviu utang oleh Inspektorat dengan nomor IK.057/1/LHP-PK/SBD/III/2025 yang belum terbayarkan sampai 31 Desember 2024.

d. Utang belanja pada RSUD Reda Bolo senilai 588.424.702,00, terdiri dari:
   - Utang tahun 2023 senilai Rp39.840.477,00 berupa belanja modal alat laboratorium berdasarkan hasil reviu utang oleh Inspektorat dengan nomor IK.057/01/LHR/SBD/I/2024 yang belum terbayarkan sampai 31 Desember 2024.
   - Utang belanja tahun 2024 berdasarkan laporan hasil reviu utang oleh Inspektorat nomor IK.057/06/LHR/SBD/PKPT/IV/2025 yang belum terbayarkan sampai 31 Desember 2024 senilai Rp548.584.225,00.

e. Utang belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp5.206.996,00 berupa belanja modal berdasarkan hasil reviu utang oleh Inspektorat belum terbayarkan sampai 31 Desember 2024.

Berdasarkan jenis akun utang belanja, rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3. 35 Saldo Akun Utang Belanja

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
1	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	769.704.000,00	0,00	769.704.000,00	0,00
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.348.716.200,00	0,00	1.348.716.200,00	0,00

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	913.444.706,00	56.600.000,00	905.007.906,00	65.036.800,00
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	191.250.000,00	0,00	191.250.000,00	0,00
5	Utang Belanja Barang Pakai	92.187.384,00	0,00	92.187.384,00	0,00
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	2.902.087.445,00	0,00	2.902.087.445,00
7	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Permukaan	681.971.000,00	0,00	681.971.000,00	0,00
8	Utang Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	5.206.996,00	0,00	5.206.996,00
9	Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	322.953.000,00	0,00	322.953.000,00
10	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	253.638.477,00	0,00	213.798.000,00	39.840.477,00
11	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	0,00	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00
12	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	485.696.564,70	0,00	463.528.472,70	22.168.092,00
13	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	52.015.000,00	250.985.000,00	0,00	303.000.000,00
JUMLAH		**4.788.623.331,70**	**3.564.232.441,00**	**4.666.162.962,70**	**3.686.692.810,00**

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah melakukan pembahasan bersama dengan BPJS Kesehatan tanggal 24 April 2025 terkait tambahan pembayaran iuran BPJS Kesehatan atas Tunjangan Tambahan Penghasilan yaitu Jasa Pelayanan Kesehatan dan Tunjangan Profesi Guru. Sesuai hasil rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya akan melakukan pembayaran iuran tersebut kepada BPJS Kesehatan ketika kemampuan keuangan daerah sudah memadai. Sesuai data dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan BPJS Kesehatan, taksiran nilai dari utang iuran BPJS Kesehatan atas Jasa Pelayanan Kesehatan dan Tunjangan Profesi Guru tahun

2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp6.396.123.929,00. Namun, data taksiran nilai utang tersebut akan divalidasi kembali untuk memastikan para penerima tunjangan yang masih aktif bekerja sehingga menjadi dasar dilakukan penganggaran sebesar 4% yang akan menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

5.3.2.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2024	31 Desember 2023
0,00	0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya pada tahun 2024 dan tahun 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.3.3 Ekuitas

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp2.098.795.109.521,56	Rp2.005.336.863.854,21

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Ekuitas tahun 2024 senilai Rp2.098.795.109.521,56 adalah ekuitas awal senilai Rp2.005.336.863.854,21 ditambah oleh Surplus LO senilai Rp68.289.705.277,34 dan ditambah dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar senilai Rp25.168.540.390,01. Jumlah tersebut mengalami kenaikan senilai Rp93.458.245.667,35 atau 4,66% dari tahun 2023 senilai Rp2.005.336.863.854,21.

5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan Tahun Anggaran 2024 yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang tercermin dalam Pendapatan- LO, Beban, Surplus/Defisit Operasional dan Pos Luar Biasa. Laporan Operasional per 31 Desember 2024 disajikan dengan perbandingan Laporan Operasional per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

5.4.1 Pendapatan-LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp1.020.038.361.814,12	Rp 1.009.599.067.378,48

Pendapatan Laporan Operasional Kabupaten Sumba Barat Daya adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual dimana pengakuan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan (earned) dan pendapatan direalisasikan yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi dimana Pendapatan- LO pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian. Pendapatan-LO Kabupaten Sumba Barat Daya adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp1.020.038.361.814,12 yang mengalami kenaikan senilai Rp10.439.294.435,64 atau 1,03% dari pendapatan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.009.599.067.378,48 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4. 1 Pendapatan–LO Tahun 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	Kenaikan/(Penurunan)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Pendapatan – LO				
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	45.815.759.160,11	37.881.679.311,63	7.934.079.848,48	20,94
Pendapatan Transfer – LO	929.581.839.027,00	927.771.638.165,00	1.810.200.862,00	0,20
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	44.640.763.627,01	43.945.749.901,85	695.013.725,16	1,58
JUMLAH	**1.020.038.361.814,12**	**1.009.599.067.378,48**	**10.439.294.435,64**	**1,03**

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat tiga jenis pendapatan pada Pendapatan-LO, dengan penjelasan sebagai berikut.

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp45.815.759.160,11	**Rp37.881.679.311,63**

Pendapatan Asli Daerah–LO Kabupaten Sumba Barat Daya adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp45.815.759.160,11 mengalami kenaikan senilai Rp7.934.079.848,48 atau sebesar 20,94% dari Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2023 senilai Rp37.881.679.311,63 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4. 2 Pendapatan Asli Daerah–LO Tahun 2024 dan 2023

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			Rp	%
Pendapatan Pajak Daerah – LO	24.995.907.677,00	17.980.246.022,00	7.015.661.655,00	39,02
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	12.263.594.538,00	8.995.990.897,00	3.267.603.641,00	36,32
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	3.944.963.310,00	7.742.306.863,00	(3.797.343.553,00)	(49,05)
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	4.611.293.635,11	3.163.135.529,63	1.448.158.105,48	45,78

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			Rp	%
JUMLAH	45.815.759.160,11	37.881.679.311,63	7.934.079.848,48	20,94

Berdasarkan data pada tabel tersebut, terdapat empat jenis pendapatan dalam Pendapatan Asli Daerah-LO dengan penjelasan sebagai berikut.

5.4.1.1.1. Pajak Daerah-LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp24.995.907.677,00	Rp 17.980.246.022,00

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah senilai Rp24.995.907.677,00 pada tahun 2024 mengalami kenaikan senilai Rp7.015.661.655,00 atau 39,02% dari tahun 2023 senilai Rp17.980.246.022,00. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Pajak Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4. 3 Pajak Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Pajak Hotel-LO	5.903.305.733,00	1.641.082.324,00	4.262.223.409,00	259,72
2	Pajak Restoran–LO	4.165.731.147,00	2.430.992.527,00	1.734.738.620,00	71,36
3	Pajak Hiburan-LO	316.468.100,00	0,00	316.468.100,00	100,00
4	Pajak Reklame-LO	220.449.309,00	278.674.394,00	(58.225.085,00)	(20,89)
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	3.909.085.485,00	3.419.109.121,00	489.976.364,00	14,33
6	Pajak Parkir-LO	891.300,00	1.735.836,00	(844.536,00)	(48,65)
7	Pajak Air Tanah-LO	23.157.977,00	29.433.414,00	(6.275.437,00)	(21,32)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	3.051.659.227,00	3.408.321.348,00	(356.662.121,00)	(10,46)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	5.434.282.799,00	5.129.757.224,00	304.525.575,00	5,94
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	1.970.876.600,00	1.641.139.834,00	329.736.766,00	20,09
	TOTAL	**24.995.907.677,00**	**17.980.246.022,00**	**7.015.661.655,00**	**39,02**

Penjelasan masing-masing saldo Pendapatan Pajak Daerah – LO dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Pajak Hotel - LO senilai Rp5.903.305.733,00 di tahun 2024 jika

dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp1.641.082.324,00. Mengalami kenaikan senilai Rp4.262.223.409,00 atau 259,72%.

2) Pajak Restoran - LO senilai Rp4.165.731.147,00 di tahun 2024 jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp2.430.992.527,00. Mengalami kenaikan senilai Rp1.734.738.620,00 atau 71,36%.

3) Pajak hiburan - LO senilai Rp316.468.100,00 di tahun 2024 jika dibanding dengan tahun 2023 senilai 0,00. Mengalami kenaikan senilai Rp316.468.100,00 atau 100%.

4) Pajak reklame – LO senilai Rp220.449.309,00 di tahun 2024 jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp278.674.394,00. Mengalami penurunan senilai Rp58.225.085,00 atau 20,89%.

5) Pajak Penerangan Jalan - LO senilai Rp3.909.085.485,00 di tahun 2024 jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp 3.419.109.121,00. Mengalami kenaikan senilai Rp489.976.364,00 atau 14,33%.

6) Pajak Parkir - LO senilai Rp891.300,00 di tahun 2024 jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp1.735.836,00. Mengalami penurunan senilai Rp844.536,00 atau 48,65%.

7) Pajak Air Tanah - LO senilai Rp23.157.977,00 di tahun 2024 jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp29.433.414,00. Mengalami penurunan senilai Rp6.275.437,00 atau 21,32%.

8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO senilai Rp3.051.659.227,00 di tahun 2024 jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp3.408.321.348,00. Mengalami penurunan senilai Rp356.662.121,00 atau 10,46%.

9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LO senilai Rp5.434.282.799,00 di tahun 2024 jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp5.129.757.224,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp304.525.575,00 atau 5,94%.

10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO senilai Rp1.970.876.600,00 di tahun 2024 jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp1.641.139.834,00. Mengalami kenaikan senilai Rp329.736.766,00 atau 20.09%.

Terdapat perbedaan nilai antara pendapatan pajak daerah-LRA dan pendapatan pajak daerah-LO, dimana pendapatan pajak daerah-LO

lebih besar Rp2.034.906.024,00 dibanding pendapatan pajak daerah-LRA. Hal ini disebabkan oleh:

- Adanya penambahan piutang pendapatan pajak daerah tahun 2024 senilai Rp3.556.121.868,00 yang terdiri dari piutang pendapatan pajak hiburan senilai Rp 54.823.500,00, piutang pendapatan pajak reklame senilai Rp567.000,00, dan piutang pendapatan PBBP2 senilai Rp3.500.731.368,00.
- Adanya pengurangan piutang pendapatan pajak daerah tahun 2023 yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tahun 2024 senilai Rp1.521.215.844,00 yang terdiri dari pelunasan Piutang Pajak Hotel senilai Rp535.145.285,00, Piutang Pajak Reklame senilai Rp25.659.407,00, Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain senilai Rp 342.102.481,00, Piutang Pajak Air Tanah senilai Rp1.410.240,00, Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya senilai Rp313.857.849,00, Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya senilai Rp40.459.192,00, dan Piutang PBBP2 senilai Rp 262.581.390,00.

5.4.1.1.2. Retribusi Daerah-LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp12.263.594.538,00	**Rp8.995.990.897,00**

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2024 senilai Rp12.263.594.538,00 mengalami kenaikan senilai Rp3.267.603.641,00 atau 36,32% dari tahun 2023 senilai Rp8.995.990.897,00. Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Kenaikan paling signifikan terjadi pada 3 obyek retribusi yakni Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO sebesar 100,00%, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO sebesar 100,00% dan Retribusi Rumah Potong Hewan- LO sebesar 47,62%. Sedangkan obyek retribusi yang tidak mencapai target adalah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO yang ditargetkan senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau (100,00%), hal ini disebabkan pemberlakuan peraturan yang melarang adanya pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Tabel 5.4. 4 Rincian Retribusi Daerah – LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				Rp	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	10.673.510.048,00	7.168.462.292,00	3.505.047.756,00	48,90
2	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	261.824.000,00	409.924.000,00	(148.100.000,00)	(36,13)
3	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	13.800.000,00	(13.800.000,00)	(100,00)
4	Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO	113.092.700,00	0,00	113.092.700,00	100,00
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	753.313.000,00	714.796.950,00	38.516.050,00	5,39
6	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	22.897.300,00	34.348.200,00	(11.450.900,00)	(33,34)
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	32.788.000,00	31.811.000,00	977.000,00	3,07
8	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	12.585.000,00	8.525.000,00	4.060.000,00	47,62
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	104.600.000,00	98.960.000,00	5.640.000,00	5,70
10	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	45.300.000,00	94.520.000,00	(49.220.000,00)	(52,07)
11	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	0,00	420.843.455,00	(420.843.455,00)	(100,00)
12	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	243.684.490,00	0,00	243.684.490,00	100,00
JUMLAH		**12.263.594.538,00**	**8.995.990.897,00**	**3.267.603.641,00**	**36,32**

Penjelasan masing-masing saldo Pendapatan Retribusi – LO dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO senilai Rp10.673.510.048,00 tahun 2024, jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp7.168.462.292,00 mengalami kenaikan senilai Rp3.505.047.756,00 atau 48,90%.
2) Retribusi Pelayanan Pasar – LO senilai Rp261.824.000,00 di tahun 2024, jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp409.924.000,00 mengalami penurunan senilai Rp148.100.000,00 atau 36,13%.
3) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO senilai Rp0,00 di tahun 2024, jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp13.800.000,00 mengalami penurunan senilai Rp13.800.000,00 atau 100,00%.
4) Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO senilai Rp113.092.700,00 di tahun 2024, jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp0,00 mengalami kenaikan senilai Rp113.092.700,00 atau 100,00%.
5) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO senilai Rp753.313.000,00 di tahun 2024, jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp714.796.950,00 mengalami kenaikan senilai

Rp38.516.050,00 atau 5,39%.

6) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LO senilai Rp22.897.300,00 di tahun 2024, jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp34.348.200,00 mengalami penurunan senilai Rp11.450.900,00 atau 33,34%.
7) Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO senilai Rp32.788.000,00 di tahun 2024, jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp31.811.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp977.000,00 atau 3,07%.
8) Retribusi Rumah Potong Hewan – LO senilai Rp12.585.000,00 di tahun 2024, jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp8.525.000,00, mengalami kenaikan senilai Rp4.060.000,00 atau 47,62%.
9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga- LO senilai Rp104.600.000,00 di tahun 2024, jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp98.960.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp5.640.000,00 atau 5,70%.
10) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO senilai Rp45.300.000,00 di tahun 2024, jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp94.520.000,00 mengalami penurunan senilai Rp49.220.000,00 atau 52,07%.
11) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO senilai Rp0,00 di tahun 2024, jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp420.843.455,00 mengalami penurunan senilai Rp420.843.455,00 atau (100,00%). Hal ini disebabkan perubahan nomenklatur menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO.
12) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO senilai Rp243.684.490,00 di tahun 2024, jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp0,00 mengalami kenaikan senilai Rp243.684.490,00 atau 100,00%.

Terdapat perbedaan nilai antara pendapatan retribusi daerah-LRA dan pendapatan retribusi daerah -LO, dimana pendapatan retribusi daerah -LO lebih besar Rp619.259.402,00 dibanding pendapatan retribusi daerah -LRA. Hal ini disebabkan oleh:

- Adanya penambahan piutang pendapatan retribusi daerah tahun 2024 senilai Rp978.266.002,00 berupa Piutang Retribusi Pelayanan

Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah pada RSUD Reda Bolo tahun 2024.

- Adanya pengurangan piutang pendapatan retribusi daerah tahun 2024 senilai Rp359.006.600,00 berupa pelunasan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis tahun 2023 yang ditransfer oleh BPJS kepada Pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 yang terdiri dari transfer masuk Kas Daerah senilai Rp358.992.100,00 dan biaya transaksi keuangan antar bank yang dibebankan kepada penerima senilai Rp14.500,00.

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp3.944.963.310,00	**Rp 7.742.306.863,00**

Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024 senilai Rp.3.944.963.310,00 mengalami penurunan senilai Rp3.797.343.553,00 atau 49,05% dari tahun 2023 senilai Rp7.742.306.863,00. Pendapatan tersebut merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada Bank NTT.

5.4.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah- LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp4.611.293.635,11	**Rp3.163.135.529,63**

Jumlah Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2024 senilai Rp4.611.293.635,11 mengalami kenaikan senilai Rp1.448.158.105,48 atau 45,78% dari tahun 2023 senilai Rp3.163.135.529,63**.** Pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang diperoleh dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya, Pendapatan Dana Kapitasi JKN, Pendapatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan. Rincian Jumlah lain-lain PAD yang Sah – LO adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4. 5 Lain-Lain PAD yang Sah – LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				Rp	%
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	273.316.171,00	(273.316.171,00)	(100,00)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	82.500.000,00	(82.500.000,00)	(100,00)
3	Jasa Giro – LO	1.359.677.497,33	1.082.716.103,91	276.961.393,42	25,58
4	Pendapatan Bunga – LO	1.260.331.144,00	916.625.120,00	343.706.024,00	37,50
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	870.038.435,85	480.133.753,00	389.904.682,85	81,21
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	140.118.423,00	70.837.131,72	69.281.291,28	97,80
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	188.775.032,00	0,00	188.775.032,00	100,00
8	Pendapatan Denda Retribusi – LO	23.500.000,00	24.750.000,00	(1.250.000,00)	(5,05)
9	Pendapatan dari Pengembalian –LO	768.853.102,93	232.257.250,00	536.595.852,93	231,04
TOTAL		**4.611.293.635,11**	**3.163.135.529,63**	**1.448.158.105,48**	**45,78**

Penjelasan masing-masing saldo Lain-lain PAD yang Sah – LO dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan – LO senilai Rp0,00 di tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 senilai Rp273.316.171,00, mengalami penurunan senilai Rp273.316.171,00 atau 100,00%.
2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO senilai Rp0,00 di tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 senilai Rp82.500.000,00,00, mengalami penurunan senilai Rp82.500.000,00 atau 100,00%.
3) Jasa Giro – LO senilai Rp1.359.677.497,33 di tahun 2024. Jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp1.082.716.103,91, mengalami kenaikan senilai Rp276.961.393,42 atau 25,58%.
4) Pendapatan Bunga – LO senilai Rp1.260.331.144,00 di tahun 2024. Jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp916.625.120,00, mengalami kenaikan senilai Rp343.706.024,00 atau 37,50%.
5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO senilai Rp870.038.435,85 di tahun 2024. Jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp480.133.753,00, mengalami kenaikan senilai Rp389.904.682,85 atau 81,21%.

6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO senilai Rp140.118.423,00 di tahun 2024. Jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp70.837.131,72, mengalami kenaikan senilai Rp69.281.291,28 atau 97,80%.

7) Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO senilai Rp188.775.032,00 di tahun 2024. Jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp0,00, mengalami kenaikan senilai Rp188.775.032,00 atau 100,00%.

8) Pendapatan Denda Retribusi – LO senilai Rp23.500.000,00 di tahun 2024. Jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp24.750.000,00, mengalami penurunan senilai Rp1.250.000,00 atau 5,05%.

9) Pendapatan dari Pengembalian – LO senilai Rp768.853.102,93 di tahun 2024. Jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp232.257.250,00, mengalami kenaikan senilai Rp536.595.852,93 atau 231,04%.

Terdapat perbedaan nilai antara Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO, dimana Lain-lain PAD yang Sah-LO lebih kecil Rp489.667.903,21 dibanding Lain-lain PAD yang Sah-LRA. Hal ini disebabkan oleh:

- Adanya pengurangan atau reklasifikasi pencatatan Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin berupa kendaraan Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD senilai Rp435.993.600,00 yang dicatat pada pos Lain-lain PAD yang Sah-LRA, tetapi dicatat dalam LO pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO.
- Adanya pengurangan atau reklasifikasi pencatatan pelunasan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara tahun 2023 pada tahun 2024 berupa setoran Temuan atas LKPD Tahun 2022 Kekurangan Volume atas Pekerjaan pada Dinas Peternakan senilai Rp52.676.681,21.
- Adanya pengurangan atau reklasifikasi pelunasan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 2023 pada tahun 2024 berupa setoran Temuan Inspektorat atas kelebihan Pembayaran Honorarium Tahun 2009 An. Asterius Tamo Ama tahun 2024 senilai Rp1.000.000,00.
- Adanya penambahan Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah berupa remunerasi TDF TA 2024 sesuai

data dari LKBUN senilai Rp2.378,00.

5.4.1.2. Pendapatan Transfer- LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp929.581.839.027,00	**Rp927.771.638.165,00**

Pendapatan Transfer-Kabupaten Sumba Barat Daya adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp929.581.839.027,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.810.200.862,00 atau 0,20% dari tahun 2023 senilai Rp927.771.638.165,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4. 6 Rincian Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				Rp	%
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	894.297.886.773,00	880.911.720.268,00	13.386.166.505,00	1,52
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	7.109.813.000,00	19.751.646.000,00	(12.641.833.000,00)	(64,00)
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	28.174.139.254,00	27.108.271.897,00	1.065.867.357,00	3,93
	Jumlah	**929.581.839.027,00**	**927.771.638.165,00**	**1.810.200.862,00**	**0,20**

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp901.407.699.773,00	**Rp900.663.366.268,00**

Pendapatan Transfer pemerintah pusat tahun 2024 senilai Rp901.407.699.773,00 mengalami kenaikan senilai Rp744.333.505,00 atau 0,08% dari tahun 2023 senilai Rp900.663.366.268,00.

Terdapat perbedaan nilai antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO, dimana Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO lebih kecil Rp185.084.529.000,00 dibanding Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA. Hal ini disebabkan oleh:

- Adanya pencatatan pendapatan transfer Dana Desa yang dicatat pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA tetapi tidak dicatat pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO senilai Rp184.608.937.000,00.
- Adanya penyaluran Piutang TDF tahun 2023 ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 senilai Rp475.592.000,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan-LO dan Dana Insentif Daerah – LO yang dapat diuraikan sebagai berikut.

5.4.1.2.1.1 Dana Perimbangan- LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp894.297.886.773,00	**Rp880.911.720.268,00**

Pendapatan dana perimbangan tahun 2024 senilai Rp894.297.886.773,00 mengalami kenaikan senilai Rp13.386.166.505,00 atau 1,52% dari tahun 2023 senilai Rp880.911.720.268,00.

Tabel 5.4. 7 Rincian Pendapatan Transfer pemerintah pusat Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				Rp	%
1	Bagi Hasil Pajak – LO	2.523.555.524,00	3.505.099.000,00	(981.543.476,00)	(28,00)
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	1.672.379.000,00	1.900.559.000,00	(228.180.000,00)	(12,01)
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	574.445.179.602,00	502.959.267.143,00	71.485.912.459,00	14,21
4	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) - LO	160.421.804.814,00	200.621.098.674,00	(40.199.293.860,00)	(20,04)
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	155.234.967.833,00	171.925.696.451,00	(16.690.728.618,00)	(9,71)
	Total	**894.297.886.773,00**	**880.911.720.268,00**	**13.386.166.505,00**	**1,52**

Penjelasan masing-masing saldo Pendapatan Transfer pemerintah pusat dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Dana Bagi Hasil Pajak – LO terealisasi senilai Rp2.523.555.524,00 di tahun 2024, jika dibanding dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp3.505.099.000,00 mengalami penurunan senilai Rp981.543.476,00 atau 28,00%.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO terealisasi senilai Rp1.672.379.000,00 di tahun 2024, jika dibanding dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp1.900.559.000,00 mengalami penurunan senilai Rp228.180.000,00 atau 12,01%.

3) Dana Alokasi Umum (DAU) – LO terealisasi senilai Rp574.445.179.602,00 di tahun 2024, jika dibanding dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp502.959.267.143,00 mengalami

kenaikan senilai Rp71.485.912.459,00 atau 14,21%.

4) Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) – LO terealisasi senilai Rp160.421.804.814,00 di tahun 2024, jika dibanding dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp200.621.098.674,00 mengalami penurunan senilai Rp40.199.293.860,00 atau 20,04%.
5) Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) – LO terealisasi senilai Rp155.234.967.833,00 di tahun 2024, jika dibanding dengan realisasi tahun 2023 senilai Rp171.925.696.451,00 mengalami penurunan senilai Rp16.690.728.618,00 atau 9,71%.

5.4.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp0,00	**Rp19.751.646.000,00**

Dana Insentif Daerah – LO tidak ada realisasi di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 senilai Rp19.751.646.000,00 mengalami penurunan sebesar 100%.

5.4.1.2.1.3 Insentif Fiskal-LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp7.109.813.000,00	**Rp0,00**

Insentif Fiskal – LO tahun 2024 terealisasi sebesar Rp7.109.813.000,00, jika dibandingkan dengan tahun 2023 senilai Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar 100%.

5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp28.174.139.254,00	**Rp27.108.271.897,00**

Pendapatan Transfer pemerintah daerah lainnya tahun 2024 senilai Rp28.174.139.254,00 mengalami penurunan senilai Rp1.065.867.357,00 atau 3,93% dari tahun 2023 senilai Rp27.108.271.897,00. Pendapatan Transfer pemerintah daerah lainnya tahun 2024 merupakan pendapatan bagi hasil pajak oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Terdapat perbedaan nilai antara Pendapatan Transfer Antar Daerah-

LRA dan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO, dimana Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO lebih kecil Rp3.432.977.469,00 dibanding Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA. Hal ini disebabkan oleh:

- Adanya penambahan piutang pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Propinsi NTT tahun 2024 senilai Rp2.261.459.724,00, yang terdiri dari Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor senilai Rp218.509.034,00, Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor senilai Rp2.042.536.512,00, dan Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan senilai Rp414.178,00 yang tercatat pada pos Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO, tetapi tidak tercatat pada Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA.

- Adanya pelunasan piutang pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Propinsi NTT tahun 2023 pada tahun 2024 senilai Rp5.694.437.193,00, yang terdiri dari Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor senilai Rp2.977.722.675,00, Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor senilai Rp894.065.835,00, Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan senilai Rp 970.923,00, dan Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp1.821.677.760,00.

5.4.1.3. Lain–lain Pendapatan Yang Sah - LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp44.640.763.627,01	**Rp 43.945.749.901,85**

Lain Lain Pendapatan yang Sah-LO adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp44.640.763.627,01 mengalami kenaikan senilai Rp695.013.725,16 atau 1,58% dari tahun 2023 senilai Rp43.945.749.901,85. Nilai Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4. 8 Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				Rp	%
1	Pendapatan Hibah – LO	26.993.012.733,01	23.700.082.390,85	3.292.930.342,16	13,89
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	17.647.750.894,00	20.245.667.511,00	(2.597.916.617,00)	(12,83)
Jumlah		**44.640.763.627,01**	**43.945.749.901,85**	**695.013.725,16**	**1,58**

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp26.993.012.733,01	**Rp23.700.082.390,85**

Pendapatan hibah tahun 2024 senilai Rp26.993.012.733,01 mengalami kenaikan senilai Rp3.292.930.342,16 atau 13,89% dari tahun 2023 senilai Rp23.700.082.390,85.

Tabel 5.4. 9 Pendapatan Hibah - LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				Rp	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	14.744.079.516,00	23.700.082.390,85	(8.956.002.874,85)	(37,79)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	12.224.433.217,01	0,00	12.224.433.217,01	100,00
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00	100,00
	Total	**26.993.012.733,01**	**23.700.082.390,85**	**3.292.930.342,16**	**13,89**

Penjelasan masing-masing saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO senilai Rp14.744.079.516,00 di tahun 2024. Jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp23.700.082.390,85, mengalami penurunan senilai Rp8.956.002.874,85 atau 37,79%.
2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO senilai Rp12.224.433.217,01 di tahun 2024. Jika dibanding dengan tahun 2023 yang nihil, mengalami kenaikan senilai Rp12.224.433.217,01 atau 100,00%.
3) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO di tahun 2024 senilai Rp24.500.000,00. Jika dibanding dengan tahun 2023 yang nihil, mengalami kenaikan senilai Rp24.500.000,00 atau 100,00%.

5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp17.647.750.894,00	**Rp20.245. 667.511,00**

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO tahun 2024 senilai Rp17.647.750.894,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.597.916.617,00 atau 12,83% dari tahun 2023 senilai Rp20.245.667.511,00.

Tabel 5.4. 10 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				Rp	%
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	17.647.750.894,00	20.245.667.511,00	(2.597.916.617,00)	(12,83)
Total		**17.647.750.894,00**	**20.245.667.511,00**	**(2.597.916.617,00)**	**(12,83)**

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO senilai Rp17.647.750.894,00 di tahun 2024. Jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp20.245.667.511,00, mengalami penurunan senilai Rp2.597.916.617,00 atau 12,83%.

Terdapat perbedaan nilai antara Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LRA dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO, dimana Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO lebih kecil Rp11.675.825,00 dibanding Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LRA. Hal ini disebabkan oleh adanya penyetoran tuntutan ganti kerugian daerah BPK tahun sebelumnya pada tahun 2024 yang disetorkan oleh Puskesmas Tanggaba senilai Rp6.729.785,00 dan Puskesmas Kori senilai Rp4.946.040,00.

5.4.2 Beban

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp949.555.089.843,37	**Rp883.502.564.567,37**

Jumlah Beban untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp949.555.089.843,37 mengalami kenaikan senilai Rp66.052.525.276,00 atau 7,48% dari tahun 2023 senilai Rp883.502.564.567,37. Untuk Beban Penyusutan dan Amortisasi sejak tahun 2021 tidak termasuk dalam Beban Operasi, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4. 11 Beban per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Operasi-LO	764.388.903.794,64	711.241.255.569,81	53.147.648.224,83	7,47

2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	124.585.207.612,73	108.664.704.589,56	15.920.503.023,17	14,65
3	Beban Transfer-LO	60.580.978.436,00	63.596.604.408,00	(3.015.625.972,00)	(4,74)
JUMLAH		**949.555.089.843,37**	**883.502.564.567,37**	**66.052.525.276,00**	**7,48**

5.4.2.1. Beban Operasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp764.388.903.794,64	**Rp711.241.255.569,81**

Beban Operasi-LO pada tahun 2024 senilai Rp764.388.903.794,64, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4. 12 Beban Operasi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Pegawai	330.331.141.451,00	286.564.004.981,00	43.767.136.470,00	15,27
2	Beban Barang dan Jasa	341.461.278.857,43	338.809.304.356,67	2.651.974.500,76	0,78
3	Beban Subsidi	233.203.450,00	117.966.000,00	115.237.450,00	97,69
4	Beban Hibah	73.004.663.605,00	69.938.681.550,00	3.065.982.055,00	4,38
5	Beban Bantuan Sosial	17.876.165.000,00	14.838.490.000,00	3.037.675.000,00	20,47
6	Beban Penyisihan Piutang	1.482.451.431,21	972.808.682,14	509.642.749,07	52,39
	JUMLAH	**764.388.903.794,64**	**711.241.255.569,81**	**53.147.648.224,83**	**7,47**

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp330.331.141.451,00	**Rp286.564.004.981,00**

Beban Pegawai pada Tahun 2024 senilai Rp330.331.141.451,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai yang dipekerjakan Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.4. 13 Rincian Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023

NO	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Gaji Pokok ASN	211.201.591.102,00	176.035.163.632,00	35.166.427.470,00	19,98
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	16.546.607.663,00	14.703.938.414,00	1.842.669.249,00	12,53

NO	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	6.447.980.000,00	6.270.781.250,00	177.198.750,00	2,83
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	10.789.041.000,00	11.570.521.000,00	(781.480.000,00)	(6,75)
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.044.330.000,00	2.103.680.000,00	1.940.650.000,00	92,25
6	Beban Tunjangan Beras ASN	10.930.712.700,00	10.268.576.628,00	662.136.072,00	6,45
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	235.602.474,00	143.597.596,00	92.004.878,00	64,07
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	3.492.777,00	2.788.102,00	704.675,00	25,27
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	8.559.594.679,00	7.237.496.558,00	1.322.098.121,00	18,27
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	435.072.277,00	362.390.793,00	72.681.484,00	20,06
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.305.209.311,00	1.087.171.415,00	218.037.896,00	20,06
12	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	736.160.018,00	483.798.552,00	252.361.466,00	52,16
13	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	45.164.839,00	38.182.355,00	6.982.484,00	18,29
14	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	27.767.087.400,00	27.779.607.720,00	(12.520.320,00)	(0,05)
15	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	8.363.519.800,00	9.897.283.700,00	(1.533.763.900,00)	(15,50)
16	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	586.500.000,00	2.007.000.000,00	(1.420.500.000,00)	(70,78)
17	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	79.246.250,00	0,00	79.246.250,00	100,00
18	Beban Honorarium	2.580.490.000,00	2.432.779.000,00	147.711.000,00	6,07
19	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(100,00)
20	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	1.679.261.700,00	0,00	1.679.261.700,00	100,00
21	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	3.406.092.100,00	0,00	3.406.092.100,00	100,00
22	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	517.500.000,00	0,00	517.500.000,00	100,00
23	Beban Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	782.040.000,00	0,00	0,00
24	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	55.204.080,00	62.525.400,00	(7.321.320,00)	(11,71)
25	Beban Tunjangan Beras DPRD	71.595.300,00	71.807.850,00	(212.550,00)	(0,30)
26	Beban Uang Paket DPRD	66.958.500,00	67.032.000,00	(73.500,00)	(0,11)
27	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.133.958.000,00	0,00	0,00
28	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	89.188.650,00	97.237.800,00	(8.049.150,00)	(8,28)
29	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	17.584.875,00	19.183.500,00	(1.598.625,00)	(8,33)
30	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00	2.646.000.000,00	0,00	0,00
31	Beban Tunjangan Reses DPRD	441.000.000,00	661.500.000,00	(220.500.000,00)	(33,33)
32	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.825.926.733,00	2.828.266.080,00	(2.339.347,00)	(0,08)
33	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	5.184.000.000,00	5.184.000.000,00	0,00	0,00

NO	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
34	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	271.425.000,00	0,00	271.425.000,00	100,00
35	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	39.000.000,00	54.600.000,00	(15.600.000,00)	(28,57)
36	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	2.520.000,00	3.696.000,00	(1.176.000,00)	(31,82)
37	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	70.200.000,00	98.280.000,00	(28.080.000,00)	(28,57)
38	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.896.800,00	4.055.520,00	(1.158.720,00)	(28,57)
39	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	387.523,00	867.756,00	(480.233,00)	(55,34)
40	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.020,00	1.480,00	(460,00)	(31,08)
41	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	4.021.920,00	5.367.600,00	(1.345.680,00)	(25,07)
42	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	84.240,00	112.320,00	(28.080,00)	(25,00)
43	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	252.720,00	336.960,00	(84.240,00)	(25,00)
44	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	101.640.000,00	110.880.000,00	(9.240.000,00)	(8,33)
45	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	265.000.000,00	300.000.000,00	(35.000.000,00)	(11,67)
	Jumlah	**330.331.141.451,00**	**286.564.004.981,00**	**43.767.136.470,00**	**15,27**

Rincian Beban Pegawai setiap SKPD per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4. 14 Beban Pegawai per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	38.279.449.298,00	7.612.459.243,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.035.861.355,00	961.462.734,00
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.124.575.365,00	2.125.525.579,00
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.445.431.036,00	1.438.487.673,00
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2.803.255.884,00	2.495.503.266,00
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	2.061.138.647,00	2.185.140.896,00
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1.462.841.013,00	1.566.901.259,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1.688.813.471,00	1.608.924.071,00
9	DINAS KESEHATAN	47.164.560.996,00	42.802.217.906,00
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1.809.683.171,00	1.711.483.159,00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	1.047.168.414,00	1.650.927.739,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.452.285.262,00	1.346.455.780,00
13	DINAS PARIWISATA	1.842.493.871,00	1.867.375.999,00
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.534.909.309,00	3.199.774.398,00
15	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.379.185.872,00	44.230.459,00

No	SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.389.910.087,00	2.320.782.682,00
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.727.609.348,00	1.559.437.928,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.750.135.630,00	2.164.867.224,00
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	158.293.356.584,00	153.287.578.304,00
20	DINAS PERHUBUNGAN	1.299.146.756,00	1.129.079.524,00
21	DINAS PERIKANAN	2.112.054.870,00	2.001.114.933,00
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	897.946.271,00	28.900.926,00
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.179.182.260,00	1.165.593.177,00
24	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	8.822.742.279,00	8.644.194.774,00
25	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.344.456.843,00	1.324.539.289,00
26	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	3.258.061.847,00	3.249.750.359,00
27	DINAS SOSIAL	1.847.442.264,00	1.599.741.668,00
28	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	680.653.594,00	33.961.756,00
29	INSPEKTORAT DAERAH	2.212.628.001,00	1.917.074.784,00
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.657.347.481,00	1.500.228.281,00
31	SEKRETARIAT DPRD	14.728.954.784,00	14.686.438.331,00
32	SEKRETARIAT DAERAH	5.572.711.320,00	6.105.016.676,00
33	KECAMATAN WEWEWA UTARA	1.010.500.149,00	1.015.025.797,00
34	KECAMATAN WEWEWA TIMUR	1.154.513.383,00	1.187.616.037,00
35	KECAMATAN WEWEWA TENGAH	1.326.953.062,00	1.353.855.696,00
36	KECAMATAN WEWEWA SELATAN	980.818.690,00	1.041.559.322,00
37	KECAMATAN WEWEWA BARAT	1.102.875.731,00	978.711.536,00
38	KECAMATAN LOURA	805.818.826,00	679.851.370,00
39	KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA	2.039.117.768,00	1.868.524.508,00
40	KECAMATAN KODI UTARA	840.411.590,00	852.808.425,00
41	KECAMATAN KODI BANGEDO	720.642.387,00	683.580.857,00
42	KECAMATAN KODI BALAGHAR	513.887.139,00	576.588.043,00
43	KECAMATAN KODI	929.609.543,00	990.712.613,00
	TOTAL	**330.331.141.451,00**	**286.564.004.981,00**

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp341.461.278.857,43	**Rp338.809.304.356,67**

Beban Barang dan Jasa pada tahun 2024 senilai Rp341.461.278.857,43 mengalami kenaikan senilai Rp2.651.974.500,76 atau 0,78% dari tahun 2023 senilai Rp338.809.304.356,67. Rincian beban

barang dan jasa diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.4. 15 Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Beban Barang	136.616.790.878,96	139.069.043.084,18	(2.452.252.205,22)	(1,76)
2	Beban Jasa	109.607.936.898,47	104.663.019.062,00	4.944.917.836,47	4,72
3	Beban Pemeliharaan	6.213.618.520,00	5.047.187.292,00	1.166.431.228,00	23,11
4	Beban Perjalanan Dinas	48.352.622.644,00	42.250.369.635,00	6.102.253.009,00	14,44
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	821.916.000,00	3.715.920.787,00	(2.894.004.787,00)	(77,88)
6	Beban Barang dan Jasa BOS	39.801.218.226,00	44.063.764.496,49	(4.262.546.270,49)	(9,67)
7	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	47.175.690,00	0,00	47.175.690,00	100,00
JUMLAH		**341.461.278.857,43**	**338.809.304.356,67**	**2.651.974.500,76**	**0,78**

Terdapat perbedaan nilai antara Belanja Barang dan Jasa dan Beban Barang dan Jasa, dimana Beban Barang dan Jasa lebih besar Rp22.195.626.523,43 dibanding Belanja Barang dan Jasa.

5.4.2.1.2.1 Beban Barang

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp136.616.790.878,96	**Rp139.069.043.084,18**

Beban Barang Tahun 2024 senilai Rp136.616.790.878,96 mengalami penurunan senilai Rp2.452.252.205,22 atau 1,76% dibanding tahun 2023 senilai Rp139.069.043.084,18. Beban Barang adalah perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diserahkan kepada masyarakat. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4. 16 Beban Barang Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Beban Barang Habis Pakai	132.064.501.424,96	139.040.208.709,18	(6.975.707.284,22)	(5,02)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	15.245.625,00	28.834.375,00	(13.588.750,00)	(47,13)
3	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	4.537.043.829,00	0,00	4.537.043.829,00	100,00
Jumlah		**136.616.790.878,96**	**139.069.043.084,18**	**(2.452.252.205,22)**	**(1,76)**

Selain persediaan yang digunakan untuk Pelayanan juga termasuk Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap dan dicatat sebagai Beban Persediaan. Rincian beban barang setiap

SKPD per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4. 17 Beban Barang per SKPD Tahun 2023 dan 2024

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	648.436.996,00	414.475.750,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	630.485.162,00	97.015.038,00
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.779.744.700,00	1.684.409.200,00
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	527.415.225,00	352.417.000,00
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	574.104.400,00	563.325.238,00
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	1.117.779.555,00	969.188.022,00
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	165.095.860,00	624.761.410,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1.188.282.901,00	493.240.250,00
9	DINAS KESEHATAN	22.761.328.050,04	43.301.651.850,34
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	121.893.318,00	158.738.796,00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	2.680.238.975,00	1.094.504.950,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	381.650.600,00	362.016.900,00
13	DINAS PARIWISATA	896.080.836,00	1.022.635.200,00
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.622.265.948,00	735.638.350,00
15	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	196.916.900,00	8.271.800,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	620.308.800,00	332.731.350,00
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.661.451.320,00	2.003.961.343,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	148.037.100,00	1.395.456.893,00
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	37.870.980.194,17	48.414.417.917,00
20	DINAS PERHUBUNGAN	110.550.600,00	141.837.610,00
21	DINAS PERIKANAN	4.930.920.490,00	1.068.999.609,00
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	273.573.200,00	20.117.200,00
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	189.174.000,00	288.965.750,00
24	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	19.730.097.658,00	6.869.174.787,00
25	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.176.522.300,00	2.107.080.366,00
26	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	4.367.654.337,00	4.702.191.078,00
27	DINAS SOSIAL	1.149.334.550,00	776.111.750,00

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
28	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.081.045.975,00	20.816.950,00
29	INSPEKTORAT DAERAH	144.900.200,00	113.911.879,00
30	KECAMATAN KODI	188.735.000,00	126.780.250,00
31	KECAMATAN KODI BALAGHAR	196.373.000,00	186.731.500,00
32	KECAMATAN KODI BANGEDO	337.400.750,00	225.397.250,00
33	KECAMATAN KODI UTARA	215.262.300,00	167.529.000,00
34	KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA	626.179.300,00	517.279.150,00
35	KECAMATAN LOURA	268.548.400,00	167.958.488,00
36	KECAMATAN WEWEWA BARAT	238.088.115,00	256.272.150,00
37	KECAMATAN WEWEWA SELATAN	232.358.000,00	182.501.950,00
38	KECAMATAN WEWEWA TENGAH	224.713.600,00	189.651.500,00
39	KECAMATAN WEWEWA TIMUR	197.751.700,00	174.995.450,00
40	KECAMATAN WEWEWA UTARA	238.675.630,00	170.821.950,00
41	PUSKESMAS BILLA CENGE	652.561.927,79	432.606.183,18
42	PUSKESMAS BONDO KODI	467.440.197,21	188.300.422,30
43	PUSKESMAS DELU DEPA	274.629.614,69	195.280.723,39
44	PUSKESMAS ELOPADA	504.677.321,87	570.094.011,34
45	PUSKESMAS KAWANGO HARI	329.269.649,54	130.686.885,65
46	PUSKESMAS KORI	795.854.219,59	283.271.047,77
47	PUSKESMAS PALLA	613.570.138,54	342.176.136,24
48	PUSKESMAS PANENGGO EDE	552.948.935,72	242.800.145,39
49	PUSKESMAS RADAMATA	728.235.025,63	305.611.584,64
50	PUSKESMAS TANGGABA	532.459.870,60	384.489.854,45
51	PUSKESMAS TENA TEKE	521.000.811,57	163.213.023,58
52	PUSKESMAS WAIMANGURA	516.753.156,66	339.322.081,86
53	PUSKESMAS WALLA NDIMU	753.700.138,14	82.412.888,51
54	PUSKESMAS WATUKAWULA	824.664.063,13	627.746.512,84
55	PUSKESMAS WEEKOMBAK	557.021.441,22	296.260.148,80
56	PUSKESMAS WERILOLO	385.238.626,41	91.943.047,11
57	RSUD PRATAMA REDA BOLO	3.555.469.134,44	3.257.111.918,79
58	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	482.979.900,00	323.194.900,00
59	SEKRETARIAT DAERAH	3.781.729.013,00	4.170.490.012,00
60	SEKRETARIAT DPRD	4.076.231.748,00	4.138.048.682,00
TOTAL		**136.616.790.878,96**	**139.069.043.084,18**

a) Beban Barang Habis Pakai

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp132.064.501.424,96	**Rp139.040.208.709,18**

Beban Barang Habis Pakai pada tahun 2024 senilai Rp132.064.501.424,96 mengalami penurunan senilai Rp6.975.707.284,22 atau 5,02% dibanding Beban Barang Habis Pakai tahun 2023 senilai Rp139.040.208.709,18. Rincian Beban Barang Pakai Habis per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4. 18 Beban Barang Habis Pakai per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	648.436.996,00	414.475.750,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	630.485.162,00	97.015.038,00
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.779.744.700,00	1.684.409.200,00
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	527.415.225,00	351.917.000,00
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	574.104.400,00	563.325.238,00
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	1.117.779.555,00	969.188.022,00
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	165.095.860,00	624.761.410,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1.188.282.901,00	493.240.250,00
9	DINAS KESEHATAN	22.761.108.050,04	43.301.651.850,34
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	121.893.318,00	158.738.796,00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	2.603.985.975,00	1.094.504.950,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	381.650.600,00	362.016.900,00
13	DINAS PARIWISATA	896.080.836,00	1.022.635.200,00
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.621.365.948,00	735.638.350,00
15	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	194.216.900,00	8.271.800,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	620.308.800,00	332.731.350,00
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.344.450.528,00	2.003.961.343,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	148.037.100,00	1.395.456.893,00
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	34.262.181.509,17	48.414.417.917,00
20	DINAS PERHUBUNGAN	110.550.600,00	141.837.610,00
21	DINAS PERIKANAN	4.930.920.490,00	1.068.999.609,00
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	272.243.200,00	20.117.200,00
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	189.174.000,00	288.965.750,00
24	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	19.730.097.658,00	6.869.174.787,00
25	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.176.522.300,00	2.107.080.366,00
26	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	4.354.363.712,00	4.673.856.703,00
27	DINAS SOSIAL	1.149.334.550,00	776.111.750,00

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
28	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.079.090.975,00	20.816.950,00
29	INSPEKTORAT DAERAH	144.900.200,00	113.911.879,00
30	KECAMATAN KODI	188.735.000,00	126.780.250,00
31	KECAMATAN KODI BALAGHAR	196.373.000,00	186.731.500,00
32	KECAMATAN KODI BANGEDO	337.000.750,00	225.397.250,00
33	KECAMATAN KODI UTARA	215.262.300,00	167.529.000,00
34	KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA	626.179.300,00	517.279.150,00
35	KECAMATAN LOURA	268.548.400,00	167.958.488,00
36	KECAMATAN WEWEWA BARAT	238.088.115,00	256.272.150,00
37	KECAMATAN WEWEWA SELATAN	232.358.000,00	182.501.950,00
38	KECAMATAN WEWEWA TENGAH	224.713.600,00	189.651.500,00
39	KECAMATAN WEWEWA TIMUR	197.751.700,00	174.995.450,00
40	KECAMATAN WEWEWA UTARA	238.675.630,00	170.821.950,00
41	PUSKESMAS BILLA CENGE	643.311.927,79	432.606.183,18
42	PUSKESMAS BONDO KODI	467.020.197,21	188.300.422,30
43	PUSKESMAS DELU DEPA	272.829.614,69	195.280.723,39
44	PUSKESMAS ELOPADA	504.677.321,87	570.094.011,34
45	PUSKESMAS KAWANGO HARI	329.005.649,54	130.686.885,65
46	PUSKESMAS KORI	793.854.219,59	283.271.047,77
47	PUSKESMAS PALLA	613.028.138,54	342.176.136,24
48	PUSKESMAS PANENGGO EDE	547.653.935,72	242.800.145,39
49	PUSKESMAS RADAMATA	718.008.025,63	305.611.584,64
50	PUSKESMAS TANGGABA	525.336.120,60	384.489.854,45
51	PUSKESMAS TENA TEKE	512.326.851,57	163.213.023,58
52	PUSKESMAS WAIMANGURA	516.753.156,66	339.000.009,78
53	PUSKESMAS WALLA NDIMU	750.700.138,14	82.412.888,51
54	PUSKESMAS WATUKAWULA	822.864.063,13	627.746.512,84
55	PUSKESMAS WEEKOMBAK	557.021.441,22	296.260.148,80
56	PUSKESMAS WERILOLO	385.238.626,41	91.943.047,11
57	RSUD PRATAMA REDA BOLO	3.131.658.492,44	3.257.433.990,87
58	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	482.979.900,00	323.194.900,00
59	SEKRETARIAT DAERAH	3.726.494.013,00	4.170.490.012,00
60	SEKRETARIAT DPRD	4.076.231.748,00	4.138.048.682,00
TOTAL		**132.064.501.424,96**	**139.040.208.709,18**

b) Beban Barang Tak Habis Pakai

31 Desember 2024	31 Desember 2023
15.245.625,00	**28.834.375,00**

Beban Barang Tak Habis Pakai pada tahun 2024 senilai Rp15.245.625,00 mengalami penurunan senilai Rp13.588.750,00 atau 47,13% dibanding tahun 2023 senilai Rp28.834.375,00. Rincian Beban Barang Tak Habis Pakai per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4. 19 Beban Barang Tak Habis Pakai per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	500.000,00
2	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.955.000,00	0,00
3	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	13.290.625,00	28.334.375,00
TOTAL		**15.245.625,00**	**28.834.375,00**

c) Beban Aset TetapYang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp4.537.043.829,00	**Rp0,00**

Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi pada tahun 2024 senilai Rp4.537.043.829,00 mengalami peningkatan senilai Rp4.537.043.829,00 atau 100,00% dibanding tahun 2023 senilai Rp0,00. Rincian Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5.4. 20 Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	1.330.000,00	0,00
2	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	450.439.210,00	0,00
3	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	3.286.241.185,00	0,00
4	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	298.969.792,00	0,00
5	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	423.810.642,00	0,00
6	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	76.253.000	0,00
TOTAL		**4.537.043.829,00**	**0,00**

Rincian Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi setiap SKPD per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat

pada tabel berikut.

Tabel 5.4. 21 Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	BAGIAN UMUM	55.235.000,00	0,00
2	DINAS KESEHATAN	220.000,00	0,00
3	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	76.253.000,00	0,00
4	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	2.700.000,00	0,00
5	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	317.000.792,00	0,00
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.608.798.685,00	0,00
7	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.330.000,00	0,00
8	KECAMATAN KODI BANGEDO	400.000,00	0,00
9	PUSKESMAS BILLA CENGE	9.250.000,00	0,00
10	PUSKESMAS BONDO KODI	420.000,00	0,00
11	PUSKESMAS DELU DEPA	1.800.000,00	0,00
12	PUSKESMAS KAWANGO HARI	264.000,00	0,00
13	PUSKESMAS KORI	2.000.000,00	0,00
14	PUSKESMAS PALLA	542.000,00	0,00
15	PUSKESMAS PANENGGO EDE	5.295.000,00	0,00
16	PUSKESMAS RADAMATA	10.227.000,00	0,00
17	PUSKESMAS TANGGABA	7.123.750,00	0,00
18	PUSKESMAS TENA TEKE	8.673.960,00	0,00
19	PUSKESMAS WALLA NDIMU	3.000.000,00	0,00
20	PUSKESMAS WATUKAWULA	1.800.000,00	0,00
21	RSUD PRATAMA REDA BOLO	423.810.642,00	0,00
22	UPTD SPAM WEEMARINGI	900.000,00	0,00
TOTAL		**4.537.043.829,00**	**0,00**

5.4.2.1.2.2 Beban Jasa

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp109.607.936.898,47	**Rp104.663.019.062,00**

Beban Jasa pada tahun 2024 senilai Rp109.607.936.898,47 mengalami kenaikan senilai Rp4.944.917.836,47 atau 4,72% dibanding Beban Jasa tahun 2023. Rincian Realisasi Beban Jasa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4. 22 Beban Jasa Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	82.745.828.106,80	77.691.611.017,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	21.959.806.380,00	19.298.169.455,00
3	Beban Sewa Tanah	40.000.000,00	0,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	996.416.500,00	1.039.440.000,00

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	729.300.000,00	406.150.000,00
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	0,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.724.085.911,67	4.396.103.590,00
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	765.000.000,00
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	382.500.000,00	434.500.000,00
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	27.000.000,00	632.045.000,00
TOTAL		**109.607.936.898,47**	**104.663.019.062,00**

Rincian Beban Jasa setiap SKPD per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4. 23 Beban Jasa per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.466.343.559,00	1.656.586.609,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	439.494.126,00	226.241.188,00
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.641.057.270,00	3.675.099.234,00
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	214.436.852,00	250.714.681,00
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.195.293.389,00	1.171.436.663,00
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	2.025.058.767,00	1.994.721.878,00
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	113.612.959,00	462.454.755,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	420.826.333,00	300.002.838,00
9	DINAS KESEHATAN	48.743.702.574,47	41.410.407.887,00
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1.057.245.623,00	846.055.385,00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	164.664.480,00	164.836.288,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.274.887.340,00	788.694.803,00
13	DINAS PARIWISATA	365.396.462,00	332.970.420,00
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.378.546.050,00	4.503.681.966,00
15	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	129.775.283,00	0,00
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.078.141.482,00	1.831.960.147,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.990.208.879,00	2.214.607.332,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	238.825.453,00	331.981.414,00
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	20.724.864.037,67	26.580.843.080,00
19	DINAS PERHUBUNGAN	356.342.638,00	323.331.924,00
20	DINAS PERIKANAN	336.238.188,00	354.821.892,00
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	282.655.468,00	44.396.675,00
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	164.110.588,00	99.882.978,00
23	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	924.899.450,00	761.616.813,00
24	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	328.837.747,00	959.386.297,00

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
25	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	506.727.614,00	544.717.156,00
26	DINAS SOSIAL	882.887.334,00	636.988.544,00
27	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	188.530.304,00	13.186.574,00
28	INSPEKTORAT DAERAH	277.128.648,00	163.745.878,00
29	KECAMATAN KODI	251.905.480,00	233.189.595,00
30	KECAMATAN KODI BALAGHAR	229.753.648,00	221.235.500,00
31	KECAMATAN KODI BANGEDO	222.328.448,00	178.666.120,00
32	KECAMATAN KODI UTARA	234.616.900,00	229.558.186,00
33	KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA	1.052.606.506,00	1.060.890.285,00
34	KECAMATAN LOURA	287.950.536,00	216.548.600,00
35	KECAMATAN WEWEWA BARAT	331.440.016,00	265.045.188,00
36	KECAMATAN WEWEWA SELATAN	240.369.123,00	226.688.526,00
37	KECAMATAN WEWEWA TENGAH	224.202.152,00	193.542.806,00
38	KECAMATAN WEWEWA TIMUR	272.090.632,00	205.951.412,00
39	KECAMATAN WEWEWA UTARA	193.435.602,00	180.044.177,00
40	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.384.789.954,00	3.286.244.181,00
41	SEKRETARIAT DAERAH	3.407.560.241,33	3.849.235.699,00
42	SEKRETARIAT DPRD	1.364.148.762,00	1.670.807.488,00
TOTAL		**109.607.936.898,47**	**104.663.019.062,00**

5.4.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp6.213.618.520,00	**Rp5.047.187.292,00**

Beban Pemeliharaan pada tahun 2024 senilai Rp6.213.618.520,00 mengalami kenaikan Rp1.166.431.228,00 atau 23,11% dari beban pemeliharaan tahun 2023 tahun Rp5.047.187.292,00. Rincian beban pemeliharaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4. 24 Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.147.115.871,00	2.651.243.292,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	782.783.449,00	249.505.000,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.283.719.200,00	2.146.439.000,00
TOTAL		**6.213.618.520,00**	**5.047.187.292,00**

Rincian Beban Pemeliharaan setiap SKPD per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4. 25 Beban Pemeliharaan per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.320.000,00	27.179.500,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	880.000,00	3.080.000,00
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	131.691.900,00	92.582.372,00
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	29.529.000,00	31.496.000,00
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	317.910.475,00	329.692.000,00
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	17.994.000,00	14.888.000,00
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	18.581.000,00	16.931.000,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	50.201.465,00	27.445.000,00
9	DINAS KESEHATAN	398.366.139,00	767.174.310,00
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	5.500.000,00	17.298.000,00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	21.511.000,00	25.670.000,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	102.504.000,00	68.821.000,00
13	DINAS PARIWISATA	30.439.000,00	131.052.000,00
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.616.192.100,00	2.232.770.000,00
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.500.000,00	3.300.000,00
16	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	232.619.400,00	37.274.500,00
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	27.177.500,00	55.237.000,00
18	DINAS PERHUBUNGAN	97.050.500,00	18.730.000,00
19	DINAS PERIKANAN	86.010.605,00	25.345.000,00
20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	28.520.000,00	990.000,00
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6.000.000,00	14.400.000,00
22	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	25.189.000,00	62.466.900,00
23	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	20.246.000,00	20.346.000,00
24	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	93.814.000,00	105.945.000,00
25	DINAS SOSIAL	3.300.000,00	3.300.000,00
26	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	207.344.110,00	13.248.000,00
27	INSPEKTORAT DAERAH	14.280.000,00	12.488.500,00
28	KECAMATAN KODI	0,00	2.200.000,00
29	KECAMATAN KODI BALAGHAR	1.540.000,00	1.650.000,00
30	KECAMATAN KODI UTARA	16.404.000,00	16.404.000,00
31	KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA	19.314.000,00	26.418.000,00
32	KECAMATAN LOURA	33.075.000,00	0,00
33	KECAMATAN WEWEWA BARAT	17.086.000,00	18.736.000,00
34	KECAMATAN WEWEWA SELATAN	10.509.000,00	11.168.000,00
35	KECAMATAN WEWEWA TENGAH	8.470.000,00	50.885.000,00
36	KECAMATAN WEWEWA TIMUR	1.870.000,00	2.200.000,00

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
37	KECAMATAN WEWEWA UTARA	18.562.900,00	23.089.500,00
38	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	26.961.980,00	26.105.230,00
39	SEKRETARIAT DAERAH	441.869.446,00	699.941.480,00
40	SEKRETARIAT DPRD	28.285.000,00	9.240.000,00
TOTAL		**6.213.618.520,00**	**5.047.187.292,00**

5.4.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp48.352.622.644,00	**Rp42.250.369.635,00**

Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2024 senilai Rp48.352.622.644,00 mengalami peningkatan senilai Rp6.102.253.009,00 atau 14,44% dari tahun 2023 senilai Rp42.250.369.635,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas setiap SKPD per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4. 26 Beban Perjalanan Dinas per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.187.217.006,00	1.172.013.101,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	736.514.514,00	198.616.500,00
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.155.787.325,00	994.356.832,00
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	466.487.040,00	355.446.430,00
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	742.764.634,00	739.805.560,00
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	1.619.782.092,00	951.558.945,00
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	141.435.969,00	316.449.000,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	510.185.507,00	398.121.075,00
9	DINAS KESEHATAN	8.195.679.557,00	8.088.592.100,00
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	294.666.603,00	249.441.732,00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	327.956.992,00	308.357.459,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	649.566.105,00	333.160.307,00
13	DINAS PARIWISATA	263.520.727,00	315.180.959,00
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.172.490.417,00	2.522.890.100,00
15	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	266.788.292,00	13.140.000,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	806.825.400,00	414.401.000,00
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.276.338.060,00	5.178.500.050,00

No	Nama SKPD	2024 (Rp)	2023 (Rp)
18	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	538.381.000,00	771.088.218,00
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.929.055.997,00	2.353.391.044,00
20	DINAS PERHUBUNGAN	277.649.806,00	218.724.530,00
21	DINAS PERIKANAN	558.370.000,00	415.212.265,00
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	429.050.410,00	10.638.000,00
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	280.264.000,00	276.950.250,00
24	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2.518.683.527,00	2.375.617.000,00
25	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	539.299.775,00	483.617.046,00
26	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	773.954.091,00	669.265.600,00
27	DINAS SOSIAL	761.961.507,00	648.034.700,00
28	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	558.499.172,00	37.078.400,00
29	INSPEKTORAT DAERAH	739.501.971,00	673.871.946,00
30	KECAMATAN KODI	135.072.000,00	70.682.000,00
31	KECAMATAN KODI BALAGHAR	131.340.000,00	84.606.000,00
32	KECAMATAN KODI BANGEDO	267.046.978,00	145.350.000,00
33	KECAMATAN KODI UTARA	158.565.000,00	87.796.000,00
34	KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA	358.350.500,00	195.786.100,00
35	KECAMATAN LOURA	174.560.900,00	125.038.912,00
36	KECAMATAN WEWEWA BARAT	150.720.000,00	164.220.000,00
37	KECAMATAN WEWEWA SELATAN	186.898.480,00	121.996.000,00
38	KECAMATAN WEWEWA TENGAH	218.774.841,00	116.597.957,00
39	KECAMATAN WEWEWA TIMUR	257.501.000,00	171.442.000,00
40	KECAMATAN WEWEWA UTARA	247.034.420,00	51.372.096,00
41	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	974.794.463,00	656.745.139,00
42	SEKRETARIAT DAERAH	3.365.767.021,00	2.952.728.928,00
43	SEKRETARIAT DPRD	7.007.519.545,00	5.822.488.354,00
TOTAL		**48.352.622.644,00**	**42.250.369.635,00**

5.4.2.1.2.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp821.916.000,00	**Rp3.715.920.787,00**

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada tahun 2024 senilai Rp821.916.000,00 mengalami penurunan senilai Rp2.894.004.787,00 atau 77,88% dari tahun 2023 senilai Rp3.715.920.787,00. Rincian beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat setiap SKPD per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4. 27 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	103.500.000,00	144.375.000
2	Dinas Pariwisata	56.000.000,00	21.000.000
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	19.250.000,00	29.250.000
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	277.800.000,00	70.000.000
5	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5.700.000,00	26.100.000
6	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	4.000.000,00	1.627.000
7	Kecamatan Wewewa Tengah	9.000.000,00	0,00
8	Dinas Kesehatan	249.660.000,00	2.363.893.472
9	RSUD Pratama Reda Bolo	97.006.000,00	1.052.475.315
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	6.000.000,00
11	KECAMATAN WEWEWA BARAT	0,00	1.200.000,00
	TOTAL	**821.916.000,00**	**3.715.920.787,00**

5.4.2.1.2.6 Beban Barang dan Jasa BOS

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp39.801.218.226,00	**Rp 44.063.764.496,49**

Beban Barang dan Jasa BOS pada tahun 2024 senilai Rp39.801.218.226,00 mengalami penurunan senilai Rp4.262.546.270,49 atau 9,67% dari tahun 2023 senilai Rp44.063.764.496,49. Rincian Beban Barang dan Jasa BOS setiap SKPD per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4. 28 Beban Barang dan Jasa BOS per SKPD Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	39.801.218.226,00	44.063.764.496,49
	TOTAL	**39.801.218.226,00**	**44.063.764.496,49**

5.4.2.1.2.7 Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp47.175.690,00	**Rp0,00**

Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas pada tahun 2024 senilai Rp47.175.690,00 mengalami kenaikan senilai Rp47.175.690,00

atau 100% dari tahun 2023 senilai Rp0,00.

5.4.2.1.3 Beban Subsidi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp233.203.450,00	**Rp117.966.000,00**

Realisasi Beban Subsidi untuk tahun 2024 senilai Rp233.203.450,00 mengalami peningkatan senilai Rp115.237.450,00 atau 97,69% dibanding tahun 2023. Beban Subsidi tersebut ialah beban subsidi bahan pokok makanan yang dijual kepada masyarakat dibawah harga pasar. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan atas kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian yang diselenggarakan oleh Bagian perekonomian dan sumber daya alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

5.4.2.1.4 Beban Hibah

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp73.004.663.605,00	**Rp69.938.681.550,00**

Beban Hibah untuk tahun 2024 senilai Rp73.004.663.605,00 mengalami peningkatan senilai Rp3.065.982.055,00 atau 4,38% dari Beban Hibah tahun 2023 senilai Rp69.938.681.550,00. Rincian Beban Hibah tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4. 29 Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	21.968.092.480,00	16.588.017.096,00
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.320.513.624,00	12.137.446.926,00
3	Beban Hibah Dana BOS	38.944.308.849,00	40.132.645.260,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.077.990.052,00	1.080.572.268,00
5	Beban Hibah Dana BOSP	6.693.758.600,00	0,00
TOTAL		**73.004.663.605,00**	**69.938.681.550,00**

Terdapat perbedaan nilai antara Belanja Hibah dan Beban Hibah, dimana Belanja Hibah lebih besar Rp1.042.261.924,00 dibanding Beban Hibah. Hal ini disebabkan oleh adanya sisa hibah PILKADA oleh KPU senilai Rp22.362.511,00 dan BAWASLU senilai Rp1.025.106.409,00 tahun sebelumnya yang baru disetor pada tahun 2025.

Selain itu, pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya juga memiliki utang Bantuan kepada Partai Politik senilai Rp5.206.996,00, Hal ini disebabkan perubahan perolehan suara dalam

Pemilihan Legislatif tahun 2024 dan pelantikan anggota DPRD dilaksanakan pada bulan Oktober 2024, sedangkan Perubahan APBD tahun 2024 dilakukan dan ditetapkan pada Bulan Agustus 2024.

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp17.876.165.000,000	**Rp14.838.490.000,00**

Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2024 senilai Rp17.876.165.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp3.037.675.000,00 atau 20,47% dibanding tahun 2023 senilai Rp14.838.490.000,00. Rincian Beban Bantuan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4. 30 Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.375.000.000,00	3.386.500.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.270.000.000,00	322.500.000,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	14.231.165.000,00	11.129.490.000,00
TOTAL		**17.876.165.000,00**	**14.838.490.000,00**

5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp1.482.451.431,21	**Rp972.808.682,14**

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 senilai Rp1.482.451.431,21 mengalami kenaikan senilai Rp509.642.749,07 atau 52,39% dibanding tahun 2023 senilai Rp972.808.682,14. Rincian Beban Penyisihan Piutang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4. 31 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.468.050.481,56	954.268.682,99
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	0,00	18.540.000,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	3.093.651,03	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	11.307.298,62	0,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	(0,85)
TOTAL		**1.482.451.431,21**	**972.808.682,14**

5.4.2.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp124.585.207.612,73	**Rp108.664.704.589,56**

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan penyusutan dan amortisasi Tahun 2024 senilai Rp124.585.207.612,73 yang terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Amortisasi Aset Tidak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 mengalami kenaikan senilai Rp15.920.503.023,17 atau 14,65% dibanding tahun 2023 senilai Rp108.664.704.589,56. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4. 32 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
A. Beban Penyusutan Peralatan Mesin		**30.125.723.695,00**	**28.406.734.394,34**
1	Beban Penyusutan Alat Besar	255.625.695,00	262.168.004,00
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	11.909.718.538,00	6.741.664.500,00
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	143.936.018,00	142.500.682,00
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	700.295.209,00	683.033.861,00
5	Beban Penyusutan Alat Kantor	5.034.051.361,00	4.218.494.690,00
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	152.109.237,00	369.837.866,00
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	7.844.128.750,00	5.675.400.736,34
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	911.175.488,00	519.804.970,00
9	Beban Penyusutan	39.133.334,00	38.016.666,00
10	Beban Penyusutan Komputer Unit	2.722.443.461,00	9.633.001.416
11	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	334.221.659,00	9.200.000,00
12	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	51.131.976,00	43.391.202,00
13	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	25.878.386,00	25.633.386,00
14	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	1.874.583,00	44.586.415,00
B. Beban Penyusutan Gedung Bangunan		**13.319.244.115,95**	**11.900.468.251,20**
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	13.208.593.911,95	11.829.305.730,20
2	Beban Penyusutan Monumen	399.983,00	467.496,00
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	14.025.205,00	22.616.073,00
4	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	96.225.016,00	48.078.952,00
C. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		**81.083.951.801,78**	**68.250.425.944,02**

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	73.775.033.675,18	66.914.604.897,02
2	Beban Penyusutan Bangunan Air	4.444.290.368,35	747.893.875,00
3	Beban Penyusutan Instalasi	598.753.453,00	550.402.600,00
4	Beban Penyusutan Jaringan	2.265.874.305,25	37.524.572,00
D. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		**56.288.000,00**	**107.076.000,00**
1	Beban Amortisasi Tidak Berwujud	56.288.000,00	107.076.000,00
TOTAL		**124.585.207.612,73**	**108.664.704.589,56**

5.4.2.3 Beban Transfer

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp60.580.978.436,00	**Rp63.596.604.408,00**

Beban Transfer untuk Tahun 2024 senilai Rp60.580.978.436,00 mengalami penurunan senilai Rp3.015.625.972,00 atau 4,74% dibanding tahun 2023 senilai Rp63.596.604.408,00. Rincian Beban Transfer dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4. 33 Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.781.587.389,00	1.626.899.958,00
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	985.219.084,00	0,00
3.	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	0,00	61.969.704.450,00
4.	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	57.814.171.963,00	0,00
TOTAL		**60.580.978.436,00**	**63.596.604.408,00**

Rincian atas Beban Transfer dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa senilai Rp1.781.587.389,00 di tahun 2024 jika dibanding dengan tahun 2023 senilai Rp1.626.899.958,00, mengalami kenaikan senilai Rp154.687.431,00 atau 9,51%.

2) Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa senilai Rp985.219.084,00 di tahun 2024 dan tidak terdapat beban di tahun 2023.

3) Tidak terdapat Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa di tahun 2024 tetapi terdapat beban di tahun 2023 senilai Rp61.969.704.450,00, mengalami penurunan senilai Rp61.969.704.450,00 atau 100,00%.

4) Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa senilai Rp57.814.171.963,00 di tahun 2024 dan tidak terdapat beban di tahun 2023.

Terdapat perbedaan nilai antara Belanja Transfer dan Beban Transfer, dimana Belanja Transfer lebih besar Rp184.608.937.000,00 dibanding Beban Transfer. Selisih tersebut berupa dana desa yang sesuai dengan ketentuan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran tetapi tidak disajikan dalam Laporan Operasional.

5.4.3 Surplus/(Defisit) dari Operasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp70.483.271.970,75	**Rp126.096.502.811,11**

Surplus dari Kegiatan Operasi Tahun 2024 senilai Rp70.483.271.970,75 mengalami penurunan senilai Rp55.613.230.840,36 atau 44,10% dari Surplus dari Kegiatan Operasi tahun 2023 senilai Rp126.096.502.811,11.

5.4.4 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp2.193.566.693,41)	**(Rp450.167.219,43)**

Surplus Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp639.772.319,20 mengalami kenaikan 100% dibanding tahun sebelumnya, sedangkan Defisit Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp2.833.339.012,61 mengalami kenaikan sebesar Rp2.383.171.793,18 atau 529,40% dari Defisit Kegiatan Non Operasional tahun 2023 senilai Rp450.167.219,43.

5.4.5 Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp68.289.705.277,34	**Rp125.646.335.591,68**

Surplus dari Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2024 senilai Rp68.289.705.277,34 mengalami penurunan senilai Rp57.356.630.314,34 atau 45,65% dari Surplus Sebelum Pos Luar Biasa tahun 2023 senilai Rp125.646.335.591,68.

5.4.6 Surplus/Defisit-LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp68.289.705.277,34	**Rp125.646.335.591,68**

Surpus/Defisit-LO Tahun 2024 senilai Rp68.289.705.277,34 mengalami penurunan senilai Rp57.356.630.314,34 atau 45,65% dari Surplus/Defisit-LO

tahun 2023 senilai Rp125.646.335.591,68.

5.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2024 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran.

5.5.1 Aktivitas Operasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp192.031.037.052,32	**Rp249.143.740.491,99**

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 senilai Rp192.031.037.052,32 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas dari Aktivitas Operasi dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.5. 1 Arus Kas Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	Arus Kas Masuk	1.178.974.040.252,32	1.172.954.709.612,99	6.019.330.639,33	0,51
2	Arus Kas Keluar	986.943.003.200,00	923.810.969.121,00	63.132.034.079,00	6,83
	Arus Kas Bersih	**192.031.037.052,32**	**249.143.740.491,99**	**(57.112.703.439,67)**	**(22,92)**

5.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp1.178.974.040.252,32	**Rp1.172.954.709.612,99**

Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penerimaan Transfer (Dana Perimbangan) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi tahun 2024 senilai Rp1.178.974.040.252,32 atau mengalami peningkatan senilai Rp6.019.330.639,33 atau 0,51% dibanding tahun 2023 senilai Rp1.172.954.709.612,99. Hal ini disebabkan karena peningkatan Dana alokasi umum pada TA 2024. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.5. 2 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	22.961.001.653,00	15.230.415.543,51	7.730.586.109,49	50,76
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	11.644.335.136,00	8.684.969.797,00	2.959.365.339,00	34,07
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	3.944.963.310,00	7.742.306.863,00	(3.797.343.553,00)	(49,05)
4	Lain-lain PAD yang Sah - LRA	4.664.967.938,32	3.373.161.313,48	1.291.806.624,84	38,30
5	Dana Bagi Hasil	4.671.526.524,00	6.046.427.914,00	(1.374.901.390,00)	(22,74)
6	Dana Alokasi Umum	574.445.179.602,00	502.959.267.143,00	71.485.912.459,00	14,21
7	Dana Alokasi Khusus	315.656.772.647,00	372.546.795.125,00	(56.890.022.478,00)	(15,27)
8	Dana Insentif Daerah	0,00	19.751.646.000,00	(19.751.646.000,00)	(100,00)
9	Dana Desa dari Pemerintah Pusat	184.608.937.000,00	187.540.421.000,00	(2.931.484.000,00)	(1,56)
10	Penndapatn Insentif Fiskal-LRA	7.109.813.000,00	0,00	7.109.813.000,00	100,00
11	Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi	31.607.116.723,00	28.762.932.363,00	2.844.184.360,00	9,89
12	Pendapatan Lainnya	17.659.426.719,00	20.316.366.551,00	(2.656.939.832,00)	(13,08)
	JUMLAH	**1.178.974.040.252,32**	**1.172.954.709.612,99**	**6.019.330.639,33**	**0,51**

5.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp986.943.003.200,00	**Rp923.810.969.121,00**

Arus kas keluar dari aktivitas operasi tahun 2024 senilai Rp986.943.003.200,00 mengalami kenaikan senilai Rp63.132.034.079,00 atau 6,83% dibanding tahun 2023 senilai Rp923.810.969.121,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.5. 3 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	Belanja Pegawai	330.331.141.451,00	286.564.004.981,00	43.767.136.470,00	15,27
2	Belanja Barang dan Jasa	319.265.652.334,00	303.857.301.344,00	15.408.350.990,00	5,07
3	Belanja Subsidi	233.203.450,00	117.966.000,00	115.237.450,00	97,69
4	Belanja Hibah	74.046.925.529,00	67.296.181.388,00	6.750.744.141,00	10,03
5	Belanja Bantuan Sosial	17.876.165.000,00	14.838.490.000,00	3.037.675.000,00	20,47

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	%
6	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	2.766.806.473,00	1.626.899.958,00	1.139.906.515,00	70,07
7	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	242.423.108.963,00	249.510.125.450,00	(7.087.016.487,00)	(2,84)
	JUMLAH	**986.943.003.200,00**	**923.810.969.121,00**	**63.132.034.079,00**	**6,83**

5.5.2 Aktivitas Investasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp172.196.944.033,00)	**(Rp229.197.922.321,00)**

Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2024 defisit sebesar (Rp172.196.944.033,00). Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas investasi berupa.

Tabel 5.5. 4 Arus Kas Dari Investasi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	Arus Kas Masuk	435.993.600,00	273.316.171,00	162.677.429,00	59,52
2	Arus Kas Keluar	172.632.937.633,00	229.471.238.492,00	(56.838.300.859,00)	(24,77)
	Arus Kas Bersih	**(172.196.944.033,00)**	**(229.197.922.321,00)**	**57.000.978.288,00**	**(24,87)**

5.5.2.1 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp435.993.600,00	**Rp273.316.171,00**

Komponen Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi terdiri dari aktivitas penjualan aset tetap pada tahun berjalan. Pada TA 2024 terdapat penjualan aset tetap sehingga realisasi Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi senilai Rp435.993.600,00. Rincian penjualan aset tetap tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.5. 5 Rincian Aset Tetap yang Dijual pada tahun 2024

No	Uraian	Nilai Penjualan (Rp)
1	Kendaraan Roda Empat	435.993.600,00
	JUMLAH	**435.993.600,00**

5.5.2.2 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp 172.632.937.633,00	**Rp229.471.238.492,00**

Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi pada TA 2024 senilai Rp172.632.937.633,00 mengalami penurunan senilai Rp56.838.300.859,00 atau 24,77% dibanding TA 2023 senilai Rp229.471.238.492,00. Rincian Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi sebagai berikut.

Tabel 5.5. 6 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatandan Mesin	27.119.273.098,00	32.506.485.331,00	(5.387.212.233,00)	(16,57)
3	Belanja Gedung dan Bangunan	35.658.539.759,00	73.256.412.346,00	(37.597.872.587,00)	(51,32)
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	94.810.066.973,00	118.375.365.601,00	(23.565.298.628,00)	(19,91)
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.045.057.803,00	3.252.975.214,00	(207.917.411,00)	(6,39)
6	Belanja Aset Lainnya	0,00	80.000.000,00	(80.000.000,00)	(100,00)
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	12.000.000.000,00	2.000.000.000,00	10.000.000.000,00	500,00
	JUMLAH	**172.632.937.633,00**	**229.471.238.492,00**	**(56.838.300.859,00)**	**(24,77)**

5.5.3 Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp0,00	**Rp0,00**

Tidak terdapat arus kas keluar dari aktivitas pendanaan pada tahun 2024.

5.5.4 Aktivitas Transitoris

31 Desember 2024	31 Desember 2023
(Rp137.510.619,13)	**(Rp77.040.315,51)**

Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2024 sebesar (Rp137.510.619,13) mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Arus kas masuk dari aktivitas transitoris terdiri dari penerimaan PFK senilai Rp34.702.330.583,05, sedangkan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris adalah pengeluaran PFK senilai Rp34.839.841.202,18, sehingga Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

sebesar (Rp137.510.619,13)

Tabel 5.5. 7 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	34.702.330.583,05	38.348.824.851,84	(3.646.494.268,79)	(9,51)
2	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	34.839.841.202,18	38.425.865.167,35	(3.586.023.965,17)	(9,33)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**(137.510.619,13)**	**(77.040.315,51)**	**(60.470.303,62)**	**(78,49)**

5.5.5 Saldo Akhir Kas

Tahun 2024	Tahun 2023
Rp74.748.429.108,47	**Rp54.909.233.838,10**

Dari semua aktivitas masuk dan keluar Kas selama satu periode diperoleh saldo akhir Kas senilai Rp74.748.429.108,47 dengan rincian saldo akhir arus kas adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5. 8 Rincian Saldo Akhir Kas

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	192.031.037.052,32
2	Arus Kas Bersih Dari Akttivitas Investasi	(172.196.944.033,00)
3	Arus Kas Bersih Dari Akttivitas Pendanaan	0,00
4	Arus Kas Bersih Transitoris	(137.510.619,13)
5	**Kenaikan Kas (1+2+3+4)**	**19.696.582.400,19**
6	Saldo Awal Kas	54.909.233.838,10
7	Koreksi SiLPA	142.612.870,18
8	**Saldo Awal Kas Setelah Koreksi (7+8)**	**55.051.846.708,28**
9	**Saldo Akhir Kas (5+8)**	**74.748.429.108,47**

Saldo akhir kas sebesar Rp74.748.429.108,47 terdiri dari nilai kas di Neraca yaitu.

- Kas di Kas Daerah senilai Rp70.397.469.118,98;
- Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp65.806.218,00;
- Kas di bendahara Pengeluaran senilai Rp29.655.490,00;
- Kas di Bendahara FKTP senilai Rp376.013.475,14;
- Kas Lainnya senilai Rp39.329.266,05;
- Kas di Bendahara BOSP senilai Rp785.956.588,30; dan
- Kas Dana BOK Puskesmas senilai Rp3.054.198.952,00.

5.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan

Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.1 Ekuitas Awal

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp 2.005.336.863.854,21	**Rp1.879.783.177.163,23**

Jumlah ekuitas awal senilai Rp2.005.336.863.854,21 mengalami penurunan senilai Rp125.553.686.690,98 atau 6,68% atas saldo pada tahun 2023 senilai Rp1.879.783.177.163,23.

5.6.2 Surplus/Defisit LO

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp68.289.705.277,34	**Rp125.646.335.591,68**

Penambahan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp68.289.705.277,34, mengalami penurunan senilai Rp57.356.630.314,34 atau 45,65% dari Surplus-LO Tahun 2023 senilai Rp125.646.335.591,68.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp25.168.540.390,01	**(Rp92.648.900,70)**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp25.168.540.390,01 mengalami peningkatan senilai Rp25.261.189.290,71 atau 27.265,50% atas saldo pada tahun 2023 sebesar (Rp92.648.900,70). Saldo pada tahun 2024, terdiri atas sebagai berikut.

Tabel 5.6. 1 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	**25.168.540.390,01**	**(92.648.900,70)**
KOREKSI EKUITAS - ASET LANCAR	**(11.056.920,00)**	**(1,07)**
Dampak Perubahan Kas Bendahara Pengeluaran	(10.886.920,00)	0,00
Dampak Perubahan Kas BOS	0,00	(1,14)
Dampak Perubahan Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,07
Dampak Perubahan Kas Dana BOK Puskesmas	(170.000,00)	0,00
KOREKSI EKUITAS - INVESTASI	0,00	**(1.323.927.074,00)**
Dampak Perubahan Investasi Jangka Panjang - Penyertaan Modal	0,00	(1.323.927.074,00)

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
KOREKSI EKUITAS - ASET TETAP	**24.960.519.493,71**	**2.760.714.830,37**
Peralatan dan Mesin	332.116.000,00	210.316.873,00
Gedung dan Bangunan	20.343.468.303,00	2.748.080.000,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.359.022.367,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.460.750,00)	(12.435.309,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(33.905.780,51)	(185.246.733,63)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(34.720.645,78)	0,00
KOREKSI EKUITAS - ASET LAINNYA	**65.408.026,12**	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	(6.829.974,55)	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	72.238.000,67	0,00
KOREKSI EKUITAS - KEWAJIBAN	**153.669.790,18**	**(1.529.436.656,00)**
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	15.224.718,00	0,00
Dampak Perubahan Utang Perhitungan Fihak Ketiga	138.445.072,18	0,00
Dampak Perubahan Utang Belanja	0,00	(1.529.436.656,00)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa koreksi selisih koreksi ekuitas lainnya yaitu:

1. Dampak Perubahan Kas di Bendahara Pengeluaran

   Koreksi pembukuan tahun sebelumnya berupa koreksi lebih pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran pada beberapa SKPD, yaitu:

   - Bagian Perekonomian dan SDA senilai Rp2.043.300,00. Merupakan belanja langsung tahun 2023 yang baru dibayarkan oleh bendahara pengeluaran pada tahun 2024.
   - Badan Pendapatan Daerah senilai Rp6.800.000,00. Merupakan belanja langsung tahun 2023 yang baru dibayarkan oleh bendahara pengeluaran pada tahun 2024.
   - Dinas Pariwisata senilai Rp1.756.756,00. Merupakan koreksi pajak yang telah disetor atas belanja langsung yang tidak jadi dibayarkan pada tahun 2022.
   - Kecamatan Kota Tambolaka senilai Rp286.864,00. Merupakan koreksi pengembalian belanja langsung yang ada di kas bendahara pengeluaran dan sudah disetorkan ke Kas Daerah tahun 2023.

2. Dampak Perubahan Kas Dana BOK Puskesmas

   Koreksi pembukuan tahun sebelumnya senilai Rp170.000,00 merupakan koreksi kurang Kas Dana BOK Puskesmas Werilolo yang lebih dicatat pada tahun 2023.

3. Koreksi Nilai Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

   Koreksi pembukuan tahun sebelumnya berupa koreksi kurang catat aset tetap peralatan dan mesin bantuan dari Kementerian Kesehatan ke Puskesmas Kori

senilai Rp332.116.000 yang seharusnya dicatat pada tahun 2023, yang terdiri dari:

- 1 (satu) unit Mesin TCM senilai Rp317.750.000,00;
- 1 (satu) unit Printer Ink Tank senilai Rp1.466.000,00 ;dan
- 1 (satu) unit UPS Earton senilai Rp12.000.000,00,

4. Koreksi Nilai Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

   Koreksi pembukuan tahun sebelumnya berupa koreksi kurang catat aset tetap gedung dan bangunan berupa penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp20.343.468.303,00 kepada Pemerintah Sumba Barat Daya tahun 2023 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor 142.1 / BA / DC / 2023 dan BU.600 / 611.a / 53.18 / SBD / XII / 2023 berupa gedung Sekolah Dasar yang seharusnya dicatat pada tahun 2023.

5. Koreksi Nilai Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan

   Koreksi pembukuan tahun sebelumnya berupa koreksi kurang catat aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan berupa penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp4.359.022.367,00 kepada Pemerintah Sumba Barat Daya tahun 2023 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor 142.1 / BA / DC / 2023 dan BU.600 / 611.a / 53.18 / SBD / XII / 2023 yakni pembangunan sarana kebersihan (MCK) yang seharusnya dicatat pada tahun 2023.

6. Koreksi Nilai Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

   Koreksi pembukuan tahun sebelumnya berupa koreksi kurang catat akumulasi penyusutan peralatan dan mesin atas peralatan dan mesin bantuan dari Kementerian Kesehatan ke Puskesmas Kori yang seharusnya dicatat pada tahun 2023.

7. Koreksi Nilai Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

   Koreksi pembukuan tahun sebelumnya berupa koreksi kurang catat akumulasi penyusutan gedung dan bangunan atas hibah gedung dan bangunan dari Pemerintah Pusat berupa gedung Sekolah Dasar yang seharusnya dicatat pada tahun 2023.

8. Koreksi Nilai Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

   Koreksi pembukuan tahun sebelumnya berupa koreksi kurang catat akumulasi penyusutan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan atas hibah jaringan berupa pembangunan sarana kebersihan (MCK) yang seharusnya dicatat pada tahun 2023.

9. Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Bendahara

   Koreksi pembukuan tahun sebelumnya senilai Rp6.829.974,55 merupakan koreksi kurang atas lebih catat Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Bendahara yang telah dilunasi pada tahun sebelumnya.

10. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Koreksi atas pembukuan tahun sebelumnya senilai Rp72.238.000,67 merupakan koreksi kurang atas lebih catat akumulasi aset tidak beruwujud-software pada Badan Pendapatan Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun sebelumnya.

11. Dampak Perubahan Utang Perhitungan Fihak Ketiga

    Koreksi untuk mencatat penghapusan nilai Utang Perhitungan Fihak Ketiga berupa Utang Iuran Wajib Pegawai senilai Rp15.224.718,00 dan Utang Iuran Jaminan Kesehatan tahun 2024 senilai Rp138.445.072,18 berdasarkan Berita Acara Rekon Bersama PT TASPEN dan BPJS Kesehatan.

5.6.4 Ekuitas Akhir

31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rp2.098.795.109.521,56	**Rp2.005.336.863.854,21**

Nilai ekuitas akhir sebesar tahun 2024 senilai Rp2.098.795.109.521,56 mengalami kenaikan senilai Rp93.458.245.667,35 atau 4,66% dibandingkan ekuitas tahun 2023 senilai Rp2.005.336.863.854,21.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Informasi Tambahan

Menyajikan informasi tambahan yang dipandang perlu diketahui oleh *stakeholders* terutama untuk mencegah kesalahan intepretasi atas laporan keuangan.

6.2 Pengungkapan Lainnya

Kabupaten Sumba Barat Daya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Sumba Barat Daya terletak pada 9°18' – 10°20' Lintang Selatan dan 118°55' – 120°23' Bujur Timur. Kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut.

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sumba;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumba Barat;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

6.3 Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024;
c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024;
d. Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024; dan
e. Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024.

6.4 Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati, adalah:

Bupati	:	Ratu Ngadu Bonnu Wulla, ST
Wakil Bupati	:	Dominikus Alfawan Rangga Kaka, SP

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut.

a. Sekretariat Kabupaten Sumba Barat Daya terdiri dari:

1) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
2) Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan Sekretariat DPRD Tipe B; dan
3) Inspektorat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan Inspektorat Tipe A.

b. Dinas Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, terdiri dari:

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
2) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
5) Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6) Dinas Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7) Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
8) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
9) Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatatan Sipil;
10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan Persandian;
12) Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
13) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;

15) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;

16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;

17) Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;

18) Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;

19) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, sub urusan Tanaman Pangan, sub urusan Holtikultuta dan sub urusan Perkebunan;

20) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

21) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan sub urusan Kebakaran.

22) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi; dan

23) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.

c. Badan Daerah terdiri dari:

1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;

2) Badan Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Pendapatan;

3) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Keuangan; dan

4) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe C menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Selain perangkat daerah, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah yang terdiri dari:

1) Kecamatan Kodi Balaghar dengan Tipe A;

2) Kecamatan Kodi Bangedo dengan Tipe A;

3) Kecamatan Kodi Utara dengan Tipe A;

4) Kecamatan Kodi dengan Tipe A;
5) Kecamatan Wewewa Timur dengan Tipe A;
6) Kecamatan Wewewa Utara dengan Tipe A;
7) Kecamatan Wewewa Tengah dengan Tipe A;
8) Kecamatan Wewewa Selatan dengan Tipe A;
9) Kecamatan Wewewa Barat dengan Tipe A;
10) Kecamatan Kota Tambolaka dengan Tipe A; dan
11) Kecamatan Loura dengan Tipe A.

6.5 Kepegawaian

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki pegawai yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai dengan perjanjian kerja sejumlah 4.398 orang. Pemetaan jumlah pegawai baik dalam jabatan baik struktural maupun jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.5. 1 Pemetaan jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural dan jabatan fungsional tahun 2025

GOLONGAN	ESELON					TENAGA FUNGSIONAL			STAFF	JUMLAH
	I	II	III	IV	V	PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
Golongan IV/E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/C	0	24	0	0	0	10	1	0	2	37
Golongan IV/B	0	7	41	0	0	114	4	1	1	168
Golongan IV/A	0	0	74	0	0	85	8	4	4	175
SUB JUMLAH	**0**	**31**	**115**	**0**	**0**	**209**	**13**	**5**	**7**	**380**
Golongan III/D	0	0	51	217	0	283	108	15	15	689
Golongan III/C	0	0	2	120	0	232	124	13	29	520
Golongan III/B	0	0	0	38	0	338	67	53	182	678
Golongan III/A	0	0	0	5	0	64	107	1243	162	1581
SUB JUMLAH	**0**	**0**	**53**	**380**	**0**	**917**	**406**	**1324**	**388**	**3468**
Golongan II/D	0	0	0	0	0	32	64	178	65	339
Golongan II/C	0	0	0	0	0	32	56	9	48	145
Golongan II/B	0	0	0	0	0	13	5	4	16	38
Golongan II/A	0	0	0	0	0	6	3	0	8	17

GOLONGAN	ESELON					TENAGA FUNGSIONAL			STAFF	JUMLAH
	I	II	III	IV	V	PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
SUB JUMLAH	0	0	0	0	0	83	128	191	137	539
Golongan I/D	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Golongan I/C	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Golongan I/B	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Golongan I/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUB JUMLAH	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**11**
TOTAL	**0**	**31**	**168**	**380**	**0**	**1209**	**547**	**1520**	**543**	**4398**

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 secara keseluruhan.

Bupati Sumba Barat Daya,

RATU NGADU BONNU WULLA, ST

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

RINCIAN DANA DESA PER DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	PAGU DD	REALISASI DD
1	Ana Engge	Kodi	898.870.000,00	898.870.000,00
2	Ana Goka	Kodi Bangedo	1.021.140.000,00	1.021.140.000,00
3	Ana Kaka	Kodi	797.857.000,00	797.857.000,00
4	Ana Lewe	Kodi Bangedo	1.034.638.000,00	1.034.638.000,00
5	Ate Dalo	Kodi	1.126.327.000,00	1.126.327.000,00
6	Bila Cenge	Kodi Utara	1.370.972.000,00	1.370.972.000,00
7	Bodo Ponda	Wewewa Utara	1.049.426.000,00	1.049.426.000,00
8	Bolora	Wewewa Tengah	1.063.624.000,00	1.063.624.000,00
9	Bondo Balla	Kodi Bangedo	1.165.295.000,00	1.165.295.000,00
10	Bondo Bela	Wewewa Selatan	934.451.000,00	934.451.000,00
11	Bondo Boghila	Loura	879.341.000,00	879.341.000,00
12	Bondo Delo	Wewewa Tengah	944.875.000,00	944.875.000,00
13	Bondo Kodi	Kodi	1.026.982.000,00	1.026.982.000,00
14	Bondo Ukka	Wewewa Selatan	964.483.000,00	964.483.000,00
15	Bukambero	Kodi Utara	1.494.826.000,00	1.494.826.000,00
16	Buru Deilo	Wewewa Selatan	1.185.891.000,00	1.185.891.000,00
17	Buru Kaghu	Wewewa Selatan	1.059.984.000,00	1.059.984.000,00
18	Dangga Mangu	Wewewa Timur	1.142.429.000,00	1.142.429.000,00
19	Dede Pada	Wewewa Timur	807.033.000,00	807.033.000,00
20	Delo	Wewewa Selatan	1.054.484.000,00	1.054.484.000,00
21	Delu Depa	Kodi Bangedo	940.154.000,00	940.154.000,00
22	Denduka	Wewewa Selatan	1.074.517.000,00	1.074.517.000,00
23	Dikira	Wewewa Timur	981.966.000,00	981.966.000,00
24	Dinjo	Kodi Bangedo	1.043.483.000,00	1.043.483.000,00
25	Djela Manu	Wewewa Utara	1.090.857.000,00	1.090.857.000,00
26	Eka Pata	Wewewa Tengah	1.054.806.000,00	1.054.806.000,00
27	Gollu Sapi	Wewewa Tengah	956.429.000,00	956.429.000,00
28	Hameli Ate	Kodi Utara	1.511.664.000,00	1.511.664.000,00
29	Hamonggo Lele	Kodi	1.068.160.000,00	1.068.160.000,00
30	Hoha Wungo	Kodi Utara	1.260.769.000,00	1.260.769.000,00
31	Homba Karipit	Kodi Utara	1.038.474.000,00	1.038.474.000,00
32	Homba Pare	Kodi Utara	1.369.613.000,00	1.369.613.000,00
33	Homba Rande	Kodi	1.123.034.000,00	1.123.034.000,00
34	Homba Rica	Kodi	919.612.000,00	919.612.000,00
35	Kabali Dana	Wewewa Barat	871.896.000,00	871.896.000,00
36	Kadaghu Tana	Kodi Utara	1.517.636.000,00	1.517.636.000,00
37	Kadi Pada	Kota Tambolaka	998.635.000,00	998.635.000,00
38	Kadi Roma	Wewewa Tengah	747.558.000,00	747.558.000,00
39	Kadi Wano	Wewewa Timur	807.485.000,00	807.485.000,00
40	Kadi Wone	Wewewa Timur	983.261.000,00	983.261.000,00

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	PAGU DD	REALISASI DD
41	Kadoki Horo	Kodi	1.002.456.000,00	1.002.456.000,00
42	Kadu Eta	Kodi Utara	1.297.172.000,00	1.297.172.000,00
43	Kahale	Kodi Balaghar	1.167.435.000,00	1.167.435.000,00
44	Kalaki Kambe	Wewewa Barat	1.124.483.000,00	1.124.483.000,00
45	Kalembu Kaha	Kota Tambolaka	1.364.854.000,00	1.364.854.000,00
46	Kalembu Kanaika	Wewewa Barat	860.055.000,00	860.055.000,00
47	Kalembu Ndara Mane	Wewewa Timur	742.136.000,00	742.136.000,00
48	Kalembu Weri	Wewewa Barat	1.015.304.000,00	1.015.304.000,00
49	Kalena Rongo	Kodi Utara	1.494.450.000,00	1.494.450.000,00
50	Kalena Wano	Kota Tambolaka	754.337.000,00	754.337.000,00
51	Kalimbu Tillu	Wewewa Barat	989.910.000,00	989.910.000,00
52	Kalingara	Wewewa Tengah	1.069.991.000,00	1.069.991.000,00
53	Kanelu	Wewewa Tengah	969.129.000,00	969.129.000,00
54	Kapaka Madeta	Kodi	1.134.815.000,00	1.134.815.000,00
55	Karang Indah	Kodi Bangedo	1.155.501.000,00	1.155.501.000,00
56	Karuni	Loura	1.127.893.000,00	1.127.893.000,00
57	Kawango Hari	Kodi	1.114.291.000,00	1.114.291.000,00
58	Kendu Wela	Kodi Utara	1.641.426.000,00	1.641.426.000,00
59	Kiku Booko	Wewewa Tengah	978.873.000,00	978.873.000,00
60	Koki	Kodi	1.157.114.000,00	1.157.114.000,00
61	Kori	Kodi Utara	1.503.543.000,00	1.503.543.000,00
62	Laga Lete	Wewewa Barat	843.733.000,00	843.733.000,00
63	Lele Maya	Wewewa Timur	833.470.000,00	833.470.000,00
64	Lete Kamouna	Wewewa Timur	861.677.000,00	861.677.000,00
65	Lete Konda	Loura	1.012.159.000,00	1.012.159.000,00
66	Lete Konda Selatan	Loura	740.158.000,00	740.158.000,00
67	Lete Loko	Kodi Bangedo	1.134.571.000,00	1.134.571.000,00
68	Lete Wungana	Wewewa Tengah	992.434.000,00	992.434.000,00
69	Limbu Kembe	Kodi Utara	1.199.960.000,00	1.199.960.000,00
70	Limbu Watu	Wewewa Tengah	758.495.000,00	758.495.000,00
71	Loko Kalada	Loura	1.087.870.000,00	1.087.870.000,00
72	Loko Tali	Kodi Balaghar	1.100.104.000,00	1.100.104.000,00
73	Lolo Ole	Wewewa Barat	819.703.000,00	819.703.000,00
74	Lombu	Wewewa Tengah	1.110.536.000,00	1.110.536.000,00
75	Lua Koba	Wewewa Barat	1.144.169.000,00	1.144.169.000,00
76	Magho Linyo	Kodi Utara	1.380.020.000,00	1.380.020.000,00
77	Mainda Ole	Wewewa Timur	853.589.000,00	853.589.000,00
78	Mali Mada	Wewewa Utara	945.820.000,00	945.820.000,00
79	Mali Iha	Kodi	1.112.555.000,00	1.112.555.000,00
80	Maliti Bondo Ate	Kodi Bangedo	1.002.604.000,00	1.002.604.000,00
81	Maliti Dari	Wewewa Timur	936.647.000,00	936.647.000,00
82	Mandungo	Wewewa Selatan	830.722.000,00	830.722.000,00
83	Mangganipi	Kodi Utara	1.645.314.000,00	1.645.314.000,00
84	Manu Toghi	Kodi Bangedo	1.122.384.000,00	1.122.384.000,00
85	Mareda Kalada	Wewewa Timur	956.466.000,00	956.466.000,00

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	PAGU DD	REALISASI DD
86	Marokota	Wewewa Barat	1.076.501.000,00	1.076.501.000,00
87	Mata Kapore	Kodi Bangedo	1.263.066.000,00	1.263.066.000,00
88	Mata Loko	Wewewa Utara	908.333.000,00	908.333.000,00
89	Mata Lombu	Wewewa Tengah	1.090.670.000,00	1.090.670.000,00
90	Mata Pyawu	Wewewa Timur	833.436.000,00	833.436.000,00
91	Mata Wee Karoro	Wewewa Tengah	902.699.000,00	902.699.000,00
92	Mata Wee Lima	Wewewa Timur	823.207.000,00	823.207.000,00
93	Mawo Dana	Wewewa Timur	977.035.000,00	977.035.000,00
94	Mawo Maliti	Wewewa Utara	1.065.010.000,00	1.065.010.000,00
95	Menne Ate	Wewewa Barat	930.705.000,00	930.705.000,00
96	Mere Kehe	Kodi Bangedo	1.051.750.000,00	1.051.750.000,00
97	Mereda Wuni	Wewewa Tengah	957.989.000,00	957.989.000,00
98	Milla Ate	Wewewa Selatan	920.671.000,00	920.671.000,00
99	Moro Manduyo	Kodi Utara	1.232.770.000,00	1.232.770.000,00
100	Nangga Mutu	Kodi Utara	1.005.308.000,00	1.005.308.000,00
101	Noha	Kodi Utara	1.460.554.000,00	1.460.554.000,00
102	Nyura Lele	Wewewa Timur	744.623.000,00	744.623.000,00
103	Odi Paurata	Wewewa Utara	1.098.722.000,00	1.098.722.000,00
104	Ole Ate	Kodi	1.155.394.000,00	1.155.394.000,00
105	Omba Rade	Wewewa Tengah	997.397.000,00	997.397.000,00
106	Onggol	Kodi	1.298.955.000,00	1.298.955.000,00
107	Pada Eweta	Wewewa Timur	1.075.872.000,00	1.075.872.000,00
108	Pandua Tana	Wewewa Utara	1.048.308.000,00	1.048.308.000,00
109	Panenggo Ede	Kodi Balaghar	993.118.000,00	993.118.000,00
110	Payola Umbu	Loura	930.196.000,00	930.196.000,00
111	Pero	Wewewa Barat	952.505.000,00	952.505.000,00
112	Pero Batang	Kodi	1.087.274.000,00	1.087.274.000,00
113	Pero Konda	Kodi	686.069.000,00	686.069.000,00
114	Pogo Tena	Loura	1.137.964.000,00	1.137.964.000,00
115	Puu Potto	Wewewa Utara	929.031.000,00	929.031.000,00
116	Raba Ege	Wewewa Barat	1.147.675.000,00	1.147.675.000,00
117	Rada Loko	Kodi Bangedo	1.304.902.000,00	1.304.902.000,00
118	Rada Malando	Kodi Bangedo	999.082.000,00	999.082.000,00
119	Rada Mata	Kota Tambolaka	1.252.584.000,00	1.252.584.000,00
120	Rama Dana	Loura	1.035.419.000,00	1.035.419.000,00
121	Reda Pada	Wewewa Barat	995.288.000,00	995.288.000,00
122	Reda Wano	Wewewa Utara	1.146.529.000,00	1.146.529.000,00
123	Rita Baru	Wewewa Selatan	1.042.072.000,00	1.042.072.000,00
124	Sangu Ate	Wewewa Barat	836.690.000,00	836.690.000,00
125	Tana Mete	Kodi Bangedo	1.126.031.000,00	1.126.031.000,00
126	Tanggaba	Wewewa Tengah	998.494.000,00	998.494.000,00
127	Tanjung Karoso	Kodi	1.021.487.000,00	1.021.487.000,00
128	Tarra Mata	Wewewa Tengah	1.007.753.000,00	1.007.753.000,00
129	Tawo Rara	Wewewa Barat	1.096.993.000,00	1.096.993.000,00
130	Tema Tana	Wewewa Timur	927.695.000,00	927.695.000,00

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	PAGU DD	REALISASI DD
131	Tena Teke	Wewewa Selatan	1.168.257.000,00	1.168.257.000,00
132	Totok	Loura	1.176.764.000,00	1.176.764.000,00
133	Umbu Ngedo	Kodi Bangedo	1.163.522.000,00	1.163.522.000,00
134	Umbu Wangu	Wewewa Selatan	1.009.047.000,00	1.009.047.000,00
135	Waiha	Kodi Balaghar	1.418.911.000,00	1.418.911.000,00
136	Waiholo	Kodi Utara	1.859.681.000,00	1.859.681.000,00
137	Waikadada	Kodi Bangedo	987.739.000,00	987.739.000,00
138	Waikaninyo	Kodi Bangedo	1.079.813.000,00	1.079.813.000,00
139	Waikarara	Kodi Balaghar	1.282.620.000,00	1.282.620.000,00
140	Wailabubur	Kodi Utara	1.275.881.000,00	1.275.881.000,00
141	Wailangira	Kodi Balaghar	1.258.058.000,00	1.258.058.000,00
142	Waimakaha	Kodi Bangedo	1.247.703.000,00	1.247.703.000,00
143	Waimangura	Wewewa Barat	945.116.000,00	945.116.000,00
144	Waimaringi	Kodi Bangedo	962.304.000,00	962.304.000,00
145	Wainyapu	Kodi Balaghar	1.378.833.000,00	1.378.833.000,00
146	Waipaddi	Kodi Bangedo	1.015.762.000,00	1.015.762.000,00
147	Waipakolo	Kodi Balaghar	1.198.814.000,00	1.198.814.000,00
148	Waitaru	Kodi Utara	1.200.794.000,00	1.200.794.000,00
149	Wali Ate	Wewewa Barat	1.049.399.000,00	1.049.399.000,00
150	Walla Ndimu	Kodi Bangedo	898.705.000,00	898.705.000,00
151	Wano Talla	Wewewa Utara	1.158.798.000,00	1.158.798.000,00
152	Watu Kawula	Kota Tambolaka	1.098.290.000,00	1.098.290.000,00
153	Watu Labara	Wewewa Barat	1.071.158.000,00	1.071.158.000,00
154	Watu Wona	Kodi	1.077.161.000,00	1.077.161.000,00
155	Wee Baghe	Wewewa Selatan	1.108.061.000,00	1.108.061.000,00
156	Wee Kambala	Loura	917.534.000,00	917.534.000,00
157	Wee Kokora	Wewewa Tengah	971.598.000,00	971.598.000,00
158	Wee Kombaka	Wewewa Barat	948.439.000,00	948.439.000,00
159	Wee Kura	Wewewa Barat	735.986.000,00	735.986.000,00
160	Wee Lima	Wewewa Timur	853.615.000,00	853.615.000,00
161	Wee Limbu	Wewewa Timur	1.253.271.000,00	1.253.271.000,00
162	Wee Londa	Kota Tambolaka	1.081.353.000,00	1.081.353.000,00
163	Wee Mananda	Loura	1.197.165.000,00	1.197.165.000,00
164	Wee Namba	Wewewa Utara	994.334.000,00	994.334.000,00
165	Wee Paboba	Wewewa Utara	1.137.679.000,00	1.137.679.000,00
166	Wee Pangali	Kota Tambolaka	970.149.000,00	970.149.000,00
167	Wee Patando	Wewewa Tengah	1.066.518.000,00	1.066.518.000,00
168	Wee Rame	Wewewa Tengah	976.186.000,00	976.186.000,00
169	Wee Rena	Kota Tambolaka	1.222.551.000,00	1.222.551.000,00
170	Wee Wella	Kodi Utara	1.093.515.000,00	1.093.515.000,00
171	Wee Wulla	Wewewa Selatan	836.886.000,00	836.886.000,00
172	Weri Lolo	Wewewa Selatan	984.168.000,00	984.168.000,00
173	Wura Homba	Kodi	1.229.708.000,00	1.229.708.000,00
JUMLAH			**184.608.937.000,00**	**184.608.937.000,00**

LAMPIRAN 2

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

RINCIAN ATAS HIBAH BOS KEPADA SATUAN PENDIDIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

No	NPSN Nama Sekolah	BOS REGULER		TOTAL
		Tahap 1	Tahap 2	
1	69787668 SD MASEHI TENGGABA	124.450.000,00	124.450.000,00	248.900.000,00
2	70035952 SD KATOLIK ILHALOKO	95.475.000,00	95.475.000,00	190.950.000,00
3	50304278 SD KATOLIK KALAKI KAMBE	93.575.000,00	93.575.000,00	187.150.000,00
4	69876137 SD MASEHI PUDDA	114.950.000,00	114.950.000,00	229.900.000,00
5	69787667 SD MASEHI RARA	97.375.000,00	97.375.000,00	194.750.000,00
6	69876140 SDM WALLA NDIMU	152.475.000,00	152.475.000,00	304.950.000,00
7	69986222 SD GENERASI PAKONDA	35.625.000,00		35.625.000,00
8	70042566 SD SWASTA HARAPAN WEE MORO	13.775.000,00	13.775.000,00	27.550.000,00
9	50304307 SD KATOLIK MANGGANIPI	183.350.000,00	183.350.000,00	366.700.000,00
10	69904180 SD KATOLIK WANNO BADU	57.000.000,00	56.993.000,00	113.993.000,00
11	69900569 SD LAIKARAGA	70.775.000,00	70.775.000,00	141.550.000,00
12	50304024 SD MASEHI WEEKAMBURU	93.100.000,00	93.100.000,00	186.200.000,00
13	50304239 SD KATOLIK WEE KOMBAKA 2	161.500.000,00	161.500.000,00	323.000.000,00
14	69900566 SD WEE WITTU	59.850.000,00	59.850.000,00	119.700.000,00
15	70031224 SD SENANG HATI BERKARYA	28.025.000,00	28.025.000,00	56.050.000,00
16	50304309 SD KATOLIK MANU TOGHI YAPNUSDA	102.600.000,00	102.600.000,00	205.200.000,00

No	NPSN Nama Sekolah	BOS REGULER		TOTAL
		Tahap 1	Tahap 2	
17	50304277 SDK HOMBA KARIPIT	248.425.000,00	248.425.000,00	496.850.000,00
18	50303992 SDM TANA MARINGI	81.225.000,00	81.225.000,00	162.450.000,00
19	50304022 SDM WEE TOMBO	121.125.000,00	121.125.000,00	242.250.000,00
20	69958291 SD TAMAN SISWA DAHA ELU	66.975.000,00	-	66.975.000,00
21	50304225 SD KATOLIK KERE ROBBO	252.700.000,00	252.700.000,00	505.400.000,00
22	50304258 SD MASEHI KARUNI	56.525.000,00	56.525.000,00	113.050.000,00
23	69895829 SD WAI MAKAHA	158.175.000,00	155.011.500,00	313.186.500,00
24	50304305 SDK PERO	85.025.000,00	85.025.000,00	170.050.000,00
25	50304250 SD MASEHI KORI	132.525.000,00	132.525.000,00	265.050.000,00
26	50305033 SD MASEHI ELOPADA	143.925.000,00	143.925.000,00	287.850.000,00
27	50304295 SDK WAIPADDI	110.675.000,00	110.675.000,00	221.350.000,00
28	50304298 SD KATOLIK WAIMARAMA	124.925.000,00	124.925.000,00	249.850.000,00
29	50304315 SDK PASONO BENDU	106.400.000,00	106.400.000,00	212.800.000,00
30	69876130 SD MASEHI TOSSI	182.400.000,00	182.400.000,00	364.800.000,00
31	50304308 SDK MANOLA	125.400.000,00	125.400.000,00	250.800.000,00
32	70039465 SD SWASTA TUNAS MUDA KADU ETA	34.200.000,00	34.200.000,00	68.400.000,00
33	50304232 SD MASEHI BONDO KODI	104.025.000,00	104.025.000,00	208.050.000,00
34	69876131 SD MASEHI WAIYENGO	118.750.000,00	118.750.000,00	237.500.000,00
35	50304241 SD KATOLIK WEETOBULA	292.125.000,00	292.125.000,00	584.250.000,00
36	50304020 SD MASEHI WEE PEWA 1	43.225.000,00	43.225.000,00	86.450.000,00
37	50305037 SD MASEHI WEE PABOBA	45.600.000,00	45.600.000,00	91.200.000,00
38	69727615 SD MASEHI BONDO KAMODO	135.375.000,00	135.375.000,00	270.750.000,00
39	69895833 SD WELLI WANNO	85.500.000,00	85.500.000,00	171.000.000,00

No	NPSN Nama Sekolah	BOS REGULER		TOTAL
		Tahap 1	Tahap 2	
40	50304313 SD KATOLIK ONGGOL	90.250.000,00	90.250.000,00	180.500.000,00
41	50309504 SD KATOLIK BALI LOURA	108.300.000,00		108.300.000,00
42	50304235 SD KATOLIK WEEPANGALI	84.075.000,00	84.075.000,00	168.150.000,00
43	50303957 SD KATOLIK MAREDA WUNI	85.975.000,00	85.975.000,00	171.950.000,00
44	69895825 SD ANGSOL	75.050.000,00	72.798.500,00	147.848.500,00
45	69876136 SDK PEMUDA	155.800.000,00	155.800.000,00	311.600.000,00
46	50304018 SD MASEHI PUU UPPO	136.325.000,00	136.325.000,00	272.650.000,00
47	70040103 SD PELITA OLE MILLA	58.900.000,00	58.900.000,00	117.800.000,00
48	69876132 SD MASEHI WAILABUBUR	167.675.000,00	167.675.000,00	335.350.000,00
49	69876134 SDK DIMU KAKA	139.175.000,00	135.704.223,00	274.879.223,00
50	50309514 SD MASEHI WAIKARARA	91.675.000,00	91.675.000,00	183.350.000,00
51	69895830 SD WAILANGIRA	81.225.000,00	81.225.000,00	162.450.000,00
52	50304244 SDK KIKU BOKO	59.850.000,00	59.850.000,00	119.700.000,00
53	70002629 SD KATOLIK ICEYA NDAHA	106.400.000,00	106.400.000,00	212.800.000,00
54	50303955 SD KATOLIK KALLU SOBA	69.825.000,00	69.825.000,00	139.650.000,00
55	50304262 SD MASEHI GOLLU WATU	85.025.000,00	85.025.000,00	170.050.000,00
56	69895832 SD WEE RITTA	32.775.000,00	32.775.000,00	65.550.000,00
57	50304252 SD MASEHI WATU LAMBARA	87.875.000,00	87.875.000,00	175.750.000,00
58	70040658 SD SWASTA TUNAS MUDA OMBA GHOBO	28.500.000,00	28.500.000,00	57.000.000,00
59	50304265 SD MASEHI KABALI DANA	101.650.000,00	101.650.000,00	203.300.000,00
60	50305212 SD MASEHI KATURA	49.400.000,00	49.400.000,00	98.800.000,00
61	50304224 SDK WEEPEWA II	61.275.000,00	61.275.000,00	122.550.000,00
62	69900567 SD PUU KAZA	84.550.000,00	84.550.000,00	169.100.000,00

No	NPSN Nama Sekolah	BOS REGULER		TOTAL
		Tahap 1	Tahap 2	
63	69727617 SD MASEHI MONDO MIA	58.900.000,00	58.900.000,00	117.800.000,00
64	50304291 SD ISLAM PERO	154.375.000,00	154.375.000,00	308.750.000,00
65	50304281 SD KATOLIK BOMBO	133.000.000,00	133.000.000,00	266.000.000,00
66	50304276 SD KATOLIK GALLU WAWI	141.075.000,00	141.075.000,00	282.150.000,00
67	69957202 SD TAMAN SISWA RADA METER	116.375.000,00	116.375.000,00	232.750.000,00
68	50304243 SD KATOLIK KABONU TANA	19.000.000,00	19.000.000,00	38.000.000,00
69	50304304 SDK RONDA DIKIRA	57.000.000,00	56.860.000,00	113.860.000,00
70	50304247 SD MASEHI DIKIRA	103.550.000,00	103.550.000,00	207.100.000,00
71	69863299 SD KATOLIK WAIWONDO	118.275.000,00	118.275.000,00	236.550.000,00
72	69727618 SDM REDA MBOLO	162.450.000,00	162.450.000,00	324.900.000,00
73	50304280 SDK KALEMBU KUTURA	74.575.000,00	74.575.000,00	149.150.000,00
74	50304273 SD KATOLIK DELO	108.300.000,00	108.300.000,00	216.600.000,00
75	50305209 SD MASEHI MATA	178.600.000,00	178.600.000,00	357.200.000,00
76	69787664 SD KATOLIK WANNO BARU	94.525.000,00	94.525.000,00	189.050.000,00
77	50304027 SD MASEHI WAIMANGURA	109.725.000,00	109.725.000,00	219.450.000,00
78	50304314 SD KATOLIK PALLA II	139.175.000,00	139.175.000,00	278.350.000,00
79	69957201 SD TAMAN SISWA KALENA RONGO	135.850.000,00	135.850.000,00	271.700.000,00
80	50303953 SD MASEHI LETE WUNGANA	46.550.000,00	46.550.000,00	93.100.000,00
81	50304032 SD MASEHI WANNO MEMA	81.225.000,00	81.225.000,00	162.450.000,00
82	50304130 SDM MATA LOMBU	74.100.000,00	74.100.000,00	148.200.000,00
83	50304035 SD KATOLIK RARA MATA	80.275.000,00	80.275.000,00	160.550.000,00
84	69895831 SD WALI ATE	67.925.000,00		67.925.000,00
85	50304299 SDK WAIPANDA	182.875.000,00	182.875.000,00	365.750.000,00

No	NPSN Nama Sekolah	BOS REGULER		TOTAL
		Tahap 1	Tahap 2	
86	70040639 SD GRACIA PAKONDA	98.800.000,00	98.800.000,00	197.600.000,00
87	50304023 SD MASEHI WEE WANGGA	31.825.000,00	31.825.000,00	63.650.000,00
88	50309505 SDK WALLA MATA	86.450.000,00	86.450.000,00	172.900.000,00
89	50304238 SD KATOLIK WEE KAMURA	94.050.000,00	91.845.000,00	185.895.000,00
90	69986221 SD GENERASI PERJUANGAN KALENA RONGO	77.900.000,00	77.900.000,00	155.800.000,00
91	50303959 SDK WEE LIMA	122.075.000,00	122.075.000,00	244.150.000,00
92	50304938 SD MASEHI HAMONGGO LELE	235.600.000,00	235.600.000,00	471.200.000,00
93	69876133 SD KATOLIK WIKICO KAWANGO	173.850.000,00	173.850.000,00	347.700.000,00
94	50304311 SD KATOLIK MATA KAPORE	109.725.000,00	109.725.000,00	219.450.000,00
95	69876138 SD MASEHI WAIHA	80.275.000,00	80.275.000,00	160.550.000,00
96	50304248 SDM EDE	105.450.000,00	105.450.000,00	210.900.000,00
97	50305156 SD MASEHI WANNO LOURA	60.325.000,00	60.325.000,00	120.650.000,00
98	50305213 SD MASEHI KALEMBU KOMI	12.350.000,00	11.609.000,00	23.959.000,00
99	69727611 SD MASEHI WEE KOMBAKA 1	66.975.000,00	66.975.000,00	133.950.000,00
100	69895828 SD SOLID	85.500.000,00	85.354.000,00	170.854.000,00
101	50304001 SD MASEHI RINGGITA	70.775.000,00	70.775.000,00	141.550.000,00
102	50304296 SD KATOLIK WAIKAHAKA	128.250.000,00	128.250.000,00	256.500.000,00
103	50303987 SDK BONDO BOGHILA	20.425.000,00	18.313.000,00	38.738.000,00
104	50304310 SD KATOLIK MARSUDIRINI	261.250.000,00	261.250.000,00	522.500.000,00
105	50304002 SD MASEHI NGAMBA DETA	133.000.000,00	133.000.000,00	266.000.000,00
106	69895826 SD KAREKA NDARA	87.875.000,00	87.875.000,00	175.750.000,00
107	69727561 SD KHATOLIK WEE DORO	31.350.000,00	31.350.000,00	62.700.000,00
108	50304237 SD KATOLIK WEE RABUKA	61.750.000,00	61.750.000,00	123.500.000,00

No	NPSN Nama Sekolah	BOS REGULER		TOTAL
		Tahap 1	Tahap 2	
109	69895827 SD PERJUANGAN	117.800.000,00	117.800.000,00	235.600.000,00
110	69876139 SD MASEHI WAIKADADA	202.825.000,00	202.825.000,00	405.650.000,00
111	50304294 SD KATOLIK KALENA WANNO	110.675.000,00	110.521.226,00	221.196.226,00
112	50304245 SD KATOLIK TOTOK	59.850.000,00	59.850.000,00	119.700.000,00
113	50303954 SDK GOLLU SAPI	125.875.000,00	125.875.000,00	251.750.000,00
114	50304240 SDK WEE LONDA	128.250.000,00	128.250.000,00	256.500.000,00
115	50304272 SD KATOLIK BONDO LENGA	41.800.000,00	41.800.000,00	83.600.000,00
116	50304312 SDK MUTU RATA	62.700.000,00	62.700.000,00	125.400.000,00
117	50304246 SDM BUKAMBERO	172.425.000,00	172.425.000,00	344.850.000,00
118	50303942 SD MASEHI WEE RAME	111.625.000,00	111.625.000,00	223.250.000,00
119	70039464 SD TUNAS MUDA OLE AWA	42.750.000,00	42.750.000,00	85.500.000,00
120	69876135 SD KATOLIK WAIPANOKA	104.500.000,00	104.500.000,00	209.000.000,00
121	50304004 SD MASEHI PALLA I	107.350.000,00	107.350.000,00	214.700.000,00
122	50304275 SDK DIMU KALIPE	126.350.000,00	126.350.000,00	252.700.000,00
123	50304293 SDK KALEMBU WERI	114.475.000,00	114.475.000,00	228.950.000,00
124	50304292 SEKOLAH DASAR KATOLIK KALEMBU LIGHA	138.700.000,00	138.700.000,00	277.400.000,00
125	69934454 SEKOLAH DASAR KATOLIK KADEKAP	64.600.000,00	64.600.000,00	129.200.000,00
126	70041962 SMP KRISTEN PALMAD JETKANA	42.120.000,00	42.120.000,00	84.240.000,00
127	70032392 SMPK ST. YOHANES KALEMBU LONA	54.990.000,00	54.990.000,00	109.980.000,00
128	70011847 SMP KRISTEN CAHAYA KASIH	96.525.000,00	96.525.000,00	193.050.000,00
129	70002948 SMP KATOLIK ST. IGNASIUS WAIPADDI	284.310.000,00	284.245.000,00	568.555.000,00
130	69980332 SMP KATOLIK FLOS CARMELI	65.520.000,00	65.520.000,00	131.040.000,00
131	69895836 SMP HARAPAN	102.960.000,00	102.960.000,00	205.920.000,00

No	NPSN Nama Sekolah	BOS REGULER		TOTAL
		Tahap 1	Tahap 2	
132	70041964 SMP KRISTEN GENEA KALERA	50.310.000,00	50.310.000,00	100.620.000,00
133	69935091 SMP DEO GLORIAM WANNO MUTTU	78.390.000,00	78.254.150,00	156.644.150,00
134	50304116 SMPK ST ALOYSIUS	107.055.000,00	106.995.000,00	214.050.000,00
135	70002971 SMPK STA. MARIA DE LOURDES	208.845.000,00	208.845.000,00	417.690.000,00
136	70040818 SMP SWASTA TANJUNG KAROSO	54.405.000,00	54.405.000,00	108.810.000,00
137	50304110 SMP SWASTA MARAPATI	169.650.000,00	169.650.000,00	339.300.000,00
138	50304052 SMP SWASTA RANGGA RAME	84.825.000,00	84.825.000,00	169.650.000,00
139	50304049 SMPK WONA KAKA	421.200.000,00	421.200.000,00	842.400.000,00
140	69727799 SMP KHATOLIK ST. GERARDUS MAYELLA	309.465.000,00	309.465.000,00	618.930.000,00
141	69727865 SMPK ST.JOSEF FREINADEMETZ	148.590.000,00	148.590.000,00	297.180.000,00
142	70039214 SMP GRACIA	73.125.000,00	73.125.000,00	146.250.000,00
143	69988213 SMP TAMANSISWA REDA METER	52.650.000,00	52.650.000,00	105.300.000,00
144	69727800 SMP KRISTEN WEE MARINGI	35.100.000,00	35.100.000,00	70.200.000,00
145	69988474 SMP PGRI MANDUNGO	48.555.000,00	48.555.000,00	97.110.000,00
146	70003319 SMP SWASTA BUKAMBERO	137.475.000,00	137.475.000,00	274.950.000,00
147	50304053 SMP KATOLIK PALLA	256.815.000,00	256.815.000,00	513.630.000,00
148	50304082 SMP KRISTEN WAIMANGURA	399.555.000,00	399.555.000,00	799.110.000,00
149	50304054 SMP KRISTEN RARA	100.035.000,00	100.035.000,00	200.070.000,00
150	70032305 SMPK ST. GABRIEL BUKIT INDAH	26.910.000,00	26.910.000,00	53.820.000,00
151	70028862 SMPK ST. YOSEF MATA WEE LIMA	66.690.000,00	66.690.000,00	133.380.000,00
152	69900257 SMP KATOLIK ST. PAULUS	152.685.000,00	152.685.000,00	305.370.000,00
153	50304113 SMP SWSTA MBALI MBYAPU	96.525.000,00	96.525.000,00	193.050.000,00
154	50304128 SMP KRISTEN KODI	172.575.000,00	172.575.000,00	345.150.000,00

No	NPSN Nama Sekolah	BOS REGULER		TOTAL
		Tahap 1	Tahap 2	
155	70042030 SMP KATOLIK SANTO YAKOBUS WEE BAGHE	40.950.000,00	40.950.000,00	81.900.000,00
156	70032298 SMP KADEKAP	47.385.000,00	47.385.000,00	94.770.000,00
157	69895835 SMP COTOKA	68.445.000,00	68.445.000,00	136.890.000,00
158	69895864 SMP WATU LABARA	54.405.000,00	54.405.000,00	108.810.000,00
159	50304112 SMP MASYARAKAT MAREDA WUNI	98.865.000,00	98.865.000,00	197.730.000,00
160	50304115 SMP SEMINARI SINAR BUANA	38.610.000,00	38.610.000,00	77.220.000,00
161	69900574 SMP IYA TEKKI	47.385.000,00	47.385.000,00	94.770.000,00
162	69980334 SMP SANTU ANDREAS NIRI ALA	70.200.000,00	70.200.000,00	140.400.000,00
163	50304127 SMP KRISTEN KARUNI	103.545.000,00	103.545.000,00	207.090.000,00
164	70042017 SMP KATOLIK ILHALOKO	5.265.000,00	5.265.000,00	10.530.000,00
165	50304124 SMP SWASTA KALEMBU KUTURA	111.150.000,00	111.150.000,00	222.300.000,00
166	69958560 SMP SINAR HARAPAN BONDO BOGHILA	45.045.000,00	45.045.000,00	90.090.000,00
167	69896155 SMP DELO	118.755.000,00	116.379.900,00	235.134.900,00
168	69895865 SMP WEE RITTA	124.020.000,00	124.020.000,00	248.040.000,00
169	69895861 SMP SOLID	62.010.000,00	62.007.400,00	124.017.400,00
170	69895862 SMP WALI ATE	83.070.000,00		83.070.000,00
171	69957203 SMP TAMAN SISWA BILLA CENGE	76.050.000,00	76.050.000,00	152.100.000,00
172	50304117 SMP KRISTEN PALLA	145.080.000,00	142.178.400,00	287.258.400,00
173	69980335 SMP SWASTA WEE WELLA	82.485.000,00	82.485.000,00	164.970.000,00
174	70003669 SMP SWASTA TAMAN SISWA ANDE ATE	54.405.000,00	49.785.000,00	104.190.000,00
175	69947729 SMP SWASTA PANCASILA	21.060.000,00	20.378.200,00	41.438.200,00
176	50304050 SMP KRISTEN WEE RAME	94.770.000,00	94.770.000,00	189.540.000,00
177	69895859 SMP MANU TOGHI	187.785.000,00	187.785.000,00	375.570.000,00

No	NPSN Nama Sekolah	BOS REGULER		TOTAL
		Tahap 1	Tahap 2	
178	69991539 SMP SWASTA GENERASI KEDDE WALI	42.120.000,00	42.120.000,00	84.240.000,00
179	50304051 SMP MANDA ELU	27.495.000,00	27.495.000,00	54.990.000,00
180	70012201 SMP KRISTEN NARWASTU WAILABUBUR	116.415.000,00		116.415.000,00
181	50304107 SMP KRISTEN TANA MARINGI	208.845.000,00	208.845.000,00	417.690.000,00
182	69895837 SMP IMANUEL	61.425.000,00	61.411.350,00	122.836.350,00
183	69980333 SMP BAKTI LUHUR	48.555.000,00	48.455.000,00	97.010.000,00
184	69958290 SMP TAMAN SISWA KENDU WELA	75.465.000,00	75.465.000,00	150.930.000,00
185	50304126 SMP KATOLIK PLUS KASIMO	181.350.000,00	181.350.000,00	362.700.000,00
186	69895853 SMP KAREKA NDARA	71.955.000,00		71.955.000,00
187	69928410 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ICEYA NDAHA	259.740.000,00	259.740.000,00	519.480.000,00
188	69787664 SD KATOLIK WANNO BARU	-	22.500.000,00	22.500.000,00
189	50304246 SDM BUKAMBERO	-	22.500.000,00	22.500.000,00
190	50304022 SDM WEE TOMBO	-	22.500.000,00	22.500.000,00
191	50304310 SD KATOLIK MARSUDIRINI	-	22.500.000,00	22.500.000,00
192	50304224 SDK WEEPEWA II	-	22.500.000,00	22.500.000,00
193	50304238 SD KATOLIK WEE KAMURA	-	22.500.000,00	22.500.000,00
194	50304237 SD KATOLIK WEE RABUKA	-	22.500.000,00	22.500.000,00
195	69787668 SD MASEHI TENGGABA	-	22.500.000,00	22.500.000,00
196	50304305 SDK PERO	-	22.500.000,00	22.500.000,00
TOTAL				**38.944.308.849,00**

LAMPIRAN 2. a

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

RINCIAN ATAS HIBAH BOSP KEPADA SATUAN PENDIDIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

No	NPSN Nama Sekolah	KINERJA	TAHAP 1	TAHAP 2	JUMLAH PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	69942725 TK NEGERI PEMBINA ANDE ATE		8.320.000,00	8.320.000,00	16.640.000,00	16.640.000,00	-
2	69942765 TK NEGERI SION NDAPA TAKA		10.560.000,00	10.560.000,00	21.120.000,00	21.120.000,00	-
3	69968871 KB NEGERI KASIH BUNDA		12.800.000,00	12.800.000,00	25.600.000,00	25.600.000,00	-
4	69944751 TK SATAP POMA		6.720.000,00	6.720.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00	-
5	69943275 TK NEGERI PEMBINA WEWEWA TIMUR		11.840.000,00	11.840.000,00	23.680.000,00	23.680.000,00	-
6	69989035 KB PERCONTOHAN TAMBOLAKA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		17.280.000,00	17.280.000,00	34.560.000,00	34.560.000,00	-
7	69942900 TK NEGERI MIKKU ATE		10.880.000,00	10.880.000,00	21.760.000,00	21.760.000,00	-
8	69949038 TK WIKICO RONGO		8.320.000,00	8.320.000,00	16.640.000,00	16.640.000,00	-
9	69944612 TK KARARA TOMBO		10.880.000,00		10.880.000,00	10.880.000,00	-
10	69944755 TK SATAP POTTO KATILLU		6.720.000,00	6.720.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00	-
11	69942946 PAUD SETIA ABADI		13.760.000,00	13.760.000,00	27.520.000,00	27.520.000,00	-
12	69963776 KB PRIMADONA		8.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-
13	69942762 PAUD EFRATA MAWO DANA		10.560.000,00	10.560.000,00	21.120.000,00	21.120.000,00	-
14	69945104 PAUD MAWAR		4.160.000,00	4.160.000,00	8.320.000,00	8.320.000,00	-
15	70037802 TK SANTO YOSEF PEKERJA		6.400.000,00	6.400.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	-
16	69944671 PAUD WEE KABANI		2.560.000,00		2.560.000,00	2.560.000,00	-
17	69943827 TK ST.PAULUS		10.560.000,00		10.560.000,00	10.560.000,00	-
18	69943047 PAUD TUNAS BANGSA		13.440.000,00		13.440.000,00	13.440.000,00	-
19	70002880 KB MUTIARA KASIH		11.200.000,00	11.200.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	-

No	NPSN Nama Sekolah	KINERJA	TAHAP 1	TAHAP 2	JUMLAH PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
20	69947667 TK STA.MARTHA BINA HARAPAN		5.440.000,00	5.222.400,00	10.662.400,00	10.662.400,00	-
21	69943055 PAUD PUU KAURA		5.120.000,00		5.120.000,00	5.120.000,00	-
22	69942958 PAUD SANTA SCHOLASTIKA		21.440.000,00	21.440.000,00	42.880.000,00	42.880.000,00	-
23	70038702 KB KRISTEN TANGGU HOLO		8.960.000,00	8.960.000,00	17.920.000,00	17.920.000,00	-
24	69942766 PAUD MALI MADA		8.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-
25	69943825 TK LIGOURI KALEMBU WERI		14.400.000,00	14.400.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-
26	69944608 TK OLE DEWA		3.520.000,00	3.520.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00	-
27	69962381 TK STA.THERESIA KANAK-KANAK YESUS		5.440.000,00	5.440.000,00	10.880.000,00	10.880.000,00	-
28	69942910 PAUD STA MARIA POGO LEDE		11.840.000,00	11.840.000,00	23.680.000,00	23.680.000,00	-
29	69964668 KB ALFA DAN OMEGA		13.760.000,00	13.760.000,00	27.520.000,00	27.520.000,00	-
30	P9985099 PKBM BENGO NDAHA		20.800.000,00	19.892.800,00	40.692.800,00	40.692.800,00	-
31	69947828 PAUD TUNAS BANGSA 2		13.760.000,00	13.760.000,00	27.520.000,00	27.520.000,00	-
32	69963791 KB ZELU EGE		12.160.000,00	12.160.000,00	24.320.000,00	24.320.000,00	-
33	70027160 KB MAJU BERSAMA		7.360.000,00	7.360.000,00	14.720.000,00	14.720.000,00	-
34	70002653 KB TALI KASIH MANDIRI		23.680.000,00	23.680.000,00	47.360.000,00	47.360.000,00	-
35	69942917 TK ST DOMINIKUS		7.040.000,00	7.040.000,00	14.080.000,00	14.080.000,00	-
36	69942894 PAUD AZZAHRA 3 KATEWEL		11.840.000,00	11.840.000,00	23.680.000,00	23.680.000,00	-
37	69942892 PAUD ST GABRIEL		9.280.000,00	9.280.000,00	18.560.000,00	18.560.000,00	-
38	69972208 KB ST.STEFANUS WANNO BADU		12.480.000,00	12.480.000,00	24.960.000,00	24.960.000,00	-
39	69943044 TK KRISTEN SYALOM TERPADU		16.320.000,00	16.320.000,00	32.640.000,00	32.640.000,00	-
40	69963199 TK PARE KALENGGO		12.480.000,00	11.980.800,00	24.460.800,00	24.460.800,00	-
41	69942726 TK SANTA LUSIA ELOPADA		4.480.000,00	4.480.000,00	8.960.000,00	8.960.000,00	-
42	69947829 PAUD PELANGI		17.600.000,00	17.600.000,00	35.200.000,00	35.200.000,00	-
43	69944614 TK KR.BONDO KODI		8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	-
44	69942975 PAUD PUU ROO		15.360.000,00	15.360.000,00	30.720.000,00	30.720.000,00	-
45	69942978 TK KRISTEN PINTU INDAH		5.760.000,00	5.760.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00	-

No	NPSN Nama Sekolah	KINERJA	TAHAP 1	TAHAP 2	JUMLAH PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
46	69942942 KB LABET		8.320.000,00	6.528.800,00	14.848.800,00	14.848.800,00	-
47	69952482 PAUD EFATA		10.880.000,00	10.879.600,00	21.759.600,00	21.759.600,00	-
48	69947102 TK NURUL AMAN		8.320.000,00	7.987.200,00	16.307.200,00	16.307.200,00	-
49	70027172 KB UMBU WANGO		8.960.000,00	8.960.000,00	17.920.000,00	17.920.000,00	-
50	69944622 PAUD ALFA OMEGA		17.920.000,00	17.920.000,00	35.840.000,00	35.840.000,00	-
51	70023651 KB HARO DEWA		19.200.000,00	19.200.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	-
52	70034637 KB BUNDAKU		8.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-
53	70004988 KB SINAR KASIH		17.600.000,00	17.600.000,00	35.200.000,00	35.200.000,00	-
54	69942769 KB TUNAS KASIH		6.080.000,00		6.080.000,00	6.080.000,00	-
55	P9962732 PKBM MARAPATI		8.960.000,00	8.780.800,00	17.740.800,00	17.740.800,00	-
56	69963664 KB AGAPE		10.240.000,00	10.240.000,00	20.480.000,00	20.480.000,00	-
57	70003002 KB LORENTA DADI		8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	-
58	69944685 TK KR. WEE RAME		1.920.000,00		1.920.000,00	1.920.000,00	-
59	70040368 KB KARARA NDAHA		53.440.000,00	53.440.000,00	106.880.000,00	106.880.000,00	-
60	69942784 PAUD TALITAKUMI		14.080.000,00		14.080.000,00	14.080.000,00	-
61	69942911 PAUD ST ANTONIUS		8.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-
62	69944620 PAUD BONGGOR		20.160.000,00	20.160.000,00	40.320.000,00	40.320.000,00	-
63	69964747 KB ANA LALO		16.960.000,00	16.960.000,00	33.920.000,00	33.920.000,00	-
64	69944673 PAUD SEJATI		12.480.000,00	12.480.000,00	24.960.000,00	24.960.000,00	-
65	69942782 PAUD EDIZON		10.240.000,00		10.240.000,00	10.240.000,00	-
66	69944757 PAUD BONDO KABALA		15.040.000,00	14.588.800,00	29.628.800,00	29.628.800,00	-
67	69963635 KB HOREB		7.680.000,00	7.680.000,00	15.360.000,00	15.360.000,00	-
68	69945517 PAUD TALENTA		11.520.000,00		11.520.000,00	11.520.000,00	-
69	P9984342 PKBM GENERASI PENERUS WAIHA		2.880.000,00		2.880.000,00	2.880.000,00	-
70	69942952 TK KRISTEN ELOPADA		9.600.000,00	9.600.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	-
71	69943383 PAUD HARAPAN BERSAMA		12.160.000,00	12.160.000,00	24.320.000,00	24.320.000,00	-

No	NPSN Nama Sekolah	KINERJA	TAHAP 1	TAHAP 2	JUMLAH PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
72	69942944 TK KRISTEN ICE NDAHA TERPADU		17.920.000,00	17.920.000,00	35.840.000,00	35.840.000,00	-
73	69942888 TK MARSUDIRINI		16.320.000,00	16.320.000,00	32.640.000,00	32.640.000,00	-
74	69944623 PAUD KARTINI		6.720.000,00	6.720.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00	-
75	69943675 PAUD OLE AWA		7.040.000,00		7.040.000,00	7.040.000,00	-
76	69976918 KB MEKAR DAPA SANGKA		18.240.000,00	18.194.000,00	36.434.000,00	36.434.000,00	-
77	69942935 PAUD SALOMO		5.760.000,00	5.760.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00	-
78	69945106 PAUD WUKU WANA		24.000.000,00		24.000.000,00	24.000.000,00	-
79	70006400 PAUD KARTINI		10.880.000,00	10.880.000,00	21.760.000,00	21.760.000,00	-
80	69942955 PAUD TUNAS KASIH I		6.400.000,00	6.400.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	-
81	69942937 PAUD SANTA ANNA		8.960.000,00	8.960.000,00	17.920.000,00	17.920.000,00	-
82	69969712 KB BUNGA ASTER		13.120.000,00	13.120.000,00	26.240.000,00	26.240.000,00	-
83	70037892 TK ANAK TERANG WALLANDIMU		5.440.000,00	5.440.000,00	10.880.000,00	10.880.000,00	-
84	69981530 KB TUNAS KASIH		14.400.000,00	14.400.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-
85	69942789 TK MARANATHA KANELU		8.640.000,00	8.640.000,00	17.280.000,00	17.280.000,00	-
86	70002829 KB NDAHA ATE		23.680.000,00	23.680.000,00	47.360.000,00	47.360.000,00	-
87	P9984441 PKBM DAWARA		13.440.000,00	13.440.000,00	26.880.000,00	26.880.000,00	-
88	69944617 PAUD ANAK BANGSA CERDAS		17.920.000,00	17.920.000,00	35.840.000,00	35.840.000,00	-
89	69943475 PAUD PELITA KASIH		16.640.000,00	16.640.000,00	33.280.000,00	33.280.000,00	-
90	69968681 TK DIMU KAKA		13.760.000,00	13.347.200,00	27.107.200,00	27.107.200,00	-
91	70005783 KB PADEDE MANU		30.720.000,00	30.720.000,00	61.440.000,00	61.440.000,00	-
92	69958872 PAUD SINAR FAJAR		13.440.000,00	13.440.000,00	26.880.000,00	26.880.000,00	-
93	69942883 TK KRISTEN KARUNI		2.240.000,00	2.240.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	-
94	69942664 PAUD KALEMBU LOBA		11.200.000,00	11.200.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	-
95	69944676 PAUD SAMARITANIA		23.360.000,00	23.360.000,00	46.720.000,00	46.720.000,00	-
96	69944616 TK KR.EBEN HEISER		26.880.000,00	26.880.000,00	53.760.000,00	53.760.000,00	-
97	70041821 KB SANTA MONIKA		8.640.000,00	8.640.000,00	17.280.000,00	17.280.000,00	-

No	NPSN Nama Sekolah	KINERJA	TAHAP 1	TAHAP 2	JUMLAH PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
98	69942781 TK KRISTEN TUNAS ZAITUN		12.800.000,00	12.800.000,00	25.600.000,00	25.600.000,00	-
99	69945526 PAUD ST.YOHANES		20.480.000,00	20.480.000,00	40.960.000,00	40.960.000,00	-
100	69942953 KB PEDULI ANAK		10.240.000,00	10.240.000,00	20.480.000,00	20.480.000,00	-
101	70036131 KB KASIH KARUNIA		9.600.000,00	9.600.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	-
102	69943677 PAUD MALI NDETA		16.960.000,00	16.281.600,00	33.241.600,00	33.241.600,00	-
103	69958869 PAUD FIRDAUS		19.520.000,00	19.520.000,00	39.040.000,00	39.040.000,00	-
104	69944674 PAUD STA.THERESIA PAYOLA UMBU		15.360.000,00	15.360.000,00	30.720.000,00	30.720.000,00	-
105	69944613 PAUD ORA ET LABORA 2		6.720.000,00	6.720.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00	-
106	69963793 KB KING KIDS KATURA		14.400.000,00	14.400.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-
107	69942959 TK KRISTEN PALLA		6.400.000,00		6.400.000,00	6.400.000,00	-
108	70031818 KB.ORA ET LABORA		16.640.000,00	16.640.000,00	33.280.000,00	33.280.000,00	-
109	69849889 POS PAUD SOLA GRASIA		12.800.000,00	12.800.000,00	25.600.000,00	25.600.000,00	-
110	69943678 PAUD TUNAS BARU		8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	-
111	69943826 PAUD ST.DOMINIKUS KAWANGODANA		8.320.000,00	8.320.000,00	16.640.000,00	16.640.000,00	-
112	69966064 KB ST.CLAUDIA DOKA KAKA		11.520.000,00	11.520.000,00	23.040.000,00	23.040.000,00	-
113	69943828 PAUD DAZA ELU		7.360.000,00		7.360.000,00	7.360.000,00	-
114	70037176 KB LUKU		14.080.000,00	14.080.000,00	28.160.000,00	28.160.000,00	-
115	70027524 KB SANTO PETRUS		15.040.000,00	15.040.000,00	30.080.000,00	30.080.000,00	-
116	69942763 THE CHILDREN`S		1.920.000,00		1.920.000,00	1.920.000,00	-
117	69942914 PAUD CAHAYA KASIH		7.680.000,00	7.680.000,00	15.360.000,00	15.360.000,00	-
118	70035197 KB PAHALLA		20.800.000,00	20.800.000,00	41.600.000,00	41.600.000,00	-
119	69942871 PAUD MATA WEE KARORO		8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	-
120	69942735 PAUD YERUSALEM		5.440.000,00	5.440.000,00	10.880.000,00	10.880.000,00	-
121	69944627 PAUD SINAR KASIH WEE PANGALI		11.520.000,00	11.520.000,00	23.040.000,00	23.040.000,00	-
122	69966061 KB BUDY KASIH		7.360.000,00	7.045.600,00	14.405.600,00	14.405.600,00	-
123	69943048 PAUD ORA ET LABORA		10.880.000,00	10.880.000,00	21.760.000,00	21.760.000,00	-

No	NPSN Nama Sekolah	KINERJA	TAHAP 1	TAHAP 2	JUMLAH PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
124	70033532 KB EMANUEL		8.640.000,00	8.640.000,00	17.280.000,00	17.280.000,00	-
125	69944684 PAUD PUTRI SION		16.000.000,00	16.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	-
126	69942898 TK ST FRANSISKUS XAVERIUS		4.800.000,00	4.800.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	-
127	69968679 KB MALULLA		7.040.000,00		7.040.000,00	7.040.000,00	-
128	69942896 PAUD LASKAR PELANGI		17.600.000,00	17.600.000,00	35.200.000,00	35.200.000,00	-
129	69967745 KB TUNAS DAUD		4.800.000,00		4.800.000,00	4.800.000,00	-
130	69942970 PAUD BUNGA KASIH		5.440.000,00	5.440.000,00	10.880.000,00	10.880.000,00	-
131	69942909 PAUD ST. KLARITA		3.840.000,00	3.840.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00	-
132	70033294 KB MAGHU ATE		19.200.000,00	19.200.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	-
133	69942912 PAUD PEITANA		2.880.000,00	2.880.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	-
134	69986174 KB OLE AWA		12.800.000,00	12.800.000,00	25.600.000,00	25.600.000,00	-
135	69942779 KB KUDA PUTIH		6.080.000,00		6.080.000,00	6.080.000,00	-
136	69948581 PAUD TUNAS CENDANA		11.200.000,00	11.200.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	-
137	69944619 PAUD SANTA ELISABETH		18.560.000,00		18.560.000,00	18.560.000,00	-
138	69966801 KB IMANUEL RABA EGE		7.360.000,00	7.360.000,00	14.720.000,00	14.720.000,00	-
139	69942957 TK SANTA URSULA PALLA		16.320.000,00	16.320.000,00	32.640.000,00	32.640.000,00	-
140	69945764 PAUD KANAK KANAK SUCI BETLEHEM		8.960.000,00	8.960.000,00	17.920.000,00	17.920.000,00	-
141	69963712 KB TUNAS BANGSA		19.520.000,00	19.520.000,00	39.040.000,00	39.040.000,00	-
142	69946642 PAUD TUNAS HARAPAN		21.760.000,00	21.760.000,00	43.520.000,00	43.520.000,00	-
143	69942951 TK SINAR KASIH		10.240.000,00	10.240.000,00	20.480.000,00	20.480.000,00	-
144	69942976 PAUD NDETA ATE		2.880.000,00	2.880.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	-
145	69942938 PAUD OLE DEWA		320.000,00		320.000,00	320.000,00	-
146	69996041 KB WOLLA KAKA		6.400.000,00	6.400.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	-
147	69942768 PAUD EFATA		18.880.000,00	18.880.000,00	37.760.000,00	37.760.000,00	-
148	70023652 KB BENGO PEGHE		12.480.000,00	12.480.000,00	24.960.000,00	24.960.000,00	-
149	70006880 KB SUMBER KASIH		8.320.000,00	8.320.000,00	16.640.000,00	16.640.000,00	-

No	NPSN Nama Sekolah	KINERJA	TAHAP 1	TAHAP 2	JUMLAH PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
150	69977051 KB NAFIRI		13.760.000,00	13.760.000,00	27.520.000,00	27.520.000,00	-
151	69942733 PAUD MORO`U PANDE		11.520.000,00	11.520.000,00	23.040.000,00	23.040.000,00	-
152	69987438 KB IMANUEL WEE KOKORA		8.960.000,00	8.960.000,00	17.920.000,00	17.920.000,00	-
153	69968682 KB FAJAR BARU		10.560.000,00		10.560.000,00	10.560.000,00	-
154	69967906 KB PERMATA BUNDA		9.280.000,00		9.280.000,00	9.280.000,00	-
155	69988222 KB KRISTEN BUKAMBERO		33.280.000,00	33.280.000,00	66.560.000,00	66.560.000,00	-
156	69949040 PAUD WEE WIDU		8.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-
157	69944750 PAUD STA.THERESIA HAMELI ATE		14.400.000,00	14.400.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-
158	70005365 KB HATI NURANI 2		12.160.000,00	12.160.000,00	24.320.000,00	24.320.000,00	-
159	69945765 PAUD DETA ATE TENA TEKE		2.880.000,00	2.880.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	-
160	70036133 KB SANTA VERONIKA		7.360.000,00	7.360.000,00	14.720.000,00	14.720.000,00	-
161	69943045 PAUD IMANUEL		6.080.000,00	6.080.000,00	12.160.000,00	12.160.000,00	-
162	69942901 PAUD WANNO LOBO		5.440.000,00	5.440.000,00	10.880.000,00	10.880.000,00	-
163	69949039 PAUD OMBA DELO		7.040.000,00		7.040.000,00	7.040.000,00	-
164	69946257 PAUD DJAMA GAIYA		17.920.000,00	17.920.000,00	35.840.000,00	35.840.000,00	-
165	69944633 PAUD R.A.KARTINI		10.880.000,00	10.880.000,00	21.760.000,00	21.760.000,00	-
166	70002753 TK KATOLIK ICEYA NDAHA		15.040.000,00	15.040.000,00	30.080.000,00	30.080.000,00	-
167	70035072 KB MARANATHA		4.800.000,00	4.656.000,00	9.456.000,00	9.456.000,00	-
168	69949659 TK KRISTEN HAMONGGO LELE		5.120.000,00		5.120.000,00	5.120.000,00	-
169	70032053 KB TALITAKUM ONGGOL HARI		17.280.000,00	17.280.000,00	34.560.000,00	34.560.000,00	-
170	70033614 KB GRACELLA		8.640.000,00	8.640.000,00	17.280.000,00	17.280.000,00	-
171	69942977 PAUD ST PAULUS		2.880.000,00		2.880.000,00	2.880.000,00	-
172	69942936 TK KRISTEN WAIKADADA		8.320.000,00	8.320.000,00	16.640.000,00	16.640.000,00	-
173	70027195 TK SANTO ALOYSIUS GONZAGA		9.920.000,00	9.920.000,00	19.840.000,00	19.840.000,00	-
174	69982024 KB TUHA DADI		6.080.000,00	6.080.000,00	12.160.000,00	12.160.000,00	-
175	69943051 TK KRISTEN GIDEON TERPADU		9.280.000,00		9.280.000,00	9.280.000,00	-

No	NPSN Nama Sekolah	KINERJA	TAHAP 1	TAHAP 2	JUMLAH PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
176	69942780 PAUD MARANATHA		9.600.000,00		9.600.000,00	9.600.000,00	-
177	70035569 KB SANTA ELISABETH PANGGA DENGA		11.520.000,00	11.289.600,00	22.809.600,00	22.809.600,00	-
178	69977390 KB SETIA KASIH		12.480.000,00	12.480.000,00	24.960.000,00	24.960.000,00	-
179	69992968 KB MANAWARA 1		4.800.000,00	4.800.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	-
180	69942963 PAUD SALOM		9.280.000,00	9.280.000,00	18.560.000,00	18.560.000,00	-
181	69984620 KB TUNAS DAUD		20.160.000,00	20.160.000,00	40.320.000,00	40.320.000,00	-
182	69971718 KB TUNAS HARAPAN		12.160.000,00	12.160.000,00	24.320.000,00	24.320.000,00	-
183	70027693 KB KEMAH DAUD PAREBEHA		26.560.000,00	26.560.000,00	53.120.000,00	53.120.000,00	-
184	69942939 TK KATOLIK WAIMARAMA		16.640.000,00		16.640.000,00	16.640.000,00	-
185	69942974 KB PNIEL	30.000.000,00	8.960.000,00	8.960.000,00	47.920.000,00	47.920.000,00	-
186	69944691 PAUD SUKA MAJU		7.040.000,00		7.040.000,00	7.040.000,00	-
187	69942956 PAUD DENADA		11.520.000,00	11.520.000,00	23.040.000,00	23.040.000,00	-
188	69963853 KB CINTA DAMAI		8.960.000,00		8.960.000,00	8.960.000,00	-
189	69967214 KB ANA KANURU		11.840.000,00	11.840.000,00	23.680.000,00	23.680.000,00	-
190	70034247 KB ANAK TERANG WEE MANANGA		7.680.000,00		7.680.000,00	7.680.000,00	-
191	69963875 KB TUNAS BARU 2		10.240.000,00		10.240.000,00	10.240.000,00	-
192	69942767 PAUD SINAR KASIH		14.400.000,00	14.400.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-
193	70002495 KB KEDE KEHE		14.400.000,00	14.400.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-
194	69942931 PAUD HATI NURANI		17.280.000,00	17.280.000,00	34.560.000,00	34.560.000,00	-
195	69942891 PAUD ANA MILLA		4.480.000,00	4.480.000,00	8.960.000,00	8.960.000,00	-
196	69986099 KB KALUNGA WANNO		15.040.000,00		15.040.000,00	15.040.000,00	-
197	69849887 POS PAUD EMBUN KASIH		24.960.000,00	24.960.000,00	49.920.000,00	49.920.000,00	-
198	69943473 TK KAWANGO HARI		2.240.000,00		2.240.000,00	2.240.000,00	-
199	69942948 PAUD MILLA ATE		16.000.000,00	16.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	-
200	69944688 PAUD SENANG MATA		21.440.000,00	21.440.000,00	42.880.000,00	42.880.000,00	-
201	69983675 KB ST. MATHEUS		5.120.000,00	5.120.000,00	10.240.000,00	10.240.000,00	-

No	NPSN Nama Sekolah	KINERJA	TAHAP 1	TAHAP 2	JUMLAH PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
202	69986126 KB GENERASI PAKONDA		21.440.000,00	21.440.000,00	42.880.000,00	42.880.000,00	-
203	69944687 PAUD TUMBUH KEMBANG		16.000.000,00	16.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	-
204	69942979 TK SANTA AGATA MANOLA		12.480.000,00	12.480.000,00	24.960.000,00	24.960.000,00	-
205	70034240 KB ANAK TERANG CABEKA		9.920.000,00	9.920.000,00	19.840.000,00	19.840.000,00	-
206	69942972 TK KRISTEN IMANUEL WAIMANGURA		7.360.000,00	7.360.000,00	14.720.000,00	14.720.000,00	-
207	69849888 AZ-ZAHRA 2		7.360.000,00		7.360.000,00	7.360.000,00	-
208	69943829 TK ST. DONBOSCO		11.840.000,00		11.840.000,00	11.840.000,00	-
209	69942774 PAUD BUKIT ZAITUN		16.640.000,00	16.640.000,00	33.280.000,00	33.280.000,00	-
210	69942949 TK EMBUN KASIH SATAP		10.880.000,00	10.880.000,00	21.760.000,00	21.760.000,00	-
211	69964746 KB KASIH		12.480.000,00	12.480.000,00	24.960.000,00	24.960.000,00	-
212	69942913 PAUD HARAPAN BERSAMA		3.840.000,00	3.838.200,00	7.678.200,00	7.678.200,00	-
213	69945543 PAUD DIAN		16.000.000,00	16.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	-
214	69939177 TK SARANA KASIH OMBA RADE		4.800.000,00	4.800.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	-
215	69969656 KB OLE KEHE		11.200.000,00	11.200.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	-
216	69943049 PAUD KARISMA		2.880.000,00		2.880.000,00	2.880.000,00	-
217	69958866 PAUD BUNGA MAWAR		10.240.000,00	10.240.000,00	20.480.000,00	20.480.000,00	-
218	69984611 KB KASIH SETIA PUU NAGA		7.360.000,00		7.360.000,00	7.360.000,00	-
219	70037791 KB CAHAYA PAKONDA		12.160.000,00	12.160.000,00	24.320.000,00	24.320.000,00	-
220	69986264 KB TANA NYALE		16.960.000,00	16.960.000,00	33.920.000,00	33.920.000,00	-
221	69980534 KB IMANUEL KALEMBU KANAIKA		8.000.000,00	7.840.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00	-
222	69942840 PAUD KASIH IBU		10.240.000,00		10.240.000,00	10.240.000,00	-
223	70000333 KB SARNELI		9.920.000,00	9.920.000,00	19.840.000,00	19.840.000,00	-
224	69942601 TK ST. ARNOLDUS JANSEN		18.880.000,00	18.880.000,00	37.760.000,00	37.760.000,00	-
225	69942940 PAUD ENGGE ATE		10.560.000,00	10.560.000,00	21.120.000,00	21.120.000,00	-
226	69964666 KB NANGGA MUTU		10.240.000,00	10.240.000,00	20.480.000,00	20.480.000,00	-
227	69943066 PAUD OLE ATE DUA		15.680.000,00	15.680.000,00	31.360.000,00	31.360.000,00	-

No	NPSN Nama Sekolah	KINERJA	TAHAP 1	TAHAP 2	JUMLAH PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
228	70032592 KB PENERUS BANGSA		10.560.000,00	10.560.000,00	21.120.000,00	21.120.000,00	-
229	69984062 KB SINAR KASIH		7.680.000,00		7.680.000,00	7.680.000,00	-
230	69944759 PAUD YUSUF		8.320.000,00	8.282.000,00	16.602.000,00	16.602.000,00	-
231	69942734 KB KYRIE ELEISON		12.160.000,00	12.160.000,00	24.320.000,00	24.320.000,00	-
232	69942945 PAUD BENGO PEGHE		640.000,00	640.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	-
233	69963884 KB SOLA VIDE		16.960.000,00		16.960.000,00	16.960.000,00	-
234	69950251 PAUD KASIH BERKAT		2.560.000,00		2.560.000,00	2.560.000,00	-
235	69944618 PAUD MARIA BUNDA PENOLONG		11.200.000,00		11.200.000,00	11.200.000,00	-
236	70032422 KB TUNAS BANGSA LETE LOKO		19.200.000,00	19.200.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	-
237	69942834 PAUD GLORIA		9.600.000,00	9.600.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	-
238	69984691 KB ST.BENEDIKTUS DAHA DEDE		13.760.000,00	13.760.000,00	27.520.000,00	27.520.000,00	-
239	69968683 KB TIMBU DJONA		12.160.000,00	12.160.000,00	24.320.000,00	24.320.000,00	-
240	69943603 TK STA.THERESIA TUNAS HARAPAN		48.000.000,00	48.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	-
241	P9984343 PKBM GENERASI PENERUS UMA NGAINGO		5.760.000,00		5.760.000,00	5.760.000,00	-
242	69990016 KB SILOAM GOLLU SAPI		5.120.000,00	5.120.000,00	10.240.000,00	10.240.000,00	-
243	69989087 KB SYUKUR		10.240.000,00	10.240.000,00	20.480.000,00	20.480.000,00	-
244	70040077 KB JF SANTA CAROLINA		22.400.000,00	22.400.000,00	44.800.000,00	44.800.000,00	-
245	69987895 KB SION KALEMBU WERI		14.720.000,00	14.720.000,00	29.440.000,00	29.440.000,00	-
246	69942890 PAUD ST ANDREAS		6.400.000,00	6.400.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	-
247	69942732 PAUD ANAK HARAPAN		8.640.000,00	8.294.400,00	16.934.400,00	16.934.400,00	-
248	69950229 PAUD SANTA MARIA PAKONDA WATU		24.960.000,00		24.960.000,00	24.960.000,00	-
249	70040079 KB. SANTA CAROLINE		10.560.000,00	10.560.000,00	21.120.000,00	21.120.000,00	-
250	69942950 PAUD RANDA ATE		11.840.000,00	11.840.000,00	23.680.000,00	23.680.000,00	-
251	69942885 PAUD SINAR PAGI		7.360.000,00	7.360.000,00	14.720.000,00	14.720.000,00	-
252	70041500 KB SENANG HATI BERKARYA		17.280.000,00	17.280.000,00	34.560.000,00	34.560.000,00	-
253	69977066 KB PELANGI KASIH		14.400.000,00	14.400.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-

No	NPSN Nama Sekolah	KINERJA	TAHAP 1	TAHAP 2	JUMLAH PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
254	69963665 KB ANUGRAH		960.000,00		960.000,00	960.000,00	-
255	69944632 TK ST.MARIA RATU ROSARI WAIPADDI		12.160.000,00	12.160.000,00	24.320.000,00	24.320.000,00	-
256	69942872 PAUD NARWASTU		26.880.000,00	26.880.000,00	53.760.000,00	53.760.000,00	-
257	69985266 KB APE DEDE		11.840.000,00	11.840.000,00	23.680.000,00	23.680.000,00	-
258	50304082 SMP KRISTEN WAIMANGURA		0	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-
259	50304107 SMP KRISTEN TANA MARINGI		0	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-
260	50304115 SMP SEMINARI SINAR BUANA		0	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-
261	50304127 SMP KRISTEN KARUNI		0	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-
262	50304116 SMPK ST ALOYSIUS		0	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-
263	69727865 SMPK ST.JOSEF FREINADEMETZ		0	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-
264	69895836 SMP HARAPAN		0	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-
265	P9962732 PKBM MARAPATI		17.500.000,00	4.350.000,00	21.850.000,00	21.850.000,00	-
266	P9984341 PKBM GENERASI KAMODO		26.935.000,00	15.777.600,00	42.712.600,00	42.712.600,00	-
267	P9985099 PKBM BENGO NDAHA		8.595.000,00		8.595.000,00	8.595.000,00	-
268	P9954407 PKBM EKA TANI	45.000.000,00	107.080.000,00	105.170.000,00	257.250.000,00	257.250.000,00	-
269	P9996533 PKBM MALENNA ATE		38.660.000,00	35.480.000,00	74.140.000,00	74.140.000,00	-
270	P9984344 PKBM GENERASI RAPU TATA		12.730.000,00	6.150.000,00	18.880.000,00	18.880.000,00	-
271	P9962753 PKBM SOLID		35.970.000,00	34.531.200,00	70.501.200,00	70.501.200,00	-
272	P9984345 PKBM GENERASI PENERUS BANGEDO	-	47.475.000,00		47.475.000,00	47.475.000,00	-
273	P9984441 PKBM DAWARA	45.000.000,00	55.755.000,00	51.935.000,00	152.690.000,00	152.690.000,00	-
274	P9984343 PKBM GENERASI PENERUS UMA NGAINGO		33.480.000,00	28.070.000,00	61.550.000,00	61.550.000,00	-
275	P9984340 PKBM GENERASI SATYA LESTARI		23.710.000,00	14.480.000,00	38.190.000,00	38.190.000,00	-
276	P9984342 PKBM GENERASI PENERUS WAIHA		29.435.000,00		29.435.000,00	29.435.000,00	-
TOTAL		**120.000.000,00**	**3.456.525.000,00**	**3.117.233.600,00**	**6.693.758.600,00**	**6.693.758.600,00**	**-**

LAMPIRAN 3

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

RINCIAN BELANJA DAN BELANJA TRANSFER

BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	PAGU BHR	REALISASI BHR
1	Ana Engge	Kodi	5.694.908,00	5.694.908,00
2	Ana Goka	Kodi Bangedo	5.694.908,00	5.694.908,00
3	Ana Kaka	Kodi	5.694.908,00	5.694.908,00
4	Ana Lewe	Kodi Bangedo	5.694.908,00	5.694.908,00
5	Ate Dalo	Kodi	5.694.908,00	5.694.908,00
6	Bila Cenge	Kodi Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
7	Bodo Ponda	Wewewa Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
8	Bolora	Wewewa Tengah	5.694.908,00	5.694.908,00
9	Bondo Balla	Kodi Bangedo	5.694.908,00	5.694.908,00
10	Bondo Bela	Wewewa Selatan	5.694.908,00	5.694.908,00
11	Bondo Boghila	Loura	5.694.908,00	5.694.908,00
12	Bondo Delo	Wewewa Tengah	5.694.908,00	5.694.908,00
13	Bondo Kodi	Kodi	5.694.908,00	5.694.908,00
14	Bondo Ukka	Wewewa Selatan	5.694.908,00	5.694.908,00
15	Bukambero	Kodi Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
16	Buru Deilo	Wewewa Selatan	5.694.908,00	5.694.908,00
17	Buru Kaghu	Wewewa Selatan	5.694.908,00	5.694.908,00
18	Dangga Mangu	Wewewa Timur	5.694.908,00	5.694.908,00
19	Dede Pada	Wewewa Timur	5.694.908,00	5.694.908,00
20	Delo	Wewewa Selatan	5.694.908,00	5.694.908,00
21	Delu Depa	Kodi Bangedo	5.694.908,00	5.694.908,00
22	Denduka	Wewewa Selatan	5.694.908,00	5.694.908,00
23	Dikira	Wewewa Timur	5.694.908,00	5.694.908,00
24	Dinjo	Kodi Bangedo	5.694.908,00	5.694.908,00
25	Djela Manu	Wewewa Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
26	Eka Pata	Wewewa Tengah	5.694.908,00	5.694.908,00
27	Gollu Sapi	Wewewa Tengah	5.694.908,00	5.694.908,00
28	Hameli Ate	Kodi Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
29	Hamonggo Lele	Kodi	5.694.908,00	5.694.908,00
30	Hoha Wungo	Kodi Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
31	Homba Karipit	Kodi Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
32	Homba Pare	Kodi Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
33	Homba Rande	Kodi	5.694.908,00	5.694.908,00
34	Homba Rica	Kodi	5.694.908,00	5.694.908,00
35	Kabali Dana	Wewewa Barat	5.694.908,00	5.694.908,00
36	Kadaghu Tana	Kodi Utara	5.694.908,00	5.694.908,00

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	PAGU BHR	REALISASI BHR
37	Kadi Pada	Kota Tambolaka	5.694.908,00	5.694.908,00
38	Kadi Roma	Wewewa Tengah	5.694.908,00	5.694.908,00
39	Kadi Wano	Wewewa Timur	5.694.908,00	5.694.908,00
40	Kadi Wone	Wewewa Timur	5.694.908,00	5.694.908,00
41	Kadoki Horo	Kodi	5.694.908,00	5.694.908,00
42	Kadu Eta	Kodi Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
43	Kahale	Kodi Balaghar	5.694.908,00	5.694.908,00
44	Kalaki Kambe	Wewewa Barat	5.694.908,00	5.694.908,00
45	Kalembu Kaha	Kota Tambolaka	5.694.908,00	5.694.908,00
46	Kalembu Kanaika	Wewewa Barat	5.694.908,00	5.694.908,00
47	Kalembu Ndara Mane	Wewewa Timur	5.694.908,00	5.694.908,00
48	Kalembu Weri	Wewewa Barat	5.694.908,00	5.694.908,00
49	Kalena Rongo	Kodi Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
50	Kalena Wano	Kota Tambolaka	5.694.908,00	5.694.908,00
51	Kalimbu Tillu	Wewewa Barat	5.694.908,00	5.694.908,00
52	Kalingara	Wewewa Tengah	5.694.908,00	5.694.908,00
53	Kanelu	Wewewa Tengah	5.694.908,00	5.694.908,00
54	Kapaka Madeta	Kodi	5.694.908,00	5.694.908,00
55	Karang Indah	Kodi Bangedo	5.694.908,00	5.694.908,00
56	Karuni	Loura	5.694.908,00	5.694.908,00
57	Kawango Hari	Kodi	5.694.908,00	5.694.908,00
58	Kendu Wela	Kodi Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
59	Kiku Booko	Wewewa Tengah	5.694.908,00	5.694.908,00
60	Koki	Kodi	5.694.908,00	5.694.908,00
61	Kori	Kodi Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
62	Laga Lete	Wewewa Barat	5.694.908,00	5.694.908,00
63	Lele Maya	Wewewa Timur	5.694.908,00	5.694.908,00
64	Lete Kamouna	Wewewa Timur	5.694.908,00	5.694.908,00
65	Lete Konda	Loura	5.694.908,00	5.694.908,00
66	Lete Konda Selatan	Loura	5.694.908,00	5.694.908,00
67	Lete Loko	Kodi Bangedo	5.694.908,00	5.694.908,00
68	Lete Wungana	Wewewa Tengah	5.694.908,00	5.694.908,00
69	Limbu Kembe	Kodi Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
70	Limbu Watu	Wewewa Tengah	5.694.908,00	5.694.908,00
71	Loko Kalada	Loura	5.694.908,00	5.694.908,00
72	Loko Tali	Kodi Balaghar	5.694.908,00	5.694.908,00
73	Lolo Ole	Wewewa Barat	5.694.908,00	5.694.908,00
74	Lombu	Wewewa Tengah	5.694.908,00	5.694.908,00
75	Lua Koba	Wewewa Barat	5.694.908,00	5.694.908,00
76	Magho Linyo	Kodi Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
77	Mainda Ole	Wewewa Timur	5.694.908,00	5.694.908,00
78	Mali Mada	Wewewa Utara	5.694.908,00	5.694.908,00

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	PAGU BHR	REALISASI BHR
79	Mali Iha	Kodi	5.694.908,00	5.694.908,00
80	Maliti Bondo Ate	Kodi Bangedo	5.694.908,00	5.694.908,00
81	Maliti Dari	Wewewa Timur	5.694.908,00	5.694.908,00
82	Mandungo	Wewewa Selatan	5.694.908,00	5.694.908,00
83	Mangganipi	Kodi Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
84	Manu Toghi	Kodi Bangedo	5.694.908,00	5.694.908,00
85	Mareda Kalada	Wewewa Timur	5.694.908,00	5.694.908,00
86	Marokota	Wewewa Barat	5.694.908,00	5.694.908,00
87	Mata Kapore	Kodi Bangedo	5.694.908,00	5.694.908,00
88	Mata Loko	Wewewa Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
89	Mata Lombu	Wewewa Tengah	5.694.908,00	5.694.908,00
90	Mata Pyawu	Wewewa Timur	5.694.908,00	5.694.908,00
91	Mata Wee Karoro	Wewewa Tengah	5.694.908,00	5.694.908,00
92	Mata Wee Lima	Wewewa Timur	5.694.908,00	5.694.908,00
93	Mawo Dana	Wewewa Timur	5.694.908,00	5.694.908,00
94	Mawo Maliti	Wewewa Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
95	Menne Ate	Wewewa Barat	5.694.908,00	5.694.908,00
96	Mere Kehe	Kodi Bangedo	5.694.908,00	5.694.908,00
97	Mereda Wuni	Wewewa Tengah	5.694.908,00	5.694.908,00
98	Milla Ate	Wewewa Selatan	5.694.908,00	5.694.908,00
99	Moro Manduyo	Kodi Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
100	Nangga Mutu	Kodi Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
101	Noha	Kodi Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
102	Nyura Lele	Wewewa Timur	5.694.908,00	5.694.908,00
103	Odi Paurata	Wewewa Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
104	Ole Ate	Kodi	5.694.908,00	5.694.908,00
105	Omba Rade	Wewewa Tengah	5.694.908,00	5.694.908,00
106	Onggol	Kodi	5.694.908,00	5.694.908,00
107	Pada Eweta	Wewewa Timur	5.694.908,00	5.694.908,00
108	Pandua Tana	Wewewa Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
109	Panenggo Ede	Kodi Balaghar	5.694.908,00	5.694.908,00
110	Payola Umbu	Loura	5.694.908,00	5.694.908,00
111	Pero	Wewewa Barat	5.694.908,00	5.694.908,00
112	Pero Batang	Kodi	5.694.908,00	5.694.908,00
113	Pero Konda	Kodi	5.694.908,00	5.694.908,00
114	Pogo Tena	Loura	5.694.908,00	5.694.908,00
115	Puu Potto	Wewewa Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
116	Raba Ege	Wewewa Barat	5.694.908,00	5.694.908,00
117	Rada Loko	Kodi Bangedo	5.694.908,00	5.694.908,00
118	Rada Malando	Kodi Bangedo	5.694.908,00	5.694.908,00
119	Rada Mata	Kota Tambolaka	5.694.908,00	5.694.908,00
120	Rama Dana	Loura	5.694.908,00	5.694.908,00

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	PAGU BHR	REALISASI BHR
121	Reda Pada	Wewewa Barat	5.694.908,00	5.694.908,00
122	Reda Wano	Wewewa Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
123	Rita Baru	Wewewa Selatan	5.694.908,00	5.694.908,00
124	Sangu Ate	Wewewa Barat	5.694.908,00	5.694.908,00
125	Tana Mete	Kodi Bangedo	5.694.908,00	5.694.908,00
126	Tanggaba	Wewewa Tengah	5.694.908,00	5.694.908,00
127	Tanjung Karoso	Kodi	5.694.908,00	5.694.908,00
128	Tarra Mata	Wewewa Tengah	5.694.908,00	5.694.908,00
129	Tawo Rara	Wewewa Barat	5.694.908,00	5.694.908,00
130	Tema Tana	Wewewa Timur	5.694.908,00	5.694.908,00
131	Tena Teke	Wewewa Selatan	5.694.908,00	5.694.908,00
132	Totok	Loura	5.694.908,00	5.694.908,00
133	Umbu Ngedo	Kodi Bangedo	5.694.908,00	5.694.908,00
134	Umbu Wangu	Wewewa Selatan	5.694.908,00	5.694.908,00
135	Waiha	Kodi Balaghar	5.694.908,00	5.694.908,00
136	Waiholo	Kodi Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
137	Waikadada	Kodi Bangedo	5.694.908,00	5.694.908,00
138	Waikaninyo	Kodi Bangedo	5.694.908,00	5.694.908,00
139	Waikarara	Kodi Balaghar	5.694.908,00	5.694.908,00
140	Wailabubur	Kodi Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
141	Wailangira	Kodi Balaghar	5.694.908,00	5.694.908,00
142	Waimakaha	Kodi Bangedo	5.694.908,00	5.694.908,00
143	Waimangura	Wewewa Barat	5.694.908,00	5.694.908,00
144	Waimaringi	Kodi Bangedo	5.694.908,00	5.694.908,00
145	Wainyapu	Kodi Balaghar	5.694.908,00	5.694.908,00
146	Waipaddi	Kodi Bangedo	5.694.908,00	5.694.908,00
147	Waipakolo	Kodi Balaghar	5.694.908,00	5.694.908,00
148	Waitaru	Kodi Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
149	Wali Ate	Wewewa Barat	5.694.908,00	5.694.908,00
150	Walla Ndimu	Kodi Bangedo	5.694.908,00	5.694.908,00
151	Wano Talla	Wewewa Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
152	Watu Kawula	Kota Tambolaka	5.694.908,00	5.694.908,00
153	Watu Labara	Wewewa Barat	5.694.908,00	5.694.908,00
154	Watu Wona	Kodi	5.694.908,00	5.694.908,00
155	Wee Baghe	Wewewa Selatan	5.694.908,00	5.694.908,00
156	Wee Kambala	Loura	5.694.908,00	5.694.908,00
157	Wee Kokora	Wewewa Tengah	5.694.908,00	5.694.908,00
158	Wee Kombaka	Wewewa Barat	5.694.908,00	5.694.908,00
159	Wee Kura	Wewewa Barat	5.694.908,00	5.694.908,00
160	Wee Lima	Wewewa Timur	5.694.908,00	5.694.908,00
161	Wee Limbu	Wewewa Timur	5.694.908,00	5.694.908,00
162	Wee Londa	Kota Tambolaka	5.694.908,00	5.694.908,00

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	PAGU BHR	REALISASI BHR
163	Wee Mananda	Loura	5.694.908,00	5.694.908,00
164	Wee Namba	Wewewa Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
165	Wee Paboba	Wewewa Utara	5.694.941,00	5.694.908,00
166	Wee Pangali	Kota Tambolaka	5.694.908,00	5.694.908,00
167	Wee Patando	Wewewa Tengah	5.694.908,00	5.694.908,00
168	Wee Rame	Wewewa Tengah	5.694.908,00	5.694.908,00
169	Wee Rena	Kota Tambolaka	5.694.908,00	5.694.908,00
170	Wee Wella	Kodi Utara	5.694.908,00	5.694.908,00
171	Wee Wulla	Wewewa Selatan	5.694.908,00	5.694.908,00
172	Weri Lolo	Wewewa Selatan	5.694.908,00	5.694.908,00
173	Wura Homba	Kodi	5.694.981,00	5.694.908,00
JUMLAH			**985.219.190,00**	**985.219.084,00**

LAMPIRAN 4

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

RINCIAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE DESA KEPADA SETIAP PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	PAGU DD	REALISASI DD	PAGU ADD	REALISASI ADD
1	Ana Engge	Kodi	898.870.000,00	898.870.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
2	Ana Goka	Kodi Bangedo	1.021.140.000,00	1.021.140.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
3	Ana Kaka	Kodi	797.857.000,00	797.857.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
4	Ana Lewe	Kodi Bangedo	1.034.638.000,00	1.034.638.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
5	Ate Dalo	Kodi	1.126.327.000,00	1.126.327.000,00	365.284.231,00	365.284.231,00
6	Bila Cenge	Kodi Utara	1.370.972.000,00	1.370.972.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
7	Bodo Ponda	Wewewa Utara	1.049.426.000,00	1.049.426.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
8	Bolora	Wewewa Tengah	1.063.624.000,00	1.063.624.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
9	Bondo Balla	Kodi Bangedo	1.165.295.000,00	1.165.295.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
10	Bondo Bela	Wewewa Selatan	934.451.000,00	934.451.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
11	Bondo Boghila	Loura	879.341.000,00	879.341.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
12	Bondo Delo	Wewewa Tengah	944.875.000,00	944.875.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
13	Bondo Kodi	Kodi	1.026.982.000,00	1.026.982.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
14	Bondo Ukka	Wewewa Selatan	964.483.000,00	964.483.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
15	Bukambero	Kodi Utara	1.494.826.000,00	1.494.826.000,00	365.284.231,00	365.284.231,00
16	Buru Deilo	Wewewa Selatan	1.185.891.000,00	1.185.891.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
17	Buru Kaghu	Wewewa Selatan	1.059.984.000,00	1.059.984.000,00	365.284.231,00	365.284.231,00
18	Dangga Mangu	Wewewa Timur	1.142.429.000,00	1.142.429.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
19	Dede Pada	Wewewa Timur	807.033.000,00	807.033.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	PAGU DD	REALISASI DD	PAGU ADD	REALISASI ADD
20	Delo	Wewewa Selatan	1.054.484.000,00	1.054.484.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
21	Delu Depa	Kodi Bangedo	940.154.000,00	940.154.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
22	Denduka	Wewewa Selatan	1.074.517.000,00	1.074.517.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
23	Dikira	Wewewa Timur	981.966.000,00	981.966.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
24	Dinjo	Kodi Bangedo	1.043.483.000,00	1.043.483.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
25	Djela Manu	Wewewa Utara	1.090.857.000,00	1.090.857.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
26	Eka Pata	Wewewa Tengah	1.054.806.000,00	1.054.806.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
27	Gollu Sapi	Wewewa Tengah	956.429.000,00	956.429.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
28	Hameli Ate	Kodi Utara	1.511.664.000,00	1.511.664.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
29	Hamonggo Lele	Kodi	1.068.160.000,00	1.068.160.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
30	Hoha Wungo	Kodi Utara	1.260.769.000,00	1.260.769.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
31	Homba Karipit	Kodi Utara	1.038.474.000,00	1.038.474.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
32	Homba Pare	Kodi Utara	1.369.613.000,00	1.369.613.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
33	Homba Rande	Kodi	1.123.034.000,00	1.123.034.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
34	Homba Rica	Kodi	919.612.000,00	919.612.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
35	Kabali Dana	Wewewa Barat	871.896.000,00	871.896.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
36	Kadaghu Tana	Kodi Utara	1.517.636.000,00	1.517.636.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
37	Kadi Pada	Kota Tambolaka	998.635.000,00	998.635.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
38	Kadi Roma	Wewewa Tengah	747.558.000,00	747.558.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
39	Kadi Wano	Wewewa Timur	807.485.000,00	807.485.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
40	Kadi Wone	Wewewa Timur	983.261.000,00	983.261.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
41	Kadoki Horo	Kodi	1.002.456.000,00	1.002.456.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
42	Kadu Eta	Kodi Utara	1.297.172.000,00	1.297.172.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
43	Kahale	Kodi Balaghar	1.167.435.000,00	1.167.435.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
44	Kalaki Kambe	Wewewa Barat	1.124.483.000,00	1.124.483.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	PAGU DD	REALISASI DD	PAGU ADD	REALISASI ADD
45	Kalembu Kaha	Kota Tambolaka	1.364.854.000,00	1.364.854.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
46	Kalembu Kanaika	Wewewa Barat	860.055.000,00	860.055.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
47	Kalembu Ndara Mane	Wewewa Timur	742.136.000,00	742.136.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
48	Kalembu Weri	Wewewa Barat	1.015.304.000,00	1.015.304.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
49	Kalena Rongo	Kodi Utara	1.494.450.000,00	1.494.450.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
50	Kalena Wano	Kota Tambolaka	754.337.000,00	754.337.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
51	Kalimbu Tillu	Wewewa Barat	989.910.000,00	989.910.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
52	Kalingara	Wewewa Tengah	1.069.991.000,00	1.069.991.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
53	Kanelu	Wewewa Tengah	969.129.000,00	969.129.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
54	Kapaka Madeta	Kodi	1.134.815.000,00	1.134.815.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
55	Karang Indah	Kodi Bangedo	1.155.501.000,00	1.155.501.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
56	Karuni	Loura	1.127.893.000,00	1.127.893.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
57	Kawango Hari	Kodi	1.114.291.000,00	1.114.291.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
58	Kendu Wela	Kodi Utara	1.641.426.000,00	1.641.426.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
59	Kiku Booko	Wewewa Tengah	978.873.000,00	978.873.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
60	Koki	Kodi	1.157.114.000,00	1.157.114.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
61	Kori	Kodi Utara	1.503.543.000,00	1.503.543.000,00	385.284.231,00	385.284.231,00
62	Laga Lete	Wewewa Barat	843.733.000,00	843.733.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
63	Lele Maya	Wewewa Timur	833.470.000,00	833.470.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
64	Lete Kamouna	Wewewa Timur	861.677.000,00	861.677.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
65	Lete Konda	Loura	1.012.159.000,00	1.012.159.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
66	Lete Konda Selatan	Loura	740.158.000,00	740.158.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
67	Lete Loko	Kodi Bangedo	1.134.571.000,00	1.134.571.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
68	Lete Wungana	Wewewa Tengah	992.434.000,00	992.434.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
69	Limbu Kembe	Kodi Utara	1.199.960.000,00	1.199.960.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	PAGU DD	REALISASI DD	PAGU ADD	REALISASI ADD
70	Limbu Watu	Wewewa Tengah	758.495.000,00	758.495.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
71	Loko Kalada	Loura	1.087.870.000,00	1.087.870.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
72	Loko Tali	Kodi Balaghar	1.100.104.000,00	1.100.104.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
73	Lolo Ole	Wewewa Barat	819.703.000,00	819.703.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
74	Lombu	Wewewa Tengah	1.110.536.000,00	1.110.536.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
75	Lua Koba	Wewewa Barat	1.144.169.000,00	1.144.169.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
76	Magho Linyo	Kodi Utara	1.380.020.000,00	1.380.020.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
77	Mainda Ole	Wewewa Timur	853.589.000,00	853.589.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
78	Mali Mada	Wewewa Utara	945.820.000,00	945.820.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
79	Mali Iha	Kodi	1.112.555.000,00	1.112.555.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
80	Maliti Bondo Ate	Kodi Bangedo	1.002.604.000,00	1.002.604.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
81	Maliti Dari	Wewewa Timur	936.647.000,00	936.647.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
82	Mandungo	Wewewa Selatan	830.722.000,00	830.722.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
83	Mangganipi	Kodi Utara	1.645.314.000,00	1.645.314.000,00	365.284.231,00	365.284.231,00
84	Manu Toghi	Kodi Bangedo	1.122.384.000,00	1.122.384.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
85	Mareda Kalada	Wewewa Timur	956.466.000,00	956.466.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
86	Marokota	Wewewa Barat	1.076.501.000,00	1.076.501.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
87	Mata Kapore	Kodi Bangedo	1.263.066.000,00	1.263.066.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
88	Mata Loko	Wewewa Utara	908.333.000,00	908.333.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
89	Mata Lombu	Wewewa Tengah	1.090.670.000,00	1.090.670.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
90	Mata Pyawu	Wewewa Timur	833.436.000,00	833.436.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
91	Mata Wee Karoro	Wewewa Tengah	902.699.000,00	902.699.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
92	Mata Wee Lima	Wewewa Timur	823.207.000,00	823.207.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
93	Mawo Dana	Wewewa Timur	977.035.000,00	977.035.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
94	Mawo Maliti	Wewewa Utara	1.065.010.000,00	1.065.010.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	PAGU DD	REALISASI DD	PAGU ADD	REALISASI ADD
95	Menne Ate	Wewewa Barat	930.705.000,00	930.705.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
96	Mere Kehe	Kodi Bangedo	1.051.750.000,00	1.051.750.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
97	Mereda Wuni	Wewewa Tengah	957.989.000,00	957.989.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
98	Milla Ate	Wewewa Selatan	920.671.000,00	920.671.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
99	Moro Manduyo	Kodi Utara	1.232.770.000,00	1.232.770.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
100	Nangga Mutu	Kodi Utara	1.005.308.000,00	1.005.308.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
101	Noha	Kodi Utara	1.460.554.000,00	1.460.554.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
102	Nyura Lele	Wewewa Timur	744.623.000,00	744.623.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
103	Odi Paurata	Wewewa Utara	1.098.722.000,00	1.098.722.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
104	Ole Ate	Kodi	1.155.394.000,00	1.155.394.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
105	Omba Rade	Wewewa Tengah	997.397.000,00	997.397.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
106	Onggol	Kodi	1.298.955.000,00	1.298.955.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
107	Pada Eweta	Wewewa Timur	1.075.872.000,00	1.075.872.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
108	Pandua Tana	Wewewa Utara	1.048.308.000,00	1.048.308.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
109	Panenggo Ede	Kodi Balaghar	993.118.000,00	993.118.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
110	Payola Umbu	Loura	930.196.000,00	930.196.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
111	Pero	Wewewa Barat	952.505.000,00	952.505.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
112	Pero Batang	Kodi	1.087.274.000,00	1.087.274.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
113	Pero Konda	Kodi	686.069.000,00	686.069.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
114	Pogo Tena	Loura	1.137.964.000,00	1.137.964.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
115	Puu Potto	Wewewa Utara	929.031.000,00	929.031.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
116	Raba Ege	Wewewa Barat	1.147.675.000,00	1.147.675.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
117	Rada Loko	Kodi Bangedo	1.304.902.000,00	1.304.902.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
118	Rada Malando	Kodi Bangedo	999.082.000,00	999.082.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
119	Rada Mata	Kota Tambolaka	1.252.584.000,00	1.252.584.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	PAGU DD	REALISASI DD	PAGU ADD	REALISASI ADD
120	Rama Dana	Loura	1.035.419.000,00	1.035.419.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
121	Reda Pada	Wewewa Barat	995.288.000,00	995.288.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
122	Reda Wano	Wewewa Utara	1.146.529.000,00	1.146.529.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
123	Rita Baru	Wewewa Selatan	1.042.072.000,00	1.042.072.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
124	Sangu Ate	Wewewa Barat	836.690.000,00	836.690.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
125	Tana Mete	Kodi Bangedo	1.126.031.000,00	1.126.031.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
126	Tanggaba	Wewewa Tengah	998.494.000,00	998.494.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
127	Tanjung Karoso	Kodi	1.021.487.000,00	1.021.487.000,00	365.284.231,00	365.284.231,00
128	Tarra Mata	Wewewa Tengah	1.007.753.000,00	1.007.753.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
129	Tawo Rara	Wewewa Barat	1.096.993.000,00	1.096.993.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
130	Tema Tana	Wewewa Timur	927.695.000,00	927.695.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
131	Tena Teke	Wewewa Selatan	1.168.257.000,00	1.168.257.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
132	Totok	Loura	1.176.764.000,00	1.176.764.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
133	Umbu Ngedo	Kodi Bangedo	1.163.522.000,00	1.163.522.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
134	Umbu Wangu	Wewewa Selatan	1.009.047.000,00	1.009.047.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
135	Waiha	Kodi Balaghar	1.418.911.000,00	1.418.911.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
136	Waiholo	Kodi Utara	1.859.681.000,00	1.859.681.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
137	Waikadada	Kodi Bangedo	987.739.000,00	987.739.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
138	Waikaninyo	Kodi Bangedo	1.079.813.000,00	1.079.813.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
139	Waikarara	Kodi Balaghar	1.282.620.000,00	1.282.620.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
140	Wailabubur	Kodi Utara	1.275.881.000,00	1.275.881.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
141	Wailangira	Kodi Balaghar	1.258.058.000,00	1.258.058.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
142	Waimakaha	Kodi Bangedo	1.247.703.000,00	1.247.703.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
143	Waimangura	Wewewa Barat	945.116.000,00	945.116.000,00	365.284.231,00	365.284.231,00
144	Waimaringi	Kodi Bangedo	962.304.000,00	962.304.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	PAGU DD	REALISASI DD	PAGU ADD	REALISASI ADD
145	Wainyapu	Kodi Balaghar	1.378.833.000,00	1.378.833.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
146	Waipaddi	Kodi Bangedo	1.015.762.000,00	1.015.762.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
147	Waipakolo	Kodi Balaghar	1.198.814.000,00	1.198.814.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
148	Waitaru	Kodi Utara	1.200.794.000,00	1.200.794.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
149	Wali Ate	Wewewa Barat	1.049.399.000,00	1.049.399.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
150	Walla Ndimu	Kodi Bangedo	898.705.000,00	898.705.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
151	Wano Talla	Wewewa Utara	1.158.798.000,00	1.158.798.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
152	Watu Kawula	Kota Tambolaka	1.098.290.000,00	1.098.290.000,00	365.284.231,00	365.284.231,00
153	Watu Labara	Wewewa Barat	1.071.158.000,00	1.071.158.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
154	Watu Wona	Kodi	1.077.161.000,00	1.077.161.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
155	Wee Baghe	Wewewa Selatan	1.108.061.000,00	1.108.061.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
156	Wee Kambala	Loura	917.534.000,00	917.534.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
157	Wee Kokora	Wewewa Tengah	971.598.000,00	971.598.000,00	365.284.231,00	365.284.231,00
158	Wee Kombaka	Wewewa Barat	948.439.000,00	948.439.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
159	Wee Kura	Wewewa Barat	735.986.000,00	735.986.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
160	Wee Lima	Wewewa Timur	853.615.000,00	853.615.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
161	Wee Limbu	Wewewa Timur	1.253.271.000,00	1.253.271.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
162	Wee Londa	Kota Tambolaka	1.081.353.000,00	1.081.353.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
163	Wee Mananda	Loura	1.197.165.000,00	1.197.165.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
164	Wee Namba	Wewewa Utara	994.334.000,00	994.334.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
165	Wee Paboba	Wewewa Utara	1.137.679.000,00	1.137.679.000,00	325.284.268,00	325.284.231,00
166	Wee Pangali	Kota Tambolaka	970.149.000,00	970.149.000,00	365.284.231,00	365.284.231,00
167	Wee Patando	Wewewa Tengah	1.066.518.000,00	1.066.518.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
168	Wee Rame	Wewewa Tengah	976.186.000,00	976.186.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
169	Wee Rena	Kota Tambolaka	1.222.551.000,00	1.222.551.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	PAGU DD	REALISASI DD	PAGU ADD	REALISASI ADD
170	Wee Wella	Kodi Utara	1.093.515.000,00	1.093.515.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
171	Wee Wulla	Wewewa Selatan	836.886.000,00	836.886.000,00	325.284.231,00	325.284.231,00
172	Weri Lolo	Wewewa Selatan	984.168.000,00	984.168.000,00	345.284.231,00	345.284.231,00
173	Wura Homba	Kodi	1.229.708.000,00	1.229.708.000,00	365.284.231,00	365.284.231,00
JUMLAH			**184.608.937.000,00**	**184.608.937.000,00**	**57.814.172.000,00**	**57.814.171.963,00**

LAMPIRAN 5

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

RINCIAN PENDAPATAN, BELANJA DAN SALDO KAS DANA BOS DI SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN ANGGARAN 2024

1. SEKOLAH DASAR NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	TOTAL PENDAPATAN	SETORAN TGR TH 2023 dan JAGIR	BOSKIN 2024	TOTAL BARJAS	TOTAL PM	TOTAL ATL	TOTAL JIJ	TOTAL BELANJA	JAGIR YANG SUDAH PBK	SALDO
1	69903002 SD NEGERI BATTA		170.050.000,00	1.500.000,00		156.550.000,00	11.000.000,00	2.500.000,00	-	170.050.000,00		1.500.000,00
2	50309491 SD NEGERI BONDO KAWANGO		167.200.000,00	1.500.000,00		162.800.000,00	-	4.400.000,00	-	167.200.000,00		1.500.000,00
3	50304193 SD NEGERI BONGGOR		312.550.000,00	1.700.000,00		289.550.000,00	17.000.000,00	6.000.000,00	-	312.550.000,00		1.700.000,00
4	50304185 SD NEGERI HOMBARICA		244.150.000,00	1.600.000,00	22.500.000,00	239.150.000,00	19.500.000,00	8.000.000,00	-	266.650.000,00		1.600.000,00
5	50304213 SD NEGERI KALEMBU LETENA		176.700.000,00	700.000,00		158.700.000,00	18.000.000,00	-	-	176.700.000,00		700.000,00
6	50304219 SD NEGERI KARARA TOMBO		323.000.000,00	1.500.000,00		304.000.000,00	19.000.000,00	-	-	323.000.000,00		1.500.000,00
7	50304220 SD NEGERI KAROSO		322.050.000,00	2.300.000,00		284.050.000,00	28.000.000,00	10.000.000,00	-	322.050.000,00		2.300.000,00
8	50309498 SD NEGERI PABONDO DIMU		222.300.000,00			208.300.000,00	14.000.000,00	-	-	222.300.000,00		-
9	50304139 SD NEGERI PATUKU		289.750.000,00			269.118.000,00	16.750.000,00	3.882.000,00	-	289.750.000,00		-
10	50304152 SD NEGERI PEHA		264.100.000,00			249.100.000,00	15.000.000,00	-	-	264.100.000,00		-
11	69879009 SD NEGERI WAI CUNGA		149.150.000,00	1.500.000,00		140.150.000,00	9.000.000,00	-	-	149.150.000,00		1.500.000,00
12	50309566 SD NEGERI WERY		199.500.000,00			187.750.000,00	11.750.000,00	-	-	199.500.000,00		-
13	50304210 SDN NEGERI KAWANGO HARI		320.150.000,00			290.144.000,00	13.700.000,00	16.306.000,00	-	320.150.000,00		-
14	69733862 SD NEGERI BATU KARANG		154.850.000,00		22.500.000,00	159.850.000,00	9.500.000,00	8.000.000,00	-	177.350.000,00		-
15	69972402 SD NEGERI BAHABU		192.850.000,00			181.850.000,00	11.000.000,00	-	-	192.850.000,00		-
16	69903004 SD NEGERI HENDE MONNO		130.150.000,00			112.796.000,00	7.000.000,00	10.354.000,00	-	130.150.000,00		-
17	69888785 SD NEGERI KALEMBU PALOLO		122.550.000,00			107.550.000,00	10.000.000,00	-	5.000.000,00	122.550.000,00		-
18	69888763 SD NEGERI KALOGHA		227.050.000,00	1.500.000,00		227.050.000,00	-	-	-	227.050.000,00		1.500.000,00
19	50309517 SD NEGERI KERE PAMBA		235.600.000,00	1.500.000,00		196.141.500,00	19.458.500,00	20.000.000,00	-	235.600.000,00		1.500.000,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	TOTAL PENDAPATAN	SETORAN TGR TH 2023 dan JAGIR	BOSKIN 2024	TOTAL BARJAS	TOTAL PM	TOTAL ATL	TOTAL JIJ	TOTAL BELANJA	JAGIR YANG SUDAH PBK	SALDO
20	69727501 SD NEGERI PANENGGO EDE I		279.300.000,00	1.840.000,00		243.884.000,00	26.000.000,00	9.416.000,00	-	279.300.000,00		1.840.000,00
21	69787660 SD NEGERI PANENGGO EDE II		155.800.000,00			139.036.500,00	6.000.000,00	10.763.500,00	-	155.800.000,00		-
22	69880819 SD NEGERI RADA KODI		169.100.000,00			163.100.000,00	-	6.000.000,00	-	169.100.000,00		-
23	50309568 SD NEGERI WIKICO RONGO		422.750.000,00	1.500.000,00		356.250.000,00	61.500.000,00	5.000.000,00	-	422.750.000,00		1.500.000,00
24	69733863 SD NEGERI RADA GHALLA		263.150.000,00	1.500.000,00		247.265.000,00	10.000.000,00	5.885.000,00	-	263.150.000,00		1.500.000,00
25	70031223 SD NEGERI PARE KARABU		114.000.000,00	52.580,58		100.916.000,00	2.200.000,00	10.884.000,00	-	114.000.000,00		52.580,58
26	70031226 SD NEGERI KEDDE KEHE		54.150.000,00	14.260,86		44.150.000,00	10.000.000,00	-	-	54.150.000,00		14.260,86
27	70031227 SD NEGERI BALING		132.050.000,00			112.300.000,00	19.750.000,00	-	-	132.050.000,00		-
28	50309502 SD NEGERI WAI LANGIRA		226.100.000,00			200.660.000,00	21.000.000,00	4.440.000,00	-	226.100.000,00		-
29	50304136 SD INPRES PAGHOHI		244.150.000,00			228.700.000,00	10.450.000,00	5.000.000,00	-	244.150.000,00		-
30	50309490 SD NEGERI BALLA MORO		483.550.000,00	800.000,00		460.134.000,00	14.000.000,00	9.416.000,00	-	483.550.000,00		800.000,00
31	50300886 SD NEGERI BILLA		124.450.000,00	2.100.000,00		114.450.000,00	10.000.000,00	-	-	124.450.000,00		2.100.000,00
32	50304186 SD NEGERI HOMBA TANA	23.000,00	111.919.500,00			101.919.500,00	-	10.000.000,00	-	111.919.500,00		23.000,00
33	69965562 SD NEGERI KAREKA DARA		82.650.000,00			68.150.000,00	9.500.000,00	5.000.000,00	-	82.650.000,00		-
34	69970370 SD NEGERI WAIHARI		72.200.000,00			71.200.000,00	-	1.000.000,00	-	72.200.000,00		-
35	69970371 SD NEGERI WAIMALALA		150.100.000,00			127.585.000,00	12.000.000,00	10.515.000,00	-	150.100.000,00		-
36	69968140 SD NEGERI WAIKABALA	25.365.000,00	77.900.000,00			72.400.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	-	77.900.000,00		25.365.000,00
37	69727472 SD NEGERI DAHA WALU		169.100.000,00	1.500.000,00	22.500.000,00	169.100.000,00	13.200.000,00	9.300.000,00	-	191.600.000,00		1.500.000,00
38	69959588 SD NEGERI GHOMBOL		172.900.000,00	1.500.000,00		159.900.000,00	13.000.000,00	-	-	172.900.000,00		1.500.000,00
39	50304182 SD NEGERI HAMELI		332.500.000,00			303.950.000,00	18.550.000,00	10.000.000,00	-	332.500.000,00		-
40	69879004 SD NEGERI HOMBA PARE		208.050.000,00			191.050.000,00	17.000.000,00	-	-	208.050.000,00		-
41	69727473 SD NEGERI IKIT		142.500.000,00			139.500.000,00	-	-	3.000.000,00	142.500.000,00		-
42	69727478 SD NEGERI JAHA DUKKA		123.500.000,00	2.300.000,00		123.500.000,00	-	-	-	123.500.000,00		2.300.000,00
43	50304200 SD NEGERI KADIMBIL	8.100.000,00	102.100.000,00	8.008.097,00		107.200.000,00	3.000.000,00	-	-	110.200.000,00		8.008.097,00
44	69876129 SD NEGERI KALEMBU DANGA		234.650.000,00	1.500.000,00		214.650.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	234.650.000,00		1.500.000,00
45	69959965 SD NEGERI KANINYO		137.750.000,00	1.500.000,00		116.285.500,00	19.300.000,00	2.164.500,00	-	137.750.000,00		1.500.000,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	TOTAL PENDAPATAN	SETORAN TGR TH 2023 dan JAGIR	BOSKIN 2024	TOTAL BARJAS	TOTAL PM	TOTAL ATL	TOTAL JIJ	TOTAL BELANJA	JAGIR YANG SUDAH PBK	SALDO
46	50304218 SD NEGERI KAPUNGE TANA		162.450.000,00	1.400.000,00		149.324.000,00	10.000.000,00	3.126.000,00	-	162.450.000,00		1.400.000,00
47	69733861 SD NEGERI KARENDI		174.800.000,00			149.795.100,00	16.500.000,00	4.504.900,00	4.000.000,00	174.800.000,00		-
48	50304201 SD NEGERI KENDU WELA		258.398.000,00	1.150.000,00		245.398.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	-	258.398.000,00		1.150.000,00
49	50304204 SD NEGERI LAIKARENGA		243.200.000,00			218.865.900,00	20.100.000,00	4.234.100,00	-	243.200.000,00		-
50	69879006 SD NEGERI LARA DIMU	39.000,00	103.550.000,00	1.500.000,00	22.500.000,00	98.550.000,00	19.500.000,00	8.000.000,00	-	126.050.000,00		1.539.000,00
51	50304208 SD NEGERI LIANGO MALAGHO		215.650.000,00	1.500.000,00		209.650.000,00	6.000.000,00	-	-	215.650.000,00		1.500.000,00
52	69879007 SD NEGERI LORRO INDA BODE		174.800.000,00	1.500.000,00		152.800.000,00	22.000.000,00	-	-	174.800.000,00		1.500.000,00
53	50304144 SD NEGERI MAGHO LINYO		261.250.000,00	1.500.000,00		247.850.000,00	7.400.000,00	6.000.000,00	-	261.250.000,00		1.500.000,00
54	70031225 SD NEGERI MANU DEDE		123.500.000,00	11.556,17		107.789.000,00	12.600.000,00	3.111.000,00	-	123.500.000,00		11.556,17
55	69727677 SD NEGERI MORO MANDUYO	3.800.000,00	272.650.000,00	1.500.000,00		259.650.000,00	10.000.000,00	-	-	269.650.000,00		8.300.000,00
56	50304132 SD NEGERI NOHA		189.050.000,00	600.000,00	22.500.000,00	191.050.000,00	9.500.000,00	11.000.000,00	-	211.550.000,00		600.000,00
57	69959531 SD NEGERI REDA METER		171.950.000,00			154.950.000,00	14.000.000,00	3.000.000,00	-	171.950.000,00		-
58	69959532 SD NEGERI UMA RIPI		133.000.000,00			133.000.000,00	-	-	-	133.000.000,00		-
59	50304089 SD NEGERI WAIHOLO		261.250.000,00	1.500.000,00		247.614.000,00	8.636.000,00	5.000.000,00	-	261.250.000,00		1.500.000,00
60	69879010 SD NEGERI WAIKALIMBU		213.750.000,00			184.498.000,00	23.500.000,00	5.752.000,00	-	213.750.000,00		-
61	69902992 SD NEGERI WERI KADU		82.650.000,00			69.635.000,00	10.000.000,00	2.520.000,00	-	82.155.000,00		495.000,00
62	50304090 SD NEGERI WAIKARYA		281.200.000,00	1.500.000,00		264.285.500,00	16.914.500,00	-	-	281.200.000,00		1.500.000,00
63	50309501 SD NEGERI WAIBORO	165.798,00	246.050.000,00			223.050.000,00	13.000.000,00	-	-	236.050.000,00		10.165.798,00
64	50309494 SD NEGERI KARARA		114.475.000,00			114.475.000,00	-	-	-	114.475.000,00		-
65	50305177 SD NEGERI LOKOKAKI		188.100.000,00	1.500.000,00		177.120.000,00	1.100.000,00	9.880.000,00	-	188.100.000,00		1.500.000,00
66	50304154 SD NEGERI POGO LEDE		351.500.000,00			296.000.000,00	55.500.000,00	-	-	351.500.000,00		-
67	69727475 SD NEGERI WAIKELO		165.290.000,00			156.666.300,00	3.750.000,00	4.873.700,00	-	165.290.000,00		-
68	69888762 SD NEGERI WATU TAKULA		155.800.000,00			151.061.000,00	-	4.739.000,00	-	155.800.000,00		-
69	50305173 SD NEGERI WEE TABULA II	566.360,00	211.850.000,00	1.500.000,00	45.000.000,00	233.350.000,00	9.500.000,00	14.000.000,00	-	256.850.000,00		2.066.360,00
70	50304166 SD NEGERI POMA		386.650.000,00	1.800.000,00		376.900.000,00	9.750.000,00	-	-	386.650.000,00		1.800.000,00
71	50304179 SD NEGERI GOKATA		143.450.000,00		22.500.000,00	148.450.000,00	9.500.000,00	8.000.000,00	-	165.950.000,00		-

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	TOTAL PENDAPATAN	SETORAN TGR TH 2023 dan JAGIR	BOSKIN 2024	TOTAL BARJAS	TOTAL PM	TOTAL ATL	TOTAL JIJ	TOTAL BELANJA	JAGIR YANG SUDAH PBK	SALDO
72	69733864 SD NEGERI KADULA		105.450.000,00	2.100.000,00		100.412.000,00	-	5.038.000,00	-	105.450.000,00		2.100.000,00
73	50303982 SD NEGERI KATEWEL		165.300.000,00			147.133.800,00	14.000.000,00	4.166.200,00	-	165.300.000,00		-
74	69902990 SD NEGERI KAWONA		71.171.035,00	35		70.171.035,00	-	1.000.000,00	-	71.171.035,00		35
75	70005682 SD NEGERI KOMI KATTO	645,18	87.400.000,00	1.500.000,00		76.120.200,00	8.000.000,00	3.279.800,00	-	87.400.000,00	645,18	1.500.000,00
76	69902994 SD NEGERI LANGATA		46.550.000,00	800.000,00		44.314.000,00	-	2.236.000,00	-	46.550.000,00		800.000,00
77	50309495 SD NEGERI LEDO NGARA		62.700.000,00			51.552.500,00	10.250.000,00	897.500,00	-	62.700.000,00		-
78	69902996 SD NEGERI LOKO KALADA		60.800.000,00			46.473.800,00	12.250.000,00	2.076.200,00	-	60.800.000,00		-
79	50304209 SD NEGERI LOKO LAMATA		143.450.000,00	1.500.000,00		133.650.000,00	5.800.000,00	4.000.000,00	-	143.450.000,00		1.500.000,00
80	69787663 SD NEGERI MANANGA ABA		57.000.000,00			54.000.000,00	-	3.000.000,00	-	57.000.000,00		-
81	50304140 SD NEGERI PAYOLA UMBU		195.700.000,00	3.000.000,00		173.950.000,00	14.750.000,00	7.000.000,00	-	195.700.000,00		3.000.000,00
82	69959976 SD NEGERI POGO TENA		121.600.000,00	1.500.000,00	22.500.000,00	122.600.000,00	9.500.000,00	12.000.000,00	-	144.100.000,00		1.500.000,00
83	69972403 SD NEGERI PRAIROWA		87.400.000,00			85.206.400,00	-	2.193.600,00	-	87.400.000,00		-
84	69960055 SD NEGERI RATO ATE		63.650.000,00	1.500.000,00		54.750.000,00	8.900.000,00	-	-	63.650.000,00		1.500.000,00
85	50309564 SD NEGERI WEE MANADA		105.450.000,00			101.020.000,00	-	4.430.000,00	-	105.450.000,00		-
86	50304188 SD NEGERI GADI LETE	155.372.309,00	86.450.000,00	1.500.000,00		82.919.000,00	-	3.531.000,00	-	86.450.000,00		156.872.309,00
87	69733860 SD NEGERI GOLA	150.897,38	152.950.000,00	1.800.000,00		152.950.000,00	-	-	-	152.950.000,00	150.897,38	1.800.000,00
88	69985188 SD NEGERI GOLLU TOGO		90.250.000,00		22.500.000,00	96.250.000,00	9.500.000,00	7.000.000,00	-	112.750.000,00		-
89	50304181 SD NEGERI GOLLU UTTA		252.700.000,00			242.700.000,00	10.000.000,00	-	-	252.700.000,00		-
90	50303979 SD NEGERI KALIMBU TILLU		130.150.000,00	1.500.000,00		117.150.000,00	13.000.000,00	-	-	130.150.000,00		1.500.000,00
91	50304216 SD NEGERI KANDELU KUTURA		96.900.000,00		22.500.000,00	99.400.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00	-	119.400.000,00		-
92	69902986 SD NEGERI KAREKA KAKARA	64.200.189,00	211.850.000,00	1.500.000,00		186.152.000,00	19.200.000,00	5.748.000,00	-	211.100.000,00		66.450.189,00
93	50304176 SD NEGERI LOLA RAMO		288.800.000,00			259.481.500,00	8.000.000,00	21.318.500,00	-	288.800.000,00		-
94	50304131 SD NEGERI LOLO ALLE		234.650.000,00	1.500.000,00	22.500.000,00	223.619.000,00	27.500.000,00	6.031.000,00	-	257.150.000,00		1.500.000,00
95	50304147 SD NEGERI MARAWANG		150.100.000,00	1.500.000,00		133.100.000,00	11.000.000,00	6.000.000,00	-	150.100.000,00		1.500.000,00
96	50304149 SD NEGERI MAROKOTA		115.900.000,00	1.900.000,00		105.415.000,00	-	10.485.000,00	-	115.900.000,00		1.900.000,00
97	69733865 SD NEGERI OMBA TANA RARA	2.446.316,00	94.047.316,00	3.000.000,00	22.500.000,00	96.047.316,00	9.500.000,00	11.000.000,00	-	116.547.316,00		5.446.316,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	TOTAL PENDAPATAN	SETORAN TGR TH 2023 dan JAGIR	BOSKIN 2024	TOTAL BARJAS	TOTAL PM	TOTAL ATL	TOTAL JIJ	TOTAL BELANJA	JAGIR YANG SUDAH PBK	SALDO
98	50304100 SD NEGERI POTTO KATILLU		164.350.000,00	4.800.000,00	22.500.000,00	164.350.000,00	9.500.000,00	13.000.000,00	-	186.850.000,00		4.800.000,00
99	50304172 SD NEGERI PUU NAGA		81.700.000,00			71.700.000,00	10.000.000,00	-	-	81.700.000,00		-
100	69727485 SD NEGERI WANNO TALLA		159.600.000,00		22.500.000,00	151.100.000,00	13.000.000,00	18.000.000,00	-	182.100.000,00		-
101	50304175 SD NEGERI WEEKAPULOTA		137.750.000,00	1.500.000,00		133.499.000,00	-	4.251.000,00	-	137.750.000,00		1.500.000,00
102	50304223 SD NEGERI WEEKURA		119.700.000,00		22.500.000,00	110.700.000,00	9.500.000,00	18.000.000,00	4.000.000,00	142.200.000,00		-
103	69727531 SD NEGERI WEE WINI		123.500.000,00			115.500.000,00	-	8.000.000,00	-	123.500.000,00		-
104	50304288 SD NEGERI WOWARA		199.500.000,00	1.500.000,00		190.300.000,00	5.200.000,00	4.000.000,00	-	199.500.000,00		1.500.000,00
105	69984302 SD NEGERI GOLLU DARA		107.350.000,00	7.800.000,00		105.874.000,00	-	1.476.000,00	-	107.350.000,00		7.800.000,00
106	50304170 SD INPRES PUU KAPAKA		95.950.000,00	1.150.000,00		87.674.000,00	-	5.276.000,00	3.000.000,00	95.950.000,00		1.150.000,00
107	69787665 SD NEGERI DENDUKA		251.750.000,00	6.000.000,00	22.500.000,00	236.750.000,00	19.500.000,00	18.000.000,00	-	274.250.000,00		6.000.000,00
108	50303976 SD NEGERI LETE ENGGE	1.550.906,00	173.850.000,00	1.500.000,00		161.550.000,00	12.300.000,00	-	-	173.850.000,00		3.050.906,00
109	50304099 SD NEGERI POMBALA		121.600.000,00			113.600.000,00	8.000.000,00	-	-	121.600.000,00		-
110	50304171 SD NEGERI PUU KAURA		101.650.000,00	7.200.000,00	22.500.000,00	105.850.000,00	9.500.000,00	8.800.000,00	-	124.150.000,00		7.200.000,00
111	50304173 SD NEGERI RITA		186.200.000,00	700.000,00		177.200.000,00	9.000.000,00	-	-	186.200.000,00		700.000,00
112	69+B5:B159960244 SD NEGERI TEMA TANA	1.053.800,00	71.146.200,00			72.200.000,00	-	-	-	72.200.000,00		-
113	50304157 SD NEGERI WAI WAGHA		162.450.000,00			143.950.000,00	13.000.000,00	5.500.000,00	-	162.450.000,00		-
114	50304283 SD NEGERI WEE MARINGI		67.450.000,00			60.325.000,00	7.125.000,00	-	-	67.450.000,00		-
115	50304214 SD NEGERI KALINDAKA		180.500.000,00			169.600.000,00	10.900.000,00	-	-	180.500.000,00		-
116	50304215 SD NEGERI KAMBATANA		139.650.000,00	1.500.000,00		123.383.800,00	13.000.000,00	3.266.200,00	-	139.650.000,00		1.500.000,00
117	50304217 SD NEGERI KANELU		205.200.000,00			192.784.000,00	9.500.000,00	2.916.000,00	-	205.200.000,00		-
118	50304206 SD NEGERI LETE GARONA		127.300.000,00	2.700.000,00	22.500.000,00	128.100.000,00	10.200.000,00	11.500.000,00	-	149.800.000,00		2.700.000,00
119	69903258 SD NEGERI LOLO WANNO		102.600.000,00	800.000,00	22.500.000,00	94.579.600,00	15.500.000,00	15.020.400,00	-	125.100.000,00		800.000,00
120	50304143 SD NEGERI LOMBU		234.650.000,00			213.701.300,00	9.000.000,00	11.948.700,00	-	234.650.000,00		-
121	50303970 SD NEGERI MATA WEE KARORO		87.400.000,00		22.500.000,00	81.150.000,00	20.750.000,00	8.000.000,00	-	109.900.000,00		-
122	69733858 SD NEGERI MAWO MALITI	24.320.000,00	105.450.000,00	1.500.000,00	22.500.000,00	99.950.000,00	20.000.000,00	8.000.000,00	-	127.950.000,00		25.820.000,00
123	50305011 SD NEGERI NDAPA TAKA		109.250.000,00			92.297.000,00	10.000.000,00	6.953.000,00	-	109.250.000,00		-

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	TOTAL PENDAPATAN	SETORAN TGR TH 2023 dan JAGIR	BOSKIN 2024	TOTAL BARJAS	TOTAL PM	TOTAL ATL	TOTAL JIJ	TOTAL BELANJA	JAGIR YANG SUDAH PBK	SALDO
124	70002261 SD NEGERI OMBA KEY		98.686.000,00		22.500.000,00	91.929.000,00	16.500.000,00	12.757.000,00	-	121.186.000,00		-
125	50304134 SD NEGERI OMBA NGAINGO		207.100.000,00	1.500.000,00	22.500.000,00	188.706.000,00	23.000.000,00	17.894.000,00	-	229.600.000,00		1.500.000,00
126	50303972 SD NEGERI OMBA RADE		257.450.000,00			228.147.000,00	19.000.000,00	10.303.000,00	-	257.450.000,00		-
127	50304135 SD NEGERI OMBA REDAPA		107.350.000,00			93.398.000,00	10.000.000,00	3.952.000,00	-	107.350.000,00		-
128	69903257 SD NEGERI PADEDE WERI	8.802.648,00	70.300.000,00	1.500.000,00		52.300.000,00	18.000.000,00	-	-	70.300.000,00		10.302.648,00
129	50304105 SD NEGERI WEE KOKORA		207.100.000,00			187.450.000,00	11.650.000,00	8.000.000,00	-	207.100.000,00		-
130	69733859 SD NEGERI BINA WERO		85.500.000,00	1.500.000,00		85.500.000,00	-	-	-	85.500.000,00		1.500.000,00
131	50303964 SD NEGERI DIMU DEDE		46.550.000,00	1.500.000,00		45.500.000,00	-	1.050.000,00	-	46.550.000,00		1.500.000,00
132	50304202 SD NEGERI KERE MAREDA		87.400.000,00			73.400.000,00	11.000.000,00	3.000.000,00	-	87.400.000,00		-
133	50304207 SD NEGERI LETE KAMOUNA		142.500.000,00	1.500.000,00		135.000.000,00	-	7.500.000,00	-	142.500.000,00		1.500.000,00
134	50304146 SD NEGERI MALULLA		146.300.000,00	1.500.000,00		146.300.000,00	-	-	-	146.300.000,00		1.500.000,00
135	50304148 SD NEGERI MAREDA KALADA	39.000,00	223.250.000,00			177.274.500,00	26.000.000,00	19.975.500,00	-	223.250.000,00		39.000,00
136	50304150 SD NEGERI MAWO DANA		90.250.000,00			86.631.400,00	-	3.618.600,00	-	90.250.000,00		-
137	50304142 SD NEGERI NDIKI BARU		101.310.000,00			88.550.000,00	4.800.000,00	7.960.000,00	-	101.310.000,00		-
138	50304174 SD NEGERI RITA KAKA		327.750.000,00			265.047.000,00	26.450.000,00	36.253.000,00	-	327.750.000,00		-
139	50304093 SD NEGERI TANA KOMBUKA		217.550.000,00			191.050.000,00	8.500.000,00	18.000.000,00	-	217.550.000,00		-
140	50304163 SD NEGERI WEE DINDI		141.550.000,00	1.500.000,00		122.603.500,00	8.673.000,00	10.273.500,00	-	141.550.000,00		1.500.000,00
141	50304284 SD NEGERI WEE MUU	23.200,00	255.550.000,00	2.292.700,00		228.037.800,00	12.000.000,00	15.512.200,00	-	255.550.000,00		2.315.900,00
142	50304287 SD NEGERI WONE		145.350.000,00			120.850.000,00	11.500.000,00	13.000.000,00	-	145.350.000,00		-
143	50304161 SD NEGERI WANO WARA		252.700.000,00			235.204.800,00	9.000.000,00	8.495.200,00	-	252.700.000,00		-
144	50304180 SD NEGERI GOLLU MAREDA		68.400.000,00	2.090.000,00		61.235.000,00	3.500.000,00	3.665.000,00	-	68.400.000,00		2.090.000,00
145	50303978 SD NEGERI KALEMBU MALITI	910.270,00	85.500.000,00	1.500.270,00		76.200.000,00	4.800.000,00	-	4.500.000,00	85.500.000,00		2.410.540,00
146	69879008 SD NEGERI RAWE		127.300.000,00			121.459.000,00	800.000,00	5.041.000,00	-	127.300.000,00		-
147	50305152 SD NEGERI PAKAMANDARA		167.200.000,00	1.500.000,00	22.500.000,00	172.200.000,00	9.500.000,00	8.000.000,00	-	189.700.000,00		1.500.000,00
JUMLAH		**296.929.338,56**	**24.852.093.051,00**	**140.509.499,61**	**562.500.000,00**	**22.991.790.051,00**	**1.556.157.000,00**	**838.054.800,00**	**23.500.000,00**	**25.409.501.851,00**	**151.542,56**	**442.378.495,61**

2. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	TOTAL PENDAPATAN	SETORAN TGR TH 2023 dan JAGIR	BOSKIN 2024	TOTAL BARJAS	TOTAL PM	TOTAL ATL	TOTAL JIJ	TOTAL BELANJA	JAGIR YANG SUDAH PBK	SALDO
1	50304056 SMP NEGERI 1 KODI	3.918.000,00	869.883.300,00			764.601.300,00	109.200.000,00	-	-	873.801.300,00		-
2	50304059 SMP NEGERI 2 KODI	-	639.802.800,00			550.472.800,00	59.330.000,00	30.000.000,00	-	639.802.800,00		-
3	69727766 SMP NEGERI 3 KODI	-	315.899.900,00		13.200.000,00	267.537.500,00	-	-	-	267.537.500,00		61.562.400,00
4	69727785 SMP NEGERI 4 KODI	-	448.110.000,00		16.200.000,00	394.904.500,00	28.173.000,00	25.032.500,00	-	448.110.000,00		16.200.000,00
5	69787659 SMP NEGERI 5 KODI	-	310.050.000,00			257.000.000,00	36.500.000,00	16.550.000,00	-	310.050.000,00		-
6	69946711 SMP NEGERI 6 KODI	-	439.920.000,00		10.200.000,00	377.594.100,00	62.325.900,00	-	-	439.920.000,00		10.200.000,00
7	69727622 SMP NEGERI 1 KODI BALAGHAR	-	625.950.000,00			545.249.200,00	57.100.000,00	23.600.800,00	-	625.950.000,00		-
8	69727623 SMP NEGERI 2 KODI BALAGHAR	-	369.720.000,00			325.420.000,00	-	-	-	325.420.000,00		44.300.000,00
9	69727773 SMP NEGERI 3 KODI BALAGHAR	-	484.380.000,00		4.800.000,00	419.405.000,00	49.975.000,00	15.000.000,00	-	484.380.000,00		4.800.000,00
10	69787661 SMP NEGERI 4 KODI BALAGHAR	-	225.810.000,00		4.800.000,00	216.938.700,00	8.871.000,00	-	-	225.809.700,00		4.800.300,00
11	69948165 SMP NEGERI 5 KODI BALAGHAR	-	256.230.000,00			256.230.000,00	-	-	-	256.230.000,00		-
12	69727621 SMP NEGERI 1 KODI BANGEDO	-	455.130.000,00	35.000.000,00		413.810.000,00	50.800.000,00	25.520.000,00	-	490.130.000,00		-
13	69787662 SMP NEGERI 2 KODI BANGEDO	-	348.660.000,00		20.000,00	276.660.000,00	67.000.000,00	5.000.000,00	-	348.660.000,00		20.000,00
14	69727624 SMP NEGERI 1 KODI UTARA	-	816.660.000,00		540.000,00	680.660.000,00	106.000.000,00	30.000.000,00	-	816.660.000,00		540.000,00
15	69727625 SMP NEGERI 2 KODI UTARA	-	229.320.000,00		2.100.000,00	219.320.000,00	-	10.000.000,00	-	229.320.000,00		2.100.000,00
16	69727627 SMP NEGERI 3 KODI UTARA	1.214.817,00	241.020.000,00			230.795.300,00	4.900.000,00	5.324.700,00	-	241.020.000,00		1.214.817,00
17	69727770 SMP NEGERI 4 KODI UTARA	2.500.000,00	301.860.000,00		6.300.000,00	252.497.800,00	29.000.000,00	20.362.200,00	-	301.860.000,00		8.800.000,00
18	69862407 SMP NEGERI 5 KODI UTARA	-	202.410.000,00		4.500.000,00	167.979.100,00	12.000.000,00	16.430.900,00	6.000.000,00	202.410.000,00		4.500.000,00

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	TOTAL PENDAPATAN	SETORAN TGR TH 2023 dan JAGIR	BOSKIN 2024	TOTAL BARJAS	TOTAL PM	TOTAL ATL	TOTAL JIJ	TOTAL BELANJA	JAGIR YANG SUDAH PBK	SALDO
19	69879013 SMP NEGERI 6 KODI UTARA	-	349.830.000,00			297.356.300,00	27.900.000,00	24.573.700,00	-	349.830.000,00		-
20	69947329 SMP NEGERI 7 KODI UTARA	-	355.446.000,00		7.200.000,00	307.226.000,00	30.200.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00	345.426.000,00		17.220.000,00
21	70012641 SMP NEGERI 8 KODI UTARA	-	168.480.000,00	35.000.000,00		148.601.500,00	40.650.000,00	14.228.500,00	-	203.480.000,00		-
22	50304038 SMP NEGERI 1 KOTA TAMBOLAKA	2.850.000,00	1.082.250.000,00			915.891.000,00	102.750.000,00	63.609.000,00	-	1.082.250.000,00		2.850.000,00
23	50305178 SMP NEGERI 2 KOTA TAMBOLAKA	-	155.610.000,00			130.500.000,00	14.000.000,00	11.110.000,00	-	155.610.000,00		-
24	69727647 SMP NEGERI 3 KOTA TAMBOLAKA	-	644.670.000,00			506.045.000,00	83.600.000,00	55.025.000,00	-	644.670.000,00		-
25	69950354 SMP NEGERI 4 KOTA TAMBOLAKA	-	219.000.600,00			194.362.600,00	10.200.000,00	14.438.000,00	-	219.000.600,00		-
26	50305174 SMP NEGERI 1 LOURA	4.000,00	94.770.000,00		5.000.000,00	79.588.000,00	2.210.000,00	12.972.000,00	-	94.770.000,00		5.004.000,00
27	69727777 SMP NEGERI 2 LOURA	-	127.530.000,00		3.600.000,00	118.250.000,00	-	9.280.000,00	-	127.530.000,00		3.600.000,00
28	69757898 SMP NEGERI 3 LOURA	-	245.700.000,00		1.500.000,00	228.735.885,00	-	16.964.115,00	-	245.700.000,00		1.500.000,00
29	69727666 SMP NEGERI 4 LOURA	-	197.730.000,00	35.000.000,00		190.863.500,00	21.191.000,00	16.265.500,00	4.410.000,00	232.730.000,00		-
30	69903259 SMP NEGERI 5 LOURA	-	58.500.000,00			57.574.600,00	-	925.400,00	-	58.500.000,00		-
31	50304043 SMP NEGERI 1 WEWEWA BARAT	-	395.460.000,00			371.564.600,00	4.000.000,00	19.895.400,00	-	395.460.000,00		-
32	50304073 SMP NEGERI 2 WEWEWA BARAT	-	689.130.000,00			629.729.000,00	34.000.000,00	25.401.000,00	-	689.130.000,00		-
33	69727644 SMP NEGERI 3 WEWEWA BARAT	-	255.060.000,00			229.365.200,00	20.000.000,00	5.694.800,00	-	255.060.000,00		-
34	69727759 SMP NEGERI 4 WEWEWA BARAT	2.011.500,00	312.390.000,00		5.300.000,00	276.390.000,00	36.000.000,00	-	-	312.390.000,00		7.311.500,00
35	69727747 SMP NEGERI 5 WEWEWA BARAT	78.000,00	190.632.000,00			178.210.000,00	11.000.000,00	-	-	189.210.000,00		1.500.000,00
36	50304044 SMP NEGERI 1 WEWEWA SELATAN	-	421.200.000,00		9.600.000,00	328.374.300,00	74.400.000,00	18.425.700,00	-	421.200.000,00		9.600.000,00
37	50304074 SMP NEGERI 2 WEWEWA SELATAN	-	352.170.000,00			276.620.000,00	60.550.000,00	15.000.000,00	-	352.170.000,00		-

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	TOTAL PENDAPATAN	SETORAN TGR TH 2023 dan JAGIR	BOSKIN 2024	TOTAL BARJAS	TOTAL PM	TOTAL ATL	TOTAL JIJ	TOTAL BELANJA	JAGIR YANG SUDAH PBK	SALDO
38	69787666 SMP NEGERI 3 WEWEWA SELATAN	1.250.000,00	127.450.000,00	35.000.000,00		122.450.000,00	19.750.000,00	18.000.000,00	3.500.000,00	163.700.000,00		-
39	69727687 SMP NEGERI 4 WEWEWA SELATAN	-	189.540.000,00		5.250.000,00	165.226.300,00	17.950.000,00	6.363.700,00	-	189.540.000,00		5.250.000,00
40	69895910 SMP NEGERI 5 WEWEWA SELATAN	80.000,00	231.649.200,00			206.649.200,00	17.000.000,00	-	-	223.649.200,00		8.080.000,00
41	69947730 SMP NEGERI 6 WEWEWA SELATAN	-	111.150.000,00			92.397.600,00	-	18.752.400,00	-	111.150.000,00		-
42	50304075 SMP NEGERI 1 WEWEWA TENGAH	-	614.250.000,00	35.000.000,00		544.350.000,00	78.900.000,00	26.000.000,00	-	649.250.000,00		-
43	69727652 SMP NEGERI 2 WEWEWA TENGAH	-	468.000.000,00	35.000.000,00	5.600.000,00	394.199.200,00	83.700.000,00	25.100.800,00	-	503.000.000,00		5.600.000,00
44	69727781 SMP NEGERI 3 WEWEWA TENGAH	-	354.510.000,00		4.800.000,00	289.412.250,00	50.556.250,00	14.541.500,00	-	354.510.000,00		4.800.000,00
45	69883587 SMP NEGERI 4 WEWEWA TENGAH	-	339.300.000,00			325.777.000,00	13.523.000,00	-	-	339.300.000,00		-
46	69948421 SMP NEGERI 5 WEWEWA TENGAH	-	200.070.000,00			159.930.000,00	29.680.000,00	6.460.000,00	-	196.070.000,00		4.000.000,00
47	70029493 SMP NEGERI 6 WEWEWA TENGAH	45.000,00	80.730.000,00		13.575,69	60.630.000,00	17.000.000,00	-	3.100.000,00	80.730.000,00		58.575,69
48	50304045 SMP NEGERI 1 WEWEWA TIMUR	37.244.200,00	511.555.800,00		18.740.000,00	476.508.800,00	20.550.000,00	14.497.000,00	-	511.555.800,00		55.984.200,00
49	50304077 SMP NEGERI 2 WEWEWA TIMUR	1.800.000,00	328.140.000,00	70.000.000,00	730.000,00	304.644.400,00	73.250.000,00	22.045.600,00	-	399.940.000,00		730.000,00
50	50304078 SMP NEGERI 3 WEWEWA TIMUR	30.000,00	381.420.000,00			360.659.900,00	3.500.000,00	17.260.100,00	-	381.420.000,00		30.000,00
51	69727656 SMP NEGERI 4 WEWEWA TIMUR	-	280.308.600,00		4.922.300,00	209.308.600,00	35.400.000,00	20.000.000,00	-	264.708.600,00		20.522.300,00
52	69727697 SMP NEGERI 5 WEWEWA TIMUR	-	273.780.000,00		5.400.000,00	241.401.400,00	15.500.000,00	16.878.600,00	-	273.780.000,00		5.400.000,00
53	69727793 SMP NEGERI 6 WEWEWA TIMUR	-	246.870.000,00		9.750.000,00	217.698.000,00	23.073.000,00	6.099.000,00	-	246.870.000,00		9.750.000,00
54	69903009 SMP NEGERI 7 WEWEWA TIMUR	-	120.510.000,00			110.510.000,00	10.000.000,00	-	-	120.510.000,00		-

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AWAL	TOTAL PENDAPATAN	SETORAN TGR TH 2023 dan JAGIR	BOSKIN 2024	TOTAL BARJAS	TOTAL PM	TOTAL ATL	TOTAL JIJ	TOTAL BELANJA	JAGIR YANG SUDAH PBK	SALDO
55	69948418 SMP NEGERI 8 WEWEWA TIMUR	-	132.210.000,00		4.200.000,00	115.020.900,00	11.500.000,00	5.689.100,00	-	132.210.000,00		4.200.000,00
56	50304046 SMP NEGERI 1 WEWEWA UTARA	-	203.580.000,00		6.300.000,00	177.723.600,00	19.100.000,00	6.756.400,00	-	203.580.000,00		6.300.000,00
57	69727701 SMP NEGERI 2 WEWEWA UTARA	-	193.050.000,00	35.000.000,00	5.250.000,00	171.715.640,00	35.250.000,00	21.084.360,00	-	228.050.000,00		5.250.000,00
JUMLAH		**53.025.517,00**	**19.284.448.200,00**	**315.000.000,00**	**165.815.875,69**	**16.828.535.575,00**	**1.829.008.150,00**	**795.657.775,00**	**21.510.000,00**	**19.474.711.500,00**		**343.578.092,69**

LAMPIRAN 6

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DAFTAR SISA PERSEDIAAN PADA PER SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	Saldo Awal	Realiasi/Penambahan	Pemakaian/Keluar	Saldo
1	Dinas Kesehatan	14.497.928.017,45	18.352.288.021,87	22.943.870.252,90	9.906.345.786,42
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH REDA BOLO	2.904.380.288,73	1.189.290.174,19	1.434.102.669,63	2.659.567.793,29
3	PUSKESMAS WATU KAWULA	184.799.224,73	1.948.700.159,81	1.999.703.139,94	133.796.244,60
4	PUSKESMAS RADAMATA	343.880.836,14	1.382.717.012,72	1.348.465.676,35	378.132.172,51
5	PUSKESMAS WAIMANGURA	327.843.431,93	1.236.584.512,45	1.143.349.920,11	421.078.024,27
6	PUSKESMAS TANGGABA	114.913.625,46	1.413.391.198,52	1.358.184.008,12	170.120.815,86
7	PUSKESMAS TENA TEKE	269.725.957,67	1.124.123.014,06	1.141.742.999,63	252.105.972,10
8	PUSKESMAS PALLA	165.862.347,43	969.851.170,46	1.039.548.959,00	96.164.558,89
9	PUSKESMAS KORI	151.850.221,25	1.865.941.338,80	1.804.435.810,39	213.355.749,66
10	PUSKESMAS BONDO KODI	122.094.004,82	1.810.259.886,23	1.846.005.711,44	86.348.179,61
11	PUSKESMAS WALLANDIMU	430.725.490,05	963.418.103,08	1.337.347.962,22	56.795.630,91
12	PUSKESMAS PANENGGO EDE	333.660.525,86	1.404.665.015,57	1.466.172.449,29	272.153.092,14
13	PUSKESMAS ELOPADA	134.362.679,18	1.861.800.070,48	1.856.363.710,35	139.799.039,31
14	PUSKESMAS BILLA CENGE	231.431.621,99	1.294.354.056,33	1.385.914.591,15	139.871.087,17
15	PUSKESMAS WEEKOMBAKA	113.880.938,02	1.015.211.475,05	996.078.921,27	133.013.491,80
16	PUSKESMAS DELU DEPA	81.940.008,18	783.907.240,67	776.952.574,36	88.894.674,49
17	PUSKEMAS KAWANGO HARI	152.496.238,37	1.062.198.253,94	1.101.344.259,48	113.350.232,83
18	PUSKEMAS WERI LOLO	124.868.163,13	597.525.121,12	630.446.795,50	91.946.488,75
19	DINAS PERHUBUNGAN	25.060.198,00	112.095.600,00	111.805.600,00	25.350.198,00
20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	288.420.000,00	1.856.161.959,00	1.389.131.901,00	755.450.058,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	576.123.960,00	3.147.513.695,00	3.354.831.528,00	368.806.127,00

NO	SKPD	Saldo Awal	Realiasi/Penambahan	Pemakaian/Keluar	Saldo
22	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	384.695.540,00	4.662.541.331,00	4.651.091.721,00	396.145.150,00
23	BADAN PENDAPATAN DAERAH	335.351.300,00	571.218.400,00	574.104.400,00	332.465.300,00
24	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.900.000,00	1.775.844.700,00	1.779.744.700,00	0,00
25	KECAMATAN WEWEWA BARAT	890.500,00	237.197.615,00	238.088.115,00	0,00
26	KELURAHAN LANGGA LERO	215.000.000,00	146.956.250,00	361.956.250,00	0,00
27	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1.237.983.000,00	1.267.487.948,00	2.505.470.948,00	0,00
28	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	126.002.500,00	19.853.895.158,00	19.979.897.658,00	0,00
29	SEKRETARIAT DPRD	13.875.046,00	4.170.286.260,00	4.184.161.306,00	0,00
TOTAL		**23.893.945.664,39**	**78.077.424.741,35**	**84.740.314.538,13**	**17.231.055.867,61**

LAMPIRAN 7

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

RINCIAN ASET TETAP TANAH SKPD KAB. SUMBA BARAT DAYA

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA UPB	SALDO AWAL	REKLASIFIKASI KE P ROPERTI INVESTASI	PERUBAHAN REKENING 108		PENGHAPUSAN	Koreksi HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DII BAWAH Rp500.000,00	SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG				
1.4.1.1	SEKRETARIAT DPRD	-							-
4.1.1.1	Bagian Umum	-							-
4.1.2.1	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	32.655.988.140,00	5.152.285.000,00						27.503.703.140,00
4.1.3.1	Bagian Organisasi	-							-
4.1.4.1	Bagian Administrasi Pembangunan	-							-
4.1.5.1	Bagian Hukum	-							-
4.1.6.1	Bagian Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	-							-
4.1.7.1	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-							-
4.1.8.1	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	-							-
4.1.9.1	Bagian Layanan Pengadaan	-							-
5.1.1.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	307.626.556.430,00							307.626.556.430,00
	UPTD SPAM WEEMARINGI	-							-
5.2.1.1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	150.000.000,00							150.000.000,00
6.1.1.1	DINAS PERHUBUNGAN	56.647.980,00							56.647.980,00
6.2.1.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-							-
7.1.1.1	Dinas Kesehatan	614.176.580,00							614.176.580,00
7.1.2.1	PUSKESMAS WATU KAWULA	-							-
7.1.3.1	PUSKESMAS RADAMATA	192.886.800,00							192.886.800,00
7.1.4.1	PUSKESMAS WAIMANGURA	245.459.380,00							245.459.380,00
7.1.5.1	PUSKESMAS TANGGABA	72.039.230,00							72.039.230,00
7.1.6.1	PUSKESMAS TENA TEKE	229.146.910,00							229.146.910,00

NO	NAMA UPB	SALDO AWAL	REKLASIFIKASI KE P ROPERTI INVESTASI	PERUBAHAN REKENING 108		PENGHAPUSAN	Koreksi HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DII BAWAH Rp500.000,00	SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG				
7.1.7.1	PUSKESMAS PALLA	52.165.000,00							52.165.000,00
7.1.8.1	PUSKESMAS KORI	379.767.040,00							379.767.040,00
7.1.9.1	PUSKESMAS BONDO KODI	103.846.600,00							103.846.600,00
7.1.10.1	PUSKESMAS WALLANDIMU	5.610.500,00							5.610.500,00
7.1.11.1	PUSKESMAS PANENGGO EDE	145.464.150,00							145.464.150,00
7.1.12.1	PUSKESMAS ELOPADA	90.960.280,00							90.960.280,00
7.1.13.1	PUSKESMAS BILLA CENGE	-							-
7.1.14.1	PUSKESMAS WEEKOMBAKA	-							-
7.1.15.1	PUSKESMAS DELU DEPA	-							-
7.1.16.1	PUSKEMAS KAWANGO HARI	-							-
7.1.17.1	PUSKEMAS WERI LOLO	-							-
7.1.18.1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-							-
8.1.1.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	17.253.076.455,00							17.253.076.455,00
8.1.1.2	SD Negeri Waikarya	-							-
8.1.1.3	SD Negeri Patuku	-							-
8.1.1.4	SD Negeri Peha	-							-
8.1.1.5	SD Negeri Hombarica	-							-
8.1.1.6	SD Negeri Satap Bonggor	-							-
8.1.1.7	SD Negeri Kawango Hari	-							-
8.1.1.8	SD Negeri Kalembu Letena	-							-
8.1.1.9	SD Negeri Karara Tombo	-							-
8.1.1.10	SD Negeri Karoso	-							-
8.1.1.11	SD Negeri Bondo Kawango	-							-
8.1.1.12	SD Negeri Pabundo Dimu	-							-
8.1.1.13	SD Negeri Wery	-							-
8.1.1.14	SD Negeri Batu Karang	-							-
8.1.1.15	SD Negeri Wai Cunga	-							-

NO	NAMA UPB	SALDO AWAL	REKLASIFIKASI KE P ROPERTI INVESTASI	PERUBAHAN REKENING 108		PENGHAPUSAN	Koreksi HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DII BAWAH Rp500.000,00	SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG				
8.1.1.16	SD Negeri Batta	-							-
8.1.1.17	SD Negeri Billa	-							-
8.1.1.18	SD Negeri Paghohi	-							-
8.1.1.19	SD Negeri Homba Tana	-							-
8.1.1.20	SD Negeri Balla Moro	-							-
8.1.1.21	SD Negeri Wailangira	-							-
8.1.1.22	SD Negeri Kere Pamba	-							-
8.1.1.23	SD Negeri Wikico Rongo	-							-
8.1.1.24	SD Negeri Panenggo Ede I	-							-
8.1.1.25	SD Negeri Rada Ghalla	-							-
8.1.1.26	SD Negeri Panenggo Ede II	-							-
8.1.1.27	SD Negeri Katewel	-							-
8.1.1.28	SD Negeri Payola Umbu	-							-
8.1.1.29	SD Negeri Gokata	-							-
8.1.1.30	SD Negeri Loko Lamata	-							-
8.1.1.31	SD Negeri Wee Tabula II	-							-
8.1.1.32	SD Negeri Ledo Ngara	-							-
8.1.1.33	SD Negeri Wee Manada	-							-
8.1.1.34	SD Negeri Kadula	-							-
8.1.1.35	SD Negeri Mananga Aba	-							-
8.1.1.36	SD Negeri Kawona	-							-
8.1.1.37	SD Negeri Langata	-							-
8.1.1.38	SD Negeri Loku Kalada	-							-
8.1.1.39	SD Negeri Kalimbu Tillu	-							-
8.1.1.40	SD Negeri Potto Katillu	-							-
8.1.1.41	SD Negeri Lolo Alle	-							-
8.1.1.42	SD Negeri Marawang	-							-

NO	NAMA UPB	SALDO AWAL	REKLASIFIKASI KE P ROPERTI INVESTASI	PERUBAHAN REKENING 108		PENGHAPUSAN	Koreksi HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DII BAWAH Rp500.000,00	SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG				
8.1.1.43	SD Negeri Marokota	-							-
8.1.1.44	SD Negeri Pogo Lede	-							-
8.1.1.45	SD Negeri Puu Naga	-							-
8.1.1.46	SD Negeri Weekapulota	-							-
8.1.1.47	SD Negeri Lola Ramo	-							-
8.1.1.48	SD Negeri Gollu Utta	-							-
8.1.1.49	SD Negeri Gadi Lete	-							-
8.1.1.50	SD Negeri Kandelu Kutura	-							-
8.1.1.51	SD Negeri Weekura	-							-
8.1.1.52	SD Negeri Wowara	-							-
8.1.1.53	SD Negeri Wanno Talla	-							-
8.1.1.54	SD Negeri Wee Wini	-							-
8.1.1.55	SD Negeri Gola	-							-
8.1.1.56	SD Negeri Omba Tana Rara	-							-
8.1.1.57	SD Negeri Kareka Kakara	-							-
8.1.1.58	SD Negeri Lete Engge	-							-
8.1.1.59	SD Negeri Pombala	-							-
8.1.1.60	SD Negeri Waiwagha	-							-
8.1.1.61	SD Negeri Puu Kapaka	-							-
8.1.1.62	SD Negeri Puu Kaura	-							-
8.1.1.63	SD Negeri Rita	-							-
8.1.1.64	SD Negeri Wee Maringi	-							-
8.1.1.65	SD Negeri Denduka	-							-
8.1.1.66	SD Negeri Dimu Dede	-							-
8.1.1.67	SD Negeri Mata Wee Karoro	-							-
8.1.1.68	SD Negeri Omba Rade	-							-
8.1.1.69	SD Negeri Tana Kombuka	-							-

NO	NAMA UPB	SALDO AWAL	REKLASIFIKASI KE P ROPERTI INVESTASI	PERUBAHAN REKENING 108		PENGHAPUSAN	Koreksi HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DII BAWAH Rp500.000,00	SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG				
8.1.1.70	SD Negeri Wee Kokora	-							-
8.1.1.71	SD Negeri Ndiki Baru	-							-
8.1.1.72	SD Negeri Lombu	-							-
8.1.1.73	SD Negeri Satap Malula	-							-
8.1.1.74	SD Negeri Mareda Kalada	-							-
8.1.1.75	SD Negeri Mawo Dana	-							-
8.1.1.76	SD Negeri Wano Wara	-							-
8.1.1.77	SD Negeri Wee Dindi	-							-
8.1.1.78	SD Negeri Rita Kaka	-							-
8.1.1.79	SD Negeri Kere Mareda	-							-
8.1.1.80	SD Negeri Lete Garona	-							-
8.1.1.81	SD Negeri Lete Kamouna	-							-
8.1.1.82	SD Negeri Kalindaka	-							-
8.1.1.83	SD Negeri Kambatana	-							-
8.1.1.84	SD Negeri Inpres Kanelu	-							-
8.1.1.85	SD Negeri Wee Muu	-							-
8.1.1.86	SD Negeri Wone	-							-
8.1.1.87	SD Negeri Ndapa Taka	-							-
8.1.1.88	SD Negeri Mawo Maliti	-							-
8.1.1.89	SD Negeri Bina Wero	-							-
8.1.1.90	SD Negeri Kalembu Maliti	-							-
8.1.1.91	SD Negeri Gollu Mareda	-							-
8.1.1.92	SD Negeri Pakamandara	-							-
8.1.1.93	SD Negeri Rawe	-							-
8.1.1.94	SD Negeri Waiholo	-							-
8.1.1.95	SD Negeri Noha	-							-
8.1.1.96	SD Negeri Magho Linyo	-							-

NO	NAMA UPB	SALDO AWAL	REKLASIFIKASI KE P ROPERTI INVESTASI	PERUBAHAN REKENING 108		PENGHAPUSAN	Koreksi HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DII BAWAH Rp500.000,00	SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG				
8.1.1.97	SD Negeri Hameli	-							-
8.1.1.98	SD Negeri Kadimbil	-							-
8.1.1.99	SD Negeri Kendu Wela	-							-
8.1.1.100	SD Negeri Laikarenga	-							-
8.1.1.101	SD Negeri Liango Malagho	-							-
8.1.1.102	SD Negeri Kapunge Tana	-							-
8.1.1.103	SD Negeri Karara	-							-
8.1.1.104	SD Negeri Waiboro	-							-
8.1.1.105	SD Negeri Daha Walu	-							-
8.1.1.106	SD Negeri Ikit	-							-
8.1.1.107	SD Negeri Jaha Dukka	-							-
8.1.1.108	SD Negeri Moro Manduyo	-							-
8.1.1.109	SD Negeri Karendi	-							-
8.1.1.110	SD Negeri Kalembu Danga	-							-
8.1.1.111	SD Negeri Homba Pare	-							-
8.1.1.112	SD Negeri Lara Dimu	-							-
8.1.1.113	SD Negeri Lorro Inda Bode	-							-
8.1.1.114	SD Negeri Waikalimbu	-							-
8.1.1.115	SD Negeri Weri Kadu	-							-
8.1.1.116	SD Negeri Poma	-							-
8.1.1.117	SD Negeri Lokokaki	-							-
8.1.1.118	SD Negeri Waikelo	-							-
8.1.1.119	SD Negeri Watu Takula	-							-
8.1.1.120	SD Negeri Omba Ngaingo	-							-
8.1.1.121	SD Negeri Omba Redapa	-							-
8.1.1.122	SD Negeri Padede Weri	-							-
8.1.1.123	SD Negeri Lolo Wanno	-							-

NO	NAMA UPB	SALDO AWAL	REKLASIFIKASI KE P ROPERTI INVESTASI	PERUBAHAN REKENING 108		PENGHAPUSAN	Koreksi HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DII BAWAH Rp500.000,00	SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG				
8.1.1.124	SD Negeri Raua Kodi	-							-
8.1.1.125	SD Negeri Kalogha	-							-
8.1.1.126	SD Negeri Kalembu Palolo	-							-
8.1.1.127	SD Negeri Hende Monno	-							-
8.1.1.128	SD Negeri Kareka Ndara	-							-
8.1.1.129	SD Negeri Uma Riti - Kodi Utara	-							-
8.1.1.130	SD Negeri Kaninyo - Kodi Utara	-							-
8.1.1.131	SD Negeri Gombol - Kodi Utara	-							-
8.1.1.132	SD Negeri Rada Meter - Kodi Utara	-							-
8.1.1.133	SD Negeri Bahabu - Kodi Balaghar	-							-
8.1.1.134	SD Negeri Waikambala - Kodi	-							-
8.1.1.135	SD Negeri Waihari - Kodi	-							-
8.1.1.136	SD Negeri Pogo Tena - Loura	-							-
8.1.1.137	SD Negeri Prairowa - Loura	-							-
8.1.1.138	SD Negeri Tema Tana - Wewewa Timur	-							-
8.1.1.139	SD Negeri Rato Ate - Wewewa Utara	-							-
8.1.1.140	SD Negeri Waimalala - Kodi	-							-
8.1.1.141	SD Negeri Gollu Dara	-							-
8.1.1.142	SD Negeri Gollu Togo	-							-
8.1.1.143	SD Negeri Omba Key	-							-
8.1.1.144	SD Negeri Komi Katto	-	-						
8.1.1.145	SD NEGERI MANU DEDE	-							-
8.1.1.146	SD NEGERI PARE KARABU								-
8.1.1.147	SD NEGERI KEDDE KEHE								-
8.1.1.148	SD NEGERI BALING								-
8.1.2.1	SMP Negeri 1 Kota Tambolaka	371.547.000,00							371.547.000,00
8.1.3.1	SMP Negeri 1 Kodi Utara	96.476.850,00							96.476.850,00

NO	NAMA UPB	SALDO AWAL	REKLASIFIKASI KE P ROPERTI INVESTASI	PERUBAHAN REKENING 108		PENGHAPUSAN	Koreksi HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DII BAWAH Rp500.000,00	SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG				
8.1.4.1	SMP Negeri 2 Kodi Utara	50.000.000,00							50.000.000,00
8.1.5.1	SMP Negeri 1 Kodi	114.179.040,00							114.179.040,00
8.1.6.1	SMP Negeri 2 Kodi	73.076.850,00							73.076.850,00
8.1.7.1	SMP Negeri 1 Kodi Bangedo	59.012.550,00							59.012.550,00
8.1.8.1	SMP Negeri 1 Kodi Balaghar	143.000.000,00							143.000.000,00
8.1.9.1	SMP Negeri 2 Kodi Balaghar	50.000.000,00							50.000.000,00
8.1.10.1	SMP Negeri 1 Wewewa Barat	42.537.150,00							42.537.150,00
8.1.11.1	SMP Negeri 2 Wewewa Barat	39.511.800,00							39.511.800,00
8.1.12.1	SMP Negeri 3 Wewewa Barat	384.947.850,00							384.947.850,00
8.1.13.1	SMP Negeri 1 Wewewa Selatan	122.500.000,00							122.500.000,00
8.1.14.1	SMP Negeri 2 Wewewa Selatan	60.677.100,00							60.677.100,00
8.1.15.1	SMP Negeri 1 Wewewa Timur	94.080.000,00							94.080.000,00
8.1.16.1	SMP Negeri 1 Wewewa Tengah	67.442.490,00							67.442.490,00
8.1.17.1	SMP Negeri 2 Wewewa Timur	36.729.900,00							36.729.900,00
8.1.18.1	SMP Negeri 3 Wewewa Timur	44.688.600,00							44.688.600,00
8.1.19.1	SMP Negeri 2 Wewewa Tengah	164.950.000,00							164.950.000,00
8.1.20.1	SMP Negeri 4 Wewewa Timur	50.000.000,00							50.000.000,00
8.1.21.1	SMP Negeri 1 Wewewa Utara	43.245.000,00							43.245.000,00
8.1.29.1	SMP Negeri 5 Wewewa Timur	-							-
8.1.30.1	SMP Negeri 4 Wewewa Barat	-							-
8.1.31.1	SMP Negeri 2 Loura	-							-
8.1.32.1	SMP Negeri 1 Loura	-							-
8.1.33.1	SMP Negeri 4 Kodi Utara	-							-
8.1.34.1	SMP Negeri 3 Kodi Balaghar	-							-
8.1.35.1	SMPN 4 KODI	-							-
8.1.36.1	SMP Negeri 2 Wewewa Utara	-							-
8.1.37.1	SMP Negeri 3 Kodi	20.681.500,00							20.681.500,00

NO	NAMA UPB	SALDO AWAL	REKLASIFIKASI KE P ROPERTI INVESTASI	PERUBAHAN REKENING 108		PENGHAPUSAN	Koreksi HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DII BAWAH Rp500.000,00	SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG				
8.1.38.1	SMP Negeri 3 Loura	-							-
8.1.39.1	SMP Negeri 3 Wewewa Tengah	-							-
8.1.40.1	SMP Negeri 6 Wewewa Timur	-							-
8.1.41.1	SMP Negeri 4 Wewewa Selatan	-							-
8.1.45.1	SMP Negeri 3 Kota Tambolaka	-							-
8.1.46.1	SMP Negeri 4 Kodi Balaghar	-							-
8.1.47.1	SMP Negeri 4 Loura	-							-
8.1.48.1	SMP Negeri 2 Kota Tambolaka	249.640.000,00							249.640.000,00
8.1.49.1	SMP Negeri 5 Kodi Utara	-							-
8.1.50.1	SMP Negeri 5 Kodi	-							-
8.1.51.1	SMP Negeri 2 Kodi Bangedo	-							-
8.1.52.1	SMP Negeri 5 Wewewa Barat	-							-
8.1.53.1	SMP Negeri 3 Wewewa Selatan	-							-
8.1.55.1	SMP Negeri 3 Kodi Utara	-							-
8.1.56.1	SMPN 6 KODI UTARA	-							-
8.1.57.1	SMP Negeri 5 Wewewa Selatan	131.250.000,00							131.250.000,00
8.1.59.1	SMP Negeri 7 Wewewa Timur	200.000.000,00							200.000.000,00
8.1.60.1	SMP Negeri 4 Wewewa Tengah	65.000.000,00							65.000.000,00
8.1.61.1	SMP Negeri 8 Wewewa Timur	-							-
8.1.62.1	SMP Negeri 6 Kodi	-							-
8.1.63.1	SMP Negeri 5 Kodi Balaghar	50.000.000,00							50.000.000,00
8.1.64.1	SMP Negeri 5 Loura	-							-
8.1.65.1	SMP Negeri 5 Wewewa Tengah	-							-
8.1.66.1	SMP Negeri 6 Wewewa Selatan	-							-
8.1.67.1	SMP Negeri 4 Kota Tambolaka	-							-
8.1.68.1	SMP Negeri 7 Kodi Utara	110.467.500,00							110.467.500,00
8.1.69.1	SMP Negeri 8 Kodi Utara	-							-

NO	NAMA UPB	SALDO AWAL	REKLASIFIKASI KE P ROPERTI INVESTASI	PERUBAHAN REKENING 108		PENGHAPUSAN	Koreksi HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DII BAWAH Rp500.000,00	SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG				
8.1.70.1	SMP Negeri 6 Wewewa Tengah	-							-
8.2.1.1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-							-
9.1.1.1	DINAS SOSIAL	48.818.000,00							48.818.000,00
9.3.1.1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-							-
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	125.100.000,00							125.100.000,00
10.1.1.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-							-
10.2.1.1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-							-
10.3.1.1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-							-
11.2.1.1	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	1.059.986.730,00							1.059.986.730,00
11.4.1.1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	216.670.890,00							216.670.890,00
11.6.1.1	DINAS PERIKANAN	685.260.500,00							685.260.500,00
12.1.1.1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	-							-
	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN	744.699.920,00							744.699.920,00
13.1.1.1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-							-
13.2.1.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-							-
13.3.1.1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-							-
14.1.1.1	INSPEKTORAT DAERAH	-							-
15.1.1.1	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-							-
16.1.1.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-							-
17.1.1.1	DINAS PARIWISATA	174.388.500,00							174.388.500,00
18.1.1.1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-							-
18.2.1.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	-							-
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	-							
19.1.1.1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-							-
21.1.1.1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-							-
50.1.1.1	KECAMATAN LOURA	1.182.033.330,00							1.182.033.330,00
50.2.1.1	KECAMATAN KODI UTARA	461.574.090,00							461.574.090,00

NO	NAMA UPB	SALDO AWAL	REKLASIFIKASI KE P ROPERTI INVESTASI	PERUBAHAN REKENING 108		PENGHAPUSAN	Koreksi HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DII BAWAH Rp500.000,00	SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG				
50.3.1.1	KECAMATAN KODI	269.569.430,00							269.569.430,00
50.4.1.1	KECAMATAN KODI BANGEDO	313.769.200,00							313.769.200,00
50.5.1.1	KECAMATAN WEWEWA BARAT	377.901.000,00							377.901.000,00
50.6.1.1	KECAMATAN WEWEWA TIMUR	468.882.700,00							468.882.700,00
50.7.1.1	KECAMATAN WEWEWA UTARA	63.032.950,00							63.032.950,00
50.8.1.1	KECAMATAN WEWEWA SELATAN	645.844.150,00							645.844.150,00
50.9.1.1	KECAMATAN WEWEWA TENGAH	459.061.611,00							459.061.611,00
50.10.1.1	KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA	811.420.200,00							811.420.200,00
50.11.1.1	KECAMATAN KODI BALAGHAR	285.440.600,00							285.440.600,00
50.12.1.1	KELURAHAN LANGGA LERO	58.920.880,00							58.920.880,00
50.13.1.1	KELURAHAN WAITABULA	19.602.000,00							19.602.000,00
JUMLAH		**371.281.409.336,00**	**5.152.285.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**366.129.124.336,00**

LAMPIRAN 8

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

RINCIAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN SKPD KAB. SUMBA BARAT DAYA

TAHUN ANGGARAN 2024

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		MUTASI ANTAR SKPD		PENGAKUAN DARI HUTANG		PENGHAPUSAN	HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DI BAWAH Rp500.000,00	ASET LAINNYA	SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG					
1.4.1.1	SEKRETARIAT DPRD	7.049.658.390,00	399.438.000,00				113.119.558,00	5.190.000,00	1.808.000.000,00				1.355.451.000,00				8.009.574.948,00
4.1.1.1	Bagian Umum	15.958.127.490,00	291.883.000,00					55.235.000,00	1.376.000.000,00				1.322.000.000,00				16.248.775.490,00
4.1.2.1	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	470.465.576,00															470.465.576,00
4.1.3.1	Bagian Organisasi	365.274.750,00															365.274.750,00
4.1.4.1	Bagian Administrasi Pembangunan	1.421.792.167,00															1.421.792.167,00
4.1.5.1	Bagian Hukum	373.837.950,00															373.837.950,00
4.1.6.1	Bagian Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	356.777.700,00	10.250.000,00														367.027.700,00
4.1.7.1	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.265.338.240,00	86.798.000,00						516.000.000,00				133.550.700,00				1.734.585.540,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		MUTASI ANTAR SKPD		PENGAKUAN DARI HUTANG		PENGHAPUSAN	HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DI BAWAH Rp500.000,00	ASET LAINNYA	SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG					
4.1.8.1	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	179.110.000,00	9.100.000,00													18.403.500,00	169.806.500,00
4.1.9.1	Bagian Layanan Pengadaan Jasa	736.384.200,00															736.384.200,00
5.1.1.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	7.934.692.694,00	27.778.000,00														7.962.470.694,00
	UPTD SPAM WEEMARINGI	-	36.604.000,00												900.000,00		35.704.000,00
5.2.1.1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	912.231.200,00	23.500.000,00														935.731.200,00
6.1.1.1	DINAS PERHUBUNGAN	8.030.921.107,00															8.030.921.107,00
6.2.1.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	967.397.400,00	34.467.880,00					4.861.268,00									997.004.012,00
7.1.1.1	Dinas Kesehatan	94.030.139.199,89	3.921.571.000,00			804.650.000,00					26.400.000,00	213.798.000,00			220.000,00		96.959.442.199,89
7.1.2.1	PUSKESMAS WATU KAWULA	1.399.105.256,28	99.121.000,00												1.800.000,00		1.496.426.256,28
7.1.3.1	PUSKESMAS RADAMATA	642.154.180,00	109.492.000,00					7.977.000,00							2.250.000,00		741.419.180,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		MUTASI ANTAR SKPD		PENGAKUAN DARI HUTANG		PENGHAPUSAN	HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DI BAWAH Rp500.000,00	ASET LAINNYA	SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG					
7.1.4.1	PUSKESMAS WAIMANGURA	1.946.034.128,00	110.440.000,00														2.056.474.128,00
7.1.5.1	PUSKESMAS TANGGABA	2.373.279.862,00	60.502.750,00				3.000.000,00	7.123.750,00									2.429.658.862,00
7.1.6.1	PUSKESMAS TENA TEKE	1.454.438.566,00	42.783.460,00					1.143.960,00							7.530.000,00		1.488.548.066,00
7.1.7.1	PUSKESMAS PALLA	2.129.032.939,00	50.092.000,00					542.000,00									2.178.582.939,00
7.1.8.1	PUSKESMAS KORI	1.853.981.151,00	70.300.000,00	332.116.000,00				2.000.000,00									2.254.397.151,00
7.1.9.1	PUSKESMAS BONDOKODI	1.790.548.442,00	38.220.000,00					420.000,00									1.828.348.442,00
7.1.10.1	PUSKESMAS WALLANDIMU	1.538.157.302,00	52.091.662,00					3.000.000,00									1.587.248.964,00
7.1.11.1	PUSKESMAS PANENGGO EDE	1.154.621.918,00	28.913.000,00					5.000.000,00							295.000,00		1.178.239.918,00
7.1.12.1	PUSKESMAS ELOPADA	1.092.475.192,00	78.650.000,00														1.171.125.192,00
7.1.13.1	PUSKESMAS BILLA CENGE	622.892.505,00	44.491.000,00				11.812.500,00	1.700.000,00							7.550.000,00		669.946.005,00
7.1.14.1	PUSKESMAS WEEKOMBAKA	345.278.395,00	60.100.000,00														405.378.395,00
7.1.15.1	PUSKESMAS DELU DEPA	164.464.750,00	45.204.000,00												1.800.000,00		207.868.750,00
7.1.16.1	PUSKEMAS KAWANGO HARI	172.615.200,00	29.164.000,00					264.000,00									201.515.200,00
7.1.17.1	PUSKEMAS WERILOLO	28.325.000,00	42.325.000,00														70.650.000,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		MUTASI ANTAR SKPD		PENGAKUAN DARI HUTANG		PENGHAPUSAN	HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DI BAWAH Rp500.000,00	ASET LAINNYA	SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG					
7.1.18.1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	24.722.241.594,00	2.630.421.037,00				20.741.500,00	398.776.116,00	391.000.000,00						21.989.526,00		27.343.638.489,00
8.1.1.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	46.265.650.869,21	6.304.182.214,00		3.005.088.987,00	683.395.700,00	43.867.900,00						2.598.163.359,11	43.867.900,00	3.229.688.865,00		49.063.674.146,10
8.1.1.2	SD Negeri Waikarya	186.676.500,00	16.914.500,00														203.591.000,00
8.1.1.3	SD Negeri Patuku	242.793.000,00	16.750.000,00														259.543.000,00
8.1.1.4	SD Negeri Peha	155.100.000,00	15.000.000,00														170.100.000,00
8.1.1.5	SD Negeri Hombarica	169.150.000,00	19.500.000,00														188.650.000,00
8.1.1.6	SD Negeri Bonggor	271.895.500,00	17.000.000,00														288.895.500,00
8.1.1.7	SD Negeri Kawango Hari	262.655.500,00	13.700.000,00														276.355.500,00
8.1.1.8	SD Negeri Kalembu Letena	128.100.000,00	18.000.000,00														146.100.000,00
8.1.1.9	SD Negeri Karara Tombo	238.156.000,00	19.000.000,00														257.156.000,00
8.1.1.10	SD Negeri Karoso	198.240.000,00	28.000.000,00														226.240.000,00
8.1.1.11	SD Negeri Bondo Kawango	180.642.383,00	-														180.642.383,00
8.1.1.12	SD Negeri Pabundo Dimu	227.200.000,00	14.000.000,00														241.200.000,00
8.1.1.13	SD Negeri Wery	285.175.500,00	11.750.000,00														296.925.500,00
8.1.1.14	SD Negeri Batu Karang	145.300.000,00	9.500.000,00														154.800.000,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		MUTASI ANTAR SKPD		PENGAKUAN DARI HUTANG		PENGHAPUSAN	HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DI BAWAH Rp500.000,00	ASET LAINNYA	SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG					
8.1.1.15	SD Negeri Wai Cunga	96.100.000,00	9.000.000,00														105.100.000,00
8.1.1.16	SD Negeri Batta	69.350.000,00	11.000.000,00														80.350.000,00
8.1.1.17	SD Negeri Billa	132.900.000,00	10.000.000,00														142.900.000,00
8.1.1.18	SD Negeri Paghohi	272.489.000,00	10.450.000,00												450.000,00		282.489.000,00
8.1.1.19	SD Negeri Homba Tana	98.541.416,00	-														98.541.416,00
8.1.1.20	SD Negeri Balla Moro	225.295.000,60	14.000.000,00														239.295.000,60
8.1.1.21	SD Negeri Wailangira	238.200.000,00	21.000.000,00			4.000.000,00									6.000.000,00		249.200.000,00
8.1.1.22	SD Negeri Kere Pamba	345.285.781,00	19.458.500,00		5.000.000,00												369.744.281,00
8.1.1.23	SD Negeri Wikico Rongo	379.910.000,00	61.500.000,00												7.500.000,00		433.910.000,00
8.1.1.24	SD Negeri Panenggo Ede I	133.700.000,00	26.000.000,00														159.700.000,00
8.1.1.25	SD Negeri Rada Ghalla	162.262.500,00	10.000.000,00														172.262.500,00
8.1.1.26	SD Negeri Panenggo Ede II	223.575.000,00	6.000.000,00														229.575.000,00
8.1.1.27	SD Negeri Katewel	224.153.200,00	14.000.000,00												7.000.000,00		231.153.200,00
8.1.1.28	SD Negeri Payola Umbu	158.225.000,00	14.750.000,00														172.975.000,00
8.1.1.29	SD Negeri Gokata	145.957.000,00	9.500.000,00														155.457.000,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		MUTASI ANTAR SKPD		PENGAKUAN DARI HUTANG		PENGHAPUSAN	HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DI BAWAH Rp500.000,00	ASET LAINNYA	SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG					
8.1.1.30	SD Negeri Loko Lamata	76.700.000,00	5.800.000,00					1.500.000,00									81.000.000,00
8.1.1.31	SD Negeri Wee Tabula II	226.560.000,00	9.500.000,00														236.060.000,00
8.1.1.32	SD Negeri Ledo Ngara	89.700.000,00	10.250.000,00														99.950.000,00
8.1.1.33	SD Negeri Wee Manada	53.000.000,00	-														53.000.000,00
8.1.1.34	SD Negeri Kadula	53.440.831,00	-														53.440.831,00
8.1.1.35	SD Negeri Mananga Aba	46.300.000,00	-														46.300.000,00
8.1.1.36	SD Negeri Kawona	71.950.000,00	-														71.950.000,00
8.1.1.37	SD Negeri Langata	52.500.000,00	-														52.500.000,00
8.1.1.38	SD Negeri Loku Kalada	113.100.000,00	12.250.000,00														125.350.000,00
8.1.1.39	SD Negeri Kalimbu Tillu	293.930.000,00	13.000.000,00														306.930.000,00
8.1.1.40	SD Negeri Potto Katillu	74.730.000,00	9.500.000,00														84.230.000,00
8.1.1.41	SD Negeri Lolo Alle	228.934.105,00	27.500.000,00			6.000.000,00											250.434.105,00
8.1.1.42	SD Negeri Marawang	79.700.000,00	11.000.000,00														90.700.000,00
8.1.1.43	SD Negeri Marokota	174.147.000,00	-														174.147.000,00
8.1.1.44	SD Negeri Pogo Lede	135.600.000,00	55.500.000,00			40.000.000,00											151.100.000,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		MUTASI ANTAR SKPD		PENGAKUAN DARI HUTANG		PENGHAPUSAN	HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DI BAWAH Rp500.000,00	ASET LAINNYA	SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG					
8.1.1.45	SD Negeri Puu Naga	207.694.000,00	10.000.000,00														217.694.000,00
8.1.1.46	SD Negeri Weekapu lota	157.150.000,00	-														157.150.000,00
8.1.1.47	SD Negeri Lola Ramo	359.153.800,00	8.000.000,00														367.153.800,00
8.1.1.48	SD Negeri Gollu Utta	104.622.500,00	10.000.000,00														114.622.500,00
8.1.1.49	SD Negeri Gadi Lete	134.247.000,00	-														134.247.000,00
8.1.1.50	SD Negeri Kandelu Kutura	55.950.000,00	9.500.000,00					500.000,00									64.950.000,00
8.1.1.51	SD Negeri Weekura	88.819.500,00	13.500.000,00			4.000.000,00											98.319.500,00
8.1.1.52	SD Negeri Wowara	88.834.000,00	5.200.000,00														94.034.000,00
8.1.1.53	SD Negeri Wanno Talla	83.350.000,00	13.000.000,00														96.350.000,00
8.1.1.54	SD Negeri Wee Wini	57.140.000,00	-														57.140.000,00
8.1.1.55	SD Negeri Gola	62.200.000,00	-														62.200.000,00
8.1.1.56	SD Negeri Omba Tana Rara	55.489.000,00	9.500.000,00														64.989.000,00
8.1.1.57	SD Negeri Kareka Kakara	163.300.000,00	19.200.000,00												4.200.000,00		178.300.000,00
8.1.1.58	SD Negeri Lete Engge	461.700.400,00	12.300.000,00														474.000.400,00
8.1.1.59	SD Negeri Pombala	102.051.346,00	8.000.000,00														110.051.346,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		MUTASI ANTAR SKPD		PENGAKUAN DARI HUTANG		PENGHAPUSAN	HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DI BAWAH Rp500.000,00	ASET LAINNYA	SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG					
8.1.1.60	SD Negeri Waiwagha	91.366.102,00	13.000.000,00														104.366.102,00
8.1.1.61	SD Negeri Puu Kapaka	82.150.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00											82.150.000,00
8.1.1.62	SD Negeri Puu Kaura	82.350.000,00	9.500.000,00														91.850.000,00
8.1.1.63	SD Negeri Rita	89.473.000,00	9.000.000,00														98.473.000,00
8.1.1.64	SD Negeri Wee Maringi	105.220.111,00	7.125.000,00			7.125.000,00											105.220.111,00
8.1.1.65	SD Negeri Denduka	239.211.000,00	19.500.000,00														258.711.000,00
8.1.1.66	SD Negeri Dimu Dede	25.572.600,00	-														25.572.600,00
8.1.1.67	SD Negeri Mata Wee Karoro	45.700.000,00	20.750.000,00														66.450.000,00
8.1.1.68	SD Negeri Omba Rade	78.800.800,00	19.000.000,00												3.000.000,00		94.800.800,00
8.1.1.69	SD Negeri Tana Kombuka	202.100.000,00	8.500.000,00														210.600.000,00
8.1.1.70	SD Negeri Wee Kokora	201.580.000,00	11.650.000,00														213.230.000,00
8.1.1.71	SD Negeri Ndiki Baru	218.446.000,00	4.800.000,00												4.800.000,00		218.446.000,00
8.1.1.72	SD Negeri Lombu	139.100.590,00	9.000.000,00			1.000.000,00											147.100.590,00
8.1.1.73	SD Negeri Satap Malula	196.700.000,00	-														196.700.000,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		MUTASI ANTAR SKPD		PENGAKUAN DARI HUTANG		PENGHAPUSAN	HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DI BAWAH Rp500.000,00	ASET LAINNYA	SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG					
8.1.1.74	SD Negeri Mareda Kalada	215.650.000,00	26.000.000,00														241.650.000,00
8.1.1.75	SD Negeri Mawo Dana	46.250.000,00	-														46.250.000,00
8.1.1.76	SD Negeri Wano Wara	97.500.000,00	9.000.000,00														106.500.000,00
8.1.1.77	SD Negeri Wee Dindi	82.945.000,00	8.673.000,00												5.400.000,00		86.218.000,00
8.1.1.78	SD Negeri Rita Kaka	348.877.062,00	26.450.000,00			1.200.000,00									3.000.000,00		371.127.062,00
8.1.1.79	SD Negeri Kere Mareda	33.700.000,00	11.000.000,00														44.700.000,00
8.1.1.80	SD Negeri Lete Garona	183.058.000,00	10.200.000,00			1.150.000,00		850.000,00									191.258.000,00
8.1.1.81	SD Negeri Lete Kamouna	51.400.000,00	-														51.400.000,00
8.1.1.82	SD Negeri Kalindaka	74.500.000,00	10.900.000,00														85.400.000,00
8.1.1.83	SD Negeri Kambatana	108.973.000,00	13.000.000,00														121.973.000,00
8.1.1.84	SD Negeri Kanelu	24.498.000,00	9.500.000,00														33.998.000,00
8.1.1.85	SD Negeri Wee Muu	224.276.800,00	12.000.000,00														236.276.800,00
8.1.1.86	SD Negeri Wone	133.110.000,00	11.500.000,00														144.610.000,00
8.1.1.87	SD Negeri Ndapa Taka	130.059.500,00	10.000.000,00														140.059.500,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		MUTASI ANTAR SKPD		PENGAKUAN DARI HUTANG		PENGHAPUSAN	HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DI BAWAH Rp500.000,00	ASET LAINNYA	SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG					
8.1.1.88	SD Negeri Mawo Maliti	70.610.000,00	20.000.000,00														90.610.000,00
8.1.1.89	SD Negeri Bina Wero	186.521.000,00	-														186.521.000,00
8.1.1.90	SD Negeri Kalembu Maliti	34.500.000,00	9.300.000,00			4.500.000,00											39.300.000,00
8.1.1.91	SD Negeri Gollu Mareda	68.100.000,00	3.500.000,00														71.600.000,00
8.1.1.92	SD Negeri Pakamandara	117.886.000,00	9.500.000,00														127.386.000,00
8.1.1.93	SD Negeri Rawe	90.900.000,00	800.000,00														91.700.000,00
8.1.1.94	SD Negeri Waiholo	134.100.000,00	8.636.000,00														142.736.000,00
8.1.1.95	SD Negeri Noha	193.750.000,00	9.500.000,00		3.000.000,00		1.000.000,00										207.250.000,00
8.1.1.96	SD Negeri Magho Linyo	85.550.000,00	7.400.000,00		6.000.000,00			1.400.000,00									97.550.000,00
8.1.1.97	SD Negeri Hameli	453.698.500,00	18.550.000,00												1.000.000,00		471.248.500,00
8.1.1.98	SD Negeri Kadimbil	182.350.000,00	3.000.000,00														185.350.000,00
8.1.1.99	SD Negeri Kendu Wela	140.250.000,00	8.000.000,00														148.250.000,00
8.1.1.100	SD Negeri Laikarenga	226.490.000,00	20.100.000,00												1.600.000,00		244.990.000,00
8.1.1.101	SD Negeri Liango Malagho	141.450.000,00	6.000.000,00														147.450.000,00
8.1.1.102	SD Negeri Kapunge Tana	209.240.000,00	10.000.000,00														219.240.000,00
8.1.1.103	SD Negeri Karara	100.627.000,00	-														100.627.000,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		MUTASI ANTAR SKPD		PENGAKUAN DARI HUTANG		PENGHAPUSAN	HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DI BAWAH Rp500.000,00	ASET LAINNYA	SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG					
8.1.1.1 04	SD Negeri Waiboro	119.148.000,00	13.000.000,00														132.148.000,00
8.1.1.1 05	SD Negeri Daha Walu	86.300.000,00	13.200.000,00														99.500.000,00
8.1.1.1 06	SD Negeri Ikit	140.250.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00											140.250.000,00
8.1.1.1 07	SD Negeri Jaha Dukka	57.000.000,00	-														57.000.000,00
8.1.1.1 08	SD Negeri Moro Manduyo	117.884.136,00	10.000.000,00														127.884.136,00
8.1.1.1 09	SD Negeri Karendi	73.200.000,00	20.500.000,00			4.000.000,00											89.700.000,00
8.1.1.1 10	SD Negeri Kalembu Danga	139.000.000,00	10.000.000,00														149.000.000,00
8.1.1.1 11	SD Negeri Homba Pare	113.847.500,00	17.000.000,00														130.847.500,00
8.1.1.1 12	SD Negeri Lara Dimu	116.703.000,00	19.500.000,00														136.203.000,00
8.1.1.1 13	SD Negeri Lorro Inda Bode	105.600.000,00	22.000.000,00												7.000.000,00		120.600.000,00
8.1.1.1 14	SD Negeri Waikalimbu	128.600.000,00	23.500.000,00														152.100.000,00
8.1.1.1 15	SD Negeri Weri Kadu	47.200.000,00	10.000.000,00														57.200.000,00
8.1.1.1 16	SD Negeri Poma	228.148.000,00	9.750.000,00												9.750.000,00		228.148.000,00
8.1.1.1 17	SD Negeri Lokokaki	45.000.000,00	1.100.000,00														46.100.000,00
8.1.1.1 18	SD Negeri Waikelo	50.550.000,00	3.750.000,00														54.300.000,00
8.1.1.1 19	SD Negeri Watu Takula	49.300.000,00	-														49.300.000,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		MUTASI ANTAR SKPD		PENGAKUAN DARI HUTANG		PENGHAPUSAN	HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DI BAWAH Rp500.000,00	ASET LAINNYA	SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG					
8.1.1.120	SD Negeri Omba Ngaingo	75.090.000,00	23.000.000,00		7.000.000,00												105.090.000,00
8.1.1.121	SD Negeri Omba Redapa	62.500.000,00	10.000.000,00														72.500.000,00
8.1.1.122	SD Negeri Padede Weri	56.674.400,00	18.000.000,00												2.275.000,00		72.399.400,00
8.1.1.123	SD Negeri Lolo Wanno	72.436.900,00	15.500.000,00														87.936.900,00
8.1.1.124	SD Negeri Rada Kodi	393.606.000,00	-														393.606.000,00
8.1.1.125	SD Negeri Kalogha	124.200.000,00	-														124.200.000,00
8.1.1.126	SD Negeri Kalembu Palolo	139.200.000,00	15.000.000,00			5.000.000,00											149.200.000,00
8.1.1.127	SD Negeri Hende Monno	274.750.000,00	7.000.000,00														281.750.000,00
8.1.1.128	SD Negeri Kareka Ndara	50.675.000,00	9.500.000,00														60.175.000,00
8.1.1.129	SD Negeri Uma Riti - Kodi Utara	145.350.000,00	-														145.350.000,00
8.1.1.130	SD Negeri Kaninyo - Kodi Utara	160.862.600,00	19.300.000,00														180.162.600,00
8.1.1.131	SD Negeri Gombol - Kodi Utara	261.093.000,00	13.000.000,00														274.093.000,00
8.1.1.132	SD Negeri Rada Meter - Kodi Utara	144.851.000,00	14.000.000,00														158.851.000,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		MUTASI ANTAR SKPD		PENGAKUAN DARI HUTANG		PENGHAPUSAN	HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DI BAWAH Rp500.000,00	ASET LAINNYA	SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG					
8.1.1.133	SD Negeri Bahabu - Kodi Balaghar	150.800.000,00	11.000.000,00														161.800.000,00
8.1.1.134	SD Negeri Waikambala - Kodi	49.000.000,00	3.500.000,00														52.500.000,00
8.1.1.135	SD Negeri Waihari - Kodi	22.800.000,00	-														22.800.000,00
8.1.1.136	SD Negeri Pogo Tena - Loura	36.700.000,00	9.500.000,00														46.200.000,00
8.1.1.137	SD Negeri Prairowa - Loura	59.900.000,00	-														59.900.000,00
8.1.1.138	SD Negeri Tema Tana - Wewewa Timur	32.587.500,00	-														32.587.500,00
8.1.1.139	SD Negeri Rato Ate - Wewewa Utara	49.849.600,00	8.900.000,00				600.000,00										59.349.600,00
8.1.1.140	SD Negeri Waimalala - Kodi	81.465.000,00	12.000.000,00														93.465.000,00
8.1.1.141	SD Negeri Gollu Dara	60.000.000,00	-														60.000.000,00
8.1.1.142	SD Negeri Gollu Togo	50.690.000,00	9.500.000,00														60.190.000,00
8.1.1.143	SD Negeri Omba Key	17.000.000,00	16.500.000,00		4.500.000,00												38.000.000,00
8.1.1.144	SD Negeri Komi Katto	4.000.000,00	8.000.000,00														12.000.000,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		MUTASI ANTAR SKPD		PENGAKUAN DARI HUTANG		PENGHAPUSAN	HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DI BAWAH Rp500.000,00	ASET LAINNYA	SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG					
8.1.1.145	SD NEGERI MANU DEDE	19.500.000,00	12.600.000,00												7.600.000,00		24.500.000,00
8.1.1.146	SD NEGERI PARE KARABU	-	2.200.000,00		3.000.000,00		9.000.000,00								1.100.000,00		13.100.000,00
8.1.1.147	SD NEGERI KEDDE KEHE	-	10.000.000,00														10.000.000,00
8.1.1.148	SD NEGERI BALING	-	19.750.000,00					2.200.000,00							4.050.000,00		13.500.000,00
8.1.2.1	SMP Negeri 1 Kota Tambolaka	613.047.967,57	102.750.000,00												56.000.000,00		659.797.967,57
8.1.3.1	SMP Negeri 1 Kodi Utara	851.213.500,00	106.000.000,00			37.000.000,00		10.000.000,00							20.000.000,00		890.213.500,00
8.1.4.1	SMP Negeri 2 Kodi Utara	294.964.200,00	-														294.964.200,00
8.1.5.1	SMP Negeri 1 Kodi	885.553.300,00	109.200.000,00												44.450.000,00		950.303.300,00
8.1.6.1	SMP Negeri 2 Kodi	540.147.300,00	59.330.000,00														599.477.300,00
8.1.7.1	SMP Negeri 1 Kodi Bangedo	118.582.000,00	50.800.000,00												1.800.000,00		167.582.000,00
8.1.8.1	SMP Negeri 1 Kodi Balaghar	308.784.700,00	57.100.000,00												8.000.000,00		357.884.700,00
8.1.9.1	SMP Negeri 2 Kodi Balaghar	257.334.924,72	-														257.334.924,72
8.1.10.1	SMP Negeri 1 Wewewa Barat	547.151.903,41	4.000.000,00														551.151.903,41
8.1.11.1	SMP Negeri 2 Wewewa Barat	521.333.770,67	34.000.000,00												18.000.000,00		537.333.770,67

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		MUTASI ANTAR SKPD		PENGAKUAN DARI HUTANG		PENGHAPUSAN	HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DI BAWAH Rp500.000,00	ASET LAINNYA	SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG					
8.1.12.1	SMP Negeri 3 Wewewa Barat	487.214.069,94	20.000.000,00														507.214.069,94
8.1.13.1	SMP Negeri 1 Wewewa Selatan	501.360.000,00	74.400.000,00														575.760.000,00
8.1.14.1	SMP Negeri 2 Wewewa Selatan	557.395.660,00	60.550.000,00			8.000.000,00									8.250.000,00		601.695.660,00
8.1.15.1	SMP Negeri 1 Wewewa Timur	778.897.367,32	20.550.000,00														799.447.367,32
8.1.16.1	SMP Negeri 1 Wewewa Tengah	847.450.000,00	78.900.000,00		8.000.000,00			2.200.000,00							22.600.000,00		909.550.000,00
8.1.17.1	SMP Negeri 2 Wewewa Timur	332.018.557,00	73.250.000,00														405.268.557,00
8.1.18.1	SMP Negeri 3 Wewewa Timur	415.561.170,61	3.500.000,00														419.061.170,61
8.1.19.1	SMP Negeri 2 Wewewa Tengah	413.244.000,00	83.700.000,00			15.000.000,00									45.200.000,00		436.744.000,00
8.1.20.1	SMP Negeri 4 Wewewa Timur	425.258.000,00	35.400.000,00														460.658.000,00
8.1.21.1	SMP Negeri 1 Wewewa Utara	443.462.171,31	19.100.000,00					600.000,00									461.962.171,31
8.1.29.1	SMP Negeri 5 Wewewa Timur	253.654.000,00	15.500.000,00												5.500.000,00		263.654.000,00
8.1.30.1	SMP Negeri 4 Wewewa Barat	332.169.518,00	36.000.000,00														368.169.518,00
8.1.31.1	SMP Negeri 2 Loura	192.350.031,87	-														192.350.031,87
8.1.32.1	SMP Negeri 1 Loura	272.747.800,00	2.210.000,00														274.957.800,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		MUTASI ANTAR SKPD		PENGAKUAN DARI HUTANG		PENGHAPUSAN	HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DI BAWAH Rp500.000,00	ASET LAINNYA	SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG					
8.1.33.1	SMP Negeri 4 Kodi Utara	362.441.664,00	29.000.000,00														391.441.664,00
8.1.34.1	SMP Negeri 3 Kodi Balaghar	381.665.000,00	49.975.000,00												14.875.000,00		416.765.000,00
8.1.35.1	SMPN 4 KODI	630.492.900,00	28.173.000,00												11.700.000,00		646.965.900,00
8.1.36.1	SMP Negeri 2 Wewewa Utara	289.013.280,00	35.250.000,00												2.500.000,00		321.763.280,00
8.1.37.1	SMP Negeri 3 Kodi	195.105.000,00															195.105.000,00
8.1.38.1	SMP Negeri 3 Loura	200.784.400,00	-														200.784.400,00
8.1.39.1	SMP Negeri 3 Wewewa Tengah	270.038.850,00	50.556.250,00					400.000,00							7.762.500,00		312.432.600,00
8.1.40.1	SMP Negeri 6 Wewewa Timur	242.631.000,00	23.073.000,00														265.704.000,00
8.1.41.1	SMP Negeri 4 Wewewa Selatan	113.900.000,00	17.950.000,00														131.850.000,00
8.1.45.1	SMP Negeri 3 Kota Tambolaka	1.492.731.420,00	83.600.000,00		14.400.000,00			3.500.000,00							15.100.000,00		1.572.131.420,00
8.1.46.1	SMP Negeri 4 Kodi Balaghar	220.470.000,00	8.871.000,00														229.341.000,00
8.1.47.1	SMP Negeri 4 Loura	383.348.340,00	25.601.000,00		6.400.000,00	4.410.000,00											410.939.340,00
8.1.48.1	SMP Negeri 2 Kota Tambolaka	99.642.461,00	14.000.000,00														113.642.461,00
8.1.49.1	SMP Negeri 5 Kodi Utara	224.864.600,00	18.000.000,00			6.000.000,00											236.864.600,00
8.1.50.1	SMP Negeri 5 Kodi	302.660.000,00	36.500.000,00														339.160.000,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		MUTASI ANTAR SKPD		PENGAKUAN DARI HUTANG		PENGHAPUSAN	HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DI BAWAH Rp500.000,00	ASET LAINNYA	SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG					
8.1.51.1	SMP Negeri 2 Kodi Bangedo	413.649.000,00	67.000.000,00			40.000.000,00											440.649.000,00
8.1.52.1	SMP Negeri 5 Wewewa Barat	308.932.300,00	11.000.000,00														319.932.300,00
8.1.53.1	SMP Negeri 3 Wewewa Selatan	211.450.000,00	23.250.000,00			3.500.000,00									2.750.000,00		228.450.000,00
8.1.55.1	SMP Negeri 3 Kodi Utara	388.348.300,00	4.900.000,00												900.000,00		392.348.300,00
8.1.56.1	SMPN 6 KODI UTARA	218.619.016,00	27.900.000,00														246.519.016,00
8.1.57.1	SMP Negeri 5 Wewewa Selatan	440.482.000,00	17.000.000,00														457.482.000,00
8.1.59.1	SMP Negeri 7 Wewewa Timur	50.497.000,00	10.000.000,00														60.497.000,00
8.1.60.1	SMP Negeri 4 Wewewa Tengah	219.796.000,00	13.523.000,00														233.319.000,00
8.1.61.1	SMP Negeri 8 Wewewa Timur	373.985.000,00	11.500.000,00														385.485.000,00
8.1.62.1	SMP Negeri 6 Kodi	293.517.930,00	62.325.900,00														355.843.830,00
8.1.63.1	SMP Negeri 5 Kodi Balaghar	273.768.000,00	-														273.768.000,00
8.1.64.1	SMP Negeri 5 Loura	161.470.000,00	-														161.470.000,00
8.1.65.1	SMP Negeri 5 Wewewa Tengah	76.301.200,00	29.680.000,00												17.980.000,00		88.001.200,00
8.1.66.1	SMP Negeri 6 Wewewa Selatan	194.274.500,00	-														194.274.500,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		MUTASI ANTAR SKPD		PENGAKUAN DARI HUTANG		PENGHAPUSAN	HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DI BAWAH Rp500.000,00	ASET LAINNYA	SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG					
8.1.67.1	SMP Negeri 4 Kota Tambolaka	380.668.700,00	10.200.000,00														390.868.700,00
8.1.68.1	SMP Negeri 7 Kodi Utara	79.093.500,00	34.700.000,00			4.500.000,00											109.293.500,00
8.1.69.1	SMP Negeri 8 Kodi Utara	8.989.000,00	40.650.000,00														49.639.000,00
8.1.70.1	SMP Negeri 6 Wewewa Tengah	15.240.000,00	20.100.000,00			3.100.000,00											32.240.000,00
8.2.1.1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	899.854.000,00															899.854.000,00
9.1.1.1	DINAS SOSIAL	1.034.076.167,00	61.046.000,00														1.095.122.167,00
9.3.1.1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.060.058.067,00	57.000.000,00													27.815.750,00	3.089.242.317,00
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	242.451.650,00	13.523.000,00														255.974.650,00
10.1.1.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.730.235.257,00	43.139.000,00								322.953.000,00						3.096.327.257,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		MUTASI ANTAR SKPD		PENGAKUAN DARI HUTANG		PENGHAPUSAN	HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DI BAWAH Rp500.000,00	ASET LAINNYA	SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG					
10.2.1.1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.674.487.865,00	1.136.535.700,00					10.381.000,00							7.650.000,00		7.792.992.565,00
10.3.1.1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.409.516.383,00															1.409.516.383,00
11.2.1.1	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	11.926.713.348,00	100.000.000,00														12.026.713.348,00
11.4.1.1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	6.549.684.184,97	28.900.000,00					2.500.000,00									6.576.084.184,97
11.6.1.1	DINAS PERIKANAN	2.843.456.625,00	151.971.745,00					48.568.605,00									2.946.859.765,00
12.1.1.1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	1.384.871.909,00	40.125.000,00														1.424.996.909,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		MUTASI ANTAR SKPD		PENGAKUAN DARI HUTANG		PENGHAPUSAN	HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DI BAWAH Rp500.000,00	ASET LAINNYA	SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG					
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.320.993.647,00	13.330.000,00					1.330.000,00	482.000.000,00								1.814.993.647,00
13.1.1.1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4.408.456.167,00	6.213.325.000,00							6.019.000.000,00							4.602.781.167,00
13.2.1.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.351.097.925,00	177.668.000,00						482.000.000,00								2.010.765.925,00
13.3.1.1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.982.003.353,00	14.700.000,00														1.996.703.353,00
14.1.1.1	INSPEKTORAT DAERAH	1.096.105.257,00	56.841.000,00										293.586.500,00		4.350.000,00		855.009.757,00
15.1.1.1	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.380.849.050,00	233.258.000,00				19.191.250,00										1.633.298.300,00
16.1.1.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.667.612.519,90	94.104.750,00					12.304.750,00								819.296.070,00	3.930.116.449,90

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		MUTASI ANTAR SKPD		PENGAKUAN DARI HUTANG		PENGHAPUSAN	HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DI BAWAH Rp500.000,00	ASET LAINNYA	SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG					
17.1.1.1	DINAS PARIWISATA	1.123.229.600,00	23.648.500,00					148.500,00									1.146.729.600,00
18.1.1.1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	858.507.015,00	23.500.000,00														882.007.015,00
18.2.1.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.229.291.594,00	50.230.000,00	24.500.000,00					482.000.000,00								1.786.021.594,00
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	72.957.350,00	117.239.000,00	105.000.000,00					482.000.000,00						2.700.000,00		774.496.350,00
19.1.1.1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.385.691.826,00	96.880.000,00														2.482.571.826,00
21.1.1.1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.239.442.687,00	61.273.000,00													16.400.000,00	1.284.315.687,00
50.1.1.1	KECAMATAN LOURA	883.708.471,77														304.917.067,00	578.791.404,77
50.2.1.1	KECAMATAN KODI UTARA	1.115.342.135,00															1.115.342.135,00
50.3.1.1	KECAMATAN KODI	805.415.161,00	16.273.000,00														821.688.161,00
50.4.1.1	KECAMATAN KODI BANGEDO	739.413.954,00	24.668.750,00												400.000,00		763.682.704,00
50.5.1.1	KECAMATAN WEWEWA BARAT	869.600.485,00	1.650.000,00														871.250.485,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		MUTASI ANTAR SKPD		PENGAKUAN DARI HUTANG		PENGHAPUSAN	HIBAH KELUAR	BELANJA MODAL DI BAWAH Rp500.000,00	ASET LAINNYA	SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG					
50.6.1.1	KECAMATAN WEWEWA TIMUR	827.968.741,00															827.968.741,00
50.7.1.1	KECAMATAN WEWEWA UTARA	355.351.500,00	16.700.000,00														372.051.500,00
50.8.1.1	KECAMATAN WEWEWA SELATAN	903.942.415,00															903.942.415,00
50.9.1.1	KECAMATAN WEWEWA TENGAH	1.063.903.028,00	28.700.000,00														1.092.603.028,00
50.10.1.1	KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA	863.918.932,00															863.918.932,00
50.11.1.1	KECAMATAN KODI BALAGHAR	845.318.281,01															845.318.281,01
50.12.1.1	KELURAHAN LANGGALERO	173.785.585,00	22.800.000,00														196.585.585,00
50.13.1.1	KELURAHAN WAITABULA	173.927.352,57	32.185.500,00														206.112.852,57
JUMLAH		**341.701.391.858,62**	**27.119.273.098,00**	**461.616.000,00**	**3.062.388.987,00**	**1.693.530.700,00**	**222.332.708,00**	**591.615.949,00**	**6.019.000.000,00**	**6.019.000.000,00**	**349.353.000,00**	**213.798.000,00**	**5.702.751.559,11**	**43.867.900,00**	**3.668.215.891,00**	**1.186.832.387,00**	**359.815.725.945,51**

LAMPIRAN 9

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

RINCIAN ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN PER 31 DESEMBER 2024

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		HIBAH KELUAR	KURANG VOLUME	SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG			
1.4.1.1	SEKRETARIAT DPRD	486.121.304,00									486.121.304,00
4.1.1.1	Bagian Umum	531.775.000,00									531.775.000,00
4.1.2.1	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	189.939.611,00									189.939.611,00
4.1.4.1	Bagian Administrasi Pembangunan	57.703.000,00									57.703.000,00
5.1.1.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	80.951.332.604,23	3.973.933.300,00							10.100.314,74	84.915.165.589,49
6.1.1.1	DINAS PERHUBUNGAN	586.421.212,69									586.421.212,69
7.1.1.1	Dinas Kesehatan	138.431.811.852,07	6.478.945.815,00			20.000.000,00	90.601.800,00			28.049.356,44	144.953.310.110,63
7.1.2.1	PUSKESMAS WATU KAWULA	1.252.417.500,00									1.252.417.500,00
7.1.4.1	PUSKESMAS WAIMANGURA	637.499.000,00									637.499.000,00
7.1.5.1	PUSKESMAS TANGGABA	40.000.000,00									40.000.000,00
7.1.6.1	PUSKESMAS TENA TEKE	1.069.174.000,00									1.069.174.000,00
7.1.7.1	PUSKESMAS PALLA	193.879.660,00									193.879.660,00
7.1.8.1	PUSKESMAS KORI	553.829.000,00									553.829.000,00
7.1.9.1	PUSKESMAS BONDO KODI	630.737.474,00									630.737.474,00
7.1.10.1	PUSKESMAS WALLANDIMU	686.499.000,00									686.499.000,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		HIBAH KELUAR	KURANG VOLUME	SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG			
7.1.11.1	PUSKESMAS PANENGGO EDE	1.220.801.700,00									1.220.801.700,00
7.1.12.1	PUSKESMAS ELOPADA	1.575.560.000,00									1.575.560.000,00
7.1.13.1	PUSKESMAS BILLA CENGE	310.382.000,00									310.382.000,00
7.1.18.1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	10.557.550.136,26									10.557.550.136,26
8.1.1.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	196.861.009.549,34	23.946.115.084,00	20.343.468.303,00	26.406.030.361,00	748.260.250,00	137.551.666,00		151.196.400,00	78.483.448,81	266.716.234.864,53
8.1.2.1	SMP Negeri 1 Kota Tambolaka	4.064.816.840,00									4.064.816.840,00
8.1.3.1	SMP Negeri 1 Kodi Utara	3.366.243.247,00									3.366.243.247,00
8.1.4.1	SMP Negeri 2 Kodi Utara	1.749.922.000,00									1.749.922.000,00
8.1.5.1	SMP Negeri 1 Kodi	2.623.414.517,00									2.623.414.517,00
8.1.6.1	SMP Negeri 2 Kodi	1.232.631.430,00									1.232.631.430,00
8.1.7.1	SMP Negeri 1 Kodi Bangedo	892.960.000,00									892.960.000,00
8.1.8.1	SMP Negeri 1 Kodi Balaghar	310.624.000,00									310.624.000,00
8.1.9.1	SMP Negeri 2 Kodi Balaghar	3.000.881.530,00									3.000.881.530,00
8.1.10.1	SMP Negeri 1 Wewewa Barat	2.357.002.017,00									2.357.002.017,00
8.1.11.1	SMP Negeri 2 Wewewa Barat	2.989.664.027,00									2.989.664.027,00
8.1.12.1	SMP Negeri 3 Wewewa Barat	1.310.000.000,00									1.310.000.000,00
8.1.13.1	SMP Negeri 1 Wewewa Selatan	2.290.927.417,00									2.290.927.417,00
8.1.14.1	SMP Negeri 2 Wewewa Selatan	1.947.422.067,00			8.000.000,00						1.955.422.067,00
8.1.15.1	SMP Negeri 1 Wewewa Timur	4.404.123.517,00									4.404.123.517,00
8.1.16.1	SMP Negeri 1 Wewewa Tengah	2.056.781.530,00									2.056.781.530,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		HIBAH KELUAR	KURANG VOLUME	SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG			
8.1.17.1	SMP Negeri 2 Wewewa Timur	1.893.289.567,00									1.893.289.567,00
8.1.18.1	SMP Negeri 3 Wewewa Timur	2.362.968.917,00									2.362.968.917,00
8.1.19.1	SMP Negeri 2 Wewewa Tengah	1.567.094.180,00									1.567.094.180,00
8.1.20.1	SMP Negeri 4 Wewewa Timur	1.401.532.067,00									1.401.532.067,00
8.1.21.1	SMP Negeri 1 Wewewa Utara	431.833.000,00									431.833.000,00
8.1.29.1	SMP Negeri 5 Wewewa Timur	1.548.628.642,00									1.548.628.642,00
8.1.30.1	SMP Negeri 4 Wewewa Barat	1.187.866.193,00									1.187.866.193,00
8.1.31.1	SMP Negeri 2 Loura	1.822.568.425,00									1.822.568.425,00
8.1.32.1	SMP Negeri 1 Loura	855.091.091,00									855.091.091,00
8.1.33.1	SMP Negeri 4 Kodi Utara	1.313.956.142,00									1.313.956.142,00
8.1.34.1	SMP Negeri 3 Kodi Balaghar	751.500.000,00									751.500.000,00
8.1.35.1	SMPN 4 KODI	480.898.295,62									480.898.295,62
8.1.36.1	SMP Negeri 2 Wewewa Utara	648.713.455,81									648.713.455,81
8.1.37.1	SMP Negeri 3 Kodi	829.231.200,00									829.231.200,00
8.1.38.1	SMP Negeri 3 Loura	315.388.134,00									315.388.134,00
8.1.39.1	SMP Negeri 3 Wewewa Tengah	1.113.708.800,00									1.113.708.800,00
8.1.41.1	SMP Negeri 4 Wewewa Selatan	549.386.200,00									549.386.200,00
8.1.45.1	SMP Negeri 3 Kota Tambolaka	2.458.318.344,29									2.458.318.344,29
8.1.46.1	SMP Negeri 4 Kodi Balaghar	947.344.000,00									947.344.000,00
8.1.47.1	SMP Negeri 4 Loura	1.148.698.829,37									1.148.698.829,37
8.1.48.1	SMP Negeri 2 Kota Tambolaka	808.133.000,00									808.133.000,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		HIBAH KELUAR	KURANG VOLUME	SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG			
8.1.49.1	SMP Negeri 5 Kodi Utara	201.340.000,00									201.340.000,00
8.1.50.1	SMP Negeri 5 Kodi	559.684.634,35									559.684.634,35
8.1.51.1	SMP Negeri 2 Kodi Bangedo	1.786.051.000,00									1.786.051.000,00
8.1.52.1	SMP Negeri 5 Wewewa Barat	1.006.330.214,54									1.006.330.214,54
8.1.53.1	SMP Negeri 3 Wewewa Selatan	390.095.634,00									390.095.634,00
8.1.55.1	SMP Negeri 3 Kodi Utara	662.120.184,00									662.120.184,00
8.1.56.1	SMPN 6 KODI UTARA	1.738.489.836,00									1.738.489.836,00
8.1.57.1	SMP Negeri 5 Wewewa Selatan	876.496.530,00									876.496.530,00
8.1.59.1	SMP Negeri 7 Wewewa Timur	847.603.866,00									847.603.866,00
8.1.60.1	SMP Negeri 4 Wewewa Tengah	599.561.898,00									599.561.898,00
8.1.61.1	SMP Negeri 8 Wewewa Timur	1.395.356.515,00									1.395.356.515,00
8.1.62.1	SMP Negeri 6 Kodi	1.577.777.438,00									1.577.777.438,00
8.1.63.1	SMP Negeri 5 Kodi Balaghar	1.256.502.898,00									1.256.502.898,00
8.1.65.1	SMP Negeri 5 Wewewa Tengah	1.108.064.200,00									1.108.064.200,00
8.1.66.1	SMP Negeri 6 Wewewa Selatan	1.256.502.898,00									1.256.502.898,00
8.1.67.1	SMP Negeri 4 Kota Tambolaka	1.753.700.515,00									1.753.700.515,00
8.1.68.1	SMP Negeri 7 Kodi Utara	1.577.777.438,00									1.577.777.438,00
9.1.1.1	DINAS SOSIAL	86.000.000,00									86.000.000,00
9.3.1.1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.400.491.000,00									1.400.491.000,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		HIBAH KELUAR	KURANG VOLUME	SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG			
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.990.480.000,00									1.990.480.000,00
10.1.1.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-					50.939.000,00				50.939.000,00
10.2.1.1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.384.264.896,00	792.348.400,00								4.176.613.296,00
11.2.1.1	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	11.739.910.676,00									11.739.910.676,00
11.4.1.1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	12.581.889.494,76									12.581.889.494,76
11.6.1.1	DINAS PERIKANAN	5.415.096.250,00	235.007.836,00			235.007.836,00					5.415.096.250,00
12.1.1.1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	6.125.443.000,00	76.253.000,00					76.253.000,00			6.125.443.000,00
	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN	40.809.578.413,00									40.809.578.413,00
16.1.1.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	284.259.000,00									284.259.000,00
17.1.1.1	DINAS PARIWISATA	7.235.984.600,00	155.936.324,00								7.391.920.924,00
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	-									-
50.1.1.1	KECAMATAN LOURA	1.004.978.377,00									1.004.978.377,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		HIBAH KELUAR	KURANG VOLUME	SALDO AKHIR
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG			
50.2.1.1	KECAMATAN KODI UTARA	1.450.612.338,00									1.450.612.338,00
50.3.1.1	KECAMATAN KODI	1.943.342.200,00									1.943.342.200,00
50.4.1.1	KECAMATAN KODI BANGEDO	788.584.213,00									788.584.213,00
50.5.1.1	KECAMATAN WEWEWA BARAT	1.410.235.000,00									1.410.235.000,00
50.6.1.1	KECAMATAN WEWEWA TIMUR	1.155.814.805,00									1.155.814.805,00
50.7.1.1	KECAMATAN WEWEWA UTARA	954.811.926,00			19.337.500,00						974.149.426,00
50.8.1.1	KECAMATAN WEWEWA SELATAN	365.605.000,00			50.000.000,00						415.605.000,00
50.9.1.1	KECAMATAN WEWEWA TENGAH	4.427.925.458,00									4.427.925.458,00
50.10.1.1	KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA	2.554.504.987,00									2.554.504.987,00
50.11.1.1	KECAMATAN KODI BALAGHAR	1.555.008.311,00									1.555.008.311,00
50.12.1.1	KELURAHAN LANGGA LERO	375.085.000,00									375.085.000,00
50.13.1.1	KELURAHAN WAITABULA	100.750.000,00									100.750.000,00
JUMLAH		**623.592.116.869,33**	**35.658.539.759,00**	**20.343.468.303,00**	**26.483.367.861,00**	**1.003.268.086,00**	**279.092.466,00**	**76.253.000,00**	**151.196.400,00**	**116.633.119,99**	**705.009.234.652,34**

LAMPIRAN 10

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

RINCIAN ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PER 31 DESEMBER 2024

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS DARI JENIS ASET TETAP YANG LAIN	REKLAS DARI BARANG DAN JASA	KURANG VOLUME	SALDO AKHIR
1.4.1.1	SEKRETARIAT DPRD	219.975.000,00						219.975.000,00
4.1.1.1	Bagian Umum	1.124.295.666,00						1.124.295.666,00
4.1.4.1	Bagian Administrasi Pembangunan	8.701.560,00						8.701.560,00
5.1.1.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1.316.246.202.539,79	90.703.726.973,00	12.405.704.850,00			496.774.851,27	1.418.858.859.511,52
	UPTD SPAM WEEMARINGI	-	396.590.000,00					396.590.000,00
5.2.1.1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.763.075.000,00						5.763.075.000,00
6.1.1.1	DINAS PERHUBUNGAN	5.728.903.200,09	712.750.000,00					6.441.653.200,09
7.1.1.1	Dinas Kesehatan	14.643.500.906,00	2.659.000.000,00		824.650.000,00	49.000.000,00		18.176.150.906,00
7.1.2.1	PUSKESMAS WATU KAWULA	150.899.644,00						150.899.644,00
7.1.4.1	PUSKESMAS WAIMANGURA	176.957.000,00						176.957.000,00
7.1.5.1	PUSKESMAS TANGGABA	70.000.000,00						70.000.000,00
7.1.6.1	PUSKESMAS TENA TEKE	11.600.000,00						11.600.000,00
7.1.7.1	PUSKESMAS PALLA	66.500.000,00						66.500.000,00
7.1.9.1	PUSKESMAS BONDO KODI	167.309.253,00						167.309.253,00
7.1.10.1	PUSKESMAS WALLANDIMU	115.000.000,00						115.000.000,00
7.1.11.1	PUSKESMAS PANENGGO EDE	260.255.000,00						260.255.000,00
7.1.12.1	PUSKESMAS ELOPADA	135.200.000,00						135.200.000,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS DARI JENIS ASET TETAP YANG LAIN	REKLAS DARI BARANG DAN JASA	KURANG VOLUME	SALDO AKHIR
7.1.13.1	PUSKESMAS BILLA CENGE	132.450.000,00						132.450.000,00
7.1.14.1	PUSKESMAS WEEKOMBAKA	3.000.000,00						3.000.000,00
7.1.16.1	PUSKEMAS KAWANGO HARI	-				3.000.000,00		3.000.000,00
7.1.18.1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	2.079.288.723,00						2.079.288.723,00
8.1.1.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6.557.251.594,00		4.359.022.367,00	4.720.275.000,00			15.636.548.961,00
8.1.1.8	SD Negeri Kalembu Letena	3.000.000,00	-					3.000.000,00
8.1.1.10	SD Negeri Karoso	4.000.000,00	-					4.000.000,00
8.1.1.12	SD Negeri Pabundo Dimu	4.000.000,00	-					4.000.000,00
8.1.1.14	SD Negeri Batu Karang	-	-			3.200.000,00		3.200.000,00
8.1.1.18	SD Negeri Paghohi	10.000.000,00	-					10.000.000,00
8.1.1.19	SD Negeri Homba Tana	5.000.000,00	-					5.000.000,00
8.1.1.20	SD Negeri Balla Moro	3.000.000,00	-					3.000.000,00
8.1.1.21	SD Negeri Wailangira	-	-		4.000.000,00			4.000.000,00
8.1.1.22	SD Negeri Kere Pamba	9.500.000,00	-					9.500.000,00
8.1.1.23	SD Negeri Wikico Rongo	5.000.000,00	-					5.000.000,00
8.1.1.25	SD Negeri Rada Ghalla	12.000.000,00	-					12.000.000,00
8.1.1.33	SD Negeri Wee Manada	5.000.000,00	-					5.000.000,00
8.1.1.39	SD Negeri Kalimbu Tillu	2.800.000,00	-					2.800.000,00
8.1.1.41	SD Negeri Lolo Alle	7.108.000,00	-					7.108.000,00
8.1.1.43	SD Negeri Marokota	6.000.000,00	-					6.000.000,00
8.1.1.44	SD Negeri Pogo Lede	-	-		40.000.000,00			40.000.000,00
8.1.1.45	SD Negeri Puu Naga	950.000,00	-					950.000,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS DARI JENIS ASET TETAP YANG LAIN	REKLAS DARI BARANG DAN JASA	KURANG VOLUME	SALDO AKHIR
8.1.1.51	SD Negeri Weekura	-			4.000.000,00			4.000.000,00
8.1.1.54	SD Negeri Wee Wini	2.700.000,00	-					2.700.000,00
8.1.1.56	SD Negeri Omba Tana Rara	3.500.000,00	-					3.500.000,00
8.1.1.57	SD Negeri Kareka Kakara	12.000.000,00	-					12.000.000,00
8.1.1.61	SD Negeri Puu Kapaka	-			3.000.000,00			3.000.000,00
8.1.1.62	SD Negeri Puu Kaura	5.000.000,00	-					5.000.000,00
8.1.1.64	SD Negeri Wee Maringi	-	-		7.125.000,00			7.125.000,00
8.1.1.67	SD Negeri Mata Wee Karoro	3.500.000,00	-					3.500.000,00
8.1.1.69	SD Negeri Tana Kombuka	3.500.000,00	-					3.500.000,00
8.1.1.73	SD Negeri Satap Malula	7.000.000,00	-					7.000.000,00
8.1.1.82	SD Negeri Kalindaka	2.800.000,00	-					2.800.000,00
8.1.1.83	SD Negeri Kambatana	2.000.000,00	-					2.000.000,00
8.1.1.90	SD Negeri Kalembu Maliti	-			4.500.000,00			4.500.000,00
8.1.1.92	SD Negeri Pakamandara	3.000.000,00	-					3.000.000,00
8.1.1.94	SD Negeri Waiholo	3.500.000,00	-					3.500.000,00
8.1.1.95	SD Negeri Noha	-	-			7.500.000,00		7.500.000,00
8.1.1.98	SD Negeri Kadimbil	5.000.000,00	-					5.000.000,00
8.1.1.105	SD Negeri Daha Walu	14.000.000,00	-					14.000.000,00
8.1.1.106	SD Negeri Ikit	-			3.000.000,00			3.000.000,00
8.1.1.109	SD Negeri Karendi	-			4.000.000,00			4.000.000,00
8.1.1.114	SD Negeri Waikalimbu	4.000.000,00	-					4.000.000,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS DARI JENIS ASET TETAP YANG LAIN	REKLAS DARI BARANG DAN JASA	KURANG VOLUME	SALDO AKHIR
8.1.1.119	SD Negeri Watu Takula	2.800.000,00	-					2.800.000,00
8.1.1.124	SD Negeri Rada Kodi	6.000.000,00	-					6.000.000,00
8.1.1.126	SD Negeri Kalembu Palolo	-			5.000.000,00			5.000.000,00
8.1.1.137	SD Negeri Prairowa - Loura	5.600.000,00						5.600.000,00
8.1.1.142	SD Negeri Gollu Togo	3.000.000,00						3.000.000,00
8.1.1.144	SD Negeri Komi Katto	5.500.000,00	-					5.500.000,00
8.1.2.1	SMP Negeri 1 Kota Tambolaka	14.000.000,00	-					14.000.000,00
8.1.3.1	SMP Negeri 1 Kodi Utara	103.000.000,00	-					103.000.000,00
8.1.4.1	SMP Negeri 2 Kodi Utara	2.000.000,00	-					2.000.000,00
8.1.5.1	SMP Negeri 1 Kodi	2.100.000,00	-					2.100.000,00
8.1.8.1	SMP Negeri 1 Kodi Balaghar	20.000.000,00	-					20.000.000,00
8.1.12.1	SMP Negeri 3 Wewewa Barat	9.998.000,00	-					9.998.000,00
8.1.20.1	SMP Negeri 4 Wewewa Timur	17.411.400,00	-					17.411.400,00
8.1.29.1	SMP Negeri 5 Wewewa Timur	44.569.674,85	-					44.569.674,85
8.1.30.1	SMP Negeri 4 Wewewa Barat	22.069.674,85	-					22.069.674,85
8.1.31.1	SMP Negeri 2 Loura	33.069.674,85	-					33.069.674,85
8.1.32.1	SMP Negeri 1 Loura	54.266.954,00	-					54.266.954,00
8.1.34.1	SMP Negeri 3 Kodi Balaghar	36.069.674,85	-					36.069.674,85
8.1.35.1	SMPN 4 KODI	66.326.956,85	-					66.326.956,85
8.1.36.1	SMP Negeri 2 Wewewa Utara	38.422.395,83	-					38.422.395,83

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS DARI JENIS ASET TETAP YANG LAIN	REKLAS DARI BARANG DAN JASA	KURANG VOLUME	SALDO AKHIR
8.1.37.1	SMP Negeri 3 Kodi	16.548.200,00	-					16.548.200,00
8.1.38.1	SMP Negeri 3 Loura	99.950.105,00	-					99.950.105,00
8.1.39.1	SMP Negeri 3 Wewewa Tengah	20.500.000,00	-					20.500.000,00
8.1.40.1	SMP Negeri 6 Wewewa Timur	26.269.674,85	-					26.269.674,85
8.1.41.1	SMP Negeri 4 Wewewa Selatan	67.957.000,00	-					67.957.000,00
8.1.45.1	SMP Negeri 3 Kota Tambolaka	176.587.055,97	-					176.587.055,97
8.1.46.1	SMP Negeri 4 Kodi Balaghar	24.069.674,85	-					24.069.674,85
8.1.47.1	SMP Negeri 4 Loura	91.177.057,68			4.410.000,00			95.587.057,68
8.1.48.1	SMP Negeri 2 Kota Tambolaka	9.800.000,00	-					9.800.000,00
8.1.49.1	SMP Negeri 5 Kodi Utara	25.069.674,85			6.000.000,00			31.069.674,85
8.1.50.1	SMP Negeri 5 Kodi	27.569.674,85	-					27.569.674,85
8.1.51.1	SMP Negeri 2 Kodi Bangedo	24.069.000,00	-					24.069.000,00
8.1.52.1	SMP Negeri 5 Wewewa Barat	108.660.768,49	-					108.660.768,49
8.1.53.1	SMP Negeri 3 Wewewa Selatan	25.069.674,81			3.500.000,00			28.569.674,81
8.1.62.1	SMP Negeri 6 Kodi	228.613.597,00	-					228.613.597,00
8.1.65.1	SMP Negeri 5 Wewewa Tengah	10.000.000,00	-					10.000.000,00
8.1.68.1	SMP Negeri 7 Kodi Utara	244.113.597,00			4.500.000,00			248.613.597,00
8.1.70.1	SMP Negeri 6 Wewewa Tengah	-			3.100.000,00			3.100.000,00
9.1.1.1	DINAS SOSIAL	21.000.000,00						21.000.000,00
9.3.1.1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	26.650.000,00						26.650.000,00
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.762.287.000,00						3.762.287.000,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS DARI JENIS ASET TETAP YANG LAIN	REKLAS DARI BARANG DAN JASA	KURANG VOLUME	SALDO AKHIR
10.1.1.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	39.475.000,00				149.910.000,00		189.385.000,00
10.2.1.1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	53.408.000,00	30.000.000,00					83.408.000,00
10.3.1.1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	25.000.000,00						25.000.000,00
11.2.1.1	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	22.028.733.748,00						22.028.733.748,00
11.4.1.1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	785.683.000,00						785.683.000,00
11.6.1.1	DINAS PERIKANAN	3.775.203.254,00			235.007.836,00			4.010.211.090,00
12.1.1.1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	3.700.000,00						3.700.000,00
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.915.357.341,00						1.915.357.341,00
13.1.1.1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	72.272.000,00						72.272.000,00
15.1.1.1	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	137.400.000,00						137.400.000,00
16.1.1.1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	393.806.000,00						393.806.000,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	HIBAH MASUK	REKLAS DARI JENIS ASET TETAP YANG LAIN	REKLAS DARI BARANG DAN JASA	KURANG VOLUME	SALDO AKHIR
17.1.1.1	DINAS PARIWISATA	3.348.417.936,00						3.348.417.936,00
19.1.1.1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	28.400.000,00						28.400.000,00
50.1.1.1	KECAMATAN LOURA	29.745.000,00						29.745.000,00
50.2.1.1	KECAMATAN KODI UTARA	6.060.000,00						6.060.000,00
50.3.1.1	KECAMATAN KODI	3.600.000,00						3.600.000,00
50.4.1.1	KECAMATAN KODI BANGEDO	20.000.000,00						20.000.000,00
50.5.1.1	KECAMATAN WEWEWA BARAT	37.000.000,00						37.000.000,00
50.6.1.1	KECAMATAN WEWEWA TIMUR	8.374.000,00						8.374.000,00
50.7.1.1	KECAMATAN WEWEWA UTARA	73.000.000,00						73.000.000,00
50.9.1.1	KECAMATAN WEWEWA TENGAH	24.384.000,00						24.384.000,00
50.12.1.1	KELURAHAN LANGGA LERO	1.544.556.777,00	150.000.000,00					1.694.556.777,00
50.13.1.1	KELURAHAN WAITABULA	1.569.067.500,00	158.000.000,00					1.727.067.500,00
JUMLAH		**1.395.254.032.803,31**	**94.810.066.973,00**	**16.764.727.217,00**	**5.876.067.836,00**	**212.610.000,00**	**496.774.851,27**	**1.512.420.729.978,04**

LAMPIRAN 11

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

RINCIAN ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA PER 31 DESEMBER 2024

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		PENGHAPUSAN	SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG		
1.4.1.1	SEKRETARIAT DPRD	25.950.000,00							25.950.000,00
4.1.1.1	Bagian Umum	52.000.000,00							52.000.000,00
4.1.2.1	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	15.650.000,00							15.650.000,00
4.1.3.1	Bagian Organisasi	23.125.800,00							23.125.800,00
4.1.4.1	Bagian Administrasi Pembangunan	6.000.000,00							6.000.000,00
4.1.5.1	Bagian Hukum	17.000.000,00							17.000.000,00
4.1.6.1	Bagian Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	250.000,00							250.000,00
4.1.7.1	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	39.713.000,00							39.713.000,00
5.1.1.1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	423.282.250,00							423.282.250,00
5.2.1.1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.875.000,00							1.875.000,00
6.1.1.1	DINAS PERHUBUNGAN	4.030.000,00							4.030.000,00
6.2.1.1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.600.000,00							5.600.000,00
7.1.1.1	Dinas Kesehatan	21.885.600,00							21.885.600,00
7.1.3.1	PUSKESMAS RADAMATA	1.400.000,00							1.400.000,00
7.1.8.1	PUSKESMAS KORI	1.149.947,00							1.149.947,00
7.1.9.1	PUSKESMAS BONDO KODI	850.000,00							850.000,00
7.1.13.1	PUSKESMAS BILLA CENGE	4.063.000,00							4.063.000,00
8.1.1.1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	19.439.966.136,54	1.411.345.228,00		659.901.148,00				20.191.410.216,54
8.1.1.2	SD Negeri Waikarya	197.897.000,00	-						197.897.000,00
8.1.1.3	SD Negeri Patuku	204.628.500,00	3.882.000						208.510.500,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		PENGHAPUSAN	SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG		
8.1.1.4	SD Negeri Peha	159.240.500,00	-						159.240.500,00
8.1.1.5	SD Negeri Hombarica	190.552.000,00	8.000.000,00						198.552.000,00
8.1.1.6	SD Negeri Satap Bonggor	152.891.300,00	6.000.000,00						158.891.300,00
8.1.1.7	SD Negeri Kawango Hari	287.068.000,00	16.306.000,00						303.374.000,00
8.1.1.8	SD Negeri Kalembu Letena	118.229.641,00	-						118.229.641,00
8.1.1.9	SD Negeri Karara Tombo	235.730.000,00	-						235.730.000,00
8.1.1.10	SD Negeri Karoso	221.626.048,00	10.000.000,00						231.626.048,00
8.1.1.11	SD Negeri Bondo Kawango	174.384.200,00	4.400.000,00						178.784.200,00
8.1.1.12	SD Negeri Pabundo Dimu	110.638.000,00	-						110.638.000,00
8.1.1.13	SD Negeri Wery	156.008.300,00	-						156.008.300,00
8.1.1.14	SD Negeri Batu Karang	122.215.313,00	8.000.000,00						130.215.313,00
8.1.1.15	SD Negeri Wai Cunga	82.301.600,00	-						82.301.600,00
8.1.1.16	SD Negeri Batta	126.575.000,00	**2.500.000,00**						129.075.000,00
8.1.1.17	SD Negeri Billa	116.564.539,00	-						116.564.539,00
8.1.1.18	SD Negeri Paghohi	195.827.500,00	5.000.000,00						200.827.500,00
8.1.1.19	SD Negeri Homba Tana	169.170.000,00	10.000.000,00						179.170.000,00
8.1.1.20	SD Negeri Balla Moro	393.907.677,60	9.416.000,00						403.323.677,60
8.1.1.21	SD Negeri Wailangira	298.737.163,00	4.440.000,00						303.177.163,00
8.1.1.22	SD Negeri Kere Pamba	313.310.000,00	20.000.000,00		5.000.000,00				328.310.000,00
8.1.1.23	SD Negeri Wikico Rongo	329.012.500,00	5.000.000,00						334.012.500,00
8.1.1.24	SD Negeri Panenggo Ede I	279.937.900,00	9.416.000,00						289.353.900,00
8.1.1.25	SD Negeri Rada Ghalla	103.846.442,00	5.885.000,00						109.731.442,00
8.1.1.26	SD Negeri Panenggo Ede II	281.031.200,00	10.763.500,00						291.794.700,00
8.1.1.27	SD Negeri Katewel	81.943.900,00	4.166.200,00						86.110.100,00
8.1.1.28	SD Negeri Payola Umbu	103.389.700,00	7.000.000,00						110.389.700,00
8.1.1.29	SD Negeri Gokata	93.538.600,00	8.000.000,00						101.538.600,00
8.1.1.30	SD Negeri Loko Lamata	59.942.300,00	4.000.000,00						63.942.300,00
8.1.1.31	SD Negeri Wee Tabula II	108.641.300,00	14.000.000,00						122.641.300,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		PENGHAPUSAN	SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG		
8.1.1.32	SD Negeri Ledo Ngara	49.241.000,00	897.500,00						50.138.500,00
8.1.1.33	SD Negeri Wee Manada	60.735.600,00	4.430.000,00						65.165.600,00
8.1.1.34	SD Negeri Kadula	84.562.700,00	5.038.000,00						89.600.700,00
8.1.1.35	SD Negeri Mananga Aba	54.995.900,00	3.000.000,00						57.995.900,00
8.1.1.36	SD Negeri Kawona	28.187.000,00	1.000.000,00						29.187.000,00
8.1.1.37	SD Negeri Langata	22.172.500,00	2.236.000,00						24.408.500,00
8.1.1.38	SD Negeri Loku Kalada	26.096.600,00	2.076.200,00						28.172.800,00
8.1.1.39	SD Negeri Kalimbu Tillu	207.495.100,00	0,00						207.495.100,00
8.1.1.40	SD Negeri Potto Katillu	198.544.904,00	13.000.000,00						211.544.904,00
8.1.1.41	SD Negeri Lolo Alle	220.466.731,00	6.031.000,00	6.000.000,00					232.497.731,00
8.1.1.42	SD Negeri Marawang	87.706.022,00	6.000.000,00						93.706.022,00
8.1.1.43	SD Negeri Marokota	67.579.915,00	10.485.000,00						78.064.915,00
8.1.1.44	SD Negeri Pogo Lede	200.668.214,00	-						200.668.214,00
8.1.1.45	SD Negeri Puu Naga	108.174.000,00	-						108.174.000,00
8.1.1.46	SD Negeri Weekapulota	120.843.200,00	4.251.000,00						125.094.200,00
8.1.1.47	SD Negeri Lola Ramo	99.403.600,00	21.318.500,00						120.722.100,00
8.1.1.48	SD Negeri Gollu Utta	162.259.200,00	-						162.259.200,00
8.1.1.49	SD Negeri Gadi Lete	109.800.300,00	3.531.000,00						113.331.300,00
8.1.1.50	SD Negeri Kandelu Kutura	46.656.000,00	10.500.000,00						57.156.000,00
8.1.1.51	SD Negeri Weekura	109.487.160,00	18.000.000,00						127.487.160,00
8.1.1.52	SD Negeri Wowara	154.788.000,00	4.000.000,00						158.788.000,00
8.1.1.53	SD Negeri Wanno Talla	150.628.820,00	18.000.000,00						168.628.820,00
8.1.1.54	SD Negeri Wee Wini	125.180.700,00	8.000.000,00						133.180.700,00
8.1.1.55	SD Negeri Gola	88.870.500,00	-						88.870.500,00
8.1.1.56	SD Negeri Omba Tana Rara	89.091.620,00	11.000.000,00						100.091.620,00
8.1.1.57	SD Negeri Kareka Kakara	150.673.400,00	5.748.000,00						156.421.400,00
8.1.1.58	SD Negeri Lete Engge	149.717.600,00	-						149.717.600,00
8.1.1.59	SD Negeri Pombala	57.851.700,00	-						57.851.700,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		PENGHAPUSAN	SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG		
8.1.1.60	SD Negeri Waiwagha	80.831.700,00	5.500.000,00						86.331.700,00
8.1.1.61	SD Negeri Puu Kapaka	93.707.100,00	5.276.000,00						98.983.100,00
8.1.1.62	SD Negeri Puu Kaura	73.253.798,00	8.800.000,00						82.053.798,00
8.1.1.63	SD Negeri Rita	161.794.021,00	-						161.794.021,00
8.1.1.64	SD Negeri Wee Maringi	27.642.800,00	-						27.642.800,00
8.1.1.65	SD Negeri Denduka	108.205.600,00	18.000.000,00						126.205.600,00
8.1.1.66	SD Negeri Dimu Dede	26.587.000,00	1.050.000,00						27.637.000,00
8.1.1.67	SD Negeri Mata Wee Karoro	34.667.035,00	8.000.000,00						42.667.035,00
8.1.1.68	SD Negeri Omba Rade	170.497.400,00	10.303.000						180.800.400,00
8.1.1.69	SD Negeri Tana Kombuka	75.727.600,00	18.000.000,00						93.727.600,00
8.1.1.70	SD Negeri Wee Kokora	121.230.000,00	8.000.000,00						129.230.000,00
8.1.1.71	SD Negeri Ndiki Baru	59.873.526,00	7.960.000,00						67.833.526,00
8.1.1.72	SD Negeri Lombu	194.565.163,00	11.948.700,00	1.000.000,00					207.513.863,00
8.1.1.73	SD Negeri Satap Malula	99.493.300,00	-						99.493.300,00
8.1.1.74	SD Negeri Mareda Kalada	137.545.000,00	19.975.500,00						157.520.500,00
8.1.1.75	SD Negeri Mawo Dana	67.060.700,00	3.618.600,00						70.679.300,00
8.1.1.76	SD Negeri Wano Wara	114.272.917,00	8.495.200						122.768.117,00
8.1.1.77	SD Negeri Wee Dindi	85.207.592,00	10.273.500,00						95.481.092,00
8.1.1.78	SD Negeri Rita Kaka	156.457.400,00	36.253.000,00	1.200.000,00					193.910.400,00
8.1.1.79	SD Negeri Kere Mareda	63.011.600,00	3.000.000,00						66.011.600,00
8.1.1.80	SD Negeri Lete Garona	105.396.200,00	11.500.000,00	1.150.000,00					118.046.200,00
8.1.1.81	SD Negeri Lete Kamouna	62.124.500,00	7.500.000,00						69.624.500,00
8.1.1.82	SD Negeri Kalindaka	109.125.000,00	-						109.125.000,00
8.1.1.83	SD Negeri Kambatana	100.040.475,00	3.266.200,00						103.306.675,00
8.1.1.84	SD Negeri Inpres Kanelu	102.631.350,00	2.916.000,00						105.547.350,00
8.1.1.85	SD Negeri Wee Muu	160.075.195,00	15.512.200,00						175.587.395,00
8.1.1.86	SD Negeri Wone	85.020.000,00	13.000.000,00						98.020.000,00
8.1.1.87	SD Negeri Ndapa Taka	74.578.266,00	6.953.000,00						81.531.266,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		PENGHAPUSAN	SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG		
8.1.1.88	SD Negeri Mawo Maliti	75.686.100,00	8.000.000,00						83.686.100,00
8.1.1.89	SD Negeri Bina Wero	60.736.200,00	-						60.736.200,00
8.1.1.90	SD Negeri Kalembu Maliti	39.992.300,00	-						39.992.300,00
8.1.1.91	SD Negeri Gollu Mareda	24.296.200,00	3.665.000,00						27.961.200,00
8.1.1.92	SD Negeri Pakamandara	146.435.274,00	8.000.000,00						154.435.274,00
8.1.1.93	SD Negeri Rawe	49.353.300,00	5.041.000,00						54.394.300,00
8.1.1.94	SD Negeri Waiholo	148.812.509,00	5.000.000,00						153.812.509,00
8.1.1.95	SD Negeri Noha	118.373.700,00	11.000.000,00		3.000.000,00				126.373.700,00
8.1.1.96	SD Negeri Magho Linyo	132.719.311,00	6.000.000,00		6.000.000,00				132.719.311,00
8.1.1.97	SD Negeri Hameli	232.606.300,00	10.000.000,00						242.606.300,00
8.1.1.98	SD Negeri Kadimbil	147.560.820,00	-						147.560.820,00
8.1.1.99	SD Negeri Kendu Wela	230.767.663,00	5.000.000,00						235.767.663,00
8.1.1.100	SD Negeri Laikarenga	245.498.100,00	4.234.100,00						249.732.200,00
8.1.1.101	SD Negeri Liango Malagho	216.691.000,00	-						216.691.000,00
8.1.1.102	SD Negeri Kapunge Tana	144.532.700,00	3.126.000,00						147.658.700,00
8.1.1.103	SD Negeri Karara	148.671.856,00	-						148.671.856,00
8.1.1.104	SD Negeri Waiboro	114.911.555,00	-						114.911.555,00
8.1.1.105	SD Negeri Daha Walu	182.807.800,00	9.300.000,00						192.107.800,00
8.1.1.106	SD Negeri Ikit	213.909.000,00	-						213.909.000,00
8.1.1.107	SD Negeri Jaha Dukka	189.534.000,00	-						189.534.000,00
8.1.1.108	SD Negeri Moro Manduyo	90.770.000,00							90.770.000,00
8.1.1.109	SD Negeri Karendi	99.631.200,00	4.504.900,00						104.136.100,00
8.1.1.110	SD Negeri Kalembu Danga	146.255.000,00	10.000.000,00						156.255.000,00
8.1.1.111	SD Negeri Homba Pare	178.616.600,00	-						178.616.600,00
8.1.1.112	SD Negeri Lara Dimu	62.056.700,00	8.000.000,00						70.056.700,00
8.1.1.113	SD Negeri Lorro Inda Bode	90.209.200,00	-						90.209.200,00
8.1.1.114	SD Negeri Waikalimbu	170.858.400,00	5.752.000,00						176.610.400,00
8.1.1.115	SD Negeri Weri Kadu	57.247.500,00	2.520.000,00						59.767.500,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		PENGHAPUSAN	SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG		
8.1.1.116	SD Negeri Poma	241.902.000,00	-						241.902.000,00
8.1.1.117	SD Negeri Lokokaki	112.144.785,00	9.880.000,00						122.024.785,00
8.1.1.118	SD Negeri Waikelo	81.328.900,00	4.873.700,00						86.202.600,00
8.1.1.119	SD Negeri Watu Takula	78.278.600,00	4.739.000,00						83.017.600,00
8.1.1.120	SD Negeri Omba Ngaingo	68.636.400,00	17.894.000,00		7.000.000,00				79.530.400,00
8.1.1.121	SD Negeri Omba Redapa	71.095.599,00	3.952.000,00						75.047.599,00
8.1.1.122	SD Negeri Padede Weri	64.974.654,00	-						64.974.654,00
8.1.1.123	SD Negeri Lolo Wanno	81.432.600,00	15.020.400,00						96.453.000,00
8.1.1.124	SD Negeri Rada Kodi	212.393.000,00	6.000.000,00						218.393.000,00
8.1.1.125	SD Negeri Kalogha	151.980.000,00	-						151.980.000,00
8.1.1.126	SD Negeri Kalembu Palolo	165.681.000,00	-						165.681.000,00
8.1.1.127	SD Negeri Hende Monno	248.127.100,00	10.354.000,00						258.481.100,00
8.1.1.128	SD Negeri Kareka Ndara	35.018.400,00	5.000.000,00						40.018.400,00
8.1.1.129	SD Negeri Uma Riti - Kodi Utara	80.443.900,00	-						80.443.900,00
8.1.1.130	SD Negeri Kaninyo - Kodi Utara	34.959.000,00	2.164.500,00						37.123.500,00
8.1.1.131	SD Negeri Gombol - Kodi Utara	71.008.300,00	-						71.008.300,00
8.1.1.132	SD Negeri Rada Meter - Kodi Utara	95.517.493,00	3.000.000,00						98.517.493,00
8.1.1.133	SD Negeri Bahabu - Kodi Balaghar	69.501.100,00	-						69.501.100,00
8.1.1.134	SD Negeri Waikambala - Kodi	22.793.000,00	2.000.000,00						24.793.000,00
8.1.1.135	SD Negeri Waihari - Kodi	42.080.000,00	1.000.000,00						43.080.000,00
8.1.1.136	SD Negeri Pogo Tena - Loura	46.520.000,00	12.000.000,00						58.520.000,00
8.1.1.137	SD Negeri Prairowa - Loura	34.651.400,00	2.193.600,00						36.845.000,00
8.1.1.138	SD Negeri Tema Tana - Wewewa Timur	49.794.000,00	-						49.794.000,00
8.1.1.139	SD Negeri Rato Ate - Wewewa Utara	36.499.300,00	-						36.499.300,00
8.1.1.140	SD Negeri Waimalala - Kodi	57.855.000,00	10.515.000,00						68.370.000,00
8.1.1.141	SD Negeri Gollu Dara	12.196.000,00	1.476.000,00						13.672.000,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		PENGHAPUSAN	SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG		
8.1.1.142	SD Negeri Gollu Togo	19.264.000,00	7.000.000,00						26.264.000,00
8.1.1.143	SD Negeri Omba Key	5.924.000,00	12.757.000,00		4.500.000,00				14.181.000,00
8.1.1.144	SD Negeri Komi Katto	3.303.500,00	3.279.800,00						6.583.300,00
8.1.1.145	SD NEGERI MANU DEDE	2.631.000,00	3.111.000,00						5.742.000,00
8.1.1.146	SD NEGERI PARE KARABU	-	10.884.000,00		3.000.000,00		490.000,00		7.394.000,00
8.1.2.1	SMP Negeri 1 Kota Tambolaka	348.795.202,00	63.609.000,00						412.404.202,00
8.1.3.1	SMP Negeri 1 Kodi Utara	290.126.600,00	30.000.000,00	37.000.000,00					357.126.600,00
8.1.4.1	SMP Negeri 2 Kodi Utara	183.939.900,00	10.000.000,00						193.939.900,00
8.1.5.1	SMP Negeri 1 Kodi	206.140.660,00	0,00						206.140.660,00
8.1.6.1	SMP Negeri 2 Kodi	505.565.144,00	30.000.000,00						535.565.144,00
8.1.7.1	SMP Negeri 1 Kodi Bangedo	329.223.337,00	25.520.000,00						354.743.337,00
8.1.8.1	SMP Negeri 1 Kodi Balaghar	281.292.190,00	23.600.800,00						304.892.990,00
8.1.9.1	SMP Negeri 2 Kodi Balaghar	142.189.216,00	-						142.189.216,00
8.1.10.1	SMP Negeri 1 Wewewa Barat	333.669.100,00	19.895.400,00						353.564.500,00
8.1.11.1	SMP Negeri 2 Wewewa Barat	368.389.852,00	25.401.000,00						393.790.852,00
8.1.12.1	SMP Negeri 3 Wewewa Barat	234.870.100,00	5.694.800,00						240.564.900,00
8.1.13.1	SMP Negeri 1 Wewewa Selatan	275.970.700,00	18.425.700,00						294.396.400,00
8.1.14.1	SMP Negeri 2 Wewewa Selatan	127.331.100,00	15.000.000,00						142.331.100,00
8.1.15.1	SMP Negeri 1 Wewewa Timur	125.546.438,00	14.497.000,00						140.043.438,00
8.1.16.1	SMP Negeri 1 Wewewa Tengah	314.556.349,00	26.000.000,00		8.000.000,00				332.556.349,00
8.1.17.1	SMP Negeri 2 Wewewa Timur	202.163.299,00	22.045.600,00						224.208.899,00
8.1.18.1	SMP Negeri 3 Wewewa Timur	121.805.480,00	17.260.100,00						139.065.580,00
8.1.19.1	SMP Negeri 2 Wewewa Tengah	234.454.943,00	25.100.800,00	15.000.000,00					274.555.743,00
8.1.20.1	SMP Negeri 4 Wewewa Timur	137.230.353,00	20.000.000,00						157.230.353,00
8.1.21.1	SMP Negeri 1 Wewewa Utara	77.435.100,00	6.756.400,00						84.191.500,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		PENGHAPUSAN	SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG		
8.1.29.1	SMP Negeri 5 Wewewa Timur	105.076.500,00	16.878.600,00						121.955.100,00
8.1.30.1	SMP Negeri 4 Wewewa Barat	136.084.084,00	-						136.084.084,00
8.1.31.1	SMP Negeri 2 Loura	86.662.640,00	9.280.000,00						95.942.640,00
8.1.32.1	SMP Negeri 1 Loura	93.272.591,00	12.972.000,00						106.244.591,00
8.1.33.1	SMP Negeri 4 Kodi Utara	184.564.500,00	20.362.200,00						204.926.700,00
8.1.34.1	SMP Negeri 3 Kodi Balaghar	165.711.900,00	15.000.000,00						180.711.900,00
8.1.35.1	SMPN 4 KODI	168.226.347,00	25.032.500,00						193.258.847,00
8.1.36.1	SMP Negeri 2 Wewewa Utara	72.895.758,00	21.084.360,00						93.980.118,00
8.1.37.1	SMP Negeri 3 Kodi	111.867.700,00							111.867.700,00
8.1.38.1	SMP Negeri 3 Loura	80.640.100,00	16.964.115,00						97.604.215,00
8.1.39.1	SMP Negeri 3 Wewewa Tengah	270.392.650,00	14.541.500,00						284.934.150,00
8.1.40.1	SMP Negeri 6 Wewewa Timur	41.231.780,00	6.099.000,00						47.330.780,00
8.1.41.1	SMP Negeri 4 Wewewa Selatan	119.424.900,00	6.363.700,00						125.788.600,00
8.1.45.1	SMP Negeri 3 Kota Tambolaka	267.337.320,00	55.025.000,00		14.400.000,00				307.962.320,00
8.1.46.1	SMP Negeri 4 Kodi Balaghar	169.267.555,00	-						169.267.555,00
8.1.47.1	SMP Negeri 4 Loura	114.130.400,00	16.265.500,00		6.400.000,00				123.995.900,00
8.1.48.1	SMP Negeri 2 Kota Tambolaka	81.702.300,00	11.110.000,00						92.812.300,00
8.1.49.1	SMP Negeri 5 Kodi Utara	61.059.400,00	16.430.900,00						77.490.300,00
8.1.50.1	SMP Negeri 5 Kodi	112.918.450,00	16.550.000,00						129.468.450,00
8.1.51.1	SMP Negeri 2 Kodi Bangedo	151.341.800,00	5.000.000,00	40.000.000,00					196.341.800,00
8.1.52.1	SMP Negeri 5 Wewewa Barat	76.721.709,00	-						76.721.709,00
8.1.53.1	SMP Negeri 3 Wewewa Selatan	87.021.000,00	18.000.000,00						105.021.000,00
8.1.55.1	SMP Negeri 3 Kodi Utara	76.337.500,00	5.324.700,00						81.662.200,00
8.1.56.1	SMPN 6 KODI UTARA	106.833.103,00	24.573.700,00						131.406.803,00
8.1.57.1	SMP Negeri 5 Wewewa Selatan	75.952.200,00	-						75.952.200,00
8.1.59.1	SMP Negeri 7 Wewewa Timur	36.798.000,00	-						36.798.000,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		PENGHAPUSAN	SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG		
8.1.60.1	SMP Negeri 4 Wewewa Tengah	118.860.900,00	-						118.860.900,00
8.1.61.1	SMP Negeri 8 Wewewa Timur	42.743.900,00	5.689.100,00						48.433.000,00
8.1.62.1	SMP Negeri 6 Kodi	78.010.800,00	-			11.427.400,00			89.438.200,00
8.1.63.1	SMP Negeri 5 Kodi Balaghar	89.704.700,00	-						89.704.700,00
8.1.64.1	SMP Negeri 5 Loura	31.320.100,00	925.400,00						32.245.500,00
8.1.65.1	SMP Negeri 5 Wewewa Tengah	53.118.853,00	6.460.000,00						59.578.853,00
8.1.66.1	SMP Negeri 6 Wewewa Selatan	32.235.270,00	18.752.400,00						50.987.670,00
8.1.67.1	SMP Negeri 4 Kota Tambolaka	56.786.500,00	*14.438.000,00*						71.224.500,00
8.1.68.1	SMP Negeri 7 Kodi Utara	36.530.000,00	3.500.000,00			10.020.000,00			50.050.000,00
8.1.69.1	SMP Negeri 8 Kodi Utara	2.275.000,00	14.228.500,00						16.503.500,00
8.1.70.1	SMP Negeri 6 Wewewa Tengah	4.110.000,00	-						4.110.000,00
8.2.1.1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.798.160,00							2.798.160,00
9.1.1.1	DINAS SOSIAL	3.000.000,00							3.000.000,00
10.1.1.1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3.200.000,00							3.200.000,00
10.2.1.1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	41.793.600,00							41.793.600,00
10.3.1.1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.500.000,00							4.500.000,00
11.2.1.1	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	38.048.000,00							38.048.000,00
11.4.1.1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	229.263.500,00						180.163.500,00	49.100.000,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		PENGHAPUSAN	SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG		
12.1.1.1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	19.543.500,00							19.543.500,00
13.1.1.1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.000.000,00							1.000.000,00
13.2.1.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14.489.000,00							14.489.000,00
14.1.1.1	INSPEKTORAT DAERAH	6.900.000,00							6.900.000,00
15.1.1.1	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.834.000,00							5.834.000,00
17.1.1.1	DINAS PARIWISATA	13.540.000,00							13.540.000,00
18.2.1.1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	2.420.000,00							2.420.000,00
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	-							
19.1.1.1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	8.000.000,00							8.000.000,00
21.1.1.1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	226.125.850,00							226.125.850,00
50.1.1.1	KECAMATAN LOURA	6.900.000,00							6.900.000,00
50.2.1.1	KECAMATAN KODI UTARA	4.600.000,00							4.600.000,00
50.3.1.1	KECAMATAN KODI	4.540.000,00							4.540.000,00
50.4.1.1	KECAMATAN KODI BANGEDO	900.000,00							900.000,00
50.5.1.1	KECAMATAN WEWEWA BARAT	4.500.000,00							4.500.000,00
50.6.1.1	KECAMATAN WEWEWA TIMUR	3.460.000,00							3.460.000,00
50.7.1.1	KECAMATAN WEWEWA UTARA	2.000.000,00							2.000.000,00
50.8.1.1	KECAMATAN WEWEWA SELATAN	7.600.000,00							7.600.000,00
50.9.1.1	KECAMATAN WEWEWA TENGAH	8.600.000,00							8.600.000,00

KODE UPB	NAMA UPB	SALDO AWAL	REALISASI BELANJA MODAL	REKLAS ANTAR AKUN		REKLAS KE BARANG DAN JASA		PENGHAPUSAN	SALDO AKHIR
				TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG		
50.10.1.1	KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA	14.250.000,00							14.250.000,00
50.11.1.1	KECAMATAN KODI BALAGHAR	2.000.000,00							2.000.000,00
50.12.1.1	KELURAHAN LANGGA LERO	600.000,00							600.000,00
50.13.1.1	KELURAHAN WAITABULA	1.025.000,00							1.025.000,00
JUMLAH		**46.513.845.283,14**	**3.045.057.803,00**	**101.350.000,00**	**717.201.148,00**	**21.447.400,00**	**490.000,00**	**180.163.500,00**	**48.783.845.838,14**

LAMPIRAN 12

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

RINCIAN AKUMULASI PENYUSUTAN PER SKPD

PER 31 DESEMBER 2024

No	SKPD	AKUMULASI PENYUSUTAN 01 JANUARI 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN			AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-24
			PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6.061.700.379,00	973.983.845,00	5.945.389.954,00	217.498.458,00	7.136.872.257,00
2	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.241.343.776,00	2.305.465.801,00	-	10.169.166,00	2.315.634.967,00
3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	857.782.015,00	861.998.681,00	-	-	861.998.681,00
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.955.862.035,72	2.824.746.009,00	156.388.161,72	7.439.792,00	2.988.573.962,72
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.862.863.419,00	1.916.306.335,00	-	-	1.916.306.335,00
6	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4.189.978.994,00	4.395.232.433,00	-	17.381.178,00	4.412.613.611,00
7	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.306.351.759,00	1.352.750.574,00	-	49.519.167,00	1.402.269.741,00
8	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	156.868.146,00	151.255.397,00	-	-	151.255.397,00
9	Bagian Administrasi Pembangunan	1.408.586.770,00	1.414.456.229,00	1.442.575,00	3.528.967,00	1.419.427.771,00
10	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	460.948.909,00	467.298.909,00	3.798.794,00	-	471.097.703,00
11	Bagian Administrasi Perkonomian dan Sumber Daya Alam	190.623.553,00	194.156.261,00	-	-	194.156.261,00
12	Bagian Hukum	344.587.366,00	360.681.366,00	-	-	360.681.366,00
13	Bagian Layanan Pengadaan	493.055.937,00	594.429.040,00	-	-	594.429.040,00
14	Bagian Organisasi	360.868.500,00	363.806.000,00	-	-	363.806.000,00
15	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.184.457.551,00	1.094.685.793,00	-	-	1.094.685.793,00
16	Bagian Umum	13.511.627.157,24	13.098.918.240,00	130.026.070,24	407.905.327,00	13.636.849.637,24
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.423.709.183,90	2.545.988.248,00	254.695,00	8.226.781,90	2.554.469.724,90
18	Dinas Kesehatan	94.911.698.695,72	77.177.408.859,72	25.671.544.925,06	2.505.235.320,00	105.354.189.104,78
19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	774.876.752,00	852.834.515,00	-	-	852.834.515,00

No	SKPD	AKUMULASI PENYUSUTAN 01 JANUARI 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN			AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-24
			PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
20	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	2.346.403.962,00	1.383.393.783,00	1.077.876.099,00	1.187.083,00	2.462.456.965,00
21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.251.397.328,90	3.377.276.053,90	51.727.145,00	182.931.767,00	3.611.934.965,90
22	DINAS PARIWISATA	2.649.714.495,00	1.003.609.844,00	799.747.100,00	1.226.887.914,00	3.030.244.858,00
23	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	652.834.244.024,81	8.145.211.995,00	18.613.222.244,00	704.673.255.628,56	731.431.689.867,56
24	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	12.377.026,00	67.590.107,00	-	-	67.590.107,00
25	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.350.623.344,00	1.371.940.188,00	-	7.604.167,00	1.379.544.355,00
26	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.973.979.190,00	5.183.244.954,00	612.979.177,00	4.715.133,00	5.800.939.264,00
27	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	666.884.021,00	696.380.604,00	-	-	696.380.604,00
28	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.299.135.344,00	1.369.742.290,00	-	-	1.369.742.290,00
29	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	113.860.751.018,55	72.098.080.015,48	58.623.397.166,47	1.973.904.184,80	132.695.381.366,75
30	DINAS PERHUBUNGAN	10.037.466.497,09	7.703.092.590,00	175.439.790,00	2.381.738.643,09	10.260.271.023,09
31	DINAS PERIKANAN	4.871.501.132,00	2.813.210.249,00	1.208.128.738,00	1.126.390.706,00	5.147.729.693,00
32	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.049.394.781,00	1.124.347.643,00	-	-	1.124.347.643,00
33	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.974.670.708,00	1.001.895.989,00	-	2.171.489.382,00	3.173.385.371,00
34	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	5.545.794.803,07	4.787.744.399,07	1.692.600.191,00	265.821.239,00	6.746.165.829,07
35	DINAS SOSIAL	1.015.072.043,33	1.025.042.709,00	36.263.333,33	6.956.250,00	1.068.262.292,33
36	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	23.130.559.267,00	11.912.497.507,00	2.671.393.368,00	9.970.901.413,00	24.554.792.288,00
37	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.269.462.997,00	176.420.692,00	512.530.725,00	3.019.345.885,00	3.708.297.302,00
38	INSPEKTORAT DAERAH	1.090.350.342,00	804.468.666,00	-	-	804.468.666,00
39	KECAMATAN KODI	1.421.733.206,00	874.641.285,00	613.902.245,00	997.500,00	1.489.541.030,00
40	KECAMATAN KODI BALAGHAR	1.149.209.358,01	892.283.556,01	298.857.337,00	-	1.191.140.893,01
41	KECAMATAN KODI BANGEDO	1.109.786.536,04	831.692.628,00	348.523.870,04	4.989.583,00	1.185.206.081,04
42	KECAMATAN KODI UTARA	1.598.600.488,75	1.070.028.679,00	596.911.566,75	3.322.563,00	1.670.262.808,75

No	SKPD	AKUMULASI PENYUSUTAN 01 JANUARI 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN			AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-24
			PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
43	KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA	1.465.766.120,09	847.959.685,00	688.848.085,09	-	1.536.807.770,09
44	KECAMATAN LOURA	1.399.648.221,19	549.146.800,77	574.960.622,42	8.757.089,00	1.132.864.512,19
45	KECAMATAN WEWEWA BARAT	1.468.602.939,33	841.267.673,00	659.771.308,33	11.102.083,00	1.512.141.064,33
46	KECAMATAN WEWEWA SELATAN	956.018.269,00	864.940.478,00	118.638.891,00	-	983.579.369,00
47	KECAMATAN WEWEWA TENGAH	2.135.701.536,00	1.038.242.805,00	1.199.004.947,00	7.450.667,00	2.244.698.419,00
48	KECAMATAN WEWEWA TIMUR	1.224.363.836,00	793.306.242,00	465.277.608,00	3.472.484,00	1.262.056.334,00
49	KECAMATAN WEWEWA UTARA	1.042.690.110,00	317.380.867,00	743.769.071,00	24.372.565,00	1.085.522.503,00
50	KELURAHAN LANGGA LERO	809.385.529,00	161.632.571,00	173.766.657,00	642.512.561,00	977.911.789,00
51	KELURAHAN WAITABULA	534.697.588,48	178.683.186,57	42.545.054,91	478.356.257,00	699.584.498,48
52	PUSKEMAS KAWANGO HARI	89.660.005,00	131.300.545,00	-	12.500,00	131.313.045,00
53	PUSKEMAS WERI LOLO	7.284.792,00	14.865.210,00	-	-	14.865.210,00
54	PUSKESMAS BILLA CENGE	529.670.405,00	578.455.880,00	6.207.640,00	14.008.125,00	598.671.645,00
55	PUSKESMAS BONDO KODI	1.492.497.432,00	1.589.649.533,00	12.455.550,00	32.892.451,00	1.634.997.534,00
56	PUSKESMAS DELU DEPA	69.432.796,00	109.480.267,00	-	-	109.480.267,00
57	PUSKESMAS ELOPADA	874.235.929,00	964.572.457,00	31.511.200,00	22.296.665,00	1.018.380.322,00
58	PUSKESMAS KORI	1.571.651.759,00	1.738.525.226,00	11.076.580,00	-	1.749.601.806,00
59	PUSKESMAS PALLA	1.817.155.340,00	1.941.070.989,00	3.877.594,00	6.482.637,00	1.951.431.220,00
60	PUSKESMAS PANENGGO EDE	1.047.962.216,00	1.017.984.692,00	22.512.466,00	108.147.375,00	1.148.644.533,00
61	PUSKESMAS RADAMATA	460.133.645,00	536.936.419,00	-	-	536.936.419,00
62	PUSKESMAS TANGGABA	1.802.215.881,00	2.014.873.567,00	800.000,00	21.486.099,00	2.037.159.666,00
63	PUSKESMAS TENA TEKE	1.275.845.700,00	1.361.324.156,00	21.383.480,00	1.642.500,00	1.384.350.136,00
64	PUSKESMAS WAIMANGURA	1.539.096.752,00	1.712.398.389,00	12.749.980,00	10.912.348,00	1.736.060.717,00
65	PUSKESMAS WALLANDIMU	1.436.868.863,00	1.474.440.965,00	10.365.808,00	14.183.333,00	1.498.990.106,00
66	PUSKESMAS WATU KAWULA	1.123.684.260,28	1.203.131.255,28	25.048.350,00	15.844.956,00	1.244.024.561,28
67	PUSKESMAS WEEKOMBAKA	208.842.099,00	266.609.907,00	-	81.250,00	266.691.157,00
68	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	10.504.307.577,00	15.066.737.885,00	334.021.712,00	214.647.936,00	15.615.407.533,00
69	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.225.564.257,00	1.250.032.084,00	-	-	1.250.032.084,00

No	SKPD	AKUMULASI PENYUSUTAN 01 JANUARI 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN			AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-24
			PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
70	SEKRETARIAT DPRD	6.967.678.665,48	5.633.508.902,00	92.378.703,48	65.461.325,00	5.791.348.930,48
71	UPTD SPAM WEEMARINGI		6.321.584,00	-	2.203.278,00	8.524.862,00
JUMLAH		**1.023.287.565.334,97**	**286.865.019.182,80**	**125.093.316.578,84**	**731.955.669.682,35**	**1.143.914.005.443,99**

LAMPIRAN 13

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

RINCIAN TAGIHAN JANGKA PANJANG PER 31 DESEMBER 2024

Nomor	Pelaku/Obyek Pemeriksaan	NIP/Instansi Pada Saat Terkena Temuan	Uraian Kasus	Tahun Kejadian/Tahun Pemeriksaan	Saldo Awal	Jumlah Temuan		Saldo Akhir
						Tambah	Kurang	
TEMUAN DILUAR SK PEMBEBANAN SEMENTARA TP/TGR INSPEKTORAT KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TA 2017, 2018 DAN SKTJM								
1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		Pembangunan Puskeswan Kota Tambolaka (DAK)	LHP 2022	24.724.760,03		24.724.760,03	-
2			Pekerjaan Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH Babi) (DAK)	LHP 2022	28.498.962,86		28.498.962,86	-
3			Pekerjaan Pembangunan RPH Ruminansia (DAK)	LHP 2022	24.177.718,35		24.177.718,35	-
4	Dinas P dan K		Pekerjaan Pembangunan Ruang Lab Komputer Beserta Perabotnya SMP N 2 Loura (DAK)	LHP 2022	10.000.000,00		10.000.000,00	-
5			Pekerjaan Pembangunan Ruang Lab Komputer Beserta Perabotnya SMP N 2 Wetim (DAK)	LHP 2022	8.659.349,49		8.659.349,49	-
6			Pekerjaan Ruang Kelas Baru SMPN 3 Kota Tambolaka (DAK)	LHP 2022	35.768.939,98		35.768.939,98	-
7	Kepala PKM Kori	PKM Kori	Belanja Fiktif	LHP 2022	4.946.040,50	-	4.946.040,00	0,5
8	Bendahara Puskesmas Kori periode Januari - Maret 2022	PKM Kori	Belanja Fiktif	LHP 2022	-799	-	-	-799

Nomor	Pelaku/Obyek Pemeriksaan	NIP/Instansi Pada Saat Terkena Temuan	Uraian Kasus	Tahun Kejadian/Tahun Pemeriksaan	Saldo Awal	Jumlah Temuan		Saldo Akhir
9	Kepala Puskesmas	PKM Tenggaba	Belanja Fiktif	LHP 2022	173.465.000,00	-	-	173.465.000,00
10	Bendahara JKN	PKM Tenggaba	Belanja Fiktif	LHP 2022	417.055.006,00	-	6.729.785,00	410.325.221,00
Jumlah					**727.294.978,21**	**0,00**	**11.675.825,00**	**583.789.422,50**
TEMUAN YANG DITETAPKAN DENGAN SK PEMBEBANAN SEMENTARA TP/TGR INSPEKTORAT KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TA 2017, 2018 DAN SKTJM								
1		Desa Bondo Boghila	PBB Belum disetorkan	2009	407.183,00			407.183,00
2	Frans Bulu	Desa Mataloko	Pengeluara Fiktif	2009	2.000.000,00			2.000.000,00
3	Ag. Nd Dapa	Desa Wanno Talla		2009	2.000.000,00			2.000.000,00
4	Christopel Toni	Kantor Kecamatan Kodi Utara	Rangkap Jabatan Fungsional dan Struktural	2009	1.250.000,00			1.250.000,00
5	Alpius Wudy	Kecamatan Wewewa Utara		2009	1.750.000,00			1.750.000,00
6	CV Puspita Bakti		CV. Puspita Bakti ditemui kenyataan bahwa Fungsi Pengawasan tidak dilaksanakan	2009	1.738.412,55			1.738.412,55
7	Himelel Kali Kula	620 025 017	PHR belum disetor	2009	17.800.000,00			17.800.000,00
8		Bagian Ekonomi (Khusus)		2009	3.121.203,00			3.121.203,00
9	Nikodemus U Diala	Nip 19791119 200604 1 001	Pengeluaran tidak sesuai ketentuan	2009	219.850,00			219.850,00
10	Asterius Tamo Ama	620 042 567	Kelebihan pembayaran honorarium	2009	3.025.000,00		1.000.000,00	2.025.000,00
11	David Ngongo	380 047 629	PAD yang belum disetor ke kas daerah	2009	50.415.000,00			50.415.000,00
12	Mekianus M Ndapa	19540413 197806 1 001	Perangkapan jabatan fungsional dan struktural	2009	2.900.000,00			2.900.000,00

Nomor	Pelaku/Obyek Pemeriksaan	NIP/Instansi Pada Saat Terkena Temuan	Uraian Kasus	Tahun Kejadian/Tahun Pemeriksaan	Saldo Awal	Jumlah Temuan		Saldo Akhir
13	Yohanis Ledi Bora	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM	Penyalahgunaan setoran Dana Bergulir sebesar . Dana tersebut telah masuk ke Dinas namun belum disetorkan ke Kas Daerah karena digunakan untuk membiayai kebutuhan dinas.	2009	14.503.628,00			14.503.628,00
14	Petrus Pati Nani	Desa Bia Cenge	Sisa kas yang belum dipertanggungjawabkan	2010	4.510.000,00			4.510.000,00
15	Petrus Tamo Ama	19541124 197703 1 003	Pengeluaran fiktif	2010	13.261.100,00			13.261.100,00
16	Yustinus Sudi Lero	19780715 200012 1 004	PHR yang belum disetor	2010	1.200.000,00			1.200.000,00
17	Kornelis Ama Pote	Desa Waiha	Ketekoran kas	2011	4.000.000,00			4.000.000,00
18		Desa Waiha	Pengeluaran fiktif	2011	11.062.000,00			11.062.000,00
19	Benyamin D Ngandi	Desa Mata Kapore	Pengeluaran fiktif		15.635.000,00			15.635.000,00
20	YOM Tellu	SD Inpres Puu Kaura	Ketekoran kas	2011	5.076.394,00			5.076.394,00
21		SMP Swasta Mbali Nyapu	Ketekoran kas	2011	2.811.290,00			2.811.290,00
22	Hendrikus Jenot		Dana obat 2007 yang belum disetor ke Dinas Kesehatan Kab. SBD	2011	-	100.000,00		100.000,00
23		Kantor Kecamata Wewewa Timur	Pajak Hotel dan Restoran belum disetor	2011	3.050.000,00			3.050.000,00
24		Kantor Kecamatan Kodi Bangedo	Pajak Hotel dan Restoran belum disetor	2011	750.000,00			750.000,00
25		Kantor Kecamatan Kodi Utara	Pendobelan pembayaran tunjangan	2011	1.040.000,00			1.040.000,00
26		Kantor Kecamatan Wewewa Selatan	PHR yang belum disetor	2011	3.012.100,00			3.012.100,00

Nomor	Pelaku/Obyek Pemeriksaan	NIP/Instansi Pada Saat Terkena Temuan	Uraian Kasus	Tahun Kejadian/Tahun Pemeriksaan	Saldo Awal	Jumlah Temuan		Saldo Akhir
27		Kantor Kecamatan Wewewa Utara	Kelebihan pembayaran	2011	171.800,00			171.800,00
28	Agustina Dunga A.Ma	19832009032009	Pajak makan minum belum disetor	2012	25.000,00			25.000,00
29	Frederika Novita Lete	19740331 200604 2 007	PAD yang belum disetor	2012	665.000,00			665.000,00
30	CV TB		Kekurangan Pekerjaan Pagar Pengaman Jalan sebanyak 10 M	2012	13.582.140,00			13.582.140,00
31	CV KPI		Kekurangan Volume Pengadaan Buku (CV.KPI) selisih temuan Hasil temuan BPK dan Uji Ulang Inspektorat Kabupaten	2012	213.169.360,00			213.169.360,00
32	Maria Goreti Dasa		Sisa Dana PAD	2012	749.600,00			749.600,00
33	Puskesmas Radamata Rp 1.242.000,Watukawula Rp3.000, Kori 60.000, Bondo kodi 540.000 Palla 159.000		Sisa Kewajiban Puskesmas	2012	162.000,00			162.000,00
34	Petrus Pati Nani		Pembelanjaan Fiktif	2013	41.000.000,00			41.000.000,00
35	Benediktus Bulu Tanggu		Pengeluaran fiktif	2013	10.000.000,00			10.000.000,00
36	Yohanes Geli	Desa Weepangali	Pengeluaran fiktif	2013	7.900.000,00			7.900.000,00
37	Anddreas Bili Panda	Desa Weepangali	Pengeluaran fiktif		9.500.000,00			9.500.000,00
38	Yesaya Holo dan Imanuel K M Ate	Desa Manu Toghi	Terdapat ketekoran kas	2013	2.330.000,00			2.330.000,00
39	Theodorus Tuto Ama	SMP N 2 Kodi utara	Pembayaran Pengeluaran melebihi standar kewajaran sebesar	2013	2.550.000,00			2.550.000,00
40	Theodorus Tuto Ama	SMP N 2 Kodi utara	Pembayaran Pengeluaran melebihi standar kewajaran sebesar	2013	1.185.000,00			1.185.000,00

Nomor	Pelaku/Obyek Pemeriksaan	NIP/Instansi Pada Saat Terkena Temuan	Uraian Kasus	Tahun Kejadian/Tahun Pemeriksaan	Saldo Awal	Jumlah Temuan		Saldo Akhir
41	Yosef Dairo	SDK Kiku Boko, Nip 19801212 200903 1 006			462.925,00			462.925,00
42	Petrus Baiyo Lende	SMP Kristen pala	PHR yang belum disetor	2015	127.000,00			127.000,00
43		SDM Weetombo	PHR yang belum disetor	2015	703.700,00			703.700,00
44		Puskesmas Tanggaba	Biaya transpotasi di luar ketentuan	2016	750.000,00			750.000,00
45		Desa Loko Kalada	Pendobelan Pembiayaan Penghasilan Tetap Aparat	2016	3.750.000,00			3.750.000,00
46	Anggota DPRD	Anggota DPRD	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya tidak sesuai ketentuan	2009	8.662.750,00			8.662.750,00
47	CV Gollu Kapabal	Dinas Pertanian	Pelaksanaan Kontrak atas Pekerjaan Pengadaan Barang Pada Dinas Pertanian TA 2010 tidak Direalisasikan Sesuai Kontrak	2010	6.839.310,00			6.839.310,00
48	CV MEJ (Rumah Dinas Kopel Paramedis Puskesmas Radamata)	Dinas Kesehatan	Terdapat kekurangan volume pekerjaan Rp44.279.969,75	2010	6.995.811,75			6.995.811,75
49	CV UBS (Pembangunan Gedung Farmasi)	Dinas Kesehatan	Terdapat kekurangan volume pekerjaan Rp44.279.969,75		37.294.158,00			37.294.158,00
50	Karisma Pembina Ilmu	Dinas PPO	Kekurangan fisik buku	2010	335.500.199,00			335.500.199,00
51	Asuransi Jiwa Bumi Putra 1912 Cabang Kupang	DPRD	Kelebihan Perhitungan atas Premi Asuransi Kesehatan DPRD	2012	18.000.000,00			18.000.000,00
52	CV Baja Mas	PPO	Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP Pada Dinas PPO: Kekurangan Barang Sebesar Rp14.340.000,00	2013	14.340.000,00			14.340.000,00
53	- AM	DPRD	tidak melaksanakan perjalanan dinas	2014	9.500.000,00			9.500.000,00

Nomor	Pelaku/Obyek Pemeriksaan	NIP/Instansi Pada Saat Terkena Temuan	Uraian Kasus	Tahun Kejadian/Tahun Pemeriksaan	Saldo Awal	Jumlah Temuan		Saldo Akhir
54	- CL	DPRD	tidak melaksanakan perjalanan dinas	2014	9.499.000,00			9.499.000,00
55	- NN	DPRD	tidak melaksanakan perjalanan dinas	2014	9.159.000,00			9.159.000,00
56	- ALN	DPRD	Pertanggungjawaban harga tiket pesawat Garuda yang lebih tinggi dibanding data manifest dari Garuda Indonesia	2014	900.000,00			900.000,00
57	- AK	DPRD	Pertanggungjawaban harga tiket pesawat Garuda yang lebih tinggi dibanding data manifest dari Garuda Indonesia	2014	900.000,00			900.000,00
58	- DBM	DPRD	Pertanggungjawaban harga tiket pesawat Garuda yang lebih tinggi dibanding data manifest dari Garuda Indonesia	2014	838.000,00			838.000,00
59	- DRM	DPRD	Pertanggungjawaban harga tiket pesawat Garuda yang lebih tinggi dibanding data manifest dari Garuda Indonesia	2014	818.000,00			818.000,00
60	- RDO	DPRD	Pertanggungjawaban harga tiket pesawat Garuda yang lebih tinggi dibanding data manifest dari Garuda Indonesia	2014	818.000,00			818.000,00
61	- SB	DPRD	Pertanggungjawaban harga tiket pesawat Garuda yang lebih tinggi dibanding data manifest dari Garuda Indonesia	2014	900.000,00			900.000,00
62	- MRA	DPRD	Pertanggungjawaban harga tiket pesawat Garuda yang lebih tinggi dibanding data manifest dari Garuda Indonesia	2014	900.000,00			900.000,00
63	- MRA	DPRD	Pertanggungjawaban harga tiket pesawat Garuda yang lebih tinggi dibanding data manifest dari Garuda Indonesia	2014	746.000,00			746.000,00

Nomor	Pelaku/Obyek Pemeriksaan	NIP/Instansi Pada Saat Terkena Temuan	Uraian Kasus	Tahun Kejadian/Tahun Pemeriksaan	Saldo Awal	Jumlah Temuan		Saldo Akhir
64	- ML	DPRD	Pertanggungjawaban harga tiket pesawat Garuda yang lebih tinggi dibanding data manifest dari Garuda Indonesia	2014	400.000,00			400.000,00
65	- NB	DPRD	Pertanggungjawaban harga tiket pesawat Garuda yang lebih tinggi dibanding data manifest dari Garuda Indonesia	2014	900.000,00			900.000,00
66	- OJN	DPRD	Pertanggungjawaban harga tiket pesawat Garuda yang lebih tinggi dibanding data manifest dari Garuda Indonesia	2014	838.000,00			838.000,00
67	- DM	DPRD	Pertanggungjawaban harga tiket pesawat Garuda yang lebih tinggi dibanding data manifest dari Garuda Indonesia	2014	900.000,00			900.000,00
68	- DM	DPRD	Pertanggungjawaban harga tiket pesawat Garuda yang lebih tinggi dibanding data manifest dari Garuda Indonesia	2014	746.000,00			746.000,00
69	- STW	DPRD	Pertanggungjawaban harga tiket pesawat Garuda yang lebih tinggi dibanding data manifest dari Garuda Indonesia	2014	400.000,00			400.000,00
70	- TL	DPRD	Pertanggungjawaban harga tiket pesawat Garuda yang lebih tinggi dibanding data manifest dari Garuda Indonesia	2014	900.000,00			900.000,00
71	- JKM	DPRD	Pertanggungjawaban harga tiket pesawat Garuda yang lebih tinggi dibanding data manifest dari Garuda Indonesia	2014	638.000,00			638.000,00
72	- MBR	DPRD	Pertanggungjawaban harga tiket pesawat Garuda yang lebih tinggi dibanding data manifest dari Garuda Indonesia	2014	900.000,00			900.000,00

Nomor	Pelaku/Obyek Pemeriksaan	NIP/Instansi Pada Saat Terkena Temuan	Uraian Kasus	Tahun Kejadian/Tahun Pemeriksaan	Saldo Awal	Jumlah Temuan		Saldo Akhir
73	- PNG	DPRD	Pertanggungjawaban harga tiket pesawat Garuda yang lebih tinggi dibanding data manifest dari Garuda Indonesia	2014	818.000,00			818.000,00
74	- SW	DPRD	Pertanggungjawaban harga tiket pesawat Garuda yang lebih tinggi dibanding data manifest dari Garuda Indonesia	2014	818.000,00			818.000,00
75	- SW	DPRD	Pertanggungjawaban harga tiket pesawat Garuda yang lebih tinggi dibanding data manifest dari Garuda Indonesia	2014	746.000,00			746.000,00
76	- NB	DPRD	Kelebihan pembayaran tiket	2014	542.900,00			542.900,00
77	DTA	DPRD	Perjalanan Dinas yang Tidak Dilaksanakan	2015	5.744.800,00			5.744.800,00
78	OH	DPRD	Perjalanan Dinas yang Tidak Dilaksanakan	2015	8.908.000,00			8.908.000,00
79	Pekerjaan dinding keramik	Dinas Kesehatan	Perbedaan Spesifikasidan Kekurangan Volume	2015	6.528.559,29			6.528.559,29
80	Pemasangan Plafon	Dinas Kesehatan	Perbedaan Spesifikasidan Kekurangan Volume	2015	3.211.104,00			3.211.104,00
81	Puskesmas Palla	Puskesmas Palla	Pemanfaatan dana Kapitasi tidak sesuai ketentuan	2016	6.926.250,00			6.926.250,00
82	Puskesmas Wallandimu	Puskesmas Wallandimu	Pemanfaatan dana Kapitasi tidak sesuai ketentuan	2016	4.300.000,00			4.300.000,00
83		SDN Balamoro		SKTJM Inspektorat 2022	6.929.974,55		6.929.974,55	-
Jumlah					**990.027.502,14**	**100.000,00**	**7.929.974,55**	**982.197.527,59**
TOTAL					**1.717.322.480,35**	**100.000,00**	**72.282.480,76**	**1.565.986.950,09**

LAMPIRAN 14

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

RINCIAN AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD

PER 31 DESEMBER 2024

NO	JENIS ASET TAK BERWUJUD	Pembelihan	Pembukuan	TAHUN PEMBELIAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MASA MANFAAT (TAHUN)	PROSENTASE PENYUSUTAN ATB										TOTAL PENYUSUTAN (6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	NILAI BUKU (16-17)
							THN I (1/10)	THN II (2/10)	THN III (3/10)	THN IV (4/10)	THN V (5/10)	THN VI (6/10)	THN VII (7/10)	THN VIII (8/10)	THN IX (9/10)	THN X (10/10)		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		
1.	LISENSI (WEBSITE KAB. SBD)	31/12/2011	31/12/2011	2011	156.054.900	10	15.605.490	15.605.490	15.605.490	15.605.490	15.605.490	15.605.490	15.605.490	15.605.490	15.605.490	15.605.490	**156.054.900**	-
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																		
1.	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI (PROGRAM APLIKASI PENGGAJIAN PNS)	31/12/2008	31/12/2008	2008	254.045.000	10	25.404.500	25.404.500	25.404.500	25.404.500	25.404.500	25.404.500	25.404.500	25.404.500	25.404.500	25.404.500	**254.045.000**	-
2.	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI (PROGRAM APLIKASI SIMBADA)	31/12/2009	31/12/2009	2009	**274.752.500**	10	27.475.250	27.475.250	27.475.250	27.475.250	27.475.250	27.475.250	27.475.250	27.475.250	27.475.250	27.475.250	**274.752.500**	-
BADAN PENDAPATAN DAERAH																		
3.	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERA	31/12/2011	31/12/2011	2011	190.575.000	10	19.057.500	19.057.500	19.057.500	19.057.500	19.057.500	19.057.500	19.057.500	19.057.500	19.057.500	19.057.500	**190.575.000**	-

NO	JENIS ASET TAK BERWUJUD	Pembelihan	Pembukuan	TAHUN PEMBELIAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MASA MANFAAT (TAHUN)	PROSENTASE PENYUSUTAN ATB										TOTAL PENYUSUTAN (6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	NILAI BUKU (16-17)
							THN I (1/10)	THN II (2/10)	THN III (3/10)	THN IV (4/10)	THN V (5/10)	THN VI (6/10)	THN VII (7/10)	THN VIII (8/10)	THN IX (9/10)	THN X (10/10)		
	SI (PROGRAM APLIKASI PBB DAN BPHTB)																	
	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI (OPERASI SISTEM DATA BASE)	31/12/2012	31/12/2012	2012	2.875.000	10	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500	**2.875.000**	-
	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI (WINDOWS)	31/12/2012	31/12/2012	2012	30.494.500	10	3.049.450	3.049.450	3.049.450	3.049.450	3.049.450	3.049.450	3.049.450	3.049.450	3.049.450	3.049.450	**30.494.500**	-
	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI (ANTIVIRUS)	31/12/2012	31/12/2012	2012	1.752.600	10	175.260	175.260	175.260	175.260	175.260	175.260	175.260	175.260	175.260	175.260	**1.752.600**	-
	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI (PENGADAAN PERANGKAT LUNAK ORACLE SIM PBB)	20/12/2013	20/12/2013	2013	159.500.000	10	15.950.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000,00	**159.500.000,00**	-

NO	JENIS ASET TAK BERWUJUD	Pembelihan	Pembukuan	TAHUN PEMBELIAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MASA MANFAAT (TAHUN)	PROSENTASE PENYUSUTAN ATB										TOTAL PENYUSUTAN (6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	NILAI BUKU (16-17)
							T HN I (1/10)	THN II (2/10)	THN III (3/10)	THN IV (4/10)	THN V (5/10)	THN VI (6/10)	THN VII (7/10)	THN VIII (8/10)	THN IX (9/10)	THN X (10/10)		
	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI (PENGADAAN PERANGKAT LUNAK ORACLE SIM PBB)	12/11/2020	01/12/2020	2020	99.000.000	10	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000							**39.600.000**	59.400.000
	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI (PENGADAAN PERANGKAT LUNAK ORACLE SIM PBB)	12/11/2020	01/12/2020	2020	198.000.000,00	10	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000							**79.200.000**	118.800.000
				2022	197.580.000,00	10	19.758.000	19.758.000									**39.516.000**	158.064.000
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH													
1.	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI (APLIKASI SIMPEGI)	31/12/2008	31/12/2008	2008	54.000.000	10	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	**54.000.000**	-
2.	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI (APLIKASI SIMPEG	31/12/2009	31/12/2009	2009	200.000.000	10	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	**200.000.000**	-

NO	JENIS ASET TAK BERWUJUD	Pembelihan	Pembukuan	TAHUN PEMBELIAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MASA MANFAAT (TAHUN)	PROSENTASE PENYUSUTAN ATB										TOTAL PENYUSUTAN (6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	NILAI BUKU (16-17)
							THN I (1/10)	THN II (2/10)	THN III (3/10)	THN IV (4/10)	THN V (5/10)	THN VI (6/10)	THN VII (7/10)	THN VIII (8/10)	THN IX (9/10)	THN X (10/10)		
	II LANJUTAN)																	
	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI (APLIKASI SIMPEG)	04/11/2016	31/12/2016	2016	68.300.000	10	6.830.000	6.830.000	6.830.000	6.830.000	6.830.000	6.830.000	6.830.000	6.830.000			**54.640.000**	13.660.000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL																		
1.	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI (APLIKASI DESAIN SISTEM DAN ANALISA SISTEM)	31/12/2010	31/12/2013	2010	24.992.000	10	2.499.200	2.499.200	2.499.200	2.499.200	2.499.200	2.499.200	2.499.200	2.499.200	2.499.200	2.499.200	**24.992.000**	-
2.	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI (APLIKASI PROGRAM DISIGN E)	31/12/2010	31/12/2013	2010	24.887.500	10	2.488.750	2.488.750	2.488.750	2.488.750	2.488.750	2.488.750	2.488.750	2.488.750	2.488.750	2.488.750	**24.887.500**	-
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																		
1	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI	01/11/2016	31/12/2016	2016	17.892.000	10	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200			**14.313.600**	3.578.400

NO	JENIS ASET TAK BERWUJUD	Pembelihan	Pembukuan	TAHUN PEMBELIAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MASA MANFAAT (TAHUN)	PROSENTASE PENYUSUTAN ATB										TOTAL PENYUSUTAN (6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	NILAI BUKU (16-17)
							THN I (1/10)	THN II (2/10)	THN III (3/10)	THN IV (4/10)	THN V (5/10)	THN VI (6/10)	THN VII (7/10)	THN VIII (8/10)	THN IX (9/10)	THN X (10/10)		
2	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI	01/11/2016	31/12/2016	2016	17.892.000	10	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200			**14.313.600**	3.578.400
3	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI	01/11/2016	31/12/2016	2016	17.892.000	10	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200			**14.313.600**	3.578.400
4	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI	01/11/2016	31/12/2016	2016	17.892.000	10	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200			**14.313.600**	3.578.400
5	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI	01/11/2016	31/12/2016	2016	17.892.000	10	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200			**14.313.600**	3.578.400
6	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI	01/11/2016	31/12/2016	2016	17.892.000	10	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200			**14.313.600**	3.578.400
7	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI	01/11/2016	31/12/2016	2016	17.892.000	10	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200			**14.313.600**	3.578.400
8	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI	01/11/2016	31/12/2016	2016	17.892.000	10	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200			**14.313.600**	3.578.400
9	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI	01/11/2016	31/12/2016	2016	17.892.000	10	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200			**14.313.600**	3.578.400
10	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI	01/11/2016	31/12/2016	2016	17.892.000	10	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200			**14.313.600**	3.578.400

NO	JENIS ASET TAK BERWUJUD	Pembelihan	Pembukuan	TAHUN PEMBELIAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	MASA MANFAAT (TAHUN)	PROSENTASE PENYUSUTAN ATB										TOTAL PENYUSUTAN (6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	NILAI BUKU (16-17)
							THN I (1/10)	THN II (2/10)	THN III (3/10)	THN IV (4/10)	THN V (5/10)	THN VI (6/10)	THN VII (7/10)	THN VIII (8/10)	THN IX (9/10)	THN X (10/10)		
11	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI	01/11/2016	31/12/2016	2016	17.892.000	10	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200			**14.313.600**	3.578.400
12	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI	01/11/2016	31/12/2016	2016	17.892.000	10	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200			**14.313.600**	3.578.400
13	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI	01/11/2016	31/12/2016	2016	17.892.000	10	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200			**14.313.600**	3.578.400
14	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI	01/11/2016	31/12/2016	2016	17.892.000	10	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200			**14.313.600**	3.578.400
15	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI	01/11/2016	31/12/2016	2016	17.892.000	10	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200	1.789.200			**14.313.600**	3.578.400
16	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI	01/11/2023	01/11/2023	2023	80.000.000	10	8.000.000										**8.000.000**	72.000.000
TOTAL					**2.285.189.000**		**228.518.900**	**220.518.900**	**200.760.900**	**200.760.900**	**171.060.900**	**171.060.900**	**171.060.900**	**171.060.900**	**137.392.900**	**137.392.900**	**1.809.589.000,00**	**475.600.000**

LAMPIRAN 15

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA SALDO ASET
LAIN - LAIN PER 31 DESEMBER 2024

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
SEKRETARIAT DPRD				395.815.241,00	
SEKRETARIAT DPRD	2.3.1.5.1	1	Sepeda Motor	2007	23.964.041,00
SEKRETARIAT DPRD	2.3.1.5.1	3	Sepeda Motor	2009	25.400.000,00
SEKRETARIAT DPRD	2.3.1.5.1	4	Sepeda Motor	2009	25.400.000,00
SEKRETARIAT DPRD	2.3.1.5.1	5	Sepeda Motor	2009	25.400.000,00
SEKRETARIAT DPRD	2.3.1.5.1	6	Station Wagon	2008	274.725.000,00
SEKRETARIAT DPRD	2.3.1.5.1	7	Sepeda Motor	2012	20.926.200,00
	Bagian Umum			996.983.249,00	
Bagian Umum	2.3.1.5.1	2	Sepeda Motor	2007	23.964.049,00
Bagian Umum	2.3.1.5.1	4	Sepeda Motor	2007	18.161.000,00
Bagian Umum	2.3.1.5.1	4	Station Wagon	2007	251.005.000,00
Bagian Umum	2.3.1.5.1	4	Sepeda Motor	2007	18.161.000,00
Bagian Umum	2.3.1.5.1	4	Sepeda Motor	2008	18.475.600,00
Bagian Umum	2.3.1.5.1	4	Sepeda Motor	2008	18.475.600,00
Bagian Umum	2.3.1.5.1	4	Pick Up	2009	185.845.000,00
Bagian Umum	2.3.1.5.1	4	Sepeda Motor	2009	24.982.500,00
Bagian Umum	2.3.1.5.1	4	Sepeda Motor	2009	18.480.000,00
Bagian Umum	2.3.1.5.1	4	Sepeda Motor	2009	16.390.000,00
Bagian Umum	2.3.1.5.1	4	Pick Up	2010	168.850.000,00
Bagian Umum	2.3.1.5.1	4	Pick Up	2013	170.000.000,00
Bagian Umum	2.3.1.5.1	4	Sepeda Motor	2013	21.593.500,00
Bagian Umum	2.3.1.5.1	4	Sepeda Motor	2015	16.400.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
Bagian Umum	2.3.1.5.1	4	Sepeda Motor	2019	18.400.000,00
Bagian Umum	2.3.1.5.1	4	Sepeda Motor	2019	18.400.000,00
Bagian Pemerintahan				1.178.629.041,00	
Bagian Pemerintahan	2.3.1.5.1	1	Sepeda Motor	2007	23.964.041,00
Bagian Pemerintahan	2.3.1.5.2	000001	Tanah Lapangan Terbang lainnya	2010	871.025.000,00
Bagian Pemerintahan	2.3.1.5.3	000005	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2018	87.780.000,00
Bagian Pemerintahan	2.3.1.5.4	000006	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2018	101.140.000,00
Bagian Pemerintahan	2.3.1.5.5	000008	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2018	94.720.000,00
Bagian Hukum	2.3.1.5.6		Bagian Hukum	23.964.041,00	
Bagian Hukum	2.3.1.5.1	1	Sepeda Motor	2007	23.964.041,00
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				23.964.041,00	
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.3.1.5.1	1	Sepeda Motor	2007	23.964.041,00
				42.767.541,00	
Bagian Kesejahteraan Rakyat	2.3.1.5.1	1	Sepeda Motor	2007	23.964.041,00
Bagian Kesejahteraan Rakyat		000001	Alat Dapur lainnya	2009	423.500,00
Bagian Kesejahteraan Rakyat		000001	CCTV - Camera Control Television System	2012	3.000.000,00
Bagian Kesejahteraan Rakyat		000001	Alat Pemotong Kertas	2012	500.000,00
Bagian Kesejahteraan Rakyat		000001	Mesin Jilid	2012	2.000.000,00
Bagian Kesejahteraan Rakyat		000001	Lap Top	2012	10.500.000,00
Bagian Kesejahteraan Rakyat		000001 s/	Peralatan Personal Komputer lainnya	2012	1.980.000,00
Bagian Kesejahteraan Rakyat		000002	Alat Kantor Lainnya	2012	400.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				14.018.810.720,00	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	2.2.1.2.3	1	Buldozer	2012	1.245.000.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	2.2.1.6.6	1	Asphal Srayer	2012	20.000.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	2.3.1.5.1	1	Sepeda Motor	2007	23.964.041,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1.3.4.1.1.5.1	9	Jalan Desa	2007	266.250.800,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1.3.4.1.1.5.1	12	Jalan Desa	2007	634.477.400,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1.3.4.1.1.5.1	25	Jalan Desa	2007	2.574.000.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1.3.4.1.1.5.1	38	Jalan Desa	2007	144.662.800,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1.3.4.1.1.5.1	59	Jalan Desa	2007	177.900.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1.3.4.1.1.3.2	16	Jalan Kabupaten Kolektor	2007	1.147.680.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1.3.4.1.1.3.1	58	Jalan Kabupaten Arteri	2011	4.421.165.679,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1.3.4.1.1.2.2	1	Jalan Propinsi Kolektor	2010	738.110.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1.3.4.1.1.2.1	1	Jalan Propinsi Arteri	2007	2.625.600.000,00
DINAS PERHUBUNGAN				896.329.500,00	

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PERHUBUNGAN	2.6.1.1.12	1	Mesin Ketik Lain-lain	2008	3.850.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	2.6.1.2.1	1	Mesin Hitung Manual	2007	100.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	2.6.2.4.3	1	AC Unit	2009	34.980.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	2.6.2.4.3	2	AC Unit	2009	34.980.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	2.6.3.2.1	1	P.C Unit/ Komputer PC	2007	7.000.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	2.6.3.2.1	4	P.C Unit/ Komputer PC	2012	7.500.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	2.6.3.2.1	5	P.C Unit/ Komputer PC	2013	9.500.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	2.6.3.2.1	7	P.C Unit/ Komputer PC	2015	8.703.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	2.6.3.2.1	8	P.C Unit/ Komputer PC	2015	8.703.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	2.6.3.2.2	1	Laptop	2008	19.382.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	2.6.3.4.8	1	Printer	2007	1.500.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	2.6.3.4.8	2	Printer	2009	1.200.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	2.6.3.4.8	8	Printer	2015	3.636.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	2.6.3.4.8	9	Printer	2015	3.636.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	2.6.3.4.16	4	Flashdisk	2008	375.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	2.6.3.4.16	1	Flashdisk	2008	260.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	2.6.3.4.16	2	Flashdisk	2008	260.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	2.6.3.4.16	3	Flashdisk	2008	375.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	2.6.3.5.3	1	Printer	2009	6.500.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	2.6.3.5.3	3	Printer	2012	1.250.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	2.6.3.5.3	4	Printer	2012	1.250.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	2.6.3.5.11	1	UPS	2007	1.500.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	2.6.3.5.11	2	UPS	2009	2.170.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	2.6.3.5.12	1	Stabilizer/Stavolt	2007	500.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	2.7.1.1.1	1	Camera + Attachment	2008	6.380.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	2.7.1.1.83	1	Handycam	2008	4.400.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.8.5.4.1	1	Barometer (Meteorological Equipment)	2007	72.490.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.8.4.6.31	1	Tube Tester (Measuring/testing Device)	2007	3.960.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.8.1.50.9	1	Graverkit	2007	12.925.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.8.1.38.31	1	Weather Station	2007	399.850.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.8.1.22.10	1	Thermohigrograph (Alat Laboratorium Klimat	2007	1.210.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.8.1.22.10	2	Thermohigrograph (Alat Laboratorium Klimat	2007	1.210.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.8.1.12.85	1	alat laboratorium microbiologi lainnya (dst)	2007	8.250.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.8.1.12.14	1	Millipore Filter	2007	53.790.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.3.3.9.18	1	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	2007	1.485.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.3.3.9.18	2	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	2007	1.485.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.3.3.9.18	3	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	2007	1.485.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.3.3.5.109	1	alat kalibrasi lainnya (dst)	2007	66.990.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.3.3.5.109	2	alat kalibrasi lainnya (dst)	2007	1.430.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.3.3.5.109	3	alat kalibrasi lainnya (dst)	2007	1.430.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.3.3.5.109	4	alat kalibrasi lainnya (dst)	2007	1.430.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.3.3.5.109	5	alat kalibrasi lainnya (dst)	2007	1.430.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.3.3.5.109	6	alat kalibrasi lainnya (dst)	2007	1.430.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.3.3.5.109	7	alat kalibrasi lainnya (dst)	2007	1.210.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.3.3.5.109	8	alat kalibrasi lainnya (dst)	2007	1.210.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.3.3.5.109	9	alat kalibrasi lainnya (dst)	2007	1.210.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.3.3.5.109	12	alat kalibrasi lainnya (dst)	2007	1.540.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.5.1.1.2	1	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	2008	1.650.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.5.2.1.48	2	Sofa	2009	18.000.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.5.1.4.5	1	Filing Cabinet Besi	2011	2.500.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.10.1.2.1	2	P.C Unit	2011	7.812.500,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.10.1.2.1	3	P.C Unit	2011	7.812.500,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.10.2.3.3	3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	1.250.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.6.1.2.3	1	Camera Electronic	2014	7.000.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.10.2.3.3	5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	2.500.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.10.2.3.3	6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	2.500.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.6.1.2.3	2	Camera Electronic	2015	6.773.500,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.5.2.6.17	1	Mic Conference	2015	2.500.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.5.2.6.17	2	Mic Conference	2015	2.500.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.10.2.3.3	8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	3.636.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.10.2.3.18	3	Peralatan Personal Komputer lainnya	2015	836.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.10.2.3.18	4	Peralatan Personal Komputer lainnya	2015	836.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.10.2.3.18	5	Peralatan Personal Komputer lainnya	2015	836.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.10.2.3.18	6	Peralatan Personal Komputer lainnya	2015	836.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.8.4.4.8	4	recorder display lainnya (dst)	2016	1.963.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.8.4.4.8	5	recorder display lainnya (dst)	2016	1.963.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.10.2.4.4	1	Modem	2016	3.000.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.10.2.1.12	1	Hard Disk	2016	1.207.500,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.2.10.2.1.12	2	Hard Disk	2016	1.207.500,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.4.11	1	Buku Ilmu Sosial Lain-lain	2008	290.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.4.11	2	Buku Ilmu Sosial Lain-lain	2008	297.500,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	9	Buku Umum Lain-lain	2008	300.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	10	Buku Umum Lain-lain	2008	292.500,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	11	Buku Umum Lain-lain	2008	280.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	12	Buku Umum Lain-lain	2009	350.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	13	Buku Umum Lain-lain	2010	250.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	15	Buku Umum Lain-lain	2011	300.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	16	Buku Umum Lain-lain	2010	200.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	18	Buku Umum Lain-lain	2010	300.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	19	Buku Umum Lain-lain	2010	300.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	20	Buku Umum Lain-lain	2010	960.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	21	Buku Umum Lain-lain	2011	300.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	23	Buku Umum Lain-lain	2011	300.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	24	Buku Umum Lain-lain	2011	150.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	25	Buku Umum Lain-lain	2012	200.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	26	Buku Umum Lain-lain	2012	200.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	27	Buku Umum Lain-lain	2012	200.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	28	Buku Umum Lain-lain	2012	200.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	29	Buku Umum Lain-lain	2012	200.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	30	Buku Umum Lain-lain	2012	200.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	31	Buku Umum Lain-lain	2012	200.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	32	Buku Umum Lain-lain	2012	200.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	33	Buku Umum Lain-lain	2013	200.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	34	Buku Umum Lain-lain	2013	200.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	35	Buku Umum Lain-lain	2013	200.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	36	Buku Umum Lain-lain	2013	200.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	37	Buku Umum Lain-lain	2013	200.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	38	Buku Umum Lain-lain	2013	200.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	39	Buku Umum Lain-lain	2013	200.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	40	Buku Umum Lain-lain	2013	200.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	41	Buku Umum Lain-lain	2013	200.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	42	Buku Umum Lain-lain	2013	200.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	43	Buku Umum Lain-lain	2014	200.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	44	Buku Umum Lain-lain	2014	200.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	45	Buku Umum Lain-lain	2014	200.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	46	Buku Umum Lain-lain	2014	200.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	47	Buku Umum Lain-lain	2014	200.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	48	Buku Umum Lain-lain	2014	200.000,00
DINAS PERHUBUNGAN	1.3.5.1.1.1.12	50	Buku Umum Lain-lain	2014	200.000,00
Dinas Kesehatan				266.186.000,00	
Dinas Kesehatan	2.3.1.5.1	81	Sepeda Motor	1994	4.900.000,00
Dinas Kesehatan	2.3.1.5.1	89	Sepeda Motor	1995	5.100.000,00
Dinas Kesehatan	2.3.1.5.1	93	Sepeda Motor	1998	5.700.000,00
Dinas Kesehatan	2.3.1.5.1	96	Sepeda Motor	1994	4.900.000,00
Dinas Kesehatan	2.3.1.5.1	97	Sepeda Motor	1994	4.900.000,00
Dinas Kesehatan	3.11.1.6.10	23	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	1996	7.875.000,00
Dinas Kesehatan	3.11.1.6.10	43	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	1996	7.875.000,00
Dinas Kesehatan	3.11.1.6.10	144	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	2007	111.141.000,00
Dinas Kesehatan	3.11.1.6.10	231	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	2013	58.670.000,00
Dinas Kesehatan	3.11.1.6.10	6	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	1996	7.875.000,00
Dinas Kesehatan	3.11.1.6.10	16	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	1996	7.875.000,00
Dinas Kesehatan	3.11.1.6.10	17	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	1996	7.875.000,00
Dinas Kesehatan	3.11.1.6.10	18	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	1996	7.875.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
Dinas Kesehatan	3.11.1.6.10	19	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	1996	7.875.000,00
Dinas Kesehatan	3.11.1.6.10	21	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	1996	7.875.000,00
Dinas Kesehatan	3.11.1.6.10	22	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	1996	7.875.000,00
	DINAS SOSIAL			43.729.100,00	
DINAS SOSIAL	2.3.1.5.1	1	Sepeda Motor	2008	18.475.600,00
DINAS SOSIAL	2.3.1.5.1	6	Sepeda Motor	2009	25.253.500,00
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			229.788.500,00	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.6.2.6.2	2	Wireless Amplifier	2021	12.365.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.6.1.2.3	1	Camera Electronic	2011	5.313.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.6.1.2.3	2	Camera Electronic	2014	1.700.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.6.1.2.3	3	Camera Electronic	2014	1.700.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.6.1.2.3	4	Camera Electronic	2014	1.700.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.6.1.2.3	5	Camera Electronic	2014	1.700.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.6.1.2.3	6	Camera Electronic	2015	1.955.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.6.1.2.3	7	Camera Electronic	2015	1.955.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.6.1.2.3	8	Camera Electronic	2015	1.955.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.6.1.2.3	9	Camera Electronic	2015	1.955.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.6.1.2.3	10	Camera Electronic	2015	1.955.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.6.1.2.105	2	Layar Film/Projector	2016	10.925.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.5.2.7.16	1	Alat Pembantu Kebakaran	2012	23.955.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.5.2.5.26	1	Alat Dapur lainnya	2012	1.232.500,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.5.2.5.26	2	Alat Dapur lainnya	2012	1.232.500,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.5.2.5.26	3	Alat Dapur lainnya	2012	1.232.500,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.5.2.5.26	4	Alat Dapur lainnya	2012	1.232.500,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.5.2.5.26	5	Alat Dapur lainnya	2012	1.232.500,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.5.2.5.26	6	Alat Dapur lainnya	2012	1.232.500,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.5.2.5.26	7	Alat Dapur lainnya	2012	1.232.500,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.5.2.5.26	8	Alat Dapur lainnya	2012	1.232.500,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.5.2.5.26	9	Alat Dapur lainnya	2012	1.232.500,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.5.2.5.26	10	Alat Dapur lainnya	2012	1.232.500,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.5.2.3.3	1	Mesin Pemotong Rumput	2014	1.750.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.5.2.1.39	1	Meja Komputer	2010	1.250.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.5.2.1.39	2	Meja Komputer	2010	1.250.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.3.3.1.72	1	Global Positioning System	2015	13.800.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.3.3.1.72	2	Global Positioning System	2015	13.800.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.10.2.3.3	2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	1.245.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.10.2.3.3	3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	3.160.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.10.2.3.3	4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	3.160.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.10.2.3.3	8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	3.273.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.10.2.3.3	5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	3.636.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.10.2.3.3	6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	3.636.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.10.2.3.3	7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	3.636.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.10.2.1.12	1	Hard Disk	2016	1.207.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.10.2.1.12	2	Hard Disk	2016	1.207.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.10.1.2.2	3	Lap Top	2011	10.371.250,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.10.1.2.2	4	Lap Top	2011	10.371.250,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.10.1.2.2	5	Lap Top	2011	10.371.250,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.10.1.2.2	8	Lap Top	2014	10.115.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.10.1.2.2	9	Lap Top	2015	11.638.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.3.2.10.1.2.2	10	Lap Top	2015	11.638.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		000002 s/	Kursi Putar	2011	1.600.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		000001 s/	Microphone	2011	1.000.000,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		000002 s/	Handy Talky (HT)	2011	17.943.750,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		000008 s/	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019	7.272.000,00
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			59.150.291,00	

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.3.1.5.1	1	Sepeda Motor	2009	25.190.000,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.3.1.5.1	3	Sepeda Motor	2007	23.964.041,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	4.16.3.1.4	1	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	2007	9.996.250,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				233.228.340,00	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.3.1.5.1	1	Sepeda Motor	2008	18.475.600,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DANKELUARGA BERENCANA	2.3.1.5.1	8	Sepeda Motor	2008	18.475.600,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.3.1.5.1	16	Sepeda Motor	2008	18.475.600,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.3.1.5.1	20	Sepeda Motor	2008	15.352.440,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.3.1.5.1	23	Sepeda Motor	2011	26.683.350,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.3.1.5.1	24	Sepeda Motor	2011	26.683.350,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.3.1.5.1	30	Sepeda Motor	2011	20.942.750,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DANKELUARGA BERENCANA	2.3.1.5.1	39	Sepeda Motor	2011	20.942.750,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.3.1.5.1	42	Sepeda Motor	2012	26.009.500,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.3.1.5.1	44	Sepeda Motor	2012	20.593.600,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.3.1.5.1	45	Sepeda Motor	2012	20.593.800,00
	DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA			704.193.723,00	
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	2.3.1.5.1	38	Sepeda Motor	2009	25.190.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	2.3.1.5.1	41	Sepeda Motor	2009	25.190.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	2.3.1.5.1	23	Sepeda Motor	2009	25.190.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	2.3.1.5.1	44	Sepeda Motor	2012	15.257.909,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	2.3.1.5.1	46	Sepeda Motor	2012	15.257.909,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	2.3.1.5.1	49	Sepeda Motor	2012	15.257.909,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	2.3.1.5.1	83	Sepeda Motor	2015	18.480.878,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	2.3.1.5.1	74	Sepeda Motor	2015	18.480.878,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	2.3.1.5.1	95	Sepeda Motor	2016	28.550.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	2.3.1.5.1	2	Sepeda Motor	2007	23.964.041,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	2.3.1.5.1	16	Sepeda Motor	2015	23.000.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	2.3.1.5.1	4	Sepeda Motor	2012	20.926.200,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN,PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	2.3.1.5.1	80	Sepeda Motor	2013	21.593.500,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	2.3.1.5.1	6	Sepeda Motor	2013	21.593.500,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	1.3.2.2.1.4.1	25	Sepeda Motor	2009	17.250.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.1.1.1	5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1982	20.655.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.1.1.1	6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1988	28.560.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.1.5.4	1	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain	2010	44.950.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	1	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1983	5.400.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	2	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1983	4.050.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN,PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	3	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1983	9.450.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	4	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1993	4.050.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	5	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1993	4.050.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	6	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1983	9.450.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	7	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1983	4.050.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	8	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1983	4.050.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	9	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1983	4.050.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	10	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1983	9.450.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN,PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	11	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1983	4.050.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	12	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1983	9.450.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	13	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1983	4.050.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	14	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1983	12.600.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	15	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1983	4.050.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	16	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1983	4.050.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	17	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1983	4.050.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	18	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1991	9.450.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN,PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	19	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1991	18.900.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	20	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1991	4.050.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	21	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1991	9.450.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	22	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1991	4.050.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	23	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1991	4.050.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	24	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1991	9.450.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	25	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1991	9.450.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	26	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1983	11.025.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN,PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	27	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1983	9.450.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	28	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1991	4.050.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	29	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1991	9.450.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	30	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1996	9.000.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	32	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1996	15.750.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.13	33	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	1996	9.000.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.14	1	Rumah Negara Golongan III Type E Semi Per	1986	11.375.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.14	2	Rumah Negara Golongan III Type E Semi Per	1987	13.650.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN,PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	3.11.2.3.14	4	Rumah Negara Golongan III Type E Semi Per	1996	13.650.000,00
DINAS PERTANIAN , KETAHANAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	1.3.3.1.1.2.1	1	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2007	19.245.999,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN					

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.2.1.11.6	17	Mesin Proses Lain-lain	2012	18.250.000,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.2.1.11.6	18	Mesin Proses Lain-lain	2012	18.250.000,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.3.1.5.1	4	Sepeda Motor	2004	15.000.000,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.3.1.5.1	5	Sepeda Motor	2004	15.000.000,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.3.1.5.1	6	Sepeda Motor	2004	1.440.000,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.4.3.10.2	1	Timbangan	2010	4.500.000,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.4.3.10.2	2	Timbangan	2011	4.000.000,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.5.1.3.22	1	Alat-alat Peternakan Lain-lain	2011	39.999.012,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.5.1.3.22	2	Alat-alat Peternakan Lain-lain	2011	39.999.012,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.5.1.3.22	3	Alat-alat Peternakan Lain-lain	2011	34.625.000,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.5.1.3.22	4	Alat-alat Peternakan Lain-lain	2011	34.625.000,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.6.1.4.14	1	Lemari kayu	2007	2.500.000,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.6.1.5.41	1	Genset	2008	1.999.800,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.6.2.1.10	1	Meja Rapat	2008	736.000,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.6.2.1.48	1	Meja Biro	2007	1.000.000,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.6.3.5.3	1	Printer	2010	1.793.000,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.6.3.5.11	1	UPS	2007	1.500.000,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.6.4.1.10	10	Meja Kerja	2008	1.060.608,70
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.9.1.14.34	1	Suction Tube	2008	44.412.000,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.9.1.48.48	1	Unit Penggilingan	2014	87.750.000,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.9.1.48.48	2	Unit Penggilingan	2014	14.465.000,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.9.1.48.48	3	Unit Penggilingan	2014	67.100.000,00
DINAS PERIKANAN				25.920.000,00	
DINAS PERIKANAN	2.3.1.5.1	8	Sepeda Motor	2009	25.920.000,00
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN				97.136.541,00	
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	2.3.1.5.1	1	Sepeda Motor	2007	23.964.041,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	2.3.1.5.1	2	Sepeda Motor	2009	24.982.500,00
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	2.3.1.5.1	3	Sepeda Motor	2009	25.190.000,00
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN	2.3.1.5.1	4	Sepeda Motor	2009	23.000.000,00
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				146.537.500,00	
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.3.1.5.1	8	Sepeda Motor	2009	24.982.500,00
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.3.1.5.1	12	Sepeda Motor	2009	16.390.000,00
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4.14.5.2.2	1	Sumur Artesis	2011	79.975.000,00
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			Sepeda Motor	2009	25.190.000,00
INSPEKTORAT DAERAH				23.964.041,00	
INSPEKTORAT DAERAH	2.3.1.5.1	1	Sepeda Motor	2007	23.964.041,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				43.627.500,00	
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.3.1.5.1	2	Sepeda Motor	2008	18.645.000,00
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DANPENGEMBANGAN DAERAH	2.3.1.5.1	5	Sepeda Motor	2009	24.982.500,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP				1.024.254.070,00	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.6.1.4.14	1	Lemari kayu	2009	2.200.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.6.1.5.28	1	Overhead Projektor	2009	13.200.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.6.2.1.5	2	Kursi Besi/Metal	2008	250.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.6.2.1.5	3	Kursi Besi/Metal	2008	250.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.6.2.1.5	4	Kursi Besi/Metal	2008	250.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.6.2.1.5	5	Kursi Besi/Metal	2008	250.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.6.2.1.5	6	Kursi Besi/Metal	2008	250.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.6.2.4.6	3	Kipas Angin	2012	800.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.6.3.2.1	2	P.C Unit/ Komputer PC	2008	14.245.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.6.3.2.1	3	P.C Unit/ Komputer PC	2009	7.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.6.3.2.1	4	P.C Unit/ Komputer PC	2011	9.375.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.6.3.2.2	1	Laptop	2009	15.608.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.6.3.2.2	3	Laptop	2011	13.750.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.6.3.4.8	1	Printer	2008	1.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.6.3.4.8	7	Printer	2011	1.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.6.3.4.16	1	Flashdisk	2008	500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.6.3.5.3	1	Printer	2013	2.500.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.6.3.5.11	3	UPS	2013	4.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.6.4.1.10	4	Meja Kerja	2008	1.540.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.6.4.1.10	5	Meja Kerja	2008	1.540.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.7.1.1.1	1	Camera + Attachment	2008	6.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.7.1.1.1	3	Camera + Attachment	2009	6.550.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.7.1.2.3	1	Camera Electronic	2013	2.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.9.1.10.33	1	LP Gas Detector	2012	97.900.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Rak Kayu	2008	2.200.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Meja Kerja Kayu	2008	165.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Meja Kerja Kayu	2008	165.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Meja Kerja Kayu	2008	1.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Meja Kerja Kayu	2008	1.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Meja 1/2 Biro	2008	3.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Kursi Fiber Glas/Plastik	2008	55.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Kursi Fiber Glas/Plastik	2008	55.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Kursi Fiber Glas/Plastik	2008	55.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Kursi Fiber Glas/Plastik	2008	55.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Kursi Fiber Glas/Plastik	2008	55.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Kursi Fiber Glas/Plastik	2008	55.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Kursi Fiber Glas/Plastik	2008	55.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Kursi Fiber Glas/Plastik	2008	55.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Kursi Fiber Glas/Plastik	2008	55.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Kursi Fiber Glas/Plastik	2008	55.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Kursi Putar	2008	800.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Dapur lainnya	2008	300.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2009	500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2009	500.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2009	500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2009	500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2009	1.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2009	1.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2009	1.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2009	1.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2009	1.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2009	1.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2009	1.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2009	1.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2009	1.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Meja Kerja Kayu	2009	165.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Meja Kerja Kayu	2009	165.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Meja Kerja Kayu	2009	165.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Meja Kerja Kayu	2009	165.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Lap Top	2009	16.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Genset	2009	6.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2010	5.229.750,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2010	5.229.750,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2010	5.229.750,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2010	5.229.750,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2010	5.624.750,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2010	5.624.750,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2010	5.624.750,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2010	5.624.750,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Papan Pengumuman	2010	2.983.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Mesin Pemotong Rumput	2010	2.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Mesin Pemotong Rumput	2010	2.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Mesin Pemotong Rumput	2010	2.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2011	3.350.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2011	3.350.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2011	3.350.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2011	3.350.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2011	3.350.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2011	3.350.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2011	3.350.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2011	3.350.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2011	3.350.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2011	3.350.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2011	3.350.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2011	3.350.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2011	3.350.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2011	3.350.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2011	3.350.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2011	3.350.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2011	3.350.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2011	3.350.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2011	3.350.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2011	3.350.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2011	3.350.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2011	3.350.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2011	3.554.480,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2011	3.554.480,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2011	3.554.480,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Pemadat Sampah	2011	3.554.480,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2011	3.497.500,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2011	3.497.500,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2011	3.497.500,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2011	3.497.500,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2011	3.497.500,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2011	3.497.500,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2011	3.497.500,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2011	3.497.500,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2011	3.497.500,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2011	3.497.500,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2011	3.497.500,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2011	3.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2011	6.007.600,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2011	6.007.600,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2011	6.007.600,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2011	6.007.600,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Alat Kantor Lainnya	2011	2.211.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	P.C Unit	2011	8.125.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Lap Top	2011	13.750.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	1.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	2.343.750,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	5.625.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Peralatan Personal Komputer lainnya	2011	4.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2012	6.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2012	6.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2012	6.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2012	6.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2012	6.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2012	6.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2012	6.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2012	6.000.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2012	6.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2012	6.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	1.250.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2014	6.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2014	6.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2014	6.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Gerobak Dorong	2014	6.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Container	2014	89.043.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Bak Fiberglass	2014	2.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Bak Fiberglass	2014	2.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Bak Fiberglass	2014	2.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Bak Fiberglass	2014	2.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Bak Fiberglass	2014	2.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Bak Fiberglass	2014	2.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Bak Fiberglass	2014	2.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Bak Fiberglass	2014	2.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Bak Fiberglass	2014	2.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Bak Fiberglass	2014	2.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Bak Fiberglass	2014	2.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Bak Fiberglass	2014	2.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Bak Fiberglass	2014	2.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Bak Fiberglass	2014	2.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Bak Fiberglass	2014	2.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Bak Fiberglass	2014	2.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Bak Fiberglass	2014	2.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Bak Fiberglass	2014	2.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Bak Fiberglass	2014	2.500.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Bak Fiberglass	2014	2.500.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	Bak Fiberglass	2014	2.500.000,00
DINAS PARIWISATA				153.567.800,00	
DINAS PARIWISATA	2.6.1.4.4	1	Filling Besi/Metal	2010	625.000,00
DINAS PARIWISATA	2.6.1.4.14	1	Lemari kayu	2010	3.750.000,00
DINAS PARIWISATA	2.6.2.1.4	2	Meja Kayu/Rotan	2009	1.863.400,00
DINAS PARIWISATA	2.6.2.1.4	6	Meja Kayu/Rotan	2009	1.863.400,00
DINAS PARIWISATA	2.6.2.1.4	7	Meja Kayu/Rotan	2009	1.863.400,00
DINAS PARIWISATA	2.6.2.1.4	8	Meja Kayu/Rotan	2009	1.863.400,00
DINAS PARIWISATA	2.6.2.1.4	9	Meja Kayu/Rotan	2009	1.863.400,00
DINAS PARIWISATA	2.6.2.1.4	10	Meja Kayu/Rotan	2010	1.863.400,00
DINAS PARIWISATA	2.6.2.1.4	11	Meja Kayu/Rotan	2010	1.863.400,00
DINAS PARIWISATA	2.6.2.1.4	12	Meja Kayu/Rotan	2010	1.863.400,00
DINAS PARIWISATA	2.6.2.1.17	1	Meja Reseption	2014	15.500.000,00
DINAS PARIWISATA	2.6.2.1.30	1	Kursi Putar	2009	1.443.750,00
DINAS PARIWISATA	2.6.2.1.30	2	Kursi Putar	2010	1.663.750,00
DINAS PARIWISATA	2.6.2.1.30	3	Kursi Putar	2011	2.250.000,00
DINAS PARIWISATA	2.6.2.1.30	4	Kursi Putar	2011	2.250.000,00
DINAS PARIWISATA	2.6.2.1.30	5	Kursi Putar	2010	1.663.750,00
DINAS PARIWISATA	2.6.2.1.30	6	Kursi Putar	2014	700.000,00
DINAS PARIWISATA	2.6.2.1.30	7	Kursi Putar	2014	700.000,00
DINAS PARIWISATA	2.6.2.1.48	1	Meja Biro	2010	2.662.000,00
DINAS PARIWISATA	2.6.2.1.48	2	Meja Biro	2010	2.662.000,00
DINAS PARIWISATA	2.6.2.1.48	3	Meja Biro	2009	2.662.000,00
DINAS PARIWISATA	2.6.2.5.15	1	Dispenser	2015	1.125.000,00
DINAS PARIWISATA	2.6.2.6.12	1	Wireless	2015	12.365.000,00
DINAS PARIWISATA	2.6.3.2.1	2	P.C Unit/ Komputer PC	2010	7.500.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PARIWISATA	2.6.3.2.1	3	P.C Unit/ Komputer PC	2014	9.500.000,00
DINAS PARIWISATA	2.6.3.2.2	6	Laptop	2014	10.500.000,00
DINAS PARIWISATA	2.6.3.4.8	1	Printer	2014	1.250.000,00
DINAS PARIWISATA	2.6.3.5.3	2	Printer	2010	6.117.650,00
DINAS PARIWISATA	2.6.3.5.3	8	Printer	2013	2.500.000,00
DINAS PARIWISATA	2.6.3.5.3	11	Printer	2016	1.963.000,00
DINAS PARIWISATA	2.6.3.5.7	1	External Drive	2016	2.300.000,00
DINAS PARIWISATA	2.6.3.5.7	2	External Drive	2016	2.300.000,00
DINAS PARIWISATA	2.6.3.5.7	3	External Drive	2016	2.300.000,00
DINAS PARIWISATA	2.6.3.5.11	1	UPS	2011	994.750,00
DINAS PARIWISATA	2.6.3.5.11	3	UPS	2014	1.200.000,00
DINAS PARIWISATA	2.6.3.5.14	1	Harddisk Eksternal	2014	2.000.000,00
DINAS PARIWISATA	2.6.3.6.4	3	Modem	2016	1.000.000,00
DINAS PARIWISATA	2.6.3.6.4	1	Modem	2015	500.000,00
DINAS PARIWISATA	2.6.3.6.4	2	Modem	2015	500.000,00
DINAS PARIWISATA	2.7.1.1.1	1	Camera + Attachment	2011	11.422.950,00
DINAS PARIWISATA	2.7.1.1.3	1	Proyektor + Attachment	2012	17.950.000,00
DINAS PARIWISATA	2.7.1.1.83	1	Handycam	2010	4.840.000,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN			48.946.541,00	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	2.3.1.5.1	1	Sepeda Motor	2009	24.982.500,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	2.3.1.5.1	2	Sepeda Motor	2010	23.964.041,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM				358.291.091,00	

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.3.1.5.1	5	Sepeda Motor	2012	13.609.200,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.3.1.5.1	1	Sepeda Motor	2007	23.964.041,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.2.1.5	1	Kursi Besi/Metal	2007	250.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.2.1.5	2	Kursi Besi/Metal	2007	250.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.2.1.5	3	Kursi Besi/Metal	2007	250.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.2.1.5	4	Kursi Besi/Metal	2007	250.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.1.1	2	Server Mainframe	2008	8.250.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.1.1	3	Server Mainframe	2009	9.500.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.1.1	4	Server Mainframe	2009	9.500.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.1.1	5	Server Mainframe	2009	9.500.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.1.1	6	Server Mainframe	2009	9.500.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.1.1	7	Server Mainframe	2009	9.500.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.2.1	1	P.C Unit/ Komputer PC	2007	7.000.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.2.2	1	Laptop	2008	19.382.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.2.2	3	Laptop	2009	16.500.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.2.2	4	Laptop	2009	16.500.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.2.2	5	Laptop	2010	13.750.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.2.2	6	Laptop	2009	13.750.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.2.2	7	Laptop	2012	8.750.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.2.3	1	Note Book	2012	10.500.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.2.3	2	Note Book	2012	10.500.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.4.8	1	Printer	2012	4.400.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.5.3	2	Printer	2008	6.900.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.5.3	4	Printer	2008	3.500.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.5.3	5	Printer	2009	6.900.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.5.3	6	Printer	2009	3.500.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.5.3	7	Printer	2009	3.500.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.5.3	8	Printer	2009	3.500.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.5.3	9	Printer	2009	3.500.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.5.3	10	Printer	2009	3.500.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.5.3	11	Printer	2009	3.500.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.5.3	13	Printer	2009	6.654.100,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.5.3	14	Printer	2010	4.250.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.5.11	2	UPS	2008	2.100.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.5.11	4	UPS	2008	1.200.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.5.11	5	UPS	2009	2.100.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.5.11	6	UPS	2009	2.100.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.5.11	7	UPS	2009	1.200.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.5.11	8	UPS	2009	1.200.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.5.11	9	UPS	2009	1.200.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.5.11	10	UPS	2009	1.200.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.5.11	11	UPS	2009	1.200.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.5.11	13	UPS	2013	1.200.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.5.11	14	UPS	2013	1.200.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.5.12	1	Stabilizer/Stavolt	2007	500.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.5.12	2	Stabilizer/Stavolt	2008	350.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.5.12	5	Stabilizer/Stavolt	2009	400.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.5.12	6	Stabilizer/Stavolt	2009	400.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.5.12	7	Stabilizer/Stavolt	2009	300.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.5.12	9	Stabilizer/Stavolt	2009	300.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.5.12	11	Stabilizer/Stavolt	2009	300.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.6.1	1	Server	2008	9.500.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.6.1	2	Server	2009	40.000.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.6.3	1	Hub	2008	1.500.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.6.3	2	Hub	2009	10.450.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.6.4	1	Modem	2012	600.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.6.4	2	Modem	2012	600.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.6.4	3	Modem	2012	600.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.6.4	4	Modem	2012	600.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.6.3.6.4	5	Modem	2012	600.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.7.1.1.1	1	Camera + Attachment	2010	1.431.750,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.7.1.2.63	1	Lensa Kamera	2013	2.500.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.7.1.2.69	20	Printer	2012	2.000.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.7.1.2.69	21	Printer	2012	4.400.000,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	2.7.2.1.20	1	Facsimile	2007	500.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				27.650.000,00	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.6.3.2.2	1	Laptop	2011	10.500.000,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.6.3.2.2	3	Laptop	2012	10.500.000,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.6.3.2.5	1	Personal Komputer Lain-lain	2013	2.900.000,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.6.3.5.3	1	Printer	2011	1.500.000,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			Sepeda Motor	2016	16.400.000,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.6.3.5.3	2	Printer	2011	1.500.000,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.6.3.5.12	1	Stabilizer/Stavolt	2011	750.000,00
KECAMATAN LOURA				371.390.901,00	
KECAMATAN LOURA	2.3.1.5.1	2	Sepeda Motor	2006	19.182.000,00
KECAMATAN LOURA	2.3.1.5.1	6	Sepeda Motor	2011	23.645.917,00
KECAMATAN LOURA	2.3.1.5.1	7	Sepeda Motor	2011	23.645.917,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.001.004.029	000001	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	1982	50.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.035	000005s/ d 000008	Bangku Tunggu	1990	200.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.002	000074 s/d 000078	Meja Kerja Kayu	1994	375.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.029	000253 s/d 000258	Kursi Fiber Glas/Plastik	1994	111.396,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.002	000042 s/d 000051	Meja Kerja Kayu	1995	2.605.050,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.008	000002 s/d 000006	Meja Rapat	1995	1.097.090,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.029	000265 s/d 000271	Kursi Fiber Glas/Plastik	1995	129.962,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.048	000004	Sofa	1997	861.672,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.001.004.002	000001 s/d 000005	Lemari Kayu	1998	1.001.940,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.001.004.002	000014	Lemari Kayu	1998	226.038,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.001.004.002	000020	Lemari Kayu	1998	320.622,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.002	000009	Meja Kerja Kayu	1998	300.583,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.002	000011	Meja Kerja Kayu	1998	300.583,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.029	000259 s/d 000264	Kursi Fiber Glas/Plastik	1998	149.184,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.035	000012	Bangku Tunggu	1998	75.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.001.004.027	000001	Lemari Kaca	1999	513.976,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.002	000007s/ d 000008	Meja Kerja Kayu	1999	521.010,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.002	000057 s/d 000060	Meja Kerja Kayu	1999	1.869.004,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.029	000183 s/d 000252	Kursi Fiber Glas/Plastik	1999	2.767.520,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.001.004.002	000018	Lemari Kayu	2000	200.388,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.002	000002 s/d 000004	Meja Kerja Kayu	2000	331.398,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.002	000029 s/d 000030	Meja Kerja Kayu	2000	1.151.162,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.002	000031 s/d 000035	Meja Kerja Kayu	2000	3.250.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.002	000036 s/d 000038	Meja Kerja Kayu	2000	1.496.511,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.029	000272 s/d 000311	Kursi Fiber Glas/Plastik	2000	1.688.360,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.06.002.002.001	000001	Unit Tranceiver Ssb Portable	2000	11.511.636,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.001.004.002	000015	Lemari Kayu	2001	429.038,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.002	000001	Meja Kerja Kayu	2001	107.259,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.002	000052	Meja Kerja Kayu	2001	643.558,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.002	000061 s/d 000063	Meja Kerja Kayu	2001	1.673.250,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.002	000069s/ d 000072	Meja Kerja Kayu	2001	1.839.716,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.029	000322 s/d 000351	Kursi Fiber Glas/Plastik	2001	1.544.520,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.006.002	000001	Televisi	2001	2.500.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.001.004.002	000006 s/d 000007	Lemari Kayu	2002	912.908,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.001.004.002	000016 s/d 000017	Lemari Kayu	2002	400.776,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.002	000005 s/d 000006	Meja Kerja Kayu	2002	1.186.780,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.002	000073	Meja Kerja Kayu	2002	300.583,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.001.004.002	000009 s/d 000012	Lemari Kayu	2003	801.552,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.004	000033 s/d 000062	Kursi Kayu	2003	3.750.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.002	000010	Meja Kerja Kayu	2004	640.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.004	000063 s/d 000068	Kursi Kayu	2004	132.252,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.029	000312 s/d 000321	Kursi Fiber Glas/Plastik	2004	393.340,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.002	000012	Meja Kerja Kayu	2005	850.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.032	000001	Kursi Putar	2005	850.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.002	000013	Meja Kerja Kayu	2008	1.540.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.027	000001	Meja Makan Besi	2008	1.870.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.030	000001 s/d 000020	Kursi Rapat	2008	700.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.032	000002	Kursi Putar	2008	1.375.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.048	000002	Sofa	2008	2.750.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.002.003	000002 s/d 000003	Jam Elektronik	2008	100.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.004.006	000002	Kipas Angin	2008	350.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.005.026	000001	Alat Dapur lainnya	2008	400.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.002	000014 s/d 000018	Meja Kerja Kayu	2009	8.470.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.002	000019	Meja Kerja Kayu	2009	2.420.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.030	000021 s/d 000070	Kursi Rapat	2009	3.000.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.039	000001 s/d 000002	Meja Komputer	2009	1.815.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.048	000003	Sofa	2009	3.025.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.06.002.001.003	000001 s/d 000002	Pesawat Telephone	2009	363.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.15.004.005.001	000001	Genset	2009	10.000.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.02.001.004.001	000004	Sepeda Motor	2010	24.907.250,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.003.003	000002	Mesin Pemotong Rumput	2010	3.500.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.006.007	000001 s/d 000002	Loudspeaker	2010	3.500.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.006.016	000001s/ d 000002	Microphone Table Stand	2010	1.250.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.06.001.001.040	000001	Power Supply Microphone	2010	3.000.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.06.001.002.043	000001	Stabilizing Amplifier	2010	500.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.10.001.002.001	000002	P.C Unit	2010	9.410.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.10.002.003.003	000005	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2010	1.932.700,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.10.002.003.018	000001	Peralatan Personal Komputer lainnya	2010	1.512.500,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.10.001.002.002	000002	Lap Top	2011	10.375.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
KECAMATAN LOURA	1.3.2.10.002.003.003	000006	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	3.750.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.10.001.002.001	000003	P.C Unit	2013	7.500.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.10.001.002.002	000003	Lap Top	2013	10.500.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.10.001.002.002	000004	Lap Top	2013	10.500.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.10.002.003.003	000001 s/d 000002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	3.750.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.10.002.003.003	000003 s/d 000004	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	3.750.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.010	000003	Tempat Tidur Kayu	2014	5.600.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.001.027	000002	Meja Makan Besi	2014	8.400.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.003.003	000003	Mesin Pemotong Rumput	2014	3.500.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.06.001.002.003	000001	Camera Electronic	2014	1.700.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.10.001.002.001	000004	P.C Unit	2014	7.590.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.10.001.002.002	000005 s/d 000006	Lap Top	2014	20.750.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.10.002.003.003	000007 s/d 000008	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2014	3.750.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.10.002.003.018	000002 s/d 000003	Peralatan Personal Komputer lainnya	2014	1.989.500,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.15.004.005.001	000002	Genset	2014	9.000.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.003.003	000004	Mesin Pemotong Rumput	2015	3.500.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.006.002	000002	Televisi	2015	2.415.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
KECAMATAN LOURA	1.3.2.05.002.006.012	000002	Wireless	2015	12.365.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.06.003.010.001	000001	Antene SHF Portable	2015	1.380.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.10.001.002.002	000007	Lap Top	2015	11.638.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.10.002.003.003	000009 s/d 000010	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2015	2.909.500,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.10.002.003.003	000005 s/d 000006	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2016	3.926.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.10.001.002.002	000008	Lap Top	2017	11.638.000,00
KECAMATAN LOURA	1.3.2.10.001.002.010	000001 s/d 000002	Personal Komputer lainnya	2017	2.990.000,00
KECAMATAN KODI UTARA				167.583.500,00	
KECAMATAN KODI UTARA	2.3.1.5.1	19	Sepeda Motor	2005	15.620.000,00
KECAMATAN KODI UTARA	3.12.2.2.4	1	Bangunan Pintu Gerbang	2005	63.000.000,00
KECAMATAN KODI UTARA	3.12.2.2.4	2	Bangunan Pintu Gerbang	2008	19.200.000,00
KECAMATAN KODI UTARA	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.001.004.002		2003	69.763.500,00
KECAMATAN KODI				1.019.907.000,00	
KECAMATAN KODI	2.3.1.5.1	1	Sepeda Motor	2006	19.182.000,00
KECAMATAN KODI	3.11.1.1.1	7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2007	13.125.000,00
KECAMATAN KODI	3.11.1.1.2	8	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	2007	850.000.000,00
KECAMATAN KODI	3.11.1.2.1	1	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2007	36.000.000,00
KECAMATAN KODI	3.11.2.3.7	3	Rumah Negara Golongan III Type C Permane	2007	39.000.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
KECAMATAN KODI	3.11.2.3.10	2	Rumah Negara Golongan III Type D Permane	2007	5.400.000,00
KECAMATAN KODI	3.11.2.3.13	1	Rumah Negara Golongan III Type E Permane	2007	19.500.000,00
KECAMATAN KODI	3.11.2.3.14	1	Rumah Negara Golongan III Type E Semi Per	2007	19.500.000,00
KECAMATAN KODI	3.11.2.3.14	2	Rumah Negara Golongan III Type E Semi Per	2007	18.200.000,00
KECAMATAN KODI BANGEDO				182.110.000,00	
KECAMATAN KODI BANGEDO	3.11.1.1.1	2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2011	26.775.000,00
KECAMATAN KODI BANGEDO	3.11.1.1.1	9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1996	13.650.000,00
KECAMATAN KODI BANGEDO	3.11.1.1.1	10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1996	15.600.000,00
KECAMATAN KODI BANGEDO	3.11.1.1.1	14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1996	38.250.000,00
KECAMATAN KODI BANGEDO	3.11.1.1.1	16	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1994	30.600.000,00
KECAMATAN KODI BANGEDO	3.11.1.9.1	1	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Perman	1996	8.500.000,00
KECAMATAN KODI BANGEDO	3.11.2.3.1	2	Rumah Negara Golongan III Type A Permane	1996	15.750.000,00
KECAMATAN KODI BANGEDO	3.11.2.3.1	3	Rumah Negara Golongan III Type A Permane	1996	23.625.000,00
KECAMATAN KODI BANGEDO	3.11.2.3.1	5	Rumah Negara Golongan III Type A Permane	2001	9.360.000,00
KECAMATAN WEWEWA BARAT				92.380.917,00	
KECAMATAN WEWEWA BARAT	2.3.1.5.1	16	Sepeda Motor	2011	23.645.917,00
KECAMATAN WEWEWA BARAT	3.11.1.1.1	2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1996	37.485.000,00
KECAMATAN WEWEWA BARAT	3.11.1.1.1	3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1999	8.500.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
KECAMATAN WEWEWA BARAT	3.11.1.1.1	18	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1996	14.875.000,00
KECAMATAN WEWEWA BARAT	3.11.2.4.1	1	Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan	1996	7.875.000,00
KECAMATAN WEWEWA TIMUR				50.618.542,00	
KECAMATAN WEWEWA TIMUR	2.3.1.5.1	5	Sepeda Motor	2010	24.937.540,00
KECAMATAN WEWEWA TIMUR	2.3.1.5.1	14	Sepeda Motor	2006	13.181.000,00
KECAMATAN WEWEWA TIMUR	3.11.1.1.1	12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1996	1,00
KECAMATAN WEWEWA TIMUR	3.11.1.1.1	17	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1996	1,00
KECAMATAN WEWEWA TIMUR	4.14.6.5.8	1	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservok	2009	12.500.000,00
KECAMATAN WEWEWA UTARA				24.937.540,00	
KECAMATAN WEWEWA UTARA	2.3.1.5.1	5	Sepeda Motor	2010	24.937.540,00
KECAMATAN WEWEWA SELATAN				44.089.250,00	
KECAMATAN WEWEWA SELATAN	2.3.1.5.1	1	Sepeda Motor	2010	24.907.250,00
KECAMATAN WEWEWA SELATAN	2.3.1.5.1	10	Sepeda Motor	2006	19.182.000,00
KECAMATAN WEWEWA TENGAH				23.645.917,00	
KECAMATAN WEWEWA TENGAH	2.3.1.5.1	11	Sepeda Motor	2011	23.645.917,00
KELURAHAN LANGGA LERO				18.184.500,00	
KELURAHAN LANGGA LERO	2.3.1.5.1	2	Sepeda Motor	2010	18.184.500,00
KELURAHAN WAITABULA				18.184.500,00	
KELURAHAN WAITABULA	2.3.1.5.1	1	Sepeda Motor	2007	18.184.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				25.698.768.487,82	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.4.3.8.15	1	Jam Ukur (Meet Lock)	2008	25.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.6.2.6.46	14	Lonceng/Genta	2008	15.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	1	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	2	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	3	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	4	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	5	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	6	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	7	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	8	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	9	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	10	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	11	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	12	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	13	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	14	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	15	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	16	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	17	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	18	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	19	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	20	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	21	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	22	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	23	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	24	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	25	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	26	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	27	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	28	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	29	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	30	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	31	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.2.68	32	Model Bangun Ruang	2009	760.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	4	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	7	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	8	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	9	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	11	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	12	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2007	25.000.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	13	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	14	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	16	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	18	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	32	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	33	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	34	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	35	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	36	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	37	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	38	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	39	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	42	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2007	25.000.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	43	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	57	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	58	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	59	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	60	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	61	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	62	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	63	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	64	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	65	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	66	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	67	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	68	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	69	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	70	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	71	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	72	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	73	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	74	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	75	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	76	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	77	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	78	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	79	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	80	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	81	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	82	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	83	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	84	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	85	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	86	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	87	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	88	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	89	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	90	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	91	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	92	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	93	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	94	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	95	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	96	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	97	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.3.46	98	ALat Peraga IPA Dasar Lain-lain	2011	2.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	1	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	2	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	3	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	4	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	5	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	6	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	7	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	8	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	9	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	10	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	11	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	12	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	13	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	14	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	15	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	16	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	17	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	18	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	19	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	20	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	21	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	22	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	23	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	24	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	25	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	26	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	27	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	28	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	29	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	30	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	31	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	32	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	33	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	34	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	35	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	36	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	37	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	38	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	39	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	40	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	41	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	42	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	43	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	44	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	45	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	46	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	47	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.4.97	48	Alat Peraga IPA Lanjutan Lain-lain	2011	5.567.376,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	8	Alat Peraga IPS Lain-lain	2008	74.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	9	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	10	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	11	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	12	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	13	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	14	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	15	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	16	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	17	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	18	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	19	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	20	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	21	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	22	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	23	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	24	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	25	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	26	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	27	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	28	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	29	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	30	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	31	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	32	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	33	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	34	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	35	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	36	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	37	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	38	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	39	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	40	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	41	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	42	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	43	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	44	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	45	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	46	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	47	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	48	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	49	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.7.2	50	Alat Peraga IPS Lain-lain	2011	1.650.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	2	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2008	10.187.307,99
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	3	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2008	29.700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	4	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2008	29.700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	8	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2008	29.700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	10	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2008	29.700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	11	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2008	29.700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	16	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	17	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	18	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	19	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	20	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	21	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	22	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	23	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	24	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	25	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	26	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	27	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	28	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	29	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	30	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	31	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	32	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	33	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	34	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	35	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	36	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	37	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	38	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	39	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	40	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	41	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	42	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	43	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	44	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	45	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	46	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	47	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	48	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	49	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	50	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	51	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	52	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	53	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	54	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	55	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	56	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	57	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	700.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	58	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	59	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	60	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	61	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	62	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	63	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	64	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	65	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	66	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	67	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	68	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	69	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	70	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	71	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	72	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	73	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	74	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	75	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	76	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	77	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	78	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	79	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	80	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	81	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	82	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	83	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	84	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	85	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	86	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	87	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	88	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	89	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	90	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	91	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	92	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	93	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	94	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	95	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	96	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	97	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	98	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	99	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	1.100.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	100	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	101	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	102	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	103	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	104	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	105	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	106	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	107	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	108	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	109	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	110	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	111	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	112	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	113	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	114	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	115	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	116	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	117	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	118	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	119	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	120	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	121	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	122	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	123	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	124	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	125	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	126	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	127	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	128	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	129	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	130	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	131	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	132	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	133	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	134	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	135	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	136	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	137	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	138	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	139	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	140	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	141	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	4.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	142	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	143	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	144	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	145	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	146	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	147	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	148	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	149	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	150	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	151	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	152	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	153	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	154	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	155	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	156	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	157	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	158	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	159	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	160	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	161	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	162	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	163	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	164	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	165	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	166	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	167	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	168	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	169	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	170	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	171	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	172	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	173	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	174	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	175	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	176	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	177	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	178	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	179	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	180	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	181	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	182	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	183	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	184	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	185	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	186	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	187	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	188	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.268.565,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	189	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	190	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	191	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	192	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	193	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	194	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	195	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	196	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	197	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	198	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	199	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	200	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	201	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	202	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	203	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	204	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	205	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	206	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	207	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	208	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	209	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	210	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	211	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	212	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	213	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	214	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	215	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	216	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	217	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	218	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	219	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	220	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	221	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	222	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	223	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	224	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	225	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	226	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	227	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	228	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	229	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	230	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	231	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	232	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	233	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	234	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	235	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	5.352.218,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	236	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	237	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	238	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	239	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	240	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	241	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	242	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	243	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	244	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	245	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	246	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	247	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	248	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	249	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	250	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	251	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	252	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	253	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	254	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	255	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	256	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	257	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	258	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	259	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	260	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	261	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	262	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	263	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	264	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	265	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	266	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	267	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	268	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	269	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	270	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	271	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	272	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	273	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	274	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	275	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	276	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	277	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	278	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	279	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	280	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	281	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	282	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	7.675.440,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	283	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	284	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	285	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	286	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	287	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	288	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	289	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	290	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	291	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	292	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	293	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	294	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	295	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	296	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	297	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	298	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	299	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	300	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	301	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	302	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	303	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	304	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	305	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	306	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	307	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	308	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	309	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	310	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	311	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	312	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	313	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	314	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	315	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	316	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	317	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	318	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	319	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	320	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	321	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	322	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	323	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	324	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	325	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	326	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	327	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	328	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.9.15	329	Alat Peraga Ketrampilan Lain-lain	2011	8.632.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.10.1	1	Gitar Spanish	2010	2.178.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.10.1	2	Gitar Spanish	2010	2.178.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.10.1	3	Gitar Spanish	2010	2.178.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.10.1	4	Gitar Spanish	2010	2.178.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.10.1	5	Gitar Spanish	2010	2.178.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.10.1	6	Gitar Spanish	2010	2.178.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.10.1	7	Gitar Spanish	2010	2.178.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.10.1	8	Gitar Spanish	2010	2.178.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.10.1	9	Gitar Spanish	2010	2.178.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.10.1	10	Gitar Spanish	2010	2.178.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.10.17	10	Alat Peraga Kesenian Lain-lain	2008	29.700.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.10.17	11	Alat Peraga Kesenian Lain-lain	2008	20.574.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.10.17	12	Alat Peraga Kesenian Lain-lain	2008	75.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	7	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2009	1.014.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	8	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2009	1.014.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	9	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2009	1.014.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	10	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2009	1.014.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	11	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2009	1.014.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	12	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2009	1.014.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	13	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2009	1.014.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	14	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2009	1.014.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	15	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2009	1.014.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	16	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2011	2.925.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	17	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2011	2.925.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	18	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2011	2.925.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	19	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2011	2.925.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	20	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2011	2.925.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	21	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2011	2.925.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	22	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2011	2.925.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	23	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2011	2.925.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	24	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2011	2.925.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	25	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2011	3.856.118,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	26	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2011	3.856.118,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	27	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2011	3.856.118,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	28	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2011	3.856.118,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	29	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2011	3.856.118,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	30	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2011	3.856.118,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	31	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2011	3.856.118,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	32	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2011	3.856.118,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	33	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2011	3.856.118,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	34	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2011	3.900.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	35	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2011	3.900.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	36	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2011	3.900.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	37	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2011	3.900.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	38	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2011	3.900.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	39	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2011	3.900.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	40	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2011	3.900.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	41	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2011	3.900.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.11.8	42	Alat Peraga Olah Raga Lain-lain	2011	3.900.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.12.2	1	Bendera Merah Putih	1992	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.12.2	2	Bendera Merah Putih	1976	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.12.2	8	Bendera Merah Putih	2008	5.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.12.2	9	Bendera Merah Putih	2008	5.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.12.2	10	Bendera Merah Putih	2008	5.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.12.2	11	Bendera Merah Putih	2005	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.12.2	12	Bendera Merah Putih	1990	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.12.2	13	Bendera Merah Putih	1989	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.12.2	14	Bendera Merah Putih	1989	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.12.2	15	Bendera Merah Putih	1989	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.13.2	1	Alat Peraga/Praktek Sekolah Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.13.2	2	Alat Peraga/Praktek Sekolah Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.13.2	3	Alat Peraga/Praktek Sekolah Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.13.2	4	Alat Peraga/Praktek Sekolah Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.13.2	5	Alat Peraga/Praktek Sekolah Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.13.2	6	Alat Peraga/Praktek Sekolah Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.13.2	7	Alat Peraga/Praktek Sekolah Lain-lain	2007	25.000.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.13.2	8	Alat Peraga/Praktek Sekolah Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.13.2	9	Alat Peraga/Praktek Sekolah Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.13.2	10	Alat Peraga/Praktek Sekolah Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.13.2	11	Alat Peraga/Praktek Sekolah Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.2.13.2	12	Alat Peraga/Praktek Sekolah Lain-lain	2007	25.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.9.4.4.4	2	Printer	1992	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.11.1.10.1	323	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Perma	2007	98.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.11.2.3.10	133	Rumah Negara Golongan III Type D Permane	2007	20.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.2.3.10	86	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	2008	22.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.2.3.10	87	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	2008	22.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.2.3.10	88	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	2008	22.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.2.3.10	89	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	2008	22.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.2.3.10	90	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	2008	22.000.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.2.3.10	91	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	2008	22.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.2.3.10	92	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	2008	22.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.2.3.10	93	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	2008	22.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.2.3.10	94	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	2008	22.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.2.3.10	95	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	2008	22.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.2.3.10	96	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	2008	22.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.30.1	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Per	2008	11.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.30.1	2	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Per	2008	11.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.30.1	3	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Per	2008	11.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.30.1	4	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Per	2008	11.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.30.1	5	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Per	2008	11.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.30.1	6	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Per	2008	11.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.30.1	7	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Per	2008	11.000.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.30.1	8	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Per	2008	11.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.30.1	9	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Per	2008	11.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.30.1	10	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Per	2008	11.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.30.1	11	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Per	2008	11.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	136	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2008	118.800.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	137	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2008	118.800.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	138	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2008	118.800.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	139	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2008	118.800.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	140	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2008	118.800.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	141	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2008	118.800.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	142	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2008	118.800.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	143	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2008	118.800.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	144	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2008	118.800.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	145	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2008	118.800.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	146	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2008	118.800.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	150	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2008	118.800.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	161	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2009	163.061.500,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	162	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2009	186.600.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	163	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2009	181.856.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	165	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2009	171.940.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	166	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2009	139.893.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	167	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2009	181.400.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	170	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2009	185.050.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	171	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2009	185.050.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	173	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2009	165.156.200,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	345	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	117.000.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	348	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	116.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	349	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	117.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	350	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	115.243.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	351	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	117.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	353	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	117.017.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	354	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	111.851.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	358	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	117.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	362	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	116.826.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	363	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	117.450.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	365	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	117.320.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	371	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	117.101.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	374	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	117.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	375	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	115.500.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	376	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	116.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	379	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	117.083.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	381	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	116.820.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	382	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	107.938.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	388	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	117.192.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	390	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	117.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	392	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	117.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	396	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	116.500.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	397	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	116.900.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	399	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	189.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	406	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	241.356.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	407	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	240.995.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	408	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	242.350.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	409	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	239.033.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	411	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	241.950.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	417	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	240.000.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	419	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	240.381.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	420	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	170.655.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	422	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	185.195.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	423	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	197.320.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	424	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	197.576.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	426	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	196.550.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	427	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	192.624.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	428	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	197.500.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	430	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	155.574.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	431	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2011	391.722.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.9.1	1	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	2012	231.350.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.16.1	6	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2012	113.839.344,26
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.16.1	10	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2012	113.839.344,26
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.16.1	14	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2012	113.839.344,26
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.16.1	24	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2012	113.839.344,26
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.16.1	26	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2012	113.839.344,26
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.16.1	27	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2012	113.839.344,26
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.16.1	30	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2012	113.839.344,26
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.16.1	31	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2012	113.839.344,26
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.16.1	32	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2012	113.839.344,26
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.16.1	33	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2012	113.839.344,26
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.16.1	34	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2012	113.839.344,26
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.16.1	38	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2012	113.839.344,26

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.16.1	40	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2012	113.839.344,26
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.16.1	44	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2012	113.839.344,26
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.16.1	48	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2012	113.839.344,26
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.16.1	49	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2012	113.839.344,26
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.16.1	50	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2012	113.839.344,26
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.16.1	53	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2012	113.839.344,26
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.16.1	55	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2012	113.839.344,26
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.16.1	56	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2012	113.839.344,26
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.16.1	57	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2012	113.839.344,26
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.16.1	58	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2012	113.839.344,26
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.16.1	60	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2012	113.839.344,26
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	440	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2012	231.350.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	441	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2012	231.350.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	443	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2012	231.350.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	446	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2012	231.350.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	447	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2012	231.350.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	450	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2012	231.350.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	452	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2012	231.350.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	453	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2012	231.350.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	455	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2012	231.350.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	456	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2012	231.350.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	458	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2012	231.350.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	459	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2012	231.350.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	460	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2012	231.350.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	461	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2012	231.350.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	463	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2012	231.350.000,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	464	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2012	231.350.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	466	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2012	231.350.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	470	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2012	231.350.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	481	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2012	231.350.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	483	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2012	231.350.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	491	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2012	231.350.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	493	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2012	231.350.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	499	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2012	231.350.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	501	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2012	231.350.000,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	668	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2015	292.356.544,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	669	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2015	292.356.544,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	670	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2015	292.356.544,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	671	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2015	292.356.544,00

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	672	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2015	292.356.544,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	673	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2015	292.356.544,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	674	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2015	292.356.544,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	675	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2015	292.356.544,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	676	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2015	292.356.544,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	677	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2015	292.356.544,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	678	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2015	284.996.544,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	679	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2015	284.996.544,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.3.3.1.1.10.1	680	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2015	284.996.544,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan			2004	74.775.150,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan			2004	25.374.600,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan			2004	88.128.450,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan			2004	119.691.000,00
SMPN 4 KODI UTARA	SMPN 4 KODI UTARA				

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
SMPN 4 KODI UTARA	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservok Air Umum			2012	24.069.674,85
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Website			2011	156.054.900,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dana Bergulir Ternak				4.021.922.484,08
Dinas PUPR					
	Peningkatan Jalan Kawangohari - Kapakamandeta		Kekurangan Volume Belanja Modal JIJ	2023	26.686.413,62
	Peningkatan Jalan Dalam Kota Tambolaka		Belanja Modal JIJ	2023	77.437.527,17
	Peningkatan Jalan Wanoroto - Kori		Belanja Modal JIJ	2023	55.848.006,56
	Pembangunan Gedung KIR		Belanja Modal GB	2023	38.601.577,36
RSUD Reda Bolo					
	Pembangunan Gedung UTD		Belanja Modal GB	2023	68.935.120,74
Dinas Kesehatan					
	Lanjutan Pembangunan Rumah Paramedis Puskesmas Radamata		Belanja Modal GB	2023	21.455.975,86
	Lanjutan Pembangunan Rumah Paramedis Puskesmas Waimangura		Belanja Modal GB	2023	21.191.728,65
	Rehab Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Panenggo Ede		Belanja Modal GB	2023	4.416.113,10
	Lanjutan Pembangunan Ruang Rawat Inap Puskesmas Walandimu		Belanja Modal GB	2023	31.540.342,32
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Pembangunan Ruang Guru SMPN 8 Kodi Utara		Belanja Modal GB	2023	14.475.840,30

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 8 Kodi Utara		Belanja Modal GB	2023	24.622.653,40
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Manu Dede		Belanja Modal GB	2023	42.404.622,80
	Pembangunan Ruang Guru SDN Manu Dede		Belanja Modal GB	2023	9.066.605,39
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Poma		Belanja Modal GB	2023	20.273.036,58
	Rehab Ruang Kelas SDN Watu Takula		Belanja Modal GB	2023	1.569.812,05
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		Kekurangan Volume Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2022	24.724.760,03
Dinas P&K	Dinas P&K		Kekurangan Volume Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2022	54.428.289,47
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TIPE A KAB. SUMBA BARAT DAYA			Honor TPK tidak sesuai ketentuan	2024	6.545.000,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH			Honor TPK tidak sesuai ketentuan	2024	7.865.333,33
KANTOR KECAMATAN WEWEWA UTARA			Honor TPK tidak sesuai ketentuan	2024	1.147.500,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH			Honor TPK tidak sesuai ketentuan	2024	10.918.250,00
SEKRETARIAT DAERAH TIPE A			Honor TPK tidak sesuai ketentuan	2024	29.941.250,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH			Honor TPK tidak sesuai ketentuan	2024	11.916.166,67

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH			Honor TPK tidak sesuai ketentuan	2024	34.793.333,33
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH			Honor TPK tidak sesuai ketentuan	2024	5.240.833,33
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH			Honor TPK tidak sesuai ketentuan	2024	24.844.791,67
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH			Honor TPK tidak sesuai ketentuan	2024	9.379.666,67
SEKRETARIAT DAERAH TIPE A			Honor TPK tidak sesuai ketentuan	2024	2.018.750,00
SEKRETARIAT DAERAH TIPE A			Honor TPK tidak sesuai ketentuan	2024	5.666.666,67
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH			Honor TPK tidak sesuai ketentuan	2024	2.547.166,67
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH			Honor TPK tidak sesuai ketentuan	2024	4.533.083,33
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH			Honor TPK tidak sesuai ketentuan	2024	2.816.750,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH			Honor TPK tidak sesuai ketentuan	2024	1.995.000,00
	Honor Melebihi SBU				

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
BKPSDM			Honor Melebihi SBU	2024	14.632.500,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Honor Melebihi SBU	2024	22.882.500,00
Sekretariat Daerah			Honor Melebihi SBU	2024	1.770.000,00
	Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas				
Dinas Kesehatan			Kelebihan Perjalanan Dinas	2024	11.185.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Kelebihan Perjalanan Dinas	2024	11.207.856,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			Kelebihan Perjalanan Dinas	2024	101.573.320,00
Dinas PUPR			Kelebihan Perjalanan Dinas	2024	61.456.125,00
DP3AP2KB			Kelebihan Perjalanan Dinas	2024	4.461.350,00
Setwan			Kelebihan Perjalanan Dinas	2024	76.177.000,00
Puskesmas Werilolo			Kelebihan Pembayaran Jaspel	2024	62.079.911,71
Puskesmas Deludepa			Kelebihan Pembayaran Jaspel	2024	78.425.116,80
Puskesmas Billa Cenge			Kelebihan Pembayaran Jaspel	2024	146.144.540,21
Puskesmas Panenggo Ede			Kelebihan Pembayaran Jaspel	2024	208.483.316,10
Puskesmas Weekombak			Kelebihan Pembayaran Jaspel	2024	164.596.677,50
Puskesmas Kawango Hari			Kelebihan Pembayaran Jaspel	2024	94.885.940,98
Puskesmas Tena Teke			Kelebihan Pembayaran Jaspel	2024	122.223.613,54
Puskesmas Waimangura			Kelebihan Pembayaran Jaspel	2024	109.658.998,40
Puskesmas Palla			Kelebihan Pembayaran Jaspel	2024	114.974.950,16
Puskesmas Elopada			Kelebihan Pembayaran Jaspel	2024	88.046.882,81
Puskesmas Radamata			Kelebihan Pembayaran Jaspel	2024	146.308.581,41
Puskesmas Watukawula			Kelebihan Pembayaran Jaspel	2024	303.622.312,95
Puskesmas Walla Ndimu			Kelebihan Pembayaran Jaspel	2024	91.585.904,61
Puskesmas Bondo Kodi			Kelebihan Pembayaran Jaspel	2024	83.538.564,18

SKPD	Kode Aset	No Reg	Nama Barang	Tahun	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	7
Puskesmas Tanggaba			Kelebihan Pembayaran Jaspel	2024	203.410.818,22
Puskesmas Kori			Kelebihan Pembayaran Jaspel	2024	110.590.302,95
Dinas Pendidikan	Mencatat temuan pengembalian Belanja Jasa Konsultan GB Sekolah Swasta (TP Jasa Konsultasi)			2024	15.583.333,33
Dinas PUPR	Mencatat temuan pengembalian Belanja Jasa Konsultan JIJ (TP Jasa Konsultasi), perhitungan penyusutan untuk aset yang beririsan dengan TP Kurvol sudah disesuaikan				
	Jalan		Jalan	2024	80.680.680,00
	Saluran		Saluran	2024	3.435.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah				2024	17.983.000,00
				232.011.000,00	56.681.669.347,53

Buku II

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAHUN 2024
DI TAMBOLAKA

DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DI KUPANG

Nomor : 72.B /LHP/XIX.KUP/05/2025
Tanggal : 23 Mei 2025

Buku II

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024
DI TAMBOLAKA

DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DI KUPANG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **ii**

DAFTAR GAMBAR ..... **v**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **vi**

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN **1**

BAB I HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN **3**

A. Penyusunan Laporan Keuangan **3**

1. Kesalahan Penganggaran pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Enam SKPD 3

B. Pendapatan **7**

1. Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Tidak Sesuai Ketentuan 7

C. Belanja **12**

1. Pelaksanaan Belanja Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas Lima Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan yang Diserahkan kepada Sekolah Swasta Tidak Sesuai Ketentuan..... 12
2. Pelaksanaan Belanja Jasa Honorarium, Jasa Konsultansi, Jasa Pelayanan Kesehatan dan Jasa Iuran Jaminan/Asuransi Tidak Sesuai Ketentuan 21
3. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Enam SKPD Tidak Sesuai Ketentuan..... 37
4. Pengelolaan Belanja Hibah pada Lima SKPD belum Memadai..... 41
5. Pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tiga SKPD Tidak Sesuai Ketentuan..... 55

D. Aset **78**

1. Pengelolaan Kas pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya belum Tertib 78
2. Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya belum Tertib 84

BAB II IKHTISAR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBELUMNYA **90**

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal TA 2024	3
Tabel 1. 2	Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa dianggarkan pada Belanja Modal	4
Tabel 1. 3	Kesalahan Penganggaran Belanja Modal dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa	4
Tabel 1. 4	Anggaran dan Realisasi PAD TA 2024	8
Tabel 1. 5	Kekurangan Pembayaran Pajak Hotel Tahun 2024	9
Tabel 1. 6	Kekurangan Volume Pekerjaan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12
Tabel 1. 7	Kekurangan Volume atas Pembangunan Ruang Kelas Baru DAU SG SMP Bakti Luhur	14
Tabel 1. 8	Kekurangan Volume atas Pembangunan Ruang Kelas Baru DAU SG SMP Genera Kalerea	15
Tabel 1. 9	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas SDK Kalembu Kutura	16
Tabel 1. 10	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Katolik Palla	17
Tabel 1. 11	Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Kristen Waimangura	18
Tabel 1. 12	Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2024	21
Tabel 1. 13	Rincian permasalahan pada Belanja Jasa	21
Tabel 1. 14	Batasan Jumlah Tim yang dapat diberikan Honorarium sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020	23
Tabel 1. 15	Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Honorarium TPK	24
Tabel 1. 16	Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Honorarium Panitia	24
Tabel 1. 17	Rincian Kelebihan Pembayaran Personel Konsultan per SKPD	26
Tabel 1. 18	Rekap Iuran Jaminan Kesehatan atas Peserta JKN PBI yang Telah Meninggal	30
Tabel 1. 19	Rekap Iuran Jaminan Kesejatan atas Peserta JKN PBI yang Telah Pindah Keluar Kabupaten Sumba Barat Daya	30
Tabel 1. 20	Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024	38
Tabel 1. 21	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024	42
Tabel 1. 22	Kegiatan KONI melewati TA 2024	43
Tabel 1. 23	Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Parpol pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2024	44
Tabel 1. 24	Rincian Parpol terlambat Menyampaikan LPJ	45
Tabel 1. 25	Rincian Sekolah Tidak Salur dan Tidak Cair Dana BOS TA 2024 Tahap II	48
Tabel 1. 26	Rincian Sekolah Dasar Tidak Salur Dana BOS Tahap II karena belum Lapor LPJ Tahap 1	49
Tabel 1. 27	Rincian Sekolah Dasar Yayasan TT Tidak Cair Dana BOS Tahap II	50
Tabel 1. 28	Rincian Sekolah Menengah Pertama Tidak Salur dan Tidak Cair Dana BOS	50

Tabel 1. 29 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal JIJ TA 2024 55
Tabel 1. 30 Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal JIJ TA 2024 56
Tabel 1. 31 Rekapitulasi Kekurangan Volume Pekerjaan Gedung dan bangunan pada Disdikbud, Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR 56
Tabel 1. 32 Kekurangan Volume atas Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMPN 8 Kodi Utara 58
Tabel 1. 33 Kekurangan Volume atas Pembangunan Ruang Kelas Baru DAU SG SD Negeri Weri Kadu 59
Tabel 1. 34 Kekurangan Volume atas Pembangunan Ruang Kelas Baru DAU SG SMPN 2 Kota Tambolaka 60
Tabel 1. 35 Kekurangan Volume atas Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabotannya SMPN 8 Kodi Utara 61
Tabel 1. 36 Kekurangan Volume atas Pembangunan Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas DAU SG SDN Wee Tabula 2 62
Tabel 1. 37 Kekurangan Volume atas Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal beserta Perabotannya SDN Gokata 63
Tabel 1. 38 Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal beserta Perabotannya SMPN 1 Kota Tambolaka 64
Tabel 1. 39 Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal beserta Perabotannya SMPN 2 Kodi 65
Tabel 1. 40 Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal beserta Perabotannya SMPN 5 Wewewa Barat 66
Tabel 1. 41 Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Labkesda) 68
Tabel 1. 42 Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sentra UKM Kota Tambolaka Tahap II DID 69
Tabel 1. 43 Rekapitulasi Kekurangan Volume Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPR 69
Tabel 1. 44 Rincian Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Penanganan *Long Segmen* Jalan dalam Kota Tambolaka 70
Tabel 1. 45 Rincian Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Penanganan *Long Segmen* Jalan Tanggaba - Tanggo'o 71
Tabel 1. 46 Rincian Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Penanganan *Long Segmen* Jalan SP. Waimangura - Leteloko 72
Tabel 1. 47 Rincian Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Penanganan *Long Segmen* Jalan Weekapoda – Kikukarambo 73
Tabel 1. 48 Rincian Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan Kolping dan Kramat Jati 74
Tabel 1. 49 Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 78
Tabel 1. 50 Daftar SKPD terlambat Setor sisa UP Tahun 2024 79
Tabel 1. 51 Daftar SKPD terlambat Setor Retribusi Daerah TA 2024 80

Tabel 1. 52 Rincian Aset Tetap per 31/12/2024 dan 31/12/2023 84
Tabel 1. 53 Rincian Sepeda Motor yang Tidak Diketahui Keberadaannya 87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Formula Perhitungan Berdasarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2016	27
Gambar 2.	Formula Perhitungan Berdasarkan Permenkes Nomor 6 Tahun 2022	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rincian Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa dianggarkan pada Belanja Modal
Lampiran 2	Rincian Kesalahan Penganggaran Belanja Modal dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa
Lampiran 3	Rincian Perhitungan Kekurangan Pembayaran Pajak Hotel Tahun 2024
Lampiran 4	Rincian Kekurangan Volume atas Pembangunan Ruang Kelas Baru DAU SG SMP Bakti Luhur
Lampiran 5	Rincian Kekurangan Volume atas Pembangunan Ruang Kelas Baru DAU SG SMP Genera Kalerea
Lampiran 6	Rincian Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas SDK Kalembu Kutura
Lampiran 7	Rincian Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Katolik Palla
Lampiran 8	Rincian Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Kristen Waimangura
Lampiran 9	Rincian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Lampiran 10	Rincian Kelebihan Pembayaran Honorarium Panitia
Lampiran 11	A. Rekapitulasi Personel Konsultan Lebih Bayar Berdasarkan SKPD dan Kontrak
	B. Rincian Personel Konsultan Lebih Bayar
Lampiran 12	Rekapitulasi Kelebihan Jasa Pelayanan Kesehatan per Puskesmas
Lampiran 13	Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar
Lampiran 14	Rincian Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan atas Peserta JKN PBI yang Telah Meninggal Dunia
Lampiran 15	Rincian Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan atas Peserta JKN PBI yang Telah Mutasi Keluar dari Kabupaten Sumba Barat Daya
Lampiran 16	Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Bukti Riil
Lampiran 17	Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Tidak Menginap namun Mempertanggungjawabkan Biaya Penginapan
Lampiran 18	Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap
Lampiran 19	Rincian Pembayaran Komponen Biaya Perjalanan Dinas (Uang Harian/Biaya Transport) Melebihi Standar Biaya Umum
Lampiran 20	Rincian Kurang Bayar Atas Realisasi Bantuan Partai Politik kepada Sepuluh Partai Politik Periode Tahun 2024 s.d. 2029
Lampiran 21	Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta Perabotannya SMP Negeri 8 Kodi Utara

Lampiran 22	Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas Baru DAU SG SD Negeri Weri Kadu
Lampiran 23	Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas Baru DAU SG SMP Negeri 2 Kota Tambolaka
Lampiran 24	Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabotannya SMPN 8 Kodi Utara
Lampiran 25	Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas DAU SG SDN Wee Tabula 2
Lampiran 26	Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal beserta Perabotannya SD Negeri Gokata
Lampiran 27	Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal beserta Perabotannya SMP Negeri 1 Kota Tambolaka
Lampiran 28	Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal beserta Perabotannya SMPN 2 Kodi
Lampiran 29	Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal beserta Perabotannya SMPN 5 Wewewa Barat
Lampiran 30	Rincian kekurangan volume Pekerjaan Konstruksi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Labkesda)
Lampiran 31	Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sentra UKM Kota Tambolaka Tahap II (DID)
Lampiran 32	Daftar Rekening Sekolah Negeri yang Tidak Terdapat pada SK Bupati
Lampiran 33	Rincian Pembayaran Honorarium kepada ASN di Sekolah Dasar
Lampiran 34	Rincian Pembayaran Honorarium kepada ASN di Sekolah Menengah Pertama
Lampiran 35	Rincian Aset Tetap yang Tidak Ada pada Rumah Jabatan Wakil Bupati
Lampiran 36	Rincian Kendaraan Bermotor Dikuasai oleh Pegawai yang Telah Pensiun dan Personel yang Bukan Peruntukannya.
Lampiran 37	Rincian Aset Kendaraan Bermotor Tidak Diketahui Keberadaannya pada Kecamatan Wewewa Barat

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 72.A/XIX.KUP/05/2025 tanggal 23 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

1. Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan (Jaspel) Kesehatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan tidak sesuai ketentuan, karena terdapat formula perhitungan variabel ketenagaan dan/atau jabatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 6 Tahun 2022, permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pegawai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas senilai Rp2,12 miliar;
2. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak sesuai ketentuan, antara lain terdapat bukti pertanggungjawaban biaya penginapan tidak sesuai hasil konfirmasi dari penyedia jasa penginapan dan terdapat pertanggungjawaban perjalanan dinas rangkap, permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp261,76 juta; dan
3. Pelaksanaan 14 Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tiga SKPD tidak sesuai ketentuan, antara lain terdapat kekurangan volume, permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan total senilai Rp522,04 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumba Barat Daya antara lain agar menginstruksikan:

1. Kepala Dinas Kesehatan supaya memerintahkan 16 Kepala Puskesmas agar memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Jasa Tenaga Kesehatan senilai Rp2,12 miliar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas di FKTP;
2. Kepala SKPD terkait memproses kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp261,76 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
3. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume total senilai Rp522,04 juta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Kupang, 23 Mei 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan

Triyantoro S.E., M.M.

BAB I

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebanyak sembilan temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut.

A. Penyusunan Laporan Keuangan

1. Kesalahan Penganggaran pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Enam SKPD

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menyajikan anggaran dan realisasi Belanja dan Transfer Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2024 masing-masing senilai Rp1.233.200.263.844,00 dan Rp1.147.575.940.833,00 atau sebesar 93,06% dari anggaran, diantaranya direalisasikan untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal TA 2024

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang dan Jasa	355.638.300.148,00	319.265.652.334,00	89,77
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.332.368.704,00	27.119.273.098,00	92,46
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.446.323.354,00	35.658.539.759,00	95,23
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	95.174.430.838,00	94.810.066.973,00	99,62
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.191.782.475,00	3.045.057.803,00	95,40
Jumlah	**520.783.205.519,00**	**479.898.589.967,00**	**92,15**

Pemerintah daerah (Pemda) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023 dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2024. Dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 910/9/BKAD/SBD/I/2024 tanggal 8 Januari 2024.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas ketepatan klasifikasi penganggaran dan realisasi APBD serta keterangan dari Bidang Anggaran BKAD diketahui terdapat kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kesehatan, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan uraian sebagai berikut.

a. Belanja yang menghasilkan barang yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Modal senilai Rp195.554.300,00

Hasil pemeriksaan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Laporan Barang Milik Daerah (BMD), dokumen pertanggungjawaban belanja, dan dokumen penetapan dan realisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal TA 2024 menunjukkan adanya belanja yang menghasilkan barang yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Modal pada Disdikbud senilai Rp195.554.300,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. 2 Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa dianggarkan pada Belanja Modal

No	Nama SKPD	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Disdikbud	Belanja Barang yang diserahkan pada Masyarakat yang dianggarkan pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.867.900,00
		Belanja Barang yang diserahkan pada Masyarakat yang dianggarkan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan	151.196.400,00
		Belanja Barang Jasa Transportasi yang dianggarkan pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	490.000,00
		Jumlah	**195.554.300,00**

Adapun rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1.**

b. Belanja yang menghasilkan Aset Tetap dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Barang dan Jasa senilai Rp711.660.974,00

Hasil pemeriksaan atas DPA, DPPA, Laporan BMD, dan dokumen pertanggungjawaban belanja, menunjukkan adanya belanja yang menghasilkan Aset Tetap, namun dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Barang dan Jasa pada enam SKPD senilai Rp711.660.974,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. 3 Kesalahan Penganggaran Belanja Modal dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa

No	Nama SKPD	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan, RSUD, Disdikbud, dan Bapelitbangda	Reklasifikasi Barang dan Jasa Menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	198.511.108,00
2	Dinas Kesehatan, Disdikbud, dan Disdukcapil	Belanja Barang dan Jasa yang Dikapitalisasi Menjadi Aset Tetap	279.092.466,00
3	Dinas Kesehatan, Disdikbud, dan Disdukcapil	Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Jalan, Instalasi dan Jaringan	212.610.000,00
4	Disdikbud	Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Lainnya	21.447.400,00
		Jumlah	**711.660.974,00**

Adapun rincian dapat dilihat pada **Lampiran 2.**

Atas permasalahan tersebut, TAPD menyatakan bahwa telah melaksanakan tugas mereviu anggaran yang diajukan oleh SKPD namun diakui masih terdapat ketidaktelitian dalam mereviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diajukan oleh SKPD sehingga terjadi beberapa kesalahan penganggaran, contoh anggaran yang seharusnya menggunakan rekening Belanja Modal akan tetapi realisasi menggunakan rekening Belanja Barang dan Jasa. Demikian pula sebaliknya.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Bab II Anggaran Pendapatan Belanja Daerah huruf D. Belanja Daerah, pada:

   1) Angka (2) Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf b Belanja Barang dan Jasa pada:

      a) Nomor (1) yang menyatakan bahwa "Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain";

      b) Nomor (3) yang menyatakan bahwa "Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat"; dan

      c) Nomor (4) yang menyatakan bahwa "Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut: (a). Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai; dan (e). Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat";

   2) Angka (3) Ketentuan Terkait Belanja Modal pada:

      a) Huruf a yang menyatakan bahwa "Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan (3) batas minimal kapitalisasi aset. Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu (1) berwujud; (2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal; (3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan (4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan";

      b) Huruf b yang menyatakan bahwa "Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada";

c) Huruf c yang menyatakan bahwa "Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan";

d) Huruf d yang menyatakan bahwa "Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: (1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; (2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai; (3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; (4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; (5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; (6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya"; dan

e) Huruf e yang menyatakan bahwa "Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria: (1) dapat diidentifikasi; (2) tidak mempunyai wujud fisik; (3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual; (4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan (5) memiliki manfaat ekonomi masa depan";

b. Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah pada Bab V. Klasifikasi Menurut Jenis Belanja yang menyatakan bahwa "Komponen Belanja Modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, dan lain-lain. Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan

perangkat lunak (*software*), harus ditambahkan pada nilai perolehan. Komponen-komponen tersebut harus dianggarkan dalam APBN/APBD sebagai Belanja Modal dan bukan sebagai Belanja Operasional"; dan

c. Perbup Sumba Barat Daya Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah pada Lampiran Kebijakan Akuntansi Nomor (3) terkait Akuntansi Belanja perihal Perlakuan Akuntansi atas Belanja Barang dan Belanja Modal/Aset Tetap pada:

   1) Nomor (15) yang menyatakan bahwa "Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut: a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. Barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan besaran minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap"; dan

   2) Nomor (16) yang menyatakan bahwa "Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja barang dan jasa".

Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dalam LRA TA 2024 tidak menggambarkan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku dan substansi kegiatan yang sebenarnya.

Hal tersebut disebabkan oleh TAPD dan masing-masing Kepala SKPD terkait kurang cermat dalam menyusun dan melakukan verifikasi atas kesesuaian anggaran belanja dalam dokumen anggaran dengan jenis belanja dan substansi kegiatannya, serta ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Sumba Barat Daya menyatakan sependapat, dan akan menjadi perhatian serta perbaikan dimasa yang akan datang.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumba Barat Daya agar menginstruksikan TAPD membuat pedoman dalam menyusun dan melakukan verifikasi atas kesesuaian anggaran belanja dalam dokumen anggaran dengan jenis belanja dan substansi kegiatannya serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

B. Pendapatan

1. Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menyajikan anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada LRA TA 2024 masing-masing

senilai Rp41.865.479.936,00 dan senilai Rp43.651.261.637,32 atau sebesar 104,27% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. 4 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2024

Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Pendapatan Pajak Daerah	21.187.692.697,00	22.961.001.653,00	108,37
Pendapatan Retribusi Daerah	13.492.430.500,00	11.644.335.136,00	86,30
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.953.742.399,00	3.944.963.310,00	99,78
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.231.614.340,00	5.100.961.538,32	157,85
Jumlah	**41.865.479.936,00**	**43.651.261.637,32**	**104,27**

Realisasi PAD sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.4, diantaranya terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah, yaitu Perda Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Sumba Barat Daya Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang antara lain mengatur mengenai penilaian PBB-P2; Persentase NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2; Tata cara pemungutan pajak; Pemeriksaan pajak; Surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak; Tata cara penagihan; Tata cara penghapusan piutang pajak; Tata cara penyelesaian keberatan; Tata cara pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak; Penetapan, pembayaran dan penyetoran opsen PKB dan opsen BBNKB; dan tata cara yang sama terkait retribusi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pajak dan retribusi daerah diketahui terdapat permasalahan yang dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Kekurangan penerimaan pajak hotel pada dua Wajib Pajak (WP) hotel senilai Rp134.346.086,70

   Sebelum diterbitkan Perda Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Sumba Barat Daya mengacu pada Perda Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 7 Tahun 2012 tentang pajak daerah dalam mengelola dan memungut pendapatan daerah. Peraturan tersebut berlaku sampai dengan bulan Juli 2024.

   Berdasarkan Perda Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa objek pajak jasa perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi di darat dan di atas air dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan. Sedangkan objek pajak makanan dan/atau minuman adalah restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum serta penyedia jasa boga atau katering. Tarif pajak hotel dan restoran ditetapkan sebesar 10% dengan mekanisme *self-assesment*. Pendapatan pajak hotel dan restoran dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumba Barat Daya pada Bidang Pajak Daerah.

Pemeriksaan dilakukan secara uji petik bersama Bapenda terhadap tujuh WP hotel dengan cara membandingkan realisasi pembayaran pajak per bulan masing-masing WP dengan laporan pendapatan harian atau bulanan selama tahun 2024, memeriksa jumlah *bill* berupa unduhan dari sistem informasi keuangan hotel serta register yang berisi nama-nama tamu yang menginap pada hotel untuk kemudian dilakukan perhitungan kembali oleh Bapenda. Berdasarkan hasil perhitungan kembali, diketahui terdapat kekurangan pembayaran atas pajak hotel pada dua WP hotel total senilai Rp134.346.086,70 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 1. 5 Kekurangan Pembayaran Pajak Hotel Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Nama WP	Omzet yang Dilaporkan	Pajak yang Dibayarkan	Omzet Riil	Pajak Riil	Kurang Bayar Pajak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) =(6) - (4)
1	Hotel M	456.619.860,00	45.661.986,00	787.445.388,94	78.744.538,90	33.082.552,90
2	Hotel ST	1.894.585.660,00	189.458.566,00	2.907.220.998,00	290.722.099,80	101.263.533,80
Jumlah						**134.346.086,70**

Adapun rincian perhitungan dapat dilihat pada **Lampiran 3.**

Kepala Bidang (Kabid) Pajak Daerah menjelaskan bahwa penyebab adanya kurang bayar tersebut karena selama ini belum pernah dilakukan pemeriksaan terhadap WP. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Bapenda beranggapan pemeriksaan pajak harus dilakukan oleh pegawai yang memenuhi kompetensi dan memiliki kemampuan teknis sebagai pemeriksa pajak. Sedangkan berdasarkan Perbup Sumba Barat Daya Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Pemeriksa yang tergabung dalam suatu tim pemeriksa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Pemeriksa yang dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dampak dari ketiadaan pemeriksa pajak daerah dan kegiatan pemeriksaan pajak daerah dalam menguji kepatuhan wajib pajak daerah adalah terdapat wajib pajak daerah yg belum sepenuhnya mematuhi kewajiban pajaknya antara lain pada wajib pajak daerah Hotel M dan Hotel ST.

Atas Kekurangan penerimaan pajak tersebut telah dilakukan konfirmasi kepada Hotel M dan Hotel ST. Hotel M telah melakukan penyetoran dan melunasi kekurangan penerimaan pajak ke Kas Daerah senilai Rp33.082.552,90 pada tanggal 01 Mei 2025, sedangkan Hotel ST telah melakukan penyetoran kekurangan penerimaan pajak ke Kas Daerah senilai Rp47.813.200,00 pada tanggal 07 Mei 2025 sehingga masih tersisa senilai Rp53.450.333,80 (Rp101.263.533,80 - Rp47.813.200,00).

b. Kekurangan penerimaan denda pajak hotel dan restoran pada dua WP senilai Rp291.246.433,00

Perda Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 7 Tahun 2012 tentang pajak daerah dan Peraturan Bupati (Perbup) Sumba Barat Daya Nomor 26 Tahun

2024 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Bupati dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika WP dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Namun berdasarkan hasil wawancara kepada Kabid Pajak Daerah Bependa terkait mekanisme penetapan denda diketahui bahwa Bapenda Kabupaten Sumba Barat Daya selama tahun 2024 tidak pernah menerbitkan STPD apabila hendak menagihkan denda kepada WP, melainkan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Denda dikenakan kepada WP yang telah tercantum pada SSPD, selanjutnya dikomunikasikan kepada WP melalui surat pemberitahuan atau surat teguran. Ketika WP akan membayar denda tersebut maka Bapenda akan mencetak ulang SSPD. Keterangan lebih lanjut diketahui bahwa alasan tidak pernah diterbitkannya STPD dalam menagih denda ke WP adalah karena tidak adanya menu untuk menerbitkan STPD pada aplikasi *Vtax*.

Hasil pengujian terhadap dokumen dan tanggal pembayaran serta pelaporan WP hotel dan restoran pada tujuh hotel dan delapan restoran diketahui bahwa terdapat denda pajak yang belum dipungut atas sanksi administrasi yang belum diterbitkan STPD selama tahun 2024 senilai Rp291.246.433,00 yang terdiri dari denda pajak hotel senilai Rp192.292.548,00 dan denda pajak restoran senilai Rp98.953.885,00 terdiri dari :

1) Denda pajak Hotel CK senilai Rp191.689.648,00;
2) Denda Pajak Hotel ST senilai Rp602.900,00;
3) Denda Pajak Restoran Hotel CK senilai Rp98.875.125,00; dan
4) Denda Pajak Restoran Hotel ST senilai Rp78.760,00.

Atas Kekurangan penerimaan denda tersebut telah dilakukan konfirmasi kepada Hotel CK dan Hotel ST. Hotel CK telah melakukan penyetoran dan melunasi kekurangan penerimaan denda pajak hotel dan restoran ke Kas Daerah senilai Rp290.564.773,00 (Rp191.689.648,00 + Rp98.875.125,00) pada tanggal 5 Mei 2025, sedangkan Hotel ST telah melakukan penyetoran dan melunasi kekurangan penerimaan denda pajak hotel dan restoran ke Kas Daerah senilai Rp681.660,00 (Rp602.900,00 + Rp78.760,00) pada tanggal 06 Mei 2025.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Perda Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 7 Tahun 2012 tentang pajak daerah pada:

   1) Pasal 52 yang menyatakan bahwa "Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender";

   2) Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (1) dan angka (2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak";

3) Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Bupati dapat menerbitkan STPD jika:

   a) Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

   b) Dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan

   c) Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda"; dan

4) Pasal 60 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak";

b. Perbup Sumba Barat Daya Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada:

1) Pasal 40:

   a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak"; dan

   b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemeriksa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati"; dan

2) Pasal 41:

   a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Pemeriksa yang tergabung dalam suatu tim pemeriksa berdasarkan SP2"; dan

   b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa "SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk satu atau beberapa tahun dalam suatu bagian tahun pajak atau tahun pajak yang sama, atau untuk satu bagian tahun pajak atau tahun pajak terhadap satu Wajib Pajak".

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Dasar penagihan denda tidak menggunakan dokumen yang dipersyaratkan; dan

b. Kekurangan penerimaan atas pembayaran pajak hotel senilai Rp53.450.333,80.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya belum membentuk tim pemeriksaan pajak;

b. Kepala Bapenda tidak optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pemungutan pajak hotel; dan

c. Kabid Pajak Daerah kurang cermat dalam melakukan pengendalian atas pengenaan denda pajak.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Sumba Barat Daya menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumba Barat Daya agar:

a. Membentuk tim pemeriksa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

b. Menginstruksikan Kepala Bapenda untuk memproses kekurangan penetapan pajak hotel tahun 2024 atas satu wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atas kekurangan penerimaan pajak hotel senilai Rp53.450.333,80.

C. Belanja

1. Pelaksanaan Belanja Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas Lima Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan yang Diserahkan kepada Sekolah Swasta Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada LRA TA 2024 masing-masing senilai Rp355.638.300.148,00 dan Rp319.265.652.344,00 atau sebesar 89,77% dari anggaran. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut diantaranya berupa Belanja Barang yang direalisasikan senilai Rp113.149.775.747,00 atau sebesar 90,34% dari anggaran senilai Rp125.251.736.913,00 dan di dalamnya terdapat kegiatan pembangunan gedung pada sekolah swasta.

Hasil pemeriksaan dokumen Belanja Barang dan Jasa atas pekerjaan Gedung dan Bangunan pada lima paket pekerjaan berupa Surat Perjanjian/Kontrak, *Addendum*, *Shop Drawing*, *As Built Drawing*, *Back Up Data*, *Mutual Check* (MC) 0%, MC 100%, dokumen pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan pemeriksaan fisik pekerjaan untuk menguji kesesuaiannya dengan surat perjanjian/kontrak menunjukkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada lima paket pekerjaan di Disdikbud senilai Rp89.434.517,36, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. 6 Kekurangan Volume Pekerjaan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

(dalam rupiah)

No	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak	Kekurangan Volume
1	Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas Baru DAU SG SMP Bakti Luhur	533.333.000,00	14.865.100,44
2	Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas Baru DAU SG SMP Genera Kalerea	537.250.000,00	27.454.617,06
3	Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan	426.010.700,00	14.703.328,28

No	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak	Kekurangan Volume
	Minimal beserta Perabotannya SDK Kalembu Kutura		
4	Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal beserta Perabotannya SMP Katolik Palla	769.018.300,00	16.151.098,65
5	Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal beserta Perabotannya SMP Kristen Waimangura	740.508.000,00	16.260.372,93
	Jumlah	**3.006.120.000,00**	**89.434.517,36**

Uraian lebih rinci atas pelaksanaan lima paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yang terdapat kekurangan volume hasil pekerjaan dijelaskan sebagai berikut.

a. Kekurangan volume pada paket pekerjaan konstruksi pembangunan ruang kelas baru Dana Alokasi Umum (DAU) SG Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bakti Luhur senilai Rp14.865.100,44

   Paket pekerjaan konstruksi pembangunan ruang kelas baru DAU SG SMP Bakti Luhur dilaksanakan oleh *Commanditaire Venootschap* (CV) KM berdasarkan hasil tender sesuai kontrak nomor 1496/PPK/PK/SBD/IX/2024 tanggal 24 September 2024 senilai Rp533.333.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum *Specific Grant (*DAU SG). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 hari kalender, terhitung sejak 24 September 2024 s.d. 22 Desember 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

   Paket pekerjaan konstruksi pembangunan ruang kelas baru DAU SG SMP Bakti Luhur telah dinyatakan selesai sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pertama/*Provisional Hand Over* (PHO) nomor 2096/PPK/PK/SBD/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp533.333.000,00 dengan SP2D terakhir nomor 53.18/04.0/000722/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 senilai Rp373.333.100,00.

   BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat yang dituangkan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAPF) nomor 09/BAPF/LKPD.SBD/03/2025 tanggal 06 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas sebelas item pekerjaan senilai Rp524.333.000,00, meliputi Pekerjaan Tanah dan Urugan, Pekerjaan Pasangan dan Plesteran, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Lantai, Pekerjaan Kayu dan Kaca, Pekerjaan Kuda-kuda, Reng dan *Listplank*, Pekerjaan Atap dan Plafon, Pekerjaan Alat-alat Penggantung, Pekerjaan Listrik, Pekerjaan Cat dan Laburan, dan Pekerjaan Lain-lain. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp14.865.100,44 atas enam item pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1. 7 Kekurangan Volume atas Pembangunan Ruang Kelas Baru DAU SG SMP Bakti Luhur

No	Item Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
1	Pekerjaan Tanah dan Urugan	1.324.801,21
2	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	10.267.630,98
3	Pekerjaan Beton	1.794.256,57
4	Pekerjaan Lantai	200.685,18
5	Pekerjaan Kayu dan Kaca	778.355,82
6	Pekerjaan Cat dan Laburan	499.370,68
	Jumlah	**14.865.100,44**

Adapun rincian item pekerjaan dan volume pekerjaan yang mengalami kelebihan pembayaran dapat dilihat pada **Lampiran 4.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik (BAPHPF) nomor 9/LKPD.SBD/AT.4/GB/BAKP/2025 tanggal 28 April 2025.

b. Kekurangan volume pada paket pekerjaan konstruksi pembangunan ruang kelas baru DAU SG SMP Genera Kalerea senilai Rp27.454.617,06

Paket pekerjaan konstruksi pembangunan ruang kelas baru DAU SG SMP Genera Kalerea dilaksanakan oleh CV PA berdasarkan hasil tender sesuai kontrak nomor 1494/PPK/PK/SBD/IX/2024 tanggal 24 September 2024 senilai Rp537.250.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum *Specific Grant* (DAU SG). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 hari kalender, terhitung sejak 24 September 2024 s.d. 22 Desember 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

Paket pekerjaan konstruksi pembangunan ruang kelas baru DAU SG SMP Genera Kalerea telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO nomor 2106/PPK/PK/SBD/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp537.250.000,00 dengan SP2D terakhir nomor 53.18/04.0/000716/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 senilai Rp161.175.000,00.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF nomor 10/BAPF/LKPD.SBD/03/2025 tanggal 06 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas sebelas item pekerjaan senilai Rp527.713.098,27,00, meliputi Pekerjaan Galian Tanah dan Urugan, Pekerjaan Pasangan dan Plesteran, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Lantai, Pekerjaan Kayu dan Kaca, Pekerjaan Kuda-kuda, Reng dan *Listplank*, Pekerjaan Atap dan Plafon, Pekerjaan Alat-alat Penggantung, Pekerjaan Instalasi Listrik, Pekerjaan Cat dan Laburan, dan Pekerjaan Lain-lain. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp27.454.617,06 atas enam item pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1. 8 Kekurangan Volume atas Pembangunan Ruang Kelas Baru DAU SG SMP Genera Kalerea

No	Item Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
1.	Pekerjaan Tanah dan Urugan	97.040,08
2.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	17.154.942,85
3.	Pekerjaan Beton	6.033.345,14
4.	Pekerjaan Lantai	3.274.494,24
5.	Pekerjaan Kayu dan Kaca	358.294,75
6.	Pekerjaan Instalasi Listrik	536.500,00
	Jumlah	**27.454.617,06**

Adapun rincian item pekerjaan dan volume pekerjaan yang mengalami kelebihan pembayaran dapat dilihat pada **Lampiran 5.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas dan PPK sesuai BAPHPF nomor 10/LKPD.SBD/AT.4/ GB/BAKP/2025 tanggal 28 April 2025.

Atas kelebihan pembayaran senilai Rp27.454.617,06 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan melunasi dan melakukan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp27.454.617,06 sesuai dengan STS nomor 53.8/41.0/000151/ STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/5/2025 tanggal 14 Mei 2025.

c. Kekurangan volume pada paket pekerjaan konstruksi rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal beserta perabotannya SDK Kalembu Kutura senilai Rp14.703.328,28

Paket pekerjaan konstruksi rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal beserta perabotannya SDK Kalembu Kutura dilaksanakan oleh CV N berdasarkan hasil tender sesuai kontrak nomor 418/PPK/PK/SBD/IV2024 tanggal 16 April 2024 senilai Rp426.010.700,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 hari kalender, terhitung sejak 16 April 2024 s.d. 13 Agustus 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

Paket pekerjaan konstruksi rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal beserta perabotannya SDK Kalembu Kutura telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO nomor 989/PPK/PK/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp426.010.700,00 dengan SP2D terakhir nomor 53.18/04.0/000291/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PR/9/2024 tanggal 23 September 2024 senilai Rp127.803.210,00.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan Fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF nomor 15/BAPF/LKPD.SBD/03/2025 tanggal 11 Maret 2025. Pemeriksaan Fisik dilakukan secara uji petik atas sepuluh item pekerjaan senilai Rp411.210.700,00, meliputi Pekerjaan Tanah dan Urugan, Pekerjaan Pasangan dan Plesteran, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Lantai, Pekerjaan Kayu dan Kaca, Pekerjaan Kuda-kuda, Reng dan *Listplank*, Pekerjaan Atap dan Plafon, Pekerjaan Alat-alat Penggantung, Pekerjaan

Instalasi Listrik, dan Pekerjaan Cat dan Laburan. Hasil pemeriksaan Fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp14.703.328,28 atas tujuh item pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1. 9 Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas SDK Kalembu Kutura

No	Item Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
1.	Pekerjaan Tanah dan Urugan	5.663.210,65
2.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	4.501.303,95
3.	Pekerjaan Beton	762.261,18
4.	Pekerjaan Lantai	1.226.039,38
5.	Pekerjaan Kayu dan Kaca	1.500.383,49
6.	Pekerjaan Alat-alat Penggantung	518.765,00
7.	Pekerjaan Cat dan Laburan	531.364,63
	Jumlah	**14.703.328,28**

Adapun rincian item pekerjaan dan volume pekerjaan yang mengalami kelebihan pembayaran dapat dilihat pada **Lampiran 6.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas dan PPK sesuai BAPHPF nomor 15/LKPD.SBD/AT.4/ GB/BAKP/2025 tanggal 28 April 2025.

d. Kekurangan volume pada paket pekerjaan konstruksi rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal beserta perabotannya SMP Katolik Palla senilai Rp16.151.098,65

Paket pekerjaan konstruksi rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal beserta perabotannya SMP Katolik Palla dilaksanakan oleh CV AJ berdasarkan hasil tender sesuai kontrak nomor 565/PPK/PK/ SBD/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 senilai Rp769.018.300,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 hari kalender, terhitung sejak 27 Mei 2024 s.d. 23 September 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

Pekerjaan konstruksi rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal beserta perabotannya SMP Katolik Palla telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO nomor 1386/PPK/PK/SBD/IX/2024 tanggal 13 September 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp769.018.300,00 dengan SP2D terakhir nomor 53.18/04.0/000415/LS/1.01.2.22.0.00.01. 0000/PPR1/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 senilai Rp230.705.490,00.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan Fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF nomor 16/BAPF/LKPD.SBD/03/2025 tanggal 11 Maret 2025. Pemeriksaan Fisik dilakukan secara uji petik atas 24 item pekerjaan senilai Rp757.918.300,00, meliputi Pekerjaan Gedung A, Gedung B dan Gedung C terdiri dari Pekerjaan Galian dan Timbunan, Pekerjaan Pasangan, Pondasi dan Plesteran, Pekerjaan Kayu, Kusen Pintu, Jendela dan

Atap, Pekerjaan Lantai, Plafon dan Cat, Pekerjaan Instalasi Listrik, Pekerjaan Sanitair, Pengunci dan Penggantung, Pekerjaan *Meubelair*, dan Pekerjaan Lain-lain. Hasil pemeriksaan Fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp16.151.098,65 atas 13 item pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1. 10 Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Katolik Palla

No	Item Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
A	**Rehabilitasi 1 Ruang Gedung A**	
1.	Pekerjaan Galian dan Timbunan	216.055,95
2.	Pekerjaan Pasangan, Pondasi dan Plesteran	1.248.144,81
3.	Pekerjaan Kayu, Kusen Pintu, Jendela dan Atap	44.495,00
4.	Pekerjaan Lantai, Plafon dan Cat	3.047.357,50
5.	Pekerjaan Lain-lain	319.576,65
B	**Rehabilitasi 2 Ruang Gedung B**	
6.	Pekerjaan Galian dan Timbunan	2.297.845,00
7.	Pekerjaan Pasangan Pondasi dan Plesteran	3.921.215,41
8.	Pekerjaan Kayu, Kusen Pintu, Jendela dan Atap	133.485,00
9.	Pekerjaan *Meubelair*	2.850.000,00
C	**Rehabilitasi 1 Ruang Gedung C**	
10.	Pekerjaan Galian dan Timbunan	102.849,45
11.	Pekerjaan Pasangan, Pondasi dan Plesteran	1.297.918,88
12.	Pekerjaan Kayu, Kusen Pintu, Jendela dan Atap	44.495,00
13.	Pekerjaan Lantai, Plafon, dan Cat	627.660,00
	Jumlah	**16.151.098,65**

Adapun rincian item pekerjaan dan volume pekerjaan yang mengalami kelebihan pembayaran dapat dilihat pada **Lampiran 7.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas dan PPK sesuai BAPHPF nomor 20/LKPD.SBD/AT.4/GB/BAKP/2025 tanggal 01 Mei 2025.

e. Kekurangan volume pada paket pekerjaan konstruksi rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal beserta perabotannya SMP Kristen Waimangura senilai Rp16.260.372,93

Paket pekerjaan konstruksi rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal beserta perabotannya SMP Kristen Waimangura dilaksanakan oleh CV AT berdasarkan hasil tender sesuai kontrak nomor 577/PPK/PK.SBD/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 senilai Rp740.508.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 hari kalender, terhitung sejak 27 Mei 2024 s.d. 23 September 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

Paket pekerjaan konstruksi rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal beserta perabotannya SMP Kristen Waimangura telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO nomor 1682/PPK/PK/SBD/IX/2024 tanggal 23 September 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp740.508.000,00 dengan SP2D terakhir nomor 53.18/04.0/000650/LS/

1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 senilai Rp222.152.400,00.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan Fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF nomor 17/BAPF/LKPD.SBD/03/2025 tanggal 11 Maret 2025 Pemeriksaan Fisik dilakukan secara uji petik atas delapan item pekerjaan senilai Rp724.818.000,00, meliputi Pekerjaan Galian dan Timbunan, Pekerjaan Pasangan, Pondasi dan Plesteran. Pekerjaan Kayu, Kusen Pintu, Jendela dan Atap, Pekerjaan Lantai, Plafon dan Cat, Pekerjaan Instalasi Listrik, Pekerjaan Sanitair, Pengunci dan Penggantung, Pekerjaan *Meubelair*, dan Pekerjaan Lain-lain. Hasil pemeriksaan Fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp16.260.372,93 atas empat item pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1. 11 Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Kristen Waimangura

No	Item Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
1.	Pekerjaan Pasangan, Pondasi dan Plesteran	8.104.690,57
2.	Pekerjaan Kayu, Kusen Pintu, Jendela dan Atap	1.103.544,26
3.	Pekerjaan Lantai, Plafon dan Cat	4.894.068,31
4.	Pekerjaan Lain-lain	2.158.069,79
	Jumlah	**16.260.372,93**

Adapun rincian item pekerjaan dan volume pekerjaan yang mengalami kelebihan pembayaran dapat dilihat pada **Lampiran 8.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas dan PPK sesuai BAPHPF nomor 21/LKPD.SBD/AT.4/ GB/BAKP/2025 tanggal 2 Mei 2025.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:

   1) Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa "PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak";

   2) Pasal 17:

      a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"; dan

      b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: Huruf a. pelaksanaan Kontrak,

Huruf b. kualitas barang/jasa; Huruf c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume, dan Huruf d. ketepatan waktu penyerahan";

3) Pasal 27 ayat (6) yang menyatakan bahwa "Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani; b) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan c) nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan";

4) Pasal 78:

   a) Ayat (3) yang menyatakan bahwa "Dalam hal Penyedia: Huruf a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan; Huruf c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan, Huruf d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit; dan Huruf f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak. Penyedia dikenai sanksi administratif"; dan

   b) Ayat (5) yang menyatakan bahwa "Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada: d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun; dan e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; dan f: ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan";

b. Peraturan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, pada Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia:

   1) Angka 7.11 Pengendalian Kontrak yang menyebutkan bahwa "Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh: a. Pejabat Penandatangan Kontrak; b. pihak ketiga yang independen; c. Penyedia; dan/atau d. pengguna akhir"; dan

2) Angka 7.13 Pembayaran Prestasi Pekerjaan yang menyebutkan bahwa "Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak; dan b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang"; dan

c. Surat Perjanjian/Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi masing-masing pekerjaan pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf F tentang Pembayaran Kepada Penyedia nomor 70.2 poin c yang menyatakan bahwa "Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang".

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada empat paket pekerjaan senilai Rp61.979.900,30, terdiri dari:

a. Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas Baru DAU SG SMP Bakti Luhur oleh CV KM senilai Rp14.865.100,44;

b. Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Beserta Perabotannya SDK Kalembu Kutura oleh CV N senilai Rp14.703.328,28;

c. Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Beserta Perabotannya SMP Katolik Palla oleh CV AJ senilai Rp16.151.098,65; dan

d. Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Beserta Perabotannya SMP Kristen Waimangura oleh CV AT senilai Rp16.260.372,93.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Kepala Disdikbud selaku Pengguna Anggaran kurang cermat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran pada satuan kerjanya; dan

b. PPK pada masing – masing pekerjaan kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan dan memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kontrak.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Sumba Barat Daya menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumba Barat Daya agar menginstruksikan Kepala Disdikbud untuk memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada empat paket pekerjaan senilai Rp61.979.900,30 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

2. Pelaksanaan Belanja Jasa Honorarium, Jasa Konsultansi, Jasa Pelayanan Kesehatan dan Jasa Iuran Jaminan/Asuransi Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada LRA TA 2024 masing-masing senilai Rp355.638.300.148,00 dan Rp319.265.652.344,00 atau sebesar 89,77% dari anggaran. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut diantaranya berupa Belanja Jasa yang direalisasikan senilai Rp109.960.755.061,00 atau sebesar 87,75% dari anggaran senilai Rp125.314.268.057,00, dan diantaranya direalisasikan untuk Belanja Jasa seperti dalam tabel berikut.

Tabel 1. 12 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2024

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Jasa Kantor	96.029.608.416,00	82.943.461.136,00	86,37
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.167.850.057,00	2.879.271.045,00	90,89
Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	23.427.249.084,00	21.959.806.380,00	93,74
Jumlah	**122.624.707.557,00**	**107.782.538.561,00**	**87,90**

BPK melakukan pemeriksaan secara uji petik atas realisasi Belanja Jasa pada tujuh SKPD yaitu pada realisasi Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan, dan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas bukti pertanggungjawaban pada realisasi Belanja Jasa di atas dan hasil konfirmasi kepada pelaksana pada SKPD terkait, diketahui terdapat permasalahan seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. 13 Rincian permasalahan pada Belanja Jasa

Jenis Belanja	Permasalahan yang ditemukan	Nilai (Rp)	Ket
Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan melebihi batasan jumlah Tim Pelaksana Kegiatan yang dapat diberikan honor pada 16 personel di tiga SKPD	162.169.541,67	- 11 personel di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) - Tiga personel di Sekretariat Daerah (Setda) - Dua personel di Dinas Peternakan dan Kesehataan Hewan (Disnakeswan)
	Honorarium panitia melebihi Standar Biaya Umum (SBU) yang telah ditetapkan pada 34 personel di tiga SKPD	39.285.000,00	- 14 personel di Disdikbud - 19 personel di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) - Satu personel di Setda
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	terdapat 13 personel yang bekerja pada beberapa paket pekerjaan dalam waktu yang	99.699.013,34	- Empat personel pada Dua kontrak di Disdikbud

Jenis Belanja	Permasalahan yang ditemukan	Nilai (Rp)	Ket
	sama dengan kontrak waktu penugasan dan bekerja pada lebih dari tiga paket pekerjaan dengan kontrak lumsum pada dua SKPD		- Sembilan personel pada Enam kontrak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Belanja Jasa Kantor- Jasa Tenaga Kesehatan	Penerima jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi dibayarkan jasanya melebihi besaran seharusnya	2.128.909.167,54	Dinas Kesehatan meliputi 16 Puskesmas
Belanja Jasa Iuran Jaminan/ Asuransi	Terdapat pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang telah meninggal dan Mutasi Keluar dari Kabupaten Sumba Barat Daya	-	Administratif
	Jumlah	**2.430.062.722,55**	

Adapun penjelasan masing-masing permasalahan diuraikan sebagai berikut.

a. Pertanggungjawaban belanja honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan honorarium Panitia tidak sesuai ketentuan total senilai Rp201.454.541,67

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan salah satu realisasi belanja yang terdapat dalam Belanja Jasa Kantor. Selama TA 2024 telah direalisasikan senilai Rp14.033.895.000,00 atau sebesar 93,84% dari anggaran senilai Rp14.954.410.000,00.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah menetapkan Keputusan Bupati Nomor 273/KEP/HK/2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: 444/Kep/Hk/2023 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024.

Pemerintah Pusat melalui Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2023, telah menetapkan standar harga satuan regional untuk digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hal ini berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan dan estimasi yang merupakan prakiraan besarnya biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar. Standar harga satuan yang diatur dalam Perpres tersebut meliputi: 1) satuan biaya honorarium; 2) satuan biaya perjalanan dinas; 3) satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor; 4) satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan 5) satuan biaya pemeliharaan.

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas realisasi Belanja Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diperoleh beberapa permasalahan sebagai berikut.

1) Pertanggungjawaban honorarium Tim Pelaksana Kegiatan melebihi batasan jumlah Tim Pelaksana Kegiatan yang dapat diberikan honor pada 16 personel di tiga SKPD senilai Rp162.169.541,67

Honorarium tim pelaksana kegiatan merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya direalisasikan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 273/KEP/HK/2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2024.

Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional menyatakan bahwa tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut.

Tabel 1. 14 Batasan Jumlah Tim yang dapat diberikan Honorarium sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya termasuk dalam Klasifikasi III karena tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 per bulan. Batasan jumlah tim pelaksana kegiatan pada klasifikasi III yaitu untuk eselon II sebanyak empat tim, eselon III sebanyak lima tim, eselon IV; pelaksana; dan pejabat fungsional sebanyak tujuh tim.

Berdasarkan hasil pengujian secara uji petik belanja honorarium TPK lintas SKPD pada empat SKPD yakni Bapperida, BKPSDM, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), serta Disnakeswan atas data rekapitulasi realisasi belanja honorarium tim pelaksana kegiatan tahun 2024 dan dokumen pertanggungjawabannya diketahui terdapat pembayaran honorarium kepada 16 personel yang bertugas di tiga SKPD yakni Bapperida, Setda, dan Disnakeswan yang melebihi batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium total senilai Rp162.169.541,67 seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. 15 Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Honorarium TPK

No.	SKPD	Kelebihan Pembayaran	
		Jumlah Personel	Nilai (Rp)
1	Bapperida	11	116.850.375,00
2	Setda	3	37.626.666,67
3	Disnakeswan	2	7.692.500,00
Jumlah		**16**	**162.169.541,67**

Adapun rincian dapat dilihat pada **Lampiran 9.**

Hasil permintaan keterangan kepada Kepala BKAD selaku Ketua Tim Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kabupaten Sumba Barat Daya dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah memedomani Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional. Namun, Perpres Nomor 33 Tahun 2020 hanya menyebutkan pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honor dan tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan keanggotaan tim. Hal ini diartikan bahwa dalam satu tim paling banyak 16 orang terdiri dari empat orang pejabat eselon I dan eselon II, lima orang pejabat eselon III, dan tujuh orang untuk pejabat eselon IV dan/atau pelaksana dan/atau pejabat fungsional. Pemahaman atas hal tersebut masih belum sesuai dengan ketentuan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium seperti yang dimaksud dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2020.

2) Pembayaran honorarium panitia pada dua SKPD melebihi SBU Kabupaten Sumba Barat Daya senilai Rp39.285.000,00

Keputusan Bupati Nomor 273/KEP/HK/2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: 444/Kep/HK/ 2023 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 telah menetapkan besaran honorarium panitia.

Berdasarkan uji petik pada dua SKPD yakni Disdikbud serta BKPSDM diketahui bahwa terdapat pembayaran honorarium panitia melebihi SBU yang telah ditetapkan pada 34 personel yang bertugas di tiga SKPD yakni Disdikbud, BKPSDM dan Setda dengan total kelebihan senilai Rp39.285.000,00 seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. 16 Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Honorarium Panitia

No.	SKPD	Kelebihan Pembayaran	
		Jml Personel	Nilai (Rp)
1	Disdikbud	14	22.882.500,00
2	BKPSDM	19	14.632.500,00
3	Setda	1	1.770.000,00
Jumlah		**34**	**39.285.000,00**

Adapun rincian dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

Hasil keterangan yang diperoleh dari Kepala Disdikbud serta Kepala BKPSDM diketahui bahwa pembayaran honorarium panitia melebihi SBU karena terdapat kesalahan dalam mengimplementasikan Perpres 33 Tahun 2020 terkait satuan orang bulan dan orang kegiatan.

b. Pelaksanaan kontrak jasa konsultansi pada Dinas PUPR dan Disdikbud tidak sesuai ketentuan senilai Rp99.699.013,34

Salah satu realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi adalah Belanja Jasa Konsultansi perencanaan yang telah direalisasikan senilai Rp2.828.108.325,00 dan Belanja Jasa Konsultansi pengawasan senilai Rp51.162.720,00. Selain dari Belanja Barang dan Jasa, terdapat belanja konsultan yang dianggarkan dan direalisasikan dari Belanja Modal, dimana selain untuk pekerjaan fisik, terdapat juga jasa konsultan perencanaan dan jasa konsultan pengawasan. Anggaran belanja konsultansi (perencanaan dan pengawasan) yang menjadi bagian dalam Belanja Modal TA 2024 adalah senilai Rp6.521.188.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp3.152.024.710,00 atau sebesar 48,34%.

Jasa konsultansi menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018 adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*). Komponen inti dari belanja jasa konsultansi adalah tenaga ahli yang merupakan personel bersertifikat yang dipekerjakan penyedia jasa konsultansi sesuai peraturan perundang-undangan. Kualifikasi tenaga ahli diukur dari pendidikan, pelatihan, sertifikasi keahlian dan pengalaman kerja. Pelaksana jasa konsultansi atau konsultan bertugas memberikan pertimbangan atas alternatif-alternatif seperti pertimbangan risiko maupun memberikan suatu analisis yang mendalam atas suatu fenomena untuk diberikan kepada pembuat keputusan. Mengingat pentingnya peranan konsultan dalam suatu pekerjaan maka penyedia jasa konsultan wajib menyediakan personel dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk bekerja sesuai dengan periode masa kontrak yang telah disepakati.

Pelaksanaan paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di bawah Rp100.000.000,00 dilakukan oleh Pejabat Pengadaan masing-masing SKPD melalui Penunjukkan Langsung. Sedangkan paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sumba Barat Daya melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Jenis kontrak jasa konsultansi terdiri dari Lumsum, Waktu Penugasan dan Kontrak Payung.

Pemeriksaan dilakukan secara uji petik pada enam SKPD yaitu Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Pariwisata (Dispar), Disdikbud, Dinas Perikanan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terhadap 82 dokumen kontrak dan pertanggungjawaban belanja jasa konsultansi tahun 2024 senilai Rp8.494.687.455,00.

Pemeriksaan dilakukan atas kerangka acuan kerja (KAK), dokumen

penawaran, dokumen kontrak jasa konsultansi, *invoice*/pertanggungjawaban masing-masing jasa konsultan dengan membandingkan daftar personel konsultan dalam kontrak dengan jadwal penugasannya sesuai RAB serta permintaan keterangan pada personel tenaga ahli. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelebihan pembayaran pada 13 personel yang bekerja pada beberapa paket pekerjaan dalam waktu yang sama dengan kontrak waktu penugasan dan bekerja pada lebih dari tiga paket pekerjaan dengan kontrak lumsum pada Dinas PUPR dan Disdikbud senilai Rp99.699.013,34, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 17 Rincian Kelebihan Pembayaran Personel Konsultan per SKPD

No.	SKPD	Kelebihan Pembayaran		
		Kontrak	Jumlah Personel lebih bayar	Nilai (Rp)
1	Dinas PUPR	6	9	84.115.680,00
2	Disdikbud	2	4	15.583.333,34
Jumlah		**8**	**13**	**99.699.013,34**

Adapun rekapitulasi dan rincian personel konsultan lebih bayar dapat dilihat pada **Lampiran 11.**

Hasil wawancara dengan PPK yang mengelola jasa konsultansi menunjukkan bahwa PPK tidak melakukan klarifikasi kepada penyedia jasa terkait tenaga konsultan yang bekerja pada paket pekerjaan yang bersangkutan sehingga PPK tidak mengetahui bahwa personel tersebut juga sedang bekerja pada paket pekerjaan lainnya. Tidak ada perubahan/*addendum* kontrak atas seluruh paket pekerjaan jasa konsultansi yang diperiksa, baik itu perubahan personel maupun perubahan nilai kontrak. Lebih lanjut diketahui bahwa atas kegiatan jasa konsultansi pada delapan paket pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran 100% sesuai kontrak, sehingga terdapat kelebihan pembayaran biaya langsung personel senilai Rp99.699.013,34.

c. Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan (Jaspel) Kesehatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan tidak sesuai ketentuan senilai Rp2.128.909.167,54

Belanja Jasa Tenaga Kesehatan merupakan salah satu realisasi belanja yang terdapat dalam Belanja Jasa Kantor. Selama TA 2024 telah direalisasikan senilai Rp23.870.136.676,00 atau sebesar 78,35% dari anggaran senilai Rp30.467.699.836,00.

Pada tahun 2022 Kementerian Kesehatan menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah. Permenkes tersebut mencabut Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Salah satu perbedaan

mendasar atas kedua Permenkes tersebut adalah terkait formulasi perhitungan jasa pelayanan kesehatan yaitu sebagai berikut.

1) Formula perhitungan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2016

Gambar 1. Formula Perhitungan Berdasarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2016

2) Formula perhitungan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan Permenkes Nomor 6 Tahun 2022

Gambar 2. Formula Perhitungan Berdasarkan Permenkes Nomor 6 Tahun 2022

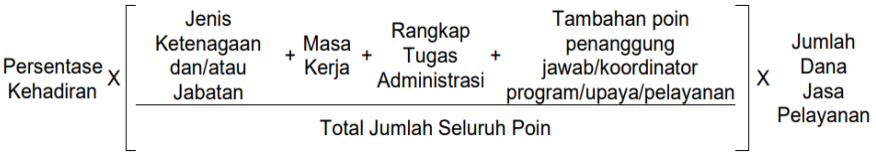

Perbedaan kedua formulasi tersebut terletak pada perhitungan total jumlah seluruh poin, sebagai berikut.

1) Dalam Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 jumlah seluruh poin merupakan hasil penjumlahan antara empat variabel pada setiap penerima jasa pelayanan kesehatan yaitu variabel jenis ketenagaan, masa kerja, rangkap tugas, dan tambahan poin, kemudian dikali dengan persentase kehadiran. Dari hasil perkalian tersebut kemudian dibagi dengan total jumlah seluruh poin, setelah itu dikali dengan jumlah dana jasa pelayanan kesehatan; dan
2) Dalam Permenkes Nomor 6 Tahun 2022, total jumlah seluruh poin merupakan hasil penjumlahan antara empat variabel pada setiap penerima jasa pelayanan yaitu variabel jenis ketenagaan, masa kerja, rangkap tugas, dan tambahan poin (belum dikali dengan persentase kehadiran). Dari hasil penjumlahan tersebut kemudian dibagi terlebih dahulu dengan total jumlah seluruh poin, kemudian dikali dengan persentase kehadiran dan dikali lagi dengan jumlah dana jasa pelayanan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 87/KEP/HK/2024 tentang Penetapan Pembagian Jasa Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 yang mengatur antara lain alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sesuai Permenkes Nomor 6 Tahun 2022. Keputusan Bupati tersebut tidak memuat perubahan formula perhitungan jasa pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban dan kertas kerja perhitungan jasa pelayanan kesehatan tahun 2024 pada 16 puskesmas diketahui bahwa formulasi perhitungan jasa pelayanan kesehatan yang diterapkan dalam menghitung alokasi jasa pelayanan kesehatan per tenaga kesehatan belum sesuai dengan Permenkes Nomor 6 Tahun 2022 yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran. Akumulasi kelebihan atas pembayaran jasa pelayanan kesehatan selama satu tahun anggaran tersebut akan menjadi selisih lebih perhitungan anggaran (SiLPA) jasa pelayanan dana kapitasi yang dapat digunakan kembali untuk jasa pelayanan kesehatan pada tahun anggaran berikutnya.

Hasil perhitungan ulang atas besaran jasa pelayanan kesehatan pada 16 puskesmas dengan menggunakan formula perhitungan sesuai Permenkes Nomor 6 Tahun 2022 diketahui terdapat 1861 penerima jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi pada 16 puskesmas yang dibayarkan jasanya melebihi besaran seharusnya dengan jumlah seluruhnya senilai Rp2.128.909.167,54 yang rincian daftar penerima per puskesmas dapat dilihat pada **Lampiran 12 dan Lampiran 13**.

Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan, diketahui bahwa sosialisasi terkait perbedaan rumus belum dilakukan oleh Tim Verifikator Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan. Tim Verifikator hanya menyampaikan poin-poin yang terdapat dalam rumus tersebut seperti poin variabel dan kehadiran yang nantinya menjadi fokus dalam proses verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPj) penggunaan dana kapitasi dan rekomendasi pencairan dana kapitasi TA 2024. Lebih lanjut Tim Verifikator mengakui kurang teliti terhadap perbedaan rumus tersebut sehingga tidak mengetahui bahwa rumus yang digunakan oleh Puskesmas dalam menghitung alokasi jasa pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan Permenkes Nomor 6 Tahun 2022.

Kepala Puskesmas dan tenaga kesehatan di masing-masing Puskesmas telah sepakat terhadap permasalahan tersebut dan bersedia mengembalikan sebesar nilai kelebihan bayar jasa pelayanan kesehatan per masing-masing orang. Lebih lanjut, atas pembayaran jasa pelayanan kesehatan TA 2025, formulasi perhitungan mengikuti ketentuan terbaru telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 253/KEP/HK/2025 tentang penetapam pembagian jasa pelayanan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Sumba Barat Daya.

d. Pembayaran iuran JKN PBI belum berdasarkan data kepesertaan yang mutakhir

Salah satu realisasi dari belanja jasa kantor iuran/jaminan kesehatan adalah belanja kontribusi jaminan kesehatan bagi PBI senilai Rp17.851.955.000,00 pada Dinas Kesehatan, yang digunakan untuk pembayaran iuran Program JKN bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Pelaksanaan belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan

BP dilakukan dengan mengikutsertakan penduduk miskin untuk menjadi peserta JKN sebagai PBI. Pelaksanaan kegiatan tersebut tertuang dalam Rencana Kerja antara Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Waingapu Nomor 13/RK/53.18/XII/2023 dan Nomor 120/KTR/XI-07/1223 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya dalam Rangka *Universal Health Coverage*. Jumlah peserta selama jangka waktu Perjanjian Kerjasama (PKs) dapat berubah karena adanya mutasi peserta baik penambahan maupun pengurangan. Penambahan dapat terjadi karena pendaftaran peserta baru, pengalihan peserta dari JKN-Kartu Indonesia Sehat (iuran ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN), serta tambahan anggota keluarga dari peserta, sedangkan pengurangan peserta dan/atau penggantian peserta dapat terjadi karena peserta meninggal dunia, pindah tempat tinggal ke luar wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, maupun pindah segmen/jenis kepesertaan.

Sesuai dengan rencana kerja antara BPJS dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dijelaskan bahwa perubahan peserta karena adanya mutasi pengurangan peserta diserahkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya dan perubahan akan berlaku pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. Permintaan mutasi pengurangan peserta yang diserahkan di atas tanggal 20 (dua puluh) status kepesertaanya akan non aktif pada tanggal 1 (satu) pada 2 (dua) bulan berikutnya. Perubahan peserta karena adanya mutasi peserta diserahkan secara manual melalui BAST perubahan data peserta yang ditandatangani para pihak atau pejabat yang ditunjuk di atas materai atau diinput melalui sistem oleh Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya. Adapun besaran iuran dan bantuan iuran peserta PBPU dan BP yang dibayarkan oleh Pemda adalah sebesar Rp35.000,00 per orang per bulan dan sebesar Rp2.800,00 per orang per bulan sebagai bantuan iuran sehingga total premi asuransi yang dibayarkan oleh Pemda adalah sebesar Rp37.800,00 per orang per bulan.

Hasil pemeriksaan terhadap Berita Acara (BA) Rekonsiliasi, diketahui bahwa rekonsiliasi data kepesertaan JKN PBPU dan BP dilakukan setiap bulan atau sebanyak 12 kali selama tahun 2023. BA Rekonsiliasi ditandatangani oleh Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Waingapu dan Kepala Dinas Kesehatan. Dalam BA rekonsiliasi tersebut disebutkan Dinas Keseharan telah menyerahkan data peserta PBPU/BP yang didaftarkan oleh Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya secara kolektif maupun perorangan dan telah diterima dan didaftarkan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Waingapu ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Pihak BPJS menyerahkan data *peserta by name by address* dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* BA rekonsiliasi kepada Dinas Kesehatan yang berisi nama-nama peserta PBI Pemda.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan selaku bidang yang menangani pembayaran iuran PBI pemda menjelaskan bahwa nama-nama peserta penerima bantuan merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Pada

Bulan September 2024, Dinas Kesehatan telah melakukan validasi data untuk melacak nama penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, NIK yang tidak ditemukan dan penduduk meninggal. Namun bulan-bulan sebelumnya tidak dilakukan rekonsiliasi atau pemadanan data secara rutin dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas data pembayaran Iuran JKN PBI pada tahun 2024 diketahui beberapa hal sebagai berikut.

1) Terdapat pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta JKN PBI yang telah meninggal

   Berdasarkan hasil pemadanan data pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) diketahui terdapat pembayaran iuran jaminan kesehatan atas 57 peserta JKN PBI yang telah meninggal dunia dan telah diterbitkan akta kematiannya. Adapun rekapitulasi peserta JKN PBI yang telah meninggal namun masih dibayarkan iuran jaminan kesehatan ke BPJS Kesehatan selama Tahun 2024 yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. 18 Rekap Iuran Jaminan Kesehatan atas Peserta JKN PBI yang Telah Meninggal

Tahun Akta Kematian	Jumlah Peserta Meninggal ((Jiwa)	Iuran Yang Telah Dibayar (Rp)
2016	1	378.000,00
2017	1	378.000,00
2022	10	3.439.800,00
2023	18	3.553.200,00
2024	27	2.154.600,00
Jumlah	**57**	**9.903.600,00**

   Rincian pembayaran iuran jaminan kesehatan atas peserta JKN PBI yang telah meninggal dapat dilihat pada **Lampiran 14.**

2) Terdapat pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta JKN PBI yang telah pindah keluar daerah Sumba Barat Daya

   Berdasarkan hasil pemadanan data pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 oleh Ditjen Dukcapil diketahui terdapat pembayaran iuran jaminan kesehatan atas 147 peserta JKN PBI yang telah mutasi keluar Kabupaten Sumba Barat Daya namun masih dibayarkan iuran jaminan kesehatan ke BPJS Kesehatan selama Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. 19 Rekap Iuran Jaminan Kesejatan atas Peserta JKN PBI yang Telah Pindah Keluar Kabupaten Sumba Barat Daya

Tahun Kepindahan	Jumlah Peserta Mutasi	Iuran Yang Telah Dibayar
	(jiwa)	(Rp)
2023	120	39.765.600.00
2024	27	7.371.000,00
Jumlah	**147**	**47.136.600,00**

Rincian pembayaran iuran jaminan kesehatan atas peserta JKN PBI yang telah mutasi keluar Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

   1) Pasal 51:

      a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

      b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Belanja Daerah sebagaimana dimaskud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan";

      c) Ayat (4) yang menyatakan bahwa "Standar Harga Satuan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah";

   2) Pasal 97 ayat (6) menyatakan bahwa "Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4)";

   3) Pasal 121 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"; dan

   4) Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";

b. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:

   1) Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa "PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak";

   2) Pasal 17

      c) Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan

barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"; dan

d) Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: Huruf a. pelaksanaan Kontrak, Huruf b. kualitas barang/jasa; Huruf c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume, dan Huruf d. ketepatan waktu penyerahan";

3) Pasal 27 ayat (6) yang menyatakan bahwa "Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani; b) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan c) nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan";

4) Pasal 57 ayat (2) yang meyatakan bahwa "PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan";

c. Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional pada:

1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran";

2) Lampiran I Angka 1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang menyatakan bahwa "Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas antara lain dalam huruf c) klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan";

d. Lampiran Huruf F Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Pagu Anggaran,

Kontrak Waktu Penugasan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia huruf F. Penetapan Pemenang pada:

1) Poin 30.2 yang menyatakan bahwa "Dalam hal peserta mengikuti seleksi beberapa paket pekerjaan dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan/atau sedang melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi lain/yang sedang berjalan, maka:

   a) Apabila menawarkan Tenaga Ahli yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi Tenaga Ahli tersebut tidak terikat/sudah selesai melaksanakan pekerjaan pada paket tersebut saat memulai pelaksanaanpekerjaan pada paket yang sedang diseleksi;

   b) Apabila menawarkan Tenaga Ahli yang sama untuk beberapa seleksi yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan Tenaga Ahli tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan tidak ada Tenaga Ahlinya dan dinyatakan gugur; dan

   c) Ketentuan pada huruf a dan huruf b hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket jasa konsultansi, dikecualikan:

      (1) Apabila Tenaga Ahli yang diusulkan berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan tidak mengharuskan untuk hadir setiap saat di lokasi pekerjaan, tidak tumpang tindih (overlap) dengan kegiatan/paket pekerjaan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan;

      (2) apabila ada personel cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat;

      (3) pada pekerjaan jasa konsultansi yang menggunakan kontrak lumsum (paling banyak tiga paket); atau

      (4) pada pekerjaan jasa konsultansi yang menggunakan kontrak harga satuan/waktu penugasan dengan ketentuan personel yang diusulkan penugasannya tidak tumpang tindih (overlap)";

e. Permenkes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah pada:

   1) Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah wajib menghitung jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dengan menggunakan formula penghitungan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7”;

2) Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Formula penghitungan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini"; dan

3) Lampiran huruf A paragraf keenam yang menyatakan bahwa "Perhitungan jasa pelayanan kesehatan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan berdasarkan ketentuan variabel ketenagaan dan/atau jabatan dan kehadiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Dengan demikian, jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kehadiran} \times \left[\frac{\text{Jenis Ketenagaan dan/atau Jabatan} + \text{Masa Kerja} + \text{Rangkap Tugas Administrasi} + \text{Tambahan poin penanggung jawab/koordinator program/upaya/pelayanan}}{\text{Total Jumlah Seluruh Poin}} \right] \times \text{Jumlah Dana Jasa Pelayanan}$$

f. Rencana Kerja atau Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Waingapu Nomor 13/RK/53.18/XII/2023 dan Nomor 120/KTR/XI-07/1223 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya dalam Rangka *Universal Health Coverage* pada:

1) Pasal 4 Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu ayat (2) pada:

a) Huruf (a) yang menyatakan bahwa "Pihak Kesatu berkewajiban untuk melakukan pendataan dan verifikasi, serta memastikan validitas data penduduk yang akan didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda kepada Pihak Kedua berdasarkan Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan";

b) Huruf (b) yang menyatakan bahwa "Pihak Kesatu berkewajiban untuk memastikan data penduduk yang akan didaftarkan sebagai Peserta PBPU Pemda kepada Pihak Kedua telah terdaftar dalam Data Kependudukan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jendral Dukcapil pada BPJS Kesehatan"; dan

c) Huruf (j) yang menyatakan bahwa "Pihak Kesatu berkewajiban untuk melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data peserta, iuran dan bantuan iuran bersama dengan Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Rencana Kerja ini";

2) Pasal 6 Kepesertaan pada:

a) Ayat (12) huruf b yang menyatakan bahwa "Pengurangan Peserta dan/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab di bawah ini:

(1) Meninggal dunia dengan melampirkan keterangan meninggal dari pejabat berwenang; dan

(2) Pindah tempat tinggal keluar wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat berwenang";

b) Ayat (13) yang menyatakan bahwa "Perubahan Peserta karena adanya mutasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diserahkan secara manual (dituangkan dalam Berita Acara serah terima perubahan data peserta yang ditandatangani para pihak atau pejabat yang ditunjuk di atas materai cukup) atau diinput melalui sistem oleh Pihak Kesatu melalui aplikasi yang disediakan oleh Pihak Kedua; dan

c) Ayat (17) yang menyatakan bahwa "Perubahan Peserta karena adanya mutasi pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b angka 2 dan angka 3 diserahkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya dan perubahan akan berlaku pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. Permintaan mutasi pengurangan peserta yang diserahkan di atas tanggal 20 (dua puluh) status kepesertaanya akan non aktif pada tanggal 1 (satu) pada 2 (dua) bulan berikutnya";

3) Pasal 9 pada:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pemutakhiran Data Peserta PBPU dan BP Pemda dilakukan setiap bulan"; dan

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Rekonsiliasi iuran dan Bantuan Iuran Peserta PBPU dan BP Pemda dilakukan setiap sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun berdasarkan hasil Pemutakhiran Data Peserta"; dan

g. Lampiran Keputusan Bupati Nomor 273/KEP/HK/2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 444/Kep/ HK/2023 Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024:

No.	Uraian	Satuan	Besaran
Honorarium Narasumber /Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/ Panitia			
1	Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00
2	Ketua/ Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00
3	Sekretaris	OK	Rp300.000,00
4	Anggota	OK	Rp300.000,00

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pembayaran total senilai Rp2.430.062.722,55 terdiri dari:

1) Kelebihan pembayaran atas honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada 16 personel di tiga SKPD (Bapperida, Setda dan Disnakeswan) total senilai Rp162.169.541,67 (Rp116.850.375,00+ Rp37.626.666,67 +Rp7.692.500,00);

2) Kelebihan pembayaran atas honorarium panitia pada 34 personel di tiga SKPD (Disdikbud, BKPSDM dan Setda) total senilai Rp39.285.000,00 (Rp22.882.500,00 + Rp14.632.500 + Rp1.770.000,00);

3) Kelebihan pembayaran biaya 13 personel atas pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi pada Dinas PUPR dan Disdikbud total senilai Rp99.699.013,34 (Rp84.115.680,00 + Rp15.583.333,34); dan

4) Kelebihan pembayaran atas Belanja Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan bagi 1861 tenaga kesehatan dan/atau non kesehatan pada Dinas Kesehatan meliputi 16 puskesmas senilai Rp2.128.909.167,54; dan

b. Potensi lebih bayar atas pembayaran iuran JKN PBI bagi peserta yang telah meninggal senilai Rp9.903.600,00 dan atas peserta yang telah pindah keluar wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya membebani keuangan daerah senilai Rp47.136.600,00.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Kepala SKPD terkait (dhi Disdikbud, Bapperida, BKPSDM, Setda, dan Disnakeswan) selaku Pengguna Anggaran belum optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran dan realisasi honorarium pada SKPD yang dipimpinnya;

b. Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran belum optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran dan realisasi belanja jasa konsultansi pada SKPD yang dipimpinnya;

c. Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran:

1) Belum optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada 16 Puskesmas;

2) Belum menggunakan data kependudukan terbaru sebagai bahan untuk melaksanakan rekonsilisasi peserta iuran PBI JKN dengan BPJS;

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) terkait tidak cermat dalam melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

e. PPK kegiatan jasa konsultansi tidak cermat melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan/kegiatan jasa konsultansi yang menjadi tanggung jawabnya serta tidak mempertimbangkan waktu dan personel penyedia jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi;

f. Kepala Puskesmas dan Bendahara FKTP kurang cermat dalam menghitung jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan Permenkes Nomor 6 Tahun 2022; dan

g. Tim Verifikator Bidang Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan kurang cermat dalam melakukan verifikasi pertanggungjawaban atas penggunaan dana kapitasi dan rekomendasi pencairan dana kapitas khususnya Belanja Jasa Tenaga Kesehatan.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Sumba Barat Daya menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumba Barat Daya agar menginstruksikan kepada:

a. Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala BKAD melakukan sosialisasi terkait pengaturan batasan jumlah Tim Pelaksana Kegiatan yang dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan;

b. Kepala SKPD terkait (dhi. Bapperida, BKPSDM, Disnakeswan dan Setda) supaya:

   1) Memproses kelebihan pembayaran honorarium TPK pada Bapperida, Disnakeswan dan Setda total senilai Rp162.169.541,67 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan

   2) Memproses kelebihan pembayaran honorarium Panitia pada BKPSDM dan Setda total senilai Rp16.402.500,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;

c. Kepala Disdikbud supaya:

   1) Memproses kelebihan pembayaran atas honorarium panitia tidak sesuai SBU pada 14 personel senilai Rp22.882.500,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan

   2) Memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Jasa Konsultansi senilai Rp15.583.333,34 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;

d. Kepala Dinas PUPR supaya memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Jasa Konsultansi senilai Rp84.115.680,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;

e. Kepala Dinas Kesehatan supaya:

   1) Melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis terkait formulasi perhitungan jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai dengan ketentuan;

   2) Melakukan rekonsiliasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menggunakan data kependudukan yang mutakhir sebagai bahan rekonsilisasi peserta iuran PBI JKN dengan BPJS dan selanjutnya mengusulkan pengajuan kompensasi atas peserta yang telah meninggal; dan

   3) Memerintahkan 16 Kepala Puskesmas agar memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Jasa Tenaga Kesehatan senilai Rp2.128.909.167,54 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas di FKTP.

3. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Enam SKPD Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada LRA TA 2024 masing-masing senilai Rp355.638.300.148,00 dan Rp319.265.652.344,00 atau sebesar 89,77% dari

anggaran. Belanja Barang dan Jasa tersebut diantaranya direalisasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp48.618.683.295,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. 20 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.968.103.980,00	20.774.914.176,00	86,68
2.	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.236.000.000,00	1.191.000.000,00	96,36
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.491.761.000,00	26.484.769.119,00	86,86
4.	Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota	168.560.000,00	168.000.000,00	99,67
	Jumlah	**55.864.424.980,00**	**48.618.683.295,00**	**87,03**

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah menetapkan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 495/KEP/HK/2023 tentang Standar Biaya Khusus Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Sipil Lainnya Tahun 2024 yang antara lain mengatur ketentuan mengenai biaya perjalanan dinas. Berdasarkan hasil reviu diketahui bahwa biaya perjalanan dinas yang diatur dalam peraturan tersebut telah sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas dilakukan oleh pelaksana perjalanan dinas dengan memberikan bukti penggunaan biaya perjalanan dinas antara lain seperti tiket pesawat, *boarding pass*, tiket kapal, kuitansi hotel, dan bukti perjalanan dinas dengan angkutan darat yang selanjutnya disampaikan kepada PPK-SKPD. Selanjutnya, PPK-SKPD berkewajiban untuk meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan, serta menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum. Setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD dan dinyatakan telah lengkap maka pertanggungjawaban tersebut diproses pembayarannya oleh Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas diketahui terdapat permasalahan berupa pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Enam SKPD tidak sesuai ketentuan yaitu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Disdikbud, Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, dan Sekretariat DPRD dengan uraian sebagai berikut.

a. Pelaksana perjalanan dinas pada empat SKPD mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas tidak sesuai bukti riil senilai Rp16.481.983,00

   Dari hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas dan hasil konfirmasi kepada 12 penyedia jasa penginapan di dalam dan luar Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diketahui terdapat 24 pelaksana perjalanan dinas pada empat SKPD yang terkonfirmasi menginap, namun mempertanggungjawabkan biaya penginapan dengan nilai yang tidak sesuai dengan biaya riil senilai Rp16.481.983,00. Rincian disajikan pada **Lampiran 16**.

Berdasarkan permintaan keterangan kepada pelaksana perjalanan dinas pada DP3AP2KB, Disdikbud, Dinas PUPR, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan diketahui bahwa pelaksana perjalanan dinas mengakui permasalahan tersebut dan bersedia untuk melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran.

Atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas senilai Rp16.481.983,00 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp2.335.350,00 sesuai dengan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 53.18/41.0/000149/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/5/2025 tanggal 8 Mei 2025, sehingga masih terdapat sisa yang belum disetorkan senilai Rp14.146.633,00 (Rp16.481.983,00 - Rp2.335.350,00).

b. Pelaksana perjalanan dinas pada lima SKPD tidak menginap namun mempertanggungjawabkan biaya penginapan senilai Rp119.168.668,00

Dari hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas dan hasil konfirmasi kepada 23 penyedia jasa penginapan di dalam dan luar Provinsi NTT diketahui terdapat 64 pelaksana perjalanan dinas pada lima SKPD yang tidak menginap pada jasa penginapan yang dikonfirmasi, namun mempertanggungjawabkan biaya penginapan dengan menggunakan bukti pembayaran pada jasa penginapan tersebut.

Berdasarkan permintaan keterangan kepada pelaksana perjalanan dinas pada Disdikbud, Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, dan Sekretariat DPRD, diketahui bahwa yang bersangkutan melakukan perjalanan dinas namun tidak menginap di hotel melainkan di rumah kerabat/keluarga, atau menginap dengan kondisi satu kamar berdua namun di pertanggungjawabkan masing-masing.

BPK melakukan penghitungan kembali atas biaya penginapan dengan mempertimbangkan bahwa dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, maka yang bersangkutan diberikan biaya penginapan secara lumsum sebesar 30% dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. Hasil penghitungan kembali menunjukkan adanya kelebihan pembayaran biaya penginapan atas 64 pelaksana perjalanan dinas pada lima SKPD senilai Rp119.168.668,00. Rincian disajikan pada **Lampiran 17**.

Atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas senilai Rp119.168.668,00 tersebut, belum ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah.

c. Pelaksana perjalanan dinas pada lima SKPD mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas rangkap senilai Rp128.810.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas rekapitulasi perjalanan dinas dan surat tugas perjalanan dinas diketahui terdapat 130 pelaksana perjalanan dinas pada lima SKPD yang mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas rangkap. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan atas lebih dari satu perjalanan dinas di waktu (hari dan tanggal) yang bersamaan, namun dengan surat tugas dan tujuan penugasan yang berbeda. Seluruh pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas

rangkap tersebut telah dibayarkan sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp128.810.000,00. Rincian disajikan pada **Lampiran 18**.

Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada Disdikbud, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DP3AP2KB, Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR diketahui bahwa pengendalian atas tanggal pelaksanaan perjalanan dinas masing-masing pegawai belum maksimal karena berasal dari bidang yang berbeda-beda.
Selanjutnya, pelaksana perjalanan dinas, menjelaskan bahwa pelaksana perjalanan dinas mengakui permasalahan tersebut dan bersedia untuk melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran.

Atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas senilai Rp128.810.000,00 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp1.360.000,00 sesuai dengan STS Nomor: 53.18/41.0/000149/STBP/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/5/2025 tanggal 8 Mei 2025, sehingga masih terdapat sisa yang belum disetorkan senilai Rp127.450.000,00.

d. Pembayaran komponen biaya perjalanan dinas (uang harian/biaya transport) pada tiga SKPD melebihi SBU senilai Rp1.600.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas diketahui terdapat pembayaran komponen biaya perjalanan dinas (uang harian/biaya transport) melebihi SBU atas lima pelaksana perjalanan dinas pada tiga SKPD senilai Rp1.600.000,00. Rincian disajikan pada **Lampiran 19**.

Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada Disdikbud, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan DP3AP2KB diketahui bahwa pada SKPD terkait telah dilakukan verifikasi yang memadai atas kesesuaian pertanggungjawaban dengan SBU, akan tetapi masih ada yang terlewat.

Atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas senilai Rp1.600.000,00 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp596.000,00 sesuai dengan STS Nomor 53.18/41.0/000149/STBP/5.02.0.00. 0.00.01.0000/5/2025 tanggal 8 Mei 2025, sehingga masih terdapat sisa yang belum disetorkan senilai Rp1.004.000,00.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

b. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional pada Lampiran I Angka 2 huruf b. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang menyatakan bahwa “Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan”; dan

c. Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 425/KEP/HK/2023 tentang Standar Biaya Khusus Belanja Perjalanan Dinas Salam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpian dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Sipil Lainnya Tahun 2024 pada Lampiran I tentang uang harian dalam daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, lampiran II tentang uang harian perjalanan dinas luar kota untuk Kabupaten Sumba Barat Daya luar daratan Pulau Sumba dan lampiran V tentang satuan biaya taksi dalam negeri.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas senilai Rp261.769.301,00 (Rp14.146.633,00 + Rp119.168.668,00 + Rp 127.450.000,00 + Rp1.004.000,00)

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran belum sepenuhnya optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

b. PPK SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD terkait kurang cermat dalam melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas; dan

c. Pelaksana perjalanan dinas tidak menyampaikan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Sumba Barat Daya menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumba Barat Daya agar Menginstruksikan:

a. Sekretaris Daerah untuk membuat surat edaran kepada seluruh SKPD tentang penyampaian bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas sesuai dengan biaya riil, melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban, dan melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan termasuk pengaturan sanksi sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku apabila pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan; dan

b. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp261.769.301,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

4. Pengelolaan Belanja Hibah pada Lima SKPD belum Memadai

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2024 menganggarkan Belanja Hibah pada LRA senilai Rp75.323.437.120,00 dan telah terealisasi senilai Rp74.046.925.529,00 atau sebesar 98,31% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. 21 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024

No	Uraian	TA 2024		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	23.419.353.940,00	23.015.561.400,00	98,28
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.336.790.124,00	4.320.513.624,00	99,62
3	Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	39.151.820.000,00	38.944.308.849,00	99,47
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.072.783.056,00	1.072.783.056,00	100,00
6	Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)	7.342.690.000,00	6.693.758.600,00	91,16
	Jumlah	75.323.437.120,00	74.046.925.529,00	98,31

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas laporan pertanggungjawaban Belanja Hibah, diketahui terdapat pengelolaan Belanja Hibah pada lima SKPD belum Memadai yaitu pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Disperindag, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Dinas PUPR, dan Disdikbud dengan uraian permasalahan sebagai berikut.

a. Penerima Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia terlambat dan belum tertib menyampaikan laporan pertanggungjawaban

   Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana hibah s.d. 20 April 2024 pada beberapa SKPD, diketahui terdapat satu penerima hibah yang belum menyampaikan LPJ penggunaan hibah senilai Rp1.000.000.000,00 dan satu penerima hibah yang terlambat menyampaikan LPJ senilai Rp536.640.124,00, dengan penjelasan sebagai berikut.

   1) Penerima hibah KONI belum menyampaikan LPJ penggunaan dana dan terdapat sisa penggunaan dana hibah senilai Rp121.464.272,73

      Berdasarkan hasil rekapitulasi LPJ dana hibah s.d. 28 April 2024 pada beberapa SKPD, diketahui terdapat satu lembaga penerima hibah dari Dispora yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang belum menyampaikan LPJ penggunaan hibah. Pada Tahun 2024, KONI mendapatkan hibah senilai Rp1.000.000.000,00. Berdasarkan keterangan Kepala Dispora, KONI belum menyampaikan LPJ dikarenakan penggunaan dana hibah disalurkan kepada cabang-cabang olahraga yang berada di bawah pembinaan KONI Sumba Barat Daya dan terdapat cabang olahraga yang belum menyampaikan LPJ atas penggunaan dana hibah tersebut. Lebih lanjut berdasarkan informasi pengurus harian KONI, per 31 Desember 2024 masih terdapat sisa uang penggunaan dana hibah senilai Rp544.354.128,73 yang berada di rekening. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kegiatan cabang olahraga yang dimundurkan pelaksanaannya melewati tahun anggaran yaitu Bulan Januari s.d. Maret 2025 akibat terbentur dengan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Bulan November 2024 antara lain sebagai berikut.

Tabel 1. 22 Kegiatan KONI melewati TA 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bantuan ke Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) (Eltari Cup)	163.000.000,00
2	Bantuan ke Kempo	75.000.000,00
3	Bantuan ke Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina)	75.000.000,00
4	Bantuan ke Badminton	30.000.000,00
5	Operasional Sekretariat	79.889.856,00
	Jumlah	442.889.856,00

Besar penggunaan dana untuk kegiatan tersebut adalah senilai Rp422.889.856,00 sehingga masih terdapat sisa penggunaan atas dana hibah TA 2024 senilai Rp121.464.272,73 (Rp544.354.128,73-Rp422.889.856,00). Lebih lanjut diketahui bahwa atas penggunaan dana hibah melewati tahun anggaran tersebut telah mendapatkan persetujuan penggunaannya dari Bupati Sumba Barat Daya berdasarkan surat usulan penggunaan dana hibah melewati tahun anggaran yang diajukan oleh pengurus KONI melalui Dispora.

Berdasarkan Perbup Sumba Barat Daya Nomor 17 Tahun 2024 tentang pedoman pemberian dan pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial, atas sisa penggunaan dana hibah TA 2024 senilai Rp121.464.272,73 tersebut, apabila tidak dikembalikan ke Kas Daerah maka akan menjadi pengurang atau dikompensasikan terhadap dana hibah yang akan diterima oleh KONI pada TA 2025.

2) Penerima hibah terlambat menyampaikan LPJ penggunaan dana

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja hibah diketahui terdapat penerima hibah dari Disperindag yaitu Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) yang terlambat menyampaikan LPJ penggunaan hibah senilai Rp536.640.124,00. LPJ tersebut baru disampaikan pada tanggal 28 April 2025. Berdasarkan ketentuan penerima hibah diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah paling lambat pada akhir tahun berjalan atau tanggal 31 Desember 2024.

b. Penerima hibah bantuan keuangan partai politik terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan

Pemberian bantuan keuangan kepada parpol dianggarkan pada DPA Bakesbangpol Kabupaten Sumba Barat Daya. Bakesbangpol bertanggung jawab terhadap perhitungan nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik (Parpol) dan pemenuhan syarat-syarat administratif untuk pencairan dana bantuan keuangan. Pencairan bantuan keuangan kepada Parpol dilakukan melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) yaitu bantuan keuangan kepada Parpol langsung ditransfer dari rekening Kas Daerah ke rekening masing-masing Parpol penerima bantuan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. 23 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Parpol pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2024

(dalam rupiah)

No	Nama Parpol	Nilai Bantuan Keuangan Parpol	
		Anggaran	Realisasi
1	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	67.386.099,00	67.386.099,00
2	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	69.679.561,00	69.679.561,00
3	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	73.444.110,00	73.444.110,00
4	Partai Beringin Karya (Berkarya)	32.821.573,00	32.821.573,00
5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	107.358.160,00	107.358.160,00
6	Partai Golongan Karya (Golkar)	103.986.145,00	103.986.145,00
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	111.328.435,00	111.328.435,00
8	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	111.248.036,00	111.248.036,00
9	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	134.154.293,00	134.154.293,00
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	49.062.104,00	49.062.104,00
11	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	143.440.609,00	143.440.609,00
12	Partai Demokrat	68.873.931,00	68.873.931,00
	Jumlah	**1.072.783.056,00**	**1.072.783.056,00**

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Sumba Barat Daya bertanggung jawab kepada Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, serta menyampaikan laporan secara berkala. Dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, menyatakan bahwa yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain mengamanatkan Bakesbangpol Pemda untuk menyelenggarakan fungsi koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Parpol wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala satu tahun sekali kepada Pemda setelah diperiksa oleh BPK. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Parpol yang bersumber dari APBD wajib diserahkan oleh Parpol kepada BPK untuk diaudit paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Parpol TA 2024 diketahui bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan diketahui bahwa seluruh partai politik yaitu sejumlah 12 Parpol penerima bantuan keuangan, terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada BPK dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. 24 Rincian Parpol terlambat Menyampaikan LPJ

No	Nama Parpol	Realisasi Nilai Bantuan Keuangan Parpol (Rp)	Tanggal Penyampaian Dokumen Peranggungjawaban
1	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	67.386.099,00	18 Maret 2025
2	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	69.679.561,00	18 Maret 2025
3	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	73.444.110,00	18 Maret 2025
4	Partai Beringin Karya (Berkarya)	32.821.573,00	18 Maret 2025
5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	107.358.160,00	18 Maret 2025
6	Partai Golongan Karya (Golkar)	103.986.145,00	18 Maret 2025
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	111.328.435,00	18 Maret 2025
8	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	111.248.036,00	18 Maret 2025
9	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	134.154.293,00	18 Maret 2025
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	49.062.104,00	18 Maret 2025
11	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	143.440.609,00	18 Maret 2025
12	Partai Demokrat	68.873.931,00	18 Maret 2025
	Jumlah	**1.072.783.056,00**	

c. Nilai hibah bantuan partai politik yang diterima partai berbeda dengan nilai penetapan di Surat Keputusan (SK) Bupati senilai Rp5.415.807,67

Sumber keuangan Parpol berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari APBD. Banparpol pada Kabupaten Sumba Barat Daya diberikan dengan tujuan untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi Sekretariat DPD/DPW/DPC/DPK Parpol di Kabupaten Sumba Barat Daya. Pemberian Banparpol TA 2024 pada Kabupaten Sumba Barat Daya, terbagi menjadi dua kali pemberian yaitu kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Hasil Pemilu Tahun 2019 dan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Hasil Pemilu Tahun 2024.

Pemberian kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya hasil pemilu Tahun 2019 dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 189/KEP/HK/2024 tgl 6 Maret 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Barat Daya Hasil Pemilu Tahun 2019, sedangkan untuk partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya Hasil Pemilu Tahun 2024 dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 524/KEP/HK/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Barat Daya Hasil Pemilu Tahun 2024. Bantuan Keuangan ini diberikan kepada 12 Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya periode Tahun 2019 s.d. 2024 dan kepada sepuluh Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya periode Tahun 2024 s.d. 2029. Nilai bantuan per suara untuk tiap parpol adalah senilai Rp7.094,00.

Pemberian Banparpol pada Kabupaten Sumba Barat Daya dianggarkan dan direalisasikan DPA SKPD pada Bakesbangpol melalui pos Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2024 senilai Rp1.072.783.056,00 dan telah direalisasikan senilai Rp1.072.783.056,00 atau sebesar 100%. Dalam rangka pemberian Bantuan Partai Politik (Banparpol), BKAD berkoordinasi dengan Bakesbangpol melakukan perhitungan nilai bantuan dan syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi oleh Parpol untuk pencairan Banparpol. Pencairan Banparpol dilakukan melalui mekanisme SP2D-LS yaitu bantuan keuangan kepada Parpol langsung ditransfer dari rekening Kas Daerah ke rekening masing-masing Parpol penerima bantuan.

Berdasarkan hasil pengolahan data atas belanja banparpol berupa dokumen SK jumlah suara, SK penetapan dan SP2D, diketahui bahwa atas realisasi yang diberikan kepada partai politik pada TA 2024 tidak sesuai dengan jumlah seharusnya diterima yang tercantum dalam SK Bupati sehingga terdapat kurang bayar atas realisasi bantuan partai politik kepada sepuluh partai politik periode Tahun 2024 s.d. 2029 sebesar Rp5.415.807,67 dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

Berdasarkan berita acara wawancara dengan Kabid Politik Dalam Negeri dari Bakesbangpol memberikan keterangan bahwa ketidaksesuaian pemberian dana tersebut dikarenakan keterbatasan pagu anggaran yang tersedia di Bakesbangpol dan sisa kurang bayar tersebut telah dikoreksi dan dicatat menjadi utang pemda dalam Laporan Keuangan TA 2024.

d. Pemberian hibah pada Dinas PUPR tidak didukung dengan administrasi yang memadai

Berdasarkan penelusuran dokumen pemberian hibah di Dinas PUPR dan wawancara diketahui terdapat kegiatan pemberian hibah pada Dinas PUPR TA 2024 yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) berupa Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri senilai Rp1.396.047.000,00 yang tertuang dalam kontrak nomor 1311/PPK.CK/PUPR/SBD/IX/2024 tanggal 30 September 2024 dengan penyedia CV CI. Pekerjaan telah 100% selesai seluruhnya dan telah dituangkan dalam BAST Pertama Pekerjaan Konstruksi Nomor 2060/PPK.CK/PUPR/SBD/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024. Atas kegiatan pemberian hibah pada Dinas PUPR TA 2024 untuk Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri senilai Rp1.396.047.000,00 diketahui tidak memiliki SK penetapan hibah dari Kepala Daerah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Berdasarkan pemeriksaan cek fisik yang dilakukan tanggal 3 Mei 2025 bersama PPK, Penyedia dan Konsultan Pengawas pada Gedung Kejaksaan Negeri, diketahui bahwa Gedung Kejaksaan Negeri tersebut berada di Wilayah Kabupaten Sumba Barat. Lebih lanjut diketahui bahwa pembangunan gedung TA 2024 merupakan lanjutan dari pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri tahap satu yang dibangun dengan menggunakan anggaran tahun 2022.

Keterangan yang diperoleh dari Kabid Cipta Karya PUPR Kabupaten Sumba Barat Daya diketahui bahwa SK penetapan hibah dari Kepala Daerah serta NPHD baik untuk tahap 1 maupun tahap 2 tidak dibuat disebabkan tidak mengetahui peraturan tentang kewajiban adanya SK Penetapan dari Kepala Daerah dan NPHD dalam pemberian hibah. Selain itu terjadi pergantian PPK yang bertugas saat pelaksanaan hibah tahap 1 menyebabkan informasi terkait SK Penetapan dan NPHD terlewatkan, sedangkan pelaksanaan tahap 2 adalah melanjutkan progress pembangunan gedung tahap 1. Selanjutnya dikatakan bahwa hibah gedung diberikan kepada Kejaksaan Negeri yang bertempat di wilayah Kabupaten Sumba Barat dikarenakan Kejaksaan Negeri memiliki tiga wilayah administratif pelayanan yaitu meliputi wilayah Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Atas pelaksanaan pembangunan gedung Kejaksaan Negeri yang telah selesai tersebut, Kepala Dinas PUPR menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya akan membuat SK hibah Gedung Kejaksaan Negeri yang mengakomodir dana pembangunan tahap 1 dan tahap 2 dan akan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri setelah masa pemeliharaan pada bulan Juni 2025 berakhir.

e. Hibah BOS TA 2024 tidak salur dan tidak cair pada 16 Sekolah Dasar dan lima Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sumba Barat Daya

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya pada LRA TA 2024 menganggarkan Belanja Hibah Dana BOS yang diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) Swasta yaitu 187 sekolah yang terdiri dari 125 SD Swasta dan 62 SMP Swasta total senilai Rp39.151.820.000,00 dengan realisasi senilai Rp38.944.308.849,00 atau 99,47% dari anggaran. Selain itu untuk sekolah negeri, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya pada LRA TA 2024 menganggarkan Belanja Barang dan Jasa BOS senilai Rp40.656.162.075,00 dengan realisasi senilai Rp39.820.325.626,00 atau 97,94% dari anggaran.

Mekanisme penyaluran dana BOS yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada sekolah negeri dan swasta dikutip dari kemenkeu.go.id adalah dimulai dari data rekening yang dimasukkan oleh sekolah ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kemudian dari Dapodik ditarik ke aplikasi BOS Salur untuk diverifikasi dan validasi (Verval) baik oleh Kemendikbudristek maupun bank. Apabila data telah sama dan valid, maka data akan dikirimkan ke Sisten *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) untuk diproses pencairannya dengan SP2D ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar dana bisa diterima oleh rekening sekolah secara langsung. Disdikbud Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki peran dalam memverifikasi pencairan dana hibah ke sekolah yaitu melakukan verifikasi kembali laporan realisasi penggunaan dana sekolah sesuai dengan komponen penganggaran dana BOS.

Berdasarkan Laporan Pengendalian dan Pengawasan atas BOS Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diberikan oleh Kepala

Disdikbud Sumba Barat Daya kepada Pj. Bupati periode Tahun 2024 serta wawancara dengan Kabid Pengelolaan SD dan Kabid Pengelolaan SMP diketahui terdapat permasalahan terkait penyaluran dana hibah BOS dengan penjelasan sebagai berikut.

1) Sekolah Dasar

Berdasarkan Laporan Pengendalian dan Pengawasan untuk 12 Sekolah Dasar di bawah Naungan Yayasan TT, terdapat total 16 sekolah swasta maupun negeri senilai Rp1.468.861.500,00 tidak salur dari Kemendikbudristek maupun tidak cair dana BOS Tahap II oleh Disdikbud Kabupaten Sumba Barat Daya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. 25 Rincian Sekolah Tidak Salur dan Tidak Cair Dana BOS TA 2024 Tahap II

No	NPSN	Nama Sekolah	Nilai yang Belum Dicairkan Tahap II (Rp)
A	**Sekolah Dasar Negeri**		
1	69903004	SDN Hende Monno	130.150.000,00
2	50309494	SDN Karara	114.475.000,00
B	**Sekolah Dasar Swasta**		
3	50309504	SD Katolik Bali Loura	108.300.000,00
-	Di Kelola oleh Yayasan GPC		
4	70040639	SD Gracia Pakonda	98.800.000,00
5	69986222	SD Generasi Pakonda	98.800.000,00
-	Di Kelola oleh Yayasan TT		
6	69895831	SD Wali Ate	67.925.000,00
7	69895833	SD Welli Wanno	85.500.000,00
8	69900569	SD Laikaraga	70.775.000,00
9	69895830	SD Wailangira	81.225.000,00
10	69895832	SD Wee Ritta	32.775.000,00
11	69895827	SD Perjuangan	117.800.000,00
12	69895826	SD Kareka Ndara	87.875.000,00
13	69895825	SD Angsol	75.050.000,00
14	69895829	SD Wai Makaha	155.011.500,00
15	69900567	SD Puu Kaza	84.550.000,00
16	69900566	SD Wee Wittu	59.850.000,00
	Jumlah		**1.468.861.500,00**

Lebih lanjut, berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa alasan tidak salur dan tidak cairnya Dana BOS Tahap II TA 2024 pada beberapa sekolah baik sekolah negeri maupun sekolah swasta adalah sebagai berikut.

a) Lima sekolah terdiri dari dua sekolah negeri dan tiga sekolah swasta tidak salur dana BOS Tahap 2 TA 2024 dari Kemendikbudristek

karena lima sekolah tersebut tidak melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSP Tahap 1 TA 2024 secara *Online* di Aplikasi Rencana Kegiatan Sekolah (ARKAS). Sedangkan dasar penyaluran Tahap 2 tahun anggaran berkenan adalah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Tahap 1 tahun anggaran berkenan minimal 50% paling lambat tanggal 31 Juli tahun berkenan. Adapun lima sekolah tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. 26 Rincian Sekolah Dasar Tidak Salur Dana BOS Tahap II karena Belum Lapor LPJ Tahap 1

No	NPSN	Nama Sekolah	Nilai yang belum disalurkan/dicairkan Tahap II (Rp)
1	69895831	SD Wali Ate (Yayasan TT)	67.925.000,00
2	69903004	SDN Hende Monno	130.150.000,00
3	69986222	SD Generasi Pakonda (Yayasan GPC)	98.800.000,00
4	50309504	SD Katolik Bali Loura	108.300.000,00
5	50309494	SDN Karara	114.475.000,00
	Jumlah		**519.650.000,00**

b) Satu sekolah atas nama SD Gracia Pakonda (dikelola oleh yayasan GPC) dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 70040639 tidak melakukan pencairan Tahap 2 TA 2024 senilai Rp98.800.000,00 karena data siswa yang ada pada sekolah merupakan siswa dari SD Generasi Pakonda sehingga sempat diadukan ke Polres Sumba Barat Daya dan berakhir damai dengan kesepakatan siswa yang ada di SD Gracia Pakonda dikembalikan ke SD Generasi Pakonda sedangkan SD Gracia Pakonda akan ditutup.

c) Sepuluh sekolah swasta yang berada di bawah naungan Yayasan TT dari total 12 sekolah dasar yang dikelola di Kabupaten Sumba Barat Daya (termasuk SD Wali Ate pada poin 1) tidak cair dana BOS TA 2024 Tahap 2 (sedangkan tahap 1 telah dicairkan) oleh Disdikbud Sumba Barat Daya dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut.

(1) Lokasi sekolah yang berpindah-pindah tidak sesuai dengan lokasi awal pendirian dan izin operasional terbit. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 10 poin c dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyebutkan bahwa “Tata cara pemberian izin SD, SMP, SMA dan SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut (c) izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi";

(2) Pergerakan siswa setiap tahun di Bulan Januari-April sebelum pelaksanaan Penilaian Akhir Tahun-Satuan Pendidikan (PAT-SP) yang begitu banyak jika dibandingkan dengan jumlah siswa yang mengikuti Ujian Akhir dan Lulus;

(3) Kondisi sarana dan prasarana sekolah yang tidak layak untuk proses belajar mengajar;

(4) Sekolah tidak memiliki Buku Register dan Buku Induk Siswa;

(5) Siswa yang ditemukan saat peninjauan lapangan ketika melakukan inspeksi mendadak (Sidak) berbeda jauh dengan jumlah siswa yang dilaporkan di Dapodik; dan

(6) Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SD Wali Ate dan SD Wee Rita sudah tidak berjalan sejak Januari 2024.

Adapun sepuluh SD yang dikelola oleh Yayasan TT yang tidak cair dana BOS TA 2024 Tahap II adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 27 Rincian Sekolah Dasar Yayasan TT Tidak Cair Dana BOS Tahap II

(dalam rupiah)

No	Nama Sekolah	Nilai yang telah disalurkan/dicairkan Tahap I	Nilai yang belum disalurkan/dicairkan Tahap II
1	SD Welli Wanno	85.500.000,00	85.500.000,00
2	SD Laikaraga	70.775.000,00	70.775.000,00
3	SD Wailangira	81.225.000,00	81.225.000,00
4	SD Wee Ritta	32.775.000,00	32.775.000,00
5	SD Perjuangan	117.800.000,00	117.800.000,00
6	SD Kareka Ndara	87.875.000,00	87.875.000,00
7	SD Angsol	75.050.000,00	75.050.000,00
8	SD Wai Makaha	155.011.500,00	155.011.500,00
9	SD Puu Kaza	84.550.000,00	84.550.000,00
10	SD Wee Wittu	59.850.000,00	59.850.000,00
	Jumlah	**850.411.500,00**	**850.411.500,00**

2) Sekolah Menengah Pertama

Berdasarkan laporan bidang pengelolaan SMP, diketahui terdapat lima sekolah tidak salur dana BOS oleh Kemendikbudristek dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. 28 Rincian Sekolah Menengah Pertama Tidak Salur dan Tidak Cair Dana BOS

No	NPSN	Nama Sekolah	Status	Keterangan
1	69787661	SMPN 4 Kodi Balaghar	Sekolah Negeri	Tidak salur dana BOS Tahap 2 TA 2024
2	70012201	SMP Kristen Narwastu Wailabubur	Sekolah Swasta	Tidak salur dana BOS Tahap 2 TA 2024
3	69895853	SMP Kareka Ndara	Sekolah Swasta dikelola oleh Yayasan TT	Tidak salur dana BOS Tahap 2 TA 2024 dan Tidak Salur TA 2025
4	6989582	SMP Wali Ate	Sekolah Swasta dikelola oleh Yayasan TT	Tidak salur dana BOS Tahap 2 TA 2024 dan Tidak Salur TA 2025
5	69900572	SMP Lingu Lango	Sekolah Swasta dikelola oleh Yayasan TT	Tidak melakukan pencairan dan BOS sejak Tahun 2020, dan

No	NPSN	Nama Sekolah	Status	Keterangan
				sudah tidak salur s.d. 2024

Lebih lanjut berdasarkan laporan tersebut, diketahui alasan tidak salur atas empat sekolah selain SMP Lingu Lango adalah antara lain:

a) Karena tidak melakukan pelaporan penggunaan dana BOS tahap 1 kepada Disdikbud Kabupaten Sumba Barat Daya;

b) Terjadi dualisme kepemimpinan pada satuan pendidikan tersebut dan adanya persoalan internal sekolah yang belum diselesaikan dengan baik;

c) Sekolah tidak melakukan pelaporan secara *online* melalui ARKAS sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Kemendikbudristek; dan

d) Sekolah tidak mengikuti *cut off* Dapodik pada tanggal 31 Agustus 2024, hal ini mengakibatkan dana BOS TA 2025 tidak salur pada rekening sekolah tersebut.

Dalam laporan Bidang Pengelolaan SMP diperoleh alasan SMP Lingu Lango tidak melakukan pencairan dana BOS sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 karena sekolah tidak melakukan pelaporan penggunaan dana BOS pada TA 2020 sampai seterusnya sehingga tidak mendapatkan salur dana BOS lagi dari Kemendikbudristek sampai dengan tahun 2024.

Berdasarkan hasil cek fisik yang dilakukan oleh BPK, Kabid Pengelolaan Sekolah Dasar dan Kasie Sarana Prasarana pada SD Angsol dan SD Wailangira tanggal 25 April 2025 yang dituangkan dalam BA Cek Fisik Nomor 24/BACF/LKPD.SBD/04/2025 dan Nomor 25/BACF/LKPD.SBD /04/2025 diketahui bahwa kondisi fisik dari sekolah tidak layak digunakan, dan tidak nampak adanya kegiatan proses belajar mengajar. Lebih lanjut, keterangan yang diperoleh dari Kepala Sekolah SD Angsol dan SD Wailangira diketahui bahwa jumlah siswa yang berlebih tersebut dilaporkan oleh operator dari pihak Yayasan TT, bukan dari Operator Sekolah. Kabid Pengelolaan SD berdasarkan berita acara wawancara nomor 01/BAW/ LKPD-SBD/05/2025 tanggal 3 Mei 2025 menerangkan bahwa terdapat satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dikelola oleh Yayasan TT di Sumba Barat Daya telah dilaporkan oleh pemerhati pendidikan dan sedang dalam penyelidikan Kejaksaan, sehingga Disdikbud mengambil sikap untuk tidak mencairkan dana BOS TA 2024 Tahap II untuk sekolah dasar yang dikelola oleh yayasan tersebut.

Lebih lanjut dikatakan bahwa atas dana yang masih tersimpan di rekening sekolah dan belum dicairkan tersebut, dari Disdikbud akan melakukan pelaporan secara resmi ke Kemendikbudristek.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam Pasal 34 A ayat (1) yang

menyatakan bahwa Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020, yaitu pada:

   1) Pasal 32 yang menyatakan bahwa "Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBN atau APBD paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan"; dan

   2) Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN atau APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK";

c. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab II dalam Ketentuan terkait Belanja Operasi bagian (e) bagian Belanja Hibah yaitu pada:

   1) Pasal 7 yang menyatakan bahwa "Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah'';

   2) Pasal 8 yang menyatakan bahwa "Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya"; dan

   3) Pasal 9 Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala";

d. Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yaitu pada Pasal 50:

   1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Dalam hal Satuan pendidikan penerima dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, dan/atau Dana BOP Kesetaraan Reguler:

      a) mengalami penutupan;

      b) tidak bersedia menerima dana; atau

c) sebagai Satuan Pendidikan kerja sama atau dikelola oleh kementrian/lembaga lain.

Pada tahun anggaran berkenaan, maka satuan pendidikan atau penyelenggara Satuan Pendidikan harus melakukan pengembalian dana yang diterima ke rekening kas umum daerah dan menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Kementrian atau Pemerintah Daerah";

2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Dalam hal Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD Kinerja, Dana BOS Kinerja, atau Dana BOP Kesetaraan Kinerja:

a) Tidak bersedia menerima dana; dan/atau

b) Tidak memenuhi persyaratan penerima dana,

pada tahun anggaran berkenaan, maka Satuan Pendidikan atau penyelenggara Satuan Pendidikan harus melakukan pengembalian dana yang diterima ke rekening kas umum daerah";

e. Perbup Sumba Barat Daya Nomor 17 Tahun 2024 tentang pedoman pemberian dan pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yaitu pada :

1) Pasal 12 terkait Pengusulan dan Penetapan Penerima dan Besaran Hibah:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa "SKPD terkait mengusulkan kepada Bupati perihal penetapan penerima hibah beserta besaran uang dan bentuk barang dan/atau jasa berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD";

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau bentuk dan nilai barang dan/atau jasa yang dihibahkan dengan Keputusan Bupati";

2) Pasal 13 terkait Penyaluran Hibah:

a) Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Kepala SKPD terkait berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun pemberian hibah dalam NPHD";

b) Ayat (4) yang menyatakan bahwa " Kepala SKPD terkait dan penerima hibah menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)";

3) Pasal 14 menyebutkan bahwa penyaluran hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD;

4) Pasal 27:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya";

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: a) Laporan penggunaan hibah; b) Surat pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangan"; dan

c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Bupati melalui SKPD terkait paling lama 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

5) Pasal 28:

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran dana hibah berupa uang tidak seluruhnya terealisasi, maka penerima dana hibah dapat mengusulkan:

(1) Dana hibah digunakan untuk menambah volume kegiatan dan/atau menambah kegiatan baru; atau

(2) Untuk hibah yang diberikan setiap tahun anggaran, dana yang tidak terealisasi yang berasal dari efisiensi penggunaan dana dan/atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai dengan NPHD diperhitungkan sebagai pengurang dalam pemberian dana hibah selanjutnya; atau

(3) Dana hibah yang tidak terealisasi disetorkan kembali ke Kas Daerah"; dan

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam perubahan NPHD".

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Realisasi Belanja Hibah yang disalurkan belum menggambarkan kondisi yang senyatanya;
b. Belanja hibah yang disalurkan belum memenuhi syarat administrasi formal; dan
c. Terdapat dana BOS yang mengendap dan belum dapat dimanfaatkan.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Kepala SKPD terkait (dhi Dispora, Disdikbud, Bakesbangpol, Disperindag dan DPUPR) belum optimal melaksanakan pemantauan atas pertanggungjawaban penggunaan dana hibah;
b. Kepala Dinas PUPR selaku SKPD Teknis belum memedomani Perda terkait tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah;
c. Lembaga, badan dan organisasi serta parpol penerima hibah tidak tertib dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban hibah secara tepat waktu; dan
d. Sekolah penerima BOS terkait tidak melaporkan data sesuai kondisi riil/ sebenarnya.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Sumba Barat Daya menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumba Barat Daya agar menginstruksikan:

a. Sekretaris Daerah untuk melakukan sosialisasi atas Perbup Sumba Barat Daya Nomor 17 Tahun 2024 tentang pedoman pemberian dan pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial kepada seluruh SKPD;

b. Kepala Badan Kesbangpol untuk mengusulkan anggaran atas kekurangan pembayaran dana Banparpol TA 2024 kepada sepuluh partai politik periode 2024 s.d. 2029 total senilai Rp5.415.807,67 sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

c. Kepala Dispora membuat NPHD TA 2025 untuk KONI dengan memperhitungkan sisa dana senilai Rp121.464.272,73 sebagai kompensasi hibah yang diterima di tahun 2025 dan mencairkannya setelah LPJ dana hibah TA 2024 telah dilaporkan;

d. Kepala Dinas PUPR untuk segera membuat Berita Acara Hibah Pekerjaan Gedung Kejaksaan Negeri Waikabubak setelah masa pemeliharaan selesai; dan

e. Inspektur melakukan pemeriksaan atas pemberian dana BOS pada sekolah yang bermasalah, merujuk pada ketentuan yang berlaku dan melaporkan ke Bupati, kemudian apabila terbukti bermasalah, memproses pengembalian dana BOS yang tersedia pada rekening sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

5. Pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tiga SKPD Tidak Sesuai Ketentuan

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Modal pada LRA TA 2024 masing-masing senilai Rp165.144.905.371,00 dan Rp160.632.937.633,00 atau telah direalisasikan sebesar 97,27% dari anggaran. Belanja Modal tersebut diantaranya direalisasikan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. 29 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal JIJ TA 2024

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.446.323.354,00	35.658.539.759,00	95,23
2.	Belanja Modal JIJ	95.174.430.838,00	94.810.066.973,00	99,62
	Jumlah	**132.620.754.192,00**	**130.468.606.732,00**	**98,38**

Berdasarkan Hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal JIJ TA 2024 pada Disdikbud, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR diketahui terdapat kekurangan volume

pekerjaan atas 16 paket pekerjaan total senilai Rp529.024.187,70 terdiri dari sebelas paket pekerjaan gedung dan bangunan senilai Rp116.631.537,57 serta lima paket pekerjaan JIJ senilai Rp412.392.650,13 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. 30 Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal JIJ TA 2024

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Jumlah Paket	Nilai Kontrak	Nilai Pengujian	Kekurangan Volume
A	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**				**116.631.537,57**
1.	Disdikbud	9	7.619.920.700,00	7.506.300.993,97	78.482.049,04
2.	Dinas Kesehatan	1	4.860.289.000,00	4.839.146.688,00	28.049.221,27
3.	Dinas PUPR	1	3.874.000.000,00	3.866.998.000,00	10.100.267,26
B	**Belanja Modal JIJ**				**412.392.650,13**
1.	Dinas PUPR	5	55.918.893.000,00	55.374.758.000,00	412.392.650,13
	Jumlah (A+B)	**16**	**72.273.102.700,00**	**71.587.203.681,97**	**529.024.187,70**

Kekurangan volume pekerjaan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal JIJ tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Kekurangan volume sebelas paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tiga SKPD senilai Rp116.631.537,57.

   Hasil pemeriksaan yang dilakukan secara uji petik atas sebelas paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Disdikbud, Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR, meliputi dokumen realisasi pembayaran, surat perjanjian/kontrak, *addendum* kontrak, *as built drawing*, *back up data*, foto pelaksanaan, dan SP2D serta pemeriksaan fisik berupa pengujian dimensi volume terpasang menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sebelas paket pekerjaan senilai Rp116.631.537,57 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. 31 Rekapitulasi Kekurangan Volume Pekerjaan Gedung dan bangunan pada Disdikbud, Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR

No	Nama Pekerjaan	SKPD	Nilai Kontrak (Rp)	Kekurangan Volume (Rp)
1	Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta Perabotannya SMP Negeri 8 Kodi Utara	Disdikbud	503.722.700,00	8.124.252,07
2	Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas Baru DAU SG SD Negeri Weri Kadu	Disdikbud	828.864.000,00	2.010.801,80
3	Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas Baru DAU SG SMP Negeri 2 Kota Tambolaka	Disdikbud	537.379.700,00	4.971.430,67
4	Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabotannya SMPN 8 Kodi Utara	Disdikbud	1.330.243.600,00	23.083.943,56
5	Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas DAU SG SDN Wee Tabula 2	Disdikbud	679.031.000,00	4.965.040,02
6	Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal beserta Perabotannya SD Negeri Gokata	Disdikbud	427.386.800,00	5.535.534,08

No	Nama Pekerjaan	SKPD	Nilai Kontrak (Rp)	Kekurangan Volume (Rp)
7	Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal beserta Perabotannya SMP Negeri 1 Kota Tambolaka	Disdikbud	517.548.900,00	10.384.101,19
8	Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal beserta Perabotannya SMP Negeri 2 Kodi	Disdikbud	2.091.174.000,00	15.166.477,61
9	Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal beserta Perabotannya SMP Negeri 5 Wewewa Barat	Disdikbud	704.570.000,00	4.240.468,04
10	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Labkesda)	Dinas Kesehatan	4.860.289.000,00	28.049.221,27
11	Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sentra UKM Kota Tambolaka Tahap II (DID)	Dinas PUPR	3.874.000.000,00	10.100.267,26
	Jumlah		**16.354.209.700,00**	**116.631.537,57**

Uraian lebih rinci atas pelaksanaan paket pekerjaan pada Disdikbud, Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR yang terdapat kekurangan volume hasil pekerjaan dijelaskan sebagai berikut.

1) Kekurangan volume pada paket pekerjaan konstruksi pembangunan ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) beserta perabotannya SMPN 8 Kodi Utara senilai Rp8.124.252,07

   Paket pekerjaan konstruksi pembangunan ruang laboratorium IPA beserta perabotannya SMPN 8 Kodi Utara pada Disdikbud dilaksanakan oleh CV ME berdasarkan hasil tender sesuai Kontrak nomor 806/PPK/PK/SBD/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 senilai Rp503.722.700,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 hari kalender, terhitung sejak 19 Juni 2024 s.d. 16 Oktober 2024, sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor 807/PPK/PK/SBD/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak tidak mengalami perubahan.

   Paket pekerjaan konstruksi pembangunan ruang laboratorium IPA beserta perabotannya SMPN 8 Kodi Utara telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO nomor 1631/PPK/PK/SBD/ X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp503.722.700,00 dengan SP2D terakhir nomor 53.18/04.0/000837/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 senilai Rp352.605.890,00.

   BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF nomor 07/BAPF/LKPD.SBD/03/2025 tanggal 05 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas sebelas item pekerjaan senilai Rp485.231.476,00, meliputi Pekerjaan Galian Tanah dan Urugan, Pekerjaan Pasangan Pondasi dan Dinding, Pekerjaan Struktur Beton, Pekerjaan Kayu, Daun Pintu dan Atap, Pekerjaan Lantai dan Plafon, Pekerjaan Pengunci dan Penggantung,

Pekerjaan Instalasi Listrik, Pekerjaan Pengecatan, Pekerjaan Sanitair, Pekerjaan Selasar Keliling dan Saluran Keliling, dan Pekerjaan Akhir. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp8.124.252,07 atas delapan item pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1. 32 Kekurangan Volume atas Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMPN 8 Kodi Utara

No	Item Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
1.	Pekerjaan Galian Tanah dan Urugan	265.740,42
2.	Pekerjaan Pasangan Pondasi dan Dinding	1.834.996,92
3.	Pekerjaan Struktur Beton	1.791.076,06
4.	Pekerjaan Kayu ,Daun Pintu & Atap	2.773.174,46
5.	Pekerjaan Lantai Dan Plafon	758.077,41
6.	Pekerjaan Instalasi Listrik	392.690,00
7.	Pekerjaan Pengecatan	98.027,19
8.	Pekerjaan Selasar Keliling Dan Saluran keliling	210.469,61
	Jumlah	**8.124.252,07**

Rincian kekurangan volume pekerjaan konstruksi pembangunan ruang laboratorium IPA Beserta Perabotannya SMPN 8 Kodi Utara disajikan pada **Lampiran 21.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas dan PPK sesuai BAPHPF nomor 07/LKPD.SBD/AT.4/GB/ BAKP/2025 tanggal 28 April 2025.

2) Kekurangan volume pada paket pekerjaan konstruksi pembangunan ruang kelas baru DAU SG SD Negeri Weri Kadu senilai Rp2.010.801,80

Paket pekerjaan konstruksi pembangunan ruang kelas baru DAU SG SDN Weri Kadu pada Disdikbud dilaksanakan oleh CV DAP berdasarkan hasil tender sesuai kontrak nomor 1418/PPK/PK/SBD/IX/2024 tanggal 3 September 2024 senilai Rp828.864.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAU *Specific Grant*. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 100 hari kalender, terhitung sejak 3 September 2024 s.d. 11 Desember 2024, sesuai SPMK nomor 1419/PPK/PK/SBD/IX/2024 tanggal 3 September 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak tidak mengalami.

Paket pekerjaan konstruksi pembangunan ruang kelas baru DAU SG SDN Weri Kadu telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO nomor 2308/PPK/PK/SBD/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp828.864.000,00 dengan SP2D terakhir nomor 53.18/04.0/000901/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 senilai Rp580.204.800,00.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF nomor 08/BAPF/ LKPD.SBD/03/2025 tanggal 05 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan

secara uji petik atas sebelas item pekerjaan senilai Rp819.977.909,59, meliputi Pekerjaan Tanah dan Urugan, Pekerjaan Pasangan Plesteran, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Lantai, Pekerjaan Kayu dan Kaca, Pekerjaan Kuda-kuda, reng dan Lisplank, Pekerjaan Atap dan Plafon, Pekerjaan Alat-alat Penggantung, Pekerjaan Instalasi Listrik, Pekerjaan Cat dan Laburan dan Pekerjaan Lain-lain. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp2.010.801,80 atas dua item pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1. 33 Kekurangan Volume atas Pembangunan Ruang Kelas Baru DAU SG SD Negeri Weri Kadu

No	Item Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
1.	Pekerjaan Kayu dan Kaca	229.633,59
2.	Pekerjaan Alat-alat Penggantung	1.781.168,21
	Jumlah	**2.010.801,80**

Rincian kekurangan volume pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas Baru DAU SG SD Negeri Weri Kadu disajikan pada **Lampiran 22.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas dan PPK sesuai BAPHPF nomor 08/LKPD.SBD/AT.4/GB/ BAKP/ 2025 tanggal 28 April 2025.

Atas kelebihan pembayaran senilai Rp2.010.801,80 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan melunasi dan melakukan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp2.010.801,80 sesuai dengan STS nomor 53.8/41.0/000152/ STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/5/2025 tanggal 15 Mei 2025.

3) Kekurangan volume pada paket pekerjaan konstruksi pembangunan ruang kelas baru DAU SG SMPN 2 Kota Tambolaka senilai Rp4.971.430,67

Paket pekerjaan konstruksi pembangunan ruang kelas baru DAU SG SMPN 2 Kota Tambolaka pada Disdikbud dilaksanakan oleh CV A berdasarkan hasil tender sesuai kontrak nomor 1492/PPK/PK/SBD/ IX/2024 tanggal 24 September 2024 senilai Rp537.379.700,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAU *Specific Grant*. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 hari kalender, terhitung sejak 24 September 2024 s.d. 22 Desember 2024, sesuai SPMK nomor 1493/PPK/PK/SBD/IX/2024 tanggal 24 September 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak tidak mengalami perubahan.

Paket pekerjaan konstruksi pembangunan ruang kelas baru DAU SG SMPN 2 Kota Tambolaka telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO nomor 2110/PPK/PK/SBD/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp537.379.700,00 dengan SP2D terakhir nomor 53.18/04.0/000695/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/ 2024 tanggal 16 Desember 2024 senilai Rp376.165.790,00.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat yang

dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF nomor 11/BAPF/LKPD.SBD/03/2025 tanggal 06 Maret 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas sebelas item pekerjaan senilai Rp528.127.965,38 meliputi Pekerjaan Tanah dan Urugan, Pekerjaan Pasangan dan Plesteran, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Lantai, Pekerjaan Kayu dan Kaca, Pekerjaan Kuda-kuda, Reng dan Listplank, Pekerjaan Atap dan Plafon, Pekerjaan Alat-alat Penggantung, Pekerjaan Instalasi Listrik, Pekerjaan Cat dan Laburan, dan Pekerjaan Lain-lain. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp4.971.430,67 atas empat item pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1. 34 Kekurangan Volume atas Pembangunan Ruang Kelas Baru DAU SG SMPN 2 Kota Tambolaka

No	Item Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
1.	Pekerjaan Tanah dan Urugan	170.339,13
2.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	3.937.517,67
3.	Pekerjaan Beton	255.055,52
4.	Pekerjaan Kayu dan Kaca	608.518,35
	Jumlah	**4.971.430,67**

Rincian kekurangan volume pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas Baru DAU SG SMPN 2 Kota Tambolaka disajikan pada **Lampiran 23.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas dan PPK sesuai BAPHPF nomor 11/LKPD.SBD/AT.4/GB/BAKP/2025 tanggal 28 April 2025.

Atas kelebihan pembayaran senilai Rp4.971.430,67 tersebut, telah ditindaklanjuti dengan melunasi dan melakukan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp4.971.430,67 sesuai dengan STS nomor 53.8/41.0/000150/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/5/2025 tanggal 14 Mei 2025.

4) Kekurangan volume pada paket pekerjaan konstruksi pembangunan ruang kelas baru beserta perabotannya SMPN 8 Kodi Utara senilai Rp23.083.943,56

Paket pekerjaan konstruksi pembangunan ruang kelas baru beserta perabotannya SMPN 8 Kodi Utara dilaksanakan oleh CV YYP berdasarkan hasil tender sesuai kontrak nomor 412/PPK/PK/SBD/IV/2024 tanggal 29 April 2024 senilai Rp1.330.143.600,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 hari kalender, terhitung sejak 29 April 2024 s.d. 26 Agustus 2024, sesuai SPMK nomor 413/PPK/PK/SBD/IV/2024 tanggal 29 April 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak tidak mengalami perubahan.

Paket pekerjaan konstruksi pembangunan ruang kelas baru beserta perabotannya SMPN 8 Kodi Utara telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO nomor 1249/PPK/PK/SBD/VIII/2024 tanggal 26

Agustus 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp1.330.243.600,00 dengan SP2D terakhir 53.18/04.0/000302/1.01.2.22.0.0001.0000/PR/9/2024 tanggal 25 September 2024 senilai Rp931.170.520,00.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF nomor 12/BAPF/ LKPD.SBD/03/ 2025 tanggal 06 Maret 2025. Pemeriksaan Fisik dilakukan secara uji petik atas sebelas item pekerjaan senilai Rp1.315.706.600,00 meliputi Pekerjaan Tanah dan Urugan, Pekerjaan Pasangan dan Plesteran, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Lantai, Pekerjaan Kayu dan Kaca, Pekerjaan Kuda-kuda, Reng dan Listplank, Pekerjaan Atap dan Plafon, Pekerjaan Alat-alat Penggantung, Pekerjaan Instalasi Listrik, Pekerjaan Cat dan Laburan, dan Pekerjaan Lain-lain. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp23.083.943,56 atas lima item pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1. 35 Kekurangan Volume atas Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabotannya SMPN 8 Kodi Utara

No	Item Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
1.	Pekerjaan Tanah dan Urugan	76.425,80
2.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	8.693.451,41
3.	Pekerjaan Beton	11.028.487,85
4.	Pekerjaan Kayu dan Kaca	1.905.678,50
5.	Pekerjaan Instalasi Listrik	1.379.900,00
	Jumlah	**23.083.943,56**

Rincian kekurangan volume pekerjaan konstruksi pembangunan ruang kelas baru beserta perabotannya SMPN 8 Kodi Utara disajikan pada **Lampiran 24.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas dan PPK sesuai BAPHPF nomor 12/LKPD.SBD/AT.4/GB/ BAKP/ 2025 tanggal 28 April 2025.

5) Kekurangan volume pada paket pekerjaan konstruksi rehabilitasi sedang ruang kelas DAU SG SDN Wee Tabula 2 senilai Rp4.965.040,02

Paket pekerjaan konstruksi rehabilitasi sedang ruang kelas DAU SG SDN Wee Tabula 2 dilaksanakan oleh CV AMP berdasarkan hasil tender sesuai kontrak nomor 1405/PPK/PK/SBD/IX/2024 tanggal 3 September 2024 senilai Rp679.031.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAU *Specific Grant*. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 100 hari kalender, terhitung sejak 3 September 2024 s.d. 11 Desember 2024, sesuai SPMK nomor 1406/PPK/PK/SBD/IX/2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak tidak mengalami.

Paket pekerjaan konstruksi rehabilitasi sedang ruang kelas DAU SG SDN Wee Tabula 2 telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO nomor 2370/PPK/PK/SBD/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 dan telah

dibayar 100% senilai Rp679.031.000,00 dengan SP2D terakhir nomor 53.18/04.0/000838/ LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 senilai Rp475.321.700,00.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF nomor 13/BAPF/ LKPD.SBD/03/ 2025 tanggal 07 Maret 2025. Pemeriksaan Fisik dilakukan secara uji petik atas sepuluh item pekerjaan senilai Rp666.916.000,00, meliputi Pekerjaan Tanah dan Urugan, Pekerjaan Pasangan dan Plesteran, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Lantai, Pekerjaan kayu dan Kaca, Pekerjaan Kuda-kuda, Reng dan Listplank, Pekerjaan Atap dan Plafon, Pekerjaan Alat-alat Penggantung, Pekerjaan Instalasi Listrik, dan Pekerjaan Cat dan Laburan. Hasil pemeriksaan Fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp4.965.040,02 atas dua item pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1. 36 Kekurangan Volume atas Pembangunan Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas DAU SG SDN Wee Tabula 2

No	Item Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
1.	Pekerjaan Beton	3.935.525,52
2.	Pekerjaan Kayu dan Kaca	1.029.514,50
	Jumlah	**4.965.040,02**

Rincian kekurangan volume pekerjaan konstruksi rehabilitasi sedang ruang kelas DAU SG SDN Wee Tabula 2 disajikan pada **Lampiran 25.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas dan PPK sesuai BAPHPF nomor 13/LKPD.SBD/AT.4/GB/ BAKP/ 2025 tanggal 28 April 2025.

6) Kekurangan volume pada paket pekerjaan konstruksi rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal beserta perabotannya SDN Gokata senilai Rp5.535.534,08

Paket pekerjaan konstruksi rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal beserta perabotannya SD Negeri Gokata dilaksanakan oleh CV ME berdasarkan hasil tender sesuai kontrak nomor 469/PPK/ PK/SBD/IV/2024 tanggal 16 April 2024 senilai Rp427.386.800,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 hari kalender, terhitung sejak 16 April 2024 s.d. 13 Agustus 2024, sesuai SPMK nomor 470/PPK/PK/SBD/IV/ 2024 tanggal 16 April 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak tidak mengalami perubahan.

Paket pekerjaan konstruksi rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal beserta perabotannya SDN Gokata telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO nomor 1327/PPK/PK/SBD/ VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp427.386.800,00 dengan SP2D terakhir nomor 53.1B/04.0/0004591/1.8/

1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 senilai Rp299.170.780,00.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF nomor 14/BAPF/ LKPD.SBD/03/ 2025 tanggal 10 Maret 2025. Pemeriksaan Fisik dilakukan secara uji petik atas sepuluh item pekerjaan senilai Rp415.253.143,00, meliputi Pekerjaan Tanah dan Urugan, Pekerjaan Pasangan dan Plesteran, Pekerjaan Beton, Pekerjaan Lantai, Pekerjaan Kayu dan Kaca, Pekerjaan Kuda-kuda, Reng dan Listplank, Pekerjaan Atap dan Plafon, Pekerjaan Alat-alat Penggantung, Pekerjaan Instalasi Listrik, dan Pekerjaan Cat dan Laburan. Hasil pemeriksaan Fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp5.535.534,08 atas lima item pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1. 37 Kekurangan Volume atas Pembangunan Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal beserta Perabotannya SDN Gokata

No	Item Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
1.	Pekerjaan Beton	502.803,71
2.	Pekerjaan Kayu dan Kaca	1.649.071,25
3.	Pekerjaan Alat-alat Penggantung	84.237,50
4.	Pekerjaan Instalasi Listrik	645.426,00
5.	Pekerjaan Cat dan Laburan	2.653.995,62
	Jumlah	**5.535.534,08**

Rincian kekurangan volume pekerjaan konstruksi rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal beserta perabotannya SDN Gokata disajikan pada **Lampiran 26.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas dan PPK sesuai BAPHPF nomor 14/LKPD.SBD/AT.4/GB/ BAKP/ 2025 tanggal 28 April 2025.

7) Kekurangan volume pada paket pekerjaan konstruksi rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal beserta perabotannya SMPN 1 Kota Tambolaka senilai Rp10.384.101,19

Paket pekerjaan konstruksi rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal beserta perabotannya SMPN 1 Kota Tambolaka pada Disdikbud dilaksanakan oleh CV AMP berdasarkan hasil tender sesuai kontrak nomor 569/PPK/PK/SBD/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 senilai Rp517.584.900,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 hari kalender, terhitung sejak 27 Mei 2024 s.d. 23 September 2024, sesuai SPMK nomor 570/PPK/PK/SBD/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak tidak mengalami perubahan.

Paket pekerjaan konstruksi rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal beserta perabotannya SMPN 1 Kota Tambolaka telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO nomor 1702/PPK/PK/SBD/IX/2024 tanggal 23 September 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp517.548.900,00 dengan SP2D terakhir nomor 53.18/04.0/ 000746/LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 senilai Rp72.950.759,00.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan Fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF nomor 18/BAPF/ LKPD.SBD/03/ 2025 tanggal 11 Maret 2025. Pemeriksaan Fisik dilakukan secara uji petik atas delapan item pekerjaan senilai Rp512.358.900,00, meliputi Pekerjaan Galian dan Timbunan, Pekerjaan Pasangan, Pondasi dan Plesteran, Pekerjaan Kayu, Kusen Pintu, Jendela dan Atap, Pekerjaan Lantai, Plafon dan Cat, Pekerjaan Instalasi Listrik, Pekerjaan Sanitair, Pengunci dan Penggantung, Pekerjaan *Meubelair*, dan Pekerjaan Lain-lain. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp10.384.101,19 atas tiga item pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1. 38 Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal beserta Perabotannya SMPN 1 Kota Tambolaka

No	Item Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
1.	Pekerjaan Pasangan, Pondasi dan Plesteran	3.646.018,59
2.	Pekerjaan Kayu, Kusen Pintu, Jendela dan Atap	4.375.041,82
3.	Pekerjaan *Meubelair*	2.363.040,78
	Jumlah	**10.384.101,19**

Rincian kekurangan volume Pekerjaan konstruksi rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal beserta perabotannya SMPN 1 Kota Tambolaka disajikan pada **Lampiran 27.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas dan PPK sesuai BAPHPF nomor 16/LKPD.SBD/AT.4/GB/ BAKP/2025 tanggal 28 April 2025.

8) Kekurangan volume pada paket pekerjaan konstruksi rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal beserta perabotannya SMPN 2 Kodi senilai Rp15.166.477,61

Paket pekerjaan konstruksi rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal beserta perabotannya SMPN 2 Kodi pada Disdikbud dilaksanakan oleh CV AMP berdasarkan hasil tender sesuai kontrak nomor 567/PPK/PK/SBD/V2024 tanggal 27 Mei 2024 senilai Rp2.091.174.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 hari kalender, terhitung sejak 27 Mei 2024 s.d. 23 September 2024, sesuai SPMK nomor 568/PPK/PK/SBD/V/2024 tanggal 27 Mei 2024, dengan masa

pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak tidak mengalami perubahan.

Paket pekerjaan konstruksi rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal beserta perabotannya SMPN 2 Kodi telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO nomor 1840/PPK/PK/ SBD/IX/2024 tanggal 23 September 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp2.091.174.000,00 dengan SP2D terakhir nomor 53.18/04.0/000671/LS/ 1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 senilai Rp268.260.022,00.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF nomor 19/BAPF/ LKPD.SBD/03/ 2025 tanggal 13 Maret 2025. Pemeriksaan Fisik dilakukan secara uji petik atas 32 item pekerjaan senilai Rp2.069.484.000,00, meliputi Pekerjaan Gedung A, Gedung B, Gedung C dan Gedung D terdiri dari Pekerjaan Galian dan Timbunan, Pekerjaan Pasangan, Pondasi dan Plesteran, Pekerjaan Kayu, Kusen Pintu, Jendela dan Atap, Pekerjaan Lantai, Plafon dan Cat, Pekerjaan Instalasi Listrik, Pekerjaan Sanitair, Pengunci dan Penggantung, Pekerjaan *Meubelair*, dan Pekerjaan Lain-lain. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp15.166.477,61 atas sembilan item pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1. 39 Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal beserta Perabotannya SMPN 2 Kodi

No	Item Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
A	**Gedung A**	
1.	Pekerjaan Pasangan, Pondasi dan Plesteran	1.740.263,32
2.	Pekerjaan Lantai, Plafon dan Cat	1.403.448,20
B	**Gedung B**	
3.	Pekerjaan Pasangan, Pondasi dan Plesteran	6.497.721,40
4.	Pekerjaan Kayu, Kusen Pintu, Jendela dan Atap	317.487,24
5.	Pekerjaan Lantai, Plafon dan Cat	3.418.318,19
C	**Gedung C**	
6.	Pekerjaan Galian dan Timbunan	558.983,45
7.	Pekerjaan Pasangan, Pondasi dan Plesteran	213.428,79
8.	Pekerjaan Lantai Plafon dan Cat	544.659,50
D	**Gedung D**	
9.	Pekerjaan Lantai, Plafon dan Cat	472.167,52
	Jumlah	**15.166.477,61**

Rincian kekurangan volume pekerjaan konstruksi rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal beserta perabotannya SMPN 2 Kodi disajikan pada **Lampiran 28.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas dan PPK sesuai BAPHPF nomor 17/LKPD.SBD/AT.4/GB/ BAKP/ 2025 tanggal 28 April 2025.

9) Kekurangan volume pada paket pekerjaan konstruksi rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal beserta perabotannya SMPN 5 Wewewa Barat senilai Rp4.240.468,04

Paket pekerjaan konstruksi rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal beserta perabotannya SMPN 5 Wewewa Barat pada Disdikbud dilaksanakan oleh CV B berdasarkan hasil tender sesuai kontrak nomor 660/PPK/PK/SBD/SBD/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 senilai Rp704.570.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 hari kalender, terhitung sejak 27 Mei 2024 s.d. 23 September 2024, sesuai SPMK nomor 470/PPK/PK/SBD/IV/2024 tanggal 16 April 2024, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak tidak mengalami perubahan.

Paket pekerjaan konstruksi rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal beserta perabotannya SMPN 5 Wewewa Barat telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO nomor 1883/PPK/PK/SBD/ IX/2024 tanggal 23 September 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp704.570.000,00 dengan SP2D terakhir nomor 53.18/04.0/ 000912/LS/ 1.01.2.22.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 senilai Rp114.729.093,00.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF nomor 20/BAPF/ LKPD.SBD/03/ 2025 tanggal 13 Maret 2025. Pemeriksaan Fisik dilakukan secara uji petik atas delapan item pekerjaan senilai Rp693.245.000,00, meliputi Pekerjaan Galian dan Timbunan, Pekerjaan Pasangan Pondasi dan Plesteran, Pekerjaan Kayu, Kusen Pintu, Jendela dan Atap, Pekerjaan Lantai Plafon dan Cat, Pekerjaan Instalasi Listrik, Pekerjaan Sanitair Pengunci dan Penggantung, Pekerjaan *Meubelair*, dan Pekerjaan Lain-lain. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp4.240.468,04 atas dua item pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1. 40 Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal beserta Perabotannya SMPN 5 Wewewa Barat

No	Item Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
1.	Pekerjaan Pasangan Pondasi dan Plesteran	892.325,55
2.	Pekerjaan Lantai Plafon dan Cat	3.348.142,49
	Jumlah	**4.240.468,04**

Rincian kekurangan volume Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Beserta Perabotannya SMPN 5 Wewewa Barat disajikan pada **Lampiran 29.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan

Pengawas dan PPK sesuai BAPHPF nomor 18/LKPD.SBD/AT.4/GB/ BAKP/2025 tanggal 28 April 2025.

10) Kekurangan volume pada penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota (Labkesda) senilai Rp28.049.221,27

Paket pekerjaan konstruksi penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota (Labkesda) pada Dinas Kesehatan dilaksanakan oleh CV PS berdasarkan hasil tender sesuai kontrak nomor 026/PPK-DINKES/LABKESDA/YANKES/TDR/SBD/ VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 senilai Rp4.860.289.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAK. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 150 hari kalender, terhitung sejak 17 Juli 2024 s.d. 13 Desember 2024, sesuai SPMK nomor 027/PPK-DINKES/SMPK/ LABKESDA/YANKES/TDR/SBD/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024, dengan masa pemeliharaan selama 1 tahun.

Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam *addendum* kontrak nomor 205/PPK/DINKES/ADD/LABKESDA/YANKES/TDR/SBD/IX/ 2024 tanggal 8 September 2024 tentang perubahan/penyesuaian volume paket pekerjaan standar biaya khusus pembangunan gedung negara (Pembangunan Labkesda). Paket pekerjaan standar biaya khusus pembangunan gedung negara (Pembangunan Labkesda) telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO nomor 526/PPK-YANKES/ DINKES/XII/SBD/2024 tanggal 20 Desember 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp4.860.289.000,00 dengan SP2D terakhir nomor 53.18/04.0/000596/LS/ 1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR1/ 12/2024 tanggal 27 Desember 2024 senilai Rp1.458.086.700,00. Pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan selama 7 hari dengan nilai denda senilai Rp34.022.023,00 yang dituangkan dalam surat pemberitahuan denda keterlambatan nomor 105/PPK-DINKES/Denda/SBD/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 dan telah dibayar lunas sesuai dengan Surat Tanda Bukti Penerimaan nomor 53.18/41.0/000925/STPB/5.02.0.00.0.00.01. 0000/12/ 2024 tanggal 23 Desember 2024.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF nomor 21/BAPF/ LKPD.SBD/03/ 2025 tanggal 13 Maret 2025. Pemeriksaan Fisik dilakukan secara uji petik atas 15 item pekerjaan senilai Rp4.839.146.688,00, meliputi Pekerjaan Galian dan Urugan, Pekerjaan Pasangan Pondasi dan Dinding, Pekerjaan Struktur Beton, Pekerjaan Pintu dan Jendela, Pekerjaan lantai, Pekerjaan Plafon, Pekerjaan Pengecatan, Pekerjaan Atap dan Penutup Atap, Pekerjaan *Grill* Saluran ACP Setara *Alucopan*, Pekerjaan Balok15/30, Pekerjaan Panel Surya, Pekerjaan Penerangan dan Stop Kontak, Pekerjaan Penangkal Petir, Pengadaan AC, dan Pekerjaan

Tambahan. Hasil pemeriksaan Fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp28.049.221,27 atas tiga item pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1. 41 Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Labkesda)

No	Item Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
1.	Pekerjaan Lantai	7.786.881,40
2.	Pekerjaan Plafon	1.925.966,87
3.	Pekerjaan Penerangan dan Stop Kontak	18.336.373,00
	Jumlah	28.049.221,27

Rincian kekurangan volume pekerjaan konstruksi penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota (Labkesda) disajikan pada **Lampiran 30.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas dan PPK sesuai BAPHPF nomor 22/LKPD.SBD/AT.4/GB/ BAKP/2025 tanggal 02 Mei 2025.

11) Kekurangan volume pada paket pekerjaan konstruksi pembangunan sentra UKM Kota Tambolaka tahap II Dana Insentif Daerah (DID) senilai Rp10.100.267,26

Paket pekerjaan konstruksi pembangunan sentra UKM Kota Tambolaka Tahap II DID pada Dinas PUPR dilaksanakan oleh CV CM berdasarkan hasil tender sesuai kontrak nomor 452/PPK.CK/PUPR/SBD/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 senilai Rp3.874.000.000,00. Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DID. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 210 hari kalender, terhitung sejak 15 Mei 2024 s.d. 10 Desember 2024, sesuai SPMK nomor 459/PPK.CK/PUPR/SBD/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, dengan masa pemeliharaan selama 210 hari.

Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam *addendum* kontrak nomor 697/PPK.CK/PUPR/ SBD/VII/2024 tanggal 05 Juli 2024 tentang Perubahan/Penyesuaian Volume Pekerjaan Berdasarkan kajian Teknis Lapangan Paket Pekerjaan Pembangunan Sentra UKM Kota Tambolaka.

Paket pekerjaan konstruksi pembangunan sentra UKM Kota Tambolaka Tahap II DID telah dinyatakan selesai sesuai dengan BAST Pertama/PHO nomor 2001/PPK.CK/PUPR/SBD/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp3.874.000.000,00 dengan SP2D terakhir nomor 53.18/04.0/000332/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 senilai Rp774.800.000,00.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama PPK, Penyedia, Konsultan Pengawas dan Inspektorat yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF nomor 22/BAPF/ LKPD.SBD/03/ 2025 tanggal 13 Maret 2025. Pemeriksaan Fisik dilakukan secara uji petik atas 12 item pekerjaan senilai Rp3.866.998.000,00,

meliputi Pekerjaan Median Jalan dan Bundaran, Pekerjaan Drainase dan Trotoar, Pekerjaan Akses Jalan Masuk, Parkir dan *Joging Track*, Pekerjaan Gedung Utama, Pekerjaan Pondasi dan Lantai Kerja, Pekerjaan Pasangan dan Plesteran, Pekerjaan Struktur, Pekerjaan Penutup Lantai dan Penutup Dinding, Pekerjaan Atap dan Plafon, Pekerjaan Elektrikal, Pekerjaan Pompa dan Aksesoris, Tandon Air dan Pipa Distribusi, dan Pekerjaan Aksesoris Taman dan Lampu. Hasil pemeriksaan Fisik menunjukkan kekurangan volume senilai Rp10.100.267,26 atas tiga item pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1. 42 Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sentra UKM Kota Tambolaka Tahap II DID

No	Item Pekerjaan	Kekurangan Volume (Rp)
1.	Pekerjaan Pondasi dan Lantai Kerja	3.208.532,80
2.	Pekerjaan Struktur	4.676.070,46
3.	Pekerjaan Elektrikal	2.215.664,00
	Jumlah	**10.100.267,26**

Rincian kekurangan volume pekerjaan konstruksi pembangunan sentra UKM Kota Tambolaka Tahap II DID disajikan pada **Lampiran 31.**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani oleh Penyedia, Konsultan Pengawas dan PPK sesuai BAPHPF nomor 19/LKPD.SBD/AT.4/GB/ BAKP/2025 tanggal 28 April 2025.

b. Kekurangan volume lima paket pekerjaan Belanja JIJ pada Dinas PUPR senilai Rp412.392.650,13

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas lima paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas PUPR, meliputi pemeriksaan dokumen berupa surat perjanjian/kontrak, *addendum* kontrak, *as built drawing, back up* data, foto pelaksanaan, dan SP2D serta pemeriksaan fisik berupa pengujian dimensi volume terpasang, menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume senilai Rp412.392.650,13 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. 43 Rekapitulasi Kekurangan Volume Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPR

No	Nama Pekerjaan	Nilai Kontrak (Rp)	Kekurangan Volume (Rp)
1	Penanganan *Long Segmen* Jalan Dalam Kota Tambolaka	8.822.649.000,00	72.728.325,26
2	Penanganan *Long Segmen* Jalan Tanggaba - Tanggo'o	13.818.319.000,00	97.975.122,12
3	Penanganan *Long Segmen* Jalan SP. Waimangura - Leteloko	20.557.696.000,00	109.488.188,96
4	Penanganan *Long Segmen* Jalan Weekapoda - Kikukarambo	10.489.229.000,00	108.683.648,10
5	Peningkatan Jalan Kolping dan Kramat Jati	2.231.000.000,00	23.517.365,69
Jumlah		**55.918.893.000,00**	**412.392.650,13**

Uraian lebih rinci atas pelaksanaan paket pekerjaan pada Disdikbud, Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR yang terdapat kekurangan volume hasil pekerjaan dijelaskan sebagai berikut.

1) Kekurangan volume pada paket pekerjaan penanganan *long segmen* jalan dalam Kota Tambolaka senilai Rp72.728.325,26

   Paket pekerjaan penanganan *long segmen* jalan dalam Kota Tambolaka pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh CV MA berdasarkan hasil Tender sesuai Kontrak 041/PPK-BM/PUPR/SBD/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 senilai Rp8.822.649.000,00 (termasuk PPN 11%). Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAU. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 240 hari kalender, terhitung sejak 29 Januari 2024 s.d. 24 September 2024, sesuai SPMK 045/PPK.BM/PUPR/SBD/I/2024 tanggal 29 Januari 2024, dengan masa pemeliharaan 210 hari kalender. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam *addendum* kontrak ADD.I.041/PPK-BM/PUPR/SBD/I/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang mengatur tentang *Contract Change Order* (CCO).

   Pekerjaan penanganan *long segmen* jalan dalam Kota Tambolaka telah dinyatakan selesai sesuai dengan PHO 1518/PPK-BM/PUPR/SBD/IX/2024 tanggal 19 September 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp8.822.649.000,00 dengan SP2D terakhir Nomor 53.18/04.0/000290/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 senilai Rp2.646.794.700,00.

   BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama bersama PPK, Penyedia, dan Konsultan Pengawas, yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF 01/BAPF.JIJ/LKPD.SBD/2/2025 pada tanggal 24 Februari 2025. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas tujuh item pekerjaan senilai Rp8.698.549.000,00, meliputi Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Berbutir, Pekerjaan Perkerasan Aspal, Pekerjaan Struktur, Pekerjaan Harian dan Lain-lain, dan Pekerjaan Pemeliharaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan kekurangan volume senilai Rp.72.728.325,26 atas satu item pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1. 44 Rincian Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Penanganan *Long Segmen* Jalan dalam Kota Tambolaka

No.	Item /Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Kontrak	Volume Fisik	Kekurangan Volume	Jumlah Kekurangan Volume (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=4x7
1.	Lataston Lapis Aus (*Asphalt Concrete - Wearing Course/AC-WC)*	Ton	1.782.994,00	1397,59	1356,80	40,79	72.728.325,26
Jumlah							**72.728.325,26**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani PPK, dan Penyedia menyepakati akan mengembalikan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah sesuai Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik (BAPHPF) 01/LKPD.SBD/AT.4/JIJ/BAKP/2025 tanggal 28 April 2025.

2) Kekurangan volume pada paket pekerjaan penanganan *long segmen* Jalan Tanggaba - Tanggo'o senilai Rp97.975.122,12

Paket pekerjaan penanganan *long segmen* Jalan Tanggaba - Tanggo'o pada Dinas PUPR dilaksanakan oleh CV CM berdasarkan hasil Tender sesuai Kontrak 043/PPK-BM/PUPR/SBD/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 senilai Rp13.818.319.000,00 (termasuk PPN 11%). Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAU. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender, terhitung 29 Januari 2024 s.d. 24 September 2024, sesuai dengan SPMK 047/PPK.BM/PUPR/SBD/I/2024 tanggal 29 Januari 2024, dengan masa pemeliharaan 210 hari kalender. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam *addendum* kontrak ADD.I.043/PPK-BM/PUPR/SBD/I/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang mengatur tentang CCO.

Pekerjaan penanganan *long segmen* Jalan Tanggaba - Tanggo'o telah dinyatakan selesai sesuai dengan PHO 1515/PPK-BM/PUPR/ SBD/IX/2024 tanggal 19 September 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp13.818.319.000,00 dengan SP2D terakhir Nomor 53.18/04.0/000293/ LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 senilai Rp4.145.495.700,00.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama bersama PPK, Penyedia, dan Konsultan Pengawas, yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF 02/BAPF.JIJ/ LKPD.SBD/2/2025 pada tanggal 25 Februari 2024. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas tujuh item pekerjaan senilai Rp13.708.995.000,00, meliputi Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Tanah dan Geosintetik, Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton, Pekerjaan Perkerasan Aspal, Pekerjaan Struktur, Pekerjaan Harian dan Lain-lain, dan Pekerjaan Pemeliharaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan kekurangan volume senilai Rp97.975.122,12 atas dua item pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1. 45 Rincian Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Penanganan *Long Segmen* Jalan Tanggaba - Tanggo'o

No.	Item /Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Kontrak	Volume Fisik	Kekurangan Volume	Jumlah Kekurangan Volume (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=4x7
1.	Laston Lapis Aus (*AC-WC*)	Ton	1.758.692,00	2.106,56	2.052,95	53,61	94.283.478,12
2.	Patok Pengarah	Buah	167.802,00	100	78	22	3.691.644,00
	Jumlah						97.975.122,12

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani PPK, dan Penyedia menyepakati akan mengembalikan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah sesuai BAPHPF 02/LKPD.SBD/AT.4/JIJ/BAKP/2025 tanggal 28 April 2025.

3) Kekurangan volume pada paket pekerjaan penanganan *long segmen* Jalan SP. Waimangura - Leteloko senilai Rp109.488.188,96

Paket pekerjaan penanganan *long segmen* Jalan SP. Waimangura – Leteloko pada Dinas PUPR dilaksanakan oleh PT BPN berdasarkan hasil Tender sesuai Kontrak 042/PPK-BM/PUPR/SBD/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 senilai Rp20.557.696.000,00 (termasuk PPN 11%). Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAU. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 240 hari kalender, terhitung sejak 29 Januari 2024 s.d. 24 September 2024, sesuai SPMK 046/PPK.BM/PUPR/SBD/I/2024 tanggal 29 Januari 2024, dengan masa pemeliharaan 210 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam *addendum* kontrak ADD.I.042/PPK-BM/PUPR/SBD/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang mengatur tentang CCO.

Pekerjaan penanganan *long segmen* Jalan SP. Waimangura – Leteloko telah dinyatakan selesai sesuai dengan PHO 1534/PPK-BM/PUPR/SBD/IX/2024 tanggal 23 September 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp20.557.696.000,00 dengan SP2D terakhir Nomor 53.18/04.0/000292/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 senilai Rp6.167.308.800,00.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama bersama PPK, Penyedia, dan Konsultan Pengawas, yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF Nomor 03/BAPF.JIJ/LKPD.SBD/2/2025 pada tanggal 26 Februari 2024. Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas enam item pekerjaan senilai Rp20.449.319.000,00, meliputi Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Perkerasan Berbutir, Pekerjaan Perkerasan Aspal, Pekerjaan Struktur, serta Pekerjaan Harian dan Lain-lain. Hasil pemeriksaan menunjukkan kekurangan volume senilai Rp109.488.188,96 atas satu item pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1. 46 Rincian Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Penanganan *Long Segmen* Jalan SP. Waimangura - Leteloko

No.	Item /Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Kontrak	Volume Fisik	Kekurangan Volume	Jumlah Kekurangan Volume (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=4x7
1.	Laston Lapis Aus *(AC-WC)*	Ton	1.759.129,00	2.777,03	2.714,79	62,24	109.488.188,96
Jumlah							**109.488.188,96**

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani PPK, dan Penyedia menyepakati akan mengembalikan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah sesuai BAPHPF 03/LKPD.SBD/AT.4/JIJ/BAKP/2025 tanggal 28 April 2025.

4) Kekurangan volume pada paket pekerjaan penanganan *long segmen* Jalan Weekapoda - Kikukarambo senilai Rp108.683.648,10

Paket pekerjaan penanganan *long segmen* Jalan Weekapoda - Kikukarambo pada Dinas PUPR dilaksanakan oleh CV MA berdasarkan hasil Tender sesuai Kontrak 040/PPK-BM/PUPR/SBD/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 senilai Rp10.489.229.000,00 (termasuk PPN 11%). Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAU. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender terhitung sejak SPMK tanggal 29 Januari 2024 s.d. 24 September 2024, sesuai SPMK 044/PPK.BM/PUPR/SBD/I/2024 tanggal 29 Januari 2024, dengan masa pemeliharaan 210 hari kalender. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak mengalami satu kali perubahan yang telah disepakati para pihak dan dituangkan dalam *addendum* kontrak ADD.I'40/PPK-BM/PUPR/SBD/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 yang mengatur tentang CCO.

Pekerjaan penanganan *long segmen* Jalan Weekapoda - Kikukarambo telah dinyatakan selesai sesuai dengan PHO 1537/PPK-BM/PUPR/ SBD/IX/2024 tanggal 23 September 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp10.489.229,00 dengan SP2D terakhir Nomor 53.18/04.0/000291/LS/ 1.03.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 senilai Rp1.960.963.981,00.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama bersama PPK, Penyedia, dan Konsultan Pengawas, yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF 04/BAPF.JIJ/ LKPD.SBD/2/2025 pada tanggal 27 Februari 2024, Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas enam item pekerjaan senilai Rp10.363.159.000,00, meliputi Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Tanah dan Geosintetik, Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen, Pekerjaan Perkerasan Aspal, Pekerjaan Struktur, serta Pekerjaan Harian dan Lain-lain. Hasil pemeriksaan menunjukkan kekurangan volume senilai Rp108.683.648,10 atas satu item pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1. 47 Rincian Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Penanganan *Long Segmen* Jalan Weekapoda – Kikukarambo

No.	Item /Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Kontrak	Volume Fisik	Kekurangan Volume	Jumlah Kekurangan Volume (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=4x7
1.	Laston Lapis Aus (*AC-WC*)	Ton	1.762.914,00	1.704,66	1.643,01	61,65	108.683.648,10
	Jumlah						108.683.648,10

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani PPK, dan Penyedia menyepakati akan mengembalikan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah sesuai BAPHPF 04/LKPD.SBD/AT.4/JIJ/BAKP/2025 tanggal 28 April 2025.

5) Kekurangan volume pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Kolping dan Kramat Jati senilai Rp23.517.365,69

Paket pekerjaan peningkatan Jalan Kolping dan Kramat Jati pada Dinas PUPR dilaksanakan oleh CV LA berdasarkan hasil Tender sesuai Kontrak 1542/PPK-BM/PUPR/SBD/X/2024 tanggal 24 September 2024 senilai Rp2.231.000.000,00 (termasuk PPN 11%). Pembiayaan pekerjaan tersebut bersumber dari DAU. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 hari kalender, terhitung sejak tanggal 24 September 2024 s.d. 22 Desember 2024, sesuai SPMK 1543/PPK.BM/PUPR/SBD/IX/2024 tanggal 24 September 2024 dengan masa pemeliharaan 210 hari. Selama pelaksanaan pekerjaan, kontrak tidak pengalami perubahan.

Pekerjaan peningkatan Jalan Kolping dan Kramat Jati telah dinyatakan selesai sesuai dengan PHO 1749/PPK-BM/PUPR/SBD/XI/2024 tanggal 13 Nopember 2024 dan telah dibayar 100% senilai Rp2.231.000.000,00 dengan SP2D terakhir Nomor 53.18/04.0/000289/LS/1.03.0.00.0. 00.01.0000/PPR1/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 senilai Rp1.561.700.000,00.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan secara uji petik bersama bersama PPK, Penyedia, dan Konsultan Pengawas, yang dituangkan dan ditandatangani dalam BAPF 05/BAPF.JIJ/LKPD.SBD/ 2/2025 pada tanggal 28 Februari 2024, Pemeriksaan fisik dilakukan secara uji petik atas lima item pekerjaan senilai Rp2.154.736.000,00, meliputi Pekerjaan Tanah dan Geosintetik, Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen, Pekerjaan Perkerasan Aspal, Pekerjaan Struktur, serta Pekerjaan Harian dan Lain-lain. Hasil pemeriksaan menunjukkan kekurangan volume senilai Rp23.517.365,69 atas satu item pekerjaan sebagai berikut.

Tabel 1. 48 Rincian Perhitungan Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan Kolping dan Kramat Jati

No.	Item /Jenis Pekerjaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Volume Kontrak	Volume Fisik	Kekurangan Volume	Jumlah Kekurangan Volume (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=4x7
1.	Laston Lapis Aus (*AC-WC*)	Ton	1.941.979,00	488,32	476,21	12,11	23.517.365,69
						Jumlah	23.517.365,69

Hasil perhitungan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan telah disepakati dan ditandatangani PPK, dan Penyedia menyepakati akan mengembalikan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah

sesuai BAPHPF 05/LKPD.SBD/AT.4/JIJ/BAKP/2025 tanggal 28 April 2025.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:

   1) Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa "PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak";

   2) Pasal 17

      a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"; dan

      b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: Huruf a. pelaksanaan Kontrak, Huruf b. kualitas barang/jasa; Huruf c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume, dan Huruf d. ketepatan waktu penyerahan";

   3) Pasal 27 ayat (6) yang menyatakan bahwa "Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani; b) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan c) nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan";

   4) Pasal 78:

      a) Ayat (3) yang menyatakan bahwa "Dalam hal Penyedia: Huruf a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan; Huruf c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan, Huruf d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit; dan Huruf f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak. Penyedia dikenai sanksi administratif"; dan

      b) Ayat (5) yang menyatakan bahwa "Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada: d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun; dan e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti

kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; dan f: ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan";

b. Peraturan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, pada Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia:

   1) Angka 7.11 Pengendalian Kontrak, menyebutkan bahwa "Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh: a. Pejabat Penandatangan Kontrak; b. pihak ketiga yang independen; c. Penyedia; dan/atau d. pengguna akhir"; dan

   2) Angka 7.13 Pembayaran Prestasi Pekerjaan, menyebutkan bahwa "Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan: a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak; dan b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang"; dan

c. Surat Perjanjian/Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi masing-masing pekerjaan pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf F tentang Pembayaran Kepada Penyedia nomor 70.2 poin c yang menyatakan bahwa "Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang".

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada 14 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tiga SKPD senilai Rp522.041.955,23 terdiri dari:

a. Sembilan paket pekerjaan gedung dan bangunan senilai Rp109.649.305,10 yaitu:

   1) Tujuh paket pekerjaan gedung dan bangunan pada Disdikbud senilai Rp71.499.816,57, sebagai berikut:

      a) Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Laboratorium IPA beserta Perabotannya SMPN 8 Kodi Utara oleh CV ME senilai Rp8.124.252,07;

b) Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabotannya SMPN 8 Kodi Utara oleh CV YYP senilai Rp23.083.943,56;

c) Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas DAU SG SDN Wee Tabula 2 oleh CV AMP senilai Rp4.965.040,02;

d) Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal beserta Perabotannya SDN Gokata oleh CV ME senilai Rp5.535.534,08;

e) Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal beserta Perabotannya SMPN1 Kota Tambolaka oleh CV AMP senilai Rp10.384.101,19;

f) Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal beserta Perabotannya SMPN 2 Kodi oleh CV AMP senilai Rp15.166.477,61; dan

g) Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal beserta Perabotannya SMPN 5 Wewewa Barat oleh CV B senilai Rp4.240.468,04;

2) Satu paket pekerjaan gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan, yaitu Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Labkesda) oleh CV PS senilai Rp28.049.221,27; dan

3) Satu paket pekerjaan gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sentra UKM Kota Tambolaka Tahap II DID oleh CV CM senilai Rp10.100.267,26; dan

b. Lima paket pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp412.392.650,13, yaitu:

1) Paket Pekerjaan Penanganan *Long Segmen* Jalan Dalam Kota Tambolaka oleh CV MA oleh senilai Rp72.728.325,26;

2) Paket Pekerjaan Penanganan *Long Segmen* Jalan Tanggaba - Tanggo'o pada Dinas PUPR oleh CV CM senilai Rp97.975.122,12;

3) Paket Pekerjaan Penanganan *Long Segmen* Jalan SP. Waimangura – Leteloko pada Dinas PUPR oleh PT BPN senilai Rp109.488.188,96;

4) Paket Pekerjaan Penanganan *Long Segmen* Jalan Weekapoda - Kikukarambo pada Dinas PUPR oleh CV MA senilai Rp108.683.648,10; dan

5) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Kolping dan Kramat Jati pada Dinas PUPR oleh CV LA senilai Rp23.517.365,69.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Kepala Dinas terkait (dhi. Disdikbud, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR) selaku Pengguna Anggaran kurang cermat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran pada satuan kerjanya; dan

b. PPK pada masing-masing pekerjaan kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan dan memeriksa hasil pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam kontrak.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Sumba Barat Daya menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan Bupati Sumba Barat Daya agar menginstruksikan Kepala SKPD terkait (dhi. Disdikbud, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR) selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume masing-masing senilai Rp71.499.816,57, Rp28.049.356,44 dan Rp422.492.917,39 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

D. Aset

1. Pengelolaan Kas pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya belum Tertib

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menyajikan saldo Kas dan Setara Kas di Neraca per 31 Desember 2024 senilai Rp74.748.429.108,47 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. 49 Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024

No	Uraian	Saldo (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	70.397.469.118,98
2	Kas di Bendahara Penerimaan	65.806.218,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	29.655.490,00
4	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	376.013.475,14
5	Kas Lainnya	39.329.266,05
6	Kas Dana BOSP	785.956.588,30
7	Kas Dana BOK Puskesmas	3.054.198.952,00
Jumlah		**74.748.429.108,47**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pembukuan dan pertanggungjawaban serta pengujian fisik kas pada BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Dana Kapitasi pada FKTP, Bendahara Dana BOSP, dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, diketahui permasalahan sebagai berikut.

a. Terdapat penerimaan jasa giro senilai Rp38.060.544,05 yang bukan merupakan hak Pemda

Berdasarkan hasil pengujian terhadap penerimaan kas di Kas Daerah yang berasal dari jasa giro rekening milik Pemda pada Bank NTT serta hasil konfirmasi kepada Bidang Perbendaharaan, diketahui bahwa terdapat penerimaan jasa giro yang berasal dari 521 rekening bukan milik Pemda. Rekening tersebut antara lain merupakan rekening sekolah swasta, rekening desa, maupun rekening lainnya dengan total penerimaan sejumlah Rp38.060.544,05.

Berdasarkan hasil konfirmasi Kepala Bidang Perbendaharaan diketahui bahwa jasa giro tersebut masuk ke dalam Kas Daerah secara otomatis karena pemindahbukuan dilakukan oleh pihak Bank.

Atas permasalahan tersebut, berdasarkan surat dari Bank NTT Nomor 188/BNTT.KC-1207/IV/2025 tanggal 30 April 2025 diketahui bahwa *autodebet* jasa giro dari masing-masing rekening asal telah dihentikan dan kelebihan penerimaan jasa giro di atas telah dikembalikan seluruhnya ke masing-masing rekening asal pada tanggal 29 April 2025 sejumlah Rp38.060.544,05.

b. Pengelolaan kas di Kas Bendahara Pengeluaran belum tertib

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data/dokumen Kas Bendahara Pengeluaran seluruh SKPD menunjukkan bahwa terdapat Bendahara Pengeluaran/Pembantu pada tiga SKPD yang terlambat melakukan penyetoran sisa uang persediaan (UP) TA 2024 atau penyetoran dilakukan melewati 31 Desember 2024 ke Rekening Umum Kas Daerah (RKUD), total senilai Rp29.655.490,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. 50 Daftar SKPD terlambat Setor sisa UP Tahun 2024

No	Nama SKPD	Jumlah Terlambat Disetor (Rp)	Tanggal Setor ke RKUD
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	440.000,00	15 Januari 2025
2	Kecamatan Kota Tambolaka	25.981.400,00	23 Januari 2025
3	Bagian Ekonomi Setda	3.234.090,00	30 Januari 2025
Jumlah		**29.655.490,00**	

Hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran SKPD terkait menunjukkan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan teknis Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pertanggungjawaban sisa UP sesuai dengan ketentuan.

c. Keterlambatan penyetoran retribusi ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan pada tiga SKPD

Hasil *cash opname* secara uji petik dan konfirmasi kepada Bendahara Penerimaan SKPD menunjukkan bahwa terdapat retribusi daerah yang belum dilaporkan sebagai penerimaan di TA 2024 pada tiga SKPD karena terlambat disetorkan ke RKUD melewati 31 Desember 2024 total senilai Rp65.806.218,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. 51 Daftar SKPD terlambat Setor Retribusi Daerah TA 2024

No	Nama SKPD	Jumlah Terlambat Disetor (Rp)	Tanggal Penyetoran ke RKUD	Jenis Retribusi
1	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Reda Bolo	17.013.000,00	07 Januari 2025	Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) SPAM Wee Maringi	14.864.000,00	20 dan 22 Januari 2025	Retribusi Rumah tangga- iuran air bersih
3	Dinas Kesehatan	33.929.218,00	24 Januari; 06, 10, 14, 18 dan 24 Februari 2025	Retribusi pemakaian ruangan dan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas
Jumlah		**65.806.218,00**		

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bendahara Penerimaan diketahui bahwa keterlambatan tersebut disebabkan sebagai berikut:

1) Bendahara Dinas Kesehatan menjelaskan keterlambatan tersebut akibat lupa mencatat di buku register kas penerimaan;
2) Bendahara RSUD Reda Bolo menjelaskan keterlambatan tersebut karena kondisi kesehatan yang sedang tidak baik; dan
3) Bendahara UPTD SPAM Wee Maringi menjelaskan keterlambatan tersebut dikarenakan:
   a) Data hasil pencatatan meter terlambat dilaporkan karena belum ada kepastian terkait tenaga lapangan. Setiap akhir Desember, petugas dirumahkan dan petugas mulai masuk kerja setelah SK terbit; dan
   b) SPAM rata rata bermasalah, sehingga pembenahan jaringan yang masih dilakukan saat petugas masuk mengakibatkan keterlambatan pencatatan meter & penagihan iuran.

d. Pengelolaan Kas di Kas Bendahara BOS belum tertib

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen penatausahaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Bendahara BOS, serta *cash opname* diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

1) Terdapat 61 rekening sekolah negeri yang belum ditetapkan dengan SK Bupati

   Berdasarkan perbandingan antara hasil konfirmasi bank dari Bank NTT dengan daftar penetapan rekening sekolah pada Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya yang tertuang pada SK Bupati Nomor 7/KEP/HK/2024 tentang Penetapan Rekening Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024 tanggal 3 Januari 2024 diketahui bahwa terdapat 61 rekening sekolah negeri yang belum ditetapkan dengan SK Bupati dengan saldo total senilai Rp1.887.737,54 dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 32.**

Atas kondisi tersebut, diketahui 48 rekening telah dilakukan penutupan berdasarkan surat dari Bank NTT nomor 159.A/BNTT.KC-1027/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 karena sudah tidak digunakan untuk operasional sedangkan 13 rekening lainnya telah ditambahkan pada SK Bupati Nomor 184/KEP/HK/2025 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: 5/KEP/HK/2025 Tentang Penetapan Rekening Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2025 tanggal 5 Maret 2025.

2) Penggunaan Dana BOS Reguler untuk pembayaran honor guru/tenaga kependidikan yang berstatus ASN senilai Rp51.991.050,00

Berdasarkan pemeriksaan dokumen Buku Kas Umum (BKU) secara uji petik pada 31 SD dan 31 SMP, terdapat 15 SD dan delapan SMP yang menggunakan dana BOS untuk membayar kegiatan yang tidak masuk dalam Juknis berupa pembayaran honorarium pegawai yang berstatus ASN atas kegiatan tertentu dan/atau sebagai Tim BOS sekolah. Hasil permintaan keterangan dengan pihak sekolah diketahui jumlah pembayaran honorarium yang berasal dari dana BOS kepada pegawai yang berstatus ASN pada SD maupun SMP total senilai Rp51.991.050,00 (Rp26.875.000,00 + Rp25.116.050,00). Rincian selengkapnya masing-masing dapat dilihat pada **Lampiran 33** dan **Lampiran 34**.

Berdasarkan keterangan dari beberapa Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah menjelaskan secara umum mengetahui adanya aturan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagai dasar penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban dana BOS. Namun, pihak sekolah tidak mengetahui aturan terkait honorarium yang tidak boleh diberikan kepada ASN. Pihak sekolah lebih lanjut menjelaskan pihak sekolah selalu menganggarkan honorarium untuk kegiatan ataupun untuk tim BOS yang mana atas hal tersebut disetujui oleh Disdikbud.

Manajer BOS Disdikbud menjelaskan pada tahun 2024 Disdikbud telah melakukan sosialisasi terkait Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan kepada pihak sekolah pada saat kegiatan asistensi penyusunan anggaran. Namun, terdapat kekeliruan penafsiran oleh pihak sekolah. Pihak sekolah menafsirkan bahwa pemberian honor tersebut diperbolehkan apabila dalam proses reviu penganggaran tidak dilakukan penolakan oleh Disdikbud.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan "Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang

tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran";

b. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada:

   1) Bab V huruf G.1.c yang menyatakan bahwa "Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu satu hari. Dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi satu hari yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah"; dan

   2) Bab V huruf S.1.b.4.d yang menyatakan bahwa "Pada bulan terakhir tahun anggaran, pertanggungjawaban fungsional disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib melampirkan bukti setoran sisa UP";

c. Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah pada Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Rekening Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, diterbitkan oleh bank yang ditunjuk oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya"; dan

d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan" pada:

   1) Pasal 40

      a) Ayat (3) huruf a yang menyatakan bahwa "Guru yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan antara lain berstatus bukan aparatur sipil negara; dan

      b) Ayat (4) huruf a yang menyatakan bahwa "Tenaga Kependidikan yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan antara lain berstatus bukan aparatur sipil negara".

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Kelebihan pencatatan pendapatan daerah atas penerimaan yang bukan merupakan hak Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya;

b. Meningkatnya risiko operasional pengelolaan keuangan daerah antara lain penggunaan rekening yang tidak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan keterlambatan pertanggungjawaban belanja;

c. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tidak dapat segera memanfaatkan dana untuk kepentingan operasional pemerintahan karena keterlambatan penyetoran pendapatan daerah; dan

d. Kelebihan pembayaran atas honor guru/tenaga kependidikan berstatus ASN senilai Rp51.991.050,00.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD belum optimal dalam melakukan verifikasi terhadap penerimaan jasa giro yang masuk ke rekening kas di Kas Daerah dan melakukan validasi kembali terhadap rekening yang dimiliki sekolah negeri;

b. Direktur RSUD Reda Belo, Kepala UPTD SPAM Wee Maringi, dan Kepala Dinas Kesehatan kurang optimal dalam melakukan pengawasan atas ketertiban waktu penyetoran penerimaan retribusi oleh Bendahara Penerimaan sesuai ketentuan;

c. Kepala DPMD, Camat Kota Tambolaka, Kepala Bagian Ekonomi kurang optimal dalam melakukan pengawasan atas ketertiban waktu penyetoran sisa UP oleh Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan;

d. Para kepala satuan pendidikan pada 15 SD dan delapan SMP tidak memedomani ketentuan pembayaran honorarium yang diatur Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;

e. Bendahara penerimaan RSUD Reda Bolo, Bendahara Penerimaan UPTD SPAM Wee Maringi dan Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan tidak melaksanakan tugas mencatat penerimaan dan menyetorkan ke RKUD tepat waktu;

f. Bendahara Pengeluaran Dinas PMD, Kecamatan Kota Tambolaka, dan Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam tidak melaksanakan penyetoran sisa UP TA 2024 tepat waktu; dan

g. Bendahara BOS sekolah terkait belum tertib dalam mempertanggungjawabkan belanja serta tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam penyetoran pajak dan penggunaan dana BOS.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Sumba Barat Daya menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan Bupati Sumba Barat Daya agar menginstruksikan kepada:

a. Kepala BKAD untuk menyelenggarakan sosialisasi bagi para bendahara SKPD terkait pengelolaan keuangan daerah, antara lain mengenai penerapan *non cash transaction*, ketepatan waktu penyetoran sisa kas dan pertanggungjawaban

belanja, ketepatan waktu penyetoran pendapatan daerah, serta larangan penggunaan kas yang dikelola untuk kepentingan pribadi; dan

b. Kepala Disdikbud selaku pengguna anggaran supaya:

1) Menyelenggarakan sosialisasi bagi para Bendahara BOS terkait pengelolaan dana BOS, antara lain mengenai ketepatan waktu penyetoran pajak, kelengkapan bukti pertanggungjawaban belanja, serta penggunaan dana BOS sesuai juknis; dan

2) Memerintahkan kepada Para Kepala satuan pendidikan pada 15 SD dan delapan SMP untuk memproses kelebihan pembayaran honor guru/tenaga kependidikan berstatus ASN yang bersumber dari dana BOSP senilai Rp51.991.050,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

2. Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya belum Tertib

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp1.797.353.714.099,43 dan senilai Rp1.857.744.286.340,04 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. 52 Rincian Aset Tetap per 31/12/2024 dan 31/12/2023

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Per 31/12/2024	Per 31/12/ 2023
1	Tanah	366.129.124.336,00	371.281.409.336,00
2	Peralatan dan Mesin	359.815.725.945,51	341.701.391.858,62
3	Gedung dan Bangunan	705.009.234.652,34	623.592.116.869,33
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.512.420.729.978,04	1.395.254.032.803,31
5	Aset Tetap Lainnya	48.783.845.838,14	46.513.845.283,14
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.499.631.034,00	42.298.483.284,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.143.914.005.443,99)	(1.023.287.565.334,98)
	Jumlah	**1.857.744.286.340,04**	**1.797.353.714.099,43**

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 121.B/LHP/XIX.KUP/06/2023 tanggal 12 Juni 2024, BPK mengungkapkan permasalahan, diantaranya yaitu Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya tertib yaitu: 1) Aset Tetap Tanah yang dimanfaatkan pihak lain belum dilengkapi dokumen pemanfaatan; 2) Penatausahaan Peminjaman BPKB Kendaraan oleh Pengguna Kendaraan Tidak Memadai; 3) Perjanjian Pinjam Pakai Kendaraan yang Dikuasai Instansi Vertikal Belum Dimutakhirkan; 4) Dua Sepeda Motor Milik Bagian Umum Setda dan Sekretariat DPRD Tidak Diketahui Keberadaannya; dan 5) Pencatatan Kartu Inventaris Barang (KIB) Belum Dilakukan secara Lengkap dan Informatif.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumba Barat Daya agar menginstruksikan: a) Kepala BKAD agar: (1) Memperjelas status pemanfaatan aset tetap tanah yang dimanfaatkan oleh

pemerintah desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Memperbaharui perjanjian pinjam pakai atas barang milik daerah yang dimanfaatkan instansi vertikal; (3) Memerintahkan Kepala Bidang Aset melengkapi informasi yang terdapat pada KIB; dan (4) Menyusun Prosedur Operasional Standar terkait peminjaman bukti kepemilikan aset; dan b) Inspektur selaku Ketua Tim Penyelesaian Ganti Rugi Negara/Daerah untuk memproses penyelesaian ganti kerugian daerah atas hilangnya dua sepeda motor di Sekretariat DPRD dan Bagian Umum Setda melalui verifikasi kerugian negara/daerah dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara/Daerah kepada Bupati.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah menindaklanjuti rekomendasi BPK berupa a) Kepala BPKAD telah melakukan antara lain: (1) untuk status pemanfaatan aset tetap tanah yang dimanfaatkan oleh pemerintah desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BKAD telah melakukan koordinasi dengan pihak desa serta melakukan inventarisasi atas tanah pemda yang berada di bawah penguasaan desa untuk dihibahkan; (2) telah memperbaharui perjanjian pinjam pakai atas barang milik daerah yang dimanfaatkan instansi vertikal selama lima tahun kedepan s.d. tahun 2029; (3) atas kelengkapan informasi yang terdapat pada KIB, baru dilaksanakan Sebagian oleh bidang aset BKAD; dan untuk rekomendasi ke-(4) terkait menyusun prosedur operasional standar terkait peminjaman bukti kepemilikan aset, bagian aset BKAD belum melakukannya; serta untuk rekomendasi huruf b) Inspektorat masih melakukan verifikasi sehingga belum menyampaikan laporan hasil verifikasi kerugian negara/daerah kepada Bupati.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik Aset Tetap per 31 Desember 2024 pada 40 SKPD atas dokumen KIB, pemeriksaan fisik bersama dengan Tim Subbidang Aset BKAD dan Pengurus Barang SKPD, serta keterangan pihak terkait, diketahui bahwa Pengamanan aset tetap pada 13 SKPD belum tertib yaitu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, Diskoperindag, Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Dinas Lingkungan Hidup, DPMD, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, Kecamatan Kota Tambolaka, Kecamatan Wewewa Timur, dan Kecamatan Wewewa Barat dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Aset tetap pada Setda khususnya di rumah jabatan kepala daerah tidak dilengkapi dengan pengamanan fisik berupa kode barang

   Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik Aset Tetap per 31 Desember 2024 pada Bagian Umum dengan melakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 01 Maret 2025 bersama dengan Tim Subbidang Aset BKAD dan Pengurus Barang SKPD pada rumah jabatan Bupati, diketahui bahwa atas aset tetap peralatan dan mesin yang berada di rumah jabatan Bupati tidak ditemukan tanda kode barang atau inventarisasi sehingga menyulitkan untuk dilakukan penelusuran dan pengidentifikasian atas tahun perolehan dari aset tersebut. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pengurus barang bagian umum diketahui bahwa pengurus barang baru menjabat pada awal tahun 2024, sehingga belum melakukan inventarisasi dan membuat kode barang atas aset tetap yang berada di rumah jabatan. Selain itu diakui kesulitan untuk

mengidentifikasi dikarenakan pengurus barang periode sebelumnya telah dimutasi ke SKPD lain.

b. Aset tetap pada sembilan SKPD dikuasai oleh pihak yang tidak berhak

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas daftar Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan hasil cek fisik, diketahui terdapat Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak pada sembilan SKPD yaitu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, Diskoperindag, Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kecamatan Kota Tambolaka dengan uraian permasalahan sebagai berikut.

1) Aset tetap KIB B pengadaan tahun 2020 s.d. 2023 tidak berada di rumah jabatan

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik Aset Tetap per 31 Desember 2024 pada Bagian Umum dengan melakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 01 Maret 2025 bersama dengan Tim Subbidang Aset BKAD dan Pengurus Barang SKPD pada rumah jabatan Wakil Bupati, diketahui bahwa terdapat Aset Tetap Peralatan Dan Mesin yang tercatat dalam KIB B Bagian Umum Setda dan merupakan pengadaan tahun 2020 s.d. 2023 yang tidak berada di rumah jabatan wakil bupati dengan rincian ada pada **Lampiran 35.**

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kepala Bagian Umum dan Pengurus Barang Bagian Umum Setda diketahui bahwa aset tersebut berada dalam penguasaan mantan pejabat sebelumnya.

2) 14 unit kendaraan bermotor dikuasai oleh pegawai yang telah pensiun dan personel yang bukan peruntukannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kendaraan operasional 40 SKPD pada tanggal 12 s.d. 14 Maret 2025, juga diketahui terdapat 14 unit kendaraan roda dua pada sembilan SKPD senilai Rp1.246.609.738,14 yang beredar dan dikuasai oleh SKPD dan personel yang bukan peruntukannya. Kendaraan roda dua tersebut dikuasai oleh pegawai SKPD yang berbeda dengan SKPD pencatatan aset roda dua tersebut, selain itu juga dikuasai oleh pensiunan pegawai Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Adapun rincian dari 14 unit kendaraan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 36.**

c. Lima sepeda motor milik Dinas Kesehatan pada Puskesmas Watu Kawula, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan Wewewa Timur serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak ditemukan/hilang

Lebih lanjut hasil pemeriksaan fisik kendaraan operasional 40 SKPD pada tanggal 12 s.d. 14 Maret 2025, diketahui terdapat lima kendaraan roda dua total senilai Rp98.355.731,00 milik Dinas Kesehatan pada Puskesmas Watu Kawula, DPMD, Kecamatan Wewewa Timur serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah hilang/tidak diketahui keberadaannya/fisik tidak ditemukan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. 53 Rincian Sepeda Motor yang Tidak Diketahui Keberadaannya

SKPD	Kode Barang	Spesifikasi Barang			Jumlah		Keterangan
		Nama Barang	Merk/Type	No. Rangka dan Mesin	Unit	Harga (Rp)	
Dinas Kesehatan pada Puskesmas Watu Kawula	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	HONDA / NF 125 TD	FH/ADI/313941/IMH1JB8115AK58196JB81E1577348	1	19.873.150,00	Fisik tidak ditemukan/hilang merupakan pengadaan tahun 2007
DPMD	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / GL 160 D	FH/ADI/321468/FMHIKCIII87KII8898 KCIIE-1121115	1	23.964.041,00	Fisik kendaraan tidak ditemukan/hilang merupakan pengadaan tahun 2007
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z FI / UE11	MHEUE1110FJ002397 E3R5E 0025304	1	16.400.000,00	Motor hilang, sudah ada BA Kehilangan
Kecamatan Wewewa Timur	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z	-	1	13.181.000,00	tidak ditemukan
	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / Mega Pro	"MH1KC311OAK027448	1	24.937.540,00	tidak ditemukan
	Jumlah				**5**	**98.355.731,00**	

d. Aset tetap berupa sembilan kendaraan bermotor pada Kecamatan Wewewa Barat tidak diketahui keberadaannya

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kendaraan operasional 40 SKPD pada tanggal 12 s.d. 14 Maret 2025 diketahui terdapat Aset Tetap Peralatan Dan Mesin berupa sembilan unit kendaraan roda dua yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp214.750.371,00. Aset tetap tersebut tercatat dalam Laporan BMD sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan rincian pada **Lampiran 37.**

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kepala Seksi Optimalisasi Aset diketahui bahwa terkait kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya pada Kecamatan Wewewa Barat akan dilakukan koordinasi dan verifikasi segera ke lapangan. Sedangkan untuk lima kendaraan roda dua yang hilang, baru diketahui kondisi tersebut saat dilakukan sensus kendaraan bersama BPK. Penanganan lebih lanjut akan dilakukan dengan memanggil pengurus barang SKPD untuk meminta dokumen pendukung serta menanyakan kronologis kehilangan aset tersebut. Lebih lanjut terkait kendaraan roda dua yang dikuasai oleh personel yang tidak seharusnya, merupakan tanggung jawab dan kewenangan dari instansi terkait. Bidang Optimalisasi Aset akan melakukan pemindahan data kendaraan apabila pengurus barang instansi terkait melaporkan dan membawa dokumen pendukung berupa berita acara pemindahan kendaraan dari SKPD awal ke SKPD tujuan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 44 menyatakan bahwa “Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya”;

b. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada:

1) Pasal 1 angka 27 yang menyatakan bahwa "Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian";

2) Pasal 12:

a) ayat (1) yang menyatakan bahwa "Kepala SKPD selaku Pengguna Barang";

b) ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pengguna Barang sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:

(1) Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; dan

(2) Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam pengawasannya";

3) Pasal 16 Ayat 2 yang menyatakan bahwa "Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab: huruf (c) melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah dan (d) membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang";

4) Pasal 296:

a) ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya"; dan

b) ayat (2) yang menyatakan bahwa "Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pengamanan fisik; b. pengamanan administrasi; dan c. pengamanan hukum"; dan

5) Pasal 474 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang".

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

a. Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat pengendalian Aset Tetap yang memadai; dan

b. Adanya potensi permasalahan hukum dan/atau penyalahgunaan BMD atas pengamanan Aset Tetap yang belum tertib.

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah belum optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan Aset Tetap yang menjadi tanggung jawabnya;

b. Kepala BKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang belum optimal melaksanakan tanggung jawabnya dalam pengelolaan BMD, terutama terkait penertiban pencatatan serta pengamanan aset; dan

c. Kepala Dinas SKPD terkait selaku Pengguna Barang kurang cermat dalam melakukan pencatatan dan inventarisasi serta pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Sumba Barat Daya menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK merekomendasikan Bupati Sumba Barat Daya agar menginstruksikan:

a. Sekretaris Daerah untuk menginventarisasi keberadaan Aset Tetap pada sembilan SKPD yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak dan memerintahkan Kepala Bagian Umum untuk membuat kode barang sebagai pengamanan fisik atas Aset Tetap tersebut;

b. Kepala BKAD memerintahkan Kepala Bidang Aset bersama Camat Wewewa Barat untuk melaksanakan inventarisasi aset tetap sembilan unit kendaraan bermotor dan penelusuran atas Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya dan menyampaikan Laporan Hasil inventarisasi kepada Bupati; dan

c. Inspektur selaku Ketua Tim Penyelesaian Ganti Rugi Negara/Daerah untuk memproses penyelesaian ganti kerugian daerah atas hilangnya lima sepeda motor di Dinas Kesehatan pada Puskesmas Watukawulla, DPMD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Kecamatan Wewewa Timur melalui verifikasi kerugian negara/daerah dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara/Daerah kepada Bupati.

BAB II

IKHTISAR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBELUMNYA

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2024, BPK memantau tindak lanjut rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2020 s.d. 2024. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan DPRD.

Pemantauan atas tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

No.	LHP Tahun	Jumlah Temuan	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	Tahun 2024	11	0	0	22	0
2	Tahun 2023	12	4	19	3	0
3	Tahun 2022	9	8	6	0	0
4	Tahun 2021	18	12	15	4	0
5	Tahun 2020	8	17	6	3	0
Jumlah		**58**	**41**	**46**	**32**	**0**

Pada 2024, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan BPK, antara lain mengenai:

a. Penyesuaian kebijakan akuntansi sesuai dengan SAP dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan SAP Nomor 16 dan 17 yaitu dengan menetapkan Perbup Sumba Barat Daya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi; dan
b. Pemutakhiran Perbup yang mengatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan monitoring serta evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yaitu dengan menetapkan Perbup Sumba Barat Daya Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial.

Adapun permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut antara lain menyusun perubahan atau merevisi Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah kepada Bank NTT dengan merinci nilai penyertaannya dan mengusulkannya kepada DPRD.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

Lampiran 1

Rincian Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa dianggarkan pada Belanja Modal

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A	**Belanja Barang yang diserahkan pada Masyarakat yang dianggarkan pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin**			
1	Meja Sekolah	27,00	534.166,00	14.422.482,00
2	Meja Sekolah	1,00	533.978,00	533.978,00
3	Kursi Kayu	2,00	422.700,00	845.400,00
4	Kursi Kayu	56,00	358.950,00	20.101.200,00
5	Lemari Kayu	2,00	1.599.920,00	3.199.840,00
6	Papan Tulis	2,00	825.950,00	1.651.900,00
7	Meja 1/2 Biro	2,00	1.556.550,00	3.113.100,00
JUMLAH A				**43.867.900,00**
B	**Belanja Barang yang diserahkan pada Masyarakat yang dianggarkan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan**			
1	Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SDM Watu Lambara	1	28.857.300,00	28.857.300,00
2	Rehabilitasi Ruang Kelas SD Masehi Walla Ndimu DAU SG 30% ta 2024	1	122.339.100,00	122.339.100,00
JUMLAH B				**151.196.400,00**
C	**Belanja Barang Jasa Transportasi yang dianggarkan pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**			
1	SD Negeri Pare Karabu	1	490.000,00	490.000,00
JUMLAH C				**490.000,00**
TOTAL (A+B+C)				**195.554.300,00**

Lampiran 2

Rincian Kesalahan Penganggaran Belanja Modal dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa

No	Nama SKPD	Nama Sub SKPD	Nama Barang	Jumlah	Nilai Satuan (Rp)	Total (Rp)	Ket
A	**Reklasifikasi Barang dan Jasa Menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin**						
1	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Sofa	4	18.853.000,00	75.412.000,00	Dari Barjas Ke PM
			Sofa	2	18.853.779,00	37.707.558,00	Dari Barjas Ke PM
2	Dinas Kesehatan	Puskesmas Tanggaba	Kursi Pimpinan	2	1.500.000,00	3.000.000,00	Dari Barjas Ke PM
		Puskesmas Billa Cenge	Sofa	1	7.500.000,00	7.500.000,00	Dari Barjas Ke PM
			Meja 1/2 Biro	2	2.156.250,00	4.312.500,00	Dari Barjas Ke PM
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah	Lemari dan Rak untuk kegiatan/ Perabotan Kantor	1	10.509.000,00	10.509.000,00	Dari Barjas Ke PM
			Meja 1/2 Biro Jati	2	2.156.250,00	4.312.500,00	Dari Barjas Ke PM
			Thermal TDP-225 W	1	3.045.000,00	3.045.000,00	Dari Barjas Ke PM
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembayaran Belanja Langsung Pengadaan Mebel SDN WAIHARI (DAU SG 100%) TA 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
			Meja Sekolah	27	534.166,00	14.422.482,00	Dari Barjas Ke PM
			Meja Sekolah	1	533.978,00	533.978,00	Dari Barjas Ke PM
			Lemari Kayu	2	1.599.920,00	3.199.840,00	Dari Barjas Ke PM
			Papan Tulis	2	825.950,00	1.651.900,00	Dari Barjas Ke PM
			Meja 1/2 Biro	2	1.556.550,00	3.113.100,00	Dari Barjas Ke PM
		SD Negeri Noha	Belanja Printer	1	1.000.000,00	1.000.000,00	Dari Barjas Ke PM
		SD Negeri Rato Ate - Wewewa Utara	Belanja Printer	1	600.000,00	600.000,00	Dari Barjas Ke PM
		SD Negeri Pare Karabu	Belanja Laptop	1	9.000.000,00	9.000.000,00	Dari Barjas Ke PM
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kursi Putar	1	7.498.750,00	7.498.750,00	Dari Barjas Ke PM
			Kursi Tamu	6	1.698.750,00	10.192.500,00	Dari Barjas Ke PM
			Kursi Putar	1	1.500.000,00	1.500.000,00	Dari Barjas Ke PM
	Jumlah A					**198.511.108,00**	
B	**Belanja Barang dan Jasa yang Dikapitalisasi Menjadi Aset Tetap**						
1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Gedung Instalasi Farmasi Kabupaten	1	31.078.080,00	31.078.080,00	
			Jasa Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Gedung Instalasi Farmasi Kabupaten	1	26.473.920,00	26.473.920,00	
			Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Pustu Totok Puskesmas Radamata Kab. Sumba Barat Daya	1	9.180.500,00	9.180.500,00	
			Belanja jasa konsultasi pengawasan rehabilitasi Pustu Totok, Radamata	1	7.344.400,00	7.344.400,00	
			Belanja jasa konsultasi perencanaan rehabilitasi Pustu Mata Kapore Puskesmas Deludepa	1	9.180.500,00	9.180.500,00	
			Jasa Konsultasi Pengawasan Rehabilitasi Pustu Matakapore	1	7.344.400,00	7.344.400,00	
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi sedang ruang kelas DAU SG SD Negeri Wee Tabula 2	1	137.551.666,00	137.551.666,00	
3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pembangunan Kanopi Disdukcapil	1	50.939.000,00	50.939.000,00	
	Jumlah B					**279.092.466,00**	

Rincian Kesalahan Penganggaran Belanja Modal dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa

No	Nama SKPD	Nama Sub SKPD	Nama Barang	Jumlah	Nilai Satuan (Rp)	Total (Rp)	Ket
C	**Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Jalan, Instalasi dan Jaringan**						
1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jasa Konsultasi Pengawasan Sumur Bor Puskesmas Werilolo, Deludepa dan Weekombak	1	10.000.000,00	10.000.000,00	
			Jasa Konsultasi Perencanaan IPAL Puskesmas Tena Teke, Watukawula, Palla - K	1	39.000.000,00	39.000.000,00	
		Puskesmas Kawango Hari	Meteran Listrik	1	3.000.000,00	3.000.000,00	
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SD Negeri Batu Karang	Meteran Listrik	1	3.200.000,00	3.200.000,00	
		SD Negeri Noha	Meteran Listrik	1	7.500.000,00	7.500.000,00	
3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pebangunan Toilet Dispenduk	1	149.910.000,00	149.910.000,00	
	Jumlah C					**212.610.000,00**	
D	**Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Lainnya**						
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SMP Negeri 6 Kodi	Ilmu Pengetahuan Umum	15	97.400,00	1.461.000,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	15	81.700,00	1.225.500,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	16	27.900,00	446.400,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	15	29.400,00	441.000,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	14	50.200,00	702.800,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	1	143.700,00	143.700,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	15	36.600,00	549.000,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	15	37.200,00	558.000,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	1	128.400,00	128.400,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	1	159.900,00	159.900,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	1	128.400,00	128.400,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	1	137.000,00	137.000,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	16	27.500,00	440.000,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	15	45.600,00	684.000,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	15	39.100,00	586.500,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	15	41.500,00	622.500,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	15	26.700,00	400.500,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	1	159.900,00	159.900,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	14	39.600,00	554.400,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	14	51.200,00	716.800,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	13	48.200,00	626.600,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	1	144.900,00	144.900,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	1	152.000,00	152.000,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	1	137.000,00	137.000,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	1	121.200,00	121.200,00	
		SMP Negeri 7 Kodi Utara	Ilmu Pengetahuan Umum	10	200.000,00	2.000.000,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	3	300.000,00	900.000,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	3	145.000,00	435.000,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	15	175.000,00	2.625.000,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	15	150.000,00	2.250.000,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	1	21.500,00	21.500,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	3	39.600,00	118.800,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	4	27.900,00	111.600,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	4	37.200,00	148.800,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	4	39.600,00	158.400,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	5	48.200,00	241.000,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	5	27.900,00	139.500,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	4	120.600,00	482.400,00	
			Ilmu Pengetahuan Umum	4	97.000,00	388.000,00	
	Jumlah D					**21.447.400,00**	
	TOTAL (A+B+C+D)					**711.660.974,00**	

Lampiran 3

Rincian Perhitungan Kekurangan Pembayaran Pajak Hotel Tahun 2024

(dalam rupiah)

No	Nama WP	Masa Pajak	Total pelaporan Wajib Pajak		Hasil Pemeriksaan Lapangan		Total	Setor ke Kasda	Sisa Kurang Bayar	Keterangan
			Omzet	Pajak Daerah 10%	Omzet	Pajak Daerah 10%	Lebih/Kurang			
1	HM	Juli	77.655.950,00	7.765.595,00	125.993.909,17	12.599.390,92	4.833.795,92	33.082.552,90	0,00	Telah disetor ke kasda tanggal 01 Mei 2025
		Agustus	164.282.160,00	16.428.216,00	293.872.659,83	29.387.265,98	12.959.049,98			
		September	50.168.550,00	5.016.855,00	86.183.358,67	8.618.335,87	3.601.480,87			
		Oktober	89.820.410,00	8.982.041,00	148.622.798,77	14.862.279,88	5.880.238,88			
		November	47.656.860,00	4.765.686,00	84.008.126,67	8.400.812,67	3.635.126,67			
		Desember	27.035.930,00	2.703.593,00	48.764.535,83	4.876.453,58	2.172.860,58			
	Jumlah (1)		**456.619.860,00**	**45.661.986,00**	**787.445.388,94**	**78.744.538,90**	**33.082.552,90**	**33.082.552,90**	**0,00**	
2	HST	Januari	77.055.000,00	7.705.500,00	88.350.000	8.835.000,00	1.129.500,00	47.813.200,00	53.450.333,80	Telah disetor ke kasda tanggal 07 Mei 2025
		Februari	134.839.000,00	13.483.900,00	90.450.000,00	9.045.000,00	-4.438.900,00			
		Maret	144.255.000,00	14.425.500,00	165.150.000,00	16.515.000,00	2.089.500,00			
		April	120.420.000,00	12.042.000,00	134.050.000,00	13.405.000,00	1.363.000,00			
		Mei	214.035.000,00	21.403.500,00	254.200.000,00	25.420.000,00	4.016.500,00			
		Juni	172.275.000,00	17.227.500,00	227.750.000,00	22.775.000,00	5.547.500,00			
		Juli	150.725.000,00	15.072.500,00	294.445.000,00	29.444.500,00	14.372.000,00			
		Agustus	157.509.000,00	15.750.900,00	394.850.000,00	39.485.000,00	23.734.100,00			
		September	108.534.000,00	10.853.400,00	284.975.998,00	28.497.599,80	17.644.199,80			
		Oktober	171.073.660,00	17.107.366,00	280.350.000,00	28.035.000,00	10.927.634,00			
		November	198.915.000,00	19.891.500,00	372.450.000,00	37.245.000,00	17.353.500,00			
		Desember	244.950.000,00	24.495.000,00	320.200.000,00	32.020.000,00	7.525.000,00			
	Jumlah (2)		**1.894.585.660,00**	**189.458.566,00**	**2.907.220.998,00**	**290.722.099,80**	**101.263.533,80**	**47.813.200,00**	**53.450.333,80**	
Total (1 +2)			**2.351.205.520,00**	**235.120.552,00**	**3.694.666.386,94**	**369.466.638,70**	**134.346.086,70**	**80.895.752,90**	**53.450.333,80**	

Rincian Kekurangan Volume atas Pembangunan Ruang Kelas Baru
DAU SG SMP Bakti Luhur

No	Item Pekerjaan	Volume CCO	Volume Periksa	Selisih Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
a	b	c	d	e = c - d	f	g	h = e x g
1	**Pekerjaan Tanah dan Urugan**					**Jumlah Total =**	**1.324.801,21**
-	Galian tanah pondasi	25,92	24,30	1,62	M^3	63.487,50	102.849,75
-	Urugan tanah bekas galian	6,48	5,21	1,27	M^3	22.237,50	28.241,63
-	Urugan Sirtu Peninggian lantai	80,27	76,86	3,41	M^3	213.237,50	727.139,88
-	Urugan Pasir Bawah Lantai	4,70	3,63	1,07	M^3	289.795,00	310.080,65
-	Urugan pasir bawah pondasi	3,24	2,70	0,54	M^3	289.795,00	156.489,30
2	**Pekerjaan Pasangan dan Plesteran**					**Jumlah Total =**	**10.267.630,98**
-	Pasangan batu kosong/*Aanstamping*	12,96	10,80	2,16	M^3	248.881,13	537.583,24
-	Pasangan pondasi batu Karang 1Pc : 5 Psr	39,56	32,74	6,82	M^3	953.177,50	6.500.670,55
-	Pasangan tembok biasa 1 Pc : 5 Psr	24,12	22,85	1,27	M^3	1.242.657,06	1.578.174,47
-	Plesteran tembok biasa 1 pc : 5 psr (Tbl : 15 mm)	402,13	386,50	15,63	M^2	65.536,46	1.024.334,87
-	Plesteran kolom 1 pc : 3 psr (Tbl : 15 mm)	31,54	31,23	0,31	M^2	68.590,94	21.263,19
-	Plesteran Pondasi 1 pc : 4 psr (Tbl : 15 mm)	16,29	15,62	0,67	M^2	66.353,10	44.456,58
-	Acian Tembok	402,13	386,50	15,63	M^2	33.783,75	528.040,01
-	Acian Pondasi	16,29	15,62	0,67	M^2	33.783,75	22.635,11
-	Acian Kolom	31,54	31,23	0,31	M^2	33.783,75	10.472,96
3	**Pekerjaan Beton**					**Jumlah Total =**	**1.794.256,57**
-	Pek. *Sloof* 15/15 cm						
	Beton K.225	1,82	1,68	0,14	M^3	1.639.357,50	229.510,05
	Besi Tulg. Pokok Ø 12	288,36	273,46	14,90	Kg	34.138,50	508.663,65
	Besi Tulg. Sengkang Ø 6	53,95	50,05	3,90	Kg	34.138,50	133.140,15
	Bekisting (2 x pakai)	12,15	11,26	0,89	M^2	158.301,00	140.887,89
-	Pek. Kolom Struktur 15/20 cm						
	Beton K.225	1,82	1,77	0,05	M^3	1.639.357,50	81.967,88
	Besi Tulg. Pokok Ø 12	210,75	210,18	0,57	Kg	34.138,50	19.458,95
	Besi Tulg. Sengkang Ø 6	44,93	39,96	4,97	Kg	34.138,50	169.668,35
	Bekisting (2 x pakai)	1,52	1,18	0,34	M^2	281.220,50	95.614,97
-	Pek. Kolom Teras 20/20 cm						
	Beton K.225	1,06	1,05	0,01	M^3	1.639.357,50	16.393,58
	Besi Tulg. Sengkang Ø 6	25,25	24,24	1,01	Kg	34.138,50	34.479,89
	Bekisting (2 x pakai)	10,64	10,47	0,17	M^2	281.220,50	47.807,49
-	Pek. Kolom Praktis 15/15 cm						
	Beton K.225	0,17	0,16	0,01	M^3	1.639.357,50	16.393,58
	Besi Tulg. Pokok Ø 12	28,48	28,22	0,26	Kg	34.138,50	8.876,01
	Besi Tulg. Sengkang Ø 6	6,11	5,56	0,55	Kg	34.138,50	18.776,18
	Bekisting (2 x pakai)	1,52	1,08	0,44	M^2	281.220,50	123.737,02
-	Pek. *Ring balk* 15/15 Cm						
	Beton K.225	1,28	1,26	0,02	M^3	1.639.357,50	32.787,15
	Besi Tulg. Pokok Ø 12	267,00	266,70	0,30	Kg	34.138,50	10.241,55
	Besi Tulg. Sengkang Ø 6	60,81	60,07	0,74	Kg	34.138,50	25.262,49
	Bekisting (2 x pakai)	15,00	14,72	0,28	M^2	287.820,50	80.589,74
4	**Pekerjaan Lantai**					**Jumlah Total =**	**200.685,18**
-	Pek. lantai rabat tebal 7 cm	7,70	7,68	0,02	M^3	1.610.843,93	32.216,88
-	Pek. Lantai Keramik Polis 40 x 40 cm	156,97	156,29	0,68	M2	247.747,50	168.468,30
5	**Pekerjaan Kayu dan Kaca**					**Jumlah Total =**	**778.355,82**
-	Pek. Kusen Kayu Kls II (5/11)	0,88	0,83	0,05	M^3	7.027.350,00	351.367,50
-	Pek. Daun Pintu Panil Kayu Kls II	5,04	5,02	0,02	M^2	692.725,00	13.854,50
-	Pek. Jendela Panil Kaca Polos 5 mm	13,25	12,74	0,51	M^2	756.580,00	385.855,80
-	Pek. Jendela Kaca Mati Polos 5 mm	6,30	6,23	0,07	M^2	389.686,00	27.278,02
6	**Pekerjaan Cat dan Laburan**					**Jumlah Total =**	**499.370,68**
-	Cat Tembok	402,13	386,50	15,63	M^2	31.949,50	499.370,69
Jumlah Total Kurang Volume (1 s.d. 6) =							**14.865.100,44**

Lampiran 5

Rincian Kekurangan Volume atas Pembangunan Ruang Kelas Baru
DAU SG SMP Genera Kalerea

No	Item Pekerjaan	Volume CCO	Volume Periksa	Selisih Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
a	b	c	d	e = c - d	f	g	h = e x g
1	**Pekerjaan Tanah dan Urugan**					**Jumlah Total =**	**97.040,08**
-	Urugan tanah bekas galian	6,48	6,17	0,31	M^3	23.237,50	7.203,63
-	Urugan pasir bawah pondasi	3,24	2,93	0,31	M^3	289.795,00	89.836,45
2	**Pekerjaan Pasangan dan Plesteran**					**Jumlah Total =**	**17.154.942,85**
-	Pasangan batu kosong/*Aanstamping*	12,96	11,72	1,24	M^3	306.751,50	380.371,86
-	Pasangan pondasi batu Karang 1Pc : 5 Psr	39,56	34,27	5,29	M^3	945.697,50	5.002.739,78
-	Pasangan tembok biasa 1 Pc : 5 Psr	24,12	20,26	3,86	M^3	1.240.547,00	4.788.511,42
-	Plesteran tembok biasa 1 pc : 5 psr (Tbl : 15 mm)	402,13	331,58	70,55	M^2	65.164,48	4.597.354,06
-	Acian Tembok	402,13	331,58	70,55	M^2	33.819,50	2.385.965,73
3	**Pekerjaan Beton**					**Jumlah Total =**	**6.033.345,14**
-	Pek. *Sloof* 15/15 cm						
	-Beton K.225	1,82	1,54	0,28	M^3	1.592.525,00	445.907,00
	-Besi Tulg. Pokok Ø 12	288,36	250,50	37,86	Kg	34.138,50	1.292.483,61
	-Besi Tulg. Sengkang Ø 6	53,95	45,84	8,11	Kg	34.138,50	276.863,24
	-Bekisting (2 x pakai)	12,15	10,27	1,88	M^2	158.301,00	297.605,88
-	Pek. Kolom Struktur 15/20 cm						
	-Beton K.225	1,82	1,78	0,04	M^3	1.592.525,00	63.701,00
-	Pek. Kolom Struktur Teras 20/20 cm						
	-Beton K.225	1,06	1,04	0,02	M^3	1.592.525,00	31.850,50
	-Bekisting (2 x pakai)	10,64	10,37	0,27	M^2	281.220,50	75.929,54
-	Pek. Kolom Praktis 15/15 cm						
	-Bekisting (2 x pakai)	1,52	1,11	0,41	M^2	281.220,50	115.300,40
-	Pek. *Ring balk* 15/15 Cm						
	-Beton K.225	1,28	1,09	0,19	M^3	1.592.525,00	302.579,75
	-Besi Tulg. Pokok Ø 12	267,00	228,40	38,60	Kg	34.138,50	1.317.746,10
	-Besi Tulg. Sengkang Ø 6	60,81	50,92	9,89	Kg	34.138,50	337.629,77
	-Bekisting (2 x pakai)	15,00	12,54	2,46	M^2	287.820,50	708.038,43
-	Pek. Balok Gantung Teras 15/20 cm						
	-Beton K.225	0,66	0,61	0,05	M^3	1.592.525,00	79.626,25
	-Besi Tulg. Pokok Ø 12	78,32	66,28	12,04	Kg	34.138,50	411.027,54
	-Besi Tulg. Sengkang Ø 6	17,83	14,52	3,31	Kg	34.138,50	112.998,44
	-Bekisting (2 x pakai)	6,05	5,48	0,57	M^2	287.820,50	164.057,69
4	**Pekerjaan Lantai**					**Jumlah Total =**	**3.274.494,24**
-	Pek. lantai rabat tebal 7 cm	7,70	7,22	0,48	M^3	1.560.372,79	748.978,94
-	Pek. Lantai Keramik Polis 40 x 40 cm	156,97	146,75	10,22	M^2	247.115,00	2.525.515,30
5	**Pekerjaan Kayu dan Kaca**					**Jumlah Total =**	**358.294,75**
-	Pek. Kusen Kayu Kls II (5/11)	0,88	0,83	0,05	M^3	7.027.350,00	351.367,50
-	Pek. Daun Pintu Panil Kayu Kls II	5,04	5,03	0,01	M^2	692.725,00	6.927,25
6	**Pekerjaan Instalasi Listrik**					**Jumlah Total =**	**536.500,00**
-	Pasang Instalasi Listrik	12,00	10,00	2,00	Bh	206.250,00	412.500,00
-	Pasang Saklar Ganda	4,00	2,00	2,00	Bh	62.000,00	124.000,00
Jumlah Total Kurang Volume(1 s.d. 6) =							**27.454.617,06**

Rincian Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas SDK Kalembu Kutura

No	Item Pekerjaan	Volume CCO	Volume Periksa	Selisih Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
a	b	c	d	e = c - d	f	g	h = e x g
1	**Pekerjaan Tanah dan Urugan**					**Jumlah Total =**	**5.663.210,65**
-	Urugan Sirtu peninggi Lantai	79,09	53,55	25,54	M^3	217.292,50	5.549.650,45
-	Urugan Pasir dibawah lantai	3,58	3,06	0,52	M^3	218.385,00	113.560,20
2	**Pekerjaan Pasangan dan Plesteran**					**Jumlah Total =**	**4.501.303,95**
-	Pasangan tembok biasa 1 Pc 5 Psr	11,98	10,40	1,58	M^3	1.285.205,50	2.030.624,69
-	Plesteran tembok biasa 1 pc 5 psr (Tbl 15 mm)	160,92	136,60	24,32	M^2	67.176,68	1.633.736,86
-	Acian Tembok	160,92	136,60	24,32	M^2	34.413,75	836.942,40
3	**Pekerjaan Beton**					**Jumlah Total =**	**762.261,18**
-	Pek. *Sloof* 15/20 cm						
	Beton K.225	0,66	0,64	0,02	M^3	1.729.019,25	34.580,39
	Besi Tulg. Pokok Ø 12	80,81	80,42	0,39	Kg	34.569,00	13.481,91
-	Pek. Kolom Struktur 15/20 cm						
	Beton K.225	0,65	0,54	0,11	M^3	1.729.019,25	190.192,12
	Besi Tulg. Pokok Ø 12	76,90	73,69	3,21	Kg	34.569,00	110.966,49
	Bekisting (2 x pakai)	4,32	4,14	0,18	M^2	373.198,00	67.175,64
-	Pek. Kolom Teras 20/20 cm						
	Beton K.225	1,12	1,05	0,07	M^3	1.729.019,25	121.031,35
	Besi Tulg. Pokok Ø 12	99,68	97,44	2,24	Kg	34.569,00	77.434,56
	Bekisting (2 x pakai)	11,20	10,95	0,25	M^2	373.198,00	93.299,50
-	Pek. Balok Gantung Teras 15/20 cm						
	Bekisting (2 x pakai)	8,56	8,42	0,14	M^2	386.423,00	54.099,22
4	**Pekerjaan Lantai**					**Jumlah Total =**	**1.226.039,38**
-	Pek. Lantai Rabat Tebal 5 cm	8,97	8,41	0,56	M^3	1.696.704,25	950.154,38
-	Pek. Lantai Keramik Polis 40 x 40 cm	153,68	152,68	1,00	M^2	275.885,00	275.885,00
5	**Pekerjaan Kayu dan Kaca**					**Jumlah Total =**	**1.500.383,49**
-	Pek. Kusen Kayu Kls II (5/11)	0,76	0,66	0,10	M^3	7.333.550,00	733.355,00
-	Pek. Daun Pintu Panil Kayu Kls II	5,80	5,22	0,58	M^2	721.050,00	418.209,00
-	Pek. Jendela Panil Kaca Polos 5 mm	15,18	14,84	0,34	M^2	749.922,76	254.973,74
-	Pek. Papan Ventilasi/Jelusi	0,28	0,26	0,02	M^2	4.692.287,50	93.845,75
6	**Pekerjaan Alat-alat Penggantung**					**Jumlah Total =**	**518.765,00**
-	Grendel Jendela	24,00	20,00	4,00	Bh	45.425,00	181.700,00
-	Pas. Engsel Jendela	24,00	20,00	4,00	Psg	48.156,25	192.625,00
-	Pas. Kait Angin	24,00	20,00	4,00	Psg	36.110,00	144.440,00
7	**Pekerjaan Cat dan Laburan**					**Jumlah Total =**	**531.364,63**
-	Meni Kayu	26,46	25,07	1,39	M^2	29.164,00	40.537,96
-	Cat kayu kosen	26,46	25,07	1,39	M^2	65.578,75	91.154,46
-	Cat Papan Panil Jendela	15,82	11,25	4,57	M^2	65.578,75	299.694,89
-	Cat Papan Panil pintu	11,59	10,43	1,16	M^2	65.578,75	76.071,35
-	Cat Papan Jelusi	13,68	13,51	0,17	M^2	65.578,75	11.148,39
-	Cat Tembok	863,47	863,08	0,39	M^2	32.711,75	12.757,58
Jumlah Total Kurang Volume (1 s.d. 7) =							**14.703.328,28**

Rincian Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas
SMP Katolik Palla

No	Uraian Jenis Pekerjaan	Volume CCO	Volume Periksa	Selisih Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
a	b	c	d	e = c - d	f	g	h = e x g
A	**Rehabilitasi 1 Ruang Gedung A**						
1	**Pekerjaan Galian dan Timbunan**					**Jumlah Total =**	**216.055,95**
-	Pek. Galian Tanah Pondasi	7,75	7,15	0,60	M^3	59.125,00	35.475,00
-	Pek. Urugan Pasir dibawah pondasi	0,78	0,72	0,06	M^3	220.550,00	13.233,00
-	Pek. Urugan tanah bekas galian	1,94	1,82	0,12	M^3	14.066,25	1.687,95
-	Pek. Urugan Sirtu peninggi lantai	11,78	10,98	0,80	M^3	207.075,00	165.660,00
2	**Pekerjaan Pasangan, Pondasi dan Plesteran**					**Jumlah Total =**	**1.248.144,81**
-	Pek. Pasangan Aanstamping Batu karang	2,33	2,15	0,18	M^3	292.050,00	52.569,00
-	Pek. Pasangan Pondasi batu karang Selasar Camp.1pc:4psr	8,29	7,83	0,46	M^3	1.051.710,00	483.786,60
-	Pekerjaan Beton Bertulang						
-	Pek. Pasangan Tembok Batu Potong 1 pc : 5 psr	1,66	1,43	0,23	M^3	1.169.245,00	268.926,35
-	Pek. Plesteran Dinding Tembok 1pc : 5 psr	38,40	33,80	4,60	M^2	56.122,00	258.161,20
-	Pek. Plesteran Pondasi 1pc : 5 psr	18,60	17,57	1,03	M^2	56.122,00	57.805,66
-	Pek. Acian	38,40	33,80	4,60	M^2	22.660,00	104.236,00
-	Pek. Acian Pondasi	18,60	17,60	1,00	M^2	22.660,00	22.660,00
3	**Pekerjaan Kayu, Kusen Pintu, Jendela dan Atap**					**Jumlah Total =**	**44.495,00**
-	Pek. Kusen pintu, jendela	0,37	0,36	0,01	M^3	4.449.500,00	44.495,00
4	**Pekerjaan Lantai, Plafon dan Cat**					**Jumlah Total =**	**3.047.357,50**
-	Pek. Lantai Beton Rabat 1pc:3psr:5krl (tbl.5cm)	1,24	1,14	0,10	M^2	1.280.620,00	128.062,00
-	Pek. Lantai Keramik 30 x 30 cm	78,62	78,41	0,21	M^2	174.350,00	36.613,50
-	Pek. Pas. Plafon PVC + Rangka Hollow 4x4/4x2	109,52	99,17	10,35	M^2	278.520,00	2.882.682,00
5	**Pekerjaan Lain-lain**			-		**Jumlah Total =**	**319.576,65**
-	Pek. Saluran Keliling Bangunan Type 20/25	31,00	28,61	2,39	M'	133.714,08	319.576,65
B	**Rehabilitasi 2 Ruang Gedung B**			-			
6	**Pekerjaan Galian dan Timbunan**			-		**Jumlah Total =**	**2.297.845,00**
-	Pek. Urugan Pasir dibawah pondasi	1,18	0,77	0,41	M^3	220.550,00	90.425,50
-	Pek. Urugan Sirtu peninggi lantai	17,86	7,20	10,66	M^3	207.075,00	2.207.419,50
7	**Pekerjaan Pasangan Pondasi dan Plesteran**			-		**Jumlah Total =**	**3.921.215,41**
-	Pek. Pasangan Aanstamping Batu karang	3,53	2,64	0,89	M^3	292.050,00	259.924,50
-	Pek. Pasangan Pondasi batu karang Camp.1pc:4psr	11,36	8,36	3,00	M^3	1.051.710,00	3.155.130,00
-	Pekerjaan Beton Bertulang						
	- Beton Ringbalk 15/20	1,71	1,70	0,01	M^3	6.747.431,43	67.474,31
-	Pek. Plesteran Pondasi 1pc : 5 psr	60,00	54,40	5,60	M^2	56.122,00	314.283,20
-	Pek. Acian Pondasi	60,00	54,51	5,49	M^2	22.660,00	124.403,40
8	**Pekerjaan Kayu, Kusen Pintu, Jendela dan Atap**					**Jumlah Total =**	**133.485,00**
-	Pek. Kusen pintu, jendela dan Lubang Angin	0,75	0,72	0,03	M^3	4.449.500,00	133.485,00
9	**Pekerjaan *Meubelair***					**Jumlah Total =**	**2.850.000,00**
-	Meja Siswa Tunggal	55,00	52,00	3,00	Bh	600.000,00	1.800.000,00
-	Kursi Siswa	55,00	52,00	3,00	Bh	350.000,00	1.050.000,00
C	**Rehabilitasi 1 Ruang Gedung C**						
10	**Pekerjaan Galian dan Timbunan**					**Jumlah Total =**	**102.849,45**
-	Pek. Galian Tanah Pondasi	7,75	7,27	0,48	M^3	59.125,00	28.380,00
-	Pek. Urugan Pasir dibawah pondasi	0,78	0,45	0,33	M^3	220.550,00	72.781,50
-	Pek. Urugan tanah bekas galian	1,94	1,82	0,12	M^3	14.066,25	1.687,95
11	**Pekerjaan Pasangan, Pondasi dan Plesteran**			-		**Jumlah Total =**	**1.297.918,88**
-	Pek. Pasangan Aanstamping Batu karang	2,33	1,33	1,00	M^3	292.050,00	292.050,00
-	Pek. Pasangan Pondasi batu karang Camp.1pc:4psr	5,81	5,09	0,72	M^3	1.051.710,00	757.231,20
-	Pekerjaan Beton Bertulang						
	- Beton Sloof 15/20	0,39	0,38	0,01	M^3	6.038.778,96	60.387,79
	- Beton Kolom Teras 20/20	0,31	0,30	0,01	M^3	6.038.778,96	60.387,79
	- Beton Ringbalk 15/20	0,96	0,95	0,01	M^3	6.747.431,43	67.474,31
	- Beton Balok Gantung 15/20	0,39	0,38	0,01	M^3	6.038.778,96	60.387,79
12	**Pekerjaan Kayu, Kusen Pintu, Jendela dan Atap**			-		**Jumlah Total =**	**44.495,00**
-	Pek. Kusen pintu, jendela dan Lubang Angin	0,37	0,36	0,01	M^3	4.449.500,00	44.495,00
13	**Pekerjaan Lantai, Plafon, dan Cat**			-		**Jumlah Total =**	**627.660,00**
-	Pek. Lantai Keramik 30 x 30 cm	18,00	14,40	3,60	M^2	174.350,00	627.660,00
Jumlah Total Kurang Volume (1 s.d. 13) =							**16.151.098,65**

Lampiran 8

Rincian Kekurangan Volume atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas
SMP Kristen Waimangura

No	Item Pekerjaan	Volume CCO	Volume Periksa	Selisih Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
a	b	c	d	e = c - d	f	g	h = e x g
1	**Pekerjaan Pasangan, Pondasi dan Plesteran**					**Jumlah Total =**	**8.104.690,57**
-	Pekerjaan Beton Bertulang						
	- Beton Sloof 15/20	3,8	3,74	0,06	M^3	6.084.390,79	365.063,45
	- Beton Kolom Struktur 15/20	2,16	2,13	0,03	M^3	6.796.723,55	203.901,71
	- Beton Kolom Praktis 15/15	0,45	0,44	0,01	M^3	6.796.723,55	67.967,24
	- Beton Ringbalk 15/20	2,59	2,54	0,05	M^3	6.796.723,55	339.836,18
	- Beton Balok Gantung 15/20	0,96	0,94	0,02	M^3	6.084.390,79	121.687,82
-	Pek. Pasangan Tembok Batu Potong 1 pc : 5 psr	33,28	28,37	4,91	M^3	1.407.710,34	6.911.857,77
-	Pek. Plesteran Pondasi 1pc : 5 psr	38	36,87	1,13	M^2	61.014,88	68.946,81
-	Pek. Acian Pondasi	38	36,82	1,18	M^2	21.550,50	25.429,59
2	**Pekerjaan Kayu, Kusen Pintu, Jendela dan Atap**					**Jumlah Total =**	**1.103.544,26**
-	Pek. Kusen pintu, jendela dan Lubang Angin	1,23	1,06	0,17	M^3	6.491.436,85	1.103.544,26
3	**Pekerjaan Lantai, Plafon dan Cat**					**Jumlah Total =**	**4.894.068,31**
-	Pek. Lantai Keramik 30 x 30 cm	268,8	251,06	17,74	M^2	178.090,10	3.159.318,37
-	Pek. Pas. Plafon PVC + Rangka Hollow 4x4/4x2	316,93	310,07	6,86	M^2	252.879,00	1.734.749,94
4	**Pekerjaan Lain-lain**					**Jumlah Total =**	**2.158.069,79**
-	Pek. Saluran Keliling Bangunan Type 20/25	81	75,89	5,11	M	128.780,78	658.069,79
-	Pek. Pas. Plakat	1	0	1	Bh	1.000.000,00	1.000.000,00
-	Pek. Pembersihan sisa -sisa bahan & pengangkutan	1	0	1	Ls	500.000,00	500.000,00
Jumlah Total Kurang Volume (1 s.d. 4) =							**16.260.372,93**

Lampiran 9

Rincian Kelebihan Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

No	Nama	NIP	Jabatan/Eselon	Batas Keikutsertaan Tim yang Dapat Diberikan Honor (per bulan)	Total Kelebihan Pembayaran (Rp)
A	**Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah**			**Jumlah total**	**116.850.375,00**
1	OD	19731004xxxxxxxx	II	4	34.793.333,33
2	RYM	19700326xxxxxxxx	III	5	24.844.791,67
3	MUU	19840309xxxxxxxx	III	5	11.916.166,67
4	JYB	19830616xxxxxxxx	III	5	10.918.250,00
5	TYWP	19760603xxxxxxxx	III	5	9.379.666,67
6	HD	19840315xxxxxxxx	III	5	7.865.333,33
7	IL	19771017xxxxxxxx	III	5	2.547.166,67
8	RJN	19820630xxxxxxxx	Fungsional	7	5.240.833,33
9	OR	19871019xxxxxxxx	Fungsional	7	4.533.083,33
10	MWL	19940706xxxxxxxx	Fungsional	7	2.816.750,00
11	OL	19851024xxxxxxxx	Fungsional	7	1.995.000,00
B	**Sekretariat Daerah**			**Jumlah total**	**37.626.666,67**
1	LNG	19650526xxxxxxxx	II	4	29.941.250,00
2	DB	19640709xxxxxxxx	II	4	5.666.666,67
3	CH	19680225xxxxxxxx	II	4	2.018.750,00
C	**Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan**			**Jumlah total**	**7.692.500,00**
1	AP	19670829xxxxxxxx	II	4	6.545.000,00
2	HBB	19780417xxxxxxxx	III	5	1.147.500,00
Jumlah (A+B+C)					**162.169.541,67**

Lampiran 10

Rincian Kelebihan Pembayaran Honorarium Panitia

No.	Nama	NIP	Kelebihan Pembayaran Honorarium (Rp)
A	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**		**22.882.500,00**
1	WYM	19720417xxxxxxxx	882.500,00
2	AWM	19650428xxxxxxxx	365.000,00
3	ALB	19790802xxxxxxxx	2.640.000,00
4	EID	19930415xxxxxxxx	365.000,00
5	IGE	19890102xxxxxxxx	730.000,00
6	IPS	19950505xxxxxxxx	857.500,00
7	LSM	19940825xxxxxxxx	2.682.500,00
8	MID	19810628xxxxxxxx	2.600.000,00
9	PAS	19750513xxxxxxxx	3.015.000,00
10	PDT	19790228xxxxxxxx	2.190.000,00
11	SRH	19920916xxxxxxxx	2.682.500,00
12	SRA	19840612xxxxxxxx	365.000,00
13	VY	19670125xxxxxxxx	730.000,00
14	YTD	19820606xxxxxxxx	2.777.500,00
B	**BKPSDM**		**14.632.500,00**
1	AKK	19970301xxxxxxxx	1.095.000,00
2	AYN	19850731xxxxxxxx	265.000,00
3	BQF	19880331xxxxxxxx	502.500,00
4	CSP	19840512xxxxxxxx	1.095.000,00
5	EMM	19671231xxxxxxxx	1.547.500,00
6	FXK	19910928xxxxxxxx	365.000,00
7	GB	19860910xxxxxxxx	407.500,00
8	HCN	19961021xxxxxxxx	1.095.000,00
9	HYM	19860428xxxxxxxx	365.000,00
10	HFT	19880115xxxxxxxx	1.232.500,00
11	MMS	19830724xxxxxxxx	357.500,00
12	MTA	19681125xxxxxxxx	570.000,00
13	PNM	19750530xxxxxxxx	910.000,00
14	VPS	19831121xxxxxxxx	407.500,00
15	YMN	19831027xxxxxxxx	1.140.000,00
16	YNN	19880501xxxxxxxx	365.000,00
17	YP	19680322xxxxxxxx	1.310.000,00
18	YGS	19810715xxxxxxxx	365.000,00
19	YZN	19780228xxxxxxxx	1.237.500,00
C	**Sekretariat Daerah**		**1.770.000,00**
1	CH	19680225xxxxxxxx	1.770.000,00
Jumlah (A+B+C)			**39.285.000,00**

A. Rekapitulasi Personel Konsultan Lebih Bayar Berdasarkan SKPD dan Kontrak

No	Kontrak	Nama Personel	Honor Perbulan (Rp)	Jumlah Bulan Kelebihan	Jumlah Kelebihan Pembayaran (Rp)
A	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				**84.115.680,00**
1	Pengawasan Long Segmen Jalan Tanggaba - Tanggo'o	AWN	4.928.400,00	3	14.785.200,00
		KBD	6.899.760,00	2	13.799.520,00
2	Pengawasan Long Segmen Jalan Sp. Waimangura - Leteloko	HIA	2.443.000,00	2	4.886.000,00
		IDM	2.932.000,00	1	2.932.000,00
		JF	2.932.000,00	2	5.864.000,00
3	Pengawasan Peningkatan jaringan Irigasi TA. 2024	JWL	3.435.000,00	1	3.435.000,00
4	Pengawasan Long Segmen Jalan Dalam Kota Tambolaka	JAB	3.681.870,00	8	29.454.960,00
5	Pengawasan Jalan Wego - Bolora	LPA	2.932.000,00	2	5.864.000,00
6	Pengawasan Long Segmen Jalan Weekapoda - Kikukarambo	TR	3.095.000,00	1	3.095.000,00
B	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**				**15.583.333,34**
1	Pembayaran belanja jasa konsultan pengawasan rehabilitasi toilet SD (DAK 100%) Tahun 2024	FAU	916.666,67	2	1.833.333,34
		NPA	833.333,33	2	1.666.666,66
		SAM	750.000,00	2	1.500.000,00
		YRK	2.666.666,67	2	5.333.333,34
2	Pembayaran Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya (DAU SG 100 %) Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan TA. 2024	FAU	1.600.000,00	1	1.600.000,00
		NPA	1.100.000,00	1	1.100.000,00
		SAM	950.000,00	1	950.000,00
		YRK	1.600.000,00	1	1.600.000,00
	Jumlah (A+B)				**99.699.013,34**

B. Rincian Personel Konsultan Lebih Bayar

No	Nama Personel	Nama SKPD	Tgl Kontrak	No Kontrak	Uraian Kontrak	Nama Perusahaan	Nilai Kontrak (Rp)	Jenis Kontrak	Jenis Lelang	Jabatan Personel	Tanggal Mulai	Tanggal selesai	Jumlah Honor (Rp)	Jumlah Bulan	Honor Perbulan (Rp)	Jumlah Bulan Kelebihan	Jumlah Kelebihan Pembayaran (Rp)
1	AWN	Dinas Perindsutrian dan Perdagangan	01-Nov-24	10/PPK-DPP/SBD/XI/2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pasar Radamata, Pasar Waimangura dan Pasar Bondo Kodi	CV. ADP	40.000.000,00	Lumpsum	Pengadaan Langsung	Tenaga Penunjang - Surveyor	01/11/2024	30/11/2024	5.486.250,00	1			
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19-Jun-24	615/PPK.CK/PUPR/SBD/VI/2024	JASA KONSULTANSI PERENCANAAN SPAM TA. 2025	CV. ADP	247.391.250,00	Lumpsum	Lelang	Surveyor	19/06/2024	15/11/2024	4.125.000,00	5			
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26-Jan-24	039/PPK-BM/PUPR/SBD/I/2024	Pengawasan Long Segmen Jalan Tanggaba - Tanggo'o	CV. KAD	306.475.440,00	Waktu Penugasan	Seleksi	Inspector 2	29/01/2024	24/09/2024	39.427.200,00	8	4.928.400,00	3	14.785.200,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22-Jul-24	1138/PPK-BM/PUPR/SBD/VII/2024	Konsultansi Perencanaan Jalan TA 2025 (DAK Penugasan dan Reguler)	CV. MD	198.392.520,00	Lumpsum	Seleksi	Asisten Surveyor 2	22/07/2024	18/11/2024	19.713.600,00	4			

B. Rincian Personel Konsultan Lebih Bayar

No	Nama Personel	Nama SKPD	Tgl Kontrak	No Kontrak	Uraian Kontrak	Nama Perusahaan	Nilai Kontrak (Rp)	Jenis Kontrak	Jenis Lelang	Jabatan Personel	Tanggal Mulai	Tanggal selesai	Jumlah Honor (Rp)	Jumlah Bulan	Honor Perbulan (Rp)	Jumlah Bulan Kelebihan	Jumlah Kelebihan Pembayaran (Rp)
2	FAU	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	02-Apr-24	695/PPK/PK/SBD/IV/2024	Pembayaran belanja jasa konsultan pengawasan rehabilitasi toilet SD (DAK 100%) Tahun 2024	CV. AT	40.000.000,00	Lumpsum	Penunjukan langsung	Drafman	02/04/2024	31/07/2024	2.750.000,00	3	916.666,67	2	1.833.333,34
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	29-Apr-24	679/PPK/PK/SBD/IV/2024	Pembayaran belanja jasa konsultan pengawasan pembangunan ruang tata usaha SMP (DAK 100%) TA. 2024	CV. AT	95.000.000,00	Lumpsum	Penunjukan langsung	Inspector	29/04/2024	26/08/2024	9.600.000,00	4			
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	29-Apr-24	696/PPK/PK/SBD/IV/2024	Pembayaran belanja jasa konsultan pengawasan pembangunan ruang guru SD (DAK 100%) Tahun 2024	CV. AT	90.000.000,00	Lumpsum	Penunjukan langsung	Inspector	29/04/2024	26/08/2024	8.250.000,00	4			
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	29-Apr-24	119/PPK/PK/SBD/IV/2024	Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya Sekolah PAUD DAU SG 100% TA 2024 Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV. AT	70.000.000,00	Lumpsum	Penunjukan langsung	Asisten Surveyor 1	29/04/2024	27/06/2024	5.500.000,00	2			
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	19-Jul-24	1939/PPK/PK/SBD/VII/2024	Pembayaran Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya (DAU SG 100 %) Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan TA. 2024	CV. AT	60.000.000,00	Lumpsum	Penunjukan langsung	Inspector	19/07/2024	15/11/2024	6.400.000,00	4	1.600.000,00	1	1.600.000,00
3	HIA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29-Jul-24	1174/PPK-BM/PUPR/SBD/VII/2024	Survey Kondisi Jalan Kabupaten	CV. D	896.924.400,00	Lumpsum	Seleksi	Operator Komputer	29/07/2024	25/11/2024	6.520.000,00	4			
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26-Jan-24	038/PPK-BM/PUPR/SBD/I/2024	Pengawasan Long Segmen Jalan Sp. Waimangura - Leteloko	CV. D	511.874.280,00	Waktu Penugasan	Seleksi	Administrasi Keuangan	29/01/2024	24/09/2024	19.544.000,00	8	2.443.000,00	2	4.886.000,00
4	IDM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26-Jan-24	038/PPK-BM/PUPR/SBD/I/2024	Pengawasan Long Segmen Jalan Sp. Waimangura - Leteloko	CV. D	511.874.280,00	Waktu Penugasan	Seleksi	Inspector 2	29/01/2024	24/09/2024	23.456.000,00	8	2.932.000,00	1	2.932.000,00
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	24-Sep-24	1859/PPK/PK/SBD/IX/2024	Pembayaran belanja jasa konsultan pengawasan pembangunan ruang kelas baru DAU SG SMP (DAU SG 100%) Tahun 2024	CV. ITP	90.000.000,00	Lumpsum	Penunjukan langsung	inspector	24/09/2024	22/11/2024	6.400.000,00	2			
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	08-Jan-24	147/PPK/PK/SBD/I/2024	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	CV. S	100.000.000,00	Lumpsum	Penunjukan langsung	surveyor	08/01/2024	05/02/2024	18.000.000,00	1			
5	JWL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27-Feb-24	611/41/PPK-SDA/PUPR/SBD/II/2024	Pengawasan Peningkatan jaringan Irigasi TA. 2024	CV. CKE	99.900.000,00	Waktu Penugasan	Pengadaan Langsung	Inspektor	27/02/2024	25/07/2024	Rp17.175.000	5	Rp3.435.000	1	Rp3.435.000
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	04-Mar-24	129/PPK/PK/SBD/III/2024	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya DAk 2024 SMP (DAU SG 100%) TA. 2024	CV. ME	100.000.000,00	Lumpsum	Penunjukan langsung	surveyor	04/03/2024	17/04/2024	15.627.000,00	2			
6	JAB	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26-Jan-24	037/PPK-BM/PUPR/SBD/I/2024	Pengawasan Long Segmen Jalan Dalam Kota Tambolaka	CV. KPK	205.930.530,00	Waktu Penugasan	Seleksi	Inspector 1	29/01/2024	24/09/2024	29.454.960,00	8	3.681.870,00	8	29.454.960,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22-Jul-24	1138/PPK-BM/PUPR/SBD/VII/2024	Konsultansi Perencanaan Jalan TA 2025 (DAK Penugasan dan Reguler)	CV. MD	198.392.520,00	Lumpsum	Seleksi	Asisten Surveyor 1	22/07/2024	18/11/2024	19.713.600,00	4			
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29/01/2024	77/PPK.CK/PUPR/SBD/I/2024	Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan dan Perluasan SPAM (DAK)	CV. MD	349.534.560,00	Lumpsum	Lelang	Inspektor	29/01/2024	25/08/2024	4.440.000,00	7			
7	JF	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26-Jan-24	038/PPK-BM/PUPR/SBD/I/2024	Pengawasan Long Segmen Jalan Sp. Waimangura - Leteloko	CV. D	511.874.280,00	Waktu Penugasan	Seleksi	Inspector 1	29/01/2024	24/09/2024	23.456.000,00	8	2.932.000,00	2	5.864.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29-Jul-24	1174/PPK-BM/PUPR/SBD/VII/2024	Survey Kondisi Jalan Kabupaten	CV. D	896.924.400,00	Lumpsum	Seleksi	Surveyor 2	29/07/2024	25/11/2024	13.080.000,00	4			

B. Rincian Personel Konsultan Lebih Bayar

No	Nama Personel	Nama SKPD	Tgl Kontrak	No Kontrak	Uraian Kontrak	Nama Perusahaan	Nilai Kontrak (Rp)	Jenis Kontrak	Jenis Lelang	Jabatan Personel	Tanggal Mulai	Tanggal selesai	Jumlah Honor (Rp)	Jumlah Bulan	Honor Perbulan (Rp)	Jumlah Bulan Kelebihan	Jumlah Kelebihan Pembayaran (Rp)
8	KBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22-Jul-24	1138/PPK-BM/PUPR/SBD/VII/2024	Konsultansi Perencanaan Jalan TA 2025 (DAK Penugasan dan Reguler)	CV. MD	198.392.520,00	Lumpsum	Seleksi	Team Leader	22/07/2024	18/11/2024	31.541.760,00	4			
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26-Jan-24	039/PPK-BM/PUPR/SBD/I/2024	Pengawasan Long Segmen Jalan Tanggaba - Tanggo'o	CV. KAD	306.475.440,00	Waktu Penugasan	Seleksi	Chief Inspector	29/01/2024	24/09/2024	55.198.080,00	8	6.899.760,00	2	13.799.520,00
9	LPA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12-Feb-24	124/PPK-BM/PUPR/SBD/II/2024	Pengawasan Jalan Wego - Bolora	CV. D	69.987.720,00	Waktu Penugasan	Pengadaan Langsung	Team Leader	12/02/2024	08/09/2024	20.524.000,00	7	2.932.000,00	2	5.864.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29-Jul-24	1174/PPK-BM/PUPR/SBD/VII/2024	Survey Kondisi Jalan Kabupaten	CV. D	896.924.400,00	Lumpsum	Seleksi	Surveyor 1	29/07/2024	25/11/2024	13.080.000,00	4			
10	NPA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	02-Apr-24	695/PPK/PK/SBD/IV/2024	Pembayaran belanja jasa konsultan pengawasan rehabilitasi toilet SD (DAK 100%) Tahun 2024	CV. AT	40.000.000,00	Lumpsum	Penunjukan langsung	Administrasi & Keuangan	02/04/2024	31/07/2024	2.500.000,00	3	833.333,33	2	1.666.666,66
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	29-Apr-24	679/PPK/PK/SBD/IV/2024	Pembayaran belanja jasa konsultan pengawasan pembangunan ruang tata usaha SMP (DAK 100%) TA. 2024	CV. AT	95.000.000,00	Lumpsum	Penunjukan langsung	Administrasi & Keuangan	29/04/2024	26/08/2024	6.000.000,00	4			
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	29-Apr-24	696/PPK/PK/SBD/IV/2024	Pembayaran belanja jasa konsultan pengawasan pembangunan ruang guru SD (DAK 100%) Tahun 2024	CV. AT	90.000.000,00	Lumpsum	Penunjukan langsung	Administrasi & Keuangan	29/04/2024	26/08/2024	6.000.000,00	4			
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	29-Apr-24	119/PPK/PK/SBD/IV/2024	Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya Sekolah PAUD DAU SG 100% TA 2024 Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV. AT	70.000.000,00	Lumpsum	Penunjukan langsung	Administrasi & Keuangan	29/04/2024	27/06/2024	4.000.000,00	2			-
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	19-Jul-24	1939/PPK/PK/SBD/VII/2024	Pembayaran Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya (DAU SG 100 %) Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan TA. 2024	CV. AT	60.000.000,00	Lumpsum	Penunjukan langsung	Administrasi & Keuangan	19/07/2024	15/11/2024	4.400.000,00	4	1.100.000,00	1	1.100.000,00
11	SAM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	02-Apr-24	695/PPK/PK/SBD/IV/2024	Pembayaran belanja jasa konsultan pengawasan rehabilitasi toilet SD (DAK 100%) Tahun 2024	CV. AT	40.000.000,00	Lumpsum	Penunjukan langsung	Operator Komputer	02/04/2024	31/07/2024	2.250.000,00	3	750.000,00	2	1.500.000,00
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	29-Apr-24	679/PPK/PK/SBD/IV/2024	Pembayaran belanja jasa konsultan pengawasan pembangunan ruang tata usaha SMP (DAK 100%) TA. 2024	CV. AT	95.000.000,00	Lumpsum	Penunjukan langsung	Operator Komputer	29/04/2024	26/08/2024	5.200.000,00	4			
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	29-Apr-24	696/PPK/PK/SBD/IV/2024	Pembayaran belanja jasa konsultan pengawasan pembangunan ruang guru SD (DAK 100%) Tahun 2024	CV. AT	90.000.000,00	Lumpsum	Penunjukan langsung	Operator Komputer	29/04/2024	26/08/2024	5.000.000,00	4			
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	29-Apr-24	119/PPK/PK/SBD/IV/2024	Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya Sekolah PAUD DAU SG 100% TA 2024 Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV. AT	70.000.000,00	Lumpsum	Penunjukan langsung	Drafter	29/04/2024	27/06/2024	5.000.000,00	2			
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	19 Juli 2024	1939/PPK/PK/SBD/VII/2024	Pembayaran Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya (DAU SG 100 %) Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan TA. 2024	CV. AT	60.000.000,00	Lumpsum	Penunjukan langsung	Operator Komputer	19/07/2024	15/11/2024	3.800.000,00	4	950.000,00	1	950.000,00
12	TR	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	09-Jan-24	143/PPK/PK/SBD/I/2024	Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Toilet/Jamban SD	CV. S	70.000.000,00	Lumpsum	Penunjukan langsung	menejer administrasi	08/01/2024	05/02/2024	4.600.000,00	1			
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	09-Jan-24	157/PPK/PK/SBD/I/2024	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP	CV. ITP	100.000.000,00	Lumpsum	Penunjukan langsung	asiten surveyor	08/01/2024	05/02/2024	15.000.000,00	1			
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26-Jan-24	036/PPK-BM/PUPR/SBD/I/2024	Pengawasan Long Segmen Jalan Weekapoda - Kikukarambo	CV. EE	296.711.880,00	Waktu Penugasan	Seleksi	Inspector 1	29/01/2024	24/09/2024	24.760.000,00	8	3.095.000,00	1	3.095.000,00

B. Rincian Personel Konsultan Lebih Bayar

No	Nama Personel	Nama SKPD	Tgl Kontrak	No Kontrak	Uraian Kontrak	Nama Perusahaan	Nilai Kontrak (Rp)	Jenis Kontrak	Jenis Lelang	Jabatan Personel	Tanggal Mulai	Tanggal selesai	Jumlah Honor (Rp)	Jumlah Bulan	Honor Perbulan (Rp)	Jumlah Bulan Kelebihan	Jumlah Kelebihan Pembayaran (Rp)
13	YRK	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	02-Apr-24	695/PPK/PK/SBD/IV/2024	Pembayaran belanja jasa konsultan pengawasan rehabilitasi toilet SD (DAK 100%) Tahun 2024	CV. AT	40.000.000,00	Lumpsum	Penunjukan langsung	Inspector	02/04/2024	31/07/2024	8.000.000,00	3	2.666.666,67	2	5.333.333,34
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	29-Apr-24	679/PPK/PK/SBD/IV/2024	Pembayaran belanja jasa konsultan pengawasan pembangunan ruang tata usaha SMP (DAK 100%) TA. 2024	CV. AT	95.000.000,00	Lumpsum	Penunjukan langsung	Inspector	29/04/2024	26/08/2024	9.600.000,00	4			
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	29-Apr-24	696/PPK/PK/SBD/IV/2024	Pembayaran belanja jasa konsultan pengawasan pembangunan ruang guru SD (DAK 100%) Tahun 2024	CV. AT	90.000.000,00	Lumpsum	Penunjukan langsung	Inspector	29/04/2024	26/08/2024	8.250.000,00	4			
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	29-Apr-24	119/PPK/PK/SBD/IV/2024	Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya Sekolah PAUD DAU SG 100% TA 2024 Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	CV. AT	70.000.000,00	Lumpsum	Penunjukan langsung	Surveyor	29/04/2024	27/06/2024	9.000.000,00	2			
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	19-Jul-24	1939/PPK/PK/SBD/VII/2024	Pembayaran Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya (DAU SG 100 %) Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan TA. 2024	CV. AT	60.000.000,00	Lumpsum	Penunjukan langsung	Inspector	19/07/2024	15/11/2024	6.400.000,00	4	1.600.000,00	1	1.600.000,00
Jumlah																	**99.699.013,34**

Lampiran 12

Rekapitulasi Kelebihan Jasa Pelayanan Kesehatan per Puskesmas

No	Nama Puskesmas	Jumlah Total Pegawai Puskesmas	Jumlah Pegawai Lebih Bayar Tahun 2024	Total Lebih Bayar Tahun 2024 (Rp)
1	Puskesmas Werilolo	70	70	62.079.911,71
2	Puskesmas Deludepa	83	83	78.425.116,80
3	Puskesmas Billa Cenge	106	106	146.144.540,22
4	Puskesmas Panenggo Ede	94	94	208.483.316,10
5	Puskesmas Weekombak	96	96	164.596.677,50
6	Puskesmas Kawango Hari	92	92	94.885.941,02
7	Puskesmas Tena Teke	129	129	122.223.613,57
8	Puskesmas Waimangura	140	140	109.658.998,08
9	Puskesmas Palla	79	79	114.974.950,18
10	Puskesmas Elopada	159	159	88.046.883,08
11	Puskesmas Radamata	178	178	146.308.581,46
12	Puskesmas Watukawula	178	178	303.622.312,98
13	Puskesmas Walla Ndimu	81	81	91.585.904,60
14	Puskesmas Bondo Kodi	119	119	83.538.564,18
15	Puskesmas Tanggaba	149	149	203.743.553,27
16	Puskesmas Kori	108	108	110.590.302,79
Total		**1861**	**1861**	**2.128.909.167,54**

Lampiran 13

Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Lebih bayar Tahun 2024 (Rp)
A	**Puskesmas Werilolo**			**62.079.911,71**
1	AMR	Perawat Dan Profesi	S1-Ners	1.602.264,50
2	AHM	Kepala Puskesmas	S2	1.496.283,36
3	AML	Kesmas	S1	1.052.792,18
4	AHB	Bidan	S1	829.874,72
5	AMS	Perawat Dan Profesi	S1-Ners	1.786.925,28
6	ABT	Bidan	D3	677.599,25
7	ASA	Rekam Medis	D3	504.880,50
8	BAL	Analis	D3	603.886,38
9	DJN	Bidan	D3	669.022,05
10	DNR	Perawat Dan Profesi	S1-Ners	1.807.452,37
11	DPB	Penjaga Malam	SMA	452.700,95
12	DFM	Dokter Umum	D3	394.017,14
13	DMR	Dokter Umum	S1	1.238.485,64
14	EYN	Bidan	D3	623.521,63
15	EYN	Bidan	D3	168.240,37
16	EMB	Rekam Medis	D3	1.410.467,71
17	EIK	Perawat	S1	1.321.191,05
18	EGA	Perawat	D3	688.335,56
19	EDS	Kesmas	S1	631.884,28
20	EYA	Bidan	D3	956.775,46
21	FEA	Sanitarian	D3	907.133,99
22	GJE	Pramu Kebersihan	SMA	16.229,99
23	GRD	Perawat Dan Profesi	S1-Ners	1.383.224,47
24	ISB	Kesmas	D3	661.228,56
25	IKA	Rekam Medis	D3	797.429,20
26	KL	Pramu Kebersihan	SMA	36.704,67
27	LML	Asisten Apoteker	D3	460.736,94
28	LSM	Kesmas	S1	1.233.018,80
29	LSM	Kesmas	D3	950.602,75
30	MLH	Perawat	D3	825.143,66
31	MYK	Bidan	S1	1.140.035,59
32	MNA	Perawat	D3	805.113,40
33	MMA	Bidan	D3	1.496.744,12
34	MDR	Bidan	D3	776.992,61
35	MGR	Perawat	D3	202.817,95
36	MKR	Bidan	D3	1.099.695,55
37	MOR	Perawat	D3	128.397,05
38	MSD	Analis	D3	1.163.655,02
39	MLM	Kepala Puskesmas	S1-Ners	1.145.122,84
40	MSA	Bidan	D3	420.136,10
41	MBA	Perawat	D3	969.033,24
42	MYB	Perawat Gigi	D3	647.155,85
43	NOA	Perawat	D3	579.235,31
44	NCB	Perawat	D3	721.857,40
45	OUD	Sanitarian	D3	797.604,50
46	ORU	Supir	D3	452.837,09
47	PMA	Sanitarian Dan KTU	D3	1.696.583,40
48	RTI	Bidan	D3	1.014.713,23
49	RAT	Gizi	S1	1.451.029,47
50	SKA	Asisten Apoteker	D3	970.443,22
51	SAT	Bidan	D3	587.959,22
52	SKI	Kesmas	S1	247.202,02
53	SBA	Perawat	D3	769.244,80
54	SAR	Bidan	D3	359.000,38
55	SCB	Perawat	D3	1.303.710,88
56	SSP	Kesmas	S1	686.937,95
57	VLA	Bidan	D3	307.941,49
58	VLA	Perawat Dan Bendahara	D3	1.096.565,70
59	VTS	Perawat Dan Profesi	S1-Ners	1.058.306,27
60	WLG	Bidan	D3	1.375.607,88
61	YAT	Perawat Dan Profesi	D3	1.686.428,04
62	YFB	Perawat	D3	691.665,61
63	YLR	Perawat	D3	1.001.220,35
64	YMI	Perawat Dan Profesi	D3	1.982.524,23
65	YTA	Perawat	D3	65.053,66
66	YTS	Perawat Dan Profesi	D3	1.295.131,64
67	YBA	Perawat	D3	354.677,19
68	YEL	Bidan	S1	1.120.456,11
69	YTS	Bidan	D3	1.047.143,23

Lampiran 13

Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Lebih bayar Tahun 2024 (Rp)
70	YYD	Perawat	D3	1.175.878,71
B	**Puskesmas Deludepa**			**78.425.116,80**
1	AOU	Perawat	S1	1.283.813,79
2	AM	CS	SMA	128.228,50
3	AUD	Perawat	D3	577.520,91
4	AGL	Analis Kesehatan	D3	967.798,16
5	AMS	Perawat	S1	1.702.903,34
6	ABA	Kesling	D3	1.139.734,53
7	ADJ	Perawat	D3	881.097,65
8	AH	Bidan	D3	173.793,75
9	AKA	Perawat	D3	274.167,33
10	AIJ	Bidan	D3	1.280.541,45
11	AL	Analis Kesehatan	D3	288.197,28
12	BS	Bidan	D3	1.488.227,44
13	CCK	Kepala Puskesmas	D3	3.314.155,15
14	DIG	Perawat	D3	1.051.097,07
15	DH	Bidan	D3	1.164.117,40
16	DAA	Perawat	D3	44.039,27
17	DK	Kesling	D3	81.879,82
18	DSM	Perawat	D3	1.166.703,75
19	DDW	Perawat	D3	531.802,23
20	DN	Dokter Umum	S1 Kedokteran	2.286.184,60
21	EDL	Perawat	D3	1.345.128,22
22	ELP	Promkes	S1	1.659.126,23
23	ET	Adminkes	S1	997.377,59
24	EMR	Bidan	D3	948.563,91
25	EAB	Bidan	D3	1.194.918,14
26	FB	Perawat	S1	1.879.150,23
27	FMA	Rekam Medik	D3	1.297.098,91
28	FAD	Adminkes	S1	1.290.513,02
29	FDM	Perawat	S1	1.220.463,65
30	HIC	Analis Kesehatan	D3	43.409,47
31	HM	Bidan	S1	1.342.395,41
32	IKA	Perawat	D3	1.328.607,83
33	IAW	Farmasi	S1	654.495,15
34	IDA	Bidan	D3	1.001.833,17
35	JM	Bidan	D3	929.486,69
36	KDA	Bidan	D3	1.274.908,55
37	KIK	Bidan	D4	1.444.882,72
38	KIM	Pramu Bersih	SMK	462.026,29
39	KHS	Ktu	S1	2.701.622,31
40	KJB	Perawat	S1	300.260,08
41	MB	Farmasi	D3	960.179,92
42	MN	Perawat	S1 Ners	1.571.909,90
43	MG	Bidan	D3	616.162,70
44	MIB	Perawat	S1	1.345.847,88
45	ML	Perawat	D3	341.989,09
46	MGP	Bidan	D3	314.052,86
47	MP	Perawat	D3	125.555,44
48	ML	Perawat	D3	460.174,13
49	MR	Bidan	D3	1.100.364,29
50	MNL	Promkes	S1	1.096.681,84
51	MK	Pengemudi	SMK	265.689,25
52	MB	Bidan	D3	722.511,51
53	MIK	Perawat	D3	1.248.376,86
54	NG	Rekam Medik	D3	1.255.926,33
55	OMW	Bidan	S1	1.650.566,83
56	OD	Kesling	D3	521.907,48
57	ODS	Perawat	S1 Ners	1.491.253,99
58	OL	Perawat	D3	1.283.589,65
59	PK	Bidan	D3	216.137,27
60	PKK	Perawat	D3	1.916.568,41
61	PM	Bidan	D3	912.789,39
62	PPD	CS	SMA	445.408,09
63	PBM	Perawat	D3	1.032.936,01
64	RML	Analis Kesehatan	D3	333.367,22
65	RS	Perawat	D3	110.896,09
66	RM	Gizi	D3	717.461,16

Lampiran 13

Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Lebih bayar Tahun 2024 (Rp)
67	RW	Bidan	D3	439.608,30
68	RAW	Bidan	D3	1.297.736,32
69	SKS	Perawat	S1 Ners	1.158.622,64
70	SS	Promkes	S1	1.474.628,85
71	SM	Bidan	D3	255.952,42
72	VPB	Bidan	D3	575.726,57
73	YK	Perawat	D3	1.382.701,60
74	YDK	Perawat	D3	813.962,04
75	YLN	Bidan	D3	324.506,65
76	YAM	Tpg	S1	839.458,36
77	YDH	Perawat	D3	1.228.268,63
78	YM	Gizi	S1	580.436,87
79	YLA	Perawat	S1	225.195,06
80	YK	Bidan	D3	158.422,98
81	YA	Penjaga Malam	SMA	490.248,81
82	YG	Bidan	D3	1.081.163,48
83	YIN	Bidan	S1	897.902,64
C	**Puskesmas Billa Cenge**			**146.144.540,22**
1	AG	Perawat	D3	1.678.443,17
2	OAK	Kesling	D3	570.957,89
3	AMK	Analis/Pj.Triple Eliminasi	D3	2.065.394,69
4	ARD	Sopir	SMA	141.259,22
5	AP	Pj.Pustu Mangganipi	D3	1.838.873,74
6	AY	Bidan	D3	1.438.439,50
7	AJL	Adminkes/Bend Barang	S1	1.636.421,63
8	ANT	Perawat	D3	1.181.945,53
9	AAM	Bidan	D3	1.212.062,99
10	AL	Pearawat/Pj.Surveilance	D3	1.770.270,77
11	AR	Satpam	SMA	257.501,04
12	ART	Kesling	D3	200.297,55
13	AD	Adminkes	S1	1.626.373,92
14	AIK	Rekam Medik	D3	1.219.556,17
15	BDN	Apoteker	S1	2.947.281,20
16	BW	Promkes	S1	1.498.828,07
17	BN	Bidan	D4	2.158.363,85
18	CD	Sopir	SMA	149.198,39
19	CTA	Perawat	D3	1.458.319,69
20	DIB	Perawat/Pj Ptm	S1	2.748.533,60
21	DN	Dokter Gigi/Pj.UKS/ UKG	S1	3.240.645,05
22	DSM	Rekam Medik/Rme-Pic.Pcare	D3	2.371.489,06
23	DNB	Perawat/Pj.Frambusia	D3	1.739.505,37
24	DR	Nutrisionist	S1	1.607.552,05
25	DC	Dokter Umum	S1	1.219.092,47
26	DPI	Dokter Umum	S1	2.267.732,68
27	EN	Satpam	SMA	82.775,17
28	EAS	Adminkes	S1	1.170.038,47
29	ETP	Perawat/Kapus	S1	5.063.205,00
30	EMW	Perawat	D3	1.128.435,10
31	EPD	Perawat	D3	922.337,62
32	ESR	Analis	D3	73.364,74
33	FKR	Nutrisionist	D3	605.570,84
34	FR	SKM	S1	2.371.981,98
35	FK	Bidan	D3	1.013.752,11
36	FNL	Perawat/Pj.Imunisasi	D3	2.187.846,63
37	FTA	Perawat	S1	2.021.124,29
38	FSK	Bidan	D3	142.653,65
39	FB	Perawat	D3	279.912,77
40	FMT	Perawat	D3	971.219,79
41	FK	Asisten Apoteker	D3	2.084.149,35
42	HB	Bidan	D3	1.947.016,82
43	HYW	Kesling/Pj.Malaria	S1	1.790.655,05
44	HR	Perawat	S1	2.280.642,92
45	IKK	Perawat/Pj.Ispa	S1	2.491.846,32
46	IK	Perawat	D3	73.364,74
47	ID	Perawat/Ispa	S1	1.718.876,27
48	IS	Promkes/Pj.Promkes	S1	2.094.876,33
49	KG	Rekam Medik	D3	755.135,60
50	KTI	Promkes	S1	595.073,99

Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Lebih bayar Tahun 2024 (Rp)
51	LBM	Bidan	D3	666.926,66
52	LA	Perawat	S1	2.674.254,12
53	LAI	Peawat/Pj.Filariasis	S1	134.502,02
54	LK	Bidan	D3	1.039.086,69
55	MMB	Perawat/Pj.Lansia	D3	1.078.607,31
56	MLR	Perawat/Kapus	D3	2.679.105,44
57	MGB	Rekam Medik	D3	1.485.907,00
58	MIK	CS	SMA	472.428,86
59	MIP	Rekam Medik	D3	1.349.030,11
60	MK	Bidan /Pj.Kia	D3	2.204.335,61
61	MS	Bidan	D3	72.472,16
62	MUW	Bidan	D3	1.322.236,26
63	MN	Bidan	D3	844.027,78
64	MG	Perawat/Pj.Akupresur	D3	1.452.752,09
65	NPI	Dokter Umum	S1	213.980,48
66	NMP	Kesling/Pj.Bok	S1	2.283.955,58
67	NTB	Perawat	S1	828.897,80
68	NRJ	Bidan	D3	1.824.600,24
69	PIM	Asisten Apoteker	D3	1.300.530,38
70	PL	Promkes	S1	361.749,12
71	PPL	CS	SMA	150.023,92
72	PPR	Admin	SMA	229.749,74
73	PHA	Bidan	D3	1.497.604,71
74	PYM	Nutrisionist	S1	422.937,01
75	RO	Bidan	D3	1.664.120,32
76	RBW	Perawat/Pj.Dbd	S1.NERS	2.529.107,80
77	RM	Bidan	D3	1.257.779,12
78	RHR	Promkes	S1	575.380,20
79	RK	Bidan	D3	1.182.912,12
80	RM.	Bidan	D3	1.232.252,83
81	RUP	Perawat	S1	2.389.429,49
82	RMN	Perawat/Bendahara Kapitasi	D3	3.199.161,87
83	SW	Bidan	D3	1.621.625,09
84	SVK	Nutrisionist/Pj.Gizi	S1	2.252.438,98
85	SHB	Rekam Medik	D3	766.495,60
86	SK	Nutrisionist	S1	1.913.613,50
87	SI	Farmasi	S1	1.503.627,04
88	SRD	Perawat/Pj.Tb	D3	1.492.840,06
89	SHM	Farmasi	S1	879.611,35
90	TM	Bidan	D4	2.742.348,13
91	TSW	Perawat/Pj.Kusta	D3	1.384.339,74
92	TE	Admin	SMA	263.479,87
93	TE	Bidan	D3	1.141.700,17
94	TP	Farmasi	S1	1.414.206,80
95	VIK	SKM	S1	1.714.722,68
96	WFI	Bidan	D3	1.166.554,98
97	YN	CS	SMA	249.637,37
98	YLA	Juru Masak	SMA	66.538,60
99	YRD	Rekam Medik	D3	967.894,66
100	YN	Perawat	D3	555.807,75
101	YIM	Bidan	D3	1.077.273,50
102	YK	Bidan	D3	1.260.787,70
103	YB	Perawat	D3	1.311.072,17
104	YD	Perawat	S1	2.749.442,43
105	YA	Analis	D3	1.168.288,80
106	YIA	Perawat/Pj.MTBS	D3	1.750.153,57
D	**Puskesmas Panenggo Ede**			**208.483.316,10**
1	AJW	Perawat	D3	3.189.058,57
2	ANK	Bidan	D4	3.204.894,85
3	AAK	CS	SMA	1.195.168,98
4	AK	Perawat	D3	1.446.500,74
5	ALR	Nuttrisionis	S1	1.899.533,94
6	ALK	Bidan	D3	1.831.675,68
7	AM	Bidan	D3	1.900.829,49
8	ALK	SKM	S1	2.081.972,36
9	AM	Prakarya	SMA	143.729,00
10	CBS	SKM	S1	1.061.113,49
11	CNM	SKM	S1	2.323.859,50

Lampiran 13

Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Lebih bayar Tahun 2024 (Rp)
12	DIC	Kesling	S1	2.119.762,60
13	DID	Sopir	SMA	1.197.849,43
14	DJD	Bidan	D3	1.822.296,30
15	DNA	Bidan	D4	3.573.839,23
16	DMA	Bidan	D3	2.009.125,98
17	DMS	Perawat	S1	3.038.756,13
18	DNN	Dokter Umum	S1	3.954.530,10
19	DRN	Dokter Gigi	S1	1.850.748,94
20	EUJ	Perawat	D3	3.099.456,48
21	EKB	Perawat	S1	1.921.856,01
22	EMA	Perawat	D3	6.160.940,69
23	EM	Perawat	S1	2.851.316,81
24	ERP	Bidan	D3	3.001.815,89
25	ET	Petugas Dapur	SMA	1.050.766,00
26	EHS	Perawat	S1	3.766.384,42
27	EDS	Bidan	D3	3.300.785,69
28	ELK	Bidan	D3	2.850.919,48
29	FPD	Perawat	S1	4.352.247,85
30	FMW	Bidan	D4	2.333.917,36
31	GMA	Bidan	D3	3.329.142,99
32	GAL	Perawat	S1	1.123.227,51
33	HBA	Bidan	D3	1.780.618,48
34	HPM	SKM	S1	759.253,93
35	HS	Perawat	S1	1.961.566,82
36	IIK	Perawat	D3	1.903.147,42
37	IBR	Bidan	D3	2.703.262,12
38	IDK	Perawat	D3	3.475.395,80
39	YR	Bidan	D3	374.738,74
40	KIK	SKM	S1	3.834.301,13
41	KLM	Kepala Puskesmas	S1	3.714.810,19
42	KTM	Bidan	D3	2.058.245,18
43	KDT	Perawat	D3	2.860.179,40
44	KTI	CS	SMA	1.210.498,37
45	KFM	Farmasi	D3	863.288,21
46	LLD	Perawat	D3	2.876.091,13
47	MDG	Bidan	D4	2.173.090,40
48	MHS	Perawat	S1	145.400,55
49	MK	CS	SMA	133.533,66
50	MKA	Farmasi	D3	861.407,88
51	MAG	Nuttrisionis	S1	3.348.435,03
52	MEM	Kesling	D3	99.703,24
53	MFT	Farmasi	D3	2.132.148,50
54	MHM	Nuttrisionis	S1	3.848.733,53
55	MM	SKM	S1	3.355.728,52
56	MIL	Bidan	D3	1.988.817,49
57	MNS	Perawat	D3	834.379,52
58	MRA	Pearawat	D3	3.318.826,94
59	MMK	Perawat	D3	2.604.929,63
60	MMA	Perawat	D3	3.623.563,98
61	MWA	Farmasi	D3	2.980.674,44
62	MAK	CS	SMA	1.073.398,08
63	MKA	Rekam Medik	SMA	2.063.557,35
64	MLK	Bidan	D3	1.476.006,55
65	NMR	Rekam Medik	D3	1.723.206,84
66	OAO	Bidan	D3	728.847,82
67	OJD	Perawat	D3	4.074.487,51
68	PDM	Rekam Medik	D3	489.549,96
69	PWA	Bidan	D3	1.248.181,84
70	PUS	Kepala Puskesmas	D3	3.238.318,31
71	PMA	Administrasi	S1	523.790,16
72	RRK	Kesling	S1	2.812.915,37
73	RFS	SKM	S1	611.746,92
74	RKS	Kapala Tata Usaha	S1	6.024.341,76
75	RLS	Perawat	S1	2.948.871,41
76	RSH	Perawat	S1	2.605.905,12
77	SBA	Analisis	D3	3.162.107,50
78	SEB	Bidan	D3	2.614.649,25
79	SMA	Bidan	D3	2.640.844,59
80	SJL	Rekam Medik	D3	3.507.942,39
81	TTL	Satpam	SMA	710.264,87

Lampiran 13

Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Lebih bayar Tahun 2024 (Rp)
82	YJM	Sopir	SMA	1.185.406,24
83	YPL	Perawat	S1	4.160.545,21
84	YR	Bidan	D3	1.819.397,68
85	YK	Satpam	SMA	471.688,53
86	YGG	Analisis	D3	2.957.929,53
87	YRR	Perawat	D3	1.176.363,20
88	YKA	Perawat	D3	2.434.103,57
89	YIK	Pearawat	D3	1.078.321,90
90	YKA	Bidan	D3	1.721.747,05
91	YWN	CS	SMA	976.868,01
92	YEM	Perawat	S1	1.515.955,33
93	YDN	Bidan	D4	1.590.907,59
94	YDS	Administrasi	S1	2.302.355,94
E	**Puskesmas Weekombak**			**164.596.677,50**
1	AL	Perawat	S1 Profesi	3.181.219,93
2	EA	Asisten Apoteker	DIII	1.961.537,55
3	AIN	Ahli Gizi	S1	2.437.446,52
4	ADW	Perawat	DIII	2.432.346,75
5	AMA	Perawat	DIII	614.983,84
6	AAB	Perawat	S1 Profesi	1.103.498,05
7	AHD	Bidan	S1	2.691.163,80
8	AKS	Perawat	S1 Profesi	2.009.372,03
9	AMA	Bidan	DIII	2.884.638,79
10	ALK	Bidan	DIII	1.849.513,29
11	AAP	Perawat	S1 Profesi	2.626.510,57
12	ATP	Perawat	S1 Profesi	3.057.963,92
13	ASB	Penyuluh Kesmas	S1	3.074.706,35
14	ASB	Perawat Gigi	DIII	871.280,28
15	AYO	Apoteker	S1 Profesi	1.290.767,12
16	CAK	Bidan	DIII	1.030.011,76
17	CHA	Bidan	DIII	2.205.104,98
18	CMK	Perawat	DIII	2.668.832,56
19	CYT	Perawat	DIII	2.028.297,55
20	DDP	Bidan	DIII	1.419.722,47
21	DBS	Penyuluh Kesmas	S1	1.588.976,74
22	DSM	Perawat	DIII	1.941.024,17
23	DEK	Perekam Medik	DIII	1.153.430,40
24	DJB	Perawat	DIII	1.335.977,50
25	DAY	Dokter Umum	S1	4.936.433,78
26	EFR	Asisten Apoteker	DIII	2.809.513,70
27	EA	Penyuluh Kesmas	S1	1.567.510,29
28	EYA	Bidan	DIII	1.403.618,80
29	EVK	Perawat	S1 Profesi	3.328.466,10
30	EOA	Perawat	S1 Profesi	305.571,04
31	EYI	Perawat	DIII	1.839.331,37
32	FKR	Nutrisionist	DIII	1.064.175,66
33	FEA	Perawat	DIII	1.519.534,26
34	FN	Perawat	DIII	388.196,08
35	GDB	Perawat	S1	1.701.677,56
36	GMA	Analis	DIII	1.071.955,84
37	GOS	Perawat	S1 Profesi	2.295.027,37
38	GRL	Adminkes	S1	1.294.057,26
39	HDM	Penyuluh Kesmas	S1	1.696.063,16
40	HSG	Kepala Tata Usaha	S1	4.794.997,03
41	IJM	Analis	S1	857.925,66
42	ILM	Perawat	DIII	2.057.732,03
43	ITB	Bidan	DIII	685.276,55
44	IEA	Perekam Medik	DIII	1.930.309,00
45	IWA	Bidan	DIII	689.427,31
46	JAI	Perawat	S1 Profesi	1.240.458,71
47	JSK	Bidan	DIII	1.344.998,45
48	JAT	Bidan	S1	2.435.731,11
49	JDO	Sopir	SMA	783.089,32
50	JEB	Bidan	S1 Profesi	1.089.970,51
51	JRS	Penyuluh Kesmas	S1	326.958,53
52	KUN	Perawat	S1 Profesi	3.411.296,69
53	KNT	Bidan	DIII	1.114.375,75
54	LAS	Kesling	S1	2.380.924,02
55	LBA	Kepala Puskesmas	DIII	1.935.025,24

Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Lebih bayar Tahun 2024 (Rp)
56	LIL	Bidan	DIII	1.624.816,03
57	MED	Ahli Gizi	S1	924.881,26
58	MAL	Analis	DIII	1.991.501,37
59	MTI	Penyuluh Kesmas	S1	1.685.618,59
60	MDL	Analis	DIII	863.739,74
61	MAN	Ahli Gizi	S1	2.126.357,71
62	MIK	Penyuluh Kesmas	S1	1.644.352,68
63	MLL	Perawat	S1 Profesi	3.034.751,47
64	MRM	Perawat	DIII	1.750.028,69
65	MVD	Bidan	DIII	823.327,53
66	MEG	Perawat	DIII	1.109.709,55
67	MBA	Asisten Apoteker	DIII	1.400.362,75
68	MT	CS	SMA	633.080,78
69	MM	Security	SMA	810.644,48
70	MMA	Bidan	DIII	1.104.370,62
71	NAO	Bidan	S1	1.865.856,82
72	OBZ	Bidan	DIII	1.804.030,61
73	OWS	Kesling	S1	2.061.966,94
74	PUS	Kepala Puskesmas	DIII	4.252.088,45
75	PWA	Perawat	DIII	1.507.623,34
76	PB	Pekarya	SMA	88.068,60
77	PYA	Penyuluh Kesmas	S1	2.335.967,38
78	RKW	Ahli Gizi	S1	1.485.204,64
79	SYN	Sopir	SMA	923.209,01
80	SAT	Kesling	DIII	1.719.875,79
81	SWK	Bidan	DIII	2.400.878,00
82	SLS	Adminkes	S1	369.997,63
83	SGW	Perawat	S1 Profesi	387.697,86
84	TDS	Bidan	S1 Profesi	1.942.361,53
85	WDK	Perawat	DIII	439.390,90
86	YFA	Perawat	DIII	2.726.719,73
87	YSA	Bidan	DIII	115.312,47
88	YFA	Penyuluh Kesmas	S1	947.850,11
89	YIM	Bidan	DIII	1.122.877,67
90	YIK	Penyuluh Kesmas	S1	2.220.363,35
91	YLA	Bendahara Jkn	DIII	3.933.289,89
92	YSY	Adminkes	S1	1.966.272,76
93	YBA	Bidan	DIII	1.440.614,73
94	YDT	Penyuluh Kesmas	S1	1.571.002,42
95	YBA	Bidan	DIII	498.876,34
96	YLP	Perekam Medik	DIII	1.183.782,18
F	**Puskesmas Kawango Hari**			**94.885.941,02**
1	AAK	Manajemen	S1	774.088,80
2	AME	Perawat	S1	904.416,59
3	AAP	Perawat	S1	614.511,77
4	ANB	Pramu Bersih	SMA	238.905,04
5	ADS	Perawat	S1	1.730.301,31
6	ATI	Farmasi	D3	825.901,72
7	ALB	Rekam Medik	D3	596.700,19
8	AMS	Perawat	S1	1.214.953,89
9	ABA	Perawat	D3	1.688.997,54
10	AIM	Bidan	D3	737.848,58
11	ALM	Perawat	D3	708.349,88
12	AWD	Bidan	D3	916.375,19
13	APD	Perawat	D3	482.616,37
14	AAG	Apoteker	S1	972.318,23
15	AYB	Bidan	D3	812.623,75
16	DIN	Kesmas	S1	1.367.671,03
17	DHL	Bidan	D3	554.160,50
18	DIZ	Bidan	D3	869.900,32
19	DKA	Bidan	D3	1.297.114,62
20	DIP	Bidan	D3	1.132.674,84
21	DTW	Dokter	S1	2.600.893,92
22	EPL	Perawat	D3	1.056.267,57
23	EEE	Bidan	D3	847.075,37
24	FM	Bidan	D3	315.124,27
25	GAA	Bidan	D3	148.540,15
26	HRS	Perawat	S1	843.809,17
27	HBJ	Perawat	S1	62.833,87

Lampiran 13

Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Lebih bayar Tahun 2024 (Rp)
28	HNA	Bidan	D3	1.451.982,33
29	HRL	Kesling	D3	827.245,13
30	IAK	Perawat	S1	562.526,70
31	ITI	Gizi	S1	742.906,42
32	IKS	Perawat	S1	1.848.867,23
33	IDK	Perawat	S1	2.086.773,48
34	KBS	Ktu	S1	2.119.008,97
35	KBM	Rekam Medik	D3	857.718,63
36	KHE	Bikor	D3	1.758.077,20
37	KRB	Perawat Pustu	D3	1.206.924,31
38	KLD	Bidan	D3	1.293.340,54
39	LID	Bidan	D3	788.230,39
40	MDT	Bidan	D3	821.349,52
41	MWH	Rekam Medik	D3	703.146,21
42	MTI	Perawat	D3	1.191.391,85
43	MAN	Perawat	S1	1.643.699,67
44	MAG	Perawat	D3	652.818,03
45	MDN	Bidan	D3	346.460,12
46	MIP	Bidan	D3	576.083,35
47	MIK	Manajemen	S1	1.207.509,09
48	MIO	Perawat	S1	1.616.862,66
49	MLA	Perawat	S1	1.685.762,57
50	MMK	Farmasi	D3	703.094,58
51	MSI	Bidan	D3	682.538,15
52	MNS	Perawat	S1	2.136.570,80
53	MMS	Tata Usaha	S1	696.923,13
54	MBA	Bidan	D3	672.950,78
55	MIL	Bidan	D3	1.083.191,52
56	MRM	Perawat	S1	242.800,53
57	MWK	Kesmas	S1	1.403.101,17
58	MIK	Bidan	D3	1.091.411,46
59	MBO	Satpam	SMA	342.267,94
60	MMB	Pramu Bersih	SMA	427.779,05
61	MJD	Kesmas	S1	1.523.263,17
62	MBA	Kepala Puskesmas	D3	2.836.032,89
63	MMK	Bidan	D3	1.063.836,98
64	MCK	Gizi	D3	1.079.887,91
65	MSA	Bidan	D3	888.854,94
66	NM	Farmasi	D3	824.638,69
67	OEB	Kesmas	S1	1.007.444,25
68	OPK	Farmasi	D3	685.958,79
69	PLW	Bidan	D3	690.894,47
70	PSP	Bidan	D3	703.867,37
71	PPM	Perawat	S1	961.225,59
72	RLB	Laborat	D3	1.181.468,56
73	RFL	Perawat	D3	1.543.148,25
74	RMS	Manajemen	S1	505.408,70
75	RK	Sopir	SMA	486.925,84
76	RRM	Administrasi	SMA	84.727,93
77	SKA	Perawat	D3	224.153,25
78	SUR	Perawat	D3	1.277.690,53
79	SK	Perawat	S1	1.986.827,86
80	SLL	Bidan	D3	1.038.707,52
81	TTN	Pramu Bersih	SD	398.310,01
82	VAJ	Perawat	S1	990.918,03
83	VWA	Rekam Medik	D3	1.292.907,50
84	WMS	Perawat	S1	1.572.041,18
85	YKS	Perawat	S1	2.112.152,14
86	YOW	Kesling	S1	908.180,31
87	YD	Perawat	D3	948.917,08
88	YPK	Perawat	S1	1.380.103,31
89	YDW	Manajemen	S1	789.724,20
90	YCB	Perawat	S1	1.865.122,25
91	YLS	Bidan	S1	1.452.372,17
92	YIK	Bidan	S1	793.941,36
G	**Puskesmas Tena Teke**			**122.223.613,57**
1	ADG	Bidan	D3	680.981,48
2	AB	Perawat	S1 Nurse	1.584.009,87
3	AKD	Rekam Medik	D3	536.416,02

Lampiran 13

Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Lebih bayar Tahun 2024 (Rp)
4	AK	SKM	S1	558.472,87
5	ARB	Perawat/Pustu Weewulla	D3	1.243.823,34
6	ANA	Perawat	D3	709.702,61
7	AAA	Perawat	S1 Nurse	1.033.177,75
8	AK	Perawat	D3	2.012.671,37
9	AS	Kesling	S1	947.561,14
10	APN	Bidan	D3	344.854,45
11	AS	Perawat	D3	827.303,24
12	AAA	Bendahara Bok	S1	1.389.084,18
13	AB	Analis	D3	931.831,32
14	AS	Perawat	D3	436.462,06
15	AEB	Perawat	S1	948.875,00
16	ALB	SKM/Pj Kesling	S1	1.298.052,57
17	ARR	Bidan	D3	878.893,47
18	AB	Perawat	D3	737.942,11
19	AYI	SKM	S1	745.072,85
20	AUL	SKM	S1	748.852,70
21	ADK	Gizi	D3	1.094.373,11
22	AAT	Apoteker,Pj Obat	S1	1.699.351,98
23	ATM	Bidan	D3	1.065.936,62
24	AS	Perawat	S1	454.142,84
25	AL	Bidan /Pj Sdidtk	D3	1.055.018,10
26	AWR	Perawat	D3	828.090,82
27	BMT	Perawat/Pj Program Tbc	D3	1.115.257,79
28	CLK	Perawat/Pj Filariasis	S1	1.435.916,81
29	CSE	Perawat	S1	938.187,94
30	DB	CS/Pj Keamanan	SMA	570.710,33
31	DKR	SKM	S1	1.082.051,15
32	DBS	Perawat/Pengelola Keswa	S1	1.635.569,06
33	DM	Bidan	D3	147.967,29
34	DNR	Dokter Umum	S1	2.077.721,35
35	DMH	Dokter Gigi/Pj Promkes,Ukgs	S1	1.949.779,74
36	EBA	Analis/Pj Malaria	D3	1.386.383,22
37	E K	Bidan	D3	547.391,88
38	EPL	Bidan /Pj Tt	D3	1.092.625,56
39	ENB	Bidan	D3	884.010,61
40	ED	Bidan	D3	773.194,57
41	EMA	Perawat/Pj Ptm	D3	1.092.377,51
42	EDL	Bidan /Bidan Koordinator	D3	1.328.720,47
43	EN	Perawat/Pj Mtbs	D3	877.174,51
44	FDD	Rekam Medik	D3	810.279,18
45	FHK	Kepala Puskesmas	D3	1.895.723,00
46	FBS	Perawat	S1	1.486.888,31
47	GH	Manajemen	S1	840.567,67
48	HDM	Bidan	D3	758.593,62
49	HRD	SKM	S1	903.708,38
50	HNU	Perawat	S1	956.402,85
51	HTS	Perawat	S1	1.139.178,48
52	HFU	Gizi	D3	362.344,10
53	HK	Perawat	D3	989.251,18
54	IGS	Perawat	D3	1.081.875,21
55	JK	Bidan	D3	872.872,55
56	JCM	SKM	S1	1.198.536,14
57	KDR	Kesling	D3	853.897,22
58	KAG	Perawat	D3	468.713,81
59	KLB	Bidan	D3	1.040.754,11
60	KL	Perawat	D3	1.021.353,75
61	KN	Bidan	D3	837.140,83
62	LBA	Perawat/Bendahara Jkn	D3	1.685.994,50
63	L D	Adiministasi	S1	1.125.821,01
64	MB	SKM	S1	958.353,26
65	MTB	Bidan /Pj Vk	D3	1.112.653,28
66	MFU	Bidan	D3	1.021.733,81
67	MIL	Bidan	S1	1.010.904,63
68	MMK	Rekam Medik	D3	642.734,29
69	MMM	Perawat	D3	644.496,70
70	MN	Perawat	S1 Nurse	731.576,65
71	MBD	Perawat	D3	870.039,81

Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Lebih bayar Tahun 2024 (Rp)
72	MLM	Perawat	D3	646.287,92
73	MAB	Bidan	D3	830.872,91
74	MDO	Perawat	D3	636.248,17
75	MSK	Gizi/Pj Gizi	S1	1.102.509,41
76	MG	Bidan	D3	789.813,95
77	MM	Perawat	D3	557.630,60
78	MMT	Rekam Medik/Bendahara Barang	D3	1.100.645,36
79	MN	Perawat	D3	709.530,61
80	MIK	Perawat/Survailans	D3	1.126.888,52
81	NHI	Bidan	D3	893.903,56
82	NTK	Bidan	D3	790.007,04
83	NLD	Pramu Saji	SMA	561.478,22
84	NPP	Gizi	D3	732.770,47
85	NDB	Perawat	D3	1.314.474,46
86	NDJ	Perawat	D3	297.357,17
87	NB	SKM	S1	597.752,34
88	NAK	Bidan	D3	330.521,53
89	OD	Bidan	D3	972.696,59
90	ORN	Farmasi/Asisten Apoteker	D3	1.032.935,30
91	OB	Perawat	S1	788.082,34
92	OS	Perawat	S1 Nurse	1.543.510,04
93	OUR	SKM	S1	596.955,08
94	PVB	Rekam Medik	D3	772.384,04
95	PBA	Bidan	D3	1.044.786,84
96	PKB	Bidan	D3	594.819,66
97	PB	Perawat	D3	776.775,24
98	PNR	Perawat	D3	660.195,00
99	RN.	Perawat/Bendahara Pad	D3	1.241.037,47
100	RSD	Perawat	S1 Nurse	1.395.073,33
101	RB	SKM	S1	1.173.940,64
102	SM	Bidan /Pengelola Vaksin	D3	735.269,25
103	SAR	Bidan	D3	903.684,37
104	SD	Bidan	D3	777.000,98
105	SRG	SKM	S1	999.961,79
106	SNS	Perawat	S1 Nurse	1.084.678,93
107	SFI	Rekam Medik	D3	873.664,35
108	SSB	Bidan	D3	972.350,36
109	SMA	Perawat/Ktu	D3	1.949.709,24
110	SNB	Perawat	D3	78.451,68
111	SHR	Bidan	D3	805.434,71
112	SVL	Perawat	S1 Nurse	1.464.740,15
113	TTB	Perawat	D3	321.598,25
114	VB	SKM	S1	736.761,33
115	WIG	Perawat	D3	408.225,19
116	YLN	Perawat	D3	144.592,54
117	YVI	Perawat	S1 Nurse	750.980,54
118	YL	Perawat	D3	1.114.954,43
119	YNN	Perawat/Pengelola Picare/Diare/Ispa	D3	995.795,78
120	YN	Bidan /Penanggungjawab Desa Bondo Ukka	D3	1.398.444,87
121	YDT	Perawat/Pj Frambusia/Kusta	D3	1.238.153,20
122	YS	SKM	S1	1.031.293,06
123	YYN	Perawat/Pj Ranap	D3	1.244.833,89
124	YT	Bidan	D3	215.379,55
125	YT	Perawat/ Pengelola Prolanis	S1 Nurse	1.529.057,75
126	YAK	Sopir	SMA	288.820,81
127	YDM	Perawat/Pj Coldchain	D3	1.271.336,14
128	YHB	SKM	S1	1.102.679,49
129	YKN	Perawat/Pj Program 15 Pola Penyakit	D3	1.125.495,14
H	**Puskesmas Waimangura**			**109.658.998,08**
1	ABK	Bidan	D III	596.853,59
2	AIK	Bidan	D III	127.090,09
3	ADN	Perawat	S1 Profesi	1.438.159,62

Lampiran 13

Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Lebih bayar Tahun 2024 (Rp)
4	ASK	Bidan	D IV	1.026.706,55
5	AID	Nutrisionist	D III	905.488,14
6	AEE	Sopir	SMA	363.280,51
7	ABK	Kesling	D III	511.168,50
8	AMK	Security	SMA	363.280,51
9	AMK	Analis Kesehatan	D III	624.616,13
10	ATK	Bidan	D III	487.548,13
11	AIK	Rekam Medis	D III	559.203,85
12	ADR	Rekam Medis	D III	579.826,13
13	AY	Rekam Medis	D III	430.535,81
14	AB	Penyuluh Kesmas	S1	755.600,76
15	APM	Perawat	D III	960.878,64
16	AR	Sopir	SMA	21.496,07
17	AY	Penyuluh Kesmas	S1	254.071,00
18	AMN	Perawat	S1 Profesi	1.225.054,90
19	ABK	Perawat	D III	1.747.079,25
20	AMN	Perawat	S1 Profesi	1.186.824,18
21	AD	Penyuluh Kesmas	S1	826.641,02
22	ADK	Perawat	D III	610.669,83
23	AIU	Apoteker	S1 Profesi	1.469.519,17
24	AMN	Perawat	S1 Profesi	762.575,16
25	BYZ	Bidan	D III	804.231,73
26	BRL	Apoteker	S1 Profesi	696.078,45
27	CD	Penyuluh Kesmas	S1	864.578,34
28	DEK	Bidan	D IV	131.249,60
29	DMK	Bidan	D III	890.730,58
30	DIK	Bidan	D III	802.425,90
31	DIW	Perawat	D III	1.797.791,31
32	DB	Penyuluh Kesmas	S1	791.690,36
33	DAG	Dokter Umum	S1	1.993.541,68
34	DAH	Dokter Gigi	S1	1.935.710,86
35	E P	Nutrisionist	S1	484.995,66
36	EMO	Kesling	D III	1.031.188,80
37	ESS	Perawat	D III	1.144.321,67
38	E N	Perawat	D III	1.044.066,16
39	FLG	Nutrisionist	D III	89.537,15
40	FSF	Farmasi	D III	161.743,36
41	FRK	Bidan	D III	675.045,98
42	FWK	Perawat	D III	712.873,83
43	FM	Penyuluh Kesmas	S1	884.088,29
44	FY	Penyuluh Kesmas	S1	784.070,81
45	FVN	Perawat	S1 Profesi	1.210.790,71
46	FMK	Perawat	D III	1.025.202,64
47	GSK	Perawat	D III	574.281,41
48	HDK	Bidan	D III	691.450,69
49	HD	Penyuluh Kesmas	S1	558.332,25
50	HMW	Penyuluh Kesmas	S1	550.782,34
51	IEN	Perawat	S1 Profesi	1.336.702,05
52	ISB	Perawat	S1 Profesi	1.162.422,55
53	IJS	Bidan	D III	806.767,03
54	IAK	Bidan	D III	718.604,58
55	JJF	Perawat Gigi	D III	1.287.729,75
56	JSN	Perawat	S1 Profesi	735.309,57
57	KDL	Bidan	D III	310.810,67
58	KNK	Bidan	D III	593.545,00
59	KNK	Perawat	D III	419.592,00
60	KTN	Perawat	S1 Profesi	872.964,43
61	LFR	Rekam Medis	D III	585.907,46
62	LFK	Bidan	D III	407.420,19
63	LBK	Bidan	D III	690.777,96
64	MMK	Bidan	D III	462.134,96
65	MNN	Perawat	S1 Profesi	1.221.484,94
66	MB	Nutrisionist	S1	1.078.847,31
67	MBK	Perawat	D III	1.053.734,98
68	MEN	Perawat	S1 Profesi	1.227.154,54
69	MEK	Bidan	D III	724.563,60
70	MI	Pramu Saji	SMA	151.607,55
71	MLK	Bidan	D III	668.965,23
72	MML	Bidan	D III	1.037.342,65
73	MV	Magister Farm	S2	144.453,56

Lampiran 13

Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Lebih bayar Tahun 2024 (Rp)
74	MVL	Penyuluh Kesmas	S1	1.122.283,29
75	MDK	Perawat	D III	962.511,94
76	MBK	Bidan	D III	706.290,70
77	MIK	Perawat	D III	876.874,96
78	MM	Elektromedis	S1	756.891,02
79	MMK	Perawat	D III	688.519,84
80	MUT	Rekam Medis	D III	587.228,26
81	MBA	Perawat	D III	986.596,81
82	MTD	Nutrisionist	S1	695.035,46
83	MSK	Kesling	D III	110.613,09
84	MTD	Bidan	D III	612.299,96
85	MIK	Kesling	D III	527.825,71
86	MNK	Bidan	D III	536.969,00
87	MS	Penyuluh Kesmas	S1	670.373,19
88	MLK	Bidan	D III	517.744,30
89	NLK	Bidan	D III	748.572,94
90	NCN	Perawat	S1 Profesi	930.529,41
91	NSN	Perawat	S1 Profesi	959.449,88
92	NDR	Rekam Medis	D III	840.554,49
93	NTA	Bidan	D III	928.953,90
94	NNP	Nutrisionist	S1	187.434,55
95	NWL	Penyuluh Kesmas	S1	568.187,64
96	NSP	Bidan	D III	595.452,30
97	NDM	Bidan	S1	795.823,50
98	OTS	Perawat	D III	954.158,07
99	ODK	Perawat	D III	1.170.044,76
100	PNK	Perawat	S1 Profesi	1.449.116,34
101	PDK	Perawat	D III	1.177.995,65
102	PTK	Perawat	D III	823.642,88
103	PJN	Bidan	D III	90.734,07
104	RN	Penyuluh Kesmas	S1	1.088.704,72
105	RNK	Bidan	D III	730.859,73
106	RTM	Perawat	S1 Profesi	1.152.507,07
107	RMK	Apoteker	S1	1.520.601,53
108	SMK	Perawat	D III	589.079,52
109	SSA	Cleaning Servis	SMA	363.280,51
110	SYB	Perawat	D III	1.512.392,41
111	SCK	Bidan	D III	638.944,82
112	STY	Bidan	D III	815.309,52
113	SK	Penyuluh Kesmas	S1	602.721,39
114	SDK	Perawat	D III	775.068,37
115	SIR	Perawat	D III	941.546,92
116	SEL	Penyuluh Kesmas	S1	1.152.101,38
117	SST	Perawat	D III	560.599,15
118	TYK	Perawat	D III	57.387,02
119	TSN	Perawat	S1 Profesi	1.048.572,81
120	TEK	Perawat Gigi	D III	423.224,15
121	VRK	Bidan	D III	813.688,11
122	WON	Perawat	S1 Profesi	1.153.405,16
123	YIL	Analis Kesehatan	D III	982.583,07
124	YMG	Perawat	D III	946.308,58
125	YB	Sopir	SMA	118.226,18
126	YMK	Bidan	D III	132.883,86
127	YBA	Rekam Medis	D III	1.092.592,99
128	YYR	Rekam Medis	D III	571.951,22
129	YAK	Bidan	D III	750.579,03
130	YMB	Bidan	D III	1.004.957,05
131	YDN	Perawat	D III	1.016.773,77
132	YMN	Perawat	S1	1.185.104,68
133	YNN	Perawat	D III	978.771,50
134	YDN	Bidan	D IV	512.301,86
135	YBK	Bidan	D III	654.477,91
136	YBK	Bidan	D III	113.499,22
137	YLM	Perawat	D III	921.397,68
138	YMN	Perawat	SI Profesi	969.156,62
139	YS	Bidan	SI Profesi	730.069,17
140	YMA	Bidan	D III	594.850,83
I	**Puskesmas Palla**			**114.974.950,18**

Lampiran 13

Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Lebih bayar Tahun 2024 (Rp)
1	AKA	Perawat / Kepala Puskesmas	D4	4.564.115,46
2	AUP	Perawat	S1	2.093.791,28
3	ABA	Kesehatan Lingkungan	D3	69.267,06
4	AB	Cleaning Servis	SMA	1.043.231,67
5	ALB	Perawat	S1	714.018,42
6	AIA	Perawat	D3	1.096.018,40
7	API	Ahli Gizi	D4	1.458.997,85
8	ADO	Perekam Medis	D3	1.510.829,80
9	ASB	Perawat	S1	755.799,44
10	AYR	Apoteker	S1	2.729.230,81
11	AMS	Perawat	D3	1.713.533,33
12	ARW	Perekam Medis	D3	784.357,51
13	ALS	Perawat	S1	134.228,60
14	AYA	Perawat	D3	1.350.432,11
15	AMA	Bidan	D3	1.596.534,47
16	ARL	Asisten Apoteker	D3	1.584.985,11
17	AHK	Kesehatan Masyarakat	S1	685.666,65
18	DEU	Bidan	D4	1.535.032,13
19	DDK	Perawat	S1	1.945.886,52
20	DJB	Bidan	D3	480.693,94
21	DRL	Perawat	S1	1.775.548,38
22	DBH	Bidan	D3	2.295.607,86
23	DO	Dokter Umum	S1	4.395.878,71
24	DOY	Perawat	S1	2.225.200,63
25	ESL	Bidan	D3	623.524,23
26	EKA	Ahli Gizi	D3	1.482.692,46
27	ETD	Kesehatan Masyarakat	S1	795.219,21
28	FIP	Perawat	D3	1.025.466,91
29	FP	Kesehatan Masyarakat	S1	1.647.470,85
30	GDB	Sopir	SMA	236.412,19
31	ISB	Kesehatan Masyarakat	S1	34.557,28
32	IDA	Bidan	D3	1.775.262,90
33	IPD	Perawat	D3	1.634.817,69
34	IKU	Bidan	D3	1.061.416,13
35	JSD	Perawat	S1	2.491.846,17
36	KMA	Perekam Medis	D3	1.765.086,29
37	KEK	Bidan	D3	1.990.836,96
38	MVS	Analis Kesehatan	D3	507.139,99
39	MAI	Kesehatan Masyarakat	S1	1.171.586,70
40	MAM	Perawat	D3	1.328.467,00
41	MED	Perawat / Ktu	D3	2.921.831,89
42	MTW	Bidan	D3	1.648.084,15
43	MIY	Kesehatan Masyarakat	S1	1.298.828,48
44	MW	Bidan	D3	1.253.148,20
45	MDG	Perawat	D3	1.166.163,03
46	MUR	Staf	SMA	27.672,41
47	MKA	Analis Kesehatan	D3	1.624.329,71
48	MDD	Kesehatan Lingkungan	D3	432.903,67
49	MR	Bidan	D3	1.188.755,61
50	MYA	Perawat	D3	2.451.532,37
51	MDB	Perawat	D3	629.769,80
52	MGP	Analis Kesehatan	D3	595.964,55
53	NDS	Perawat	S1	1.633.619,73
54	NMA	Bidan	D3	1.910.795,02
55	NWT	Kesehatan Masyarakat	S1	1.702.802,30
56	NKT	Kesehatan Masyarakat	S1	2.170.924,10
57	NL	Perawat	D3	1.212.127,48
58	RCE	Kesehatan Lingkungan	D3	1.263.356,01
59	RNA	Perawat	D3	1.647.731,95
60	RSM	Bidan	D3	1.551.921,57
61	RLS	Perawat	S1	2.734.886,76
62	SWB	Perawat	D3	1.438.410,67
63	STI	Bidan	D3	2.044.607,34
64	SD	Analis Kesehatan	D3	1.848.046,86
65	VPR	Bidan	D3	2.303.766,15
66	WSM	Perekam Medis	D3	7.794,26
67	WWK	Staf	SMA	620.433,13
68	YKM	Perawat	D3	1.387.499,46
69	YYA	Perawat / Bendahara Jkn	D3	3.339.898,09

Lampiran 13

Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Lebih bayar Tahun 2024 (Rp)
70	YMA	Perawat	D3	2.309.688,80
71	YRW	Bidan	D3	2.486.319,36
72	YTI	Juru Masak	SMA	886.510,86
73	YAS	Perawat	S1	1.242.998,71
74	YRA	Perawat	D3	1.702.131,30
75	YLS	Perawat	S1	676.134,37
76	YMM	Bidan	D3	1.902.314,40
77	YKB	Perekam Medis	D3	419.640,32
78	YMA	Bidan	D3	438.114,23
79	YDT	Kesehatan Masyarakat	S1	742.803,98
J	**Puskesmas Elopada**			**88.046.883,08**
1	AG	Perawat	S-I	577.847,28
2	AB	Perawat	D-III	738.311,03
3	ARL	Perawat	D-III	529.499,32
4	AEI	Penyuluh Kesehatan Masyarakat/ Ktu	S-I	965.747,45
5	AWL	Perawat	D-III	431.626,18
6	AKL	Perawat	D-III	764.497,30
7	ALT	Bidan	D-III	333.736,48
8	AK	Perawat	S-I	728.953,67
9	AKB	Bidan	D-III	472.727,23
10	A I	Perawat	S-I	773.057,83
11	AFM	Perawat	D-III	198.707,02
12	AK	Bidan	D-III	437.179,13
13	ALJ	Rekam Medik	D-III	439.164,00
14	ADL	Perawat	D-III	533.759,15
15	AEB	Bidan	D-III	412.215,82
16	AGW	Perawat	D-III	804.774,97
17	ALM	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	S-I	426.993,63
18	AN	Perawat	D-III	672.930,75
19	AL	Perawat	D-III	366.522,08
20	AGW	Perawat	S-I	847.860,66
21	AUD	Perawat	D-III	534.543,55
22	AGW	CS	SMA	246.521,12
23	AKM	Perawat	D-III	366.645,13
24	BSM	Bidan	S-I	476.463,40
25	BYM	Perawat	D-III	485.601,63
26	CYC	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	S-I	862.601,62
27	DUM	Perawat	S-I	481.256,75
28	DLB	Perawat	D-III	468.954,12
29	DYL	Bidan	D-III	432.897,71
30	DKA	Perawat	D-III	291.042,27
31	DSD	Bidan	D-IV	734.526,16
32	DDS	Bidan	D-III	481.722,70
33	DF	Perawat	D-III	731.080,22
34	DDD	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	S-I	68.257,00
35	DNP	Perawat	S-I	1.079.257,64
36	DSK	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	S-I	774.739,41
37	DCB	Dokter	S-I	1.312.185,48
38	ELK	Perawat	S-I	437.656,39
39	EP	Gizi	S-I	447.781,66
40	EMA	Bidan	S-I	502.979,25
41	EB	Perawat	D-III	626.893,28
42	FMN	Perawat	D-III	903.688,69
43	FK	Perawat	D-III	410.624,91
44	FEL	Bidan	Bidan	477.960,66
45	FIN	Bidan	D-IV	460.777,42
46	FRI	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	S-I	306.801,10
47	FAK	Perawat	S-I	882.810,25
48	FAB	Bidan	D-IV	727.597,54
49	FB	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	S-I	568.186,84
50	FNL	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	S-I	787.032,09

Lampiran 13

Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Lebih bayar Tahun 2024 (Rp)
51	FMA	Farmasi	D-III	658.380,22
52	GHL	Perawat	D-III	451.334,02
53	HUK	Kesehatan Lingkungan	D-III	605.829,50
54	HE	Perawat	S-I	903.394,92
55	HNB	Farmasi	D-III	639.152,70
56	HRH	Perawat	D-III	362.642,58
57	HMT	Perawat	D-III	525.766,78
58	IN	Perawat	D-III	447.705,39
59	INW	Bidan	D-III	333.736,48
60	IDB	Bidan	D-III	90.039,54
61	IMT	Apoteker	S-I	967.247,10
62	JMT	Perawat	D-III	666.869,49
63	JLB	Perawat	D-III	338.211,00
64	JSL	Rekam Medik	D-III	426.475,61
65	JZT	Elektromedik	D-III	205.465,39
66	JBT	Perawat	D-III	438.983,26
67	JEK	Perawat	D-III	355.343,25
68	KPD	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	S-I	570.085,06
69	KW	Bidan	D-III	410.624,91
70	KNB	Perawat	D-III	342.223,70
71	KMT	Bidan	D-III	1.021.552,78
72	KNN	Perawat	D-III	865.016,74
73	KAN	Perawat	S-I	642.305,17
74	LAL	Perawat	S-I	386.695,59
75	LNP	Analis	D-III	500.071,19
76	LSA	Bidan	D-III	793.219,61
77	MI	Bidan	D-III	588.657,11
78	MAN	Rekam Medik	D-III	314.428,91
79	MPM	Nutrisionis	D-III	569.553,01
80	MMT	Bidan	D-III	830.381,44
81	MAS	Perawat	D-III	334.721,85
82	MI	Bidan	D-III	690.157,92
83	MLA	Farmasi	D-III	72.580,41
84	MML	Perawat	S-I	956.803,55
85	MMM	Perawat	D-III	725.627,41
86	MYL	Perawat	D-III	275.800,72
87	MAM	Perawat	D-III	327.509,30
88	MAD	Bidan	D-III	467.648,21
89	MB	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	S-I	573.653,96
90	MAM	Perawat	D-III	450.901,77
91	MDA	Perawat	D-III	1.077.754,37
92	MMB	Perawat	D-III	265.494,79
93	MTN	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	D-III	608.205,37
94	MDG	Perawat	S-I	592.510,87
95	MID	Bidan	D-III	534.412,81
96	MDG	Perawat	S-I	773.057,83
97	NLW	Bidan	D-III	432.897,71
98	NM	Rekam Medik	D-III	442.456,02
99	NVR	Perawat	D-III	469.374,94
100	NM	Perawat	D-III	912.285,66
101	NSA	Kesehatan Lingkungan	S-I	460.169,96
102	NH	Perawat	D-III	588.778,67
103	NK	Bidan	D-III	459.243,43
104	NU	Perawat	D-III	437.230,44
105	OSM	Bidan	D-III	452.056,74
106	OG	Perawat	D-III	612.813,70
107	OSY	Rekam Medik	D-III	137.244,55
108	OAK	Rekam Medik	D-III	1.025.339,40
109	OSB	Bidan	D-III	139.268,10
110	PN	Perawat	D-III	646.894,55
111	PRP	CS	SMA	241.184,32
112	PA	Perawat	D-III	731.752,92
113	PMD	Perawat	D-III	371.991,92
114	RIK	Perawat	D-III	603.397,03
115	RKW	Nutrisionis	S-I	228.423,32
116	RRL	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	S-I	445.959,61

Lampiran 13

Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Lebih bayar Tahun 2024 (Rp)
117	RCN	Apoteker	S-I	261.548,90
118	RST	Perawat	D-III	829.264,07
119	RD	Manajamen Rs	S-I	466.432,96
120	RI	Bidan	D-IV	757.952,21
121	RMA	Bidan	D-III	526.199,24
122	RRB	Bidan	D-III	823.646,57
123	SD,	Perawat	S-I	648.096,64
124	ST	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	S-I	616.266,37
125	SD	Administrasi	S-I	328.469,72
126	SDM	Kesehatan Lingkungan	D-III	697.594,87
127	SDB	Bidan	D-III	656.807,23
128	SYK	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	S-I	373.288,58
129	SNR	Perawat	D-III	244.682,31
130	SM	Perawat	D-III	494.379,75
131	SUP	Analis	D-III	807.484,40
132	SEB	Perawat	D-III	1.020.403,71
133	SFF	Analis	D-III	768.211,45
134	SLD	Perawat	D-III	370.168,64
135	SM	Bidan	D-III	487.192,54
136	SGW	Perawat	S-I	713.691,33
137	TKR	Juru Masak	SD	203.175,90
138	VVD		D-III	54.356,11
139	VM	Perawat	S-I	887.512,15
140	VKD	Perawat	S-I	538.952,37
141	VMP	Per Awat Gigi	D-III	387.084,40
142	WVT	Nutrisionis	S-I	644.105,93
143	YNL	Perawat	D-III	551.280,94
144	YL	Perawat	D-III	693.424,63
145	YMY	Perawat	D-III	711.359,16
146	YD	Sopir	SMA	229.239,37
147	YKM	Bidan	D-IV	675.251,35
148	YBB	Bidan	D-III	525.951,40
149	YM	Bidan	D-III	521.277,25
150	YDB	Perawat	D-III	722.574,63
151	YLK	Perawat	D-III	485.820,84
152	YB	Bidan	D-III	697.752,12
153	YDN	Prakarya	SMA	431.235,33
154	YAB	Rekam Medik	D-III	194.022,24
155	YHA	Perawat	S-I	618.929,88
156	YRB	Bidan	D-III	1.008.974,38
157	YTI	Perawat	D-III	648.312,90
158	YIL	Nutrisionis	S-I	638.600,84
159	YHY	Perawat	D-III	443.713,92
K	**Puskesmas Radamata**			**146.308.581,46**
1	AIM	Bidan	D3	557.328,85
2	AYD	Perawat	D3	841.986,49
3	AIE	Gizi	D3	531.372,73
4	ADG	SKM	SKM	539.144,52
5	AKT	Analis	S1	80.422,19
6	AKB	Bidan	D3	1.089.855,99
7	AKA	SKM	S1	694.043,17
8	ALN	Perawat	S1 NERS	1.350.262,08
9	ARR	Perawat	D3	861.341,13
10	AMT	Analis		1.267.588,49
11	ABM	Apoteker	S1 FARM	865.389,48
12	ANS	Admin	S1	727.485,91
13	AYD	Bidan	D3	755.522,27
14	AJA	Perawat	D3	1.084.682,60
15	ARM	Admin	D3	193.740,00
16	AYD	Rekam Medik	D3	1.144.739,76
17	ADS	Perawat	D3	846.273,14
18	AKS	Perawat Dan Bendahara Barang	S1	1.737.305,33
19	AUN	Perawat	S1	1.340.136,87
20	AWL	Bidan	D3	937.603,52
21	AYM	SKM	D3	28.463,34
22	ASV	Perawat Gigi	S1	1.041.947,56

Lampiran 13

Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Lebih bayar Tahun 2024 (Rp)
23	ARA	Perawat	S1	1.330.752,08
24	BPM	Kesling	D3	1.270.451,26
25	BPL	Perawat	D3	919.832,13
26	BJK	Bidan	D3	654.798,28
27	CSB	Perawat	S1	28.463,34
28	CWF	Perawat	S1	570.404,37
29	CES	Gizi	S1	946.744,76
30	CWZ	Perawat	D3	1.031.810,57
31	DIB	Perawat	D3	1.187.468,29
32	DIB	Rekam Medik	D3	794.463,42
33	DT	Bidan	D3	805.555,11
34	DAG	Bidan	D3	846.817,96
35	DRB	Farmasi	D3	514.035,87
36	DBB	Bidan	D3	601.532,92
37	DAP	Dr Intersip	S1	608.397,16
38	DAF	Dr Intersip	S1	74.630,18
39	DAM	Dr Intersip	S1	519.808,55
40	DBH	Dr Intersip	S1	519.808,55
41	DBM	Dr Intersip	S1	74.630,18
42	DEK	Dr Intersip	S1	608.397,16
43	DGS	Dr Intersip	S1	74.630,18
44	DMH	Dr Intersip	S1	2.282.585,52
45	DMK	Dr Intersip	S1	608.397,16
46	DMR	Dr Intersip	S1	519.808,55
47	DSK	Dr Intersip	S1	608.397,16
48	DY	Dr Intersip	S1	74.630,18
49	DYF	Dr Intersip	S1	519.808,55
50	DEP	Dr Gigi	S1	2.381.975,80
51	EWK	Bidan	S1	993.594,82
52	EHS	Bidan	S1	857.457,16
53	EID	SKM	S1	1.010.382,76
54	EEA	Bidan	S1	791.070,14
55	EML	Gizi	S1	1.134.172,17
56	EIW	Bidan	S1	1.517.406,78
57	ELM	SKM	S1	492.895,96
58	EMA	Bidan	S1	1.732.998,87
59	FIA	Bidan	S1	518.480,37
60	FSS	Perawat	D3	477.016,58
61	FDA	Bidan	D3	1.008.578,32
62	FMG	Bidan	D3	1.544.227,07
63	FMZ	CS	SMP	366.798,83
64	FIS	Perawat	S.Kep.Ns	334.904,89
65	FJB	Perawat	S.Kep.Ns	229.028,55
66	FJK	Bidan	D3	542.907,84
67	FNG	Perawat	D3	1.058.560,06
68	GFD	Perawat	S.Kep.Ns	2.144.548,17
69	GNN	Perawat	D3	1.049.824,67
70	GN	Bidan	D3	699.430,19
71	GPM	Bidan	D3	714.330,25
72	HDA	Perawatdan Pj Tb	D3	1.226.153,79
73	HWA	Perawat	D3	645.876,92
74	HAH	Sopir	SMA	361.294,93
75	IIL	Bidan	D3	362.264,11
76	IKM	Perawat	D3	1.432.922,63
77	IEN	Perawat	D3	1.199.578,34
78	IAS	Bidan	D3	887.311,63
79	IKM	Rekam Medik	D3	563.327,27
80	IIL	Bidan	D3	605.188,59
81	IRB	SKM	S1	1.100.416,06
82	IMD	Kesling	D3	169.368,53
83	ILN	Bidan	D3	816.491,75
84	JSA	Apoteker	S1	840.861,83
85	KRF	Perawat	D3	755.150,29
86	KPT	Analis	D3	784.817,12
87	KBD	Perawat	D3	1.002.846,89
88	KAS	Perawat	S1 NERS	963.214,55
89	LKY	Perawat	S1 NERS	1.405.488,65
90	LOB	Perawat	S1 NERS	1.457.927,30
91	LLA	Perawat	S1	1.027.165,65
92	LYK	Perawat	D3	1.063.790,71

Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Lebih bayar Tahun 2024 (Rp)
93	LNB	Perawat	S1 NERS	626.748,61
94	LLN	Perawat	D3	477.983,67
95	MYT	SKM	S1	901.041,06
96	MKN	SKM	S1	310.196,71
97	MPD	Bidan	D3	638.994,82
98	MKK	Perawat	D3	1.061.079,77
99	MLG	Bidan	D3	828.106,67
100	MWU	Farmasi	D3	1.045.182,40
101	MAL	Bidan	D3	1.412.438,41
102	MDR	Bidan	D3	788.073,11
103	MFR	Perawat	D3	619.276,14
104	MIS	Perawat	D3	1.074.057,82
105	MIK	Perawat	S1	817.423,00
106	MLB	Perawat	S1	1.404.218,07
107	MMJ	SKM	S1	273.474,02
108	MMA	Apoteker	S1	1.394.536,18
109	MRI	Bidan	D3	826.557,98
110	MRM	Bidan	D3	796.921,40
111	MSL	Perawat	D3	1.018.901,29
112	MTR	Bidan	D3	944.282,64
113	MVS	Bidan	D3	417.350,24
114	MVH	Perawat	D3	881.556,25
115	MMS	Perawat	D3	1.066.452,60
116	MSA	Bidan	D3	403.490,42
117	MRI	Bidan	S1	637.706,55
118	MDM	Perawat	D3	1.113.174,76
119	MMA	Bidan	D3	744.364,84
120	M L	Perawat	S1 NERS	2.362.780,91
121	MN	Perawat	S1 NERS	81.503,10
122	MDG	Perawat	D3	1.285.010,75
123	MYK	Perawat	S1 NERS	684.590,68
124	MK	Sopir	SMP	872.687,83
125	MBN	Perawat	D3	980.301,19
126	MEB	Perawat	D3	443.087,02
127	MTK	Gizi	S1	629.074,80
128	MBA	Perawat	D3	729.079,18
129	MDA	Gizi	S1	541.624,26
130	MN	SKM	S1	1.088.818,58
131	MEZ	Perawat	S1 NERS	729.431,13
132	MIM	Bidan	D3	646.898,40
133	MMS	Perawat	D3	1.158.304,42
134	MSR	Perawat	D3	712.642,44
135	MKK	Pekarya	SMP	361.927,52
136	NB	Bidan	D3	51.124,67
137	NDN	Kesling	D3	529.413,36
138	ONA	Kesling	D3	572.763,12
139	ONN	Bidan	D3	863.510,78
140	OSA	Perawat	D3	1.240.217,90
141	ONA	Kesling	D3	436.712,66
142	OPI	Perawat	D3	1.233.665,15
143	PCG	Bidan	S1	1.009.080,27
144	PPB	CS	SMA	180.920,99
145	PT	Bidan	D3	833.176,80
146	PBA	Rekam Medik	D3	703.997,39
147	RLA	Perawat	D3	521.329,90
148	RBS	Analis	S1	1.030.500,58
149	RIP	Perawat	S1 NERS	1.761.857,16
150	RMW	Analis	D3	772.923,92
151	RHD	Perawat	D3	802.051,25
152	RIJ	Kesling	S1	911.607,92
153	SZW	Perawat	D3	310.246,84
154	SWS	SKM	S1	893.592,67
155	SKA	Rekam Medik	D3	774.905,85
156	SVK	Perawat	D3	1.130.123,61
157	SYM	Farmasi	D3	1.264.397,04
158	SAK	Perawat	D3	862.342,41
159	SNA	Rekam Medik	D3	1.113.142,62
160	SIS	Admin	S1	131.303,48
161	SWS	Perawat	S1 NERS	1.207.045,89
162	TBA	Bidan	D3	787.504,22

Lampiran 13

Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Lebih bayar Tahun 2024 (Rp)
163	TNM	Perawat	D3	1.185.606,12
164	TDG	Perawat	D3	980.600,78
165	XAT	Bidan	D3	849.534,07
166	YPN	Perawat	D3	1.411.837,07
167	YIG	Bidan	D3	1.050.222,58
168	YOD	Gizi	S.Gz	393.676,35
169	YB	Admin	SMA	358.991,65
170	YKT	Bidan	D3	766.032,05
171	YNS	Perawat	S1 NERS	1.026.601,14
172	YSD	Juruh Masak	SMA	507.117,47
173	YHD	Perawat	S1 NERS	50.766,46
174	YNN	Bidan	D3	852.773,14
175	YWA	Perawat	D3	21.716,76
176	YNM	Analis	D3	815.778,98
177	YRN	SKM	S1	544.123,86
178	YNA	Kapus	D3	346.650,24
L	**Puskesmas Watukawula**			**303.622.312,98**
1	AMA	Kesling	SI	1.798.958,82
2	ASL	Pj Ukm	D-IV	2.346.409,72
3	A M	Bikor	D-IV profesi	1.964.024,79
4	AMA	Pj Filariasis	D-III	2.301.214,89
5	AW	Perawat	SI-Ners	3.538.551,88
6	AKN	Perawat	SI-Ners	2.749.387,47
7	ANB	Satpam	SMA	1.448.159,51
8	AB	CS	SMA	994.022,29
9	ALW	Bidan Desa Kalembu Kaha	D-III	1.849.867,46
10	AB	Bidan	D-III	1.609.718,67
11	AYN	Bidan	SI	1.600.788,51
12	ALD	Bidan	D-III	830.219,82
13	ASW	Gizi	SI	1.165.110,38
14	AN	Bidan	D-IV	1.473.080,12
15	AAB	Farmasi	SI-APT	1.118.852,03
16	AIN	Admin	S-I	64.153,58
17	AB	Bidan	D-III	1.667.398,36
18	ATA	SKM	S-I	1.188.934,87
19	AGB	Farmasi	S-I	686.229,42
20	ANN	Bidan	D-IV	1.097.255,61
21	BNA	Bidan Desa Kadi Pada	D-III	1.686.701,12
22	CRD	Bidan Desa Kalena Wanno	D-IV	2.491.517,55
23	CYD	SKM	S-I	1.929.055,87
24	DTA	Sopir	SMA	1.126.075,88
25	DL	Perawat	SI-Ners	2.369.777,66
26	DNK	Pj Kesehatan Lingkungan	D-III	1.925.449,53
27	DR	Perawat	SI-Ners	329.206,59
28	DLN	Perawat Pj Mtbs	D-III	1.987.934,73
29	DAP	Dokter	S-I	244.181,85
30	DEC	Dokter	S-I	579.862,85
31	DJT	Dokter	S-I	3.515.237,25
32	DMA	Dokter	S-I	1.148.609,75
33	DMM	Dokter	S-I	252.430,88
34	DMP	Dokter	S-I	775.570,08
35	DMA	Dokter	S-I	1.194.640,35
36	DTY	Dokter	S-I	890.785,44
37	DUM	Dokter	S-I	194.687,65
38	DCU	Dokter	S-I	268.476,24
39	DPB	Dokter	S-I	1.215.284,18
40	DFA	Dokter	S-I	1.087.612,98
41	DDP	Dokter	S-I	235.932,82
42	DFL	Dokter	S-I	3.682.363,27
43	DMM	Dokter	S-I	1.083.029,77
44	DSA	Dokter	S-I	3.698.340,22
45	EFK	Perawat	S-I Ners	3.869.143,45
46	EW	Perawat	S-I Ners	3.773.942,08
47	EAR	SKM	S-I	591.098,11
48	EO	Kesling	S-I	2.045.282,46
49	ENS	SKM	S-I	1.697.587,09
50	EK	Farmasi	S-I	2.371.592,70

Lampiran 13

Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Lebih bayar Tahun 2024 (Rp)
51	ELP	Perawat	D-III	2.462.390,47
52	EMS	Perawat	S-I Ners	3.250.398,11
53	EBM	SKM	S-I	1.835.228,43
54	EDN	Perawat ,Pj Hepatitis	D-III	2.767.199,85
55	EZ	Bidan	D-III	1.427.846,16
56	EMA	Kepala Puskemsmas	D-III	2.300.026,28
57	EYI	Bendahara Bok	D-III	2.288.967,01
58	ESM	SKM	S-I	36.206,26
59	FUH	Bidan Desa Weekambala	D-IV	2.088.863,17
60	FS	Kesling	S-I	2.103.583,61
61	FAT	Perawat	D-III	839.914,42
62	FMB	Bidan	D-IV	2.330.835,34
63	FIG	Bidan	D-III	1.753.520,28
64	FB	Satpam	SMA	1.250.353,38
65	FSL	Perawat	S-I	1.699.535,10
66	FCL	Farmasi	S-I	1.536.701,28
67	FI	Bidan	D-III	1.812.678,43
68	FIN	Perawat	D-III	1.692.056,70
69	FWD	Bendahara Jkn	D-III	3.756.532,47
70	FH	Perawat	SPK	1.166.552,74
71	FDG	Perawat	D-III	220.047,84
72	FLP	Perawat	D-III	1.403.990,62
73	GDG	SKM	S-I	1.919.360,91
74	GS	Perawat	S-I Ners	136.666,95
75	GM	Farmasi	S-I Apt	2.194.672,24
76	HDR	Bidan	D-III	1.658.211,68
77	HMM	SKM.Pj Sikda	S-I	2.427.539,63
78	HRB	Analisis	S-I	1.834.928,10
79	IDG	Bidan Kelurahan Waitabula	D-III	1.938.482,51
80	ISG	Bidan	D-III	881.881,83
81	IRI	Bidan	D-IV	1.805.486,26
82	ING	Admin	S-I	1.305.712,90
83	JA	SKM	S-I	2.137.494,82
84	JB	Perawat	S-I Nesr	3.300.833,11
85	KRF	Kepala Puskesmas	D-IV	2.640.752,27
86	KM	Juru Masak	SMA	1.060.866,40
87	KC	Perawat		37.846,23
88	KRA	Perawat,Pj Cholchain	D-III	2.531.506,54
89	LMS	Bendahara Barang	S-I	2.346.018,90
90	LLB	Perawat Pj Poskesdes Kadipada	D-III	2.146.287,03
91	LNA	Perawat Pj Tb	D-III	2.261.106,65
92	MLA	Pj Gisi	D-III	882.124,52
93	MN	Perawat	D-III	1.280.331,93
94	MAB	SKM,Pj Promkes	S-I	2.954.689,15
95	MAM	Bidan	D-III	1.986.086,56
96	MDS	Perawat	D-III	37.846,23
97	MEG	Perawat	S-I	1.503.223,40
98	MFU	Analis Pj Laboratorium	D-IV	2.118.275,34
99	MID	Perawat Pj Ugd	D-III	2.302.964,12
100	MIB	Bidan ,Pj Lansia	D-III	2.557.647,27
101	MIP	Apoteker Pj Obat	S-I Apt	3.220.150,69
102	MMD	SKM	S-I	262.720,03
103	MMY	SKM	S-I	2.403.290,88
104	MMR	Perawat,Pj Ispa	S-I Ners	1.868.232,44
105	MMB	Bidan ,Pj Vk	D-III	1.821.078,70
106	MOD	Apoteker	S-I Apt	1.122.092,96
107	MPP	Perawat	D-III	1.892.892,18
108	MRJ	Perawat Gigi	D-III	1.836.045,22
109	MYW	Bidan	D-IV	2.247.332,77
110	MLA	Bidan	D-III	1.855.862,34
111	MPL	Bidan	D-III	1.614.953,53
112	MRL	Perawat,Pj Prolanis	D-III	1.449.291,15
113	MRK	Bidn Desa Weelonda	D-III	2.090.120,64
114	MI	Gizi	D-III	1.551.945,23
115	MAS	Perawat	SPK	2.085.546,89
116	MES	Perawat	S-I Ners	361.396,17
117	MYR	Bidan	D-III	1.566.627,96

Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Lebih bayar Tahun 2024 (Rp)
118	MK	Bidan	D-III	840.209,14
119	MG	Kesling	S-I	347.865,52
120	MAK	Perawat	S-I	2.721.408,69
121	NLN	Bidan	D-III	1.782.934,61
122	NAS	Bidan	D-III	1.772.545,82
123	NJS	SKM	S-I	1.851.867,76
124	NRR	Bidan Desa Kalakikambe	D-III	1.398.533,80
125	O B	Perawat	S-I	3.370.865,24
126	OR	SKM	S-I	2.333.512,74
127	OK	Analis	S-I	1.069.521,91
128	PI	Bidan	D-III	1.768.255,89
129	PDG	SKM	S-I	969.096,78
130	PL	SKM	S-I	448.615,97
131	PLM	Sopir	SMA	245.257,36
132	PMB	Kesling	D-III	1.743.998,11
133	PMV	Apoteker	S-I Apt	1.633.913,30
134	PRR	Farmasi	D-III	565.118,07
135	RMU	Pekarya	SMA	649.413,68
136	RB	CS	SMP	871.594,66
137	RTA	Perawat	S-I Ners	3.278.176,08
138	SNM	Perawat	D-III	327.974,71
139	SBS	Perawat	S-I	666.510,54
140	SAB	SKM	S-I	907.983,12
141	SEB	Perawat	S-I Ners	178.718,32
142	SLR	Perawat	D-III	1.769.212,92
143	SNB	Perawat	S-I Ners	339.398,75
144	SRT	Ktu	S-I Apt	2.617.455,78
145	SRB	Bidan	D-III	1.795.868,65
146	SAI	Analis	D-IV	2.516.118,51
147	SA	Perawat Pj Rematri	D-III	1.619.820,98
148	SSS	SKM,Pj Malaria	S-I	2.210.693,44
149	SFA	SKM	S-I	1.989.263,12
150	SLW	Perawat,Pj Poskesdes Kalena Wanno	D-III	1.311.884,91
151	TL	Perawat	S-I Ners	2.396.526,40
152	TDG	Bidan	SPK	1.854.801,22
153	TD	Perawat	S-I	1.485.368,86
154	TNL	SKM	S-I	2.506.998,38
155	TKA	Perawat,Pj Poskesdes Waitabula	D-III	2.156.864,76
156	VRA	Perawat	D-III	2.295.759,58
157	VRG	Farmasi	D-III	945.831,15
158	VWL	Perawat,Pj Imunisasi,Bend Pad	S-I Ners	2.997.076,10
159	WPA	Perawat	D-III	2.353.108,09
160	WTO	Perawat Pj Postu	S-I Ners	2.730.801,39
161	YDU	Perawat	S-I Ners	1.245.330,63
162	YBS	Perawat	S-I Ners	3.039.026,58
163	YSB	Perawat	S-I Ners	3.107.167,94
164	YIN	Apoteker	S-I Apt	2.181.837,56
165	YDK	Bidan	D-III	1.458.666,70
166	YM	Admin	SMA	1.432.269,49
167	YGB	Bidan	D-III	1.703.224,06
168	YBS	Perawat	S-I Ners	3.342.804,75
169	YDA	Bidan	D-III	2.256.310,90
170	YMA	Rekam Medis	D-III	1.335.417,08
171	YYD	Farmasi	S-I	1.329.926,38
172	YAD	Bidan	D-III	1.618.528,88
173	YB	Bidan	D-III	1.210.577,63
174	YEL	Perawat	SPK	2.320.428,58
175	YLA	Bidan	D-III	1.945.122,53
176	YKG	Bidan	D-III	1.814.520,44
177	YN	Bidan	SPK	1.963.510,31
178	YAS	Bidan	D-III	1.465.297,92
M	**Puskesmas Walla Ndimu**			**91.585.904,60**
1	AAB	Staf Puskesmas (TKS)	S1 Ners	1.707.606,43
2	AR	PNS	D3 Kebidan an	1.477.551,66

Lampiran 13

Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Lebih bayar Tahun 2024 (Rp)
3	ASI	Staf Puskesmas (TKS)	D3 Kebidan an	1.105.406,71
4	ANJ	PNS	D4 Kebidan an	1.420.758,70
5	ASD	PNS	D3 Kebidan an	1.621.452,98
6	AKW	PNS	D3 Analis	1.340.213,87
7	AAK	Asn P3K	SKM	912.427,93
8	ADK	PNS	D3 Keperawatan	1.211.711,53
9	AHO	Staf Puskesmas (TKS)	D3 Keperawatan	1.231.679,37
10	AIT	Staf Puskesmas (TKS)	D3 Kebidan an	1.192.555,60
11	AL	Staf Puskesmas (TKS)	D3 Analis	372.462,11
12	AK	Staf Puskesmas (TKS)	D3 Keperawatan Gigi	65.654,72
13	ABH	Asn P3K	D3 Keperawatan	1.426.604,12
14	BRT	Kontrak Daerah	SMP	479.947,74
15	CNS	Asn P3K	S1 Ners	1.985.567,55
16	DKA	PNS	D3 Keperawatan	1.329.547,38
17	DKH	Staf Puskesmas (TKS)	D3 Keperawatan	1.173.617,88
18	DW	PNS	D3 Keperawatan	668.745,27
19	DPN	Staf Puskesmas (TKS)	S1 Ners	1.692.598,38
20	DSL	Staf Puskesmas (TKS)	D3 Kebidan an	842.309,91
21	DR	PNS	D3 Gizi	563.769,59
22	DDW	PNS	D3 Keperawatan	1.699.411,11
23	DJS	Kontrak	S2 MARS	1.329.187,29
24	DRE	Nusantara Sehat	Dokter Umum	1.398.663,28
25	EHH	PNS	S1 Ners	1.910.090,59
26	ELM	PNS	D3 Kebidan an	1.534.387,36
27	FDD	PNS	SKM	2.274.220,06
28	FNS	PNS	SKM	2.479.681,15
29	FND	Staf Puskesmas (TKS)	D3 Keperawatan Gigi	65.654,72
30	FI	Staf Puskesmas (TKS)	D3 Kebidan an	828.406,24
31	GAW	Staf Puskesmas (TKS)	S1 Ners	1.866.036,15
32	HBB	Asn P3K	D3 Kebidan an	1.166.489,15
33	JPL	PNS	D3 Keperawatan	801.188,89
34	KKD	Asn P3K	D3 Kebidan an	1.458.278,47
35	KRM	Staf Puskesmas (TKS)	D3 Kebidan an	1.043.237,13
36	KNN	Staf Puskesmas (TKS)	D3 Kebidan an	191.849,63
37	LBM	Staf Puskesmas (TKS)	D3 Kebidan an	1.062.518,05
38	LIC	PNS	D3 Keperawatan	962.422,63
39	LJN	Kontrak Daerah	D3 Rekam Medik	1.277.975,03
40	MM	PNS	D3 Keperawatan	1.281.769,46
41	MLH	PNS	D3 Kebidan an	1.296.360,08
42	MAK	PNS	D3 Keperawatan	728.008,05

Lampiran 13

Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Lebih bayar Tahun 2024 (Rp)
43	MCC	Kontrak Daerah	S1 Ners	1.561.603,29
44	ME	PNS	SKM	585.938,77
45	MGA	Staf Puskesmas (TKS)	D3 Kebidan an	1.043.597,60
46	MRB	PNS	D3 Keperawatan	572.187,01
47	MJW	Staf Puskesmas (TKS)	D3 Keperawatan	1.106.863,27
48	MKA	Kontrak Daerah	D3 Kebidan an	967.538,85
49	MTI	Kontrak Daerah	S1 Gizi	733.460,23
50	MKP	Staf Puskesmas (TKS)	D3 Rekam Medik	309.223,89
51	MB	PNS	D3 Keperawatan	1.413.570,54
52	MGA	PNS	D3 Asisten Apoteker	1.394.835,09
53	MHA	Staf Puskesmas (TKS)	D3 Kebidan an	1.154.641,24
54	MB	Staf Puskesmas (TKS)	D3 Keperawatan	919.448,49
55	MTS	PNS	S1 Gizi	1.552.822,89
56	MAK	Kontrak Daerah	SKM	1.226.843,25
57	MKS	Kontrak Daerah	S1 Ners	1.332.454,95
58	MPS	Asn P3K	S1 Ners	1.920.315,96
59	NWK	Staf Puskesmas (TKS)	SMP	500.737,52
60	NWL	Asn P3K	SKM	912.795,78
61	NKN	Kontrak Daerah	D3 Kebidan an	874.826,41
62	NKS	Kontrak Daerah	SKM	1.704.106,84
63	NIB	Staf Puskesmas (TKS)	S1 Keperawatan	118.435,96
64	NSK	Staf Puskesmas (TKS)	D3 Kebidan an	1.217.405,55
65	PB	Kontrak Daerah	SMA	1.521.195,75
66	RIB	PNS	S1 Ners	2.063.924,85
67	RIM	Kontrak Daerah	S1 Ners	937.959,79
68	SAR	PNS	D3 Gizi	1.170.053,13
69	SS	Kontrak Daerah	SMA	524.993,33
70	SHN	Staf Puskesmas (TKS)	S1 Ners	1.009.056,12
71	TRU	Asn P3K	D3 Keperawatan	989.757,28
72	VFW	Staf Puskesmas (TKS)	D3 Analis	807.750,78
73	YKB	Asn P3K	D3 Kebidan an	1.239.651,54
74	YK	Staf Puskesmas (TKS)	D3 Administrasi	121.668,70
75	YHT	PNS	SKM	1.142.197,85
76	YTB	Staf Puskesmas (TKS)	S1 Ners	288.066,86
77	YAK	Staf Puskesmas (TKS)	D3 Kesling	88.826,97
78	YAS	Staf Puskesmas (TKS)	S1 Ners	1.820.630,23
79	YLB	PNS	D3 Keperawatan	1.685.939,50
80	YWA	Staf Puskesmas (TKS)	D3 Kebidan an	952.731,30
81	YMS	Staf Puskesmas (TKS)	S1 Ners	1.619.823,29
N	**Puskesmas Bondo Kodi**			**83.538.564,18**
1	AJA	Ass Apoteker	D3	553.295,90
2	AAK	Tenaga Rekam Medik	D3	464.597,21
3	AEK	Tenaga Perawat	S1	1.177.375,35
4	AIJ	Tenaga Perawat	S1	585.593,35
5	AL	Tenaga Perawat	D3	610.224,24
6	AHD	Pengelola Program Filaria	D3	1.057.141,53
7	AHA	Tenaga Bidan	D3	591.576,07
8	AAB	Pj Ruang Poli	D3	1.003.859,21
9	AIJ	Tenaga Bidan	D3	1.192.626,17
10	AIL	Tenaga Perawat	S1	1.420.770,25
11	ADD	Tenaga Perawat	S1	1.946.101,23
12	A K	Tenaga Bidan	D3	513.643,33

Lampiran 13

Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Lebih bayar Tahun 2024 (Rp)
13	AEM	Promkes	S1	830.916,09
14	ADA	Ass Apoteker	D3	510.622,62
15	AAK	Ass Apoteker	S1	801.538,26
16	AKS	Tenaga Administrasi	S1	148.409,88
17	AL	Menejemen Farmasi	D3	169.869,08
18	CYA	Tenaga Bidan	D3	728.649,08
19	DIH	Tenaga Perawat	S1	600.129,87
20	DA	Tenaga Bidan	D4	965.163,09
21	DNG	Tenaga Perawat	D3	839.546,54
22	DNR	Ass Apoteker	S1	464.609,22
23	DRA	Tenaga Gizi	D3	390.597,09
24	DDK	Tenaga Kesling	S1	217.432,72
25	DMA	Tenaga Perawat	D3	756.248,40
26	DSM	Dokter	S1	1.870.321,12
27	DK	Dokter	S1	252.583,46
28	DD	Dokter	S1	283.377,63
29	ENA	Tenaga Administrasi	S1	145.110,19
30	ES	Promkes	S1	1.186.367,14
31	EK	Tenaga Perawat	D3	754.128,03
32	EHA	Tenaga Bidan	D3	677.411,19
33	EGC	Tenaga Bidan	D3	738.024,17
34	EAK	Ass Apoteker	D3	1.092.135,01
35	EIK	Tenaga Perawat	D3	1.035.151,69
36	FK	Tenaga Perawat	D3	1.235.119,36
37	FKA	Tenaga Bidan	D3	308.131,03
38	GNG	Tenaga Gizi	D3	646.378,20
39	HIC	Tenaga Analis	D3	82.057,37
40	HSM	Tenaga Perawat	S1	1.129.688,45
41	IFY	Tenaga Perawat	D3	561.064,58
42	IWS	Tenaga Bidan	S1	492.666,33
43	IWS	Tenaga Bidan	D3	659.431,25
44	IAD	Tenaga Perawat	D3	923.874,37
45	IMM	Tenaga Perawat	D3	1.251.279,47
46	JMD	Tenaga Bidan	D3	742.681,98
47	KS	Tenaga Perawat	S1	1.275.527,05
48	KBA	Tenaga Rekam Medik	D3	872.294,50
49	KSS	Tenaga Apoteker	S1	1.208.368,74
50	KK	Bendahara Jkn	D3	1.450.654,83
51	KW	Tenaga Perawat	D3	870.290,55
52	KLM	Kepala Puskesmas	S1	860.599,19
53	KIK	Tenaga Administrasi	D3	511.220,25
54	KM	Tenaga Bidan	D3	1.020.421,64
55	L F	Tenaga Bidan	D3	742.513,25
56	LM	Tenaga Perawat	D3	741.476,55
57	LK	Tenaga Perawat	D3	815.917,63
58	LFT	Tenaga Bidan	D3	498.293,13
59	LID	Tenaga Bidan	D3	173.857,73
60	LIM	Tenaga Bidan	D3	192.118,73
61	LRL	CS	SMA	128.347,36
62	LWD	Tenaga Perawat	D3	499.105,00
63	MMA	Pj Lab Dan Pengelola Hepatitis	D3	1.268.491,21
64	MP	Kepala Puskesmas	D3	601.612,91
65	MG	Pj Sipilis	D3	1.265.788,15
66	MHA	Rekam Medik	D3	323.674,42
67	MIP	Tenaga Bidan	D3	175.187,28
68	MMD	Tenaga Bidan	D3	704.158,53
69	MTI	Penanggung Jawab Program 15 Penyakit	D3	1.002.148,47
70	MVS	Tenaga Bidan	D3	248.086,31
71	MZH	Pj Pustu Ate Dalo	D3	829.092,58
72	MK	Pjengelola Imunisasi	D3	835.829,56
73	MW	CS	SMA	131.625,13
74	MBA	Tenaga Bidan	D3	751.943,39
75	MK	Pengelola Raung Vk	D3	996.994,06
76	ML	Pengelola Ptm	D3	992.470,93
77	MD	Tenaga Bidan	D3	639.696,31
78	MIW	Rekam Medik	D3	433.255,72
79	MLM	Pj Polindes Wura Homba	D3	827.652,24
80	MMT	Bidan Desa Pero Batang	D3	922.007,07

Lampiran 13

Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Lebih bayar Tahun 2024 (Rp)
81	MID	Tenaga Bidan	D3	234.003,06
82	MKK	Tenaga Perawat	S1	345.380,86
83	MWB	Tenaga Perawat	D3	777.194,19
84	NEM	Tenaga Bidan	D3	754.278,52
85	NTL	Tenaga Bidan	D3	605.552,45
86	NAA	Bidan Desa Pero Kondadan Lansia	D3	950.967,05
87	NA	Tenaga Perawat	D3	850.527,97
88	OMA	Tenaga Perawat	D3	196.350,44
89	OPA	Tenaga Farm	D3	29.187,33
90	PH	Tegana Laboratorium	D3	479.982,32
91	PIM	Rekam Medik	D3	703.256,15
92	PNW	Tenaga Bidan	D3	716.828,41
93	PFU	Tenaga Apoteker	S1	212.581,06
94	RE	Pj Ranap	D3	1.098.502,93
95	RSG	Bidan Desa Ate Dalo	D3	1.101.383,17
96	RMA	Bendahara Barang	D3	978.340,34
97	RLL	Tenaga SKM	S1	122.971,66
98	RSM	Tenaga Administrasi	S1	481.548,46
99	SK	Tenaga Perawat	D3	532.802,51
100	SMS	Promkes	S1	371.451,89
101	SSA	Rekam Medik	D3	721.235,40
102	SW	Pengelola Imunisasi	D3	1.198.484,56
103	SEK	Perawat Gigi	D3	692.473,41
104	SK	Bendahara Bok	D3	995.300,50
105	ST	Tenaga Gizi	D3	312.956,04
106	SDS	Tenaga Perawat	S1	1.204.646,63
107	WDK	Juru Masak	SMA	135.803,45
108	WM	Bidan Koordinasi	D3	1.104.757,34
109	YYK	Tenaga Perawat	S1	1.105.575,95
110	YIT	Tenaga Perawat	D3	650.531,34
111	YMA	Tenaga Bidan	D3	719.152,65
112	YM	Bidan	D3	607.479,11
113	YLL	Sopir	SMA	135.803,45
114	YM	Sopir	SMA	706.724,59
115	YAM	Pengelola Gizi	S1	396.043,88
116	YMK	Perawat Gigi	D3	729.743,62
117	YMB	Perawat	D3	166.593,67
118	YHB	Perawat	D3	955.986,10
119	ZH	Bidan	D3	37.943,52
O	**Puskesmas Tanggaba**			**203.743.553,27**
1	AAL	Staf Puskesmas	D3	1.324.951,72
2	ACA	Staf Puskesmas	D3	472.637,80
3	ABL	Pj. Sdidtk Dan Bendahara Barang	D3	1.654.841,80
4	AB	Staf Puskesmas	S1	2.012.813,41
5	AM	Staf Puskesmas	D3	800.145,83
6	AM	Staf Puskesmas	D3	678.350,19
7	ALD	Staf Puskesmas	D3	1.080.564,25
8	AL	Staf Puskesmas	D3	1.129.057,37
9	AWD	Staf Puskesmas	D3	297.299,23
10	ASM	Staf Puskesmas	S1	1.366.343,27
11	AHM	Staf Puskesmas	S2	742.985,70
12	AYB	Staf Puskesmas	S1	325.834,78
13	ACR	Staf Puskesmas	Ners	1.856.511,43
14	AMM	Staf Puskesmas	S1	1.978.044,67
15	APR	Staf Puskesmas	D3	1.089.815,79
16	ADP	Staf Puskesmas	S1	547.402,49
17	AK	Staf Puskesmas	D3	1.051.483,47
18	AY	Staf Puskesmas	S1	570.120,78
19	AOA	Pj. Pcare Kia	D3	1.797.106,74
20	AMM	Staf Puskesmas	D3	1.086.854,92
21	ANL	Staf Puskesmas	Ners	2.216.712,60
22	ABN	Staf Puskesmas	D3	449.233,21
23	BBU	Staf Puskesmas	SMA	110.876,72
24	BMA	Staf Puskesmas	D3	79.857,50
25	BE	Staf Puskesmas	S1	1.057.136,58
26	CFK	Staf Puskesmas	D3	1.326.481,63
27	CDP	Staf Puskesmas	Ners	560.037,22

Lampiran 13

Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Lebih bayar Tahun 2024 (Rp)
28	CPP	Staf Puskesmas	D3	1.511.002,38
29	CN	Staf Puskesmas	Ners	2.920.791,00
30	DDN	Staf Puskesmas	D3	1.300.590,04
31	DNS	Staf Puskesmas	S1	1.500.549,90
32	DKD	Staf Puskesmas	D3	1.145.734,48
33	DKI	Pj. Mpdn	S1	1.657.284,34
34	DBA	Staf Puskesmas	D3	1.449.513,38
35	DFZ	Staf Puskesmas	D3	1.301.925,12
36	DAM	Staf Puskesmas	D3	1.317.785,35
37	DHB	Pj.Lansia	D3	1.664.139,79
38	DBA	Staf Puskesmas	D3	1.238.712,08
39	DB	Staf Puskesmas	SMA	516.040,61
40	DDS	Staf Puskesmas	Ners	1.685.171,84
41	DEH	Dokter Umum	Dokter	544.787,95
42	DMF	Dokter Umum	Dokter	3.148.835,81
43	DMK	Dokter Umum	Dokter	2.476.716,44
44	ENH	Staf Puskesmas	S1	1.216.582,56
45	ESP	Staf Puskesmas	S1	800.998,36
46	EYU	Staf Puskesmas	D3	1.303.887,20
47	EKD	Staf Puskesmas	D3	1.446.997,88
48	ET	Staf Puskesmas	D3	1.174.067,44
49	FRN	Staf Puskesmas	Ners	910.576,10
50	FUG	Staf Puskesmas	D3	347.557,09
51	FYS	Staf Puskesmas	S1	1.869.807,39
52	FMA	Bendahara Jkn Dan Sdimdk	D3	2.405.547,11
53	FKR	Pj. Imunisasi	D3	1.566.772,03
54	FMS	Staf Puskesmas	S1	1.555.424,17
55	GIF	Pj. Diare Dan Bendahara Pad	Ners	2.754.364,51
56	HAA	Pj. Promkes	S1	1.730.884,75
57	HPM	Staf Puskesmas	S1	384.188,13
58	IPM	Staf Puskesmas	D3	983.660,19
59	IK	Staf Puskesmas	D3	341.212,25
60	IJN	Staf Puskesmas	Ners	642.791,58
61	ICB	Pj. Malaria	D3	1.771.371,01
62	JIL	Staf Puskesmas	D3	1.278.916,47
63	JMB	Staf Puskesmas	D3	910.949,71
64	KIL	Staf Puskesmas	S1	1.095.922,98
65	KBA	Pj. Kematian	D3	1.569.536,79
66	LM	Staf Puskesmas	S1	1.488.566,74
67	LN	Staf Puskesmas	S1	512.180,97
68	MAM	Staf Puskesmas	Ners	912.909,31
69	MMK	Staf Puskesmas	Ners	1.852.662,35
70	MAM	Staf Puskesmas	Ners	316.959,95
71	MD	Pj. Hiv/Aids	D3	1.693.734,83
72	MM	Staf Puskesmas	D3	1.333.210,04
73	MMA	Karu Ugd	D3	1.671.003,69
74	MAA	Staf Puskesmas	D3	1.128.497,53
75	MIB	Staf Puskesmas	Ners	1.588.331,79
76	MKW	Pj. Obat	S1	1.473.563,43
77	MOR	Pustu Ombarede	D3	1.250.060,26
78	MTJ	Staf Puskesmas	D3	988.629,14
79	MLW	Staf Puskesmas	D3	1.822.656,45
80	MRG	Pj. Uks	D3	1.653.471,29
81	ML	Staf Puskesmas	D3	853.305,85
82	MIM	Staf Puskesmas	Ners	480.355,94
83	ML	Staf Puskesmas	Ners	1.586.954,10
84	MDD	Staf Puskesmas	D3	1.142.664,93
85	MNN	Pj. Lb1	D3	2.030.061,94
86	MRM	Pj. Keswa	D3	1.555.936,69
87	MNL	Pj. Filariasis	SPK	1.436.031,02
88	MD	Staf Puskesmas	S1	865.253,77
89	MPL	Pj. Keswa	D3	1.066.713,59
90	MGR	Sopir	SMA	908.090,02
91	MBA	Staf Puskesmas	D3	1.702.516,76
92	MED	Staf Puskesmas	Ners	1.996.901,33
93	MP	Staf Puskesmas	D3	1.226.687,05
94	MAP	Staf Puskesmas	Ners	1.847.671,42
95	MAE	Bendahara Jkn	D3	1.688.211,66

Lampiran 13

Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Lebih bayar Tahun 2024 (Rp)
96	NRK	Pustu Mata Weekokor	D3	1.879.038,43
97	NRK	Ktu Dan Pj. Pkpr	Ners	3.199.511,28
98	NKD	Staf Puskesmas	D3	1.725.801,81
99	NDN	Pj. Mtbs	D3	1.927.563,36
100	NED	Pj.Dbd	D3	1.498.401,94
101	NL	Staf Puskesmas	D3	1.323.340,00
102	OLN	Staf Puskesmas	S1	1.257.082,16
103	PAA	Staf Puskesmas	D3	991.852,19
104	PGM	Staf Puskesmas	S1	1.740.490,02
105	PMA	Pustu Weekokor	Ners	2.424.865,48
106	RP	Pj. Sdidtk	D3	1.652.972,80
107	RDA	Pustu Lombu	D3	1.997.566,41
108	RP	Karu Laboratorium	S1	1.278.640,14
109	RDA	Staf Puskesmas	D3	1.791.013,33
110	SEW	Staf Puskesmas	D3	1.135.462,85
111	SEM	Staf Puskesmas	D3	977.399,73
112	SAN	Pj. Obat	D3	1.703.328,43
113	SET	Staf Puskesmas	Ners	1.374.489,87
114	SWP	Pj. Gizi	S1	1.801.488,75
115	SMR	Staf Puskesmas	S1	1.486.523,95
116	SIK	Staf Puskesmas	D3	975.012,68
117	SSL	Staf Puskesmas	D3	1.259.388,26
118	SGB	Kepala Puskesmas	D3	3.842.239,67
119	SJZ	Staf Puskesmas	D3	1.264.290,46
120	VBA	Staf Puskesmas	D3	1.693.215,44
121	VAD	Staf Puskesmas	S1	898.603,66
122	VDD	Staf Puskesmas	S1	1.867.538,48
123	VND	Staf Puskesmas	D3	684.057,45
124	VSB	Staf Puskesmas	D3	1.115.366,16
125	VMD	Staf Puskesmas	D3	988.407,12
126	VID	Sopir	SMA	634.702,01
127	WWN	Staf Puskesmas	D3	1.627.258,08
128	WMA	Pj. Choulchein Dan Rujukan	D3	1.816.162,36
129	WTI	Staf Puskesmas	D3	847.721,89
130	YL	Staf Puskesmas	S1	1.568.552,64
131	YKA	Pj. Survelaince Dan P.Care	D3	2.296.879,84
132	YSB	Pj. Ptm	D3	1.327.192,28
133	YUR	Staf Puskesmas	S1	1.234.931,42
134	YES	Pj. Filariasis	D3	1.789.644,28
135	YAA	Pj. Kelas Ibu Balita	D3	1.607.504,80
136	YIK	Staf Puskesmas	D3	1.652.652,73
137	YLK	Karu Vk	D3	1.991.104,78
138	YBT	Staf Puskesmas	S1	1.397.211,13
139	YAB	Staf Puskesmas	D3	1.878.356,26
140	YDA	Bikor Dan Karu Kia	D3	1.907.636,50
141	YK	Staf Puskesmas	D3	1.127.431,43
142	YK	Staf Puskesmas	D3	1.251.043,72
143	YDA	Staf Puskesmas	D3	1.544.727,17
144	YMB	Pj. Tbc	D3	1.794.497,57
145	YYP	Staf Puskesmas	S1	1.326.123,66
146	YAM	Staf Puskesmas	Ners	1.151.894,43
147	YMB	Staf Puskesmas	D3	1.446.717,20
148	YP	Staf Puskesmas	D3	373.599,70
149	YNI	Pustu Ekapata	D3	1.216.163,93
P	**Puskesmas Kori**			**110.590.302,79**
1	ASM	Apoteker	S-1 Apoteker	457.720,88
2	AMS	Perawat	S-1 Ners	1.913.459,02
3	ANM	Farmasi	D-III	923.670,26
4	ARI	Bidan	D-III	838.504,54
5	AXM	Perawat	D-III	1.265.219,00
6	ADS	Bidan	D-III	599.474,16
7	AB	Sopir	SMA	446.388,76
8	ABN	Analis	D-III	673.725,50
9	AFS	Bidan	D-III	1.053.800,06
10	AUM	Farmasi	D-III	779.387,95
11	ASS	Analis	D-IV	942.044,84
12	ABL	Perawat	D-III	1.335.000,83

Lampiran 13

Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Lebih bayar Tahun 2024 (Rp)
13	AYP	Penyuluh Kesehatan	S-1	1.450.016,36
14	AJN	Administrasi	S-1	722.140,54
15	ADK	Rekam Medik	D-III	522.170,73
16	AKT	Penyuluh Kesehatan	S-1	1.260.718,27
17	ATI	Bidan	D-III	1.402.348,31
18	AMK	Bidan	D-III	351.251,52
19	CIT	Bidan	D-III	856.968,77
20	DKA	Bidan	D-III	1.822.040,58
21	DIN	Penjaga Malam	SMA	341.247,33
22	DIS	Perawat	D-III	1.249.888,53
23	DDA	Perawat	D-III	1.065.510,68
24	DTI	Bidan	D-III	1.428.444,03
25	DLS	Bidan	D-IV	1.538.141,88
26	DNB	Perawat	S-1 Ners	318.470,00
27	D D	Sanitarian	S-1	390.541,35
28	DDH	Kesmas	S-1	541.760,50
29	DYL	Perawat	S-1 Ners	1.732.322,78
30	DDW	Perawat	S-1	524.299,67
31	DCE	Dokter Umum	S-1 Kedokteran	1.937.449,43
32	DEN	Dokter Umum	S-1 Kedokteran	1.500.316,96
33	DSC	Dokter Umum	S-1 Kedokteran	587.630,24
34	DDD	Dokter Gigi	S-1 Kedokteran	1.596.465,80
35	EKB	Perawat	S-1 Ners	334.781,84
36	EWK	Perawat	S-1 Ners	1.537.440,97
37	EIW	Perawat	D-III	1.071.333,02
38	END	Perawat	D-III	1.807.391,49
39	FK	CS	SMA	372.070,88
40	HDK	Perawat	S-1 Ners	169.093,14
41	IGS	Adminkes	S-1	1.448.482,77
42	IMK	Bidan	D-III	838.504,54
43	KTD	Rekam Medik	D-III	878.626,40
44	KMP	Perawat	D-III	1.249.888,53
45	KM	Sopir	SMA	892.777,52
46	KAK	Bidan	D-III	1.149.401,41
47	KCK	Perawat	D-III	667.519,83
48	KTI	Perawat	D-III	1.388.195,80
49	LNS	Apoteker	S-1 Apoteker	1.836.646,35
50	LAK	Bidan	D-III	991.397,02
51	MGA	Bidan	D-III	1.071.333,02
52	MPK	Perawat	S-1 Ners	1.698.573,89
53	MDK	Rekam Medik	D-III	1.053.736,05
54	MMA	Bidan	D-III	742.661,46
55	MDW	Bidan	D-III	1.074.219,00
56	MDW	Perawat	S-1 Ners	1.692.719,00
57	MIK	Bidan	D-III	1.063.551,84
58	MKB	Bidan	D-III	955.458,48
59	MSL	Perawat	S-1 Ners	1.709.634,58
60	MTI	Perawat	S-1 Ners	252.533,84
61	MH	Bidan	D-III	837.561,00
62	MIK	Perawat	S-1 Ners	1.724.125,08
63	MTA	Farmasi	D-III	1.032.481,95
64	MIK	Perawat	S-1 Ners	1.769.386,39
65	MHL	Perawat	S-1 Ners	2.059.899,33
66	MMK	Perawat	D-III	1.249.888,53
67	MJP	Perawat	D-III	1.284.590,07
68	MNS	Ktu	S-1	2.507.374,95
69	NBA	Bidan	D-III	801.072,01
70	NA	Bidan	D-III	1.249.888,53
71	OAH	Perawat	S-1 Ners	132.332,12
72	OAA	Perawat	D-III	1.161.393,59
73	ORM	Bidan	D-III	1.148.265,43
74	OAK	Sanitarian	D-III	57.038,69
75	OBK	Analis	D-III	1.123.623,93
76	ORK	Gizi	S-1	683.436,29
77	OBA	Bidan	D-III	961.237,73
78	PPM	Bidan	D-IV	1.603.784,06

Lampiran 13

Rincian Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Lebih Bayar

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Lebih bayar Tahun 2024 (Rp)
79	PPB	CS	SMA	236.601,82
80	PPM	Sanitarian	S-1	971.583,72
81	PAM	Farmasi	D-III	929.438,42
82	PKM	Bidan	D-III	1.003.899,33
83	RM	Juru Masak	SMA	257.781,03
84	RRB	Bidan	D-III	1.328.706,76
85	RTA	Perawat	D-III	1.606.999,54
86	R M	Gizi	D-III	134.648,19
87	RRH	CS	SMA	116.968,26
88	SDI	Perawat	S-1 Ners	1.351.535,15
89	SK	Bidan	D-III	280.723,82
90	SDD	Juru Masak	SMA	178.771,82
91	SLN	CS	SMA	371.213,05
92	SCI	Gizi	D-III	1.025.273,07
93	SAH	Rekam Medik	D-III	1.033.633,46
94	SAM	Penyuluh Kesehatan	S-1	289.082,26
95	SEA	Perawat	D-III	1.378.060,52
96	SDY	Perawat	D-III	1.016.762,88
97	SMK	Kepala Puskesmas	D-III	3.303.276,82
98	SRM	Rekam Medik	D-III	816.832,54
99	VIN	Bidan	D-III	1.071.333,02
100	YAB	Perawat	D-III	1.097.813,77
101	YRB	Perawat	S-1 Ners	734.648,90
102	YC	CS	SMP	446.388,76
103	YKA	Perawat	D-III	1.440.829,61
104	YET	Perawat	D-III	1.016.787,91
105	YRP	CS	SMA	116.968,26
106	YTK	Gizi	D-III	1.188.614,67
107	YWA	Perawat	D-III	922.821,95
108	YIC	Perawat	S-1 Ners	1.218.411,07
	Jumlah (A s.d P)			**2.128.909.167,54**

Lampiran 14

Rincian Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan atas Peserta JKN PBI yang Telah Meninggal Dunia

NO	Nama	NIK	Tanggal Kematian	No. Akta Kematian	Tanggal Akta Kematian	Jan (Rp)	Feb (Rp)	Mar (Rp)	Apr (Rp)	Mei (Rp)	Jun (Rp)	Jul (Rp)	Ags (Rp)	Sep (Rp)	Okt (Rp)	Nov (Rp)	Des (Rp)	Total Kelebihan Pembayaran (Rp)
A	**Tahun 2016**																	**378.000,00**
1	KMM	531801630192xxxx	2015-04-06	5318-KM-09052016-0001	2016-05-09	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	**378.000,00**
B	**Tahun 2017**																	**378.000,00**
1	DLT	531804501049xxxx	2016-08-12	5318-KM-31072017-0001	2017-07-31	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	**378.000,00**
C	**Tahun 2022**																	**3.439.800,00**
1	VHM	531805240977xxxx	2021-09-14	5318-KM-25012022-0001	2022-01-25	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	**378.000,00**
2	FFH	531809660278xxxx	2019-03-20	5318-KM-17052022-0004	2022-05-17	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	**378.000,00**
3	BMB	531805030889xxxx	2015-02-10	5318-KM-13062022-0002	2022-06-13	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	**378.000,00**
4	MMO	531804120364xxxx	2022-04-05	5318-KM-16062022-0001	2022-06-16	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**37.800,00**
5	RKK	531808700964xxxx	2022-01-03	5318-KM-14072022-0002	2022-07-14	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	**378.000,00**
6	MAL	531804130305xxxx	2018-03-20	5318-KM-22092022-0002	2022-09-22	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	**378.000,00**
7	SK	531809680155xxxx	2019-12-25	5318-KM-23092022-0002	2022-09-23	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	**378.000,00**
8	YDB	531809170879xxxx	2022-10-10	5318-KM-25102022-0002	2022-10-25	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	**378.000,00**
9	WWN	531803050688xxxx	2022-03-09	5318-KM-17112022-0002	2022-11-17	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	**378.000,00**
10	SP	531803411252xxxx	2022-11-17	5318-KM-16122022-0002	2022-12-16	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	**378.000,00**
D	**Tahun 2023**																	**3.553.200,00**
1	YBM	531807151203xxxx	2023-04-28	5318-KM-26052023-0001	2023-05-26	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	**378.000,00**
2	MZ	531803010380xxxx	2018-05-14	5318-KM-06062023-0004	2023-06-06	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**37.800,00**
3	MMB	531810030173xxxx	2019-07-05	5318-KM-19062023-0001	2023-06-19	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	**378.000,00**
4	GG	531803150972xxxx	2023-05-25	5318-KM-21062023-0002	2023-06-21	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**37.800,00**
5	LW	531804711247xxxx	2016-05-19	5318-KM-20072023-0007	2023-07-20	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	**378.000,00**
6	AKP	531807280858xxxx	2021-11-19	5318-KM-20072023-0006	2023-07-20	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	**378.000,00**
7	YLI	531803430285xxxx	2013-08-06	5318-KM-31072023-0001	2023-07-31	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**37.800,00**
8	ADN	531803130588xxxx	2014-10-29	5318-KM-31072023-0002	2023-07-31	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	**378.000,00**
9	YBM	531801030664xxxx	2023-07-21	5318-KM-01082023-0003	2023-08-01	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**37.800,00**
10	YBA	531810230778xxxx	2023-07-04	5318-KM-15082023-0001	2023-08-15	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**37.800,00**
11	ET	531808060588xxxx	2015-08-29	5318-KM-05092023-0002	2023-09-05	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**37.800,00**
12	JTI	531803490110xxxx	2014-12-09	5312-KM-12092023-0001	2023-09-12	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**37.800,00**
13	WW	531803570953xxxx	2020-02-12	5318-KM-14092023-0001	2023-09-14	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**37.800,00**
14	YNW	531803200142xxxx	2018-02-09	5318-KM-26092023-0002	2023-09-26	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**453.600,00**
15	YUP	531204020688xxxx	2022-08-14	5318-KM-05102023-0005	2023-10-05	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**37.800,00**
16	SDD	537104121289xxxx	2023-09-23	5318-KM-05102023-0001	2023-10-05	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	**264.600,00**
17	DM	531802100879xxxx	2016-12-01	5318-KM-18122023-0004	2023-12-18	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**151.200,00**
18	YDB	531805430620xxxx	2022-11-29	5318-KM-18122023-0002	2023-12-18	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**453.600,00**
E	**Tahun 2024**																	**2.154.600,00**
1	SLB	531801310347xxxx	2021-01-14	5318-KM-03012024-0005	2024-01-03	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**113.400,00**
2	WSD	531809141071xxxx	2020-04-04	5318-KM-08012024-0004	2024-01-08	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**113.400,00**
3	NB	531809311252xxxx	2023-09-22	5318-KM-12012024-0003	2024-01-12	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	**378.000,00**
4	ADA	531805190489xxxx	2023-04-12	5318-KM-15012024-0003	2024-01-15	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**113.400,00**
5	YL	531803440795xxxx	2024-01-08	5318-KM-18012024-0001	2024-01-18	-	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**37.800,00**
6	FBD	531803020868xxxx	2024-01-11	5318-KM-29012024-0002	2024-01-29	-	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**37.800,00**
7	WM	531803450352xxxx	2022-09-14	5318-KM-01022024-0002	2024-02-01	-	-	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**75.600,00**
8	SLP	531801311263xxxx	2023-07-11	5318-KM-26022024-0002	2024-02-26	-	-	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**75.600,00**
9	MB	531803070352xxxx	2024-02-12	5318-KM-21032024-0001	2024-03-21	-	-	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	-	**113.400,00**
10	YB	531803511262xxxx	2019-03-11	5318-KM-22032024-0001	2024-03-22	-	-	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	-	**113.400,00**
11	DDW	531806420853xxxx	2010-06-04	5318-KM-23042024-0001	2024-04-23	-	-	-	-	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	-	**75.600,00**
12	PB	531803491047xxxx	2017-03-30	5318-KM-03052024-0004	2024-05-03	-	-	-	-	-	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	**75.600,00**
13	DB	531801151163xxxx	2013-06-22	5318-KM-13052024-0001	2024-05-13	-	-	-	-	-	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	**75.600,00**
14	MKB	531803430369xxxx	2016-04-17	5318-KM-15052024-0001	2024-05-15	-	-	-	-	-	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	**75.600,00**
15	RWK	531803711260xxxx	2024-05-11	5318-KM-29052024-0002	2024-05-29	-	-	-	-	-	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	**75.600,00**
16	MM	531801650549xxxx	2024-05-21	5318-KM-30052024-0002	2024-05-30	-	-	-	-	-	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	**75.600,00**
17	WHD	531801030571xxxx	2023-12-20	5318-KM-11062024-0002	2024-06-11	-	-	-	-	-	-	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	**75.600,00**
18	FRN	531801010173xxxx	2024-06-13	5318-KM-02072024-0001	2024-07-02	-	-	-	-	-	-	-	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**75.600,00**
19	SDD	531804260970xxxx	2024-05-23	5318-KM-17072024-0003	2024-07-17	-	-	-	-	-	-	-	37.800,00	-	-	-	-	**37.800,00**
20	TPB	531802540472xxxx	2020-06-28	5318-KM-31072024-0003	2024-07-31	-	-	-	-	-	-	-	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**75.600,00**
21	TK	531809460649xxxx	2009-02-12	5318-KM-07082024-0001	2024-08-07	-	-	-	-	-	-	-	-	37.800,00	-	-	-	**37.800,00**
22	YPR	531801041008xxxx	2022-12-21	5318-KM-20082024-0005	2024-08-20	-	-	-	-	-	-	-	-	37.800,00	-	-	-	**37.800,00**
23	IRK	531804120898xxxx	2024-08-24	5318-KM-12092024-0003	2024-09-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.800,00	-	-	**37.800,00**
24	LR	531807091060xxxx	2022-07-27	5318-KM-13092024-0004	2024-09-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.800,00	-	-	**37.800,00**
25	DF	531801430849xxxx	2024-10-13	5318-KM-23102024-0001	2024-10-23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.800,00	-	**37.800,00**
26	BN	531809071050xxxx	2017-03-27	5318-KM-05112024-0005	2024-11-05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.800,00	**37.800,00**
27	YTS	531804050588xxxx	2022-10-30	5318-KM-07112024-0002	2024-11-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.800,00	**37.800,00**
Jumlah (A s.d E)																		**9.903.600,00**

Lampiran 15

Rincian Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan atas Peserta JKN PBI yang Telah Mutasi Keluar dari Kabupaten Sumba Barat Daya

No.	Nama	NIK	Nama Provinsi	Nama Kabupaten	No. Kepindahan	Tanggal Pindah	Jan (Rp)	Feb (Rp)	Mar (Rp)	Apr (Rp)	Mei (Rp)	Jun (Rp)	Jul (Rp)	Ags (Rp)	Sep (Rp)	Okt (Rp)	Nov (Rp)	Des (Rp)	Total Kelebihan Pembayaran (Rp)
A	Tahun 2023																		39.765.600,00
1	DA	5318034501 82xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT	SKPWNI/5318/13012023/0004	13/01/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	-	226.800,00
2	FB	5318042806 87xxxx	NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU	SKPWNI/5318/16012023/0001	16/01/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	264.600,00
3	JJK	5318055611 92xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT	SKPWNI/5318/24012023/0005	24/01/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	453.600,00
4	DSW	5318015210 90xxxx	JAWA TIMUR	JOMBANG	SKPWNI/3311/31012023/0023	31/01/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	264.600,00
5	FWL	9171025609 91xxxx	JAWA TIMUR	JEMBER	SKPWNI/9171/31012023/0048	31/01/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	453.600,00
6	YIG	5312153101 97xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT	SKPWNI/5318/03022023/0010	03/02/2023	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.800,00
7	ACN	5318031808 19xxxx	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	SKPWNI/5318/06022023/0001	06/02/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	264.600,00
8	CWP	5318036210 07xxxx	DKI JAKARTA	JAKARTA UTARA	SKPWNI/5318/09022023/0008	09/02/2023	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.800,00
9	GRN	5318040704 00xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	MALAKA	SKPWNI/5318/09022023/0003	09/02/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	453.600,00
10	JBA	5318040509 87xxxx	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	SKPWNI/5318/10022023/0008	10/02/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	264.600,00
11	JKA	5318044412 15xxxx	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	SKPWNI/5318/10022023/0008	10/02/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	264.600,00
12	TMA	5318045103 92xxxx	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	SKPWNI/5318/10022023/0008	10/02/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	264.600,00
13	GW	5312151012 74xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	NGADA	SKPWNI/5312/15022023/0002	15/02/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	453.600,00
14	SR	5318015012 82xxxx	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	SKPWNI/5318/16022023/0006	16/02/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	453.600,00
15	SM	5318014806 79xxxx	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	SKPWNI/5318/16022023/0006	16/02/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	453.600,00
16	SN	5318014705 81xxxx	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	SKPWNI/5318/16022023/0006	16/02/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	453.600,00
17	LLU	5318033006 99xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	ROTE NDAO	SKPWNI/5318/21022023/0003	21/02/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	264.600,00
18	PKK	5318024309 89xxxx	BALI	KOTA DENPASAR	SKPWNI/5318/03032023/0014	03/03/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	264.600,00
19	BT	5318033105 84xxxx	BALI	TABANAN	SKPWNI/5318/07032023/0001	07/03/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	264.600,00
20	MN	5318036103 83xxxx	BALI	TABANAN	SKPWNI/5318/07032023/0001	07/03/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	264.600,00
21	VJJ	5318032711 12xxxx	BALI	TABANAN	SKPWNI/5318/07032023/0001	07/03/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	264.600,00
22	RRL	5318030607 92xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT	SKPWNI/5318/13032023/0006	13/03/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	264.600,00
23	SIK	5318045311 97xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT	SKPWNI/5318/20032023/0008	20/03/2023	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.800,00
24	MB	5318046503 96xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT	SKPWNI/5318/28032023/0029	28/03/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	264.600,00
25	FYB	5318012802 00xxxx	JAWA BARAT	BANDUNG	SKPWNI/5318/30032023/0004	30/03/2023	-	-	-	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	189.000,00
26	PEK	5318036709 11xxxx	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	SKPWNI/5318/30032023/0007	30/03/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	264.600,00
27	DNB	5318020707 75xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SKPWNI/5318/27042023/0021	27/04/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	340.200,00
28	LSD	5318032103 12xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	SKPWNI/5318/28042023/0002	28/04/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	264.600,00
29	AID	5312042605 14xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT	SKPWNI/5318/02052023/0028	02/05/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	264.600,00
30	BNK	5308202408 96xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	ENDE	SKPWNI/5318/04052023/0016	04/05/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	-	226.800,00
31	DCR	5318010512 70xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SKPWNI/5318/04052023/0011	04/05/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	264.600,00
32	MII	5318046708 09xxxx	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TIMUR	SKPWNI/5318/04052023/0015	04/05/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	264.600,00
33	YM	5318015306 90xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI	SKPWNI/5318/05052023/0004	05/05/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	453.600,00
34	VVU	5318032610 04xxxx	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	SKPWNI/5318/09052023/0014	09/05/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	264.600,00
35	MD	5318030602 92xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	ROTE NDAO	SKPWNI/5318/12052023/0008	12/05/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	264.600,00
36	YJL	5371042011 91xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	SKPWNI/5318/12052023/0003	12/05/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	264.600,00
37	ETA	5318012602 00xxxx	KALIMANTAN TENGAH	SUKAMARA	SKPWNI/5318/30052023/0017	30/05/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	264.600,00
38	EBA	5318045701 82xxxx	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	SKPWNI/5318/31052023/0019	31/05/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	264.600,00
39	JEA	5318016601 19xxxx	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	SKPWNI/5318/31052023/0019	31/05/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	264.600,00
40	JAB	5318010201 14xxxx	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	SKPWNI/5318/31052023/0019	31/05/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	264.600,00
41	USD	5318030612 15xxxx	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	SKPWNI/5318/31052023/0008	31/05/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	453.600,00
42	IAB	5318022707 21xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SKPWNI/5318/06062023/0008	06/06/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	453.600,00
43	ABL	5318040606 86xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SKPWNI/5318/07062023/0008	07/06/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	453.600,00
44	FUL	5318030102 17xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SKPWNI/5318/09062023/0007	09/06/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	340.200,00
45	JUL	5318030107 91xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SKPWNI/5318/09062023/0007	09/06/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	340.200,00
46	MM	5318034107 97xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SKPWNI/5318/09062023/0007	09/06/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	340.200,00
47	RYP	5318105203 88xxxx	KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN TIMUR	SKPWNI/6207/09062023/0018	09/06/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	453.600,00
48	RHG	5318042909 09xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI BARAT	SKPWNI/5318/12062023/0025	12/06/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	340.200,00
49	RIY	5318044307 11xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI BARAT	SKPWNI/5318/12062023/0025	12/06/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	340.200,00
50	DNT	5318032912 03xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	SKPWNI/5318/13062023/0006	13/06/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	453.600,00
51	JJI	5318094307 16xxxx	JAWA BARAT	BOGOR	SKPWNI/5318/21062023/0003	21/06/2023	-	-	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	340.200,00
52	DMN	5318076312 07xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT	SKPWNI/5318/05072023/0003	05/07/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.400,00
53	MDO	5318037105 93xxxx	KALIMANTAN TENGAH	BARITO SELATAN	SKPWNI/5318/05072023/0023	05/07/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.400,00
54	MSB	5318101212 89xxxx	KALIMANTAN TENGAH	SUKAMARA	SKPWNI/5318/05072023/0025	05/07/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	453.600,00
55	EJH	5318082201 04xxxx	AERAH ISTIMEWA YOGYAKART	SLEMAN	SKPWNI/5318/11072023/0004	11/07/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	453.600,00
56	ASW	5315054504 95xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI BARAT	SKPWNI/5315/14072023/0001	14/07/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	453.600,00
57	ARB	5318084203 94xxxx	KALIMANTAN TENGAH	LAMANDAU	SKPWNI/5318/17072023/0013	17/07/2023	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.800,00
58	TMN	5318077112 93xxxx	BALI	BADUNG	SKPWNI/5318/17072023/0005	17/07/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.400,00
59	JB	5304045107 99xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	MALAKA	SKPWNI/5318/18072023/0010	18/07/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	453.600,00
60	WKG	5318010104 93xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TENGAH	SKPWNI/5318/21072023/0008	21/07/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	453.600,00
61	AM	5318095301 11xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SIKKA	SKPWNI/5318/03082023/0012	03/08/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	453.600,00
62	FLJ	5318095806 17xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SIKKA	SKPWNI/5318/03082023/0012	03/08/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	453.600,00
63	YN	5318097107 12xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SIKKA	SKPWNI/5318/03082023/0012	03/08/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	453.600,00
64	MGI	5318074304 17xxxx	KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	SKPWNI/5318/07082023/0010	07/08/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	453.600,00
65	MUS	1210085709 92xxxx	SUMATERA UTARA	TOBA	SKPWNI/1210/07082023/0039	07/08/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	453.600,00
66	KS	3524204604 95xxxx	JAWA TIMUR	LAMONGAN	SKPWNI/3524/08082023/0041	08/08/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	453.600,00
67	ACN	5318035902 16xxxx	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	SKPWNI/6408/10082023/0042	10/08/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	264.600,00
68	CND	5317054112 94xxxx	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	SKPWNI/6408/10082023/0042	10/08/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	264.600,00
69	MMN	5318025205 97xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SKPWNI/5318/11082023/0003	11/08/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	-	226.800,00
70	VY	5319014506 77xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	NAGEKEO	SKPWNI/5318/14082023/0001	14/08/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	340.200,00
71	YPD	5318015806 90xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SKPWNI/5318/15082023/0019	15/08/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	453.600,00

Lampiran 15

Rincian Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan atas Peserta JKN PBI yang Telah Mutasi Keluar dari Kabupaten Sumba Barat Daya

No.	Nama	NIK	Nama Provinsi	Nama Kabupaten	No. Kepindahan	Tanggal Pindah	Jan (Rp)	Feb (Rp)	Mar (Rp)	Apr (Rp)	Mei (Rp)	Jun (Rp)	Jul (Rp)	Ags (Rp)	Sep (Rp)	Okt (Rp)	Nov (Rp)	Des (Rp)	Total Kelebihan Pembayaran (Rp)
72	YDD	5318046010820xxxx	BALI	KOTA DENPASAR	SKPWNI/5318/16082023/0007	16/08/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**453.600,00**
73	CMR	5318094708160xxxx	JAWA TIMUR	JEMBER	SKPWNI/3509/21082023/0018	21/08/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**453.600,00**
74	BUL	5371041502820xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	SKPWNI/5318/28082023/0011	28/08/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**340.200,00**
75	CKI	5312046802860xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	SKPWNI/5318/28082023/0011	28/08/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**340.200,00**
76	GNU	5371051204140xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	SKPWNI/5318/28082023/0011	28/08/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**340.200,00**
77	MCK	5371056505190xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	SKPWNI/5318/28082023/0011	28/08/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**340.200,00**
78	SBT	5318011103860xxxx	KALIMANTAN TENGAH	SUKAMARA	SKPWNI/5318/28082023/0004	28/08/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**453.600,00**
79	YRD	5371054803180xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	SKPWNI/5318/28082023/0011	28/08/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**340.200,00**
80	ADL	5318034708920xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH SELATA	SKPWNI/5318/29082023/0001	29/08/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	**415.800,00**
81	BBK	5318044612820xxxx	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	SKPWNI/5318/31082023/0017	31/08/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**340.200,00**
82	AG	5318091712120xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT	SKPWNI/5318/05092023/0007	05/09/2023	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**37.800,00**
83	CIG	5318015910780xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT	SKPWNI/5318/05092023/0007	05/09/2023	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**37.800,00**
84	DH	5318032708260xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH UTARA	SKPWNI/5318/08092023/0003	08/09/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**453.600,00**
85	BB	5318051209990xxxx	KALIMANTAN BARAT	KETAPANG	SKPWNI/5318/11092023/0015	11/09/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**453.600,00**
86	OTS	5318030410020xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SKPWNI/5318/12092023/0004	12/09/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**453.600,00**
87	VPK	5318012408790xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	SKPWNI/5318/19092023/0001	19/09/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**453.600,00**
88	KIT	5318016010930xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	NAGEKEO	SKPWNI/5318/20092023/0004	20/09/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	**189.000,00**
89	AB	5318080704070xxxx	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	SKPWNI/5318/25092023/0008	25/09/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	**264.600,00**
90	PS	5318090204840xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	NAGEKEO	SKPWNI/5318/26092023/0005	26/09/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**340.200,00**
91	AU	5318101611120xxxx	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	SKPWNI/5318/27092023/0015	27/09/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**453.600,00**
92	AU	5318101010100xxxx	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	SKPWNI/5318/27092023/0015	27/09/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**453.600,00**
93	APO	5318104604140xxxx	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	SKPWNI/5318/27092023/0015	27/09/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**453.600,00**
94	JDU	5318101202160xxxx	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA	SKPWNI/5318/27092023/0015	27/09/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**453.600,00**
95	MR	5303076710910xxxx	AERAH ISTIMEWA YOGYAKAR	KOTA YOGYAKARTA	SKPWNI/3471/06102023/0001	06/10/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**453.600,00**
96	SW	5318055812940xxxx	JAWA TIMUR	LUMAJANG	SKPWNI/5318/09102023/0009	09/10/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**453.600,00**
97	GRN	5318041010990xxxx	KALIMANTAN TENGAH	SUKAMARA	SKPWNI/5318/10102023/0016	10/10/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**113.400,00**
98	JTA	5318052909960xxxx	KALIMANTAN BARAT	KETAPANG	SKPWNI/6104/12102023/0025	12/10/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**453.600,00**
99	HB	5318030910960xxxx	PAPUA	JAYAPURA	SKPWNI/5318/16102023/0007	16/10/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**340.200,00**
100	FND	5318036802960xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT	SKPWNI/5318/18102023/0005	18/10/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**340.200,00**
101	SNA	5318075302980xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	LEMBATA	SKPWNI/5318/24102023/0003	24/10/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	**189.000,00**
102	OM	5318111310210xxxx	KALIMANTAN UTARA	TANA TIDUNG	SKPWNI/5318/25102023/0009	25/10/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**453.600,00**
103	JUD	5318032106870xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SKPWNI/5318/26102023/0001	26/10/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**453.600,00**
104	DAL	5318015104000xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	SKPWNI/5318/31102023/0008	31/10/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**453.600,00**
105	MLP	5318030703920xxxx	KALIMANTAN TENGAH	KOTAWARINGIN BARAT	SKPWNI/5318/13112023/0002	13/11/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**340.200,00**
106	SPR	5318090101610xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	NAGEKEO	SKPWNI/5318/14112023/0003	14/11/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**453.600,00**
107	NR	5318096210020xxxx	SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA	SKPWNI/5318/16112023/0003	16/11/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**340.200,00**
108	MDW	5318044812940xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	TIMOR TENGAH SELATA	SKPWNI/5318/21112023/0009	21/11/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	**189.000,00**
109	AL	5318084205930xxxx	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BARAT	SKPWNI/5318/28112023/0008	28/11/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**340.200,00**
110	MSD	5318044109960xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SKPWNI/5318/28112023/0011	28/11/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**340.200,00**
111	YNR	5318041507920xxxx	BANTEN	KOTA TANGERANG	SKPWNI/5318/29112023/0002	29/11/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**340.200,00**
112	ARB	5318080107930xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI BARAT	SKPWNI/5318/06122023/0002	06/12/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**340.200,00**
113	EAL	5310155108960xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI BARAT	SKPWNI/5318/06122023/0002	06/12/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**340.200,00**
114	ESK	5318081408170xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI BARAT	SKPWNI/5318/06122023/0002	06/12/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**340.200,00**
115	MJA	5318031310140xxxx	SULAWESI TENGAH	SIGI	SKPWNI/5318/11122023/0017	11/12/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**340.200,00**
116	MAA	5318034506130xxxx	SULAWESI TENGAH	SIGI	SKPWNI/5318/11122023/0017	11/12/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**340.200,00**
117	YDN	5318035909920xxxx	KALIMANTAN SELATAN	KOTABARU	SKPWNI/5318/11122023/0017	11/12/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**340.200,00**
118	ANA	5318092911210xxxx	KALIMANTAN TENGAH	SUKAMARA	SKPWNI/5318/14122023/0007	14/12/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**453.600,00**
119	DAB	5318084708200xxxx	KALIMANTAN TENGAH	SUKAMARA	SKPWNI/5318/19122023/0012	19/12/2023	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**75.600,00**
120	MSK	5318060907900xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	SKPWNI/5318/19122023/0025	19/12/2023	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	**264.600,00**
B	**Tahun 2024**																		**7.371.000,00**
1	AR	5206122211880xxxx	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	SKPWNI/5318/03012024/0003	03/01/2024	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**302.400,00**
2	ABD	5318040211960xxxx	KALIMANTAN TENGAH	SUKAMARA	SKPWNI/5318/05012024/0012	05/01/2024	-	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**75.600,00**
3	PSB	5318040812170xxxx	KALIMANTAN TENGAH	SUKAMARA	SKPWNI/5318/05012024/0012	05/01/2024	-	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**75.600,00**
4	MSW	5318115203180xxxx	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA	SKPWNI/5318/10012024/0005	10/01/2024	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**415.800,00**
5	MNW	5318114805200xxxx	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA	SKPWNI/5318/10012024/0005	10/01/2024	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**415.800,00**
6	PPB	5318114202000xxxx	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA	SKPWNI/5318/10012024/0005	10/01/2024	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**415.800,00**
7	MAG	5318076505060xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SKPWNI/5318/11012024/0007	11/01/2024	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**302.400,00**
8	MN	5318021612760xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SKPWNI/5318/23012024/0010	23/01/2024	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**302.400,00**
9	GD	5272034911080xxxx	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA	SKPWNI/5318/25012024/0012	25/01/2024	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**302.400,00**
10	MPD	5318045205910xxxx	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	SKPWNI/5318/25012024/0018	25/01/2024	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**415.800,00**
11	TS	5272031106140xxxx	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA	SKPWNI/5318/25012024/0012	25/01/2024	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**302.400,00**
12	YBM	5318057101020xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT	SKPWNI/5318/25012024/0008	25/01/2024	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	-	**189.000,00**
13	PTB	5318081612950xxxx	BANTEN	PANDEGLANG	SKPWNI/5318/30012024/0002	30/01/2024	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	**226.800,00**
14	ADA	5318105504180xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT	SKPWNI/5318/31012024/0017	31/01/2024	-	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	**189.000,00**
15	KDS	5318010209110xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TENGAH	SKPWNI/5318/06022024/0001	06/02/2024	-	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**264.600,00**
16	KEB	5318011102790xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TENGAH	SKPWNI/5318/06022024/0001	06/02/2024	-	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**264.600,00**
17	PEP	5318017112090xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TENGAH	SKPWNI/5318/06022024/0001	06/02/2024	-	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**264.600,00**
18	HN	5103052804740xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI TIMUR	SKPWNI/5318/08022024/0002	08/02/2024	-	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**264.600,00**
19	FA	5318042402950xxxx	KALIMANTAN BARAT	KETAPANG	SKPWNI/3508/21022024/0056	21/02/2024	-	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**378.000,00**
20	KSL	5318090410970xxxx	JAWA TENGAH	BOYOLALI	SKPWNI/5318/22022024/0001	22/02/2024	-	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**378.000,00**
21	MCW	5318034305170xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TENGAH	SKPWNI/5318/05032024/0006	05/03/2024	-	-	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**340.200,00**
22	GJB	5318104101200xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SKPWNI/5318/07032024/0009	07/03/2024	-	-	-	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**302.400,00**

Lampiran 15

Rincian Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan atas Peserta JKN PBI yang Telah Mutasi Keluar dari Kabupaten Sumba Barat Daya

No.	Nama	NIK	Nama Provinsi	Nama Kabupaten	No. Kepindahan	Tanggal Pindah	Jan (Rp)	Feb (Rp)	Mar (Rp)	Apr (Rp)	Mei (Rp)	Jun (Rp)	Jul (Rp)	Ags (Rp)	Sep (Rp)	Okt (Rp)	Nov (Rp)	Des (Rp)	Total Kelebihan Pembayaran (Rp)
23	SN	531804510997xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA TIMUR	SKPWNI/5318/07032024/0009	07/03/2024	-	-	-	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	**302.400,00**
24	DJM	531809090499xxxx	PAPUA BARAT	KAIMANA	SKPWNI/5206/19032024/0008	19/03/2024	-	-	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	**151.200,00**
25	MSE	3371034209790xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT	SKPWNI/5318/20032024/0003	20/03/2024	-	-	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**226.800,00**
26	ENG	531801591088xxxx	NUSA TENGGARA BARAT	BIMA	SKPWNI/5318/27032024/0011	27/03/2024	-	-	-	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	-	-	-	**226.800,00**
27	KB	531804510404xxxx	NUSA TENGGARA TIMUR	SUMBA BARAT	SKPWNI/5318/27032024/0002	27/03/2024	-	-	-	37.800,00	37.800,00	-	-	-	-	-	-	-	**75.600,00**
Jumlah (A+B)																			**47.136.600,00**

Lampiran 16

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Bukti Riil

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Penginapan yang di SPJ-kan				Hasil Konfirmasi		Perhitungan Biaya Hotel			Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nama Hotel	Tanggal Check in	Tanggal Check Out	Biaya Hotel (Rp)	Menginap/Tidak	Biaya Hotel (Rp)	Selisih (Rp)	Pagu 30% (Rp)	Kelebihan Biaya Hotel (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= (11-13)	15	16= (14-15)	17	18	19= (16-17)
A	**DP3AP2KB**																	
1	ANS	334	16/08/2024	Tambolaka	Kupang	4	Pelangi Hotel	18/08/2024	21/08/2024	1.650.000,00	Menginap	825.000,00	825.000,00	-	825.000,00	825.000,00	08/05/2025	-
2	DR	127	04-07 April 2024	Tambolaka	Jawa Tengah	4	SM Malioboro Yogyakarta	04/04/2024	07/04/2024	1.878.150,00	Menginap	592.800,00	1.285.350,00	-	1.285.350,00	1.285.350,00	08/05/2025	-
3	NFS	445a	18 s/d 21 November 2024	Tambolaka	Jakarta	4	Al Hotel Jakarta Thamrin	18/11/2024	21/11/2024	2.190.000,00	Menginap	1.965.000,00	225.000,00	-	225.000,00	225.000,00	08/05/2025	-
B	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**																	
4	RRB	PK 422.1/654.a/PAUD//SBD/VIII/2024	06/09/2024	Tambolaka	Jakarta	4	Win Premier Hotel Mangga Besar	10/09/2024	13/09/2024	1.100.000,00	Menginap	329.545,00	770.455,00	330.000,00	440.455,00	-		440.455,00
5	ADS	PK 422.1/654/PAUD//SBD/VIII/2024	06/09/2024	Tambolaka	Jakarta	4	Win Premier Hotel Mangga Besar	10/09/2024	13/09/2024	1.100.000,00	Menginap	319.963,00	780.037,00	330.000,00	450.037,00	-		450.037,00
6	AM	1444/////c7.20/DM.00.02/2024	28/10/2024	Jakarta	Tambolaka	3	Sinar Tambolaka	27/10/2024	30/10/2024	1.250.000,00	Menginap	1.050.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-		200.000,00
7	GGR	028/DMP.MLKI/K.2/XII/2024	07/12/2024	Jakarta	Tambolaka	3	Sinar Tambolaka	10/12/2024	12/12/2024	1.100.000,00	Menginap	900.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-		200.000,00
C	**Dinas PUPR**																	
8	MEW	PUPR.600/205.c/SPPD-LD/53.18/XI/2024	01/11/2024	Tambolaka	Jakarta	4	Dharmein Hotel Jakarta	06/11/2024	09/11/2024	1.650.000,00	Menginap	1.100.000,00	550.000,00	165.000,00	385.000,00	-		385.000,00
9	DBE	PUPR.600/232.b/SPPD-LD/53.18/XI/2024	20/11/2024	Tambolaka	Jakarta	4	Dharmein Hotel Jakarta	21/11/2024	24/11/2024	1.650.000,00	Menginap	550.000,00	1.100.000,00	330.000,00	770.000,00	-		770.000,00
10	MR	PUPR.600/232.c/SPPD-LD/53.18/XI/2024	20/11/2024	Tambolaka	Jakarta	4	Dharmein Hotel Jakarta	21/11/2024	24/11/2024	1.650.000,00	Menginap	1.100.000,00	550.000,00	165.000,00	385.000,00	-		385.000,00
11	MMB	PUPR.600/205.c/SPPD-LD/53.18/XI/2024	01/11/2024	Tambolaka	Jakarta	4	Dharmein Hotel Jakarta	06/11/2024	09/11/2024	1.650.000,00	Menginap	1.100.000,00	550.000,00	165.000,00	385.000,00	-		385.000,00
12	AUD	PUPR.600/154.a/SPPD-LD/53.18/XI/2024	26/09/2024	Tambolaka	Jakarta	4	Dharmein Hotel Jakarta	29/09/2024	02/10/2024	1.650.000,00	Menginap	1.500.000,00	150.000,00	-	150.000,00	-		150.000,00
13	MD	PUPR.600/154/SPPD-LD/53.18/XI/2024	26/09/2024	Tambolaka	Jakarta	4	Dharmein Hotel Jakarta	29/09/2024	02/10/2024	2.145.000,00	Menginap	1.650.000,00	495.000,00	-	495.000,00	-		495.000,00
		PUPR.600/205/SPPD-LD/53.18/XI/2024	01/11/2024	Tambolaka	Jakarta	4	Dharmein Hotel Jakarta	06/11/2024	09/11/2024	2.190.000,00	Menginap	1.100.000,00	1.090.000,00	165.000,00	925.000,00	-		925.000,00
14	AN	PUPR.600/1286/SPPD-LD/53.18/IX/2024	19/09/2024	Tambolaka	Kupang	5	Sylvia Hotel Kupang	14/10/2024	18/10/2024	2.200.000,00	Menginap	550.000,00	1.650.000,00	495.000,00	1.155.000,00	-		1.155.000,00
15	DPD	PUPR.600/958.d?SPPD-LD/53.18/X/2024	21/10/2025	Tambolaka	Jakarta	5	Grand Tropic Suites Hotel Jakarta	27/10/2024	31/10/2024	2.200.000,00	Menginap	550.000,00	1.650.000,00	495.000,00	1.155.000,00	-		1.155.000,00
16	AAR	PUPR.600/205.b/SPPD-LD/53.18/XI/2024	01/11/2024	Tambolaka	Jakarta	4	Dharmein Hotel Jakarta	06/11/2024	09/11/2024	1.650.000,00	Menginap	1.100.000,00	550.000,00	165.000,00	385.000,00	-		385.000,00
17	AP	PUPR.600/958.f/SPPD-LD/53.18/X/2024	21/10/2025	Tambolaka	Jakarta	5	Grand Tropic Suites Hotel Jakarta	27/10/2024	31/10/2024	2.200.000,00	Menginap	550.000,00	1.650.000,00	495.000,00	1.155.000,00	-		1.155.000,00
18	DB	PUPR.600/232.d/SPPD-LD/53.18/XI/2024	20/11/2024	Tambolaka	Jakarta	4	Dharmein Hotel Jakarta	21/11/2024	24/11/2024	1.650.000,00	Menginap	550.000,00	1.100.000,00	330.000,00	770.000,00	-		770.000,00
19	BM	PUPR.600/1014/SPPD-LD/53.18/X/2024	25/10/2025	Tambolaka	Jakarta	4	Amaris Hotel Slipi Jakarta	28/10/2024	31/10/2024	1.650.000,00	Menginap	524.875,00	1.125.125,00	330.000,00	795.125,00	-		795.125,00

Lampiran 16

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Bukti Riil

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Penginapan yang di SPJ-kan				Hasil Konfirmasi		Perhitungan Biaya Hotel			Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nama Hotel	Tanggal Check in	Tanggal Check Out	Biaya Hotel (Rp)	Menginap/Tidak	Biaya Hotel (Rp)	Selisih (Rp)	Pagu 30% (Rp)	Kelebihan Biaya Hotel (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= (11-13)	15	16= (14-15)	17	18	19= (16-17)
20	OD	600/118/SPPD/LD/PUPR-SDA/SBD/III/2024	07/03/2024	Tambolaka	Bogor	8	Whiz Prime Hotel Bogor	05/03/2024	08/03/2024	2.190.000,00	Menginap	985.000,00	1.205.000,00	219.000,00	986.000,00	-		986.000,00
21	WWL	BU.094/06.a/SPT/SBD/II/2024 dan BU.094/8.d/SPT/SBD/II/2024	19/02/2024	Tambolaka	Jakarta	9	Dharmein Hotel Jakarta	21/02/2024	24/02/2024	2.136.000,00	Menginap	1.650.000,00	486.000,00	-	486.000,00	-		486.000,00
		BU.090/16/SPPD/53.18/III/2024	19/03/2024	Tambolaka	Jakarta	9	Dharmein Hotel Jakarta	20/03/2024	23/03/2024	2.136.000,00	Menginap	1.100.000,00	1.036.000,00	219.000,00	817.000,00	-		817.000,00
		BU.090/125/SPPD-LD/53.18/ix/2024	26/09/2024	Tambolaka	Jakarta	4	Dharmein Hotel Jakarta	29/09/2024	02/10/2024	2.145.000,00	Menginap	1.650.000,00	495.000,00	-	495.000,00	-		495.000,00
22	HM	600/507/SPPD/LD/PUPR/53.18/VI/2024	05/06/2024	Tambolaka	Yogyakarta	4	Malioboro Prime Hotel	06/06/2024	09/06/2024	1.914.000,00	Menginap	1.076.000,00	838.000,00	219.000,00	619.000,00	-		619.000,00
D	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**																	
23	NHP	099.146/SPT/DPKP/SBD/XI/2024	19/11/2024	Tambolaka	Kupang	4	Bella Vita Hotel	19/11/2024	22/11/2024	1.279.008,00	Menginap	650.000,00	629.008,00	165.000,00	464.008,00	-		464.008,00
24	YMM	099.146/SPT/DPKP/SBD/XI/2024	19/11/2024	Tambolaka	Kupang	4	Bella Vita Hotel	19/11/2024	22/11/2024	1.279.008,00	Menginap	1.200.000,00	79.008,00	-	79.008,00	-		79.008,00
														Jumlah	**16.481.983,00**	**2.335.350,00**		**14.146.633,00**

Lampiran 17

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Tidak Menginap namun Mempertanggungjawabkan Biaya Penginapan

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Penginapan				Hasil Konfirmasi		Perhitungan Biaya Hotel			Total (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nama Hotel	Tanggal Check in	Tanggal Check Out	Biaya Hotel (Rp)	Menginap/Tidak (Rp)	Biaya Hotel (Rp)	Selisih (Rp)	Pagu 30% (Rp)	Kelebihan Biaya Hotel (Rp)	
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= (11-13)	15	16= (14-15)	18
A	**Dinas Kesehatan**															
1	PK	Dinkes.440.02.3866/ST/53.18/X/2024	03/10/2024	Tambolaka	Jakarta	4	Hotel Astika	03/10/2024	06/10/2024	1.650.000,00	Tidak	-	1.650.000,00	495.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
B	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**															
2	NKS	PK 422.1/14/SPT/LD/SBD/I	02/09/2024	Tambolaka	Jakarta	4	Orchardz Hotel Jayakarta	03/09/2023	06/09/2024	1.500.000,00	Tidak	-	1.500.000,00	495.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
3	MUZ	PK 422.1/13/SPT/LD/SBD/VIII/2024	30/08/2024	Tambolaka	Kupang	3	On The Rock Hotel by Prasanthi	02/09/2024	04/09/2024	1.068.364,00	Tidak	-	1.068.364,00	330.000,00	738.364,00	738.364,00
C	**Dinas PUPR**															
4	YUD	PUPR.056/155/LD/53.18/53.18/II/2024	15/02/2024	Tambolaka	Jakarta	2	Ibis Hotel Jakarta	19/02/2024	20/02/2024	730.000,00	Tidak	-	730.000,00	219.000,00	511.000,00	511.000,00
5	MEW	PUPR.600/192.c/SPPD-LD/53.18/X/2024	21/10/2024	Tambolaka	Kupang	4	On The Rock Hotel By Prasanthi	23/10/2024	26/10/2024	1.650.000,00	Tidak	-	1.650.000,00	495.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
6	AP	PUPR.600/269.A/SPPD/LD/53.18/CK/III/2024	22/03/2024	Tambolaka	Banten	5	Mencure Tangerang	24/03/2024	26/03/2024	1.100.000,00	Tidak	-	1.100.000,00	330.000,00	770.000,00	770.000,00
		PUPR.056/269/LD/53.18/CK/III/2024	22/03/2024	Tambolaka	Banten	3	Fave Hotel Banten	26/03/2024	28/03/2024	1.000.000,00	Tidak	-	1.000.000,00	330.000,00	670.000,00	670.000,00
		PUPR/472.b/600/ST-LD/53.18/V/2024	27/05/2024	Tambolaka	Jakarta	5	Hotel 88 Jakarta	29/05/2024	02/06/2024	2.000.000,00	Tidak	-	2.000.000,00	660.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
7	BF	PUPR.600/1156.a/SPPD-LD/53.18/XII/2024	04/12/2024	Tambolaka	Kupang	4	Sylvia Hotel Kupang	05/12/2024	08/12/2024	1.650.000,00	Tidak	-	1.650.000,00	495.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
8	DCD	PUPR.600/1420/SPPD-LD/53.18/XI/2024	22/09/2024	Tambolaka	Kupang	4	Aston Kupang Hotel &Convention Center	22/09/2024	25/09/2024	1.650.000,00	Tidak	-	1.650.000,00	495.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
9	YTT	PUPR.600/1154.a/SPPD-LD/53.18/XII/2024	04/12/2024	Tambolaka	Kupang	4	Sylvia Hotel Kupang	05/12/2024	08/12/2024	1.650.000,00	Tidak	-	1.650.000,00	495.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
10	RS	PUPR.600/1155/SPPD-LD/53.18/XII/2024	04/12/2024	Tambolaka	Kupang	4	Sylvia Hotel Kupang	05/12/2024	08/12/2024	1.650.000,00	Tidak	-	1.650.000,00	495.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
11	DK	PUPR.600/262'b/SPPD-LD/53.18/XII/2024	17/12/2024	Tambolaka	Jakarta	4	Golden Boutique Hotel Melawai	18/12/2024	21/12/2024	1.650.000,00	Tidak	-	1.650.000,00	495.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
12	MYM	PUPR.600/263/SPPD-LD/53.18/XII/2024	17/12/2024	Tambolaka	Kupang	4	On The Rock Hotel By Prasanthi	18/12/2024	21/12/2024	1.650.000,00	Tidak	-	1.650.000,00	495.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
13	AS	PUPR.600/269.B/SPPD/LD/53.18/CK/III/2024	22/03/2024	Tambolaka	Banten	5	Mencure Tangerang	24/03/2024	26/03/2024	1.100.000,00	Tidak	-	1.100.000,00	330.000,00	770.000,00	770.000,00
							Fave Hotel Banten	26/03/2024	28/03/2024	1.000.000,00	Tidak	-	1.000.000,00	330.000,00	670.000,00	670.000,00
14	MMB	PUPR.600/192.a/SPPD-LD/53.18/X/2024	21/10/2024	Tambolaka	Kupang	4	On The Rock Hotel By Prasanthi	23/10/2024	26/10/2024	1.650.000,00	Tidak	-	1.650.000,00	495.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
		PUPR.600/263.a/SPPD-LD/53.18/XII/2024	17/12/2024	Tambolaka	Kupang	4	On The Rock Hotel By Prasanthi	18/12/2024	21/12/2024	1.650.000,00	Tidak	-	1.650.000,00	495.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
15	MD	PUPR.600/816.a/SPPD-LD/53.18/V/2024	13/05/2024	Tambolaka	Lombok Barat	4	Merumatta Hotel Lombok	15/05/2024	17/05/2024	1.500.000,00	Tidak	-	1.500.000,00	330.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
16	DT	PUPR.600/1154/SPPD-LD/53.18/XII/2024	04/12/2024	Tambolaka	Kupang	4	Sylvia Hotel Kupang	05/12/2024	08/12/2024	1.650.000,00	Tidak	-	1.650.000,00	495.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
17	EK	PUPR.600/816.a/SPPD-LD/53.18/V/2024	13/05/2024	Tambolaka	Jakarta	4	Golden Boutique Hotel Melawai	14/05/2024	17/05/2024	750.000,00	Tidak	-	750.000,00	495.000,00	255.000,00	255.000,00
18	ASL	PUPR.600/816.a/SPPD-LD/53.18/V/2024	13/05/2024	Tambolaka	Jakarta	4	Golden Boutique Hotel Melawai	14/05/2024	17/05/2024	750.000,00	Tidak	-	750.000,00	495.000,00	255.000,00	255.000,00
19	DB	PUPR.600/192.b/SPPD-LD/53.18/X/2024	21/10/2024	Tambolaka	Kupang	4	On The Rock Hotel By Prasanthi	23/10/2024	26/10/2024	1.650.000,00	Tidak	-	1.650.000,00	495.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00

Lampiran 17

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Tidak Menginap namun Mempertanggungjawabkan Biaya Penginapan

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Penginapan				Hasil Konfirmasi		Perhitungan Biaya Hotel			Total (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nama Hotel	Tanggal Check in	Tanggal Check Out	Biaya Hotel (Rp)	Menginap/Tidak (Rp)	Biaya Hotel (Rp)	Selisih (Rp)	Pagu 30% (Rp)	Kelebihan Biaya Hotel (Rp)	
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= (11-13)	15	16= (14-15)	18
20	BDL	PUPR,600/714/SPPD/LD/PUPR-SDA/53.18/VIII/2024	02/08/2024	Tambolaka	Jakarta	5	Hotel Ibis Budget Bandung Asia Afrika	04/08/2024	08/08/2024	2.920.000,00	Tidak	-	2.920.000,00	876.000,00	2.044.000,00	2.044.000,00
21	BM	PUPR.600/169/SPPD/LD/53.18/CK/II/2024	27/02/2024	Tambolaka	Yogyakarta	4	Kangen Hotel Yogyakarta	27/02/2024	01/03/2024	1.650.000,00	Tidak	-	1.650.000,00	495.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
		600/673/SPPD/LD/PUPR-SDA/53.18/VII/2024	22/07/2024	Tambolaka	Banten	5	Fave Hotel Banten	23/07/2024	27/07/2024	2.200.000,00	Tidak	-	2.200.000,00	660.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
		PUPR,600/714.b/SPPD/LD/PUPR-SDA/53.18/VIII/2024	02/08/2024	Tambolaka	Jakarta	5	Hotel Ibis Budget Bandung Asia Afrika	04/08/2024	08/11/2024	2.200.000,00	Tidak	-	2.200.000,00	660.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00
22	ODp	PUPR.056/74/LD/53.18/PUPR.SDA/SBD/III/2024	04/03/2024	Tambolaka	Bogor	5	Ibis Hotel Bogor	09/03/2023	10/03/2023	525.000,00	Tidak	-	525.000,00	219.000,00	306.000,00	306.000,00
23	WWL	PUPR.600/31/SPPD-LD/53.18/IV/2024	19/04/2024	Tambolaka	Kupang	4	Aston Kupang Hotel &Convention Center	21/04/2024	24/04/2024	1.944.000,00	Tidak	-	1.944.000,00	657.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00
		BU.090/47.a/SPPD/53.18/V/2024	13/05/2024	Tambolaka	Lombok	4	Merumatta Hoetl Lombok	15/05/2024	17/05/2024	1.500.000,00	Tidak	-	1.500.000,00	438.000,00	1.062.000,00	1.062.000,00
		BU.090/56/SPT/53.18/VI/2024	03/06/2024	Tambolaka	Yogyakarta	5	The Jayakarta Hotel	07/06/2024	07/06/2024	850.000,00	Tidak	-	850.000,00	219.000,00	631.000,00	631.000,00
24	HM	PUPR.600/269/SPPD/LD/53.18/CK/III/2024	22/03/2024	Tambolaka	Banten	5	Mencure Tangerang	24/03/2024	26/03/2024	1.460.000,00	Tidak	-	1.460.000,00	438.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
		PUPR.056/269/LD/53.18/CK/III/2024	22/03/2024	Tambolaka	Banten	4	Fave Hotel Banten	26/03/2024	28/03/2024	1.460.000,00	Tidak	-	1.460.000,00	438.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
		PUPR/472/600/ST-LD/53.18/V/2024	27/05/2024	Tambolaka	Jakarta	5	Hotel 88 Jakarta	29/05/2024	02/06/2024	2.800.000,00	Tidak	-	2.800.000,00	876.000,00	1.924.000,00	1.924.000,00
		PUPR.056/685/LD/53-18/CK/VIII/2024	02/08/2024	Tambolaka	Jakarta	5	Hotel Ibis Budget Bandung Asia Afrika	4/8/2024	8/8/2024	2.920.000,00	Tidak	-	2.920.000,00	876.000,00	2.044.000,00	2.044.000,00
D	**Sekretariat DPRD**															
25	ABT	090/146/ST/SETWAN/SBD/VIII/2024	07/08/2024	Tambolaka	Kupang	4	Sylvia Hotel	11/08/2024	14/08/2024	2.190.000,00	Tidak	-	2.190.000,00	657.000,00	1.533.000,00	1.533.000,00
26	AYK	094/54/ST/SETWAN/SBD/V/2024	08/05/2024	Tambolaka	Jakarta	4	JS Luwansa	08/05/2024	11/05/2024	3.000.000,00	Tidak	-	3.000.000,00	900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
27	ASN	094/67/ST/SETWAN/SBD/V/2024	03/06/2024	Tambolaka	Jakarta	4	Yuan Gaerden Pasar Baru	04/06/2024	07/06/2024	1.650.000,00	Tidak	-	1.650.000,00	495.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
28	AB	094/90/ST/SETWAN/SBD/VI/2024	19/06/2024	Tambolaka	Kupang	3	Sylvia Hotel	20/06/2024	22/06/2024	1.100.000,00	Tidak	-	1.100.000,00	330.000,00	770.000,00	770.000,00
29	CEH	094/45/ST/SETWAN/SBD/IV/2024	25/04/2024	Tambolaka	Kupang	3	Sylvia Hotel	26/04/2024	28/04/2024	1.460.000,00	Tidak	-	1.460.000,00	438.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
		094/89/ST/SETWAN/SBD/VI/2024	19/06/2024	Tambolaka	Kupang	3	Sylvia Hotel	20/06/2024	22/06/2024	1.460.000,00	Tidak	-	1.460.000,00	438.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
30	DJR	094/147/ST/SETWAN/SBD/VIII/2024	09/08/2024	Tambolaka	Kupang	4	Sylvia Hotel	11/08/2024	14/08/2024	1.650.000,00	Tidak	-	1.650.000,00	495.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00
31	DBM	090/3/ST/SETWAN/SBD/I/2024	19/01/2024	Tambolaka	Surabaya	4	Legian Beach Hotel	24/01/2024	25/01/2024	1.000.000,00	Tidak	-	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00
		094/45/ST/SETWAN/SBD/IV/2024	25/04/2024	Tambolaka	Kupang	3	Sylvia Premier Hotel	26/04/2024	28/04/2024	1.460.000,00	Tidak	-	1.460.000,00	438.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
32	DPM	094/80/ST/SETWAN/SBD/VI/2024	14/06/2024	Tambolaka	Kupang	3	Flobamor City	19/06/2024	21/06/2024	1.100.000,00	Tidak	-	1.100.000,00	330.000,00	770.000,00	770.000,00
33	FBD	090/3/ST/SETWAN/SBD/I/2024	19/01/2024	Tambolaka	Surabaya	4	Legian Beach Hotel	24/01/2024	25/01/2024	1.000.000,00	Tidak	-	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00
34	GB	094/9/ST/SETWAN/SBD/I/2024	01/03/2024	Tambolaka	Denpasar	4	Legian Beach Hotel	03/03/2024	06/03/2024	3.000.000,00	Tidak	-	3.000.000,00	900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
		094/26/ST/SETWAN/SBD/III/2024	21/03/2024	Tambolaka	Kupang	3	Hotel Kristal	22/03/2024	24/03/2024	2.000.000,00	Tidak	-	2.000.000,00	438.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00
35	HSP	094/54/ST/SETWAN/SBD/V/2024	08/05/2024	Tambolaka	Jakarta	4	JS Luwansa	08/05/2024	11/05/2024	7.500.000,00	Tidak	-	7.500.000,00	2.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00
36	HKA	094/21/ST/SETWAN/SBD/III/2024	20/03/2024	Tambolaka	Kupang	3	Hotel Sylvia	21/03/2024	23/03/2024	1.100.000,00	Tidak	-	1.100.000,00	330.000,00	770.000,00	770.000,00
37	IS	094/90/ST/SETWAN/SBD/VI/2024	19/06/2024	Tambolaka	Kupang	3	Sylvia Hotel	20/06/2024	22/06/2024	1.100.000,00	Tidak	-	1.100.000,00	330.000,00	770.000,00	770.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Tidak Menginap namun Mempertanggungjawabkan Biaya Penginapan

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Penginapan				Hasil Konfirmasi		Perhitungan Biaya Hotel			Total (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nama Hotel	Tanggal Check in	Tanggal Check Out	Biaya Hotel (Rp)	Menginap/Tidak (Rp)	Biaya Hotel (Rp)	Selisih (Rp)	Pagu 30% (Rp)	Kelebihan Biaya Hotel (Rp)	
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= (11-13)	15	16= (14-15)	18
38	JOL	094/88/ST/SETWAN/SBD/VI/2024	20/06/2024	Tambolaka	Kupang	3	Sylvia Hotel	21/06/2024	23/06/2024	1.100.000,00	Tidak	-	1.100.000,00	330.000,00	770.000,00	770.000,00
39	KK	094/45/ST/SETWAN/SBD/IV/2024	25/04/2024	Tambolaka	Kupang	3	Sylvia Hotel	26/04/2024	28/04/2024	1.460.000,00	Tidak	-	1.460.000,00	438.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
40	LMR	090/3/ST/SETWAN/SBD/I/2024	19/01/2024	Tambolaka	Surabaya	4	Legian Beach Hotel	24/01/2024	25/01/2024	1.000.000,00	Tidak	-	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00
		094/31/ST/SETWAN/SBD/III/2024	25/03/2024	Tambolaka	Jakarta	4	Yuan Garden	25/03/2024	28/03/2024	3.000.000,00	Tidak	-	3.000.000,00	900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
		094/136/ST/SETWAN/SBD/VII/2024	22/07/2024	Tambolaka	Kupang	4	Sylvia Hotel	24/07/2024	27/07/2024	2.190.000,00	Tidak	-	2.190.000,00	495.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00
41	LG	090/3/ST/SETWAN/SBD/I/2024	19/01/2024	Tambolaka	Surabaya	4	Legian Beach Hotel	24/01/2024	25/01/2024	1.000.000,00	Tidak	-	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00
42	LBL	094/36/ST/SETWAN/SBD/III/2024	15/03/2024	Tambolaka	Kupang	3	Hotel Sylvia	18/03/2024	19/03/2024	2.000.000,00	Tidak	-	2.000.000,00	219.000,00	1.781.000,00	1.781.000,00
		094/45/ST/SETWAN/SBD/IV/2024	25/04/2024	Tambolaka	Kupang	3	Sylvia Hotel	26/04/2024	28/04/2024	1.460.000,00	Tidak	-	1.460.000,00	438.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
43	MMM	094/45/ST/SETWAN/SBD/IV/2024	25/04/2024	Tambolaka	Kupang	3	Sylvia Premier Hotel	26/04/2024	28/04/2024	1.460.000,00	Tidak	-	1.460.000,00	438.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
44	MMMK	094/26/ST/SETWAN/SBD/III/2024	21/03/2024	Tambolaka	Kupang	3	Hotel Kristal	22/03/2024	24/03/2024	2.000.000,00	Tidak	-	2.000.000,00	900.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		094/27/ST/SETWAN/SBD/III/2024	22/03/2024	Tambolaka	Jakarta	4	Yuan Garden	25/03/2024	28/03/2024	3.000.000,00	Tidak	-	3.000.000,00	2.250.000,00	750.000,00	750.000,00
45	NN	090/146/ST/SETWAN/SBD/VIII/2024	07/08/2024	Tambolaka	Kupang	4	Sylvia Hotel	11/08/2024	14/08/2024	2.190.000,00	Tidak	-	2.190.000,00	657.000,00	1.533.000,00	1.533.000,00
46	ON	090/3/ST/SETWAN/SBD/I/2024	19/01/2024	Tambolaka	Surabaya	4	Legian Beach Hotel	24/01/2024	25/01/2024	1.000.000,00	Tidak	-	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00
47	OMS	094/27/ST/SETWAN/SBD/III/2024	22/03/2024	Tambolaka	Kupang	3	Hotel Flobamor City	22/03/2024	24/03/2024	1.100.000,00	Tidak	-	1.100.000,00	330.000,00	770.000,00	770.000,00
48	OON	090/146/ST/SETWAN/SBD/VIII/2024	07/08/2024	Tambolaka	Kupang	4	Sylvia Hotel	11/08/2024	14/08/2024	2.190.000,00	Tidak	-	2.190.000,00	657.000,00	1.533.000,00	1.533.000,00
49	SK	090/186/ST/SETWAN/SBD/X/2025	08/10/2024	Tambolaka	KUPANG	3	SYLVIA HOTEL	09/10/2024	11/10/2024	1.100.000,00	Tidak	-	1.100.000,00	330.000,00	770.000,00	770.000,00
50	SL	090/3/ST/SETWAN/SBD/I/2024	19/01/2024	Tambolaka	Surabaya	4	Legian Beach Hotel	24/01/2024	25/01/2024	1.000.000,00	Tidak	-	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00
		094/26/ST/SETWAN/SBD/III/2024	21/03/2024	Tambolaka	Kupang	3	Sylvia Hotel	22/03/2024	24/03/2024	2.000.000,00	Tidak	-	2.000.000,00	438.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00
51	SS	094/26/ST/SETWAN/SBD/III/2024	21/03/2024	Tambolaka	Kupang	3	Hotel Kristal	22/03/2024	24/03/2024	2.000.000,00	Tidak	-	2.000.000,00	438.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00
		094/27/ST/SETWAN/SBD/III/2024	22/03/2024	Tambolaka	Jakarta	4	Yuan Garden	25/03/2024	28/03/2024	3.000.000,00	Tidak	-	3.000.000,00	900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
52	SL	094/31/ST/SETWAN/SBD/III/2024	25/03/2024	Tambolaka	Jakarta	4	Yuan Garden	25/03/2024	28/03/2024	3.000.000,00	Tidak	-	3.000.000,00	900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
53	TTD	094/52/ST/SETWAN/SBD/IV/2024	03/05/2024	Tambolaka	Kupang	3	Sylvia Hotel	05/05/2024	07/05/2024	1.460.000,00	Tidak	-	1.460.000,00	438.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
		094/58/ST/SETWAN/SBD/V/2024	08/05/2024	Tambolaka	Kupang	3	Sylvia Hotel	12/05/2024	14/05/2024	1.460.000,00	Tidak	-	1.460.000,00	438.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
		094/66/ST/SETWAN/SBD/V/2024	03/06/2024	Tambolaka	Jakarta	4	Yuan Gaerden Pasar Baru	04/06/2024	07/06/2024	3.000.000,00	Tidak	-	3.000.000,00	900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
		094/136/ST/SETWAN/SBD/VII/2024	22/07/2024	Tambolaka	Kupang	4	Sylvia Hotel	24/07/2024	27/07/2024	2.190.000,00	Tidak	-	2.190.000,00	657.000,00	1.533.000,00	1.533.000,00
		094/143/ST/SETWAN/SBD/VIII/2024	07/08/2024	Tambolaka	Kupang	4	Sylvia Hotel	11/08/2024	14/08/2024	2.190.000,00	Tidak	-	2.190.000,00	657.000,00	1.533.000,00	1.533.000,00
54	TL	094/78/ST/SETWAN/SBD/V/2024	12/06/2024	Tambolaka	Kupang	3	Flobamor City	13/06/2024	15/06/2024	1.100.000,00	Tidak	-	1.100.000,00	330.000,00	770.000,00	770.000,00
55	TDL	094/139/ST/SETWAN/SBD/VII/2024	22/07/2024	Tambolaka	Kupang	4	Hotel Sylvia	24/07/2024	27/07/2024	2.190.000,00	Tidak	-	2.190.000,00	657.000,00	1.533.000,00	1.533.000,00
	TDL	090/146/ST/SETWAN/SBD/VIII/2024	07/08/2024	Tambolaka	Kupang	4	Sylvia Hotel	11/08/2024	14/08/2024	2.190.000,00	Tidak	-	2.190.000,00	657.000,00	1.533.000,00	1.533.000,00
56	URS	090/4/ST/SETWAN/SBD/I/2024	19/01/2024	Tambolaka	Surabaya	4	Bedrock Hotel Kuta Bli	24/01/2024	25/01/2024	1.000.000,00	Tidak	-	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	700.000,00
		094/25/ST/SETWAN/SBD/III/2024	20/03/2024	Tambolaka	Jakarta	4	Lumire Hotel	21/03/2024	24/03/2024	3.000.000,00	Tidak	-	3.000.000,00	900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
		094/72/ST/SETWAN/SBD/V/2024	05/06/2024	Tambolaka	Jakarta	4	Lumire Hotel	05/06/2024	08/06/2024	3.000.000,00	Tidak	-	3.000.000,00	900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Tidak Menginap namun Mempertanggungjawabkan Biaya Penginapan

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Penginapan				Hasil Konfirmasi		Perhitungan Biaya Hotel			Total (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nama Hotel	Tanggal Check in	Tanggal Check Out	Biaya Hotel (Rp)	Menginap/Tidak (Rp)	Biaya Hotel (Rp)	Selisih (Rp)	Pagu 30% (Rp)	Kelebihan Biaya Hotel (Rp)	
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14= (11-13)	15	16= (14-15)	18
57	YRG	094/45/ST/SETWAN/SBD/IV/2024	25/04/2024	Tambolaka	Kupang	3	Sylvia Hotel	26/04/2024	28/04/2024	1.460.000,00	Tidak	-	1.460.000,00	438.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
		094/45/ST/SETWAN/SBD/IV/2024	25/04/2024	Tambolaka	Kupang	3	Flobamor City	26/04/2024	28/04/2024	1.460.000,00	Tidak	-	1.460.000,00	438.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
58	YZA	094/9/ST/SETWAN/SBD/I/2024	01/03/2024	Tambolaka	Denpasar	4	Legian Beach Hotel	03/03/2024	06/03/2024	3.000.000,00	Tidak	-	3.000.000,00	900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
		094/87/ST/SETWAN/SBD/VI/2024	20/06/2024	Tambolaka	Kupang	3	Sylvia Hotel	21/06/2024	23/06/2024	1.460.000,00	Tidak	-	1.460.000,00	438.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
59	YAL	094/26/ST/SETWAN/SBD/III/2024	21/03/2024	Tambolaka	Kupang	3	Hotel Kristal	22/03/2024	24/03/2024	2.000.000,00	Tidak	-	2.000.000,00	438.000,00	1.562.000,00	1.562.000,00
		094/45/ST/SETWAN/SBD/IV/2024	25/04/2024	Tambolaka	Kupang	3	Sylvia Hotel	26/04/2024	28/04/2024	1.460.000,00	Tidak	-	1.460.000,00	438.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
		090/180/ST/SETWAN/SBD/X/2024	08/10/2024	TAMBOLAKA	KUPANG	3	Bella Vita	09/10/2024	11/10/2024	1.460.000,00	Tidak	-	1.460.000,00	438.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
60	YRM	094/89/ST/SETWAN/SBD/VI/2024	19/06/2024	Tambolaka	Kupang	3	Sylvia Hotel	20/06/2024	22/06/2024	1.460.000,00	Tidak	-	1.460.000,00	438.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
61	YBS	094/45/ST/SETWAN/SBD/IV/2024	25/04/2024	Tambolaka	Kupang	3	Sylvia Hotel	26/04/2024	28/04/2024	1.460.000,00	Tidak	-	1.460.000,00	438.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
		094/89/ST/SETWAN/SBD/VI/2024	19/06/2024	Tambolaka	Kupang	3	Sylvia Hotel	20/06/2024	22/06/2024	1.460.000,00	Tidak	-	1.460.000,00	438.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
E	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**															
62	IYF	BU.094/67/SPT/53.18/V/2024	03/05/2024	Tambolaka	Kupang	4	Hotel Sylvia	05/05/2024	08/05/2024	1.740.000,00	Tidak	-	1.740.000,00	495.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00
		BU.094/108.b/SPT/53.18/VIII/2024	27/08/2024	Tambolaka	Kupang	4	Hotel Sylvia	28/08/2024	01/09/2024	1.775.304,00	Tidak	-	1.775.304,00	660.000,00	1.115.304,00	1.115.304,00
		BU.094//SPT/53.18/XII/2024	13/12/2024	Tambolaka	Jakarta	4	Hotel 88 Mangga Besar 62	16/12/2024	18/12/2024	2.100.000,00	Tidak	-	2.100.000,00	438.000,00	1.662.000,00	1.662.000,00
63	YLM	85/SPT/DPKP/SBD/XII/2024	04/12/2024	Tambolaka	Kupang	3	Flobamor City Hotel	05/12/2024	07/12/2024	1.000.000,00	Tidak	-	1.000.000,00	330.000,00	670.000,00	670.000,00
64	MSR	099.24/SPT/DPKP/SBD/II/2024	20/02/2024	Tambolaka	Kupang	3	Kristal Hotel	21/02/2024	23/02/2024	1.038.000,00	Tidak	-	1.038.000,00	330.000,00	708.000,00	708.000,00
	Jumlah															**119.168.668,00**

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
A	Dinas Kesehatan													
1	SRK	dinkes.440/03.1701 b/ST/53.18/VI/2024	22/06/2024	Tambolaka	Tenggaba	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
2	DYK	Dinkes.094.01/3662/ST/53.18/IX/2024	25/09/2024	Tambolaka	Puskesmas Palla	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Dinkes.094.01/1369/ST/53.18/V/2024	06/05/2024	Tambolaka	Puskesmas Werilolo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
3	PMS	Nomor : Dinkes.094./04. 3697/ST/53.18/IX/2024	26/09/2024	Tambolaka	IRTP Instan Jahe Putih + Bubuk Kelor	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
4	HKS	Dinkes.440/03.1490/ST.53.18/V/2024	22/05/2024	Tambolaka	Puskesmas Waimangura, Posbindu Watu Labara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
5	HD	Dinkes. 440/ 03. 2769/ST / 53.18/ VIII /2024	15/08/2024	Tambolaka	Werilolo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Nomor : Dinkes.094./04. 2951/ST/53.18/VIII/2024	24/08/2024	Tambolaka	Puskesmas Werilolo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
6	MIB	Dinkes.440/03.1252/ST/53.18/IV/2024	25/04/2024	Tambolaka	Puskesmas Tenateke	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
7	HW	Dinkes. 440/ 03. 1644 / ST / 53.18/ VI /2024	14/06/2024	Tambolaka	Elopada	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		dinkes.440/03.1576/ST/53.18/VI/2024	07/06/2024	Tambolaka	Tenggaba	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
8	IMB	Dinkes.440/03.1640/ST/53.18/VI/2024	14/06/2024	Tambolaka	Puskesmas Radamata	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Dinkes. 440/ 03. 1624a / ST / 53.18/ VI /2024	13/06/2024	Tambolaka	Elopada	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
9	KVR	Dinkes.094.01/1971/ST/53.18/VII/2024	23/07/2024	Tambolaka	IRTP Bubuk Jahe	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Dinkes.094.01/2076/ST/53.18/VII/2024	24/07/2024	Tambolaka	IRTP Kacang Mete	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
10	CDF	dinkes.440/03.273b/ST/53.18/II/2024	25/01/2024	Tambolaka	Puskesmas Tenateke	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Dinkes.440/ 03. 1112.a /ST/ 53.18/ IV/2024	02/04/2024	Tambolaka	Waimangura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
11	FK	Dinkes.094.03/ 765 /ST/53.18/II/2024	26/02/2024	Tambolaka	Puskesmas Tenggaba	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
12	PK	Dinkes. 094/05/ 3700/53.18/IX/2024	26/09/2024	Tambolaka	Puskesmas Bondokodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Dinkes. 094/05/ 3740/53.18/IX/2024	27/09/2024	Tambolaka	Puskesmas Palla	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Dinkes. 440/04.3349/ST/53 - 18 / IX / 2024	12/09/2024	Tambolaka	Puskesmas Deludepa	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
13	MIA	Dinkes.440/ 03. 2758.a /ST/ 53.18/ VIII/2024	14/08/2024	Tambolaka	Weekombak	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
14	CDB	Dinkes.094.03/ 1785 /ST/53.18/VII/2024	02/07/2024	Tambolaka	Puskesmas Weri Lolo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
15	PRP	Dinkes.094.03/ 1595/ST/53.18/VI/2024	10/06/2024	Tambolaka	Puskesmas Weekombak	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Dinkes.094.03/ 2811/ST/53.18/VIII/2024	19/08/2024	Tambolaka	Puskesmas Tena Teke	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Dinkes.094.03/1717/ST/53.18/ VI/2024	26/06/2024	Tambolaka	Puskesmas Delu Depa	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
16	MEM	Dinkes.94/2738/ST/53.18/VIII/2 024	14/08/2024	Tambolaka	Puskesmas Radamata	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
17	NKT	Dinkes 440/02. 1790.a /ST/53.18/VII/2024	03/07/2024	Tambolaka	Puskesmas Delu Depa	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Dinkes. 440/04.1881 /ST/53 - 18 / VII / 2024	15/07/2024	Tambolaka	Puskesmas Bondokodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Dinkes. 440/04.2344 /ST/53 - 18 / VII / 2024	29/07/2024	Tambolaka	Puskesmas Werilolo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Dinkes. 440/04.2369 /ST/53 - 18 / VII / 2024	30/07/2024	Tambolaka	Puskesmas Panenggo Ede	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Dinkes. 440/04.2435 /ST/53 - 18 / VII / 2024	31/07/2024	Tambolaka	Puskesmas Deludepa	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
18	AMS	Dinkes. 440/04.1135/ST/53 - 18 / IV / 2024	04/04/2024	Tambolaka	Puskesmas Waimangura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Dinkes 440/02. 1606.a /ST/53.18/VI/2024	11/06/2024	Tambolaka	Puskesmas Palla	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Dinkes.094/04.2071/ST/53.18/ VII/2024	24/07/2024	Tambolaka	IRTP Kripik Pisang Maryam Sumba Suka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Dinkes 440/02. 2605 /ST/53.18/VIII/2024	06/08/2024	Tambolaka	Puskesmas Weekombak (Sumur Bor)	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Nomor : Dinkes.094./04. 2740/ST/53.18/VIII/2024	14/08/2024	Tambolaka	Puskesmas Radamata	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Nomor : Dinkes.094./04. 3101/ST/53.18/VIII/2024	31/08/2024	Tambolaka	IRTP Kopi Bubuk di Meja	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Dinkes. 440/04.3430 /ST/53 - 18 / IX / 2024	17/09/2024	Tambolaka	Puskesmas Kawangohari	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Dinkes. 440/04.3586 /ST/53 - 18 / IX / 2024	23/09/2024	Tambolaka	Puskesmas Werilolo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Nomor : Dinkes.094./04. 3656/ST/53.18/IX/2024	25/09/2024	Tambolaka	IRTP Sari Temulawak Intan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Nomor : Dinkes.094./04. 4578/ST/53.18/XI/2024	05/11/2024	Tambolaka	Puskesmas Watukawula	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Dinkes. 440/04.4645 /ST/53 - 18 / XI / 2024	08/11/2024	Tambolaka	Puskesmas Radamata	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
19	SJR	Dinkes 440/02. 2605 /ST/53.18/VIII/2024	06/08/2024	Tambolaka	Puskesmas Weekombak (Sumur Bor)	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
20	MBM	Dinkes.94/2760/ST/53.18/VIII/2 024	15/08/2024	Tambolaka	Puskesmas Waimangura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
21	AMA	Dinkes.440/02/ST.1475/53.18/ V/2024	20/05/2024	Tambolaka	Puskesmas Elopada	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
22	MMA	dinkes.440/03.1213/ST/53.18/I V/2024	20/04/2024	Tambolaka	Puskesmas Tenateke	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Dinkes.440/02/ST.1812/53.18/ VII/2024	06/07/2024	Tambolaka	dr. Silvester Ali Budhiman	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
23	AHK	dinkes.440/03.1170/ST/53.18/I V/2024	16/04/2024	Tambolaka	Puskesmas Wallandimu	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Dinkes.094.03/ 1694a /ST/53.18/VI/2024	21/06/2024	Tambolaka	Puskesmas Kori	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
24	KMB	Dinkes. 440/04.992 /ST/53 - 18 / III / 2024	18/03/2024	Tambolaka	Puskesmas Panenggo Ede	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
25	DDD	Dinkes.094.03/ 997 /ST/53.18/III/2024	18/03/2024	Tambolaka	Puskesmas tena Teke	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
26	HKS	Dinkes.094.03/ 1490/ST/53.18/V/2024	22/05/2024	Tambolaka	Puskesmas Waimangura, Posbindu Watu Labara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
27	RAD	Dinkes.094.01/1971/ST/53.18/ VII/2024	23/07/2024	Tambolaka	Puskesmas Elopada	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
28	AWN	Dinkes.440/03.967/ST/53.18/ III /2024	14/03/2024	Tambolaka	Puskesmas Deludepa	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Dinkes.440/03.1575/ST/53.18/ VI/2024	07/06/2024	Tambolaka	Puskesmas Wallandimu	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Dinkes.440/03.1689/ST/53.18/ VI/2024	21/06/2024	Tambolaka	Puskesmas Tanggaba	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
29	MHM	Dinkes.94/2593/ST/53.18/VIII/2 024	06/08/2024	Tambolaka	Puskesmas Wallandimu	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Dinkes 440/02. 1540.a /ST/53.18/VI/2024	03/06/2024	Tambolaka	Puskesmas Palla	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Dinkes. 440/04.3704 /ST/53 - 18 / IX / 2024	26/09/2024	Tambolaka	Puskesmas Radamata	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
B	**DP3AP2KB**													
30	ANS	41	06/02/2024	Tambolaka	Desa Maliti Ndari Posyandu Katuku Wawi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	170.000,00	08/05/2025	-
31	DOT	426	14/10/2024	Tambolaka	Polres Sumba Barat Daya	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	170.000,00	08/05/2025	-
32	MNN	262.a	27/06/2024	Tambolaka	Kec. Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	170.000,00	08/05/2025	-
33	DR	127	04-07 April 2024	Tambolaka	Kec. Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	170.000,00	08/05/2025	-
34	VRA	701.b	09/12/2024	Tambolaka	Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	170.000,00	08/05/2025	-
35	EFU	285 b	11/07/2024	Tambolaka	Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	170.000,00	08/05/2025	-
36	YWS	739	19/12/2024	Tambolaka	Posyandu Bina Dana Desa Weelimbu	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	170.000,00	08/05/2025	-
37	SR	287 b	12/07/2024	Tambolaka	Balai Penyuluhan KB Kecamatan Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	170.000,00	08/05/2025	-
		285 a	11/07/2024	Tambolaka	Kec. Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
C	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**													
38	IGE	PK.422.1/20/SPT/V/2024	13/05/2024	Tambolaka	SMP Negeri 2 Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PK.422.1/24/SPT/V/2024	14/05/2024	Tambolaka	SMP NEGERI 5 WEWEWA BARAT	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PK.422.1/28/SPT/V/2024	15/05/2024	Tambolaka	SMP NEGERI 5 LOURA	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PK.422.1/32/SPT/V/2024	16/05/2024	Tambolaka	SMP NEGERI 1 KOTA TAMBOLAKA	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PK.422.1/422/ST/DD/PAUD/S BD/V/2024	13/05/2024	Tambolaka	PAUD KARTINI	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
		PK.422.1/426/ST/DD/PAUD/S BD/V/2024	14/05/2024	Tambolaka	KB KASIH KARUNIA	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
		PK.422.1/430/ST/DD/PAUD/S BD/V/2024	15/05/2024	Tambolaka	KB EMANUEL	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
		PK.422.1/434/ST/DD/PAUD/S BD/V/2024	16/05/2024	Tambolaka	TK STA.THERESIA TUNAS HARAPAN	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
		PK.422.1/438/ST/DD/PAUD/S BD/V/2024	17/05/2024	Tambolaka	TK ST DOMINIKUS	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
39	MOA	PK.422.1/421/ST/DD/PAUD/S BD/V/2024	13/05/2024	Tambolaka	KB MUTIARA KASIH	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
		PK.422.1/425/ST/DD/PAUD/S BD/V/2024	14/05/2024	Tambolaka	PAUD TALENTA	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
		PK.422.1/429/ST/DD/PAUD/S BD/V/2024	15/05/2024	Tambolaka	PAUD DENADA	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
		PK.422.1/433/ST/DD/PAUD/S BD/V/2024	16/05/2024	Tambolaka	KB KASIH	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
		PK.422.1/437/ST/DD/PAUD/SBD/V/2024	17/05/2024	Tambolaka	KB TUNAS HARAPAN	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
		PK.422.1/22/SPT/V/2024	13/05/2024	Tambolaka	SMP NEGERI 1 WEWEWA TIMUR	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PK.422.1/26/SPT/V/2024	14/05/2024	Tambolaka	SMP NEGERI 2 WEWEWA UTARA	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PK.422.1/30/SPT/V/2024	15/05/2024	Tambolaka	SMP MANDAELU	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PK.422.1/34/SPT/V/2024	16/05/2024	Tambolaka	SMP NEGERI 2 KODI BALAGHAR	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PK.422.1/019/SPT/UKS/BID.SD/DD/SBD/IX/2024	18/09/2024	Tambolaka	SD Negeri Waikalimbu	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PK.422.1/020/SPT/UKS/BID.SD/DD/SBD/IX/2025	19/09/2024	Tambolaka	SD Masehi Wee Kombaka I	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PK.422.1/021/SPT/UKS/BID.SD/DD/SBD/IX/2026	20/09/2024	Tambolaka	SD Generasi Perjuangan Kalena Rongo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
40	MS	PK.422.1/20/SPT/KKG/BID.SD/DD/SBD/XI/2024	22/11/2024	Tambolaka	SDK MARSUDIRINI	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
41	BR	PK.422.1/1410/SBD/XII/2024	12/12/2024	Tambolaka	Tambolaka	1	100.000,00	-	Ganda	-	200.000,00	-		200.000,00
42	KM	PK.422.1/1410/SBD/XII/2024	12/12/2024	Tambolaka	Tambolaka	1	100.000,00	-	Ganda	-	200.000,00	-		200.000,00
43	YM	PK.422.1/1410/SBD/XII/2024	12/12/2024	Tambolaka	Tambolaka	1	100.000,00	-	Ganda	-	200.000,00	-		200.000,00
44	DG	PK.422.1/1410/SBD/XII/2024	12/12/2024	Tambolaka	Tambolaka	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
45	ET	PK.422.1/1410/SBD/XII/2024	12/12/2024	Tambolaka	Tambolaka	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
46	FB	PK.422.1/1410/SBD/XII/2024	12/12/2024	Tambolaka	Tambolaka	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
47	KBB	PK.422.1/1410/SBD/XII/2024	12/12/2024	Tambolaka	Tambolaka	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
48	LL	PK.422.1/1410/SBD/XII/2024	12/12/2024	Tambolaka	Tambolaka	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
49	LD	PK.422.1/1410/SBD/XII/2024	12/12/2024	Tambolaka	Tambolaka	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
50	LR	PK.422.1/1410/SBD/XII/2024	12/12/2024	Tambolaka	Tambolaka	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
51	LE	PK.422.1/1410/SBD/XII/2024	12/12/2024	Tambolaka	Tambolaka	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
52	MKM	PK.422.1/1410/SBD/XII/2024	12/12/2024	Tambolaka	Tambolaka	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
53	MLT	PK.422.1/1410/SBD/XII/2024	12/12/2024	Tambolaka	Tambolaka	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
54	OPK	PK.422.1/1410/SBD/XII/2024	12/12/2024	Tambolaka	Tambolaka	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
55	PPM	PK.422.1/1410/SBD/XII/2024	12/12/2024	Tambolaka	Tambolaka	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
56	RRK	PK.422.1/1410/SBD/XII/2024	12/12/2024	Tambolaka	Tambolaka	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
57	RRW	PK.422.1/1410/SBD/XII/2024	12/12/2024	Tambolaka	Tambolaka	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
58	TM	PK.422.1/1410/SBD/XII/2024	12/12/2024	Tambolaka	Tambolaka	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
59	VGM	PK.422.1/1410/SBD/XII/2024	12/12/2024	Tambolaka	Tambolaka	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
60	IP	PK.422.1/21/SPT/V/2024	13/05/2024	Tambolaka	SMPN 1 Kodi Bangedo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PK.422.1/21/SPT/V/2025	14/05/2024	Tambolaka	SMPN Flos Karmeli	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PK.422.1/21/SPT/V/2026	15/05/2024	Tambolaka	SMP Bakti Luhur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PK.422.1/21/SPT/V/2027	16/05/2024	Tambolaka	SMP N 1 Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PK.422.1/421/ST/DD/PAUD/SBD/V/2024	13/05/2024	Tambolaka	KB MUTIARA KASIH	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
		PK.422.1/421/ST/DD/PAUD/SBD/V/2025	14/05/2024	Tambolaka	PAUD TALENTA	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
		PK.422.1/421/ST/DD/PAUD/SBD/V/2026	15/05/2024	Tambolaka	PAUD DENADA	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
		PK.422.1/421/ST/DD/PAUD/SBD/V/2027	16/05/2024	Tambolaka	KB KASIH	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
		PK.422.1/421/ST/DD/PAUD/SBD/V/2028	17/05/2024	Tambolaka	KB TUNAS HARAPAN	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
61	CM	PK.422.1/423/ST/DD/PAUD/SBD/V/2024	13/05/2024	Tambolaka	TK OLE DEWA	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
		PK.422.1/427/ST/DD/PAUD/SBD/V/2024	14/05/2024	Tambolaka	TK SANTO YOSEF PEKERJA	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PK.422.1/431/ST/DD/PAUD/SBD/V/2024	15/05/2024	Tambolaka	TK ANAK TERANG WALLANDIMU	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PK.422.1/435/ST/DD/PAUD/SBD/V/2024	16/05/2024	Tambolaka	PAUD AZZAHRA 3 KATEWEL	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
62	VY	PK.422.1/421/ST/DD/PAUD/SBD/V/2024	13/05/2024	Tambolaka	KB MUTIARA KASIH	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
		PK.422.1/425/ST/DD/PAUD/SBD/V/2024	14/05/2024	Tambolaka	PAUD TALENTA	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
		PK.422.1/429/ST/DD/PAUD/SBD/V/2024	15/05/2024	Tambolaka	PAUD DENADA	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
		PK.422.1/433/ST/DD/PAUD/SBD/V/2024	16/05/2024	Tambolaka	KB KASIH	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
		PK.422.1/437/ST/DD/PAUD/SBD/V/2024	17/05/2024	Tambolaka	KB TUNAS HARAPAN	1	100.000,00	-	Ganda	-	100.000,00	-		100.000,00
D	Dinas PUPR													
63	JEW	PUPR.600.1/494/ST-DD/53.18/VI/2024	24/06/2024	Tambolaka	Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.600.1/502/ST-DD/53.18/VI/2024	26/06/2024	Tambolaka	Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.600.1/503/ST-DD/53.18/VI/2024	27/06/2024	Tambolaka	Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
64	ASL	PUPR.600.1/280/ST-DD/53.18/III/2024	26/03/2024	Tambolaka	Kec. Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.600.1/285/ST-DD/53.18/III/2024	27/03/2024	Tambolaka	Kec. Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
65	YRT	PUPR.600.1/863/ST-DD/53.18/VII/2024	27/11/2024	Tambolaka	Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.600.1/871/ST-DD/53.18/VII/2024	29/11/2024	Tambolaka	Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
66	DB	056/057/ST/DD/PUPR.TR/53.18/V/2024	19/07/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		060/057/ST/DD/PUPR.TR/53.18/V/2024	21/03/2024	Tambolaka	Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
67	AWO	PUPR.056/782/ST-DD/CK/53.18/VIII/2024	29/08/2024	Tambolaka	Desa Lolo Ole	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/771/ST-DD/CK/53.18/VIII/2024	27/08/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/775/ST-DD/CK/53.18/VIII/2024	28/08/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Bangedo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/787/ST-DD/CK/53.18/VIII/2024	30/08/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/997/ST-DD/CK/53.18/XI/2024	08/11/2024	Tambolaka	Kec. Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/979/ST-DD/CK/53.18/XI/2024	04/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/989/ST-DD/CK/53.18/XI/2024	06/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/993/ST-DD/CK/53.18/XI/2024	07/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/550/ST-DD/CK/53.18/VI/2024	25/06/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/556/ST-DD/CK/53.18/VI/2024	26/06/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
		PUPR.056/559/ST-DD/CK/53.18/VI/2024	27/06/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Bangedo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/566/ST-DD/CK/53.18/VI/2024	28/06/2024	Tambolaka	Desa Noha	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
68	RS	PUPR.056/782/ST-DD/CK/53.18/VIII/2024	29/08/2024	Tambolaka	Desa Lolo Ole	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
69	KH	056/326/ST/DD/PUPR-SDA/SBD/IX/2024	10/09/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
70	EYL	PUPR.056/126/ST-DD/CK/53.18/VIII/2024	05/02/2024	Tambolaka	Kec. Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
71	HH	PUPR.600.1/456/ST-DD/53.18/VI/2024	10/06/2024	Tambolaka	Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.600.1/462/ST-DD/53.18/VI/2024	11/06/2024	Tambolaka	Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.600.1/466/ST-DD/53.18/VI/2024	13/06/2024	Tambolaka	Kodi Bangedo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
72	DK	056/10/ST/DD/PUPR/53.18/I/2024	23/01/2024	Tambolaka	Kec. Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
73	PFA	PUPR.056/574/ST-DD/CK/53.18/VIII/2024	02/07/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/729/ST-DD/CK/53.18/VIII/2024	15/08/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/983/ST-DD/CK/53.18/XI/2024	05/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/781/ST-DD/CK/53.18/IX/2024	09/09/2024	Tambolaka	Kec. Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
74	YBS	PUPR.056/781/ST-DD/CK/53.18/IX/2024	09/09/2024	Tambolaka	Kec. Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
75	FFM	PUPR.056/239/ST-DD/CK/53.18/III/2024	15/03/2024	Tambolaka	Kec. Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/729/ST-DD/CK/53.18/III/2024	15/08/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
76	AP	PUPR.056/274/ST-DD/CK/53.18/III/2024	25/03/2024	Tambolaka	Kec. Kodi Bangedo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/274/ST-DD/CK/53.18/III/2024	26/03/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/284/ST-DD/CK/53.18/III/2024	27/03/2024	Tambolaka	Kec. Kodi Bangedo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/284/ST-DD/CK/53.18/III/2024	29/05/2024	Tambolaka	Kec.Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/284/ST-DD/CK/53.18/III/2024	30/05/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/284/ST-DD/CK/53.18/III/2024	31/05/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/284/ST-DD/CK/53.18/III/2024	28/08/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Bangedo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/284/ST-DD/CK/53.18/III/2024	29/08/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/284/ST-DD/CK/53.18/III/2024	30/08/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
77	YUD	PUPR.600.1/277/ST-DD/53.18/III/2024	26/03/2024	Tambolaka	Kec. Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.600.1/288/ST-DD/53.18/III/2024	28/03/2024	Tambolaka	Kec. Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.600.1/275/ST-DD/53.18/III/2024	25/03/2024	Tambolaka	Kec. Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.600.1/285/ST-DD/53.18/III/2024	27/03/2024	Tambolaka	Kec. Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.600.1/570/ST-DD/53.18/VII/2024	23/07/2024	Tambolaka	Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.600.1/575/ST-DD/53.18/VII/2024	25/07/2024	Tambolaka	Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.600.1/707/ST-DD/53.18/IX/2024	13/09/2024	Tambolaka	Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
78	AFA	PUPR.600.1/565/ST-DD/53.18/VII/2024	22/07/2024	Tambolaka	Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.600/193/53.18/ST/VII/2024	23/07/2024	Tambolaka	kec. Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.600/194/53.18/ST/VII/2024	24/07/2024	Tambolaka	Kec. Wewewa Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
79	SDT	PUPR.056/406/ST-DD/CK/53.18/V/2024	13/05/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Bangedo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/830/ST-DD/CK/53.18/IX/2028	23/09/2024	Tambolaka	Kec. Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/892/ST-DD/CK/53.18/X/2024	10/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/1037/ST-DD/CK/53.18/XI/2024	14/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
80	CSP	PUPR.600.1/771/ST-DD/53.18/VI/2024	15/10/2024	Tambolaka	Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
81	DDM	PUPR.056/973/ST-DD/CK/53.18/XI/2024	01/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
82	MR	056/ 477 /ST/DD/PUPR - SDA/SBD/XI/2024	20/11/2024	Tambolaka	Desa Mene Ate - Kec Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
83	BBA	PUPR.056/308/ST-DD/CK/53.18/IV/2024	03/04/2024	Tambolaka	Desa Wee Wella	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
84	FIL	PUPR.600.1/852/ST-DD/53.18/VII/2024	22/11/2024	Tambolaka	Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
85	AS	PUPR.056/276/ST-DD/CK/53.18/III/2024	25/03/2024	Tambolaka	Desa Tema Tana	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/279/ST-DD/CK/53.18/III/2024	26/03/2024	Tambolaka	Kec. Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/286/ST-DD/CK/53.18/III/2024	27/03/2024	Tambolaka	Kec. Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/455/ST-DD/CK/53.18/V/2024	29/05/2024	Tambolaka	Kec. Kodi Bangedo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/461/ST-DD/CK/53.18/V/2024	30/05/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/564/ST-DD/CK/53.18/VI/2024	28/06/2024	Tambolaka	Desa Lolo Ole	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/554/ST-DD/CK/53.18/VI/2024	26/06/2024	Tambolaka	Kec. Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/561/ST-DD/CK/53.18/VI/2024	27/06/2024	Tambolaka	Kec. Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/701/ST-DD/CK/53.18/VIII/2024	07/08/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/704/ST-DD/CK/53.18/VIII/2024	08/08/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/856/ST-DD/CK/53.18/IX/2024	30/09/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Bangedo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/781/ST-DD/CK/53.18/IX/2024	.09 September 2024	Tambolaka	Kec. Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/979/ST-DD/CK/53.18/XI/2024	04/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.056/983/ST-DD/CK/53.18/XI/2024	05/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
86	AUD	Nomor: 056/060/ST/DD/PUPR.TR/53.18/V/2024	21/03/2024	Tambolaka	Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Nomor: 056/041/ST/DD/PUPR.TR/53.18/VII/2024	09/07/2024	Tambolaka	Kelurahan Langgalero, Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
87	AN	Nomor: 056/060/ST/DD/PUPR.TR/53.18/V/2024	21/03/2024	Tambolaka	Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		Nomor: 056/059/ST/DD/PUPR.TR/53.18/V/2024	17/05/2024	Tambolaka	Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
88	BDL	PUPR.600.1/600/ST-DD/53.18/VIII/2024	05/08/2024	Tambolaka	Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		PUPR.600.1/862/ST-DD/53.18/VII/2024	27/11/2024	Tambolaka	Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
89	YH	PUPR.600.1/853/ST-DD/53.18/VII/2024	22/11/2024	Tambolaka	Kodi Bangedo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
90	DWT	056/ 297 /SPPD/DD/PUPR-SDA/SBD/VIII/2024	27/08/2024	Tambolaka	Desa Mata Lombu - kec. Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
E	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan													
91	YDN	178/SPT/PSP/DPKP/SBD/X/2024	09/10/2024	Tambolaka	BPP Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1184.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	07/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.249/SPT/PSP/DPKP/53.18/XI/2024	14/11/2024	Tambolaka	Desa Kalembu Tillu Kelompok Tani Subur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.250/SPT/PSP/DPKP/53.18/XI/2024	15/11/2024	Tambolaka	Desa Wali Ate Kelompok Tani Setia Mandiri	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.251/SPT/PSP/DPKP/53.18/XI/2024	18/11/2024	Tambolaka	Desa Lolo Ole Kelompok Tani Ate Kaka Kecamatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.252/SPT/PSP/DPKP/53.18/XI/2024	19/11/2024	Tambolaka	Desa Rada Malando Kelompok Tani Berkat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		222/SPT/PSP/DPKP/SBD/XI/2024	08/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur Desa Tema Tana	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1538.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	05/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1566.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	07/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.263/SPT/PSP/DPKP/53.18/XII/2024	05/12/2024	Tambolaka	Desa Milla Ate Kelompok Tani Dari Tana Kecamatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1772/SPT/BKP/DPKP/SBD/XII/2024	05/12/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
92	VPV	853/SPT/DPKP/SBD/IX/2024	03/09/2024	Tambolaka	Kelompok Tani Pati Rangga	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
93	ALM	853/SPT/DPKP/SBD/IX/2024	03/09/2024	Tambolaka	Kelompok Tani Pati Rangga	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
94	MIL	099.06/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	01/02/2024	Tambolaka	Desa Mata Pyawu	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.08/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	03/02/2024	Tambolaka	Desa Tema Tana	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.09/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	05/02/2024	Tambolaka	Desa Djela Manu	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.10/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	06/02/2024	Tambolaka	Desa Eka Pata	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.11/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	07/02/2024	Tambolaka	Desa Marreda Wuni	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.12/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	12/02/2024	Tambolaka	Desa Kabali Dana	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.13/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	13/02/2024	Tambolaka	Desa Delo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
		099.14/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	15/02/2024	Tambolaka	Desa Wee Kokora	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.16/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	21/02/2024	Tambolaka	Desa Kalembu Weri	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.17/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	22/02/2024	Tambolaka	Desa Raba Ege	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.18/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	23/02/2024	Tambolaka	Desa Mareda Kalada	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.21/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	28/02/2024	Tambolaka	Kelompok Tani	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.43/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	02/04/2024	Tambolaka	Kelompok Tani	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.44/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	03/04/2024	Tambolaka	Kelompok Tani	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.45/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	04/04/2024	Tambolaka	Kelompok Tani	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.46/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	05/04/2024	Tambolaka	Kelompok Tani	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.47/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	08/04/2024	Tambolaka	Kelompok Tani	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.48/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	09/04/2024	Tambolaka	Kelompok Tani	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.49/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	12/04/2024	Tambolaka	Kelompok Tani	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.50/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	15/04/2024	Tambolaka	Kelompok Tani	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.51/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	16/04/2024	Tambolaka	Kelompok Tani	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.52/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	17/04/2024	Tambolaka	Kelompok Tani	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.53/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	18/04/2024	Tambolaka	Kelompok Tani	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.54/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	19/04/2024	Tambolaka	Kelompok Tani	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.55/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	22/04/2024	Tambolaka	Kelompok Tani	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.06/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	22/04/2024	Tambolaka	Kelompok Tani Omba Kacura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		123/SPT/PSP/DPKP/SBD/V/2024	10 Mei 2024	Tambolaka	Kec. W. Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.81/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	10/06/2024	Tambolaka	Desa Laga Lete Kelompok Tani Moto Kaha Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.82/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	11/06/2024	Tambolaka	Desa Milla Ate Kelompok Tani Dari Tana Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.83/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	12/06/2024	Tambolaka	Desa Buru Kaghu Kelompok Tani Via Dolorosa Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.84/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	13/06/2024	Tambolaka	Desa Tema Tena Kelompok Tani Sabar tani Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.85/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	14/06/2024	Tambolaka	Desa Ana Engge Kelompok Tani Walu Ate Kecamatan Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.86/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	18/06/2024	Tambolaka	Desa Milla Ate Kelompok Tani Ana Lalo Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
		099.87/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	19/06/2024	Tambolaka	Desa Lolo Ole Kelompok Tani Loda Pare Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.88/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	20/06/2024	Tambolaka	Desa Eka Pata Kelompok Tani Lolo Lara Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.89/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	21/06/2024	Tambolaka	Desa Paka Madeta Kelompok Tani Madit Mata Kecamatan Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.90/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	24/06/2024	Tambolaka	Desa Tena Teke Kelompok Tani Ole Milla Kecamatan Wewewa Selatani	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.91/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	25/06/2024	Tambolaka	Desa Waimangura Kelompok Tani Helu Wungango Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.103/SPT/PSP/DPKP/53.18/VII/2024	11/07/2024	Tambolaka	Desa Dikira	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.01/SPT/PSP/DPKP/53.18/I/2024	31/07/2024	Tambolaka	Desa Lete Konda	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.150/SPT/PSP/DPKP/53.18/VIII/2024	27/08/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.133/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	08/10/2024	Tambolaka	kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.134/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	09/10/2024	Tambolaka	kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.137/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	16/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.138/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	18/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.139/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	21/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.140/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	22/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.142/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	24/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.143/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	25/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
95	MMB	099.131/SPT/PSP/DPKP/53.18/VII/2024	31/07/2024	Tambolaka	Kecamata Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.234/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	16/12/2024	Tambolaka	Poktan Mere Kehe II Desa Mata kapore Kec. Kodi Bangedo.	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
96	FZB	099.06/SPT/PSP/DPKP/53.18/I/2024	01/02/2024	Tambolaka	Kecamatan W. Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.07/SPT/PSP/DPKP/53.18/I/2024	02/02/2024	Tambolaka	Kecamatan W. Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.08/SPT/PSP/DPKP/53.18/I/2024	03/02/2024	Tambolaka	Kecamatan W. Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.09/SPT/PSP/DPKP/53.18/I/2024	05/02/2024	Tambolaka	Kecamatan W. Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.10/SPT/PSP/DPKP/53.18/I/2024	06/02/2024	Tambolaka	Kecamatan W. Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.11/SPT/PSP/DPKP/53.18/I/2024	07/02/2024	Tambolaka	Kecamatan W. Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.12/SPT/PSP/DPKP/53.18/I/2024	12/02/2024	Tambolaka	Kecamatan W. Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.13/SPT/PSP/DPKP/53.18/I/2024	13/02/2024	Tambolaka	Kecamatan W. Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.14/SPT/PSP/DPKP/53.18/I/2024	15/02/2024	Tambolaka	Kecamatan W. Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
		099.15/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	20/02/2024	Tambolaka	Kecamatan W. Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.16/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	21/02/2024	Tambolaka	Kecamatan W. Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.17/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	22/02/2024	Tambolaka	Kecamatan W. Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.18/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	23/02/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.21/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	28/02/2024	Tambolaka	Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.22/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	28/02/2024	Tambolaka	Milla Ate	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.106/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	03/04/2024	Tambolaka	Poktan Bunga Mawar Desa Wekokora Kecamatan W. Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.108/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	05/04/2024	Tambolaka	Poktan Rita Desa Rita Baru Kecamatan W. Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.110/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	09/04/2024	Tambolaka	Poktan Harapan Desa Umbu Wango Kecamatan W. Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.112/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	15/04/2024	Tambolaka	Poktan Maria Podi Desa Mareda Kalada Kecamatan W. Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.114/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	17/04/2024	Tambolaka	Poktan JD. Uma Kii Desa Pada Eweta Kecamatan W. Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.116/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	19/04/2024	Tambolaka	Poktan Heka Lori Desa Kendu Wela Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		123/SPT/PSP/DPKP/SBD/V/2024	10 Mei 2024	Tambolaka	Kec. W. Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.103/SPT/PSP/DPKP/53.18/VII/2024	11/07/2024	Tambolaka	Wunuta Mayailo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.149/SPT/PSP/DPKP/53.18/VIII/2024	27/08/2024	Tambolaka	Moto Kaha	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.150/SPT/PSP/DPKP/53.18/VIII/2024	28/08/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.165/SPT/PSP/DPKP/53.18/IX/2024	19/09/2024	Tambolaka	Usaha Mandiri	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.166/SPT/PSP/DPKP/53.18/IX/2024	20/09/2024	Tambolaka	Tara Nanga	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.178/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	08/10/2024	Tambolaka	Desa Bondo Boghila Kelompok Tani Kepiting Merah Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.180/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	10/10/2024	Tambolaka	Desa Kadi Pada Kelompok Tani Suka Maju 2 Kecamatan Kota	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.184/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	16/10/2024	Tambolaka	Desa Kadu Eta Kelompok Tani Milla Ate Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.187/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	21/10/2024	Tambolaka	Desa Buru Kaghu Kelompok Tani Via Dolorosa Kecamatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.191/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	25/10/2024	Tambolaka	Desa Waimangura Kelompok Tani Maju Tak Gentar Kecamatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.263/SPT/PSP/DPKP/53.18/XII/2024	05/12/2024	Tambolaka	Desa Milla Ate Kelompok Tani Dari Tana Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
97	RRM	099.06/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	01/02/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
		099.07/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	02/02/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.08/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	03/02/2024	Tambolaka	Kecamatan K. Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.09/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	05/02/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.10/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	06/02/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.11/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	07/02/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.12/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	12/02/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.13/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	13/02/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.14/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	15/02/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.15/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	20/02/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.16/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	21/02/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.17/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	22/02/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.18/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	23/02/2024	Tambolaka	Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.21/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	28/02/2024	Tambolaka	Lara Daha	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.105/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	02/04/2024	Tambolaka	Poktan Liku Moripa Desa Karuni Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.106/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	03/04/2024	Tambolaka	Poktan Bunga Mawar Desa Wekokora Kecamatan W. Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.107/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	04/04/2024	Tambolaka	Poktan Dua Ate Desa Kadi Wone Kecamatan W. Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.108/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	05/04/2024	Tambolaka	Poktan Rita Desa Rita Baru Kecamatan W. Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.109/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	08/04/2024	Tambolaka	Poktan Harapan Kita Desa Kadi Wone Kecamatan W. Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.110/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	09/04/2024	Tambolaka	Poktan Harapan Desa Umbu Wango Kecamatan W. Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.111/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	12/04/2024	Tambolaka	Poktan Rangga Ninno Desa Bondo Boghila Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.112/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	15/04/2024	Tambolaka	Poktan Maria Podi Desa Mareda Kalada Kecamatan W. Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.113/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	16/04/2024	Tambolaka	Poktan Kadi Wanno Desa Umbu Wangu Kecamatan W. Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.114/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	17/04/2024	Tambolaka	Poktan JD. Uma Kii Desa Pada Eweta Kecamatan W. Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.115/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	18/04/2024	Tambolaka	Poktan Wode Ole Desa Kalaki Kambe Kecamatan W. Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
		099.116/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	19/04/2024	Tambolaka	Poktan Heka Lori Desa Kendu Wela Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.117/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	22/04/2024	Tambolaka	Poktan Ngandi Kehe Desa Moro Manduyo Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		125/SPT/PSP/DPKP/SBD/V/2024	13 Mei 2024	Tambolaka	Kec. K. Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.81/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	10/06/2024	Tambolaka	Desa Laga Lete Kelompok Tani Moto Kaha Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.82/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	11/06/2024	Tambolaka	Desa Milla Ate Kelompok Tani Dari Tana Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.83/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	12/06/2024	Tambolaka	Desa Buru Kaghu Kelompok Tani Via Dolorosa Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.84/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	13/06/2024	Tambolaka	Desa Tema Tena Kelompok Tani Sabar tani Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.85/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	14/06/2024	Tambolaka	Desa Ana Engge Kelompok Tani Walu Ate Kecamatan Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.86/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	18/06/2024	Tambolaka	Desa Milla Ate Kelompok Tani Ana Lalo Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.87/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	19/06/2024	Tambolaka	Desa Lolo Ole Kelompok Tani Loda Pare Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.88/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	20/06/2024	Tambolaka	Desa Eka Pata Kelompok Tani Lolo Lara Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.89/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	21/06/2024	Tambolaka	Desa Paka Madeta Kelompok Tani Madit Mata Kecamatan Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.90/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	24/06/2024	Tambolaka	Desa Tena Teke Kelompok Tani Ole Milla Kecamatan Wewewa Selatani	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.178/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	08/10/2024	Tambolaka	Desa Bondo Boghila Kelompok Tani Kepiting Merah Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.179/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	09/10/2024	Tambolaka	Desa Watu Kawula Kelompok Tani Bangun Kasih Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.180/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	10/10/2024	Tambolaka	Desa Kadi Pada Kelompok Tani Suka Maju 2 Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.184/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	16/10/2024	Tambolaka	Desa Kadu Eta Kelompok Tani Milla Ate Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.186/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	18/10/2024	Tambolaka	Desa Hameli Ate Kelompok Tani Lende Mopir Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.187/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	21/10/2024	Tambolaka	Desa Buru Kaghu Kelompok Tani Via Dolorosa Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
		099.188/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	22/10/2024	Tambolaka	Desa Milla Ate Kelompok Tani Ndari Tana Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.190/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	24/10/2024	Tambolaka	Desa Mareda Wundi Kelompok Tani Loda Lima Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.191/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	25/10/2024	Tambolaka	Desa Waimangura Kelompok Tani Maju Tak Gentar Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.234/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	16/12/2024	Tambolaka	Poktan Mere Kehe II Desa Mata kapore Kec. Kodi Bangedo.	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
98	YJT	099.06/SPT/PSP/DPKP/53.18/I/2024	01/02/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.07/SPT/PSP/DPKP/53.18/I/2024	02/02/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.08/SPT/PSP/DPKP/53.18/I/2024	03/02/2024	Tambolaka	Kecamatan K. Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.09/SPT/PSP/DPKP/53.18/I/2024	05/02/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.10/SPT/PSP/DPKP/53.18/I/2024	06/02/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.11/SPT/PSP/DPKP/53.18/I/2024	07/02/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.12/SPT/PSP/DPKP/53.18/I/2024	12/02/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.13/SPT/PSP/DPKP/53.18/I/2024	13/02/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.14/SPT/PSP/DPKP/53.18/I/2024	15/02/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.15/SPT/PSP/DPKP/53.18/I/2024	20/02/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.16/SPT/PSP/DPKP/53.18/I/2024	21/02/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.17/SPT/PSP/DPKP/53.18/I/2024	22/02/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.18/SPT/PSP/DPKP/53.18/I/2024	23/02/2024	Tambolaka	Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.21/SPT/PSP/DPKP/53.18/I/2024	28/02/2024	Tambolaka	Lara Daha	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.43/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	02/04/2024	Tambolaka	Kecamatan K.Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.44/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	03/04/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.45/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	04/04/2024	Tambolaka	Kecamatan K.Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.46/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	05/04/2024	Tambolaka	Kecamatan W.Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.47/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	08/04/2024	Tambolaka	Kecamatan W.Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.48/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	09/04/2024	Tambolaka	Kecamatan W. Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.49/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	12/04/2024	Tambolaka	Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.50/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	15/04/2024	Tambolaka	Kecamatan K. Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.51/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	16/04/2024	Tambolaka	Kecamatan K.Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.52/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	17/04/2024	Tambolaka	Kecamatan K.Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
		099.53/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	18/04/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.54/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	19/04/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.55/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	22/04/2024	Tambolaka	Kecamatan W.Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		130/SPT/PSP/ DPKP/SBD/V/2024	23/05/2024	Tambolaka	Kec. W. Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.81/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	10/06/2024	Tambolaka	Desa Laga Lete Kelompok Tani Moto Kaha Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.82/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	11/06/2024	Tambolaka	Desa Milla Ate Kelompok Tani Dari Tana Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.83/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	12/06/2024	Tambolaka	Desa Buru Kaghu Kelompok Tani Via Dolorosa Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.84/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	13/06/2024	Tambolaka	Desa Tema Tena Kelompok Tani Sabar tani Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.85/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	14/06/2024	Tambolaka	Desa Ana Engge Kelompok Tani Walu Ate Kecamatan Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.86/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	18/06/2024	Tambolaka	Desa Milla Ate Kelompok Tani Ana Lalo Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.87/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	19/06/2024	Tambolaka	Desa Lolo Ole Kelompok Tani Loda Pare Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.88/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	20/06/2024	Tambolaka	Desa Eka Pata Kelompok Tani Lolo Lara Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.89/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	21/06/2024	Tambolaka	Desa Paka Madeta Kelompok Tani Madit Mata Kecamatan Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.90/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	24/06/2024	Tambolaka	Desa Tena Teke Kelompok Tani Ole Milla Kecamatan Wewewa Selatani	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.91/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	25/06/2024	Tambolaka	Desa Waimangura Kelompok Tani Helu Wungango Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.148/SPT/PSP/DPKP/53.18/VIII/2024	26/08/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewwa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.150/SPT/PSP/DPKP/53.18/VIII/2024	28/08/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.177/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	07/10/2024	Tambolaka	Desa Payola Umbu Kelompok Tani Wee Pdjelu Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.179/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	09/10/2024	Tambolaka	Desa Watu Kawula Kelompok Tani Bangun Kasih Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.181/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	11/10/2024	Tambolaka	Desa Rada Malando Kelompok Tani Berkat Usaha Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
		099.187/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	21/10/2024	Tambolaka	Desa Buru Kaghu Kelompok Tani Via Dolorosa Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.189/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	23/10/2024	Tambolaka	Desa Denduka Kelompok Tani Mori Mada Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.191/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	25/10/2024	Tambolaka	Desa Waimangura Kelompok Tani Maju Tak Gentar Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
99	NDA	61/SPT/DPKP/MP/SBD/IX/202	04/09/2024	Tambolaka	BPP Kec. Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		090.82/SPT/DPKP - BUN /53.18/X/ 2024	17/10/2024	Tambolaka	BPK Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.229/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	17/10/2024	Tambolaka	Desa Wee Kokora Kelompok Tani Mainda Ole Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.226/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	14/10/2024	Tambolaka	Desa Kadi Pada Kelompok Tani Suka Maju II Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		090.84/SPT/DPKP - BUN /53.18/X/ 2024	21/10/2024	Tambolaka	BPK Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		090.90/SPT/DPKP - BUN /53.18/X/ 2024	28/10/2024	Tambolaka	BPK Kecamatan Wewewa Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.237/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	29/10/2024	Tambolaka	Desa Wainyapu Kelompok Tani Milla Ate Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.238/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	30/10/2024	Tambolaka	Desa Kalaki Kambe Kelompok Tani Woda Ole Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.239/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	31/10/2024	Tambolaka	Desa Wee Pangali Kelompok Tani Lede Ndua Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		090.100/SPT/DPKP - BUN /53.18/XI/ 2024	08/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara - Desa Magho Linyo Poktan Daha Dede	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.244/SPT/PSP/DPKP/53.18/XI/2024	07/11/2024	Tambolaka	Desa Kendu Wela Kelompok Tani Heka Lori Kecamatan Kodi utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		090.105/SPT/DPKP - BUN /53.18/XI/ 2024	15/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat - Desa Wali Ate - Poktan Suka Maju	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
100	LAK	090.97/SPT/DPKP - BUN /53.18/XI/ 2024	06/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi - Desa Watu Wona Poktan Tana Mete	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.243/SPT/PSP/DPKP/53.18/XI/2024	06/11/2024	Tambolaka	Desa Kalembu Weri Kelompok Tani Ole Awa Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		090.102/SPT/DPKP - BUN /53.18/XI/ 2024	11/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat - Desa Wali Ate Poktan Sama Ate	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.246/SPT/PSP/DPKP/53.18/XI/2024	11/11/2024	Tambolaka	Desa Moro Manduyo Kelompok Tani Lara daha Kecamatan Kodi utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		090.105/SPT/DPKP - BUN /53.18/XI/ 2024	15/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat - Desa Wali Ate - Poktan Suka Maju	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
		099.240/SPT/PSP/DPKP/53.18/XI/2024	01/11/2024	Tambolaka	Desa Denduka Kelompok Tani Muri Mada Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.241/SPT/PSP/DPKP/53.18/XI/2024	04/11/2024	Tambolaka	Desa Watu Wona Kelompok Tani Tana Mete Kecamatan Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.242/SPT/PSP/DPKP/53.18/XI/2024	05/11/2024	Tambolaka	Desa Kadu Eta Kelompok Tani Milla Ate Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.244/SPT/PSP/DPKP/53.18/XI/2024	07/11/2024	Tambolaka	Desa Kendu Wela Kelompok Tani Heka Lori Kecamatan Kodi utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1573.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	07/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.245/SPT/PSP/DPKP/53.18/XI/2024	08/11/2024	Tambolaka	Desa Nangga Mutu Kelompok Tani Usaha Mandiri Kecamatan Kodi utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.247/SPT/PSP/DPKP/53.18/XI/2024	12/11/2024	Tambolaka	Desa Delo Kelompok Tani Tara Nanga Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.248/SPT/PSP/DPKP/53.18/XI/2024	13/11/2024	Tambolaka	Desa Raba Ege Kelompok Tani Citra Harapan Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1678.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	19/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1121/SPT/DPKP/SBD/X/2024	01/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1163.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/X/2024	04 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		090.73/SPT/DPKP - BUN /53.18/X/ 2024	04/10/2024	Tambolaka	BPK Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.221/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	07/10/2024	Tambolaka	Desa Djela Manu Kelompok Tani Kasih Tani Kecamatan Wewewa Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.222/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	08/10/2024	Tambolaka	Desa Mata Pyawu Kelompok Tani Omba Kacura Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.223/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	09/10/2024	Tambolaka	Desa Loko Kalda Kelompok Tani Lara Moripa Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1219.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/X/2024	09/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.224/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	10/10/2024	Tambolaka	Desa Wailangira Kelompok Tani Helu Wungango Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.226/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	14/10/2024	Tambolaka	Desa Kadi Pada Kelompok Tani Suka Maju II Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.227/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	15/10/2024	Tambolaka	Desa Mareda Kalada Kelompok Tani Renne Ate Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
		1289.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/X/2024	15/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.228/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	16/10/2024	Tambolaka	Desa Tena Teke Kelompok Tani Ole Milla Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.229/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	17/10/2024	Tambolaka	Desa Wee Kokora Kelompok Tani Mainda Ole Kecamatan Wewewa	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1317.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/X/2024	17/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.230/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	18/10/2024	Tambolaka	Desa Hameli Ate Kelompok Tani Mbinya Mopir Kecamatan Kodi utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.231/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	21/10/2024	Tambolaka	Desa Payola Umbu Kelompok Tani Wee padjelu Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1359.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	21/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.232/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	22/10/2024	Tambolaka	Desa Wee Londa Kelompok Tani Ngindi Ate Kecamatan Kota	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.233/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	23/10/2024	Tambolaka	Desa Waimakaha Kelompok Tani Ghanggo Ate Kecamatan Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.234/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	24/10/2024	Tambolaka	Desa Karuni Kelompok Tani Wali Ate Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.235/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	25/10/2024	Tambolaka	Desa Weerena Kelompok Tani Hidup Bersama Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1419.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	25/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.236/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	28/10/2024	Tambolaka	Desa Waimangura Kelompok Tani Maju Tak Gentar Kecamatan Wewewa barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.237/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	29/10/2024	Tambolaka	Desa Wainyapu Kelompok Tani Milla Ate Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1461.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	29/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.238/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	30/10/2024	Tambolaka	Desa Kalaki Kambe Kelompok Tani Woda Ole Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
101	RDL	090.51/SPT/DPKP - BUN/53.18/IX/ 2024	09/09/2024	Tambolaka	BPK Kecamatan kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		090.67/SPT/DPKP - BUN/53.18/IX/ 2024	27/09/2024	Tambolaka	BPK Kecamatan Kodi Bangedo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		090.70/SPT/DPKP - BUN/53.18/IX/ 2024	30/09/2024	Tambolaka	BPK Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		090.81/SPT/DPKP - BUN/53.18/X/ 2024	15/10/2024	Tambolaka	BPK Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
		090.82/SPT/DPKP - BUN /53.18/X/ 2024	17/10/2024	Tambolaka	BPK Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		090.92/SPT/DPKP - BUN /53.18/X/ 2024	29/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara - Desa Homba Onggol - Poktan Jama Pundo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.177/SPT/PSP/DPKP/53.18 /X/2024	07/10/2024	Tambolaka	Desa Payola Umbu Kelompok Tani Wee Pdjelu Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
102	MSA	090.60/SPT/DPKP - BUN /53.18/IX/ 2024	18/09/2024	Tambolaka	BPK Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		090.80/SPT/DPKP - BUN /53.18/X/ 2024	15/10/2024	Tambolaka	BPK Kecamatan Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		090.85/SPT/DPKP - BUN /53.18/X/ 2024+F3142:K3142	21/10/2024	Tambolaka	BPK Kecamatan Kodi Bangedo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		090.88/SPT/DPKP - BUN /53.18/X/ 2024	25/10/2024	Tambolaka	BPK Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		090.99/SPT/DPKP - BUN /53.18/XI/ 2024	08/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat - Desa Pero - Poktan Dua Awa	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.226/SPT/PSP/DPKP/53.18 /X/2024	14/10/2024	Tambolaka	Desa Kadi Pada Kelompok Tani Suka Maju II Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.263/SPT/PSP/DPKP/53.18 /XII/2024	05/12/2024	Tambolaka	Desa Milla Ate Kelompok Tani Dari Tana Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1233/SPT/BKP/DPKP/SBD/X/2 024	14/10/2024	Tambolaka	KT. Karya Sabar, Desa Mali Mada, Kec. Wewewa Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1261/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X /2024	17/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1275/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X /2024	18/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		68/SPT/DPKP/MP/SBD/IX/202 4	10/09/2024	Tambolaka	BPP Kec. Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1485/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/ 2024	07/11/2024	Tambolaka	KT. Tagu Renge, Desa Kalembu Weri, Kec. Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
103	ESW	965/SPT/DPKP/SBD/IX/2024	13/09/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		65/SPT/DPKP/MP/SBD/IX/202 4	04/09/2024	Tambolaka	BPP Kec. Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		71/SPT/DPKP/MP/SBD/IX/202 4	06/09/2024	Tambolaka	BPP Kec. Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1198/SPT/BKP/DPKP/SBD/X/2 024	09/10/2024	Tambolaka	KT. Marga Bani, Desa Rama Dana, Kec. Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1268/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X /2024	17/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		222/SPT/PSP/ DPKP/SBD/XI/2024	08/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur Desa Tema Tana	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1478/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/ 2024	06/11/2024	Tambolaka	KT. PUU Peddi, Desa Omba Rade, Kec. Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		54/SPT/DPKP/MP/SBD/VIII/20 24	08/08/2024	Tambolaka	Kec. Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
		57/SPT/DPKP/MP/SBD/VIII/2024	13/08/2024	Tambolaka	Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		63/SPT/DPKP/MP/SBD/VIII/2024	22/08/2024	Tambolaka	Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		55a/SPT/DPKP/MP/SBD/VIII/2024	25/08/2024	Tambolaka	Desa Wee Londa Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
104	AIW	902/SPT/DPKP/SBD/IX/2024	09/09/2024	Tambolaka	Kelompok Tani Osa Awa, Desa Tema Tana, Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		179/SPT/PSP/DPKP/SBD/X/2024	09/10/2024	Tambolaka	BPP Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1205/SPT/BKP/DPKP/SBD/X/2024	10/10/2024	Tambolaka	KT. Osa Awa, Desa Tema Tana, Kec. Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1240/SPT/BKP/DPKP/SBD/X/2024	14/10/2024	Tambolaka	KT. Obor Isidorus, Desa Umbu Ngedo, Kec. Kodi Bangedo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1247/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	16/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1394/SPT/BKP/DPKP/SBD/X/2024	29/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1541/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	13/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
105	YLM	1/SPT/BKP/DPKP/SBD/I/2024	19/01/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		363/SPT/BKP/DPKP/SBD/V/2024	20/05/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		377/SPT/BKP/DPKP/SBD/V/2024	21/05/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
106	YMK	099.136/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	11/10/2024	Tambolaka	kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
107	YMM	099.07/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	01/02/2024	Tambolaka	Desa Mareda Kalada	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.06/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	01/02/2024	Tambolaka	Kelompok Tani Omba Kacura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.07/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	02/02/2024	Tambolaka	Kelompok Tani Renne Ate	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.26/SPT/PSP/DPKP/53.18/III/2024	06/03/2024	Tambolaka	Desa Nangga Mutu	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.35/SPT/PSP/DPKP/53.18/III/2024	20/03/2024	Tambolaka	Desa Wee Londa	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.40/SPT/PSP/DPKP/53.18/III/2024	27/03/2024	Tambolaka	Desa Wailangira	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.43/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	02/04/2024	Tambolaka	Desa Wainyapu	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.44/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	03/04/2024	Tambolaka	Desa Ana Engge	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.45/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	04/04/2024	Tambolaka	Desa Moro Manduyo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
		099.47/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	08/04/2024	Tambolaka	Desa Buru Kaghu	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.49/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	12/04/2024	Tambolaka	Desa Bondo Boghila	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.48/SPT TPH/DPKP/53.18/IV/2024	15/04/2024	Tambolaka	Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.50/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	15/04/2024	Tambolaka	Desa Hameli Ate	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.51/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	16/04/2024	Tambolaka	Desa Wee Londo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.53/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	18/04/2024	Tambolaka	Desa Ana Engge	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.55/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	22/04/2024	Tambolaka	Desa Milla Ate	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.06/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	22/04/2024	Tambolaka	Desa Mata Pyawu	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.60/SPT/PSP/DPKP/53.18/V/2024	08/05/2024	Tambolaka	Desa Mareda Kalada Kelompok Tani Renne Ate Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.68/SPT/PSP/DPKP/53.18/V/2024	22/05/2024	Tambolaka	Desa Bondo Boghila Kelompok Tani Kepiting Merah Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.69/SPT/PSP/DPKP/53.18/V/2024	23/05/2024	Tambolaka	Desa Kabali Dana Kelompok Tani Tunas Baru Kecamatan Wwewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.75/SPT TPH/DPKP/53.18/VII/2024	12/06/2024	Tambolaka	Ds. Loko Kalada Kec. Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.78/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	05/06/2024	Tambolaka	Desa Hameli Ate Kelompok Tani Lende Mopir Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.80/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	07/06/2024	Tambolaka	Desa Moro Manduyo Kelompok Tani Ngandi Kehe Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.81/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	10/06/2024	Tambolaka	Desa Laga Lete Kelompok Tani Moto Kaha Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.82/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	11/06/2024	Tambolaka	Desa Milla Ate Kelompok Tani Dari Tana Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.83/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	12/06/2024	Tambolaka	Desa Buru Kaghu Kelompok Tani Via Dolorosa Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.124/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	13/06/2024	Tambolaka	Poktan Rita Desa Rita Baru Kecamatan W. Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.125/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	14/06/2024	Tambolaka	Poktan Harapan Kita Desa Kadi Wone Kecamatan W. Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.126/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	18/06/2024	Tambolaka	Poktan Harapan Desa Umbu Wango Kecamatan W. Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
		099.127/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	19/06/2024	Tambolaka	Poktan Rangga Ninno Desa Bondo Boghila Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.128/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	20/06/2024	Tambolaka	Poktan Maria Podi Desa Mareda Kalada Wango Kecamatan W. Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.92/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	26/06/2024	Tambolaka	Desa Kadi Pada Kelompok Tani Suka Maju 2 Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.129/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	21/06/2024	Tambolaka	Poktan Bunga Mawar Podi Desa Wekokor Kalada Wango Kecamatan W. Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.130/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	24/06/2024	Tambolaka	Poktan Harapan Kita Desa Kadi Wone Kecamatan W. Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.131/SPT/PSP/DPKP/53.18/VI/2024	25/06/2024	Tambolaka	Poktan Liku Moripa K Desa Karuni Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.95/SPT/PSP/DPKP/53.18/VII/2024	01/07/2024	Tambolaka	Desa Kendu Wela Kelompok Tani Heka Lori Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.100/SPT/PSP/DPKP/53.18/VII/2024	08/07/2024	Tambolaka	Desa Watu Kawula Kelompok Tani Maida Ole Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.102/SPT/PSP/DPKP/53.18/VII/2024	11/07/2024	Tambolaka	Desa Mareda Kalada Kelompok Tani Renne Ate Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.136/SPT/PSP/DPKP/53.18/VIII/2024	06/08/2024	Tambolaka	Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.163/SPT/PSP/DPKP/53.18/IX/2024	13/09/2024	Tambolaka	Desa Watu Wona	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.165/SPT/PSP/DPKP/53.18/IX/2024	18/09/2024	Tambolaka	Desa Nangga Mutu	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.167/SPT/PSP/DPKP/53.18/IX/2024	20/09/2024	Tambolaka	Desa Raba Ege	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.169/SPT/PSP/DPKP/53.18/IX/2024	24/09/2024	Tambolaka	Desa Loko Kalada	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.170/SPT/PSP/DPKP/53.18/IX/2024	25/09/2024	Tambolaka	Desa Wee rame	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.173/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	30/09/2024	Tambolaka	Desa Milla Ate	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.181/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	11/10/2024	Tambolaka	Desa Rada Malando Kelompok Tani Berkat Usaha Kecamatan Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.189/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	23/10/2024	Tambolaka	Desa Denduka Kelompok Tani Mori Mada Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.174/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	01/10/2024	Tambolaka	Desa Eka Pata	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		179/SPT/PSP/DPKP/SBD/X/2024	09/10/2024	Tambolaka	BPP Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
		1352/SPPS/BKP/DPKP/X/2024	25 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
108	SDS	1212.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	09 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1566.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	07/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1587.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	08/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1643.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	14/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Bangedo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1657.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	15/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1671.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	18/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1685.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	19/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
109	SKS	179/SPT/PSP/DPKP/SBD/X/2024	09/10/2024	Tambolaka	BPP Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1573.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	07/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1580.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	08/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1636.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	14/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1650.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	15/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1664.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	18/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1678.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	19/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1691.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	20/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
110	SUK	1042/SPT/DPKP/SBD/IX/2024	23/09/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.183/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	15/10/2024	Tambolaka	Desa Kendu Wela Kelompok Tani Heka Lori Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.192/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	28/10/2024	Tambolaka	Desa Kalaki Kambe Kelompok Tani Woda Ole Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		189/SPT/PSP/DPKP/SBD/X/2024	17/10/2024	Tambolaka	BPP Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1268/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	17/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1415/SPT/BKP/DPKP/SBD/X/2024	31/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
		1548/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	13/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
111	SMM	1198/SPT/BKP/DPKP/SBD/X/2024	09/10/2024	Tambolaka	KT. Marga Bani, Desa Rama Dana, Kec. Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
112	PNB	099.182/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	14/10/2024	Tambolaka	Desa Moro Manduyo Kelompok Tani Ngandi Kehe Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.192/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	28/10/2024	Tambolaka	Desa Kalaki Kambe Kelompok Tani Woda Ole Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.195/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	31/10/2024	Tambolaka	Desa Djela Manu Kelompok Tani Kasih Tani Kecamatan Wewewa Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1093/SPT/DPKP/SBD/IX/2024	27/09/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
113	MSR	099.79/SPT TPH/DPKP/53.18/VII/2024	15/07/2024	Tambolaka	Kec. Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.82/SPT TPH/DPKP/53.18/VII/2024	15/07/2024	Tambolaka	Kec. Kodi Bangedo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.133/SPT TPH/DPKP/53.18/X/2024	14/10/2024	Tambolaka	Kec. Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
114	LWP	178/SPT/PSP/ DPKP/SBD/X/2024	09/10/2024	Tambolaka	BPP Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1580.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	08/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1636.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	14/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1650.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	15/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.251/SPT/PSP/DPKP/53.18/XI/2024	18/11/2024	Tambolaka	Desa Lolo Ole Kelompok Tani Ate Kaka Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.252/SPT/PSP/DPKP/53.18/XI/2024	19/11/2024	Tambolaka	Desa Rada Malando Kelompok Tani Berkat Usaha Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.253/SPT/PSP/DPKP/53.18/XI/2024	20/11/2024	Tambolaka	Desa Wee Rame Kelompok Tani Wanno Dore Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
115	KBS	099.221/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	07/10/2024	Tambolaka	Desa Djela Manu Kelompok Tani Kasih Tani Kecamatan Wewewa Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.222/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	08/10/2024	Tambolaka	Desa Mata Pyawu Kelompok Tani Omba Kacura Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.223/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	09/10/2024	Tambolaka	Desa Loko Kalda Kelompok Tani Lara Moripa Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
		178/SPT/PSP/ DPKP/SBD/X/2024	09/10/2024	Tambolaka	BPP Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1142/SPT/DPKP/SBD/X/2024	03/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1156/SPT/DPKP/SBD/X/2024	04/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1233.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/X /2024	10/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1275.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/X /2024	14/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1289.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/X /2024	15/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1247/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X /2024	16/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1303.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/X /2024	16/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1317.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/X /2024	17/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.231/SPT/PSP/DPKP/53.18 /X/2024	21/10/2024	Tambolaka	Desa Payola Umbu Kelompok Tani Wee padjelu Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1331.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/X /2024	18/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.233/SPT/PSP/DPKP/53.18 /X/2024	23/10/2024	Tambolaka	Desa Waimakaha Kelompok Tani Ghanggo Ate Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1373.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD /X/2024	22/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.235/SPT/PSP/DPKP/53.18 /X/2024	25/10/2024	Tambolaka	Desa Weerena Kelompok Tani Hidup Bersama Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1401.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD /X/2024	24/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Bangedo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1394/SPT/BKP/DPKP/SBD/X/2 024	29/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1447.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD /X/2024	28/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1461.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD /X/2024	29/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1475.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD /X/2024	30/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1503.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/X I/2024	01/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kota	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1531.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/X I/2024	04/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1545.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/X I/2024	05/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		222/SPT/PSP/ DPKP/SBD/XI/2024	08/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur Desa Tema Tana	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
		1506/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	08/11/2024	Tambolaka	KT. Usaha Baru, Desa Wee Paboba, Kec. Wewewa Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1559.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	06/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Bangedo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1573.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	07/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1573.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	07/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1580.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	08/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1541/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	13/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1594.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	11/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1608.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	12/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1622.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	13/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
116	KRB	1212.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	09/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1566.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	07/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1587.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	08/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1643.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	14/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Bangedo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1657.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	15/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1671.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	18/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1685.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	19/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1779/SPT/BKP/DPKP/SBD/XII/2024	05/12/2024	Tambolaka	Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
117	KLK	090.24/SPT/ DPKP - BUN/SBD/V/2024	23/05/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara - Desa Kalembu Ede - Poktan Benya Moripa	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.149/SPT/PSP/DPKP/53.18/VIII/2024	27/08/2024	Tambolaka	Desa Laga Lete	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		839/SPT/DPKP/SBD/IX/2024	02/09/2024	Tambolaka	Kelompok Tani Usaha Baru	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		909/SPT/DPKP/SBD/IX/2024	09/09/2024	Tambolaka	Kelompok Tani Usaha Baru, Desa Wee Paboba, Kecamatan Wewewa Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1028/SPT/DPKP/SBD/IX/2024	20/09/2024	Tambolaka	Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1170/SPT/DPKP/SBD/IX/2024	07/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
		1184/SPT/BKP/DPKP/SBD/X/2024	08/10/2024	Tambolaka	KT. Puu Pedi, Desa Omba Rade, Kec. Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1198/SPT/BKP/DPKP/SBD/X/2024	09/10/2024	Tambolaka	KT. Marga Bani, Desa Rama Dana, Kec. Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.181/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	11/10/2024	Tambolaka	Desa Rada Malando Kelompok Tani Berkat Usaha Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.182/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	14/10/2024	Tambolaka	Desa Moro Manduyo Kelompok Tani Ngandi Kehe Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1212/SPT/BKP/DPKP/SBD/X/2024	10/10/2024	Tambolaka	KT. Usaha Baru, Desa Wee Paboba, Kec. Wewewa utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.192/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	28/10/2024	Tambolaka	Desa Kalaki Kambe Kelompok Tani Woda Ole Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.193/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	29/10/2024	Tambolaka	Desa Kabali Dana Kelompok Tani Tunas Baru Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1303/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	22/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Bangedo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.197/SPT/PSP/DPKP/53.18/XI/2024	04/11/2024	Tambolaka	Desa Rada Malando Kelompok Berkat Usaha Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1478/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	06/11/2024	Tambolaka	KT. PUU Peddi, Desa Omba Rade, Kec. Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
118	FZB	099.06/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	01/02/2024	Tambolaka	Kecamatan W. Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.07/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	02/02/2024	Tambolaka	Kecamatan W. Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.08/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	03/02/2024	Tambolaka	Kecamatan W. Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.09/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	05/02/2024	Tambolaka	Kecamatan W. Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.10/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	06/02/2024	Tambolaka	Kecamatan W. Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.11/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	07/02/2024	Tambolaka	Kecamatan W. Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.12/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	12/02/2024	Tambolaka	Kecamatan W. Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
		099.13/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	13/02/2024	Tambolaka	Kecamatan W. Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.22/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	28/02/2024	Tambolaka	Milla Ate	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.14/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	15/02/2024	Tambolaka	Maida Ole	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.15/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	20/02/2024	Tambolaka	Maju Tak Gentar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.16/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	21/02/2024	Tambolaka	Ole Awa	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.17/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	22/02/2024	Tambolaka	Citra Harapan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.18/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	23/02/2024	Tambolaka	Lede Ndua	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.21/SPT/PSP/DPKP/53.18/II/2024	28/02/2024	Tambolaka	Lara Daha	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.106/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	03/04/2024	Tambolaka	Poktan Bunga Mawar Desa Wekokora Kecamatan W. Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.108/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	05/04/2024	Tambolaka	Poktan Rita Desa Rita Baru Kecamatan W. Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.110/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	09/04/2024	Tambolaka	Poktan Harapan Desa Umbu Wango Kecamatan W. Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.112/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	15/04/2024	Tambolaka	Poktan Maria Podi Desa Mareda Kalada Kecamatan W. Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.114/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	17/04/2024	Tambolaka	Poktan JD. Uma Kii Desa Pada Eweta Kecamatan W. Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.116/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	19/04/2024	Tambolaka	Poktan Heka Lori Desa Kendu Wela Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		123/SPT/PSP/DPKP/SBD/V/2024	10/05/2024	Tambolaka	Kec. W. Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.103/SPT/PSP/DPKP/53.18/VII/2024	11/07/2024	Tambolaka	Wunuta Mayailo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.149/SPT/PSP/DPKP/53.18/VIII/2024	27/08/2024	Tambolaka	Moto Kaha	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.150/SPT/PSP/DPKP/53.18/VIII/2024	28/08/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.165/SPT/PSP/DPKP/53.18/IX/2024	19/09/2024	Tambolaka	Usaha Mandiri	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.166/SPT/PSP/DPKP/53.18/IX/2024	20/09/2024	Tambolaka	Tara Nanga	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.133/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	08/10/2024	Tambolaka	kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.135/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	10/10/2024	Tambolaka	kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.137/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	16/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
		099.139/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	21/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.143/SPT/PSP/DPKP/53.18/X/2024	25/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.263/SPT/PSP/DPKP/53.18/XII/2024	05/12/2024	Tambolaka	Desa Milla Ate Kelompok Tani Dari Tana Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
119	DLS	19/SPT/PSP/DPKP/SBD/II/2024	15/02/2024	Tambolaka	BPP Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		124/SPT/PSP/DPKP/SBD/V/2024	10/05/2024	Tambolaka	Kec. Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1219.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/X/2024	09/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1573.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	07/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1580.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	08/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1636.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	14/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1650.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	15/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1664.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	18/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1678.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	19/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1691.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	20/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
120	DLL	1212.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	09/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1587.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	08/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1643.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	14/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Bangedo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1657.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	15/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1671.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	18/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1685.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	19/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
121	DTS	160a/SPPD/DPKP/MP/SBD/VIII/2024	11/08/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		094.755.a/SPPD/PSP//DPKP/53.18/VIII/2024	11/08/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
122	CBS	090.24/SPT/ DPKP - BUN/SBD/V/2024	23/05/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara - Desa Kalembu Ede - Poktan Benya Moripa	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
123	BAP	221/SPT/PSP/DPKP/SBD/XI/2024	8 Nopember 2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara Desa Wee Wella	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1212.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	09 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
		1566.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	07/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
124	AIL	1674/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	26/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Bangedo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		09/SPT/DPKP/SBD/III/2024	09/09/2024	Tambolaka	Kec. Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
125	FLS	1674/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	26/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Bangedo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
126	SAD	1268/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	17 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1415/SPT/BKP/DPKP/SBD/X/2024	31 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		860/SPT/DPKP/SBD/IX/2024	04/09/2024	Tambolaka	Kelompok Tani Karya Sabar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
127	AK	133/SPT/PSP/DPKP/SBD/VI/2024	03 Juni 2024	Tambolaka	Kec. Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1170/SPT/DPKP/SBD/IX/2024	07/10/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1128.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	02 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1184.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	07 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1198.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	08 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		177/SPT/PSP/DPKP/SBD/X/2024	09/10/2024	Tambolaka	BPP Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1212.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	09 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1226.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	10 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1268.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	14 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1282.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	15 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1296.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	16 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1310.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	17 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1324.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	18 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Bangedo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1352.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	21 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1366.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	22 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1380.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	23 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1394.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	24 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
		1412.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	25 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1440.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	28 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1454.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	29 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1468.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	30 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1524.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	04/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1538.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	05/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1552.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	06/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1566.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	07/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1601.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	11/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1566.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	07/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1587.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	08/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1615.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	12/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1629.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	13/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
128	DDL	090.29/SPT/ DPKP - BUN/SBD/VI/2024	11/06/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara - Desa Homba Onggol - Poktan Jama Runda	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		090.53/SPT/DPKP - BUN /53.18/IX/ 2024	11/09/2024	Tambolaka	BPK Kecamatan Wewewa Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		867/SPT/DPKP/SBD/IX/2024	04/09/2024	Tambolaka	Kelompok Tani Obor Isi Dorus	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1198/SPT/BKP/DPKP/SBD/X/2024	09 Oktober 2024	Tambolaka	KT. Marga Bani, Desa Rama Dana, Kec. Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1387/SPPS/BKP/DPKP/X/2024	29 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1541/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	13/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		099.223/SPT/PSP/DPKP/53.18/IV/2024	09 Desember 2024	Tambolaka	Poktan Kompak Sejahtera Desa Pada Eweta Kec. Wewewa Timur.	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
129	YJD	1072/SPT/DPKP/SBD/IX/2024	25/09/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		183/SPT/PSP/ DPKP/SBD/X/2024	14/10/2024	Tambolaka	BPP Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1191.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/X/2024	07 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
		1205.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/X/2024	08 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1219.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/X/2024	09 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1233.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/X/2024	10 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1275.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/X/2024	14 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1289.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/X/2024	15 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1303.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/X/2024	16 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1317.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/X/2024	17 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1331.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/X/2024	18 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1359.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	21 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Loura	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1373.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	22 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1387.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	23 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1401.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	24 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Bangedo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1419.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	25 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1447.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	28 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1461.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	29 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Tengah	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1475.a/SPPD/BKP/DPKP/SBD/X/2024	30 Oktober 2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Selatan	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1503.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	01/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kota	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1531.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	04/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1545.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	05/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1559.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	06/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Bangedo	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1573.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	07/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1594.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	11/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Barat	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1608.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	12/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Utara	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1622.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	13/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Wewewa Timur	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00

Rincian Pelaksana Perjalanan Dinas Mempertanggungjawabkan Biaya Perjalanan Dinas Rangkap

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominam Uang Harian/Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya (Rp)	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11	12 (9-10)	14	15	16 (13-14)
		1573.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	07/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi Balaghar	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		1580.a/SPT/BKP/DPKP/SBD/XI/2024	08/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kota Tambolaka	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
		090.101/SPT/DPKP - BUN /53.18/XI/ 2024	11/11/2024	Tambolaka	Kecamatan Kodi - Desa Wura Homba - Poktan Houtu Home	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
130	HNM	168a/SPT/DPKP/SBD/V/2024	07 Mei 2024	Tambolaka	Kantor BPS Kab.Sumba Barat Daya	1	170.000,00	-	Ganda	-	170.000,00	-		170.000,00
										Jumlah	**128.810.000,00**	**1.360.000,00**		**127.450.000,00**

Lampiran 19

Rincian Pembayaran Komponen Biaya Perjalanan Dinas (Uang Harian/Biaya Transport) Melebihi Standar Biaya Umum

No	Nama	ST		Asal	Tujuan	Lama Hari	Perhitungan Uang Harian/Transport					Sudah di Setor (Rp)	Tanggal Setor	Sisa yang Belum di Setor (Rp)
		Nomor	Tanggal				Nominal Uang Harian/ Transport Yang Dibayarkan (Rp)	Uang Harian Perhari/Uang Sekali Transport Lokal berdasarkan SBU Perbup (Rp)	Keterangan	Uang Harian/Transport Seharusnya	Selisih Lebih (Rp)			
1	2	3	04/01/1900	5	6	7	8	9	10	11=(7 x 9)	12=(8-11)	13	14	15= (12-13)
A	**DP3AP2KB**													
1	DOT	127	14-17 Mei 2024	Tambolaka	Jawa Tengah	4	472.000,00	75.000,00	Transport Lokal	300.000,00	172.000,00	172.000,00	08/05/2025	0,00
		73b	27 Juni 2024 s/d 30 Juni 2024	Tambolaka	Semarang	4	512.000,00	75.000,00	Transport Lokal	300.000,00	212.000,00	212.000,00	08/05/2025	0,00
2	MPM	261	27 Juni 2024 s/d 30 Juni 2024	Tambolaka	Jawa Tengah	4	512.000,00	75.000,00	Transport Lokal	300.000,00	212.000,00	212.000,00	08/05/2025	0,00
B	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**													
3	MAN	PK.422.1/18/SPT/SEKRETARIAT/LD/SBD/X/2024	04/10/2024	Tambolaka	Kabupaten Sumba Timur	3	1.000.000,00	250.000,00	UH	750.000,00	250.000,00	0,00		250.000,00
4	GGR	028/DMP.MLKI/K.2/XII/2024	07/12/2024	Tambolaka	Kupang	3	1.590.000,00	430.000,00	UH	1.290.000,00	300.000,00	0,00		300.000,00
		028/DMP.MLKI/K.2/XII/2024	07/12/2024	Tambolaka	Kupang	4	456.000,00	108.000,00	Transport Lokal	432.000,00	24.000,00	0,00		24.000,00
C	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**													
5	MSR	099.24/SPT/DPKP/SBD/II/2024	20/02/2024	Tambolaka	Kupang	3	1.720.000,00	430.000,00	UH	1.290.000,00	430.000,00	0,00		430.000,00
										Jumlah	**1.600.000,00**	**596.000,00**		**1.004.000,00**

Lampiran 20

Rincian Kurang Bayar Atas Realisasi Bantuan Partai Politik kepada Sepuluh Partai Politik Periode Tahun 2024 s.d. 2029

No	Nama Parpol	Nilai Bantuan Keuangan Parpol		Berdasarkan SK No 189/KEP/HK/2024 tanggal 6 Maret 2024		Berdasarkan SK No 524/KEP/HK/2024 tanggal 20 September 2024		Total Nilai yang diperoleh Partai Politik berdasarkan SK (Rp)	Selisih yang merupakan Kurang bayar pada Parpol (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Jumlah Suara	Nilai dalam SK (Rp)	Jumlah Suara	Nilai dalam SK (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(6+8)	10= (9-4)
1	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	67.386.099,00	67.386.099,00	8.798	41.608.674,67	11.130	26.318.740,00	67.927.414,67	541.315,67
2	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	69.679.561,00	69.679.561,00	11.144	52.703.690,67	7.408	17.517.450,67	70.221.141,34	541.580,34
3	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	73.444.110,00	73.444.110,00	11.002	52.032.125,33	9.284	21.953.565,33	73.985.690,66	541.580,66
4	Partai Beringin Karya (Berkarya)	32.821.573,00	32.821.573,00	6.940	32.821.573,00		-	32.821.573,00	0,00
5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	107.358.160,00	107.358.160,00	14.398	68.078.753,33	16.840	39.820.986,67	107.899.740,00	541.580,00
6	Partai Golongan Karya (Golkar)	103.986.145,00	103.986.145,00	13.540	64.035.173,33	17.124	40.492.552,00	104.527.725,33	541.580,33
7	Partai Amanat Nasional (PAN)	111.328.435,00	111.328.435,00	14.962	70.760.285,33	17.385	41.109.730,00	111.870.015,33	541.580,33
8	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	111.248.036,00	111.248.036,00	13.979	66.111.350,67	19.317	45.678.266,00	111.789.616,67	541.580,67
9	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	134.154.293,00	134.154.293,00	18.492	87.454.832,00	19.978	47.241.310,67	134.696.142,67	541.849,67
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	49.062.104,00	49.062.104,00	10.374	49.062.104,00		-	49.062.104,00	0,00
11	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	143.440.609,00	143.440.609,00	18.843	89.114.828,00	23.203	54.867.360,67	143.982.188,67	541.579,67
12	Partai Demokrat	68.873.931,00	68.873.931,00	9.853	46.821.121,33	9.555	22.594.390,00	69.415.511,33	541.580,33
	Jumlah	**1.072.783.056,00**	**1.072.783.056,00**		**720.604.511,66**		**357.594.352,01**	**1.078.198.863,67**	**5.415.807,67**

Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Pembangunan
Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
beserta Perabotannya SMP Negeri 8 Kodi Utara

NO	ITEM PEKERJAAN	Volume CCO	Volume Periksa	Selisih Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
a	b	c	d	e = c - d	f	g	h = e x g
1	**Pekerjaan Galian Tanah dan Urugan**					**Jumlah Total =**	**265.740,42**
-	Pekerjaan galian pondasi	48,82	48,06	0,76	M^3	51.975,00	39.501,00
-	Pekerjaan urugan pasir di bawah pondasi menerus	3,2	3,15	0,05	M^3	281.267,80	14.063,39
-	Pekerjaan urugan pasir di bawah lantai	7,11	7,07	0,04	M^3	281.267,80	11.250,71
-	Pekerjaan Urugan Tanah Bekas Galian	16,27	16,02	0,25	M^3	248.927,80	62.231,95
-	Pekerjaan urugan Sirtu peninggi lantai	88,54	88,01	0,53	M^3	261.685,60	138.693,37
2	**Pekerjaan Pasangan Pondasi dan Dinding**					**Jumlah Total =**	**1.834.996,92**
-	Pekerjaan *anstamping* batu karang pondasi menerus	9,61	9,46	0,15	M^3	445.414,99	66.812,25
-	Pasangan pondasi batu karang	49,55	48,75	0,8	M^3	989.419,26	791.535,41
-	Pasangan dinding batako 1 Pc : 5 Psr	19,68	19,3	0,38	M^2	1.324.866,84	503.449,40
-	Plesteran dinding batako + Kolom 1 Pc : 4 Psr	282,99	277,6	5,39	M^2	58.449,68	315.043,78
-	Acian dinding + Kolom	295,3	289,91	5,39	M^2	29.342,50	158.156,08
3	**Pekerjaan Struktur Beton**					**Jumlah Total =**	**1.791.076,06**
-	Pekerjaan *Sloof* 15/20						
	Beton K.225	2,19	2,16	0,03	M^3	1.450.432,19	43.512,97
	Besi Tulg. Pokok Ø 12	262,32	258,44	3,88	Kg	21.234,40	82.389,47
	Besi Tulg. Sengkang Ø 8	124,04	122,2	1,84	Kg	21.234,40	39.071,30
	Bekisting	14,69	14,47	0,22	M^2	149.138,00	32.810,36
-	Pekerjaan Kolom Struktur 15/15						
	Beton K.225	0,51	0,49	0,02	M^3	1.450.432,19	29.008,64
	Besi Tulg. Pokok Ø 12	83,47	80,55	2,92	Kg	21.234,40	62.004,45
	Besi Tulg. Sengkang Ø 8	33,2	32,03	1,17	Kg	21.234,40	24.844,25
	Bekisting	6,96	6,71	0,25	M^2	249.854,00	62.463,50
-	Pekerjaan Kolom Struktur 15/20						
	Beton K.225	1,37	1,34	0,03	M^3	1.450.432,19	43.512,97
	Besi Tulg. Pokok Ø 12	165,52	159,68	5,84	Kg	21.234,40	124.008,90
	Besi Tulg. Sengkang Ø 8	77,78	75	2,78	Kg	21.234,40	59.031,63
	Bekisting	8,05	7,75	0,3	M^2	249.854,00	74.956,20
-	Kolom Teras 20/20						
	Beton K.225	0,62	0,59	0,03	M^3	1.450.432,19	43.512,97
	Besi Tulg. Pokok Ø 12	115,44	109,63	5,81	Kg	21.234,40	123.371,86
	Besi Tulg. Sengkang Ø 8	31,37	29,8	1,57	Kg	21.234,40	33.338,01
	Bekisting	6,38	6,04	0,34	M^2	249.854,00	84.950,36
-	Pekerjaan Beton Plat Meja						
	Beton K.225	0,63	0,44	0,19	M^3	1.450.432,19	275.582,12
	Besi Tulg. Pokok Ø 10	58,68	57,9	0,78	Kg	21.234,40	16.562,83
	Bekisting	3,15	3,1	0,05	M^2	249.854,00	12.492,70
-	Pekerjaan *Ringbalk* Elv.4						
	Beton K.225	1,62	1,6	0,02	M^3	1.450.432,19	29.008,64
	Besi Tulg. Pokok Ø 12	196,07	192,84	3,23	Kg	21.234,40	68.587,11
	Besi Tulg. Sengkang Ø 8	91,51	89,98	1,53	Kg	21.234,40	32.488,63
	Bekisting	10,83	10,65	0,18	M^2	249.854,00	44.973,72
-	Pekerjaan Lantai Rabat Beton t= 7 cm						
	Beton *Site Mix* K.175	11,47	11,41	0,06	M^3	5.809.874,49	348.592,47

Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Pembangunan
Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
beserta Perabotannya SMP Negeri 8 Kodi Utara

NO	ITEM PEKERJAAN	Volume CCO	Volume Periksa	Selisih Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
a	b	c	d	e = c - d	f	g	h = e x g
4	**Pekerjaan Kayu ,Daun Pintu & Atap**					**Jumlah Total =**	**2.773.174,46**
-	Pek. Kuda - Kuda Kanal C 0.75 & Reng 0.45 Baja Ringan	231,27	228,55	2,72	M^2	195.668,00	532.216,96
-	Pek. Atap *Zincalum* 9 Gelombang 0.35 mm	234,17	231,43	2,74	M^2	75.825,00	207.760,50
-	Pek. Bubungan Atap *Zincalum* 0.30	17,39	17,22	0,17	M^1	63.795,00	10.845,15
-	Pek. *Wood Plank* Lebar 30 cm	61,22	60,36	0,86	M^1	46.249,50	39.774,57
-	Pek.Kusen Pintu, jendela dan boven dan Jelusi 6/12	0,67	0,63	0,04	M^3	5.943.712,50	237.748,50
-	Daun Jendela Panil Kaca	11,75	8,55	3,2	M^2	470.101,50	1.504.324,80
-	Daun Pintu Panil Kayu	4,77	4,5	0,27	M^2	512.600,00	138.402,00
-	Jendela, *Boven* , *Boven* Pintu, *Boven* Jendela Kaca Mati 5 mm	10,76	10,17	0,59	M^2	173.054,20	102.101,98
5	**Pekerjaan lantai Dan Plafon**					**Jumlah Total =**	**758.077,41**
-	Pek. Keramik 40 x 40 Polish	114,79	114,31	0,48	M^2	127.952,11	61.417,01
-	Pek. Keramik 40 x 40 Unpolish	30,06	29,7	0,36	M^2	127.952,11	46.062,76
-	Pekerjaan Rangka *Plafond Hollow* 4x4mm + *Plafond* Tripleks 6 mm	178,17	175,95	2,22	M^2	293.062,00	650.597,64
6	**Pekerjaan Instalasi Listrik**					**Jumlah Total =**	**392.690,00**
-	Instalasi Listrik dalam bangunan	12	11	1	Titik	162.690,00	162.690,00
-	Pek. Lampu SL 14 Watt (Luar Ruangan Kelas)	4	3	1	Bh	200.000,00	200.000,00
-	Pasang Stop Kontak ex National	6	5	1	Bh	30.000,00	30.000,00
7	**Pekerjaan Pengecetan**					**Jumlah Total =**	**98.027,19**
-	Pekerjaan Pengecetan Kusen dan *Kalsiplank* 8x300mm	49,22	49,1	0,12	M^2	67.023,00	8.042,76
-	Pengecatan dinding	295,3	289,91	5,39	M^2	16.694,70	89.984,43
8	**Pekerjaan Selasar Keliling Dan Saluran keliling**					**Jumlah Total =**	**210.469,61**
-	Pek. Galian Tanah Saluran	9,75	9,65	0,1	M^3	68.137,50	6.813,75
-	Pek. Urugan Pasir Bawah Saluran	1,63	1,6	0,03	M^3	268.755,00	8.062,65
-	Pek. Rabat Lantai Saluran 1 3 5	0,81	0,8	0,01	M^3	1.524.997,75	15.249,98
-	Pek. Dinding Saluran 1 4	4,5	4,43	0,07	M^2	1.773.070,00	124.114,90
-	Pek. Plesteran Dinding Saluran 1 4	37,5	36,95	0,55	M^2	65.048,60	35.776,73
-	Pek. Acian	37,5	36,98	0,52	M^2	39.330,00	20.451,60
Jumlah Total Kurang Volume (1 s.d. 8) =							**8.124.252,07**

Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas Baru DAU SG SD Negeri Weri Kadu

No	Item Pekerjaan	Volume CCO	Volume Periksa	Selisih Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
a	b	c	d	e = c - d	f	g	h = e x g
1	**Pekerjaan Kayu dan Kaca**					**Jumlah Total =**	**229.633,59**
-	Pek. Papan Ventilasi/Jelusi	0,4	0,35	0,05	M^3	4.592.671,88	229.633,59
2	**Pekerjaan Alat-alat Penggantung**					**Jumlah Total =**	**1.781.168,21**
-	Pasang Kunci tanam pintu 2 x putar	4	3	1,00	Bh	451.530,71	451.530,71
-	Grendel Pintu	4	0	4,00	Bh	44.325,00	177.300,00
-	Grendel Jendela	40	30	10,00	Bh	44.325,00	443.250,00
-	Pas. Engsel Jendela	40	30	10,00	Psg	35.718,75	357.187,50
-	Pas. Kait Angin	40	30	10,00	Psg	35.190,00	351.900,00
Jumlah Total Kurang Volume (1 s.d. 2) =							**2.010.801,80**

Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas Baru
DAU SG SMP Negeri 2 Kota Tambolaka

No	Item Pekerjaan	Volume CCO	Volume Periksa	Selisih Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
a	b	c	d	e = c - d	f	g	h = e x g
1	**Pekerjaan Tanah dan Urugan**					**Jumlah Total =**	**170.339,13**
-	Urugan Sirtu Peninggian lantai	109,65	108,98	0,67	M^3	254.237,50	170.339,13
2	**Pekerjaan Pasangan dan Plesteran**					**Jumlah Total =**	**3.937.517,67**
-	Pasangan batu kosong/*Aanstamping*	12,96	12,18	0,78	M^3	306.751,50	239.266,17
-	Pasangan pondasi batu Karang 1Pc : 5 Psr	49,17	45,9	3,27	M^3	953.177,50	3.116.890,43
-	Plesteran tembok biasa 1 pc : 5 psr (Tbl : 15 mm)	402,13	396,28	5,85	M^2	65.536,46	383.388,29
-	Acian Tembok	402,13	396,27	5,86	M^2	33.783,75	197.972,78
3	**Pekerjaan Beton**					**Jumlah Total =**	**255.055,52**
-	Pek. *Sloof* 15/15 cm						
	Beton K.225	1,82	1,8	0,02	M^3	1.639.357,50	32.787,15
	Besi Tulg. Sengkang Ø 6	53,95	53,07	0,88	Kg	34.138,50	30.041,88
	Bekisting (2 x pakai)	12,15	12	0,15	M^2	158.301,00	23.745,15
-	Pek. Kolom Praktis 15/15 cm						
	Bekisting (2 x pakai)	1,36	1,12	0,24	M^2	281.220,50	67.492,92
-	Pek. *Ring balk* 15/15 Cm						
	Beton K.225	1,28	1,26	0,02	M^3	1.639.357,50	32.787,15
	Bekisting (2 x pakai)	15	14,82	0,18	M^2	287.820,50	51.807,69
-	Pek. Balok Gantung Teras 15/20 cm						
	Beton K.225	0,66	0,65	0,01	M^3	1.639.357,50	16.393,58
4	**Pekerjaan Kayu dan Kaca**					**Jumlah Total =**	**608.518,35**
-	Pek. Kusen Kayu Kls II (5/11)	0,88	0,85	0,03	M^3	7.027.350,00	210.820,50
-	Pek. Daun Pintu Panil Kayu Kls II	5,04	4,87	0,17	M^2	692.725,00	117.763,25
-	Pek. Jendela Panil Kaca Polos 5 mm	13,25	12,88	0,37	M^2	756.580,00	279.934,60
Jumlah Total Kurang Volume (1 s.d. 4) =							**4.971.430,67**

Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabotannya SMPN 8 Kodi Utara

NO	ITEM PEKERJAAN	Volume CCO	Volume Periksa	Selisih Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
a	b	c	d	e = c - d	f	g	h = e x g
1	**Pekerjaan Tanah dan Urugan**					**Jumlah Total =**	**76.425,80**
-	Urugan tanah bekas galian	21,26	21,21	0,05	M^3	25.300,00	1.265,00
-	Urugan pasir bawah pondasi	8,51	8,12	0,39	M^3	192.720,00	75.160,80
2	**Pekerjaan Pasangan dan Plesteran**					**Jumlah Total =**	**8.693.451,41**
-	Pasangan batu kosong/*Aanstamping*	34,02	32,47	1,55	M^3	386.050,50	598.378,28
-	Pasangan pondasi batu Karang 1Pc : 5 Psr	126,79	120,29	6,5	M^3	910.112,50	5.915.731,25
-	Pasangan tembok biasa 1 Pc : 5 Psr	51,6	50,61	0,99	M^3	1.336.703,50	1.323.336,47
-	Plesteran tembok biasa 1 pc : 5 psr (Tbl : 15 mm)	898,5	885,17	13,33	M^2	64.216,46	856.005,41
3	**Pekerjaan Beton**					**Jumlah Total =**	**11.028.487,85**
-	Pek. *Sloof* 15/20 cm						
	Beton K.225	5,67	4,94	0,73	M^3	1.362.088,75	994.324,79
	Besi Tulg. Pokok Ø 12	672,84	595,07	77,77	Kg	31.933,00	2.483.429,41
	Besi Tulg. Sengkang Ø 6	153,85	135,16	18,69	Kg	31.933,00	596.827,77
	Bekisting (2 x pakai)	37,8	32,94	4,86	M^2	167.167,00	812.431,62
-	Pek. Kolom Struktur 15/20 cm						
	Beton K.225	3,88	3,46	0,42	M^3	1.362.088,75	572.077,28
	Besi Tulg. Pokok Ø 12	459,95	411,09	48,86	Kg	31.933,00	1.560.246,38
	Besi Tulg. Sengkang Ø 6	103,79	94,63	9,16	Kg	31.933,00	292.506,28
	Bekisting (2 x pakai)	25,84	23,1	2,74	M^2	292.473,50	801.377,39
-	Pek. Kolom Teras 20/20 cm						
	Beton K.225	2,43	2,24	0,19	M^3	1.362.088,75	258.796,86
	Besi Tulg. Pokok Ø 12	227,84	198,92	28,92	Kg	31.933,00	923.502,36
	Besi Tulg. Sengkang Ø 6	57,72	54,11	3,61	Kg	31.933,00	115.278,13
	Bekisting (2 x pakai)	24,32	22,35	1,97	M^2	292.473,50	576.172,80
-	Pek. Kolom Praktis 15/15 cm						
	Beton K.225	0,86	0,84	0,02	M^3	1.362.088,75	27.241,78
	Besi Tulg. Pokok Ø 12	142,4	132,61	9,79	Kg	31.933,00	312.624,07
	Bekisting (2 x pakai)	7,6	7,45	0,15	M^2	292.473,50	43.871,03
-	Pek. Balok Gantung Teras 15/20 cm			0			
	Beton K.225	1,71	1,62	0,09	M^3	1.362.088,75	122.587,99
	Besi Tulg. Pokok Ø 12	202,92	196,16	6,76	Kg	31.933,00	215.867,08
	Besi Tulg. Sengkang Ø 6	46,15	43,83	2,32	Kg	31.933,00	74.084,56
	Bekisting (2 x pakai)	15,68	14,86	0,82	M^2	299.073,50	245.240,27
4	**Pekerjaan Kayu dan Kaca**					**Jumlah Total =**	**1.905.678,50**
-	Pek. Kusen Kayu Kls II (5/11)	2,21	1,96	0,25	M^3	7.442.600,00	1.860.650,00
-	Pek. Daun Pintu Panil Kayu Kls II	12,6	12,54	0,06	M^2	750.475,00	45.028,50
5	**Pekerjaan Instalasi Listrik**					**Jumlah Total =**	**1.379.900,00**
-	Pasang Instalasi Listrik	30	25	5	Titik	210.980,00	1.054.900,00
-	Pasang Saklar Ganda	10	5	5	Bh	65.000,00	325.000,00
Jumlah Total Kurang Volume (1 s.d. 5)=							**23.083.943,56**

Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas DAU SG SDN Wee Tabula 2

No	Item Pekerjaan	Volume CCO	Volume Periksa	Selisih Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
a	b	c	d	e = c -d	f	g	h = e x g
1	**Pekerjaan Beton**					**Jumlah Total =**	**3.935.525,52**
-	Pek. Kolom Teras 20/20 cm						
	Beton K.225	1,52	1,08	0,44	M^3	1.715.771,25	754.939,35
	Besi Tulg. Pokok Ø 12	135,28	94,72	40,56	Kg	35.770,75	1.450.861,62
	Besi Tulg. Sengkang Ø 6	36,08	25,30	10,78	Kg	35.770,75	385.608,69
	Bekisting (2 x pakai)	15,2	10,64	4,56	M^2	294.762,25	1.344.115,86
2	**Pekerjaan Kayu dan Kaca**					**Jumlah Total =**	**1.029.514,50**
-	Pek. Kusen Kayu Kls II (5/11)	1,41	1,27	0,14	M^3	7.353.675,00	1.029.514,50
Jumlah Total Kurang Volume (1 s.d. 2) =							**4.965.040,02**

Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal beserta Perabotannya SD Negeri Gokata

No	Item Pekerjaan	Volume CCO	Volume Periksa	Selisih Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
a	b	c	d	e = c -d	f	g	h = e x g
1	**Pekerjaan Beton**					**Jumlah Total =**	**502.803,71**
-	Pek. Kolom Teras 20/20 cm						
	Beton K.225	1,06	1,00	0,06	M^3	1.680.477,75	100.828,67
	Besi Tulg. Pokok Ø 12	99,68	94,28	5,40	Kg	35.409,65	191.212,11
	Besi Tulg. Sengkang Ø 6	25,25	24,24	1,01	Kg	35.409,65	35.763,75
	Bekisting (2 x pakai)	10,64	10,04	0,60	M^2	291.665,30	174.999,18
2	**Pekerjaan Kayu dan Kaca**					**Jumlah Total =**	**1.649.071,25**
-	Pek. Kusen Kayu Kls II (5/11)	0,76	0,64	0,12	M^3	7.311.930,00	877.431,60
-	Pek. Daun Pintu Panil Kayu Kls II	5,8	5,65	0,15	M^2	708.630,00	106.294,50
-	Pek. Jendela Panil Kaca Polos 5 mm	15,18	14,33	0,85	M^2	782.759,00	665.345,15
3	**Pekerjaan Alat-alat Penggantung**					**Jumlah Total =**	**84.237,50**
-	Pasang Engsel pintu	6	4,00	2,00	Psg	42.118,75	84.237,50
4	**Pekerjaan Instalasi Listrik**					**Jumlah Total =**	**645.426,00**
-	Pasang Instalasi Listrik	12	9,00	3,00	Titik	215.142,00	645.426,00
5	**Pekerjaan Cat dan Laburan**					**Jumlah Total =**	**2.653.995,62**
-	Meni Kayu	26,46	24,64	1,82	M^2	28.215,25	51.351,76
-	Cat kayu kosen	26,46	24,68	1,78	M^2	58.479,80	104.094,04
-	Cat Papan Panil Jendela	15,82	12,29	3,53	M^2	58.479,80	206.433,69
-	Cat Papan Panil pintu	11,59	11,29	0,30	M^2	58.479,80	17.543,94
-	Cat tembok	911,33	827,10	84,23	M^2	27.004,30	2.274.572,19
Jumlah Total Kurang Volume (1 s.d. 5) =							**5.535.534,08**

Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas
dengan Tingkat Kerusakan Minimal beserta Perabotannya
SMP Negeri 1 Kota Tambolaka

No	Item Pekerjaan	Volume CCO	Volume Periksa	Selisih Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
a	b	c	d	e = c - d	f	g	h = e x g
1	**Pekerjaan Pasangan, Pondasi dan Plesteran**					**Jumlah Total =**	**3.646.018,59**
-	Pekerjaan Beton Bertulang						
	- Beton *Ringbalk* 15/20	2,58	2,08	0,500	M^3	6.693.882,23	3.346.941,12
	- Beton Balok Gantung 15/20	0,90	0,85	0,050	M^3	5.981.549,47	299.077,47
2	**Pekerjaan Kayu, Kusen Pintu, Jendela dan Atap**					**Jumlah Total =**	**4.375.041,82**
-	Pek. Kusen pintu, jendela dan Lubang Angin	1,12	0,46	0,660	M^3	6.491.436,85	4.284.348,32
-	Pas. Daun Pintu Panil Kayu	5,40	5,27	0,130	M^2	697.642,27	90.693,50
3	**Pekerjaan *Meubelair***					**Jumlah Total =**	**2.363.040,78**
-	Kursi Siswa	67,00	61,00	6,000	Bh	393.840,13	2.363.040,78
Jumlah Total Kurang Volume (1 s.d. 3) =							**10.384.101,19**

Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi
Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal
beserta Perabotannya SMP Negeri 2 Kodi

No	Item Pekerjaan	Volume CCO	Volume Periksa	Selisih Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
a	b	c	d	e = c - d	f	g	h = e x g
A	**Gedung A**						
1	**Pekerjaan Pasangan, Pondasi dan Plesteran**					**Jumlah Total =**	**1.740.263,32**
-	Pek. Pasangan Pondasi batu karang Camp.1pc:4psr	48,77	48,67	0,10	M^3	1.208.194,54	120.819,45
-	Pekerjaan Beton Bertulang				M^3		
	- Beton *Sloof* 15/20	1,47	1,44	0,03	M^3	6.043.014,90	181.290,45
	- Beton Kolom Praktis 15/15	0,51	0,44	0,07	M^3	6.743.288,82	472.030,22
	- Beton Kolom Teras 20/20	1,82	1,75	0,07	M^3	5.431.934,58	380.235,42
	- Beton *Ringbalk* 15/20	3,96	3,90	0,06	M^3	6.743.288,82	404.597,33
	- Beton Balok Gantung 15/20	1,47	1,44	0,03	M^3	6.043.014,90	181.290,45
2	**Pekerjaan Lantai, Plafon dan Cat**					**Jumlah Total =**	**1.403.448,20**
-	Pek. Pas. Plafon PVC + Rangka *Hollow* 4x4/4x2	470,81	465,27	5,54	M^2	253.330,00	1.403.448,20
B	**Gedung B**						
3	**Pekerjaan Pasangan, Pondasi dan Plesteran**					**Jumlah Total =**	**6.497.721,40**
-	Pekerjaan Beton Bertulang						
	- Beton 15/20	2,46	1,60	0,86	M^3	6.743.288,82	5.799.228,39
	- Beton Balok Gantung 15/20	0,93	0,85	0,08	M^3	6.043.014,90	483.441,19
-	Pek. Plesteran Pondasi 1pc : 5 psr	40,00	37,35	2,65	M^2	58.995,55	156.338,21
-	Pek. Acian Pondasi	40,00	37,35	2,65	M^2	22.156,08	58.713,61
4	**Pekerjaan Kayu, Kusen Pintu, Jendela dan Atap**					**Jumlah Total =**	**317.487,24**
-	Pek. Kusen pintu, jendela dan Lubang Angin	1,14	1,09	0,05	M^3	6.349.744,82	317.487,24
5	**Pekerjaan Lantai, Plafon dan Cat**					**Jumlah Total =**	**3.418.318,19**
-	Pek. Lantai Keramik 30 x 30 cm	114,62	110,43	4,19	M^2	175.549,76	735.553,49
-	Pek. Pas. Plafon PVC + Rangka *Hollow* 4x4/4x2	290,17	279,58	10,59	M^2	253.330,00	2.682.764,70
C	**Gedung C**						
6	**Pekerjaan Galian dan Timbunan**					**Jumlah Total =**	**558.983,45**
-	Pek. Urugan Sirtu peninggi lantai	30,40	27,99	2,41	M^3	231.943,34	558.983,45
7	**Pekerjaan Pasangan, Pondasi dan Plesteran**					**Jumlah Total =**	**213.428,79**
-	Pek. Plesteran Dinding Tembok 1pc : 5 psr	49,20	47,60	1,60	M^2	58.995,55	94.392,88
-	Pek. Plesteran Pondasi 1pc : 5 psr	40,00	38,97	1,03	M^2	58.995,55	60.765,42
-	Pek. Acian	49,20	47,60	1,60	M^2	22.156,08	35.449,73
-	Pek. Acian Pondasi	40,00	38,97	1,03	M^2	22.156,08	22.820,76
8	**Pekerjaan Lantai Plafon dan Cat**					**Jumlah Total =**	**544.659,50**
-	Pek. Pas. Plafon PVC + Rangka *Hollow* 4x4/4x2	290,17	288,02	2,15	M^2	253.330,00	544.659,50
D	**Gedung D**						
9	**Pekerjaan Lantai, Plafon dan Cat**					**Jumlah Total =**	**472.167,52**
-	Pek. Lantai Keramik 30 x 30 cm	78,62	77,46	1,16	M^2	175.549,76	203.637,72
-	Pek. Pas. Plafon PVC + Rangka *Hollow* 4x4/4x2	111,12	110,06	1,06	M^2	253.330,00	268.529,80
Jumlah Total Kurang Volum (1 s.d. 9) =							**15.166.477,61**

Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal beserta Perabotannya
SMP Negeri 5 Wewewa Barat

No.	Item Pekerjaan	Volume CCO	Volume Periksa	Selisih Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
a	b	c	d	e = c - d	f	g	h = e x g
1	**Pekerjaan Pasangan Pondasi dan Plesteran**					**Jumlah Total =**	**892.325,55**
-	Pek. Beton Bertulang						
	Beton *Ring Balk* 15/20	3,21	3,12	0,09	M^3	6.103.086,60	549.277,79
	Beton Balok Gantung 15/20	1,2	1,19	0,01	M^3	6.103.086,60	61.030,87
-	Pek. Pasangan Tembok Batu Potong 1 pc 5 psr	2,78	2,71	0,07	M^2	1.429.997,48	100.099,82
-	Pek. Plesteran Dinding Tembok 1pc 5 psr	85,6	83,3	2,3	M^2	57.749,90	132.824,77
-	Pek. Acian	85,6	83,38	2,22	M^2	22.113,65	49.092,30
2	**Pekerjaan Lantai Plafon dan Cat**					**Jumlah Total =**	**3.348.142,49**
-	Pek. Lantai Keramik 30 x 30 cm	314,49	305,63	8,86	M^2	171.274,37	1.517.490,92
-	Pek. Pas. Plafon PVC + Rangka *Hollow* 2x4	380,49	373,32	7,17	M^2	255.321,00	1.830.651,57
Jumlah Total Kurang Volume (1 s.d. 2) =							**4.240.468,04**

Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Labkesda)

No	Item Pekerjaan	Volume CCO	Volume Periksa	Selisih Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
a	b	c	d	e = c - d	f	g	h = e x g
1	**Pekerjaan Lantai**					**Jumlah Total =**	**7.786.881,40**
-	Pekerjaan *Epoxy* Lantai tebal 1500 micron	138,91	135,49	3,42	M^2	376.684,00	1.288.259,28
-	Pekerjaan *Epoxy* Dinding + Meja Beton tebal 1500 micron	321,53	314,77	6,76	M^2	376.684,00	2.546.383,84
-	Kramik dinding Wc, Janitor, R. Wudhu T = 2 m dari Muka Lantai	251,19	239,31	11,88	M^2	332.679,99	3.952.238,28
2	**Pekerjaan Plafon**			-		**Jumlah Total =**	**1.925.966,87**
-	Pas.List Plafon PVC Bangunaan utama	1.071,10	1.010,28	60,82	M	31.666,67	1.925.966,87
3	**Pekerjaan Penerangan dan Stop Kontak**					**Jumlah Total =**	**18.336.373,00**
	Referensi Produk **Armature Lampu: P*hillips, Artolite, Panasonic Ballast, Gear, Lamp & Accessories :Phillips, General Eclectric, Osram, Panasonic Outlet Socket power*, Fitting, saklar : *Clipsall, Panasonic*, MK, ABB**						
-	Lampu *Downlight* LED E27 15 Wat	214,00	188,00	26,00	unit	150.000,00	3.900.000,00
-	Saklar Ganda 16A	20,00	15,00	5,00	unit	64.911,00	324.555,00
-	*Exhaus Fan* 50 watt	59,00	55,00	4,00	unit	1.225.000,00	4.900.000,00
-	Stop Kontak *Single Outlet*	24,00	21,00	3,00	unit	41.811,00	125.433,00
-	Stop Kontak *Double Outlet*	32,00	23,00	9,00	unit	41.811,00	376.299,00
-	Instalasi kabel penerangan & power, NYM 3 x 2.5 mm didlm Konduit dia.19 mm	395,00	344,00	51,00	titik	170.786,00	8.710.086,00
Jumlah Total Kurang Volume (1 s.d. 3) =							**28.049.221,27**

Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan Kontruksi Pembangunan
Sentra UKM Kota Tambolaka Tahap II (DID)

No	Item Pekerjaan	Volume CCO	Volume Periksa	Selisih Volume	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Kerugian (Rp)
a	b	c	d	e = c - d	f	g	h = e x g
1	**Pekerjaan Pondasi dan Lantai Kerja**					**Jumlah Total =**	**3.208.532,80**
-	Pasangan batu 1:4	50,16	46,64	3,52	M^3	911.515,00	**3.208.532,80**
2	**Pekerjaan Struktur**					**Jumlah Total =**	**4.676.070,46**
-	Beton K 250 kolom struktur K1 dia.40cm						
	- Beton K250	10,7	7,64	3,06	M^3	1.528.127,60	**4.676.070,46**
3	**Pekerjaan Elektrikal**					**Jumlah Total =**	**2.215.664,00**
-	Instalasi lampu, NYY 3x2,5mm2 *in conduit* 20 mm.	28	26	2	titik	345.000,00	690.000,00
-	Lampu taman kapal *ball ice* dinding gantung	30	28	2	unit	450.000,00	900.000,00
-	Kabel *feeder* dari MDP Ke Panel Gedung Utama NYFGBY 4 x 6 mm	120	112,48	7,52	M^1	83.200,00	625.664,00
Jumlah Total Kurang Volume =							**10.100.267,26**

Lampiran 32

Daftar Rekening Sekolah Negeri yang Tidak Terdapat pada SK Bupati

No	No Rekening	Nama Rekening	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Keterangan
1	2508259xxx	70031226 SD NEGERI KEDDE KEHE	14.260,86	Telah ditambahkan pada SK Bupati
2	2508071xxx	70031223 SD NEGERI PARE KARABU	52.580,58	Telah ditambahkan pada SK Bupati
3	2504336xxx	69944612 TK KARARA TOMBO	180.049,67	Telah ditambahkan pada SK Bupati
4	2504336xxx	69989035 KB PERCONTOHAN TAMBOLAKA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	169.631,99	Telah ditambahkan pada SK Bupati
5	2504335xxx	69968871 KB NEGERI KASIH BUNDA	320.668,78	Telah ditambahkan pada SK Bupati
6	2504335xxx	69942900 TK NEGERI MIKKU ATE	328.219,65	Telah ditambahkan pada SK Bupati
7	2504335xxx	69942725 TK NEGERI PEMBINA ANDE ATE	250.183,43	Telah ditambahkan pada SK Bupati
8	2504335xxx	69943275 TK NEGERI PEMBINA W TIMUR	-	Telah ditambahkan pada SK Bupati
9	2504335xxx	69942765 TK NEGERI SION NDAPA TAKA	-	Telah ditambahkan pada SK Bupati
10	2504334xxx	69944751 TK SATAP POMA	289.921,91	Telah ditambahkan pada SK Bupati
11	2504334xxx	69944755 TK SATAP POTTO KATILLU	186.811,39	Telah ditambahkan pada SK Bupati
12	2504334xxx	69949038 TK WIKICO RONGO	95.409,28	Telah ditambahkan pada SK Bupati
13	2504079xxx	50309502 SD NEGERI WAILANGIRA	-	Telah ditambahkan pada SK Bupati
14	1013761xxx	BEND PENG SMPN 9 WE TIMUR	-	Telah ditutup
15	1013757xxx	BEND PENGEL SMPN 7 KODI UTARA	-	Telah ditutup
16	1013750xxx	DANA RUTIN SMP N 8 WEW TIMUR	-	Telah ditutup
17	1013747xxx	BEND PENGEL SMPN 7 WE TIMUR	-	Telah ditutup
18	1013740xxx	SMP NEGERI 1 KOTA TAMBOLAKA	-	Telah ditutup
19	1013736xxx	BEND PENG SMPN 4 LAURA SATAP L	-	Telah ditutup
20	1013736xxx	BEND PENG SMPN 6 KODI UTARA	-	Telah ditutup
21	1013730xxx	BEND PENG SMPN 1 KODI BALAGHAR	-	Telah ditutup
22	1013729xxx	DANA BOS SMPN 9 W TIMUR	-	Telah ditutup
23	1013685xxx	BEND PENGEL SMPN SATAP MORO MANDUYO	-	Telah ditutup
24	1013685xxx	BEND PENG SMP N 3 WE SELATAN	-	Telah ditutup
25	1013683xxx	BEND PENG SMPN SATAP OMBARADE	-	Telah ditutup
26	1013658xxx	BEND PENGEL SMPN SATAP MALULLA	-	Telah ditutup
27	1013658xxx	BEND PENG SMPN SATAP KADIMBIL	-	Telah ditutup
28	1013658xxx	BEND PENGEL SMPN SATAP GOKATA	-	Telah ditutup
29	1013658xxx	BEND PENGEL SMP SATAP KATEWEL	-	Telah ditutup
30	1013657xxx	BEND PENGEL SDSMPN SATAP GADIL	-	Telah ditutup
31	1013657xxx	BEND PENGEL SMP SATAP WAIKARYA	-	Telah ditutup
32	1013654xxx	BEND PENG SMPN SATAP WAI WAGHA	-	Telah ditutup
33	1013653xxx	BEND PENGEL SMPN SATAP WEE MAN	-	Telah ditutup
34	1013653xxx	BEND PENGEL SMPN 4 WEW BARAT	-	Telah ditutup
35	1013645xxx	BEND PENGEL SMPN SATAP LETE ENGGE	-	Telah ditutup
36	1013642xxx	BEND PENG SMPN SATAP BONGGOR	-	Telah ditutup
37	1013627xxx	BEND PENGEL SMP N 3 KODI UTARA	-	Telah ditutup
38	1013625xxx	BEND PENGEL SMPN 5 SATAP LOKO	-	Telah ditutup
39	1013616xxx	BEND PENGELUARAN SMPN 2 KODI	-	Telah ditutup
40	1013610xxx	BEND PENGEL SMPN I LOURA	-	Telah ditutup
41	1013601xxx	BEND PENGEL SMPN 1 KODI UTARA	-	Telah ditutup
42	1013601xxx	BEND PENGEL SMPN 1 KODI BANGED	-	Telah ditutup
43	1013594xxx	BEND PENGEL SMPN 2 KODI BANGED	-	Telah ditutup
44	1013586xxx	BEND PENGEL SMPN 1 WEWEWA TIMU	-	Telah ditutup
45	1013586xxx	BEND PENG SMPN 3 KODI BANGEDO	-	Telah ditutup
46	1013586xxx	BEND PENGEL SMPN 3 W TIMUR	-	Telah ditutup

Lampiran 32

Daftar Rekening Sekolah Negeri yang Tidak Terdapat pada SK Bupati

No	No Rekening	Nama Rekening	Saldo per 31 Desember 2024 (Rp)	Keterangan
47	1013564xxx	BEND PENG SMPN 5 WEWEWA TIMUR	-	Telah ditutup
48	1013561xxx	BEND PENGEL SMPN 1 KODI	-	Telah ditutup
49	1013559xxx	BEND PENGEL SMPN 6 WEWEW TIMUR	-	Telah ditutup
50	1013559xxx	BEND PENGEL SMPN 1 WEW SELATAN	-	Telah ditutup
51	1013559xxx	BEND PENGEL SMPN 2 WEW SELATAN	-	Telah ditutup
52	1013559xxx	BEND PENGEL SMPN 2 WEW TIMUR	-	Telah ditutup
53	1013559xxx	BEND PENGEL SMPN 4 WEWEWA TIMU	-	Telah ditutup
54	1013559xxx	BEND PENGEL SMPN 3 WEW BARAT	-	Telah ditutup
55	1013559xxx	BEND PENGEL SMPN 1 WEWEWA UTAR	-	Telah ditutup
56	1013559xxx	BEND PENGEL SMPN 1 WEWEWA BARA	-	Telah ditutup
57	1013559xxx	BEND PENGEL SMPN 2 WEW BARAT	-	Telah ditutup
58	1013559xxx	BEND PENGEL SMPN 2 KODI UTARA	-	Telah ditutup
59	1013521xxx	BEND PENGEL SMP SATAP PAKAMAND	-	Telah ditutup
60	1013520xxx	BEND PENGEL SMPN SATAP KEREPAMB	-	Telah ditutup
61	1013499xxx	BEND PENG SMPN SATAP WANO WARA	-	Telah ditutup
		Jumlah	**1.887.737,54**	

Rincian Pembayaran Honorarium kepada ASN di Sekolah Dasar

No	Nama Penerima	NIP	Status Kepegawaian	Asal Sekolah	Uraian Kegiatan	Jumlah Honor (Rp)	Nilai yang Sudah Disetor (Rp)	Nilai yang Belum Disetor (Rp)
1	EY	19803012 201xxxx	PNS	SDN Pogo Lede	Biaya Pengelolaan Dana BOS oleh Bendahara	332.500,00	0,00	0,00
2	DDB	197004121994xxxx	PNS	SDN Pogo Lede	Biaya Lembur TIM BOS (Kepala Sekolah)	190.000,00	0,00	0,00
3	EY	19803012 201xxxx	PNS	SDN Pogo Lede	Biaya Lembur TIM BOS (Bendahara)	190.000,00	0,00	0,00
4	DDB	197004121994xxxx	PNS	SDN Pogo Lede	Biaya penanggung Jawab Dana BOS	340.000,00	0,00	0,00
5	DDB	197004121994xxxx	PNS	SDN Pogo Lede	Biaya penanggung Jawab Dana BOS	340.000,00	0,00	0,00
6	EY	19803012 201xxxx	PNS	SDN Pogo Lede	Biaya Pengelolaan Dana BOS oleh Bendahara	332.500,00	0,00	0,00
7	DDB	197004121994xxxx	PNS	SDN Pogo Lede	Biaya Lembur TIM BOS (Kepala Sekolah)	190.000,00	0,00	0,00
8	EY	19803012 201xxxx	PNS	SDN Pogo Lede	Biaya Lembur TIM BOS (Bendahara)	190.000,00	0,00	0,00
9	SAN	198812152019xxxx	PNS	SDN Balla Moro	honor bendahara dana BOS	380.000,00	0,00	0,00
10	SAN	198812152019xxxx	PNS	SDN Balla Moro	honor bendahara dana BOS	380.000,00	0,00	0,00
11	MWD	198507072011xxxx	PNS	SDN Balla Moro	Honor penanggung jawab dana bos	376.000,00	0,00	0,00
12	MWD	198507072011xxxx	PNS	SDN Balla Moro	Honor penanggung jawab dana bos	376.000,00	0,00	0,00
13	KL	196712311987xxxx	PNS	SDN Poma	Input Pelaporan dana BOS (Kepala Sekolah)	3.000.000,00	0,00	0,00
14	YME	196712312000xxxx	PNS	SDN Poma	Input Pelaporan dana BOS (Bendahara)	3.000.000,00	0,00	0,00
15	ST	198904242019xxxx	PNS	SD Panenggo Ede I	biaya penyelesaian LPJ Dana Bos Bendahara	329.000,00	0,00	0,00
16	ST	198904242019xxxx	PNS	SD Panenggo Ede I	biaya penyelesaian LPJ Dana Bos Bendahara	329.000,00	0,00	0,00
17	PTW	196602102007xxxx	PNS	SD Panenggo Ede I	biaya penyelesaian LPJ Dana Bos kepala Sekolah	340.000,00	0,00	0,00
18	PTW	196602102007xxxx	PNS	SD Panenggo Ede I	biaya penyelesaian LPJ Dana Bos kepala Sekolah	340.000,00	0,00	0,00
19	KRP	196909041999xxxx	PNS	SDN Lorro Inda Bode	Biaya Penyusunan Laporan BOS (Kepala Sekolah)	400.000,00	0,00	0,00
20	MGL	199405302022xxxx	PNS	SDN Lorro Inda Bode	Biaya Penyusunan Laporan BOS (Bendahara BOS)	350.000,00	0,00	0,00
21	MGL	199405302022xxxx	PNS	SDN Lorro Inda Bode	Biaya Penyusunan Laporan BOS (Bendahara BOS)	350.000,00	0,00	0,00
22	KRP	196909041999xxxx	PNS	SDN Lorro Inda Bode	Biaya Penyusunan Laporan BOS (Kepala Sekolah)	400.000,00	0,00	0,00
23	MH	198901102019xxxx	PNS	SD Moro Manduyo	Honor Bendahara Dana Bos	329.000,00	0,00	0,00
24	MH	198901102019xxxx	PNS	SD Moro Manduyo	Honor Bendahara Dana Bos	329.000,00	0,00	0,00
25	FXR	197902042011xxxx	PNS	SD Moro Manduyo	Honor Kepala Sekolah	376.000,00	0,00	0,00
26	FXR	197902042011xxxx	PNS	SD Moro Manduyo	Honor Kepala Sekolah	376.000,00	0,00	0,00

Rincian Pembayaran Honorarium kepada ASN di Sekolah Dasar

No	Nama Penerima	NIP	Status Kepegawaian	Asal Sekolah	Uraian Kegiatan	Jumlah Honor (Rp)	Nilai yang Sudah Disetor (Rp)	Nilai yang Belum Disetor (Rp)
27	AN	198702272010xxxx	PNS	SDN Gollu Dara	Honor Bendahara sebagai pengelola Dana BOS	350.000,00	0,00	0,00
28	YB	198408262011xxxx	PNS	SDN Gollu Dara	Biaya Honor Kepala Sekolah sebagai Penanggung Jawab Dana BOS	400.000,00	0,00	0,00
29	YB	198408262011xxxx	PNS	SDN Gollu Dara	Biaya Honor Kepala Sekolah sebagai Penanggung Jawab Dana BOS	400.000,00	0,00	0,00
30	AN	198702272010xxxx	PNS	SDN Gollu Dara	Honor Bendahara sebagai pengelola Dana BOS	350.000,00	0,00	0,00
31	MGR	196412311987xxxx	PNS	SDN Wiciko Rongo	Honor Penanggung Jawab Dana BOS	400.000,00	0,00	0,00
32	MA	198610242011xxxx	PNS	SDN Wiciko Rongo	Honor Bendahara BOS	350.000,00	0,00	0,00
33	MA	198610242011xxxx	PNS	SDN Wiciko Rongo	Honor Bendahara BOS	350.000,00	0,00	0,00
34	MGR	196412311987xxxx	PNS	SDN Wiciko Rongo	Honor Penanggung Jawab Dana BOS	400.000,00	0,00	0,00
35	MMK	196503021997xxxx	PNS	SDN Karoso	Honor Pengelolah Dana BOS (Kepala Sekolah)	380.000,00	0,00	0,00
36	ADJ	198901031201xxxx	PNS	SDN Karoso	Honor Pengelolah Keuangan Dana BOS (Bendahara)	332.500,00	0,00	0,00
37	ADJ	198901031201xxxx	PNS	SDN Karoso	Honor Pengelolah Keuangan Dana BOS (Bendahara)	332.500,00	0,00	0,00
38	MMK	196503021997xxxx	PNS	SDN Karoso	Honor Pengelolah Dana BOS (Kepala Sekolah)	380.000,00	0,00	0,00
39	MK	197005212005xxxx	PNS	SDN Karara Tombo	Honorarium Penanggung jawab Dana BOS 1 orang x 2 Tahap	376.000,00	0,00	0,00
40	FC	199212032017xxxx	PNS	SDN Karara Tombo	Honorarium Bendahara Dana BOS 1 orang x 2 Tahap	329.000,00	0,00	0,00
41	MK	197005212005xxxx	PNS	SDN Karara Tombo	Honorarium Penanggung jawab Dana BOS 1 orang x 2 Tahap	376.000,00	0,00	0,00
42	FC	199212032017xxxx	PNS	SDN Karara Tombo	Honorarium Bendahara Dana BOS 1 orang x 2 Tahap	329.000,00	0,00	0,00
43	SM	198606092014xxxx	PNS	SDN Hameli	Honor Bendahara Sebagai Pengelola Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2021	350.000,00	0,00	0,00
44	DG	196704041991xxxx	PNS	SDN Hameli	HonorKepala Sebagai Pengelola Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2021	400.000,00	0,00	0,00
45	DG	196704041991xxxx	PNS	SDN Hameli	HonorKepala Sebagai Pengelola Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2021	400.000,00	0,00	0,00
46	SM	198606092014xxxx	PNS	SDN Hameli	Honor Bendahara Sebagai Pengelola Keuangan Dana BOS Tahun Anggaran 2021	350.000,00	0,00	0,00
47	DNW	198109062009xxxx	PNS	SDN Bonggor	Honor Pengelolah Dana BOS Kepala Sekolah	380.000,00	0,00	0,00
48	AUB	198708172017xxxx	PNS	SDN Bonggor	Honor Pengelolah Dana BOS Kepala Sekolah	332.500,00	0,00	0,00

Rincian Pembayaran Honorarium kepada ASN di Sekolah Dasar

No	Nama Penerima	NIP	Status Kepegawaian	Asal Sekolah	Uraian Kegiatan	Jumlah Honor (Rp)	Nilai yang Sudah Disetor (Rp)	Nilai yang Belum Disetor (Rp)
49	RK	197012312003xxxx	PNS	SDN Patuku	Jasa Penanggung Jawab Dalam Rangka Pelaporan Dana Bos	500.000,00	0,00	0,00
50	RK	197012312003xxxx	PNS	SDN Patuku	Jasa Penanggung Jawab Dalam Rangka Pelaporan Dana Bos	500.000,00	0,00	0,00
51	HL	196507292005xxxx	PNS	SDN Patuku	Jasa Bendahara Dalam Rangka Pelaporan Dana BOS	500.000,00	0,00	0,00
52	HL	196507292005xxxx	PNS	SDN Patuku	Jasa Bendahara Dalam Rangka Pelaporan Dana BOS	500.000,00	0,00	0,00
53	AHN	197605032008xxxx	PNS	SDN Kawango Hari	Honor Penanggungjawab Dana BOS	380.000,00	0,00	0,00
54	AD	199104062022xxxx	PPPK	SDN Kawango Hari	Honor Bendahara Dana BOS	332.500,00	0,00	0,00
55	AHN	197605032008xxxx	PNS	SDN Kawango Hari	Honor Penanggungjawab Dana BOS	400.000,00	0,00	0,00
56	AD	199104062022xxxx	PPPK	SDN Kawango Hari	Honor Bendahara Dana BOS	350.000,00	0,00	0,00
57	PW	197910182022xxxx	PPPK	SDN Waiboro	JASA BENDAHARA PENYUSUN LPJ BOS	350.000,00	0,00	0,00
58	PW	197910182022xxxx	PPPK	SDN Waiboro	JASA BENDAHARA PENYUSUN LPJ BOS	350.000,00	0,00	0,00
59	MMH	196612312005xxxx	PNS	SDN Waiboro	Jasa Kepala sekolah Penyusun LPJ dana BOS	400.000,00	0,00	0,00
60	MMH	196612312005xxxx	PNS	SDN Waiboro	Jasa Kepala sekolah Penyusun LPJ dana BOS	400.000,00	0,00	0,00
Total						**26.875.000,00**	**0,00**	**0,00**

Rincian Pembayaran Honorarium kepada ASN di Sekolah Menengah Pertama

No	Nama Penerima	NIP	Status Kepegawaian	Asal Sekolah	Uraian Kegiatan	Jumlah Honor (Rp)	Nilai yang Sudah Disetor (Rp)	Nilai yang Belum Disetor (Rp)
1	MW	198304102011xxxx	PNS	SMPN 2 Kodi Balaghar	Honor Penanggungjawab BOSP	2.000.000,00	0,00	0,00
2	YNT	198312252023xxxx	PPPK	SMPN 2 Kodi Balaghar	Honor Bendahara BOSP	1.500.000,00	0,00	0,00
3	ADB	197300419980xxxx	PNS	SMPN 3 Kota Tambolaka	lembur kepala sekolah dalam pelaporan LPJ BOSP	318.750,00	0,00	0,00
4	RIR	198406062014xxxx	PNS	SMPN 3 Kota Tambolaka	lembur bendahara dalam pelaporan LPJ BOSP	313.500,00	0,00	0,00
5	RIR	198406062014xxxx	PNS	SMPN 3 Kota Tambolaka	lembur bendahara dalam pelaporan LPJ BOSP	313.500,00	0,00	0,00
6	NMB	198611042017xxxx	PNS	SMPN 6 Kodi	Lembur Bendahara BOSP	240.000,00	0,00	0,00
7	NMB	198611042017xxxx	PNS	SMPN 6 Kodi	Lembur Bendahara BOSP	240.000,00	0,00	0,00
8	AT	197504152003xxxx	PNS	SMPN 6 Kodi	Lembur Kepala Sekolah	400.000,00	0,00	0,00
9	AT	197504152003xxxx	PNS	SMPN 6 Kodi	Lembur Kepala Sekolah	400.000,00	0,00	0,00
10	TBT	197401292006xxxx	PNS	SMPN 2 Wewewa Selatan	Belanja Lembur Kepala Sekolah	1.050.000,00	0,00	0,00
11	OM	198709262017xxxx	PNS	SMPN 2 Wewewa Selatan	Belanja Lembur Bendahara BOSP	1.050.000,00	0,00	0,00
12	TBT	197401292006xxxx	PNS	SMPN 2 Wewewa Selatan	Belanja Lembur Kepala Sekolah	1.050.000,00	0,00	0,00
13	OM	198709262017xxxx	PNS	SMPN 2 Wewewa Selatan	Belanja Lembur Bendahara BOSP	1.050.000,00	0,00	0,00
14	PHB	197602262011xxxx	PNS	SMPN 1 Kodi Bangedo	Biaya Lembur Kepala Sekolah; 1 Orang x 1 jam = 20.000 (5 Jam/Hari X 2 Kegiatan)	190.000,00	0,00	0,00
15	TTL	196908132008xxxx	PPPK	SMPN 1 Kodi Bangedo	Biaya Lembur Bendahara; 1orang x 1 jam = 15.000 (5 Jam/Hari X 2 Kegiatan)	142.500,00	0,00	0,00
16	PHB	197602262011xxxx	PNS	SMPN 1 Kodi Bangedo	Biaya Lembur Kepala Sekolah; 1 Orang x 1 jam = 20.000 (5 Jam/Hari X 2 Kegiatan)	190.000,00	0,00	0,00
17	TTL	196908132008xxxx	PPPK	SMPN 1 Kodi Bangedo	Biaya Lembur Bendahara; 1orang x 1 jam = 15.000 (5 Jam/Hari X 2 Kegiatan)	142.500,00	0,00	0,00
18	TTL	196908132008xxxx	PPPK	SMPN 1 Kodi Bangedo	Biaya Lembur Bendahara; 1orang x 1 jam = 15.000 (5 Jam/Hari X 2 Kegiatan)	142.500,00	0,00	0,00
19	PHB	197602262011xxxx	PNS	SMPN 1 Kodi Bangedo	Biaya Lembur Kepala Sekolah; 1 Orang x 1 jam = 20.000 (5 Jam/Hari X 2 Kegiatan)	190.000,00	0,00	0,00
20	RMP	198811062017xxxx	PNS	SMPN 1 Kodi Balaghar	Kegiatan Penyusunan Laporan (Bendahara)	2.256.000,00	0,00	0,00
21	RMP	198811062017xxxx	PNS	SMPN 1 Kodi Balaghar	Kegiatan Penyusunan Laporan (Bendahara)	2.256.000,00	0,00	0,00
22	RRI	197407282005xxxx	PNS	SMPN 1 Kodi Balaghar	Kegiatan Penyusunan Laporan (Kepala Sekolah)	2.820.000,00	0,00	0,00
23	RRI	197407282005xxxx	PNS	SMPN 1 Kodi Balaghar	Kegiatan Penyusunan Laporan (Kepala Sekolah)	2.820.000,00	0,00	0,00
24	FL	198707262022xxxx	PPPK	SMPN 3 Kodi Balaghar	Biaya Lelah Bendahara BOS Dalam Mengelola DABOS 8 Jam x 7 kali	800.000,00	0,00	0,00
25	FL	198707262022xxxx	PPPK	SMPN 3 Kodi Balaghar	Biaya Lelah Bendahara BOS Dalam Mengelola DABOS 8 Jam x 7 kali	600.000,00	0,00	0,00
26	ARN	198505152010xxxx	PNS	SMPN 3 Kodi Balaghar	Biaya Lelah Kepala Sekolah Dalam Mengelola DABOS 8 Jam x 7 kali	800.000,00	0,00	0,00
27	ARN	198505152010xxxx	PNS	SMPN 3 Kodi Balaghar	Biaya Lelah Kepala Sekolah Dalam Mengelola DABOS 8 Jam x 7 kali	600.000,00	0,00	0,00
28	SR	197209172005xxxx	PNS	SMPN 2 Wewewa Barat	Jasa Lembur Menyusun RKA (Kepala Sekolah)	620.400,00	0,00	0,00
29	YB	197801222008xxxx	PNS	SMPN 2 Wewewa Barat	Jasa Lembur Menyusun RKA (Bendahara)	620.400,00	0,00	0,00
Total						**25.116.050,00**	**0,00**	**0,00**

Rincian Aset Tetap yang Tidak Ada pada Rumah Jabatan Wakil Bupati

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)
1	Kursi Sofa Kulit	1	SET	1 SOFA PANJANG, 2 SOFA KECIL/PENDEK, 1 MEJA KACA	2020	20.240.000,00
2	Kursi Sofa Kayu	2	SET	2 SOFA PANJANG, 4 SOFA KECIL/PENDEK DAN 2 MEJA KACA	2014	35.000.000,00
3	Kursi Sofa Kayu Pendek	1	SET	2 KURSI SOFA PANJANG,1 KURSI SOFA PENDEK DAN 1 MEJA	2015	17.500.000,00
4	Lemari Pakaian Kamar Utama	1	BUAH	3 PINTU, JATI LOKAL	2020	6.325.000,00
5	Lemari Pakaiaan Kamar Tamu 1	1	BUAH	2 PINTU, JATI LOKAL	2020	4.000.000,00
6	Lemari Pakaiaan Kamar Tamu 2	1	BUAH	2 PINTU, JATI LOKAL	2020	4.000.000,00
7	Lemari Pakaian Kamar Belakang	1	BUAH	2 PINTU, JATI LOKAL	2020	4.000.000,00
8	Meja Rias Kamar Utama Wkdh	1	SET	MEJA DAN KURSI, JATI LOKAL	2020	3.000.000,00
9	Meja Rias Kamar Tamu 1	1	SET	MEJA DAN KURSI, JATI LOKAL	2020	3.000.000,00
10	Meja Rias Kamar Tamu 2	1	SET	MEJA DAN KURSI, JATI LOKAL	2020	3.000.000,00
11	Meja Makan Oval	1	SET	MEJA DAN KURSI, JATI LOKAL	2020	8.000.000,00
12	Meja Makan Panjang	1	SET	MEJA DAN KURSI, JATI LOKAL	2020	7.500.000,00
13	Dipan/Tempat Tidur Kamar Tamu 1	1	BUAH	JATI LOKAL	2020	6.350.000,00
14	Dipan/Tempat Tidur Kamar Tamu 2	1	BUAH	JATI LOKAL	2020	6.350.000,00
15	Dipan/Tempat Tidur Belakang	1	BUAH	JATI LOKAL	2020	5.000.000,00
16	Lemari Kaca Untuk Piring	2	BUAH	ALUMINIUM	2017	10.350.000,00
17	Dispenser Galon Bawa	2	BUAH	PANASONIC / PNC-3579	2020	8.600.000,00
18	Televisi 50 Inch	2	UNIT	LG	2020	30.000.000,00
19	Kulkas 2 Pintu	1	UNIT	SHARP	2020	12.500.000,00
20	Speaker Lopo Rujab	4	BUAH		2020	13.440.000,00
			JUMLAH			**208.155.000,00**

Lampiran 36

Rincian Kendaraan Bermotor Dikuasai oleh Pegawai yang Telah Pensiun dan Personel yang Bukan Peruntukannya.

No.	SKPD Penanggungjawab (dalam KIB)	Kode Barang	SPESIFIKASI BARANG		Asal Perolehan	Tahun	Kondisi	Jumlah		Keterangan Mutasi
			Nama Barang	Merk/Type				Barang	Harga (Rp)	
1	Sekretariat DPRD	1.3.2.02.001.001.003	Station Wagon	-	Hibah	2007	Baik	1	240.405.000,00	BPKB hilang, pemegang an DA
2	Setda Bagian Umum	1.3.2.02.001.001.003	Station Wagon	Toyota / Innova 2.0 G M/T VIN 2019	Pembelian	2019	Baik	1	334.000.000,00	dipegang oleh OD di Baperida
	Setda Bagian Administrasi Pembangunan	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	HONDA/MEGA PRO / GL 160 D	Hibah	2008	Baik	1	18.475.600,00	Dibawa oleh pemegang MMUN ke OPD lain
	Setda Bagian Hukum	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / NF 11132 D1 M/T	Pembelian	2012	Baik	1	13.609.200,00	Dibawa oleh AW di Kecamatan Wewewa Utara
		1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Mega Pro	Pembelian	2007	Rusak Berat	1	23.964.041,00	Pemegang YU di SKPD Damkar
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Yamaha / UEII	Pembelian	2015	Baik	1	16.400.000,00	Dibawa ke Dinas Perpustakaan
4	Dinas Kesehatan pada Puskesmas Watu Kawula	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	HONDA / GL 15A1D M/T	Pembelian	2011	Baik	1	22.467.857,14	dibawa pensiunan an SB
		1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	SUZUKI / FL 125 SCD	Pembelian	2012	Baik	1	15.750.000,00	Dibawa pensiunan an alm PR, Informasi terakhir Rusak Berat
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	HONDA GL / MEGA PRO	Pembelian	2007	Rusak Berat	1	23.964.041,00	Dibawa oleh pensiunan an AN (Dinas Koperasi,UKM,Perdagangan dan Perindustrian)
		1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	HONDA / REVO	Pembelian	2009	Rusak Berat	1	23.000.000,00	Dibawa oleh Tenaga Kontrak Dinas Perpustakaan an. YD. Informasi terakhir Rusak Berat dan STNK telah hilang

Lampiran 36

Rincian Kendaraan Bermotor Dikuasai oleh Pegawai yang Telah Pensiun dan Personel yang Bukan Peruntukannya.

No.	SKPD Penanggungjawab (dalam KIB)	Kode Barang	SPESIFIKASI BARANG		Asal Perolehan	Tahun	Kondisi	Jumlah		Keterangan Mutasi
			Nama Barang	Merk/Type				Barang	Harga (Rp)	
6	Inspektorat Daerah	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	HONDA / MEGA PRO	Hibah	2007	Rusak Berat	1	23.964.041,00	Dipegang oleh mantan Inspektur NT; (BPKB) tidak ditemukan
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	mega pro / GL 160 D	Hibah	2007	Rusak Berat	1	23.964.041,00	Dibawa ke Dinas Perhubungan
8	Kecamatan Kota Tambolaka pada Kelurahan Langga Lero	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / Mega Pro	Hibah	2011	Baik	1	23.645.917,00	Dibawa oleh pemengang ANP ke dinas lain
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.3.2.02.001.003.001	Truck + Attachment	Izusu / FHR71HD5.8	Hibah	2019	Baik	1	443.000.000,00	STNK hilang, Terakhir saat posisi masih di Dinas Pertanian
			Jumlah					**14**	**1.246.609.738,14**	

Lampiran 37

Rincian Aset Kendaraan Bermotor Tidak Diketahui Keberadaannya pada Kecamatan Wewewa Barat

No	Kode Barang	Spesifikasi Barang			Jumlah	Harga (Rp)
		Nama Barang	Merk/Type	No. Rangka dan Mesin		
1	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / 15A1 GL 160 D	FH/ADI/477408/IMH1KC3111AK0 28026KC31E-1027 774	1	24.937.540,00
2	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / GL15AIRR	FH/ADI/475140/IMH1KC3110AK 027594KC31E-1027 547	1	24.937.540,00
3	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / GL15AIRR	FH/ADI/475174/IMH1KC3117AK 027611KC31E-1027542	1	24.937.540,00
4	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / GL15AID M/T	FH/ADI/425564/JMH1KC2118BKO47345K C21E-1047329	1	23.645.917,00
5	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / GL 1SAID M/T	FH/ADI/425034/JMH1KC2111BKO47364K C21E-1047260	1	23.645.917,00
6	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Honda / New Mega Pro	MH1KC2113BK47365KC21E-1047265	1	23.645.917,00
7	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Yamaha / 45P(BYSON)	MH345P005FK29981845P 309903	1	23.000.000,00
8	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Yamaha / 45P(BYSN)	MH345P005FK29801045P 308038	1	23.000.000,00
9	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Yamaha / 45P(BYSON)	MH345P005FK30168445P 311641	1	23.000.000,00
	Jumlah				**9**	**214.750.371,00**

DAFTAR SINGKATAN

A

AC-WC	:	Asphalt Concrete -Wearing Course
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBD-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
ARKAS	:	Aplikasi Rencana Kegiatan Sekolah
ASN	:	Aparatur Sipil Negara

B

BA	:	Berita Acara
Bakesbangpol	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Banparpol	:	Bantuan Partai Politik
Bapperida	:	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Bapenda	:	Badan Pendapatan Daerah
BAPF	:	Berita Acara Pemeriksaan Fisik
BAPHPF	:	Berita Acara Perhitungan Hasil Pengujian Fisik
BAST	:	Berita Acara Serah Terima
BASTP	:	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
BKAD	:	Badan Keuangan dan Aset Daerah
BKPSDM	:	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BKU	:	Buku Kas Umum
BMD	:	Barang Milik Daerah
BMHP P2P	:	Bahan Medis Habis Pakai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
BMP	:	Bobot Manfaat Perusahaan
BOK	:	Bantuan Operasional Kesehatan
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BOSP	:	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BP	:	Bukan Pekerja
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BUD	:	Bendahara Umum Daerah

C

CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
CCO	:	*Contract Change Order*
CV	:	*Commanditaire Venootschap*

D

DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DPA	:	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPMD	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DPPA	:	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Dapodik	:	Daftar Pokok Pendidikan
Dekranasda	:	Dewan Kerajinan Nasional Daerah
DID	:	Dana Insentif Daerah
Disnakeswan	:	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Disdikbud	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dispar	:	Dinas Pariwisata
Disperindag	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Disperkim	:	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Dispora	:	Dinas Pemuda dan Olahraga
Ditjen Dukcapil	:	Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DJPB	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DP3AP2KB	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

F

FKTP	:	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

I

IPA	:	Ilmu Pengetahuan Alam

J

JIJ	:	Jalan Irigasi Jaringan
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional

K

Kabid	:	Kepala Bidang
KBM	:	Kegiatan Belajar Mengajar
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
Kemendikbudristek	:	Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
KIB	:	Kartu Inventaris Barang
KONI	:	Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

L

LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	:	Laporan Keuangan
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LPJ	:	Laporan Pertanggungjawaban
LPSE	:	Layanan Pengadaan Secara Elektronik

M

MC	:	*Mutual Check*

N

NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
NPHD	:	Naskah Perjanjian Hibah Daerah
NPSN	:	Nomor Pokok Sekolah Nasional
NTT	:	Nusa Tenggara Timur

O

OM SPAN	:	*Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

P

PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
Parpol	:	Partai Politik

PAT-SP	:	Penilaian Akhir Tahun- Satuan Pendidikan
PBI	:	Penerima Bantuan Iuran
PBPU	:	Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Perbup	:	Peraturan Bupati
Perda	:	Peraturan Daerah
Permendagri	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permenkes	:	Peraturan Menteri Kesehatan
Perpres	:	Peraturan Presiden
Pertina	:	Persatuan Tinju Amatir Indonesia
PFK	:	Perhitungan Fihak Ketiga
PHO	:	*Provisional Hand Over*
Pilkada	:	Pemilihan Kepala Daerah
Pj.	:	Penanggungjawab
PKs	:	Perjanjian Kerjasama
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPK-SKPD	:	Pejabat Penatausahaan Keuangan Saturan Kerja Perangkat Daerah
PSSI	:	Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat

R

RKA	:	Rencana Kerja dan Anggaran
RKUD	:	Rekening Umum Kas Daerah
Rp	:	Rupiah
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah

S

Satdikdas	:	Satuan Pendidikan Dasar
SBU	:	Standar Biaya Umum
SD	:	Sekolah Dasar
SDN	:	Sekolah Dasar Negeri
Setda	:	Sekretariat Daerah
Sidak	:	Inspeksi mendadak
SiLPA	:	Selisih Lebih Perhitungan Anggaran
SK	:	Surat Keputusan
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPDKB	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SMPN	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri
SP2	:	Surat Perintah Pemeriksaan
SPM	:	Surat Perintah Membayar
SPMK	:	Surat Perintah Mulai Kerja
SPP	:	Surat Permintaan Pembayaran
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SP2D LS	:	Surat Perintah Pencairan Dana Langsung
SPj	:	Surat Pertanggungjawaban
SSKK	:	Sayarat – Syarat Khusus Kontrak
SSPD	:	Surat Setoran Pajak Daerah
SSUK	:	Syarat – Syarat Umum Kontrak

STPD	:	Surat Tagihan Pajak Daerah
STS	:	Surat Tanda Setoran
T		
TA	:	Tahun Anggaran
TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TKDN	:	Tingkat Komponen Dalam Negeri
TPK	:	Tim Pelaksana Kegiatan
U		
UP	:	Uang Persediaan
UPTD	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU	:	Undang – Undang
V		
Verval	:	Verifikasi dan validasi
W		
WP	:	Wajib Pajak

RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK RI DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2024

Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara:		**VI**
Perwakilan	**:**	**BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksa-naan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
A	**Penyajian Laporan Keuangan**				
1	Kesalahan Penganggaran pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Enam SKPD	BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumba Barat Daya agar menginstruksikan TAPD membuat pedoman dalam menyusun dan melakukan verifikasi atas kesesuaian anggaran belanja dalam dokumen anggaran dengan jenis belanja dan substansi kegiatannya serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.	Bupati Sumba Barat Daya menginstruksikan TAPD membuat pedoman dalam menyusun dan melakukan verifikasi atas kesesuaian anggaran belanja dalam dokumen anggaran dengan jenis belanja dan substansi kegiatannya serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.	60 Hari	Pedoman atas penyusunan dan verifikasi kesesuaian anggaran belanja dalam dokumen anggaran dengan jenis belanja dan substansi kegiatannya.
B	Pendapatan				
1	Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumba Barat Daya agar: a. Membentuk tim pemeriksa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan	Bupati Sumba Barat Daya membentuk tim pemeriksa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan	60 Hari	SK Tim Pemeriksa Pajak

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksa-naan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
		b. Menginstruksikan Kepala Bapenda untuk memproses kekurangan penetapan pajak hotel Tahun 2024 atas satu wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atas kekurangan penerimaan pajak hotel senilai Rp53.450.333,80.	Bupati Sumba Barat Daya menginstruksikan Kepala Bapenda untuk memproses kekurangan penetapan pajak hotel Tahun 2024 atas satu wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atas kekurangan penerimaan pajak hotel senilai Rp53.450.333,80.	60 Hari	1. Surat Instruksi Bupati Sumba Barat Daya kepada Kepala Bapenda untuk melakukan penerbitan SKPDKB; 2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atas kekurangan penerimaan pajak hotel senilai Rp53.450.333,80 oleh Kepala Bapenda; dan 3. Surat Tanda Setoran (STS) atas kekurangan penerimaan pajak hotel senilai Rp53.450.333,80
C	**Belanja**				
1	Pelaksanaan Belanja Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas Lima Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Bangunan yang Diserahkan Kepada Sekolah Swasta Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumba Barat Daya agar menginstruksikan Kepala Disdikbud untuk memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada empat paket pekerjaan senilai Rp61.979.900,30 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.	Bupati Sumba Barat Daya menginstruksikan Kepala Disdikbud untuk memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada empat paket pekerjaan senilai Rp61.979.900,30 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.	60 Hari	1. Surat Instruksi Bupati Sumba Barat Daya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada empat paket pekerjaan senilai Rp61.979.900,30; dan 2. STS atas kekurangan volume pada lima paket pekerjaan senilai Rp61.979.900,30.

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksa-naan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
2	Pelaksanaan Belanja Jasa Honorarium, Jasa Konsultansi, Jasa Pelayanan Kesehatan dan Jasa Iuran Jaminan/Asuransi Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumba Barat Daya agar menginstruksikan kepada: a. Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala BKAD melakukan sosialisasi terkait pengaturan batasan jumlah Tim Pelaksana Kegiatan yang dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan;	Bupati Sumba Barat Daya menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah memerintahkan Kepala BKAD melakukan sosialisasi terkait pengaturan batasan jumlah Tim Pelaksana Kegiatan yang dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan;	60 Hari	Laporan sosialisasi terkait pengaturan batasan jumlah Tim Pelaksana Kegiatan yang dapat diberikan honorarium.
		b. Kepala SKPD terkait (dhi. Baperida, BKPSDM, Disnakeswan dan Setda) supaya: 1) Memproses kelebihan pembayaran honorarium TPK pada Baperida, Disnakeswan dan Setda total senilai Rp162.169.541,67 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan 2) Memproses kelebihan pembayaran honorarium Panitia pada BKPSDM dan Setda total senilai Rp16.402.500,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;	Bupati Sumba Barat Daya menginstruksikan kepada Kepala SKPD terkait (dhi. Baperida, BKPSDM, Disnakeswan dan Setda) supaya: 1) Memproses kelebihan pembayaran honorarium TPK pada Baperida, Disnakeswan dan Setda total senilai Rp162.169.541,67 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan 2) Memproses kelebihan pembayaran honorarium Panitia pada BKPSDM dan Setda total senilai Rp16.402.500,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;	60 Hari	1. Surat Instruksi Bupati Sumba Barat Daya kepada Kepala Baperida, Kepala BKPSDM, Kepala Disnakeswan dan Sekda untuk memproses kelebihan pembayaran honorarium TPK dan honorarium panitia; dan 2. STS atas kelebihan pembayaran honorarium TPK dan honorarium panitia.

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksa-naan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
		c. Kepala Disdikbud supaya: 1) Memproses kelebihan pembayaran atas honorarium panitia tidak sesuai SBU pada 14 personel senilai Rp22.882.500,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan 2) Memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Jasa Konsultansi senilai Rp15.583.333,34 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;	Bupati Sumba Barat Daya menginstruksikan kepada Kepala Disdikbud supaya: 1) Memproses kelebihan pembayaran atas honorarium panitia tidak sesuai SBU pada 14 personel senilai Rp22.882.500,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan 2) Memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Jasa Konsultansi senilai Rp15.583.333,34 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;	60 Hari	1. Surat Instruksi Bupati Sumba Barat Daya kepada Kepala Disdikbud untuk memproses kelebihan pembayaran atas honorarium panitia tidak sesuai SBU dan kelebihan pembayaran atas jasa konsultansi; dan 2. STS atas kelebihan pembayaran honorarium panitia tidak sesuai SBU dan kelebihan pembayaran jasa konsultansi.
		d. Kepala Dinas PUPR supaya memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Jasa Konsultansi senilai Rp84.115.680,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;	Bupati Sumba Barat Daya menginstruksikan kepada Kepala Dinas PUPR supaya memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Jasa Konsultansi senilai Rp84.115.680,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;	60 Hari	1. Surat Instruksi Bupati Sumba Barat Daya kepada Kepala Dinas PUPR untuk memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Jasa Konsultansi; dan 2. STS atas kelebihan pembayaran Belanja Jasa Konsultansi.
		e. Kepala Dinas Kesehatan supaya:	Bupati Sumba Barat Daya menginstruksikan kepada Kepala Dinas	60 Hari	1. Surat Instruksi Bupati Sumba Barat Daya kepada Kepala Dinas

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksa-naan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
		1) Melakukan Sosialisasi atau bimbingan teknis terkait formulasi perhitungan jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai dengan ketentuan; 2) Melakukan rekonsiliasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menggunakan data kependudukan yang mutakhir sebagai bahan rekonsilisasi peserta iuran PBI JKN dengan BPJS dan selanjutnya mengusulkan pengajuan kompesansi atas peserta yang telah meninggal; dan 3) Memerintahkan 16 Kepala Puskesmas agar memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Jasa Tenaga Kesehatan senilai Rp2.128.909.167,54 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas di FKTP.	Kesehatan supaya: 1) Melakukan Sosialisasi atau bimbingan teknis terkait formulasi perhitungan jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai dengan ketentuan; 2) Melakukan rekonsiliasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menggunakan data kependudukan yang mutakhir sebagai bahan rekonsilisasi peserta iuran PBI JKN dengan BPJS dan selanjutnya mengusulkan pengajuan kompesansi atas peserta yang telah meninggal; dan 3) Memerintahkan 16 Kepala Puskesmas agar memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Jasa Tenaga Kesehatan senilai Rp2.128.909.167,54 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas di FKTP.		Kesehatan untuk: a) Melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis terkait formulasi perhitungan jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai dengan ketentuan; b) Melakukan rekonsiliasi dengan Dinas Kependudukan dan catatan sipil untuk menggunakan data kependudukan yang mutakhir sebagai bahan rekonsilisasi peserta iuran PBI JKN dengan BPJS dan selanjutnya mengusulkan pengajuan kompensasi atas peserta yang telah meninggal; c) Memerintahkan 16 Kepala Puskesmas agar memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Jasa Tenaga Kesehatan; 2. Laporan sosialisasi atau bimtek terkait formulasi perhitungan jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama; 3. Berita acara rekonsiliasi antara Dinas Kesehatan dan Dinas

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksa-naan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
					Dukcapil terkait peserta PBI meninggal dan mutasi; 4. Dokumen pengajuan kompensasi atas peserta PBI yang telah meninggal kepada BPJS Kesehatan; dan 5. STS atas kelebihan pembayaran belanja jasa tenaga kesehatan.
3	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Enam SKPD Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumba Barat Daya agar menginstruksikan: a. Sekretaris Daerah untuk membuat surat edaran kepada seluruh SKPD tentang penyampaian bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas sesuai dengan biaya riil, melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban, dan melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan termasuk pengaturan sanksi sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku apabila pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan; dan	Bupati Sumba Barat Daya menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk membuat surat edaran kepada seluruh SKPD tentang penyampaian bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas sesuai dengan biaya riil, melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban, dan melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan termasuk pengaturan sanksi sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku apabila pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan; dan	60 Hari	1. Surat Instruksi Bupati Sumba Barat Daya kepada Sekretaris Daerah untuk membuat surat edaran kepada seluruh SKPD tentang penyampaian bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas sesuai dengan biaya riil, melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban, dan melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan termasuk pengaturan sanksi sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku apabila pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan; 2. Surat edaran dari Sekda kepada seluruh SKPD tentang penyampaian bukti pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas sesuai dengan biaya riil, melakukan verifikasi

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksa-naan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
					bukti pertanggungjawaban, dan melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan termasuk pengaturan sanksi sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku apabila pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan
		b. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp261.769.301,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.	Bupati Sumba Barat Daya menginstruksikan Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas senilai Rp261.769.301,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.	60 Hari	1. Surat Instruksi Bupati Sumba Barat Daya kepada Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DP3AP2KB, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Sekwan) untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas; 2. STS atas kelebihan pembayaran Belanja Perjalanan Dinas
4	Pengelolaan Belanja Hibah Pada Lima SKPD belum Memadai	BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumba Barat Daya agar menginstruksikan: a. Sekretaris Daerah untuk melakukan sosialisasi atas Perbup Sumba Barat Daya Nomor 17 Tahun 2024 tentang pedoman pemberian dan pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial kepada seluruh SKPD;	Bupati Sumba Barat Daya menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk melakukan sosialisasi atas Perbup Sumba Barat Daya Nomor 17 Tahun 2024 tentang pedoman pemberian dan pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial kepada seluruh SKPD;	60 Hari	1. Surat Instruksi Bupati Sumba Barat Daya kepada Sekda untuk untuk melakukan sosialisasi; dan 2. Laporan pelaksanaan sosialisasi.

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksa-naan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
		b. Kepala Badan Kesbangpol untuk mengusulkan anggaran atas kekurangan pembayaran dana bantuan Partai Politik TA 2024 kepada sepuluh partai politik periode 2024 s.d. 2029 total senilai Rp5.415.807,67 sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;	Bupati Sumba Barat Daya menginstruksikan Kepala Badan Kesbangpol untuk mengusulkan anggaran atas kekurangan pembayaran dana bantuan Partai Politik TA 2024 kepada sepuluh partai politik periode 2024 s.d. 2029 total senilai Rp5.415.807,67 sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;	60 Hari	1. Surat Instruksi Bupati Sumba Barat Daya kepada Kaban Kesbangpol untuk mengusulkan anggaran atas kekurangan pembayaran dana bantuan Partai Politik TA 2024 kepada sepuluh partai politik periode 2024 s.d. 2029 total senilai Rp Rp5.415.807,67; dan 2. RKA Badan Kesbangpol terkait pembayaran dana bantuan Partai Politik TA 2024 senilai Rp5.415.807,67.
		c. Kepala Dispora membuat NPHD TA 2025 untuk KONI supaya memperhitungkan sisa dana senilai Rp121.464.272,73 sebagai kompensasi hibah yang diterima di tahun 2025 dan mencairkannya setelah LPJ dana hibah TA 2024 telah dilaporkan;	Bupati Sumba Barat Daya menginstruksikan Kepala Dispora membuat NPHD TA 2025 untuk KONI supaya memperhitungkan sisa dana senilai Rp121.464.272,73 sebagai kompensasi hibah yang diterima di tahun 2025 dan mencairkannya setelah LPJ dana hibah TA 2024 telah dilaporkan;	60 Hari	1. Surat Instruksi Bupati Sumba Barat Daya kepada Kepala Dispora agar membuat NPHD TA 2025 atas sisa dana TA 2024 yang akan dijadikan kompensasi setelah LPJ dana hibah TA 2024 dilaporkan; 2. NPHD KONI TA 2025 memperhitungkan sisa dana senilai Rp121.464.272,73 sebagai kompensasi hibah; dan 3. LPJ dana hibah KONI TA 2024.
		d. Kepala Dinas PUPR untuk segera membuat Berita Acara Hibah Pekerjaan Gedung Kejaksaan Negeri Waikabubak setelah	Bupati Sumba Barat Daya menginstruksikan Kepala Dinas PUPR untuk segera membuat Berita Acara Hibah Pekerjaan Gedung Kejaksaan Negeri	60 Hari	1. Surat Instruksi Bupati Sumba Barat Daya kepada Kepala Dinas PUPR untuk membuat Berita Acara Hibah Pekerjaan Gedung Kejaksaan

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksa-naan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
		masa pemeliharaan selesai; dan	Waikabubak setelah masa pemeliharaan selesai; dan		Negeri Waikabubak setelah masa pemeliharaan selesai; dan 2. BA Hibah Pekerjaan Gedung Kejaksaan Negeri Waikabubak.
		e. Inspektur melakukan pemeriksaan atas pemberian dana BOS pada sekolah yang bermasalah, merujuk pada ketentuan yang berlaku dan melaporkan ke Bupati, kemudian apabila terbukti bermasalah, memproses pengembalian dana BOS yang tersedia pada rekening sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.	Bupati Sumba Barat Daya menginstruksikan Inspektur melakukan pemeriksaan atas pemberian dana BOS pada sekolah yang bermasalah, merujuk pada ketentuan yang berlaku dan melaporkan ke Bupati, kemudian apabila terbukti bermasalah, memproses pengembalian dana BOS yang tersedia pada rekening sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara	60 Hari	1. Surat Instruksi Bupati Sumba Barat Daya kepada Inspektur melakukan pemeriksaan atas pemberian dana BOS pada sekolah yang bermasalah, merujuk pada ketentuan yang berlaku dan melaporkan ke Bupati, kemudian apabila terbukti bermasalah, memproses pengembalian dana BOS yang tersedia pada rekening sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara; 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat; dan 3. STS pengembalian dana BOS untuk sekolah yang terbukti bermasalah.
5	Pelaksanaan Belanja	BPK merekomendasikan Bupati Sumba Barat	Bupati Sumba Barat Daya menginstruksikan Kepala Disdikbud, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR selalu	60 Hari	1. Instruksi Bupati Sumba Barat Daya

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksa-naan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
	Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tiga SKPD Tidak Sesuai Ketentuan	Daya agar menginstruksikan Kepala Disdikbud, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR selalu Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran kekurangan volume masing-masing senilai Rp71.499.816,57, Rp28.049.356,44 dan Rp422.492.917,39 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.	Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran kekurangan volume masing-masing senilai Rp71.499.816,57, Rp28.049.356,44 dan Rp422.492.917,39 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.		kepada Kepala Disdikbud, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR selalu Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran kekurangan volume; dan 2. STS atas kelebihan pembayaran kekurangan volume
D	**Aset**				
1	Pengelolaan Kas pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya belum Tertib	BPK merekomendasikan Bupati Sumba Barat Daya agar menginstruksikan kepada: a. Kepala BKAD untuk menyelenggarakan sosialisasi bagi para bendahara SKPD terkait pengelolaan keuangan daerah, antara lain mengenai penerapan *non cash transaction*, ketepatan waktu penyetoran sisa kas dan pertanggungjawaban belanja, ketepatan waktu penyetoran pendapatan daerah, serta larangan penggunaan kas yang dikelola untuk kepentingan pribadi; b. Kepala Disdikbud selaku pengguna anggaran supaya: 1) Menyelenggarakan sosialisasi bagi para bendahara BOS terkait pengelolaan dana BOS, antara lain mengenai ketepatan waktu penyetoran pajak, kelengkapan bukti	Bupati Sumba Barat Daya menginstruksikan kepada: a. Kepala BKAD untuk menyelenggarakan sosialisasi bagi para bendahara SKPD terkait pengelolaan keuangan daerah, antara lain mengenai penerapan *non cash transaction*, ketepatan waktu penyetoran sisa kas dan pertanggungjawaban belanja, ketepatan waktu penyetoran pendapatan daerah, serta larangan penggunaan kas yang dikelola untuk kepentingan pribadi; b. Kepala Disdikbud selaku pengguna anggaran supaya: 1) Menyelenggarakan sosialisasi bagi para bendahara BOS terkait pengelolaan dana BOS, antara lain	60 Hari	1. Surat Instruksi Bupati Sumba Barat Daya kepada Kepala BKAD untuk menyelenggarakan sosialisasi bagi para bendahara SKPD terkait pengelolaan keuangan daerah; 2. Laporan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah; 3. Surat Instruksi Bupati Sumba Barat Daya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk: a) Menyelenggarakan sosialisasi bagi bendahara BOS terkait pengelolaan dana BOS; dan b) Memerintahkan para Kepala Satuan Pendidikan pada 15 SD dan delapan SMP untuk memproses kelebihan

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksa-naan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
		pertanggungjawaban belanja, serta penggunaan dana BOS sesuai juknis; dan 2) Memerintahkan kepada Para Kepala satuan pendidikan pada 15 SD dan delapan SMP untuk memproses kelebihan pembayaran honor guru/tenaga kependidikan berstatus ASN yang bersumber dari dana BOSP senilai Rp51.991.050,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.	mengenai ketepatan waktu penyetoran pajak, kelengkapan bukti pertanggungjawaban belanja, serta penggunaan dana BOS sesuai juknis; dan *2)* Memerintahkan kepada Para Kepala satuan pendidikan pada 15 SD dan delapan SMP untuk memproses kelebihan pembayaran honor guru/tenaga kependidikan berstatus ASN yang bersumber dari dana BOSP senilai Rp51.991.050,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.		pembayaran honor guru/ tenaga kependidikan yang berstatus ASN. 4. Laporan sosialisasi pengelolaan dana BOS; dan 5. STS kelebihan pembayaran honor guru/ tenaga kependidikan yang berstatus ASN.
2	Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Belum Tertib	BPK merekomendasikan Bupati Sumba Barat Daya agar menginstruksikan: a. Sekretaris Daerah untuk menginventarisasi keberadaan aset tetap pada sembilan SKPD yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak dan memerintahkan kepala bagian umum untuk membuat kode barang sebagai pengamanan fisik atas aset tetap tersebut; b. Kepala BKAD memerintahkan kepala bidang aset bersama Camat Wewewa Barat untuk melaksanakan inventarisasi aset tetap sembilan unit kendaraan bermotor	Bupati Sumba Barat Daya menginstruksikan: a. Sekretaris Daerah untuk menginventarisasi keberadaan aset tetap pada sembilan SKPD yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak dan memerintahkan kepala bagian umum untuk membuat kode barang sebagai pengamanan fisik atas aset tetap tersebut; b. Kepala BKAD memerintahkan kepala bidang aset bersama Camat Wewewa	60 Hari	1. Surat Instruksi Bupati Sumba Barat Daya kepada Sekda untuk melakukan inventarisasi keberadaan aset tetap pada sembilan SKPD yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak dan memerintahkan Kepala Bagian Umum untuk membuat kode barang sebagai pengamanan fisik atas aset tetap tersebut ; 2. Laporan inventarisasi keberadaan aset tetap pada sebelas SKPD; 3. Bukti dokumentasi pelabelan atas

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksa-naan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
		dan penelusuran atas aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya dan menyampaikan Laporan Hasil Inventarisasi kepada Bupati; c. Inspektur selaku Ketua Tim Penyelesaian Ganti Rugi Negara/Daerah untuk memproses penyelesaian ganti kerugian daerah atas hilangnya lima sepeda motor di Dinas Kesehatan pada Puskesmas Watukawulla, DPMD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Kecamatan Wewewa Timur melalui verifikasi kerugian negara/daerah dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara/Daerah kepada Bupati	Barat untuk melaksanakan inventarisasi aset tetap sembilan unit kendaraan bermotor dan penelusuran atas aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya dan menyampaikan Laporan Hasil Inventarisasi kepada Bupati; c. Inspektur selaku Ketua Tim Penyelesaian Ganti Rugi Negara/Daerah untuk memproses penyelesaian ganti kerugian daerah atas hilangnya lima sepeda motor di Dinas Kesehatan pada Puskesmas Watukawulla, DPMD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Kecamatan Wewewa Timur melalui verifikasi kerugian negara/daerah dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara/Daerah kepad		aset tetap; 4. Surat Instruksi Bupati Sumba Barat Daya kepada Kepala BKAD untuk memerintahkan Kepala Bidang Aset bersama Camat Wewewa Barat untuk melaksanakan inventarisasi aset tetap sembilan unit kendaraan bermotor dan penelusuran atas aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya; 5. Surat perintah Kepala BKAD kepada Bidang Aset dan Camat Wewewa Barat untuk melaksanakan inventarisasi aset tetap sembilan unit kendaraan bermotor dan penelusuran atas aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya; 6. Laporan hasil inventarisasi aset tetap sembilan unit kendaraan bermotor dan penelusuran atas aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya; 7. Surat Instruksi Bupati Sumba Barat Daya kepada Inspektur untuk memproses penyelesaian ganti kerugian daerah atas hilangnya lima sepeda motor di Dinas Kesehatan pada Puskesmas Watukawulla, DPMD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Kecamatan

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksa-naan	Keterangan Dokumen Tindak Lanjut
					Wewewa Timur melalui verifikasi kerugian negara/daerah dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara/Daerah kepada Bupati; dan 8. Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara/Daerah.

Tambolaka, 23 Mei 2025
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya
Bupati,

(Ratu Ngadu Bonnu Wulla, ST)

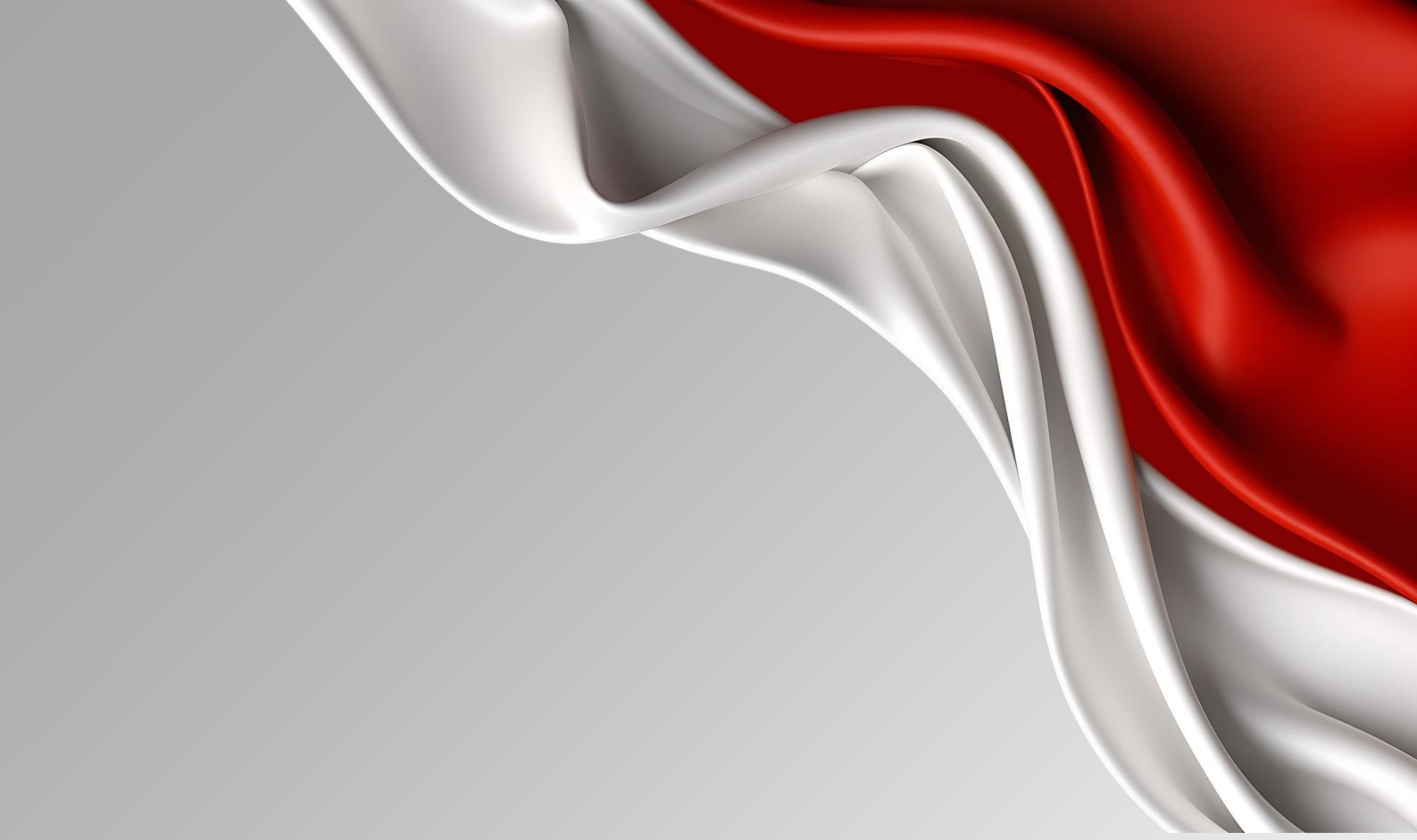

BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jalan . W.J. Lalamentik No. 91, Kupang-NTT, 85111,
Telp (0380) 840605, Fax (0380) 840601
ntt.bpk.go.id